SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada rencana panjang jangka panjang daerah serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah daerah teknokratik dan mengacu pada rencana kerja Pemerintah

BAB II
VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyusunan:
    a. rencana strategis perangkat daerah;
    b. RKPD; dan
    c. dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
(3) Dalam penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan daerah dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi:
a. pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan;

b. gambaran umum kondisi Daerah, berisi uraian gambaran umum kondisi Daerah Provinsi beberapa tahun terakhir disertai gambaran keuangan daerah, serta uraian permasalahan dan isu strategis Daerah yang mendasari perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi tahun 2025-2029;
c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah, berisi visi misi pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 beserta arahan kebijakan dan strateginya yang dikembangkan ke dalam program prioritas Daerah Provinsi;
d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berisi program, indikator program, pagu indikatif program, serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja Daerah Provinsi; dan
e. penutup, berisi kesimpulan penting substansial.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Gubernur sebagai penanggung jawab dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, melakukan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 September 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (5-119/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

YOGI GAUTAMA JAELANI, SH., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730624 199803 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Gubernur Jawa Barat terpilih fokus pada muatan substansi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang telah diselaraskan dengan berbagai kebijakan yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, antara lain meliputi Asta Cita, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat.

Provinsi Jawa Barat dengan motto *Gemah, Ripah, Repeh, Rapih* merupakan frasa yang berasal dari Bahasa Sunda yang berarti sebuah kondisi daerah yang subur, makmur, sejahtera, cukup sandang dan pangan (*Gemah, Ripah*), damai, rukun, tenteram dan tertata (*Repeh, Rapih*). Sebuah cita-cita luhur dari daerah yang subur, makmur dengan masyarakatnya yang sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, perlu strategi dan tahapan pencapaian yang dilaksanakan melalui *Gerbang Pancaniti* (Lima *Titian*), yaitu *Niti Harti* (proses mendengar, melihat, dan mengamati), *Niti Surti* (proses merasakan dan memahami), *Niti Bukti* (mengumpulkan data, dan fakta), *Niti Bakti* (proses pemecahan masalah dan perbaikan), *Niti Sajati* (tahap inovasi yang mampu menghasilkan kebaruan). Lima tahapan ini yang akan menjadi cara merencanakan pembangunan di Jawa Barat berdasarkan filosofi Sunda.

Gerbang Pancaniti ini dilaksanakan dengan memegang teguh Filosofi *Tritangtu* (tiga ketentuan) yang diinternalisasi baik dalam diri, sosial, maupun alam. *Tritangtu* dalam diri berupa kesamaan antara Tekad, Ucap, Lampah (kehendak, pikiran, dan perbuatan); *Tritangtu Silih Asah, Silih Asih*, dan *Silih Asuh* (saling mencerdaskan, mengasihi, dan membimbing) yang melandasi hubungan sosial; serta *Tritangtu leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung garapan* (hutan yang harus dijaga keseimbangannya, hutan lindung, dan hutan yang boleh dikelola) yang melandasi pengelolaan alam dan lingkungan.

Hingga setelah nilai-nilai tersebut telah diinternalisasi maka akan sampai pada *Gerbang Pancawaluya* (gerbang lima kesempurnaan). Sebuah kondisi manusia Jawa Barat yang *Cageur* (sehat jasmani dan rohani), *Bageur* (religius, beretika, berbudaya), *Bener* (memegang teguh aturan dan hukum), *Pinter* (menguasai ilmu pengetahuan), dan *Singer* (kreatif dan cekatan).

Dalam mewujudkan cita-cita luhur Jawa Barat tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 memiliki visi **Jabar Istimewa, *Lembur Diurus, Kota Ditata*** yang diterjemahkan melalui

4 (empat) misi yaitu, (1) mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul; (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif; (3) mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan, serta miskin dan kaya; dan (4) mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan sesuai dengan prinsip *good and clean governance*.

Visi dan misi Gubernur sebagaimana tersebut, akan dicapai melalui berbagi program prioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahap pertama, serta RPJMN. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 membutuhkan peran serta dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Barat serta berbagai alternatif berbagai sumber pendanaan untuk mendukung dan mempercepat proses pembangunan.

Dengan disusun dan ditetapkannya RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan strategis di lingkup nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota serta pada lingkup operasional di setiap perangkat daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah dari Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 5 (lima) tahun kedepan, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 282

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Jabar Istimewa

Lembur Diurus, Kota Ditata

RPJMD
JAWA BARAT
2025 - 2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR ISTILAH xvi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-10
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-11
1.3.1 Hubungan RPJMD Provinsi dengan RPJMN I-12
1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD I-12
1.3.3 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Provinsi Jawa Barat I-13
1.3.4 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Barat I-13
1.4 Maksud Dan Tujuan I-15
1.5 Sistematika Penulisan I-16
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-76
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-153
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-192
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal II-201
2.1.6 Kerjasama Daerah II-211
2.1.7 Pengelolaan Barang Milik Daerah II-215
2.1.8 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota II-217
2.1.9 Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Perekonomian dan Fiskal Daerah II-226

2.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik II-231
2.2.1 Kebutuhan Hunian II-231
2.2.2 Kebutuhan Air Bersih II-235
2.2.3 Kebutuhan Ketenagalistrikan II-242
2.2.4 Kebutuhan Pengelolaan Persampahan II-245
2.2.5 Kebutuhan Infrastruktur Transportasi II-253
2.2.6 Kebutuhan Pengelolaan Limbah II-268
2.2.7 Kebutuhan Internet II-269
2.2.8 Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan II-270
2.2.9 Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan II-276
2.3 Kondisi Keuangan Daerah II-284
2.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD II-284
2.3.2 Neraca Daerah II-300
2.3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-306
2.3.4 Proporsi Pembiayaan Daerah II-313
2.3.5 Proyeksi Keuangan Daerah II-318
2.3.6 Kebutuhan Perencanaan Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan Daerah II-333
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah .. II-343
2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-343
2.4.2 Identifikasi Isu Strategis Daerah II-366
2.4.3 Rumusan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat II-384

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2025-2029 ..... III-1
3.1.1 Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-1
3.1.2 Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029 .. III-4
3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ..... III-11
3.2.1 Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran III-11
3.2.2 Uraian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah III-13
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan III-32
3.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025-2029 ..... III-32
3.3.2 Strategi Pencapaian Target Indikator Makro Jawa Barat III-51
3.3.3 Penahapan Pembangunan III-66
3.4 Lokus Pembangunan III-73

3.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-95
3.5.1 Program Prioritas sesuai Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029..... III-95
3.5.2 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional III-155
3.5.3 Rencana Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2025-2030..... III-175

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1

4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.1.1 Dasar Perumusan Program Perangkat Daerah IV-1
4.1.2 Pertimbangan Kerangka Pendanaan dalam Program Perangkat Daerah..... IV-2
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-135
4.2.1 Indikator Kinerja Utama IV-135
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-139

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Administratif Provinsi Jawa Barat II-2
Tabel 2.2 Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2020-2024 (Ton) II-8
Tabel 2.3 Produksi Komoditas Unggulan Tahun 2020 – 2024 (Ton) II-9
Tabel 2.4 Capaian Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2020-2024 (Ton) II-12
Tabel 2.5 Produksi dan Nilai Produksi 5 Jenis Produk Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-12
Tabel 2.6 Sandingan Tutupan Lahan dan Rencana Pola Ruang . II-25
Tabel 2.7 Neraca Pangan Jawa Barat Tahun 2024 (Ton) II-34
Tabel 2.8 Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 ..... II-37
Tabel 2.9 Sebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Jawa Barat II-44
Tabel 2.10 Capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Poin) II-44
Tabel 2.11 Data Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Poin) II-45
Tabel 2.12 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-62
Tabel 2.13 Proyeksi Struktur Penduduk Berdasarkan Usia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-65
Tabel 2.14 Rencana Kampung Budaya yang Akan Dikaji Menjadi Kampung Adat II-71
Tabel 2.15 Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 . II-84
Tabel 2.16 Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.17 Capaian IPM Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... II-90
Tabel 2.19 Pengeluaran per Kapita Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun) II-92
Tabel 2.20 Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun) II-93
Tabel 2.21 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2023 ..... II-104
Tabel 2.24 Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (persen) II-106
Tabel 2.25 Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024 ... II-107

Tabel 2.26 Karakteristik Pengangguran di Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Umur ... II-110
Tabel 2.28 Tingkat Penganguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (persen) II-111
Tabel 2.30 Serapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat II-113
Tabel 2.31 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025-2030 ..... II-116
Tabel 2.32 Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun) II-117
Tabel 2.33 Capaian Penyakit Menular dan Tidak Menular Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-123
Tabel 2.34 Rasio Layanan Tenaga Medis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-124
Tabel 2.35 Capaian UHC kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-126
Tabel 2.36 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Tahun) II-129
Tabel 2.37 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun) .. II-129
Tabel 2.38 Harapan Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Tahun) II-131
Tabel 2.39 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun) II-132
Tabel 2.40 Rasio Minimal Jumlah Siswa Per Guru II-134
Tabel 2.41 Rekapitulasi Data Lembaga Pesantren di Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-136
Tabel 2.42 Cakupan Kepesertaan Jamsostek di Provinsi Jawa Barat II-141
Tabel 2.43 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-144
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2024 ..... II-165
Tabel 2.45 Capaian Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-166
Tabel 2.46 Data Sebaran Industri Besar dan IKM di Provinsi Jawa Barat II-168
Tabel 2.47 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat Tahun 2021-2024 (Unit) II-169
Tabel 2.48 Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) Tahun 2024 ..... II-175
Tabel 2.49 Panjang Ruas Jalan berdasarkan Kewenangan Pengelolaan II-176
Tabel 2.50 Kondisi Jalan Nasional II-177

Tabel 2.51 Kondisi Jalan Tol yang Beroperasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-177
Tabel 2.52 Kondisi Jalan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota II-179
Tabel 2.53 Kondisi Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota II-180
Tabel 2.54 Kondisi Jalan Desa berdasarkan Kabupaten/Kota II-181
Tabel 2.55 Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-186
Tabel 2.56 Laporan Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Jawa Barat Tahun 2020-2024 II-193
Tabel 2.57 Capaian SPM Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-202
Tabel 2.58 Target SPM Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-202
Tabel 2.59 Capaian SPM Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-203
Tabel 2.60 Target SPM Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-203
Tabel 2.61 Capaian SPM Sektor Pekerjaan Umum II-204
Tabel 2.62 Target SPM Sektor Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-204
Tabel 2.63 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi II-205
Tabel 2.64 Capaian SPM Sektor Perumahan Rakyat II-206
Tabel 2.65 Target SPM Sektor Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-207
Tabel 2.66 Capaian SPM Sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-208
Tabel 2.67 Target SPM Sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-208
Tabel 2.68 Capaian SPM Sektor Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024 ..... II-209
Tabel 2.69 Capaian SPM Sektor Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-210
Tabel 2.70 Proporsi Legalitas Tanah Milik Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-216
Tabel 2.71 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Aset Tahun 2021-2024 ..... II-217
Tabel 2.72 Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... II-219
Tabel 2.73 Kebutuhan Pemenuhan Modal Dasar BUMD Tahun 2024 ..... II-230
Tabel 2.74 Proyeksi Jumlah Rumah Tapak dan Hunian Vertikal Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-233
Tabel 2.75 Kebutuhan Air Baku Provinsi Jawa Barat II-238
Tabel 2.76 Proyeksi Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) II-239

Tabel 2.77 Proyeksi Persentase Penurunan Titik Banjir pada 2 WS Kewenangan Provinsi II-240
Tabel 2.78 Proyeksi Persentase Penurunan Titik Abrasi Pantai pada 2 WS Kewenangan Provinsi II-241
Tabel 2.79 Kebutuhan Tenaga Listrik Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-242
Tabel 2.80 Estimasi Anggaran Penyelesaian Desa Belum Terverifikasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2030 ..... II-244
Tabel 2.81 Proyeksi Timbunan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2030 ..... II-246
Tabel 2.82 Proyeksi Kebutuhan Penambahan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2030 ..... II-247
Tabel 2.83 Proyeksi Kebutuhan Penambahan Panjang Jalan Tahun 2030 ..... II-254
Tabel 2.84 Ruas Rencana Jalan Tol di Lingkup Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... II-255
Tabel 2.85 Tingkat Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-257
Tabel 2.86 Kondisi dan Rencana Infrastruktur Perhubungan (Simpul) Transportasi di Jawa Barat II-259
Tabel 2.87 Prioritas Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat II-264
Tabel 2.88 Pentahapan Program Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2025-2030 ..... II-267
Tabel 2.89 Desa Blank Spot Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-269
Tabel 2.90 Kecukupan Tempat Tidur Rumah Sakit Berdasarkan Regional Provinsi Jawa Barat II-271
Tabel 2.91 Proyeksi Kebutuhan Penambahan Tempat Tidur dan Rumah Sakit pada 13 Kabupaten/Kota di Jawa Barat II-273
Tabel 2.92 Proyeksi Kebutuhan Penambahan Puskesmas di II-275
Tabel 2.93 Jumlah Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMK Sederajat II-277
Tabel 2.94 Daftar Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMA Negeri dan Swasta II-278
Tabel 2.95 Rincial Kebutuhan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru II-280
Tabel 2.96 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-287
Tabel 2.97 Rentang dan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah II-290
Tabel 2.98 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-291
Tabel 2.99 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-293
Tabel 2.100 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-295
Tabel 2.101 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah II-296

Tabel 2.102 Pendapatan Asli Daerah (PAD) disandingkan dengan Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ..... II-296
Tabel 2.103 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 ..... II-298
Tabel 2.104 Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-302
Tabel 2.105 Analisis Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-305
Tabel 2.106 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-308
Tabel 2.107 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-310
Tabel 2.108 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-311
Tabel 2.109 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Barat 2020-2024 ..... II-312
Tabel 2.110 Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-314
Tabel 2.111 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-316
Tabel 2.112 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-317
Tabel 2.113 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2030 ..... II-323
Tabel 2.114 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-330
Tabel 2.115 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-332
Tabel 2.116 Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (dalam Ribuan Rupiah) II-335
Tabel 2.117 Realisasi Kegiatan PKBL dan TJSL Tahun 2024 ..... II-338
Tabel 2.118 Status Proyek KPBU di Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-339
Tabel 2.119 Potensi Pendapatan Daerah yang Didapatkan dari Pajak Karbon II-342
Tabel 2.120 Kesimpulan Isu Strategis Daerah II-385
Tabel 3.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... III-16
Tabel 3.2 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN III-23
Tabel 3.3 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... III-35
Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... III-44
Tabel 3.5 Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 III-68

Tabel 3.6 Arah Kebijakan dan *Highlight* Intervensi Pembangunan Kewilayahan III-81
Tabel 3.7 Program Prioritas Daerah dan 9 Langkah Membangun Jawa Barat III-108
Tabel 3.8 Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029..... III-111
Tabel 3.9 Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN III-156
Tabel 3.10 Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ... III-169
Tabel 3.11 Rencana Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2025-2030 ..... III-176
Tabel 4.1 Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 2025-2030..... IV-5
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... IV-136
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... IV-140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep RPJMD Berbasis Nilai dan Filosofi Sunda I-4
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... I-7
Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... I-9
Gambar 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan I-12
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat II-3
Gambar 2.2 Perkembangan Produksi Padi dan 5 Provinsi dengan Produksi Padi Terbesar (Ton) II-7
Gambar 2.3 Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 (ha) II-7
Gambar 2.4 Produksi Jagung dan Kedelai Tahun 2020-2024 (Ton) II-8
Gambar 2.5 Perkembangan Produksi Teh dan 5 Provinsi dengan Produksi Teh Terbesar Tahun 2024 (Ribu Ton) II-10
Gambar 2.6 Produksi Komoditas Peternakan Unggulan II-14
Gambar 2.7 Populasi Komoditas Peternakan Unggulan II-14
Gambar 2.8 Populasi Domba di Pulau Jawa Tahun 2024 (Ekor).. II-15
Gambar 2.9 Peta Luas Kawasan Hutan Jawa Barat II-16
Gambar 2.10 Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Jumlah Destinasi Wisata Buatan II-18
Gambar 2.11 Jumlah dan Status Desa Wisata II-18
Gambar 2.12 Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2021-2024 ..... II-19
Gambar 2.13 Sebaran dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... II-20
Gambar 2.14 Jumlah Wisatawan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Juta Orang) II-21
Gambar 2.15 Status DDLH Penyedia Air Provinsi Jawa Barat II-22
Gambar 2.16 Status DDLH Penyedia Pangan Provinsi Jawa Barat II-23
Gambar 2.17 Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... II-24
Gambar 2.18 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 ..... II-24
Gambar 2.19 Perbandingan Jumlah Luas Lahan Pertanian dan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-26
Gambar 2.20 Konsumsi Listrik Perkapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (kWh/kapita) II-27
Gambar 2.21 Capaian Realisasi EBT Jawa Barat Tahun 2021-2023 ..... II-28
Gambar 2.22 Peta Kekritisan Daerah Aliran Sungai Jawa Barat.... II-30
Gambar 2.23 IPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-30
Gambar 2.24 Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2024. II-31
Gambar 2.25 IKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Poin) II-32

Gambar 2.26 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 (Poin)..... II-32
Gambar 2.27 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan..... II-33
Gambar 2.28 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Poin) II-35
Gambar 2.29 Capaian Akses Penanganan Sampah di Perkotaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024..... II-37
Gambar 2.30 Capaian Akses Sanitasi Layak Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024..... II-39
Gambar 2.31 Peta Bahaya Letusan Gunung Api..... II-41
Gambar 2.32 Peta Bahaya Tsunami..... II-42
Gambar 2.33 Peta Bahaya Tanah Longsor..... II-42
Gambar 2.34 Peta Bahaya Gempa Bumi II-43
Gambar 2.35 Peta Bahaya Banjir..... II-43
Gambar 2.36 Capaian Tingkat Penurunan Emisi GRK Tahun 2020-2024 (Ton CO_2eq)..... II-47
Gambar 2.37 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 II-49
Gambar 2.38 Kepadatan & Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024..... II-50
Gambar 2.39 Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun II-52
Gambar 2.40 Jumlah Penduduk Anak Kurang dari Usia 16 Tahun II-52
Gambar 2.41 Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun II-53
Gambar 2.42 Jumlah Penduduk Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas II-53
Gambar 2.43 Jumlah Penduduk Perempuan Usia 19 Tahun ke Atas..... II-54
Gambar 2.44 Tren Capaian IPBK Provinsi Jawa Barat dan IPBK Nasional Tahun 2020-2024 (Poin)..... II-55
Gambar 2.45 Tren Perkembangan Penduduk Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 (Jiwa) II-59
Gambar 2.46 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024..... II-60
Gambar 2.47 Tingkat Kelahiran di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-61
Gambar 2.48 Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2030..... II-62
Gambar 2.49 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2030 ..... II-67
Gambar 2.50 Piramida Struktur Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2030..... II-68
Gambar 2.51 Kampung Budaya Di Provinsi Jawa Barat..... II-70
Gambar 2.52 Kampung Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Di Jawa Barat II-71
Gambar 2.53 Grafik Nilai Indeks Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ..... II-72
Gambar 2.54 Perubahan *Share* Sektor Lapangan Usaha Utama Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-73
Gambar 2.55 Perubahan *Share* Sektor Jasa..... II-74

Gambar 2.56 Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Utama Jawa Barat II-75
Gambar 2.57 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia 2020-2024 serta Perbandingan Antar Provinsi di Pulau Jawa 2024 (%) II-77
Gambar 2.58 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-78
Gambar 2.59 PDRB Per Kapita Jawa Barat 2020-2024 dan Perbandingan Antar Provinsi di Pulau Jawa 2024 (ribu rupiah) II-79
Gambar 2.60 Perkembangan Inflasi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (y-to-y) persen II-80
Gambar 2.61 Perbandingan Inflasi Jawa Barat Tahun 2023-2024 (m-to-m) (persen) II-80
Gambar 2.62 Realisasi Gini Ratio di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-82
Gambar 2.63 Perkembangan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020-2024..... II-83
Gambar 2.64 Peta Capaian Gini Ratio Tahun 2024 ..... II-86
Gambar 2.65 Sandingan Gini Rasio dan Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2024..... II-87
Gambar 2.66 Perbandingan IPM Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-88
Gambar 2.67 Perbandingan IPM di Pulau Jawa Tahun 2024 (dalam poin) II-88
Gambar 2.68 Pola Spasial Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024..... II-89
Gambar 2.69 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024..... II-90
Gambar 2.70 Capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Tahun 2020-2024 (Rp.000)..... II-92
Gambar 2.71 Pola Spasial Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Rp.000/kapita/tahun)..... II-94
Gambar 2.72 Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat..... II-95
Gambar 2.73 Persentase Penduduk Miskin 2020-2024 dan Perbandingan Antar Provinsi di Pulau Jawa 2024 (persen) II-96
Gambar 2.74 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024..... II-97
Gambar 2.75 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024..... II-97
Gambar 2.76 Sandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024..... II-98
Gambar 2.77 Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024 ... II-99
Gambar 2.78 Pola Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Maret 2024 ..... II-101

Gambar 2.79 Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024.... II-102
Gambar 2.80 Pola Spasial Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota Maret 2024 ..... II-103
Gambar 2.81 Tingkat Pengangguran Terbuka 2020-2024 dan Perbandingan Antar Provinsi di Pulau Jawa 2024 (persen) II-105
Gambar 2.82 Sandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024..... II-114
Gambar 2.83 Sandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2024..... II-115
Gambar 2.84 Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 (Tahun) II-117
Gambar 2.85 Pola Spasial Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Tahun)..... II-119
Gambar 2.86 Capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024..... II-120
Gambar 2.87 Capaian Prevalensi *Stunting* Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024..... II-121
Gambar 2.88 Capaian Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-122
Gambar 2.89 Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-124
Gambar 2.90 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun) II-128
Gambar 2.91 Pola Spasial Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Tahun) II-130
Gambar 2.92 Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun) II-131
Gambar 2.93 Pola Spasial Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Tahun) II-133
Gambar 2.94 Rasio Pelayanan Guru terhadap Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan per Kabupaten/Kota Tahun 2024..... II-135
Gambar 2.95 Capaian IPLM Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024..... II-138
Gambar 2.96 Capaian Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-139
Gambar 2.97 Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024..... II-139
Gambar 2.98 Jumlah Pekerja Disabiltas di Jawa Barat Tahun 2019-2024..... II-143
Gambar 2.99 Perkembangan Indeks Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-144
Gambar 2.100 Capaian IPKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024..... II-146
Gambar 2.101 Capaian IKG Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 II-147
Gambar 2.102 Capaian IPG Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 II-147
Gambar 2.103 Capaian IPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 II-148
Gambar 2.104 Capaian IPP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 II-150

Gambar 2.105 Perbandingan Nilai Domain IPP Jawa Barat dan Nasional II-150
Gambar 2.106 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Barat Tahun 2021-2024 ..... II-152
Gambar 2.107 Kelompok Usia Penduduk Tahun 2020-2030 ..... II-154
Gambar 2.108 Proyeksi Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2030 ... II-155
Gambar 2.109 Perbandingan Rasio Ketergantungan di Provinsi Jawa Barat dan Pulau Jawa Tahun 2024 ..... II-156
Gambar 2.110 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024..... II-157
Gambar 2.111 TPAK Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2024 ... II-158
Gambar 2.112 Perbandingan TPAK Jawa Barat dengan Provinsi Lain..... II-158
Gambar 2.113 Capaian Indeks Ekonomi Hijau Jawa Barat Tahun 2015-2023..... II-159
Gambar 2.114 Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia Tahun 2023..... II-160
Gambar 2.115 Analisis Kuadran IBEI Tahun 2023..... II-161
Gambar 2.116 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 II-162
Gambar 2.117 Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... II-162
Gambar 2.118 Proyeksi Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Ekonomi Tahun 2025-2030 (Persen)..... II-166
Gambar 2.119 Peta Sebaran Kawasan Industri di Provinsi Jawa Barat..... II-168
Gambar 2.120 Kinerja PMTB dan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Barat Tahun 2020-2024..... II-171
Gambar 2.121 Kinerja PMTB dan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Barat Tahun 2020-2024..... II-172
Gambar 2.122 Sebaran Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) di Tingkat Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Barat Tahun 2024..... II-173
Gambar 2.123 Proyeksi Kinerja PMTB, Realisasi Investasi (PMA dan PMDN), dan Serapan Tenaga Kerja Jawa Barat Tahun 2025-2029..... II-174
Gambar 2.124 Capaian Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) Tahun 2021-2024 ..... II-175
Gambar 2.125 Peta Jaringan Jalan Eksisting Provinsi Jawa Barat .. II-183
Gambar 2.126 Capaian Persentase Rumah Tangga Hunian Layak Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 ..... II-184
Gambar 2.127 Jumlah Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..... II-188
Gambar 2.128 Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 ..... II-189
Gambar 2.129 Perbandingan IDM Pulau Jawa dan Bali Tahun 2024..... II-189
Gambar 2.130 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (yoy) Jawa Barat Tahun 2019-2024 ..... II-191

Gambar 2.131 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 ..... II-196
Gambar 2.132 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2024 ..... II-196
Gambar 2.133 Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2023..... II-197
Gambar 2.134 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat..... II-198
Gambar 2.135 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat 2022-2024..... II-199
Gambar 2.136 Peta Rencana Infrastruktur Transportasi Strategis Provinsi Jawa Barat..... II-224
Gambar 2.137 Peta Rencana Infrastuktur Sumber Daya Air Strategis Provinsi Jawa Barat II-225
Gambar 2.138 Peta Rencana Infrastruktur Strategis Lainnya Provinsi Jawa Barat..... II-226
Gambar 2.139 BUMD Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat..... II-227
Gambar 2.140 Proyeksi Jumlah hunian Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030..... II-231
Gambar 2.141 Proyeksi Jumlah Rumah Tapak dan Hunian Vertikal Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 ..... II-232
Gambar 2.142 Proyeksi Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Tahun 2025-2030 ..... II-235
Gambar 2.143 Baseline dan Proyeksi Kapasitas Air Baku Provinsi Jawa Barat..... II-236
Gambar 2.144 107 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... II-243
Gambar 2.145 Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Sumber Pembangkit Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. II-243
Gambar 2.146 Strategi Penanganan Persampahan Jawa Barat Tahun 2025-2030..... II-248
Gambar 2.147 TPPAS Regional Nambo kapasitas 1853-2131 Ton/hari..... II-250
Gambar 2.148 Jumlah Rumah Sakit Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat..... II-270
Gambar 2.149 Jumlah Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMK Sederajat Negeri II-279
Gambar 2.150 Kebutuhan RKB Berdasarkan Perbandingan Jumlah Rombongan Belajar Dengan Ruang Kelas Eksisting II-281
Gambar 2.151 Kebutuhan RKB Berdasarkan Perbandingan Antara Jumlah Rombongan Belajar Maksimal Dengan Kapasitas Ruang Kelas II-282
Gambar 2.152 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024..... II-288
Gambar 2.153 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-289
Gambar 2.154 Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2020-2024..... II-289

Gambar 2.155 Peta Sebaran Kemampuan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2025 ..... II-300
Gambar 2.156 Jenis Pajak yang Ditangani Provinsi Jawa Barat II-320
Gambar 2.157 Perubahan Tarif PKB dan BBNKB II-321
Gambar 2.158 Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah II-334
Gambar 2.159 Proporsi Mitra PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat II-337
Gambar 2.160 Jumlah Pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Jawa Barat II-337
Gambar 2.161 Permasalahan Transportasi Jawa Barat II-362
Gambar 2.162 Konteks Isu Global yang Dihadapi Provinsi Jawa Barat Dalam ”Megatrend Jawa Barat 2045” II-367
Gambar 2.163 Isu Strategis Terkait *Green and Blue Economy* Serta Pembangunan Inklusif II-388
Gambar 2.164 Isu Terkait Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia II-389
Gambar 2.165 Isu Terkait Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar II-392
Gambar 2.166 Isu Terkait Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan II-394
Gambar 2.167 Isu Terkait Keberlanjutan Penataan Ruang II-397
Gambar 2.168 Isu Terkait Kualitas Tata Kelola Pemerintahan II-399
Gambar 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... III-9
Gambar 3.2 8 Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional III-10
Gambar 3.3 Sasaran Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... III-12
Gambar 3.4 Posisi RPJMD Tahun 2025-2029 dalam RPJPD Tahun 2025-2045 ..... III-33
Gambar 3.5 Sebaran Komoditas Unggulan yang Dikembangkan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 Persen III-54
Gambar 3.6 Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 7,95 Persen Tahun 2029 ..... III-60
Gambar 3.7 Tahapan Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ..... III-67
Gambar 3.8 Arah Kebijakan per Wilayah Pengembangan III-80
Gambar 4.1 Dasar Perumusan Program Perangkat Daerah IV-1

DAFTAR ISTILAH

Angkatan Kerja	:	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
Asta Cita	:	Istilah yang merujuk pada delapan cita-cita atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintahan saat ini, khususnya oleh Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Asta Cita merupakan fondasi bagi visi dan misi kepemimpinan Kepala Negara.
Backlog rumah	:	Kondisi di mana terjadi kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan; secara sederhana, backlog rumah adalah defisit atau *gap* antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia,
Bauran energi	:	Kombinasi dari berbagai sumber energi yang digunakan dalam suatu wilayah atau sistem; dapat mencakup berbagai jenis energi primer seperti minyak bumi, gas alam, batubara, energi baru dan terbarukan (EBT), dan energi nuklir; bauran energi mencakup semua penggunaan energi secara langsung, termasuk di sektor transportasi, perumahan, dan industri, bukan hanya pembangkitan listrik.
Bonus demografi	:	Kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dalam suatu wilayah. Kondisi ini menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar karena adanya banyak tenaga kerja, konsumen, dan pelaku usaha potensial.
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	:	Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain; Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Dukung fokus pada kemampuan lingkungan untuk menghasilkan atau menyediakan sumber daya, sementara Daya Tampung fokus pada kemampuan lingkungan untuk menampung atau menetralkan limbah atau zat lain.
Disparitas pembangunan	:	Ketimpangan pembangunan; fenomena di mana terjadi ketimpangan yang besar dalam indikator pembangunan seperti tingkat pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah atau kelompok masyarakat.
Ekonomi Hijau	:	Konsep ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah

		lingkungan yang melibatkan investasi pada teknologi bersih, energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien pada lingkungan ekologi daratan.
Ekonomi Biru	:	Konsep ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut, kelautan, dan pesisir secara berkelanjutan. Hal tersebut mencakup berbagai sektor seperti perikanan, akuakultur, transportasi laut, energi terbarukan dari laut, pariwisata pesisir, dan bioteknologi laut.
Emisi GRK	:	Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) adalah pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang memiliki potensi untuk meningkatkan efek rumah kaca, sehingga menyebabkan pemanasan global; peningkatan emisi GRK dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan kendaraan bermotor, produksi ternak, penggunaan pupuk kimia, penggundulan hutan, dan berbagai aktivitas industri.
Energi Baru / Terbarukan (EBT)	:	Energi yang bersumber dari alam dan dapat diperbarui secara alami, seperti matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi.
Gini Ratio / Rasio Gini / Indeks Gini	:	Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah atau populasi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (semua pendapatan terkonsentrasi pada satu atau beberapa orang). Artinya, semakin besar dan mendekati angka 1, maka ketimpangan ekonomi di suatu wilayah semakin besar.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	:	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengukur kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. IDSD mencakup aspek-aspek seperti kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	:	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi demokrasi politik di Indonesia, khususnya di tingkat provinsi. IDI dihitung berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. IDI memberikan gambaran objektif dan empiris tentang perkembangan demokrasi di Indonesia.
Indeks Inovasi Daerah (IID)	:	Sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IID mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu, menggunakan seperangkat variabel dan indikator. Tujuan IID adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi inovasi yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan urusan pemerintahan daerah.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	:	Ukuran yang digunakan untuk menilai untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan; IKP disusun dari beberapa indikator yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
Indeks Modal Manusia / IMM	:	Pengukuran yang dilakukan untuk menilai potensi produktivitas SDM (Sumber Daya Manusia) di suatu wilayah. IMM mengukur seberapa besar potensi ekonomi dan profesional warga suatu wilayah dipengaruhi oleh kesehatan dan pendidikan.
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	:	Tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. IPP mencakup berbagai aspek pelayanan, seperti kualitas layanan, kepuasan masyarakat, dan dampak layanan terhadap masyarakat.
Indeks Reformasi Birokrasi	:	Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan. Indeks ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi tersebut.
Indikator Kinerja Daerah (IKD)	:	Sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Indikator Kinerja Program (IKP)	:	Alat ukur yang digunakan untuk menaksir keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. IKP berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana tujuan program tercapai, baik dari segi *output, outcome,* maupun dampak.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	:	Merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, tim, atau individu telah mencapai tujuan atau target tertentu. IKU digunakan untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, memantau kemajuan terhadap target strategis, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Indikator Utama Pembangunan (IUP)	:	Tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan di suatu wilayah. IUP membantu mengukur kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan pembangunan manusia.
Infant Mortality Rate (IMR)	:	Angka Kematian Bayi (AKB); jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu; IMR/AKB digunakan sebagai indikator penting untuk menilai tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu masyarakat, khususnya terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Inklusif	:	Mencakup semua orang tanpa pembedaan; merupakan pendekatan yang melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang mungkin sebelumnya terpinggirkan. Istilah ini berasal

		dari kata "*inclusion*" dalam bahasa Inggris yang berarti "mengajak masuk" atau "mengikutsertakan".
Inklusi keuangan	:	Kondisi di mana semua anggota masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah dan daerah terpencil, memiliki akses terhadap layanan keuangan formal (lembaga keuangan dan perbankan). Ini berarti masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan seperti perbankan, asuransi, investasi, dan layanan keuangan digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Ketahanan pangan	:	Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sehingga mereka memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk hidup sehat dan aktif. Konsep ini meliputi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
KP2B		KP2B adalah singkatan dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu suatu wilayah yang ditetapkan untuk pertanian pangan abadi guna menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	:	Ukuran persentase kenaikan atau penurunan PDB (Produk Domestik Bruto) suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun); menunjukkan seberapa cepat perekonomian suatu wilayah tumbuh atau justru menyusut; merupakan indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
Literasi digital	:	Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya.
Lingkungan strategis	:	Situasi internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu entitas (wilayah, unit organisasi, maupun individu) dalam pengambilan keputusan dan strategi. Lingkungan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan alam yang dapat berdampak langsung pada kebijakan dan perubahan dalam unit tersebut.
LLAJ		LLAJ adalah singkatan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merujuk pada seluruh aspek terkait pergerakan orang dan kendaraan di jalan serta pengangkutan barang di Indonesia.
Neraca daerah	:	Kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.
Output dan Outcome	:	*Output* adalah hasil langsung atau produk dari sebuah kegiatan atau proses, sementara *outcome* adalah dampak atau pengaruh jangka panjang dari hasil tersebut.

		Output seringkali mudah diukur secara kuantitatif, sedangkan *outcome* lebih luas dan dapat berupa manfaat atau perubahan yang lebih besar.
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	:	Indikator ekonomi yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun.
Pembangunan inklusif	:	Pendekatan pembangunan yang memastikan semua orang, termasuk kelompok yang terpinggirkan, dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya secara setara. Ini berarti menciptakan akses dan kesempatan yang sama untuk semua orang, baik dalam hal ekonomi, sosial, dan politik.
Perkotaan	:	Wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian, yang berfungsi sebagai tempat permukiman, pusat pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Wilayah perkotaan juga bisa mencakup kota induk dan daerah pinggirannya.
Perdesaan	:	Wilayah yang kegiatan utamanya adalah pertanian (daerah agraris), termasuk pengelolaan sumber daya alam, dan berfungsi sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.
PHBS		PHBS adalah singkatan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mendorong individu dan keluarga untuk mempraktikkan perilaku sehat secara sadar.
Proyek Strategis Nasional (PSN)	:	Proyek-proyek infrastruktur yang dianggap penting oleh Pemerintah (Pusat) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah;
Rasio elektrifikasi	:	Perbandingan jumlah rumah tangga yang telah berlistrik dengan total jumlah rumah tangga di Indonesia.
Rasio ketergantungan (dependency ratio)	:	Perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun); rasio ini mengukur beban tanggungan ekonomi berupa penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	:	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Sekolah vokasi	:	Lembaga pendidikan yang fokus pada pelatihan keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik untuk mempersiapkan siswa atau mahasiswa untuk bekerja di bidang tertentu.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan penduduk, yang mencerminkan seberapa baik pola makan mereka memenuhi kriteria keberagaman, keseimbangan, dan kecukupan gizi, dengan skor maksimal 100%.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	:	Ketentuan yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal; merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
STEAM	:	*Science, technology, engineering, art, dan mathematics*; merupakan bentuk pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, rekayasa (*engineering*), seni, dan matematika untuk mengatasi masalah yang ditemui.
Stunting	:	Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (khususnya balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya baik dari aspek tinggi badan dan berat badannya.
Tata kelola pemerintahan	:	Proses dan struktur yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, dengan fokus pada praktik dan prinsip-prinsip yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	:	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah; TPT mengukur seberapa besar bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan.
Total Fertility Rate (TFR)	:	Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya; digunakan untuk memperkirakan jumlah rata-rata anak yang akan dimiliki seorang wanita jika ia melahirkan sesuai dengan tingkat kesuburan saat ini; TFR mengacu pada rata-rata, bukan pada jumlah anak yang sebenarnya akan dimiliki oleh setiap individu wanita; Masa reproduksi wanita sendiri biasanya dihitung dari usia 15 hingga 49 tahun (World Bank).
Transformasi digital	:	Proses mengadopsi teknologi digital untuk mengubah cara beroperasi, berinteraksi, dan menciptakan nilai baru dalam setiap kegiatan. Proses ini mencakup penggunaan teknologi komputer dan/atau kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan operasi dan memberikan nilai lebih.
Usia Harapan Hidup (UHH)	:	Perkiraan rata-rata tahun yang akan dijalani oleh seseorang setelah mencapai usia tertentu, atau rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu

tahun tertentu; kerap disebut pula sebagai angka harapan hidup (AHH);

UHH adalah indikator penting untuk mengukur kualitas hidup dan kesehatan suatu populasi, serta mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Jabar Istimewa

Lembur Diurus, Kota Ditata

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemerintahan daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional, serta memperhatikan karakteristik dan potensi daerah yang dimiliki, sehingga dapat menjawab tantangan dan isu strategis yang dihadapi.

Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berdasarkan jangka waktunya, baik dalam lingkup daerah maupun perangkat daerah, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk 5 (lima) tahun, serta dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk setiap tahunnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang memiliki segala potensi kekayaan alam dan budaya hingga pertumbuhan ekonomi. Posisi Jawa Barat yang strategis dekat dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis Indonesia, memiliki aksesibilitas ke berbagai daerah lain menjadikan Jawa Barat sebagai tujuan investasi didukung oleh sumber daya manusia yang melimpah, serta infrastruktur dan ekosistem industri yang memadai.

Namun, di sisi lain Jawa Barat memiliki beberapa tantangan diantaranya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang masih tinggi, sehingga pembangunan di Jawa Barat belum inklusif.

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 menjadi perencanaan 5 (lima) tahunan atau tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, yang memuat berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan sasaran visi pembangunan jangka panjang yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ditindaklanjuti oleh daerah dengan menyusun Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD yang sebagian muatan substansinya menjadi pedoman bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas daerah serta menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut, pada tanggal 9 Januari 2025 KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan pasangan Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2025-2030 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih sesuai pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyusunan RPJMD wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD sebagaimana disebutkan pada pada pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Oleh

karena itu, muatan substansi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan berbagai kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029, meliputi Asta Cita, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Provinsi Jawa Barat dengan motto *Gemah Ripah, Repeh Rapih* merupakan frasa yang berasal dari Bahasa Sunda yang berarti sebuah kondisi daerah yang subur, makmur, sejahtera, cukup sandang dan pangan (*Gemah, Ripah*), damai, rukun, tenteram dan tertata (*Repeh, Rapih*). Sebuah cita-cita luhur dari daerah yang subur, makmur dengan masyarakatnya yang sejahtera. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, perlu strategi dan tahapan pencapaian yang dilaksanakan melalui *Gerbang Pancaniti* (Lima *Titian*), yaitu *Niti Harti* (proses mendengar, melihat, dan mengamati), *Niti Surti* (proses merasakan dan memahami), *Niti Bukti* (mengumpulkan data, dan fakta), *Niti Bakti* (proses pemecahan masalah dan perbaikan), dan *Niti Sajati* (tahap inovasi yang mampu menghasilkan kebaruan). Kelima tahapan berdasarkan filosofi Sunda ini akan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat.

Gerbang Pancaniti dilaksanakan dengan memegang teguh Filosofi *Tritangtu* (tiga ketentuan) yang diinternalisasikan dalam diri, sosial, dan alam. *Tritangtu* dalam diri diwujudkan melalui keselarasan antara *Tekad, Ucap, Lampah* (kehendak, pikiran, dan perbuatan). Dalam aspek sosial, *Tritangtu* tercermin pada prinsip *Silih Asih, Silih Asah,* dan *Silih Asuh* (saling mengasihi, mencerdaskan, dan membimbing). Sementara itu, dalam pengelolaan alam dan lingkungan, *Tritangtu* diwujudkan melalui konsep *Tritangtu leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung garapan* (hutan yang harus dijaga keseimbangannya, hutan lindung, dan hutan yang boleh dikelola). Setelah nilai-nilai tersebut diinternalisasikan, pencapaian akan bermuara pada *Gerbang Pancawaluya* (gerbang lima kesempurnaan) yaitu kondisi manusia Jawa Barat yang *Cageur* (sehat jasmani dan rohani), *Bageur* (religius, beretika, berbudaya), *Bener* (memegang teguh aturan dan hukum), *Pinter* (menguasai ilmu pengetahuan), dan *Singer* (kreatif dan cekatan), sesuai dengan konsep hidup manusia sebagai hamba yang berjalan di muka bumi dalam hubungannya dengan Tuhan (*Hablumminallah*), hubungan dengan lingkungan (*Hablumminal'alam*), dan hubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Gambaran cita-cita luhur Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada filosofi dan kosmologi Sunda ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Konsep RPJMD Berbasis Nilai dan Filosofi Sunda

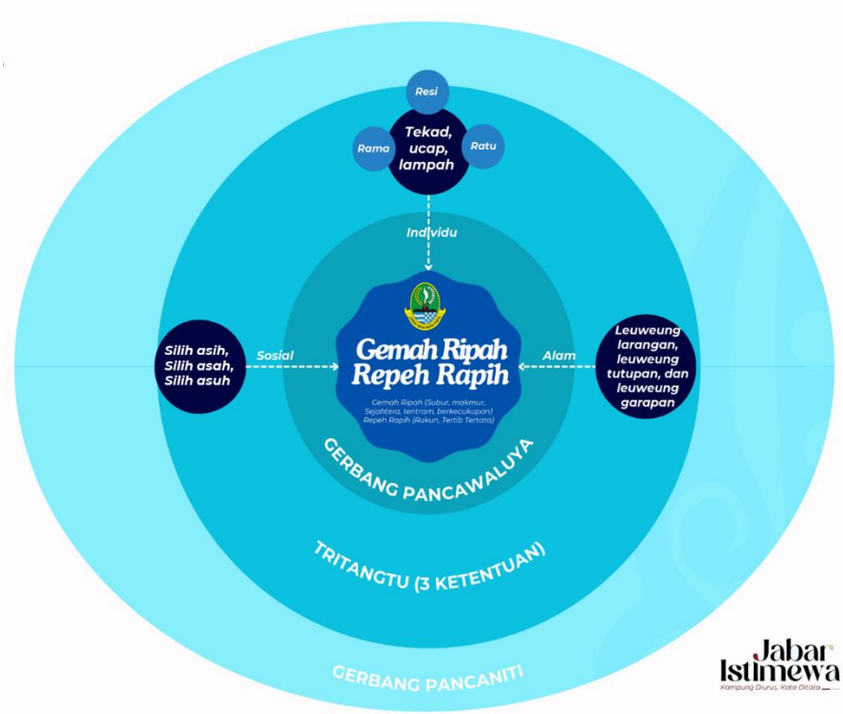

GERBANG PANCANITI

- **Niti harti** (belajar untuk mengetahui),
- **Niti surti** (belajar untuk memahami),
- **Niti bukti** (belajar untuk menerapkan),
- **Niti bakti** (belajar untuk mengevaluasi), dan
- **Niti jadi/sajati** (belajar menghasilkan ilmu baru).

TRITANGTU

- **Resi/ Tekad/** Kehendak
- **Ratu/ Ucap/** Pikiran dan Perkataan
- **Rama/ Lampah/** Perbuatan

- **Silih Asih:** Saling Mengasihi
- **Silih Asah:** Saling Mencerdaskan
- **Silih Asuh:** Saling Membimbing

- **Leuweung Larangan:** dijaga keseimbangannya untuk masyarakat Sabuana
- **Leuweung Tutupan:** Hutan Lindung yang menutupi leuweung larangan
- **Leuweung Garapan:** Hutan yang boleh dimanfaatkan

GERBANG PANCAWALUYA

- **Cageur:** Sehat jasmani dan rohani.
- **Bageur:** Baik hati dan rendah hati.
- **Bener:** Menjalankan aturan dan hukum dengan benar.
- **Pinter:** Memiliki ilmu pengetahuan dan daya saing.
- **Singer:** Kreatif, inovatif, dan terampil.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur Jawa Barat tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 memiliki visi Jabar Istimewa, *Lembur Diurus, Kota Ditata*. Hal ini, menggambarkan situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur periode 2025-2030 berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan maupun istimewa dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Visi tersebut diterjemahkan melalui 4 (empat) misi yaitu, (1) Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul;

(2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif; (3) Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan, serta miskin dan kaya; serta (4) Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan sesuai dengan prinsip *good and clean governance*. Visi dan misi Gubernur sebagaimana tersebut, akan dicapai melalui berbagi program prioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahap pertama serta RPJMN Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 membutuhkan peran dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Barat serta berbagai alternatif sumber pendanaan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan pencapaian sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan. Penyusunan dan penetapan RPJMD merupakan upaya untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan strategis di lingkup nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota serta pada lingkup operasional di setiap perangkat daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah dari Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 5 (lima) tahun kedepan, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dengan demikian, diharapkan muatan substansi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dapat dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun RPJMD telah menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan yang dimaksud tersebut, meliputi:

1. Pendekatan teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain menggunakan pendekatan di atas, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 juga menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui implementasi pendekatan *pentahelix*-ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*), serta pelibatan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, Pinjaman Daerah, obligasi daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dana masyarakat/umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta melibatkan secara aktif *stakeholder* diluar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah;
3. Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pendekatan spasial dan a-spasial melalui 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP

Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya;

5. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*;
6. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam:
   a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
   b. Satu Data Pembangunan Jawa Barat.

Alur penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

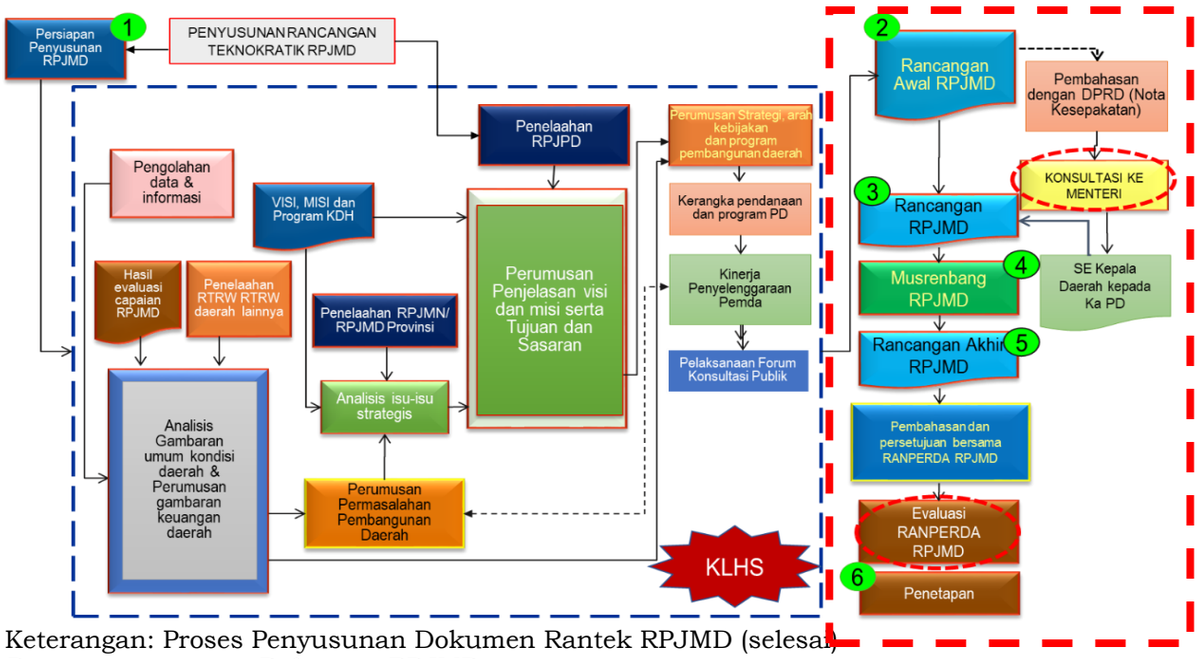

Keterangan: Proses Penyusunan Dokumen Rantek RPJMD (selesai)
Proses penyusunan Dokumen RPJMD
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dilakukan secara berkesinambungan, diawali dengan tahap persiapan hingga berakhir di tahap penetapan melalui Perda tentang RPJMD. Secara rinci sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Rantek RPJMD ini menjadi salah satu input substansi bagi Tim Penyusun RPJMD dalam melaksanakan orientasi;
2. Tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, dilaksanakan dengan penyempurnaan rancangan awal berdasarkan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, serta hasil konsultasi dengan Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas;
3. Tahap penyusunan Rancangan RPJMD, dilaksanakan dengan penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas serta Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan telah siap dibahas dalam Musrenbang RPJMD;
4. Tahap penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, dilaksanakan dengan penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD untuk selanjutnya disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk direviu. Hasil reviu APIP menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Ranperda RPJMD. Ranperda RPJMD yang telah disepakati tersebut kemudian dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
5. Tahap penetapan, dilaksanakan dengan penyempurnaan Ranperda RPJMD berdasarkan hasil evaluasi Ranperda RPJMD dari Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditetapkan sebagai Perda tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Gambar 1.3
Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2029

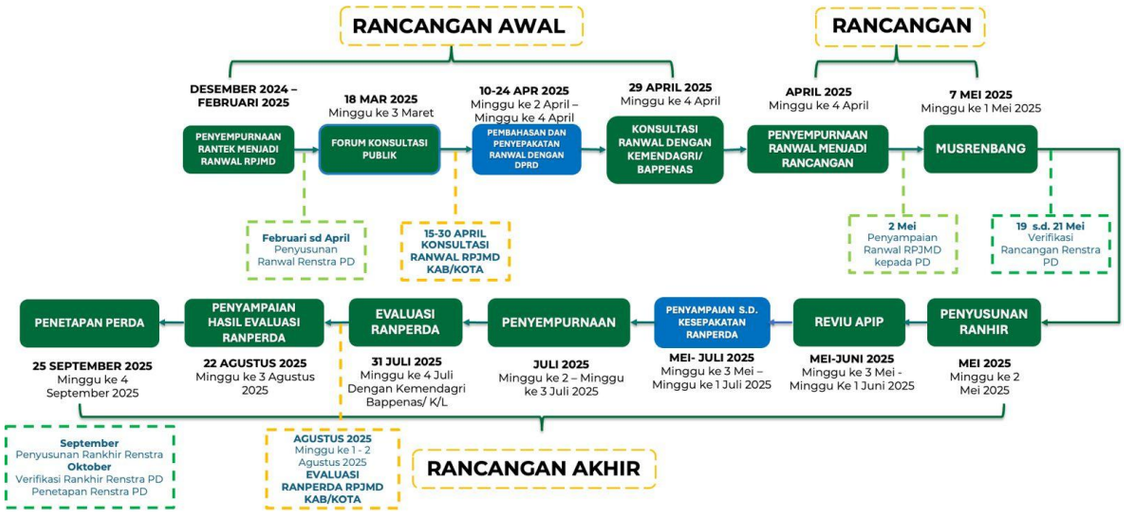

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis mengingat peran dan kedudukannya antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Media untuk menjabarkan rencana pengimplementasian janji politik Kepala Daerah terpilih sesuai dengan yang disampaikan pada masa kampanye kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045 tahap pertama (Tahun 2025-2029) yang merupakan tahap fondasi, yaitu Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
4. Pedoman penyusunan RPJMD kabupaten/kota se-Jawa Barat;
5. Pedoman untuk penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Instrumen pengukuran tingkat ketercapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
7. Instrumen pengendalian bagi pengampu urusan pengawasan dan perencanaan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum berupa kumpulan peraturan yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arahan dan amanat kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat 2 (dua) aspek utama keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dipahami pada uraian dan gambar berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, seperti RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Konsistensi, yaitu apa yang direncanakan dapat diwujudkan melalui alokasi penganggaran yang tepat.

Sejumlah keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan baik yang bersifat nasional maupun regional Jawa Barat dijelaskan di bawah ini.

Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

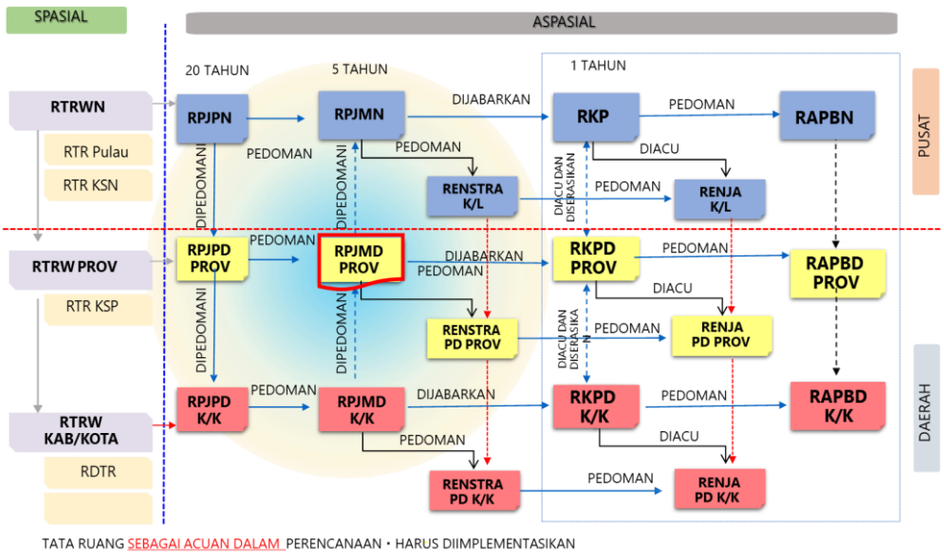

Sumber: UU Nomor 25/2004 dan Permendagri Nomor 86/2017, diolah, 2025

1.3.1 Hubungan RPJMD Provinsi dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Provinsi berpedoman pada RPJMN. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan target, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun kedepan merupakan salah satu pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan Tahap I RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk

menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD ini serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.

1.3.3 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang disusun dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.4 Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Barat

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memerhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi

dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program", dan Ayat (2) yaitu, "KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup."

RPJMD memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdapat 9 (sembilan) isu prioritas *Sustainable Development Goals* (SDG's) Jawa Barat yang ditetapkan melalui proses *crosscutting issues* antara 9 (sembilan) muatan isu KLHS terhadap capaian target SDGs Jawa Barat. Kesembilan isu prioritas SDGs tersebut, yaitu:

1. Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang termasuk pengembangan sistem teknologi informasi digital (berkaitan dengan TPB 4 dan TPB 5);
2. Belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran guna mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif (berkaitan dengan TPB 1, TPB 5, dan TPB 16);
3. Belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan (berkaitan dengan TPB 11, TPB 9, TPB 6, dan TPB 7);
4. Belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang

kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas (berkaitan dengan TPB 3, TPB 2, TPB 1, dan TPB 5);

5. Belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah (berkaitan dengan TPB 8, TPB 14, dan TPB 10);
6. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim, serta upaya penurunan gas rumah kaca (berkaitan dengan TPB 1, TPB 9, TPB 11, dan TPB 13);
7. Belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat (berkaitan dengan TPB 1, TPB 5, TPB 9, TPB 16, dan TPB 17);
8. Penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air (berkaitan dengan TPB 2, TPB 6, dan TPB 15);
9. Belum optimalnya pengelolaan DAS dan rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut (berkaitan dengan TPB 6 dan TPB 15).

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun guna memberikan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan yang terencana dan terukur. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah kedalam kebijakan pembangunan yang terukur dan realistis;
2. Menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah;

3. Menetapkan prioritas pembangunan daerah, sektor unggulan, serta program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan yang kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan memberikan arah dan kerangka strategis sebagai acuan Renstra Perangkat Daerah agar kinerja Perangkat Daerah dapat diwujudkan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan sasaran RPJMD sehingga perencanaan pembangunan di daerah berjalan harmonis dan terintegrasi;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan, merata, dan inklusif dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan;
7. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan melalui perencanaan yang jelas agar lebih efektif dan transparan dalam menjalankan program pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, agar pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berikut adalah sistematika RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hasil perumusan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RPJMD.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam beberapa aspek penyelenggaraan pembangunan, disertai informasi gambaran keuangan daerah, serta uraian permasalahan dan isu strategis daerah yang mendasari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029.

BAB III : VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan Visi-Misi pembangunan daerah pada Tahun 2025-2029 beserta arahan kebijakan dan strateginya yang dikembangkan pula ke dalam Program Prioritas pembangunan daerah.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjabarkan Program Perangkat Daerah yang merupakan kumpulan program yang terdapat pada Renstra Perangkat Daerah, serta penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang menjadi catatan dan harapan terhadap pemanfaatan dokumen RPJMD ini.

Jabar Istimewa

Lembur Diurus, Kota Ditata

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi, mencakup posisi serta peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan energi, air, serta kemandirian pangan, kualitas lingkungan hidup, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dinamika demografi, beserta sektor ekonomi dari sisi lapangan usaha. Penjelasan tersebut diperkaya dengan penjabaran kondisi eksisting Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2020 hingga 2024 sebagai landasan empiris bagi perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari 8 (delapan) provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan. Dalam perjalanannya, terukir sejarah panjang Provinsi Jawa Barat yang lekat kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Provinsi Jawa Barat ditetapkan hanya berselisih 2 (dua) hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ditetapkan tanggal 19 Agustus sebagai hari jadi Provinsi Jawa Barat. Tahun ini Provinsi Jawa Barat genap berusia 80 tahun.

Provinsi Jawa Barat memiliki letak yang strategis, di bagian barat Pulau Jawa yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Pulau Jawa. Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak di antara 106° 22’ 13” BT-108° 50’ 1,4” Bujur Timur, dan 5° 54’ 49,58” LS–7° 49’ 15,52” Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- Sebelah Barat: Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
- Sebelah Timur: Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi atas 27 kabupaten/kota yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.311 desa. Luas wilayah darat di Provinsi Jawa Barat seluas 3.704.067 hektar, dimana luasan tersebut termasuk daratan berupa pulau-pulau kecil sebanyak 19 (sembilan belas) pulau. Secara luasan, kabupaten/kota terbesar berada di Kabupaten Sukabumi sedangkan terkecil berada di Kota Cirebon dan Kota Cimahi.

Tabel 2.1
Administratif Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (Persen)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bandung	174.084	4,70	31	10	270
2	Bandung Barat	128.344	3,46	16	-	165
3	Bekasi	125.105	3,38	23	8	179
4	Bogor	299.178	8,08	40	19	416
5	Ciamis	159.594	4,31	27	7	258
6	Cianjur	363.192	9,81	32	6	354
7	Cirebon	107.676	2,90	40	12	412
8	Garut	310.124	8,37	42	21	421
9	Indramayu	207.606	5,60	31	8	309
10	Karawang	191.371	5,17	30	12	297
11	Kuningan	119.29	3,22	32	15	361
12	Majalengka	133.017	3,59	26	13	330
13	Pangandaran	112.815	3,05	10	-	93
14	Purwakarta	99.309	2,68	17	9	183
15	Subang	216.555	5,85	30	8	245
16	Sukabumi	416.415	11,24	47	5	381
17	Sumedang	156.62	4,23	26	7	270
18	Tasikmalaya	270.586	7,31	39	-	351
19	Kota Bandung	16.659	0,45	30	151	-
20	Kota Banjar	13.101	0,35	4	9	16
21	Kota Bekasi	21.304	0,58	12	56	-
22	Kota Bogor	11.137	0,30	6	68	-
23	Kota Cimahi	4.243	0,11	3	15	-
24	Kota Cirebon	3.947	0,11	5	22	-

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (Persen)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Kota Depok	19.991	0,54	11	63	-
26	Kota Sukabumi	4.831	0,13	7	33	-
27	Kota Tasikmalaya	18.394	0,50	10	69	-
Provinsi Jawa Barat		**3.704.067**	**100,00**	**627**	**645**	**5.311**

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042

Wilayah laut di Provinsi Jawa Barat memiliki cakupan sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai menuju laut lepas atau perairan kepulauan, dengan luas sekitar 1.645.417 hektar. Perairan laut Jawa Barat meliputi Pantai Utara di Laut Jawa dan Pantai Selatan di Samudera Hindia. Secara administratif, wilayah Pantai Selatan mencakup Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Sementara itu, wilayah Pantai Utara meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, serta Kota Cirebon. Di setiap kabupaten/kota di Pantura dan Pansela tersebut terdapat kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil di Jawa Barat berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, dan Sukabumi.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Nilai PDRB sektor industri pengolahan yang tertinggi se-Indonesia, menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu kontributor Produk Domestik Bruto tertinggi ke-3 di Indonesia. Hal ini menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi nasional. Selain itu, Jawa Barat memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Waduk Jatiluhur sebagai penyuplai kebutuhan air bersih untuk Wilayah Jakarta dan sekitarnya

Dalam konstelasi wilayah, Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis, diantaranya sebagai daerah yang menyuplai kebutuhan air baku bagi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pasokan pangan nasional, tulang punggung sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali, serta turut menjaga kestabilan pasokan BBM dari Kilang Balongan, dan lainnya.

Keberadaan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban yang dirancang untuk menopang ekspor produk manufaktur, Bandara Kertajati yang memperkuat konektivitas internasional, serta jaringan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama, semakin memperkuat peran Jawa Barat dalam rantai pasok logistik global dan nasional.

Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

Adapun dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, tujuan investasi terbesar, penyumbang terbesar bagi kinerja ekspor, basis industri manufaktur, serta sebagai pusat pendidikan tinggi yang memiliki 727 perguruan tinggi dengan 40 diantaranya adalah perguruan tinggi negeri.

Peran strategis Jawa Barat dalam konstelasi nasional semakin diperkuat dengan menjadi daerah dimana realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Nilai investasi sepanjang 2024 mencapai Rp251,1 triliun atau 14,1 persen dari total investasi di Indonesia. Hal ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki iklim investasi paling atraktif yang semakin memperkuat daya saing daerah.

Provinsi Jawa Barat memiliki posisi strategis di Pulau Jawa sebagai penghubung utama pusat ekonomi, lumbung pangan nasional, dan pusat industri pengolahan terbesar di Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur penting seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan tol Trans Jawa, Jawa Barat berperan vital dalam pasokan air baku, energi, dan BBM, sekaligus menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak, tujuan investasi terbesar, serta motor penggerak ekonomi nasional.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Jawa Barat memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah. Potensi sumber daya alam tersebut mencakup berbagai jenis sumber daya, meliputi hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun objek daya tarik wisata serta sumber daya energi.

Berdasarkan pembagian pola ruang di dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jawa Barat (RTRW) Tahun 2022-2042, kawasan dengan potensi sumber daya alam dan buatan yang dimanfaatkan disebut sebagai kawasan budidaya. Luas kawasan budidaya Jawa Barat adalah sebesar 89 persen atau sekitar 4.743.654 Ha dengan pembagian pada luas kawasan pertanian sebesar 2.066.938 Ha dan perikanan seluas 1.353.222 Ha. Adapun kawasan pertanian yang dimaksud mencakup kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Guna mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 735.320 Ha di seluruh daerah kabupaten/kota.

A. Pertanian

Sektor pertanian memegang peran vital dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di Jawa Barat. Sektor ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu daerah Lumbung Padi Nasional, Jawa Barat berkontribusi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Padi menjadi salah satu komoditas dominan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah produksi sebanyak 8.510.868 ton. Dibandingkan dengan provinsi lain, produksi padi tahun 2024 di Jawa Barat menempati ke-3 terbesar secara nasional dengan produktivitas tertinggi mencapai 58,47 kuintal/hektar. Adapun beberapa komoditas lainnya diantaranya Jagung sebanyak 1.044.253 ton, Ubi Kayu sebanyak 937.091 ton, Ubi Jalar sebanyak 382.370 ton, Kacang Hijau sebanyak 28.542 ton, Kacang Tanah sebanyak 12.367 ton, Kedelai sebanyak 71,16 ton.

Perkembangan produksi padi dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan (Gambar 2.2), hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya fenomena *El Nino* mengakibatkan gagal panen karena banjir dan kekeringan, dan adanya pergeseran musim tanam di beberapa daerah. Produksi padi didukung infrastruktur pengairan pada 99 daerah irigasi dengan luas 91.698 hektar. Kinerja infrastruktur irigasi belum optimal dalam memasok kebutuhan air untuk lahan sawah, sehingga menyebabkan produksi padi cenderung fluktuatif. Faktor lainnya adalah serangan hama dan penyakit tanaman yang masih terjadi secara sporadis, serta fluktuasi

harga gabah yang mempengaruhi motivasi petani untuk meningkatkan produksi. Keterbatasan akses petani terhadap benih unggul, pupuk, dan teknologi pertanian modern juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas produksi padi di Jawa Barat.

Gambar 2.2
Perkembangan Produksi Padi dan 5 Provinsi dengan Produksi Padi Terbesar (Ton)

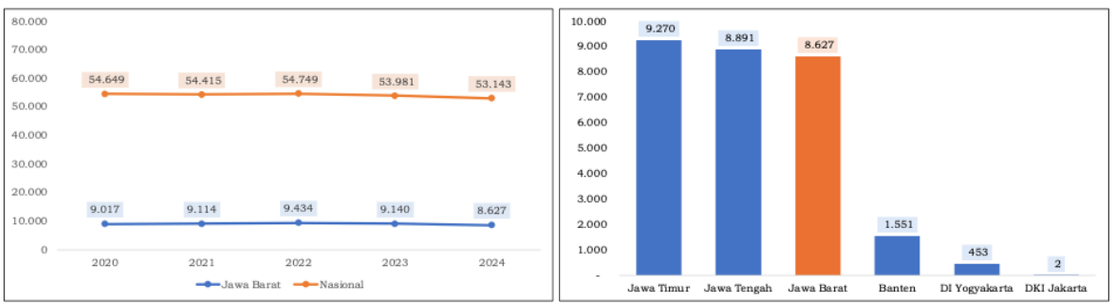

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2025

Dalam upaya pencapaian swasembada pangan, memiliki potensi luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang cukup besar. Kabupaten Indramayu memiliki LBS paling luas dibandingkan kabupaten kota lainnya. Selain itu, Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri memiliki potensi pengembangan pangan yang cukup besar.

Gambar 2.3
Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 (ha)

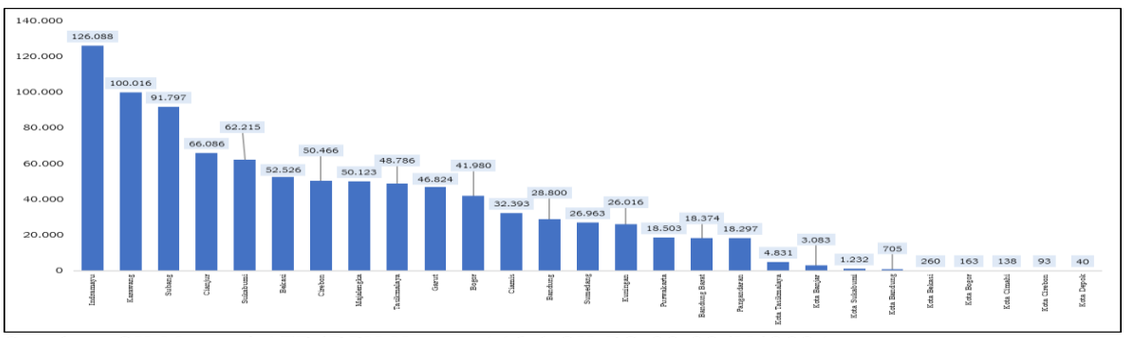

Sumber: SK Menteri ATR/BPN Nomor 446.1 SK-PG.03.03/V/2024

Selain padi, unggulan Provinsi Jawa Barat lainnya adalah Jagung dan Kedelai. Produksi jagung dan kedelai dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif (Gambar 2.4).

Produksi jagung tertinggi terjadi pada tahun 2020, seiring dengan luas panen yang meningkat pada tahun tersebut. Namun, produksi mengalami penurunan signifikan di tahun-tahun berikutnya akibat

berkurangnya luas panen dan tanam dalam kurun waktu tersebut. Begitupun dengan capaian produksi kedelai 5 (lima) tahun terakhir yang mengalami ketidakstabilan dan cenderung menurun secara signifikan. Produksi kedelai pada tahun 2024 menjadi yang terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.4
Produksi Jagung dan Kedelai Tahun 2020-2024 (Ton)

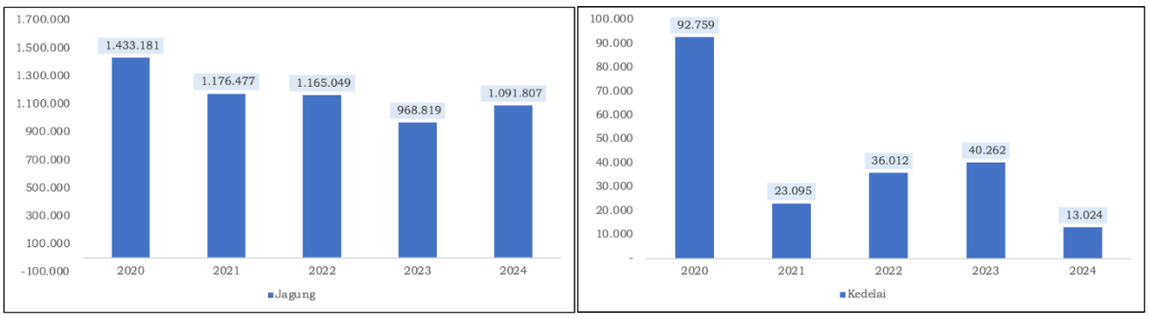

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, diolah 2025

Pertanian hortikultura Jawa Barat memiliki beberapa komoditas unggulan baik dari komoditas sayuran maupun buah-buahan. komoditas sayuran diantaranya cabe besar/teropong/keriting, bawang merah, dan kentang, dari komoditas buah-buahan terdapat mangga dan manggis, sedangkan dari komoditas rempah terdapat jahe, kunyit, dan kapulaga.

Perkembangan komoditas pertanian terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2024, komoditas sayuran seperti bawang merah dan kentang mengalami peningkatan produksi sedangkan cabe besar, cabe rawit dan tomat mengalami penurunan produksi. Pada Komoditas buah, produksi mangga mengalami penurunan. Selain mangga, durian juga mengalami penurunan setelah peningkatan produksi yang signifikan di tahun 2023. Sedangkan buah lainnya seperti manggis, pisang, dan jeruk mengalami peningkatan di tahun 2024. Pada komoditas rempah, seperti jahe, kunyit, dan kapulaga terjadi peningkatan di tahun 2024.

Tabel 2.2
Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2020-2024 (Ton)

Nama Komoditas	Produksi Komoditas (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sayur-sayuran	1.057.855	1.025.663	1.063.190	1.162.805	1.148.002
Bawang Merah	164.827	170.650	193.318	179.355	183.112

Nama Komoditas	Produksi Komoditas (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cabe Besar (TW/Teropong dan Keriting)	266.067	184.766	175.784	324.968	309.209
Cabe Rawit	130.838	137.456	149.053	163.989	151.980
Kentang	196.856	240.482	272.074	226.420	247.864
Tomat	299.267	292.309	272.961	268.073	255.836
Buah-buahan	1.916.515	2.263.800	1.939.361	2.026.166	2.114.964
Mangga	442.587	444.073	451.174	438.295	405.512
Manggis	90.269	32.160	36.173	115.023	121.335
Pisang	1.263.504	1.649.229	1.317.558	1.267.922	1.375.051
Jeruk Siam/keprok	47.137	51.554	54.122	46.233	74.869
Durian	73.017	86.785	80.334	158.693	138.198
Rempah	110.156	152.981	148.555	137.811	170.175
Jahe	34.910	43.833	54.742	39.977	55.014
Kunyit	16.999	20.047	13.999	22.447	30.448
Kapulaga	58.247	89.101	79.815	75.387	84.712
Jumlah Produksi	**3.084.526**	**3.442.444**	**3.151.106**	**3.326.782**	**3.433.141**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2024

Kinerja produksi beberapa komoditas pertanian yang menurun/fluktuatif tersebut berdampak pada peran dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan stabilitas produksi.

B. Perkebunan

Selain tanaman pangan, Jawa Barat juga memiliki potensi besar di sektor perkebunan. Berdasarkan Angka Sangat Sementara Tahun 2023, subsektor perkebunan berkontribusi sebanyak 6,82 persen (BPS, 2024) bagi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan total luas wilayah perkebunan sebesar 451.261 hektar, sebanyak 83,59 persen lahannya didominasi oleh jenis Perkebunan Rakyat (PR), diikuti dengan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 10,79 persen dan Perkebunan Besar Negara (PBN) sebanyak 5,73 persen. Terdapat 10 (sepuluh) jenis komoditas perkebunan unggulan di Jawa Barat yaitu aren, cengkeh, kakao, karet, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, tebu, teh dan tembakau.

Tabel 2.3
Produksi Komoditas Unggulan Tahun 2020 – 2024 (Ton)

Nama Komoditas	Produksi Komoditas (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aren	62.940	67.137	66.940	64.710	66.125

Nama Komoditas	Produksi Komoditas (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cengkeh	8.881	8.794	9.292	7.823	10.949
Kakao	1.180	1.586	1.548	1.508	1.539
Karet	26.851	27.622	29.090	27.932	28.934
Kelapa Dalam	86.284	87.311	91.543	91.493	86.931
Kopi Arabika	12.809	14.237	14.531	14.441	17.130
Kopi Robusta	10.167	10.142	9.103	8.199	9.406
Teh	99.945	100.289	93.494	85.548	90.315
Tebu	38.217	47.052	61.338	48.668	55.173
Tembakau	8.035	8.778	8.590	8.073	8.870

Sumber: Data Statistik Angka Tetap, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2024

Produksi teh di Jawa Barat berasal dari perkebunan besar, perkebunan swasta dan perkebunan rakyat dengan luas areal mencapai ±75.805 hektar yang mampu menghasilkan teh sebanyak 90,32 ribu ton di tahun 2023 dan menyumbang sekitar 65 persen produksi teh nasional. Teh Jawa Barat diekspor ke beberapa negara, diantaranya Malaysia, Pakistan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Cina, dan Eropa.

Gambar 2.5
Perkembangan Produksi Teh dan 5 Provinsi dengan Produksi Teh Terbesar Tahun 2024 (Ribu Ton)

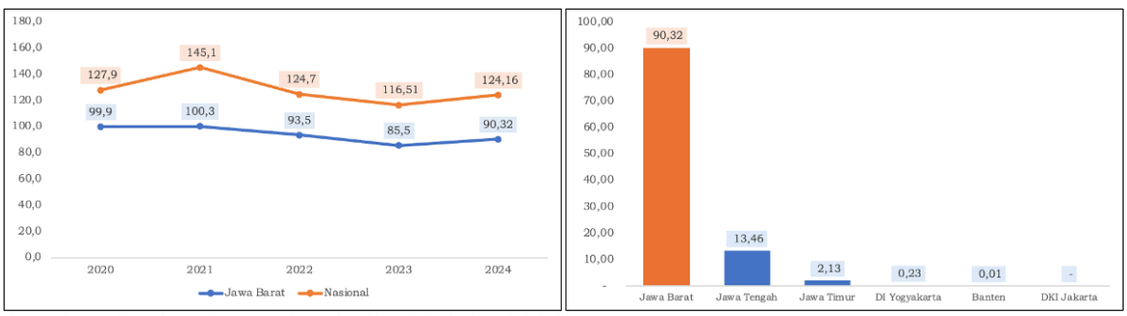

Sumber: Badan Pusat Statistik. Diolah, 2025

Berdasarkan luas lahannya, komoditas dengan lahan paling luas pada tahun 2024 adalah Kelapa Dalam yaitu seluas 144.487 hektar dimana 22,06 persen berlokasi di Kabupaten Ciamis diikuti dengan Kabupaten Pangandaran (21,87 persen), dan Kabupaten Tasikmalaya (17,50 persen). Mayoritas Kelapa Dalam berasal dari Perkebunan Rakyat dengan rata-rata produksi selama Tahun 2020 - 2024 sebesar 89.680 ton per tahun, tren produksi komoditas ini pun cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Di tingkat nasional, Jawa Barat juga diperhitungkan sebagai sentra produksi Kelapa Dalam yang menduduki peringkat ke-10 besar penghasil Kelapa Dalam se-nasional pada tahun 2023. Karena itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan, Kelapa Dalam akan menjadi salah satu fokus komoditas yang akan dikembangkan terutama dari segi peningkatan nilai tambah produk.

Komoditas berikutnya yang termasuk ke dalam komoditas unggulan Jawa Barat adalah Tebu. Luas areal perkebunan Tebu di Jawa Barat mencapai 15.034 hektar. Pemanfaatan Tebu dijadikan sebagai bahan baku pembuatan gula dimana proses pengolahannya dilakukan oleh perusahaan baik Perusahaan Besar Negara maupun Perusahaan Besar Swasta. Persebaran perkebunan Tebu terdapat di wilayah-wilayah Pantura Jawa Barat seperti Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Tebu menjadi salah satu komoditas yang turut difokuskan pengembangannya di Jawa Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMN Tahun 2025-2029 yang menargetkan Jawa Barat sebagai provinsi penghasil Tebu untuk dijadikan bahan baku pembuatan bioetanol sebagai sumber energi terbarukan.

Alih fungsi lahan perkebunan yang terus meningkat menjadi tantangan serius yang menyebabkan fluktuasi produksi perkebunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, luas lahan perkebunan di Jawa Barat mengalami penurunan sekitar 0,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh konversi lahan perkebunan menjadi lahan non-pertanian, seperti perumahan, industri, dan infrastruktur lainnya. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pengembangan subsektor perkebunan perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam kerangka pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang tegas dalam pengendalian alih fungsi lahan serta program-program yang mendorong produktivitas dan keberlanjutan subsektor perkebunan.

C. Perikanan dan Kelautan

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai potensi perikanan cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi Jawa Barat terhadap produksi perikanan nasional menduduki peringkat ke 4, setelah

Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Provinsi Riau. Kontribusi tersebut dihasilkan dari berbagai jenis produk perikanan di Jawa Barat baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Beberapa diantaramya memiliki volume produksi dan nilai ekonomi yang tinggi. Produksi perikanan tangkap tahun 2024 mencapai 291.284,15 ton, sementara perikanan budidaya mencapai 1.298.112,23 ton.

Tabel 2.4
Capaian Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Tahun 2020-2024 (Ton)

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	250.919,50	280.030,06	277.610,07	281.073,60	291.284,15
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.184.915,96	1.233.563,96	1.232.495,71	1.308.634,88	1.298.112,23

Sumber: DKP Jabar 2024

Sementara untuk produksi dan nilai ekonomi perikanan budidaya tawar sebagaimana pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Produksi dan Nilai Produksi 5 Jenis Produk Perikanan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Jenis	Produksi (kg)	Nilai Ekonomi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gurame	45.745,33	1.757.034.179.525
2	Lele	305.557,57	6.327.081.346.400
3	Nila	281.343,46	6.708.293.407.388
4	Ikan Mas	191.789,36	4.811.519.097.120
5	Udang	137.673,01	8.558.437.718.732
Total		**960.108,73**	**28.162.365.749.165**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2025

Jenis produk perikanan yang cukup menonjol adalah Gurame, Lele, Nilai, Ikan Mas, dan Udang Vaname. Data tahun 2024 mencatat volume produksi kelima produk perikanan tersebut mencapai 960.108,73 ton dengan nilai produksi mencapai Rp28,16 triliun. Produk perikanan Jawa Barat sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sementara untuk udang vaname, sebagian hasil produksi di ekspor sebagai produk unggulan ke negara-negara tujuan utama, seperti Amarika Serikat dan beberapa negara di asia.

Selain perikanan, komoditas sumberdaya kelautan bernilai ekonomis lainnya adalah garam dan rumput laut yang berkembang terutama di wilayah Pantai Utara Jawa Barat. Produksi garam pada umumnya dihasilkan dari tambak rakyat dengan teknologi sederhana sehingga jumlah produksi dan kualitasnya sangat tergantung pada kondisi cuaca dan musim. Peningkatan penggunaan teknologi yang lebih efisien perlu dilakukan agar jumlah produksi garam lebih stabil dengan kualitas yang lebih baik serta memenuhi standar kebutuhan industri. Untuk komoditas rumput laut, persebaran kegiatan budidaya terutama berada di Kabupaten Indramayu, Karawang dan Bekasi. Rumput laut merupakan komoditas ekspor terutama ke negara China dalam bentuk bahan baku kering (*dried seaweed*). Untuk meningkatkan kontribusi komoditas rumput laut terhadap perekonomian daerah, langkah-langkah hilirisasi perlu dilakukan untuk menghasilkan nilai tambah produk serta meningkatkan skala ekonominya.

D. Peternakan

Di sektor peternakan Jawa Barat memberikan sumbangsih yang besar dalam mendukung ketahanan pangan terutama pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Ketersediaan produk peternakan di Jawa Barat secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kontribusi Jawa Barat dapat dilihat dari produksi dan populasi beberapa komoditas peternakan yang menonjol sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6 dan salah satu komoditas peternakan yang berkontribusi besar terhadap pemenuhan kalori dan protein hewani adalah produk susu segar. Jawa Barat adalah provinsi terbesar kedua yang menyumbang produksi susu segar nasional di bawah Provinsi Jawa Timur. Produksi susu segar di Jawa Barat sebagian besar dihasilkan oleh 3 (tiga) daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Gambar 2.6
Produksi Komoditas Peternakan Unggulan di Jawa Barat (Ton)

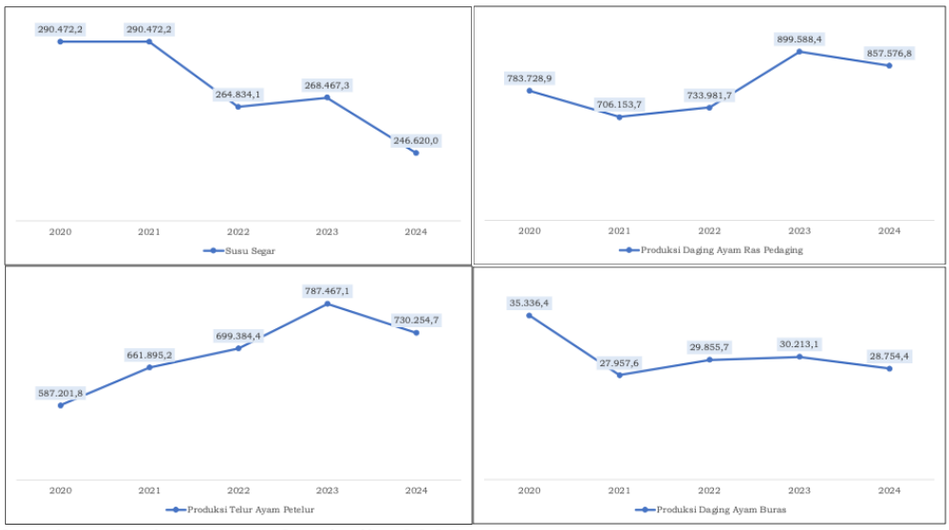

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain produksi beberapa komoditas peternakan unggulan, dari sisi populasi ternak, Jawa Barat memiliki beragam komoditas hewan ternak diantaranya; Sapi Perah sebanyak 99.692 ekor, Sapi Potong sebanyak 366.389 ekor, Kerbau sebanyak 50.140 ekor, Kuda sebanyak 5.331 ekor, kambing sebanyak 1.297.361 ekor, Domba sebanyak 6.971.877 ekor, Babi sebanyak 1.022 ekor, Ayam Buras sebanyak 27.999.261 ekor, dan Ayam Ras Pedaging sebanyak 703.869.673 ekor (BPS, 2025).

Gambar 2.7
Populasi Komoditas Peternakan Unggulan di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Ekor)

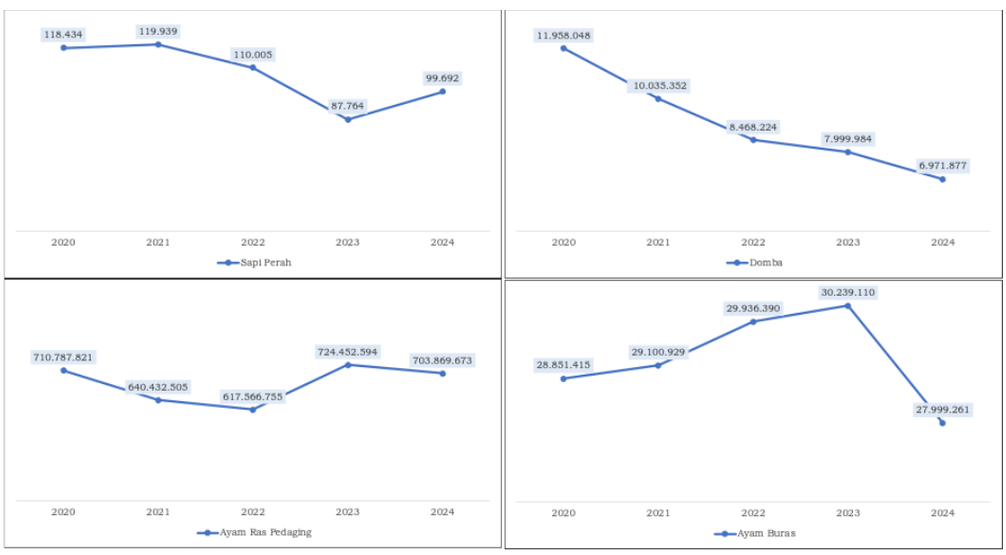

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Untuk sapi perah mengalami penurunan populasi pada tahun 2023 disebabkan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Upaya penanganan yang dilakukan telah mampu mengendalian penyebaran PMK, sehingga dapat memulihkan jumlah populasi sapi perah mulai dari tahun 2024.

Penurunan populasi ternak domba disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain itu, penyesuaian data populasi juga merujuk pada hasil Sensus Pertanian. Di samping berfungsi sebagai aset produktif, domba juga menjadi bentuk tabungan bagi peternak, yang kerap dijual saat menghadapi kebutuhan mendesak. Banyak peternak domba tangkas yang memiliki populasi ternak tidak banyak, namun bernilai tinggi.

Penurunan populasi ternak terjadi pada ayam buras. Hal ini disebabkan banyak konsumen dari para pedagang memilih ayam pejantan karena ayam pejantan harganya lebih murah, penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi harga pakan yang tajam, dan kondisi La Nina menyebabkan imun ternak rendah sehingga wabah penyakit mudah merebak seperti *Newcastle Disease* (ND) dan *Chronic Respiratory Disease* (CRD).

Meskipun mengalami penurunan jumlah populasi domba, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan populasi domba terbanyak dimana lebih dari 50 persen populasi domba secara nasional ada di Jawa Barat. Tidak hanya untuk pedaging, ternak domba oleh sebagian masyarakat dijadikan sebagai hewan ternak kesayangan dan adu ketangkasan khususnya Domba Garut. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Domba Garut sebagai plasma nutfah asli Indonesia.

Gambar 2.8
Populasi Domba di Pulau Jawa Tahun 2024 (Ekor)

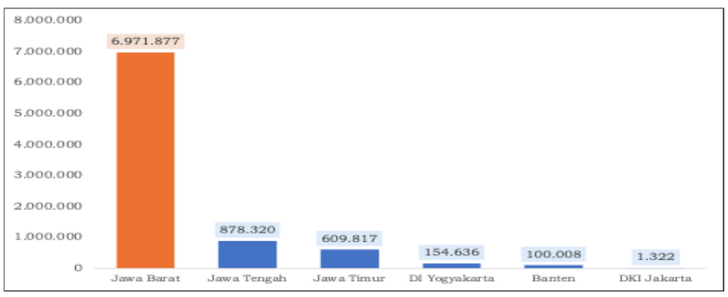

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

E. Kehutanan

Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh KLHK, Jawa Barat memiliki luas kawasan hutan sebesar ± 794.420,95 hektar atau sekitar 22 persen

dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Hutan Konservasi sebesar 172.179,78 Ha; Hutan Lindung sebesar 230.122,22 Ha; Hutan Produksi terbatas sebesar 180.009,43 Ha; dan Hutan Produksi tetap sebesar 212.310,69 Ha. Selain itu, di Jawa Barat terdapat hutan rakyat dengan luas 870.586 Ha atau 26,25 persen dari luas Jawa Barat, sehingga tutupan hutan di Jawa Barat mencapai 1.665.006,95 Ha.

Gambar 2.9
Peta Luas Kawasan Hutan Jawa Barat

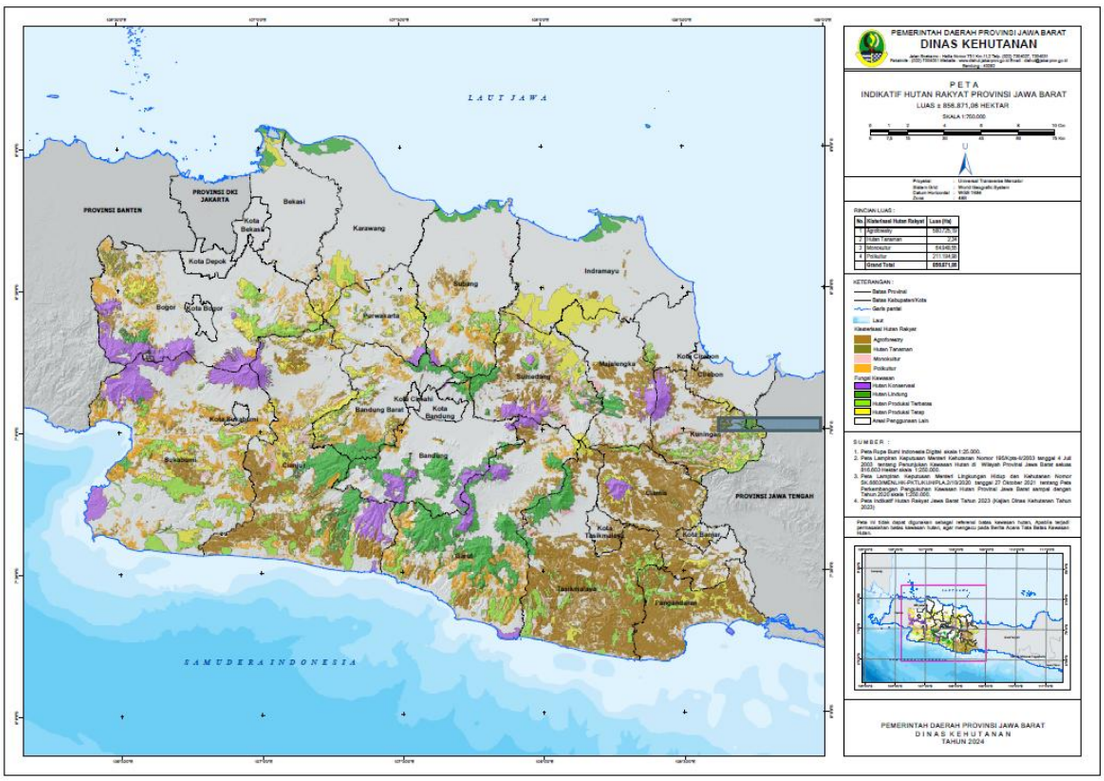

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2025

Kawasan hutan berfungsi utama sebagai pencegah perubahan iklim, perlindungan dan tata kelola air, namun dari sisi ekonomi, sektor kehutanan juga menyumbang nilai ekonomi melalui Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Produk yang dihasilkan HHK berupa kayu sebagai bahan bangunan, bahan dasar pembuatan *pulp and paper* (bubur kertas) dan bahan kerajinan. Jumlah produksi HHK didominasi oleh hutan rakyat (Selain hutan negara), dimana pada tahun 2023 jumlahnya sebanyak 193.552,90 m^3 yang terdiri dari jati sebanyak 9.498,92 m^3, mahoni sebanyak 10.222,50 m^3, pinus sebanyak 1.616,00 m^3,

sengon sebanyak 118.435,19 m^3, mangium sebanyak 1.270,73 m^3, rimba campuran sebanyak 43.400,38 m^3 serta produk lainnya.

Selain HHK, produksi HHBK juga turut andil dalam meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kehutanan di tingkat nasional. Dua komoditas yang saat ini cukup masif pengembangannya di Jawa Barat adalah beragam jenis bambu dan jamur. Adapun pada tahun 2023 jenis bambu yang paling banyak diproduksi adalah bambu tali dengan jumlah sebanyak 976.692,41 batang dan untuk jenis jamur yang paling banyak diproduksi yaitu jamur tiram putih sebanyak 1.175.789,17 kg.

Disamping sumber daya alam yang bernilai ekonomis, kawasan hutan konservasi juga dimanfaatkan menjadi tujuan wisata. Tercatat hingga tahun 2023 sudah ada 265 lokasi wisata kehutanan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat dengan total jumlah pengunjung mencapai 620.103 orang.

Meskipun cukup potensial dari sisi ekonomi, terdapat tantangan yang dihadapi sektor kehutanan Jawa Barat. Hingga tahun 2023, luas lahan kritis di Jawa Barat mencapai ± 829.556 hektar dengan status kritis dan sangat kritis. Perkembangan penanganan lahan kritis (Rehabilitasi hutan dan lahan) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2024 seluas 21.829,14 ha yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Penanganan lahan kritis akan menjadi fokus agenda pembangunan ke depan melalui rehabilitasi lahan, peningkatan fungsi kawasan hutan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

F. Pariwisata

Sektor pariwisata Jawa Barat memiliki potensi wisata yang beragam. Hingga tahun 2024, terdapat 1.430 destinasi wisata alam, 816 Wisata Buatan, serta 615 Desa Wisata yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Daya tarik wisata alam dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.10
Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Jumlah Destinasi Wisata Buatan

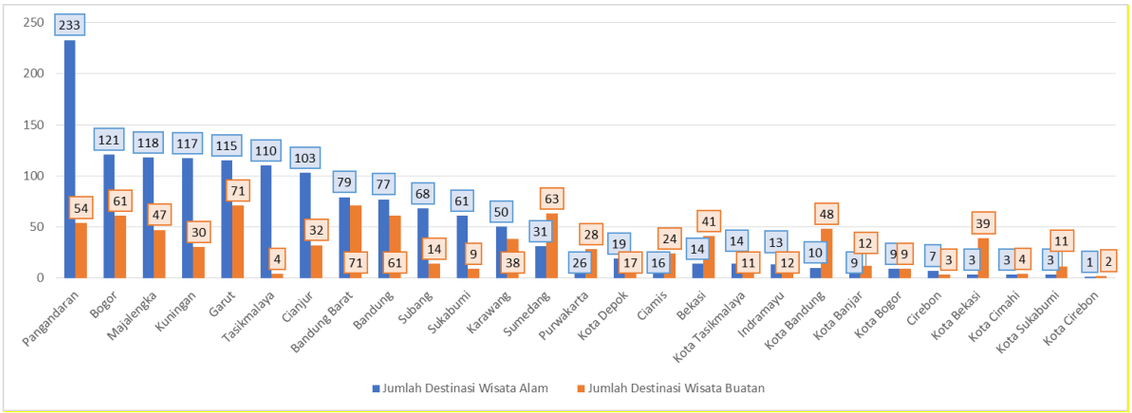

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2025, Diolah

Gambar 2.11
Jumlah dan Status Desa Wisata

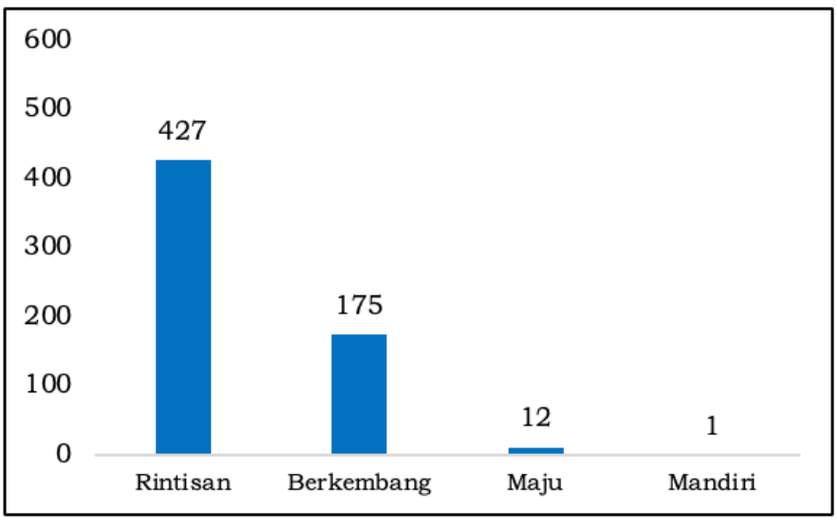

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

Sejalan dengan perkembangan destinasi wisata, kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 3 persen. Pada tahun 2024, tercatat total kunjungan wisatawan sebanyak 89,02 juta, terdiri dari 88,2 juta wisatawan nusantara dan 827 ribu orang wisatawan mancanegara. Secara nasional, jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat menduduki urutan ke 2 setelah Jawa Timur. Selain dari Jawa Barat, wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat pada umumnya berasal dari Jakarta serta daerah provinsi berdekatan. Berkembangnya pariwisata tersebut didukung oleh konektivitas infrastruktur wilayah seperti tol, Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta.

Gambar 2.12
Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2021-2024

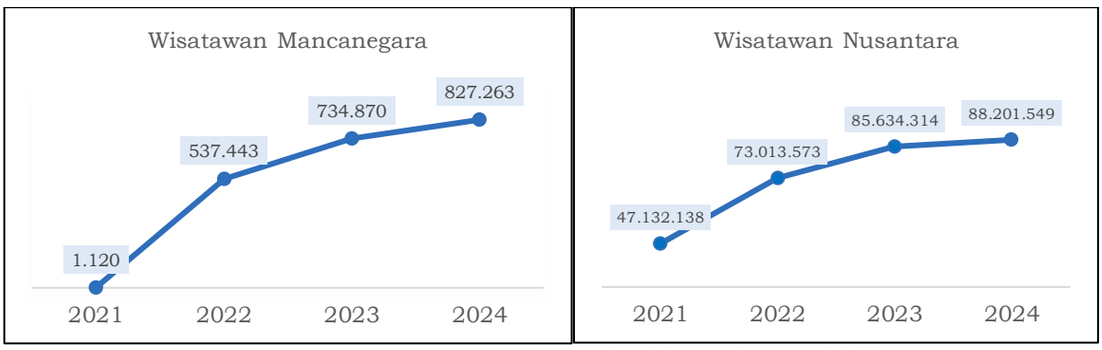

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2025

Berkembangnya sektor pariwisata juga memiliki keterkaitan dengan ekonomi kreatif. Dilihat dari PDB ekonomi kreatif, Jawa Barat merupakan provinsi dengan penyumbang tertinggi terhadap PDB ekonomi kreatif nasional sebesar 20,73 persen. Dari 17 (tujuh belas) sektor ekonomi kreatif, terdapat 4 (empat) sub sektor yang menjadi unggulan yaitu *fashion* (Bandung dan sekitarnya, Tasikmalaya, dan Garut), *game* (Bandung, Cimahi), kriya (Garut, Tasikmalaya) dan kuliner (Bandung). Pada tahun 2024, terdapat 1.892 pelaku ekonomi kreatif yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan sebaran dan jumlah (Gambar 2.13).

Kota Bandung memiliki jumlah pelaku ekonomi kreatif terbanyak dengan didominasi oleh subsektor ekonomi kreatif kuliner, *fashion*, dan kriya. Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif tersebut, pemerintah provinsi dan daerah telah mengembangkan *creative center/hub* untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di setiap daerah. Sampai dengan tahun 2024, Jawa Barat telah memiliki 10 (sepuluh) *creative centre/hub*, 3 (tiga) gedung *creative center* yang dikelola oleh Provinsi (Kota Bogor, Kota Cicebon, dan Kabupaten Purwakarta), 7 (tujuh) gedung *creative center* yang dikelola oleh kabupaten/kota (Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Subang).

Gambar 2.13
Sebaran dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024

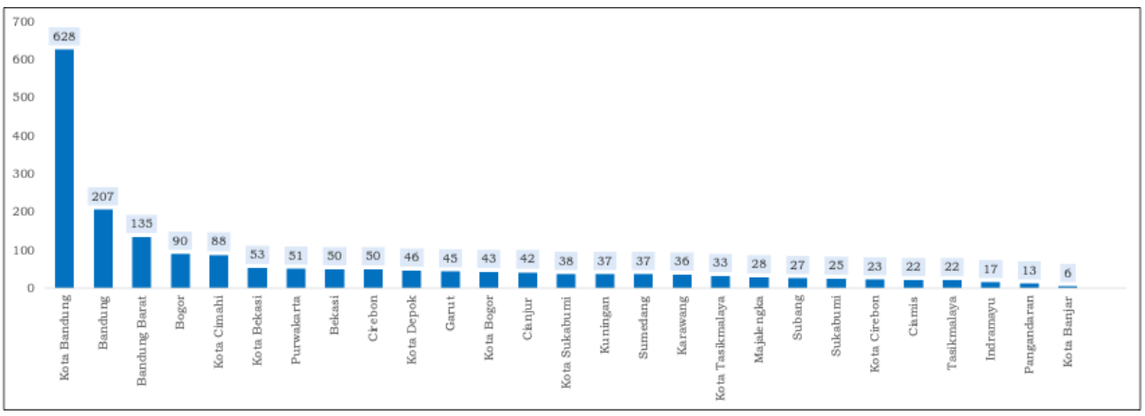

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2025, Diolah

Destinasi wisata yang sangat beragam tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari berbagai wilayah. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yang berdampak langsung pada mobilitas dan penutupan sektor pariwisata, pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan jumlah wisatawan melonjak menjadi 73,5 juta orang, menunjukkan mulai pulihnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Peningkatan signifikan kembali terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah wisatawan mencapai 88,2 juta orang, menandai hampir kembalinya aktivitas pariwisata ke kondisi sebelum pandemi. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan di Jawa Barat tercatat sebanyak 89,4 juta orang, menunjukkan stabilisasi pertumbuhan pariwisata dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Gambar 2.14
Jumlah Wisatawan di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024 (Juta Orang)

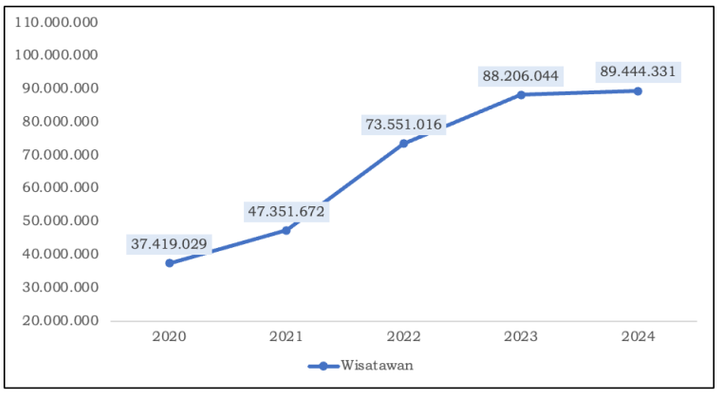

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, meliputi lahan pertanian subur, hutan, sumber daya air, pesisir, serta tambang mineral dan energi. Potensi ini mendukung sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, dan industri, sekaligus menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi daerah. Pemanfaatan yang berkelanjutan dan pengelolaan yang optimal menjadi kunci untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menggambarkan ketersediaan sumber daya alam untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, salah satunya direpresentasikan oleh besarnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan penyedia air dan pangan. Pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, hanya dilakukan analisis daya dukung lingkungan hidup, baik untuk penyedia air maupun penyedia pangan.

Status daya dukung lingkungan hidup penyedia air menunjukkan bahwa 60,07 persen dari luas wilayah di Jawa Barat belum terlampaui daya dukungnya, yang berarti ketersediaan air di wilayah tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan untuk aktivitas penduduk serta pemanfaatan lahan di wilayahnya.

Peta status daya dukung lingkungan hidup penyedia air Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.15 sebagai berikut.

Gambar 2.15
Status DDLH Penyedia Air Provinsi Jawa Barat

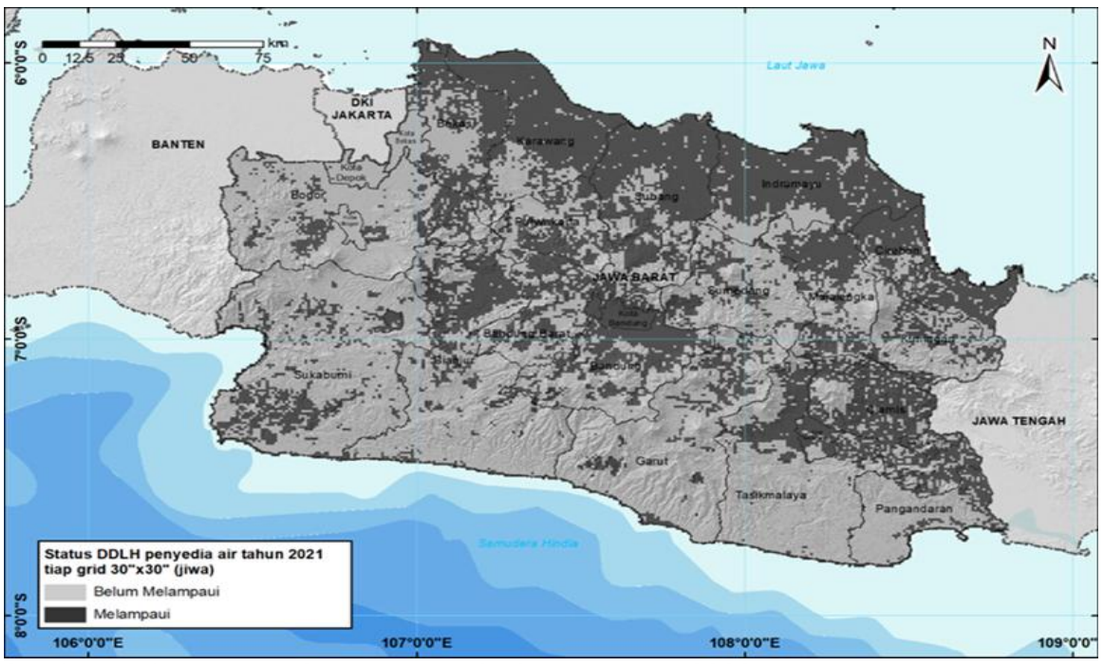

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat, 2023

Wilayah Jawa Barat yang telah terlampaui daya dukungnya berada di bagian utara, meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, serta di kawasan Metropolitan Bandung Raya, khususnya Kota Bandung dan Kota Cimahi. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah perkotaan dan wilayah industri yang memerlukan ketersediaan air cukup tinggi.

Untuk status daya dukung lingkungan hidup penyedia pangan, luas wilayah Jawa Barat yang belum terlampaui daya dukungnya adalah sebesar 63,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan di wilayah tersebut masih dapat terpenuhi oleh ketersediaan pangan di wilayah itu sendiri, serta dapat mendukung kebutuhan pangan di wilayah sekitarnya. Wilayah yang telah telah terlampaui daya dukungnya berada di wilayah kota dan perkotaan, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.

Peta status daya dukung lingkungan hidup penyedia pangan Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16
Status DDLH Penyedia Pangan Provinsi Jawa Barat

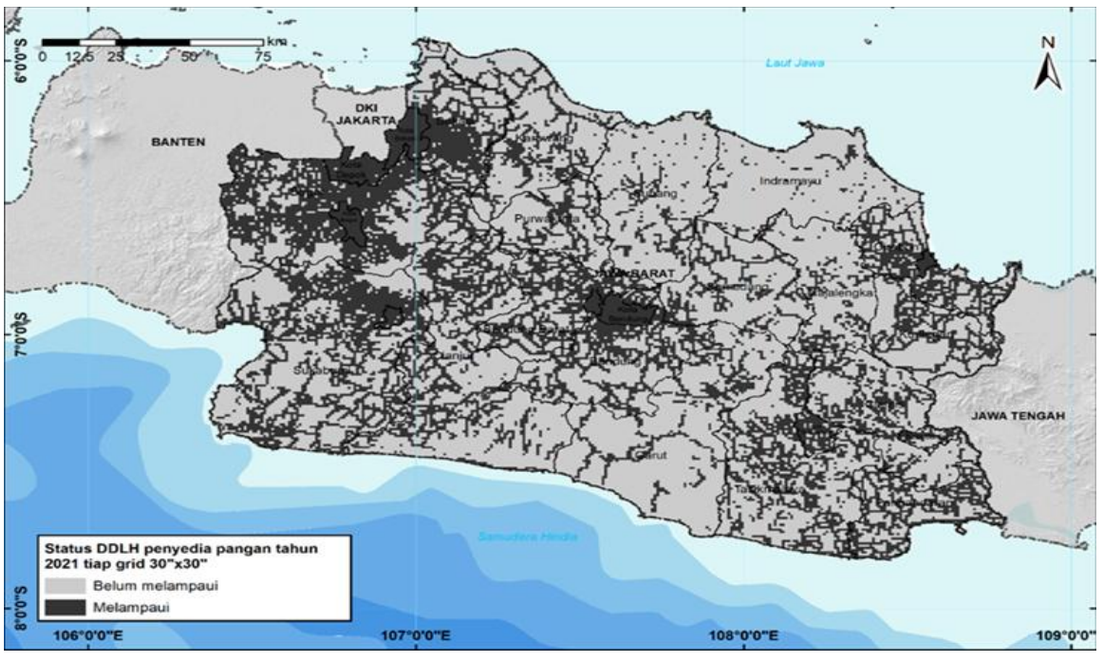

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat, 2023

Wilayah di Jawa Barat dengan daya dukung lingkungan hidup yang telah terlampaui, baik untuk penyedia air maupun penyedia pangan, pada umumnya adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk tinggi seperti halnya di kawasan perkotaan, juga wilayah dengan alih fungsi lahan yang tinggi.

Terdapat 5 (lima) jenis klasifikasi lahan yang dianggap krusial untuk di identifikasi kondisi eksisting pemanfaatannya serta ketersediaan lahan potensialnya berdasarkan rencana pola ruang. Kelima jenis klasifikasi lahan tersebut yaitu badan air, hutan, sawah, permukiman dan industri yang dipandang mampu memberikan efek bangkitan atau *multiplier effect* signifikan terhadap jenis penggunaan lahan lainnya dan berpengaruh terhadap pola perkembangan kawasan.

Gambar 2.17
Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

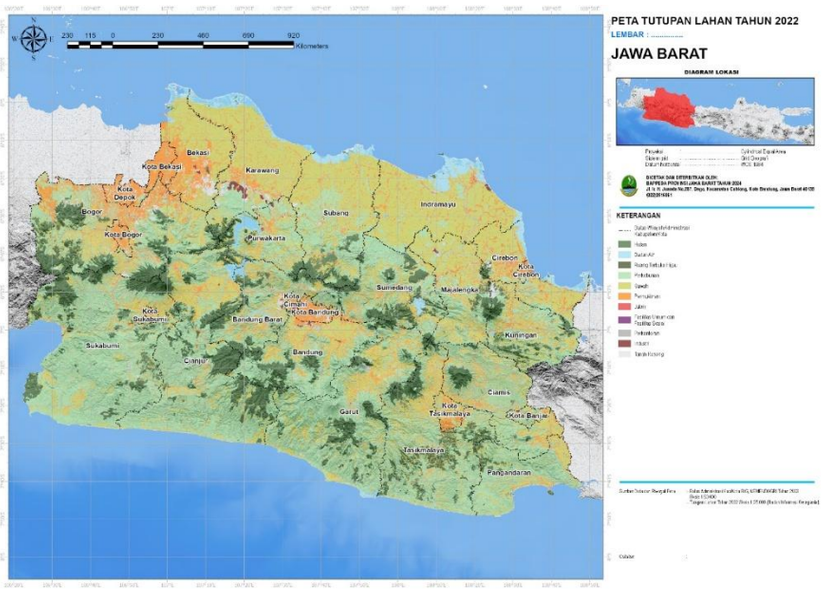

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2023

Gambar 2.18
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2042

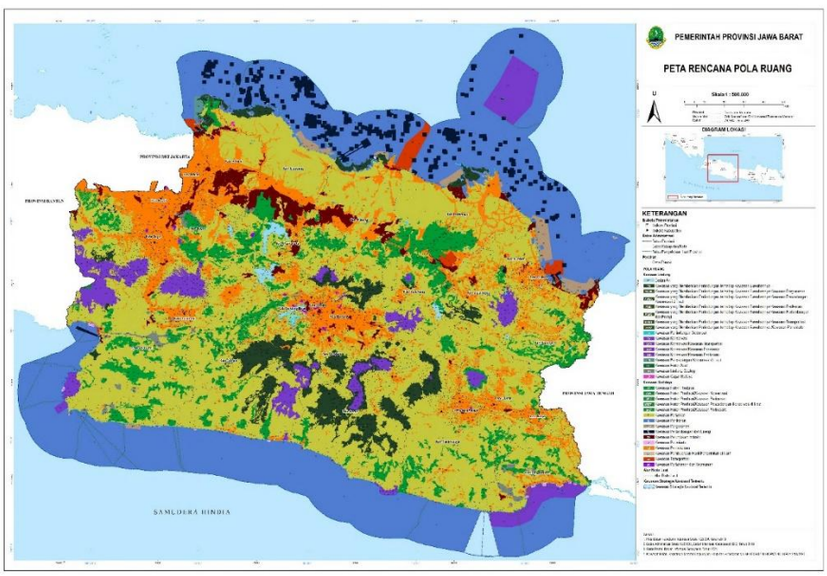

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Berdasarkan hasil sandingan antara tutupan lahan eksisting yang diperoleh dari peta tutupan lahan tahun 2022 dengan rencana pola ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, teridentifikasi bahwa masih terdapat sejumlah luasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan kawasan terbangun terutama kebutuhan hunian, Kawasan pertanian, hutan, industri dan badan air.

Untuk badan air, terdapat sebanyak 5.266 Ha lahan yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Hal ini dapat mendukung upaya penanganan persoalan banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat. Begitu pun dengan Kawasan hutan, dimana teridentifikasi terdapat 539.227 Ha lahan yang secara pola ruang dapat disesuaikan peruntukan lahannya menjadi Kawasan hutan. Hal ini, dapat mendukung upaya pencapaian Kawasan lindung 45 persen yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Potensi yang cukup besar lainnya yaitu dari sektor pertanian, teridentifikasi seluas 1.293.534 Ha yang dapat disesuaikan pemanfaatannya menjadi lahan pertanian terutama untuk lahan sawah. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya Jawa Barat untuk mempertahankan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), menjadi lumbung pangan nasional dan mendukung program ketahanan pangan. Dari sisi penggunaan lahan budidaya, masih terdapat seluas 336.628 Ha lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan permukiman, hal ini dapat mengakomodir kebutuhan hunian yang senantiasa bertambah di wilayah Jawa Barat. Dari sisi industri, terdapat potensi lahan seluas 106.073 dalam rencana pola ruang yang masih dapat dikembangkan untuk menjadi Kawasan peruntukan industri.

Tabel 2.6
Sandingan Tutupan Lahan dan Rencana Pola Ruang

No	Tutupan Lahan	Eksisting (Ha)	Pola Ruang (Ha)	Potensi Kesesuaian (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Badan Air	35.784	41.050	5.266	Badan Air: Sungai, Waduk, Tambak, Situ, dan Saluran Irigasi
2	Hutan	355.278	894.505	539.227	Hutan yang dimaksud pada rencana meliputi Hutan Konservasi, Hutan Adat, Hutan Lindung serta Hutan Produksi yang ada di pola ruang RTRW Provinsi Jawa Barat
3	Sawah	773.404	2.066.938	1.293.534	Sawah di Tutupan Lahan termasuk menghitung sawah eksisting yang berada di Kawasan Permukiman, di Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Industri termasuk sawah yang berada di Kawasan konservasi dan hutan lindung Kawasan Pertanian di Pola Ruang meliputi: Kawasan Tanaman Pangan untuk KP2B,

No	Tutupan Lahan	Eksisting (Ha)	Pola Ruang (Ha)	Potensi Kesesuaian (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Holtikultura, dan Kawasan Perkebunan;
4	Permukiman	288.157	624.785	336.628	Kawasan Permukiman
5	Industri	6.073	112.146	106.073	Industri yang dimaksud dalam rencana yaitu Kawasan Peruntukan Industri yang tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Barat

Sumber :Peta Tutupan Lahan Skala 1:25.000 Tahun 2022, BIG; Perda Nomor 12 tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat (Diolah)

Luas wilayah darat dan laut Jawa Barat mencapai 3,7 juta ha, dengan proporsi lahan pertanian seluas 2,1 juta ha dan luas lahan industri 112 ribu ha. Lahan pertanian terluas di Jawa Barat berada di Kabupaten Sukabumi (267 ribu ha), Cianjur (240 ribu ha), Tasikmalaya (203 ribu ha), dan Garut (195 ribu ha). Sementara itu wilayah industri terluas berada di Kabupaten Bekasi (24,2 ribu ha), Karawang (18,5 ribu ha), dan Subang (17,7 ribu ha). Sebagai daerah industri, Kabupaten Karawang dan Subang masih memiliki lahan pertanian yang cukup luas, yaitu sekitar 129 ribu ha dan 110 ribu ha.

Gambar 2.19
Perbandingan Jumlah Luas Lahan Pertanian dan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

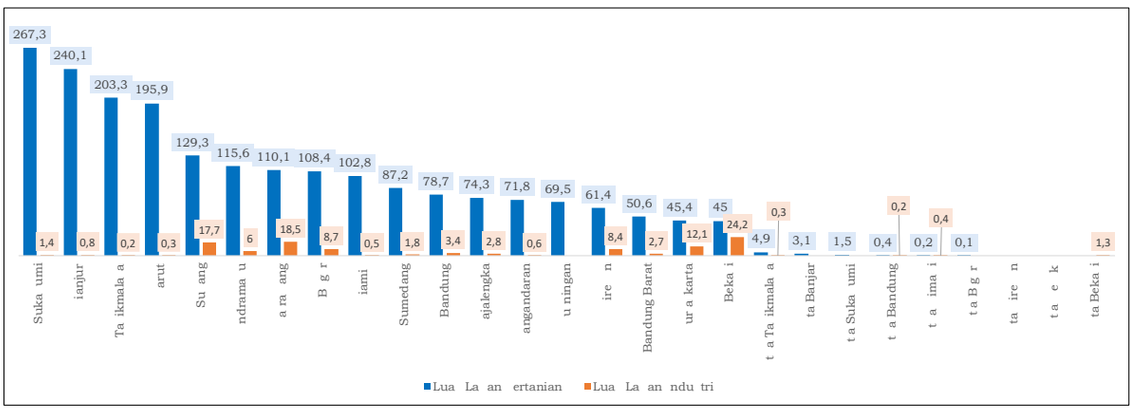

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Secara umum, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Jawa Barat masih memadai untuk memenuhi kebutuhan air dan pangan di sebagian besar wilayahnya, meskipun beberapa daerah perkotaan dan industri telah melampaui kapasitasnya. Tersedia potensi pemanfaatan lahan yang signifikan, meliputi badan air, hutan, sawah, permukiman, dan industri, yang dapat mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir, kelestarian lingkungan, serta penyediaan hunian dan kawasan industri.

Pemanfaatan potensi ini secara berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung pembangunan daerah.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Selama periode 2021 hingga 2024, Jawa Barat berkomitmen kuat dalam meningkatkan ketahanan energi daerah melalui berbagai kebijakan strategis, penguatan infrastruktur, serta pengembangan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Upaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Barat yang sejalan dengan target nasional transisi energi. Secara umum, ketahanan energi Jawa Barat ditunjukkan melalui 3 (tiga) capaian utama:

- Peningkatan Ketersediaan dan Akses Energi
- Percepatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
- Efisiensi dan Konservasi Energi

Jawa Barat berhasil menjaga pasokan energi listrik dan bahan bakar bagi masyarakat dan sektor industri, dengan realisasi rasio elektrifikasi mencapai lebih dari 99 persen, serta penambahan infrastruktur distribusi energi ke wilayah yang sebelumnya belum terjangkau, khususnya di kawasan selatan dan perdesaan.

Konsumsi listrik per kapita di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir (Gambar 2.20). Peningkatan konsumsi listrik per kapita secara bertahap dapat mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meluasnya akses dan penggunaan teknologi di berbagai sektor. Tren positif ini juga mencerminkan perbaikan dalam infrastruktur kelistrikan dan peningkatan daya beli masyarakat terhadap energi.

Gambar 2.20
Konsumsi Listrik Perkapita Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024 (kWh/kapita)

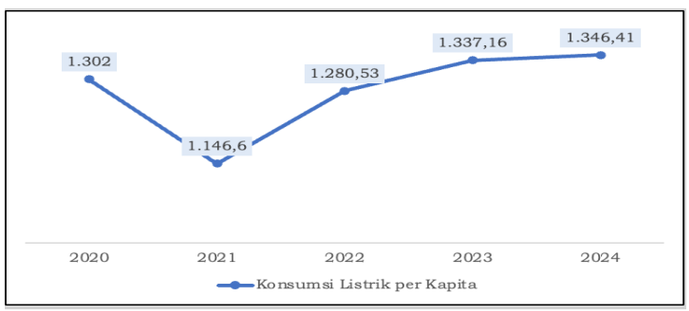

Sumber : LKIP Provinsi Jawa Barat, 2025

Penggunaan energi dari sumber fosil masih dominan di Jawa Barat, walaupun sejak 2021 sampai 2023 sudah ada peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam hal percepatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), Jawa Barat mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan EBT, antara lain:

- Pembangunan dan operasionalisasi PLTS Atap di gedung pemerintah dan sekolah, dengan total kapasitas terpasang meningkat signifikan sejak 2021.
- Pemanfaatan potensi panas bumi di Kamojang, Darajat, dan Gunung Salak sebagai bagian dari bauran energi nasional.
- Implementasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH), dan biogas skala kecil untuk komunitas pedesaan.

Gambar 2.21
Capaian Realisasi EBT Jawa Barat Tahun 2021-2023

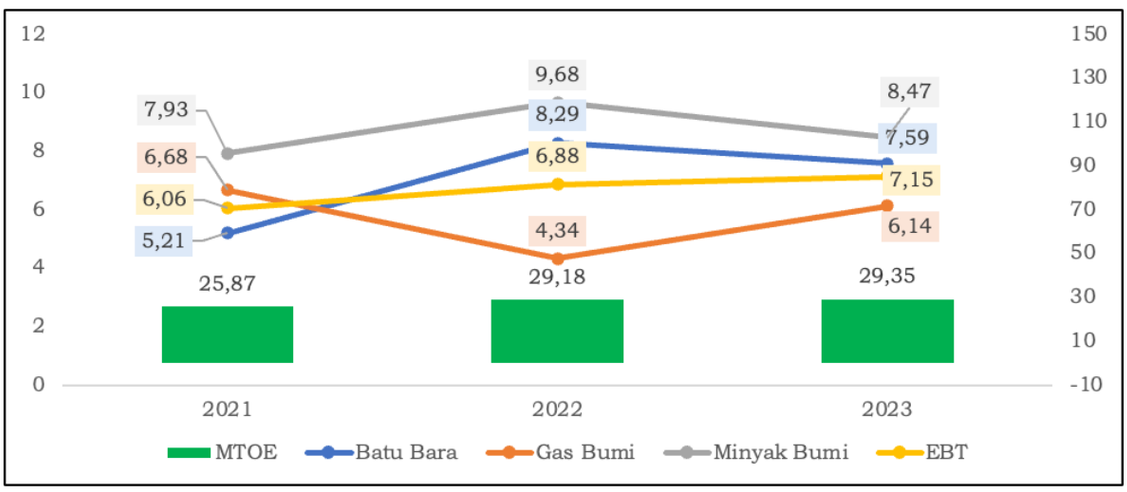

Sumber: Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, 2024

Jawa Barat juga mendorong efisiensi dan konservasi energi melalui regulasi bangunan gedung hijau, konversi lampu jalan ke LED, dan edukasi publik dalam pengurangan konsumsi energi. Selain itu, Jawa Barat mengembangkan *platform* pemantauan energi berbasis digital untuk transparansi dan evaluasi capaian.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi daerah, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon dan pencapaian target pembangunan rendah karbon sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK.

Selain berketahanan energi, upaya pemenuhan kebutuhan air menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, dengan dukungan 7 (tujuh) Wilayah Sungai dengan total panjang ± 38.537,76 km dengan 324 Daerah Aliran Sungai (DAS), panjang pantai utara dan selatan ± 724,85 km, serta infrastruktur pendukung seperti ± 831 situ (250 yang dikelola Provinsi), 20 (dua puluh) waduk, dan ribuan mata air. Potensi sumber daya air yang signifikan, meliputi ± 48 miliar m^3 air permukaan per tahun dan ± 888.590,93 ha daerah irigasi, adapun 7 (tujuh) WS tersebut yaitu :

1. Wilayah Sungai Citarum (Kab. Sumedang, Kab.Garut,Kab. Cianjur, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab Bandung Barat, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bogor, Kab.Bekasi, Kab.Sukabumi, dan Kota Cimahi);
2. Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane (Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab Bekasi);
3. Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, dan Kota Cirebon);
4. Wilayah Sungai Citanduy (Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab Garut dan Kabupaten Pangandaran);
5. Wilayah Sungai Cisadea – Cibareno (Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur);
6. Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya , Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cianjur); dan
7. Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian (Kab.Bogor sebagian)

DAS terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah DAS Citarum yang mencapai luas 18,40 persen dari luas Provinsi Jawa Barat. Sampai tahun 2018 di Jawa Barat terdapat DAS dengan kondisi kritis dan sangat kritis. Ada sebanyak 215 DAS dari 324 DAS di Provinsi Jawa Barat yang diketahui termasuk dalam kategori kritis dan sangat kritis. DAS dengan luas tingkat kekritisan sangat besar adalah DAS Citarum, yang mencapai 199.176,70 ha.

Gambar 2.22
Peta Kekritisan Daerah Aliran Sungai Jawa Barat

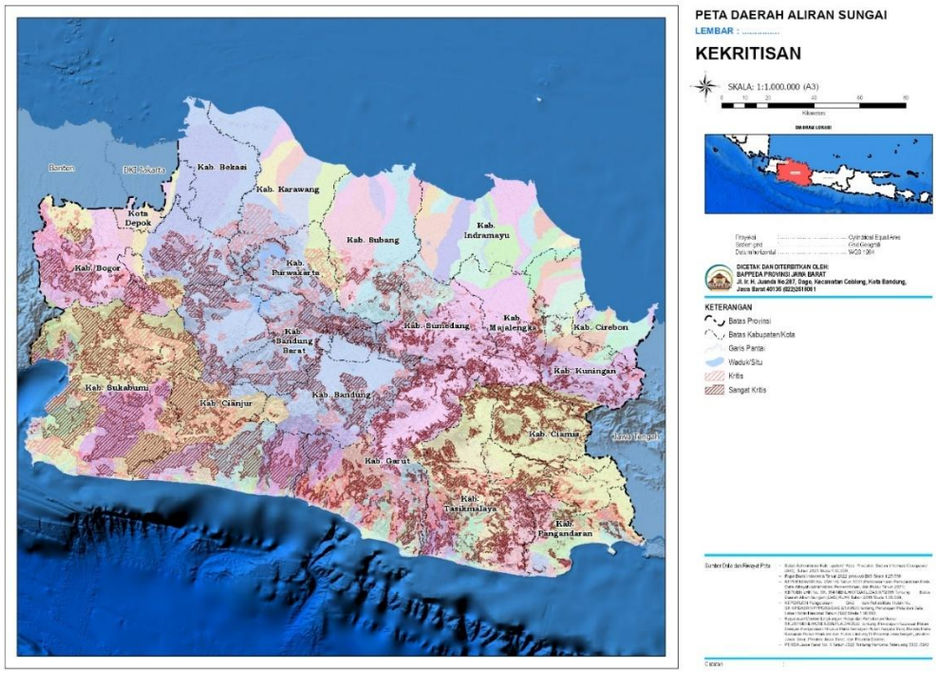

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar, berdasarkan data capaian Indeks Penggunaan Air (IPA) bahwa optimalisasi pemenuhan kebutuhan air dapat terwujud, sehingga dapat berkontribusi juga pada penyediaan akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum, serta kebutuhan air sektor lainnya.

Gambar 2.23
IPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

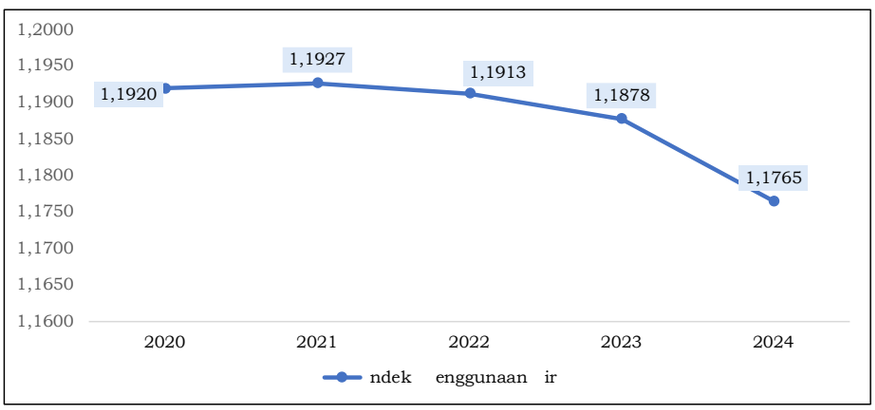

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya air yang besar, sebagaimana (Gambar 2.23). Selama Tahun 2021-2024, penggunaan air mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air sudah bertambah bila disandingkan terhadap kebutuhannya. Sehingga ketersediaan air di Jawa Barat masih dapat memenuhi kebutuhan air untuk penggunaan rumah tangga, industri, dan pertanian.

Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan air minum di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2021-2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian akses air minum layak di Provinsi Jawa Barat menggambarkan pelayanan air minum semakin baik dan menjangkau berbagai wilayah.

Gambar 2.24
Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2024

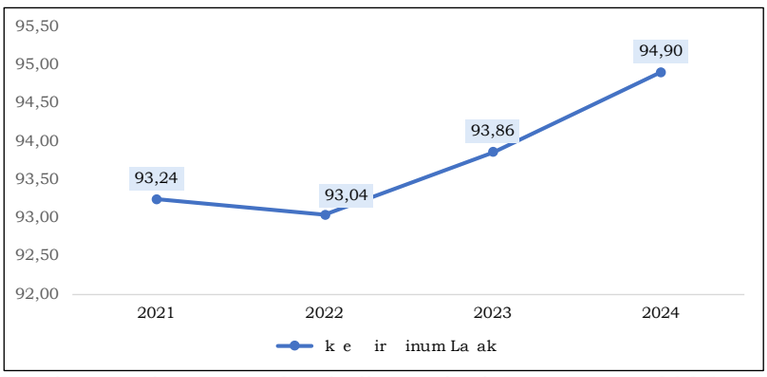

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025

Terkait dengan ketahanan pangan, Provinsi Jawa Barat mencatat nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tahun 2024 sebesar 82,97, yang menempatkan Jawa Barat pada peringkat ke-8 nasional, berada diatas rata-rata nilai nasional sebesar 78,17. Capaian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Jawa Barat berada dalam kategori baik, yang berarti bahwa Provinsi Jawa Barat mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, baik dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatannya.

Gambar 2.25
IKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Poin)

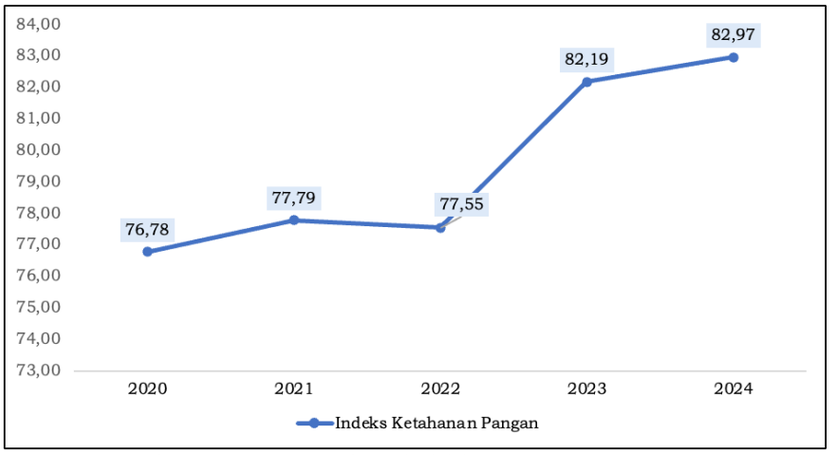

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Secara kewilayahan, Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Depok 3 wilayah yang memiliki nilai IKP tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bekasi sebagai kota dengan nilai IKP tertinggi ke-2 di tingkat Nasional setelah Kota Denpasar Bali. Capaian ini menunjukkan ketahanan pangan di daerah perkotaan besar cenderung lebih kuat dibandingkan daerah lain karena didukung oleh infrastruktur, distribusi pangan, dan daya beli masyarakat yang lebih baik. Sebaliknya, Kabupaten bogor dan Kota Tasikmalaya memiliki nilai IKP yang rendah dan berada dibawah ratah-rata nasional (75,11%). Kondisi tersebut menandakan adanya tantangan lebih besar dalam aspek aksesibilitas, produksi, atau pemanfaatan pangan di wilayah tersebut.

Gambar 2.26
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 (Poin)

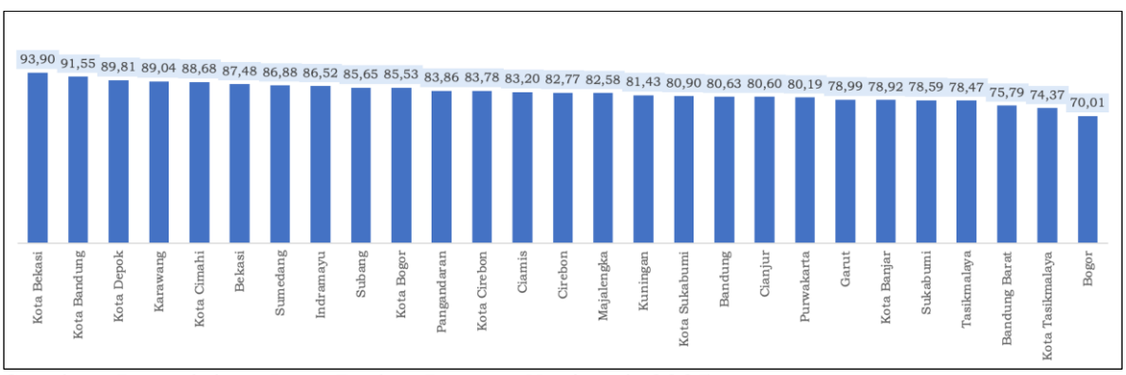

Sumber: Pengolahan Data Badan Pangan Nasional, 2025

Selain itu, terdapat indikator yang dapat menggambarkan kondisi pangan yaitu Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU), ketidakcukupan konsumsi pangan disini identik dengan ketidakcukupan energi. Berdasarkan data tahun 2024, PoU di Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 5,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2024 terdapat 5,99 persen atau 3,01 juta jiwa penduduk Jawa Barat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif. Ideal kebutuhan konsumsi energi dan protein berdasar WNPG 2018 adalah 2.100 kkal/kapita/hari dan 57 gram protein/kapita/hari.

Gambar 2.27
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2024 (Persen)

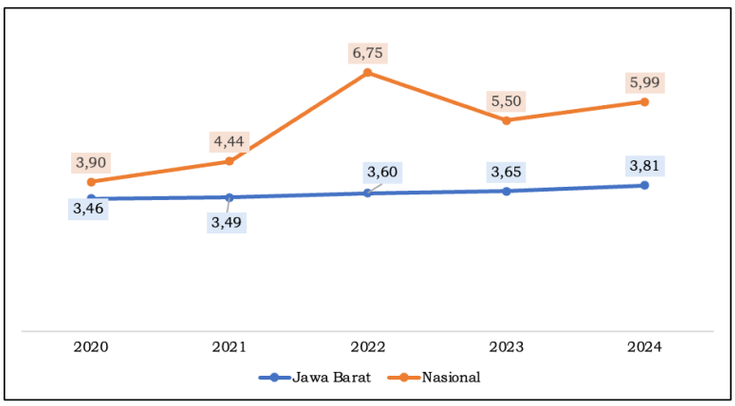

Sumber: Pengolahan Data Badan Pangan Nasional, 2025

Jawa Barat memberikan peran dalam penyediaan pangan untuk nasional dengan produksi beras 8,6 juta ton pada tahun 2024 (BPS, 2024), sehingga ditetapkan sebagai penumpu pangan bersama dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan data pangan yang dihasilkan diketahui Jawa Barat surplus untuk komoditi beras, jagung, kedelai bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Neraca Pangan Jawa Barat Tahun 2024 (Ton)

No	Komoditas	Perkiraan Ketersediaan					Perkiraan Kebutuhan (Ton)	Neraca (Ton) (7-8)
		Stok Akhir 2023 (Ton)	Perkiraan Produksi (Ton)	Perdagangan Antar Wilayah		Total (Ton) (3 + 4 + 5)		
				Pemasukan dari Wilayah Lain (Ton)	Pengiriman Ke Wilayah Lain (Ton)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Beras	1,668,196	4,917,068	577,570	109,062	7,053,772	6,424,790	628,982
2	Jagung	915,128	751,113	426	71,609	1,595,059	1,330,226	264,833
3	Kedelai	-	12,606	425,256	-	437,862	396,351	41,510
4	Bawang Merah	150	97,596	53,470	2,337	148,878	146,056	2,822
5	Bawang Putih	30,991	190	55,810	-	86,991	87,034	-43
6	Cabai Besar	2,992	155,985	15	24	158,969	153,557	5,411
7	Cabai Rawit	-	52,370	109,861	-	162,231	169,893	-7,662
8	Daging Sapi/Kerbau	117,739	23,655	45,463	-	186,857	176,909	9,947
9	Daging Ayam Ras	55,482	840,027	-	18	895,491	826,348	69,143
10	Telur Ayam Ras	-	828,479	50	376,154	452,375	410,747	41,627
11	Gula Pasir	100,649	146,676	58,300	3,350	302,275	318,328	-16,053
12	Minyak Goreng	6,508	8,083	524,840	49,545	489,886	521,073	-31,187

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2025

Bahan pangan yang tersaji pada Dari Tabel 2.7 merupakan pangan yang termasuk dalam *volatile food*, yaitu bahan makanan yang harganya sering mengalami fluktuasi atau naik-turun secara signifikan. Fluktuasi ini seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti panen, gangguan alam (misalnya cuaca ekstrem), atau perubahan harga komoditas pangan di pasar domestik dan internasional.

Provinsi Jawa Barat memiliki ketahanan energi, air, dan pangan yang cukup baik melalui pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan rasio elektrifikasi, dan efisiensi energi. Ketersediaan air didukung oleh potensi sumber daya air yang besar, meskipun sebagian daerah aliran sungai masih dalam kondisi kritis. Ketahanan pangan tergolong baik dengan surplus berbagai komoditas utama, meski masih ada wilayah dengan akses pangan rendah. Secara keseluruhan, pemanfaatan potensi ini mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi Lingkungan Hidup Jawa Barat dapat direpresentasikan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan komposit dari beberapa indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024

mencapai 66,09, hal ini mencerminkan perbaikan kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat. Capaian IKLH Provinsi Jawa Barat disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.28
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Poin)

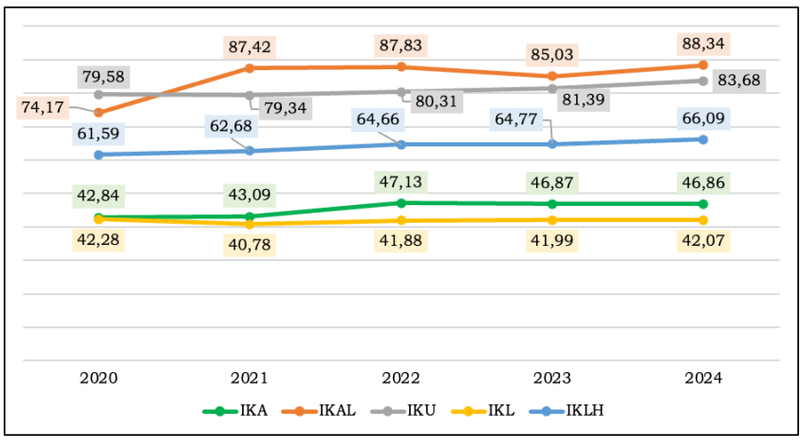

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Air (IKA) diukur melalui pemantauan kualitas air pada 11 (sebelas) sungai, yang terdiri atas 4 (empat) sungai di bawah kewenangan Pemerintah Pusat dan 7 (tujuh) sungai di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemantauan ini menggunakan 11 (sebelas) parameter kualitas air. Peningkatan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) didukung oleh berbagai upaya penanganan DAS Prioritas, diantaranya pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang dilaksanakan secara *pentahelix* melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018. Selain DAS Citarum, di tahun 2025 Jawa Barat telah menyusun Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025, serta sedang akan menyusun Rancangan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Kali Bekasi. Selain Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat pun sedang menyusun Rencana Aksi untuk DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya di Jawa Barat.

Dalam kaitannya dengan IKAL, Jawa Barat melakukan pemantauan kualitas air laut dilakukan di 2 (dua) titik pantau yang mewakili pantai utara dan pantai selatan Jawa Barat, dengan parameter yang diukur meliputi padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), ammonia

total (NH3-N), orto fosfat (PO4-P), serta minyak dan lemak. Sama seperti IKA, sumber pencemar yang dapat mempengaruhi nilai dari IKAL adalah limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah pertambangan.

Untuk menilai pencemaran udara serta kualitas udara ambien, Indeks Kualitas Udara (IKU) digunakan untuk menggambarkan kondisi dan perubahan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dilakukan di 27 kabupaten/kota dengan parameter yang diuji meliputi sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Pemantauan dilakukan pada 4 (empat) titik yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, permukiman padat penduduk, dan kawasan perkantoran.

IKL merupakan nilai kuantitatif yang mencerminkan kemampuan lahan dalam mendukung fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. IKL dihitung berdasarkan beberapa parameter seperti kandungan bahan organik tanah, erosi lahan, kualitas tutupan lahan, ketersediaan air tanah, kepadatan pembangunan atau alih fungsi lahan. Kawasan dengan IKL tinggi umumnya berada di daerah dataran tinggi seperti Lembang, Garut Selatan, dan sebagian Sukabumi, yang masih didominasi hutan dan lahan pertanian produktif. Sedangkan IKL rendah banyak ditemukan di wilayah metropolitan seperti Bandung Raya, Bekasi, dan Bogor bagian tengah, akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman, industri, dan infrastruktur. Beberapa tantangan dalam upaya peningkatan IKL diantaranya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun yang terus meningkat, terutama di kawasan aglomerasi, erosi tanah di kawasan hulu seperti DAS Citarum dan Cimanuk, penurunan tutupan vegetasi akibat deforestasi dan degradasi lahan, serta peningkatan aktivitas industri dan transportasi yang mempercepat degradasi kualitas tanah dan air.

Pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Cakupan pelayanan persampahan di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal ditunjukkan oleh akses penanganan sampah di perkotaan yang mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 70,77 persen. Penurunan capaian ini disebabkan karena masih kurangnya tingkat layanan persampahan dan kondisi sarana prasarana persampahan yang dimiliki oleh kabupaten/kota masih belum memadai. Berikut ini adalah capaian Akses

Penanganan Sampah di Perkotaan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021-2024 (Gambar 2.29).

Gambar 2.29
Capaian Akses Penanganan Sampah di Perkotaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

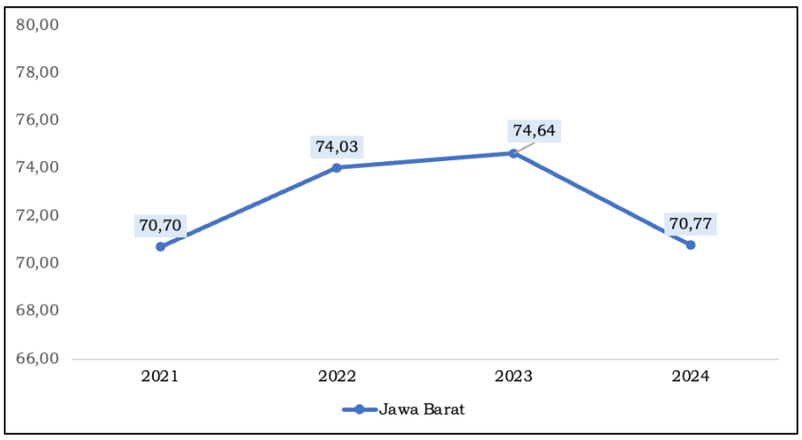

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, tren timbulan sampah di tingkat kabupaten/kota terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi. Peningkatan volume sampah tersebut belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, maupun kelembagaan. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten/Kota (Tabel 2.8).

Tabel 2.8
Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah Tahun 2022 - 2024 (Ton/Hari)		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	2,813.51	2,813.51	2,813.51
2	Sukabumi	1,708.00	1,090.14	1,643.50
3	Cianjur	1,267.00	1,267.50	1,267.50
4	Bandung	1,283.16	1,301.53	1,312.21
5	Garut	1,112.25	1,121.82	1,145.92
6	Tasikmalaya	1,316.00	705.33	698.29
7	Ciamis	574.68	499.11	501.02
8	Kuningan	599.40	599.41	599.41
9	Cirebon	1,250.33	1,274.64	1,274.64
10	Majalengka	971.02	1,047.00	670.97

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah Tahun 2022 - 2024 (Ton/Hari)		
		2022	2023	2024
11	Sumedang	442.72	478.92	482.27
12	Indramayu	1,113.65	1,124.95	1,136.54
13	Subang	997.32	659.93	665.26
14	Purwakarta	404.00	160.40	418.28
15	Karawang	1,003.94	1,254.92	1,066.97
16	Bekasi	2,250.35	2,219.00	1,683.46
17	Bandung Barat	572.56	742.74	742.74
18	Pangandaran	70.00	176.07	176.07
19	Kota Bogor	744.46	779.81	779.81
20	Kota Sukabumi	180.35	184.41	184.41
21	Kota Bandung	1,594.18	1,609.77	1,496.31
22	Kota Cirebon	209.06	212.84	216.35
23	Kota Bekasi	1,830.63	1,747.34	1,747.34
24	Kota Depok	1,337.70	1,000.00	1,363.00
25	Kota Cimahi	275.46	230.21	231.96
26	Kota Tasikmalaya	319.11	323.17	333.44
27	Kota Banjar	85.67	86.64	86.64
Jawa Barat		26,326.49	24,711.11	24,737.82

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, diolah, 2025

Salah satu tantangan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat adalah minimnya jumlah sarana pengangkutan sampah yang tersedia. Banyak daerah belum memiliki jumlah armada truk pengangkut sampah yang memadai dibandingkan dengan volume timbulan sampah harian yang terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan tidak semua sampah dapat terangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir secara rutin, sehingga menimbulkan penumpukan sampah di TPS, lingkungan permukiman, hingga di ruang-ruang publik. Disamping itu masih terbatasnya sarana prasarana pengolah persampahan di kabupaten/kota seperti TPS3R dan TPST dan juga masih berlangsungnya praktek pengelolaan TPA yang bersifat *open dumping* membuat penumpukan sampah tersebut semakin tidak terkendali, dan terjadi kedaruratan sampah pada beberapa kabupaten/kota.

Selain persampahan, sektor sanitasi (air limbah domestik) juga menjadi infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat. Capaian akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya konsisten dari

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dalam memperluas layanan dasar, khususnya dalam pengelolaan sanitasi yang aman, termasuk pembangunan jamban sehat, tangki septik, dan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lebih terkontrol. Capaian tahun 2021 hingga tahun 2024 tergambar pada gambar berikut.

Gambar 2.30
Capaian Akses Sanitasi Layak
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

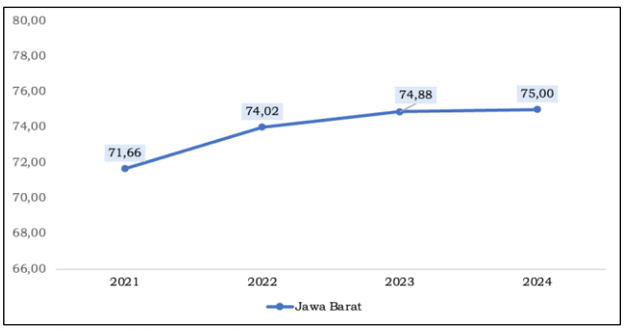

Sumber: BPS, 2025

Meski terjadi peningkatan capaian di setiap tahunnya, capaian tersebut masih belum memenuhi target dari tahun 2021 hingga tahun 2023 sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024. Seluruh capaian ini masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama di wilayah perdesaan dan kawasan kumuh perkotaan, yang menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur sanitasi. Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Jawa Barat belum sepenuhnya tertangani secara sistematis. Sebagian besar rumah tangga masih mengandalkan sistem sanitasi individu yang tidak selalu memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, seperti tangki septik tanpa resapan atau pembuangan langsung ke badan air. Infrastruktur sistem pengolahan terpusat, seperti IPAL Komunal dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), masih terbatas jumlah dan kapasitasnya, dan belum tersebar merata di seluruh kabupaten/kota. Keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan, pengelolaan teknis, serta kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mempercepat cakupan layanan sanitasi aman dan pengolahan air limbah yang berkelanjutan.

Kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat menunjukkan tren perbaikan dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,

meskipun masih dihadapkan pada tantangan besar seperti fluktuasi harga pangan, alih fungsi lahan, pencemaran air dan udara, serta pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum optimal. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan masih memerlukan peningkatan infrastruktur, teknologi, dan kesadaran masyarakat, sementara risiko bencana alam dan perubahan iklim tetap tinggi akibat faktor geologi, curah hujan, dan potensi tsunami di wilayah selatan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana yang tinggi. Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Jawa Barat secara geologi terletak di sebelah Utara lajur pertemuan 2 (dua) lempeng aktif yang saling bertumbukan. Kedua lempeng tektonik yang saling bertumbukan tersebut adalah Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eropa-Asia. Sumber-sumber potensi penyebab bencana alam di Jawa Barat yang perlu diwaspadai adalah 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di Selatan Jawa Barat.

Wilayah Provinsi Jawa Barat terletak pada jalur *Circum Pacific* dan mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi yang masih aktif bekerja sehingga memiliki resiko gempa bumi. Bahaya lingkungan beraspek geologi yang sering terjadi di Jawa Barat antara lain masalah kegempaan, letusan gunung api dan aliran lahar, longsor (gerakan tanah), perubahan garis pantai dan erosi tebing sungai. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, serta banjir di wilayah Utara Jawa Barat dan Cekungan Bandung. Selain itu, wilayah Selatan Jawa Barat secara geologis memiliki kerentanan terhadap bencana Tsunami.

Kawasan rawan bencana banjir di Jawa Barat terkonsentrasi di Pesisir Pantai Utara Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan DAS Cipunagara), Cekungan Bandung (DAS Citarum), dan Kabupaten Ciamis (DAS Citanduy).

Adapun isu mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, meliputi: mitigasi tsunami pada zona megathrust pantai selatan; penanganan bencana yang belum optimal karena terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat; mitigasi bencana dan perubahan iklim; timbulnya abrasi di pesisir laut yang menyebabkan luas daratan berkurang; dan perlindungan sosial adaptif serta belum optimalnya Tindakan memanipulasi atau pengendalian cuaca secara sengaja. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan bencana di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.31
Peta Bahaya Letusan Gunung Api

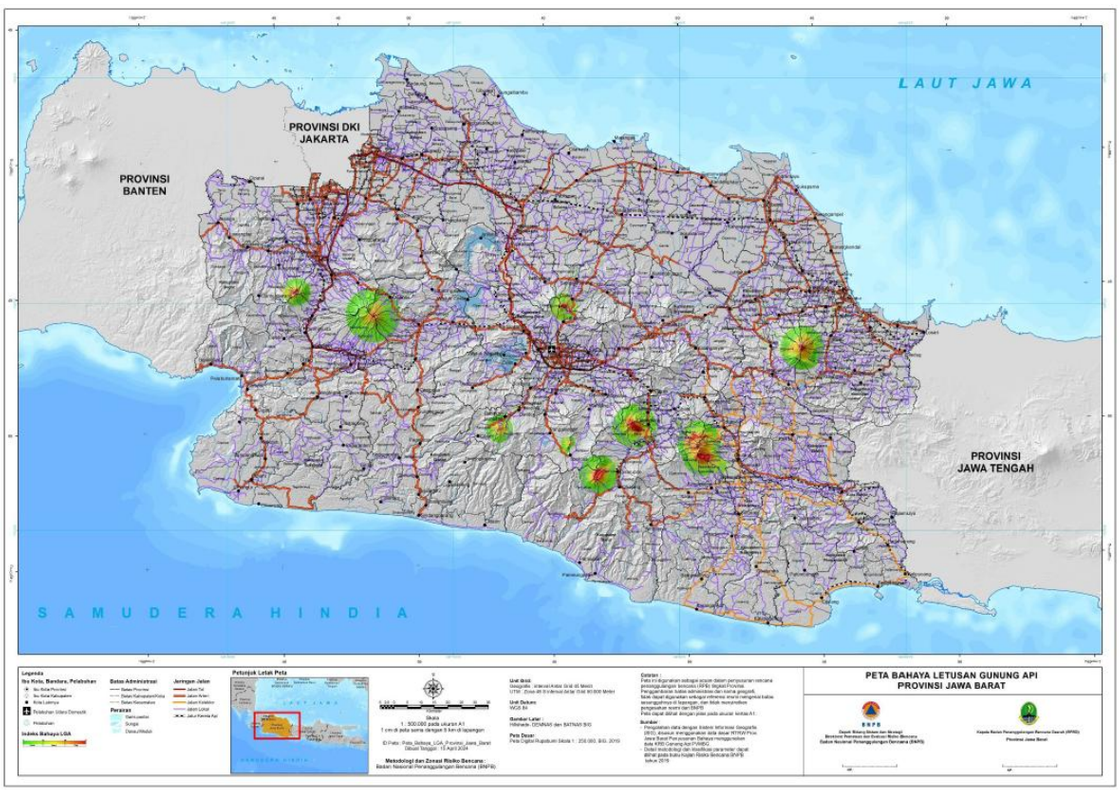

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2025

Gambar 2.32
Peta Bahaya Tsunami

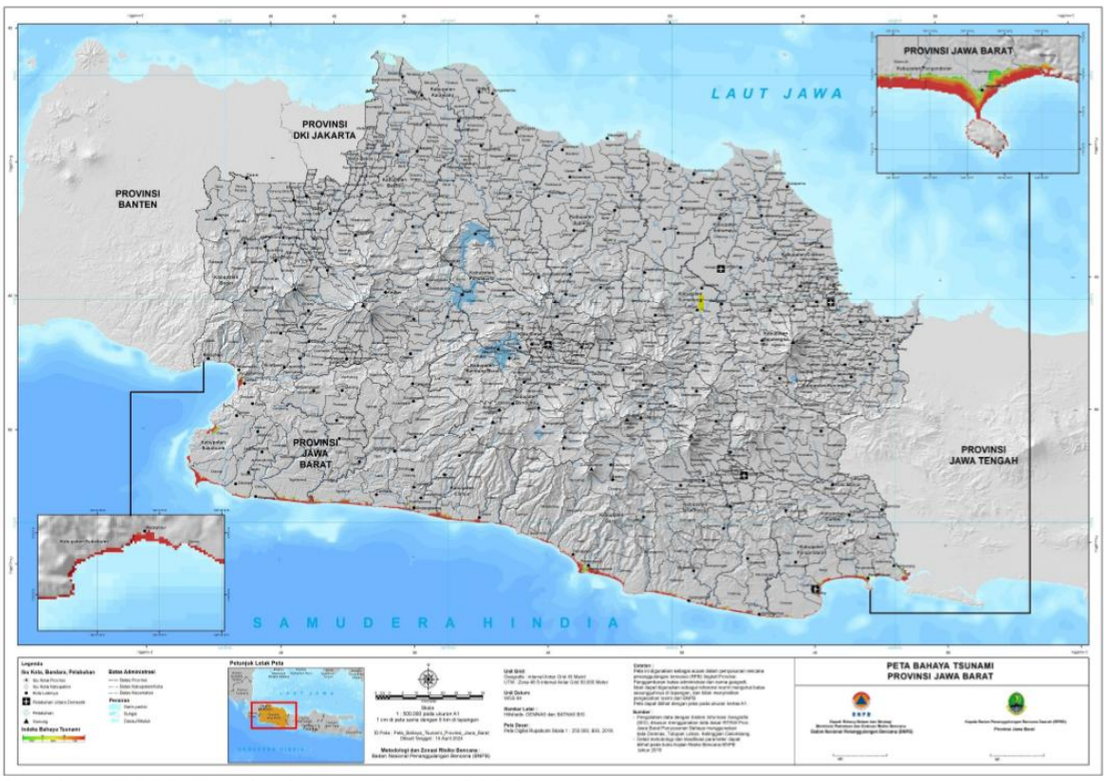

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2025

Gambar 2.33
Peta Bahaya Tanah Longsor

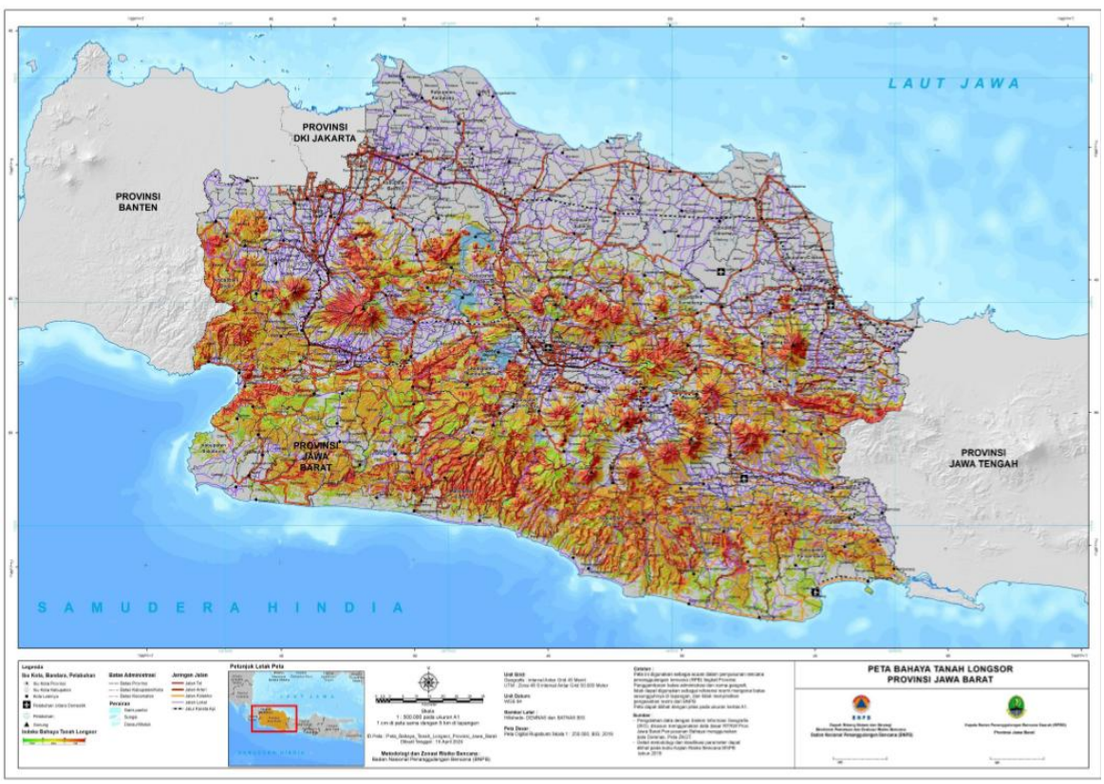

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2025

Gambar 2.34
Peta Bahaya Gempa Bumi

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2025

Gambar 2.35
Peta Bahaya Banjir

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 2.9
Sebaran Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Jawa Barat

No	Kawasan Rawan Bencana	Lokasi
1	Letusan Gunung Api	Gunung Ciremai, Gunung Gede Pangrango, Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Patuha, Gunung Salak, Gunung Talaga Bodas - Galunggung, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Wayang - Windu.
2	Tsunami	Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran
3	Tanah Longsor	Bandung, Bogor, Kota Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya
4	Gempa Bumi	Rawan Bencana Tinggi: Sukabumi, Kota Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Purwakarta, Bandung, Sumedang, Garut, Subang, Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Kota Cirebon, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya Rawan Bencana Menengah: Kota Bogor, Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat, Subang, Indramayu, Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran
5	Banjir	Bandung Barat, Bogor, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Kota Bandung, Ciamis, Pangandaran, Sukabumi, Kota Tasikmalaya

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat 2024-2028

Capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2020-2024 mengalami tren yang terus menurun, artinya terjadi penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga risiko bencana yang ditimbulkan mengalami penurunan.

Tabel 2.10
Capaian Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024 (Poin)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Risiko Bencana	145,81	134,94	131,62	123,16	114,15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Secara kategori pada tahun 2024 IRBI Jawa Barat memperoleh nilai 114,15 yang berada pada kategori Sedang, sehingga masih perlu untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana agar memperoleh nilai yang lebih baik lagi.

Sebaran Indeks Risiko Bencana 2024 di Kabupaten/Kota juga menunjukkan tren penurunan tahun 2023 ke 2024 untuk sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat. sebagai tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.11
Data Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Poin)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sukabumi	190,75	192,40	186,61	178,12	168,97	Tinggi
2	Cianjur	215,08	197,08	207,62	185,14	165,17	Tinggi
3	Tasikmalaya	203,01	186,51	174,11	159,14	145,50	Tinggi
4	Karawang	174,43	165,58	157,81	152,32	142,06	Sedang
5	Kuningan	131,13	131,13	113,58	125,80	141,55	Sedang
6	Garut	205,52	185,00	164,91	147,39	134,75	Sedang
7	Subang	171,91	168,78	157,25	143,43	133,56	Sedang
8	Pangandaran	145,44	129,21	137,36	147,85	133,13	Sedang
9	Cirebon	160,63	147,51	156,58	144,56	133,04	Sedang
10	Sumedang	142,15	124,39	129,87	135,05	127,24	Sedang
11	Bandung	174,00	161,89	145,94	132,00	117,13	Sedang
12	Kota Banjar	152,80	152,80	145,04	129,60	116,26	Sedang
13	Kota Cirebon	172,76	157,19	141,07	127,28	112,32	Sedang
14	Kota Bekasi	131,60	123,18	124,95	111,58	111,58	Sedang
15	Majalengka	143,43	124,74	136,35	120,84	108,99	Sedang
16	Bandung Barat	110,22	108,18	108,89	108,64	108,28	Sedang
17	Purwakarta	137,31	124,53	128,98	117,89	107,01	Sedang
18	Bekasi	132,89	130,11	124,10	116,85	106,39	Sedang
19	Ciamis	141,57	122,22	133,52	117,12	105,56	Sedang
20	Bogor	136,88	125,31	116,54	107,93	101,72	Sedang
21	Indramayu	136,79	114,59	122,49	111,60	99,21	Sedang
22	Kota Tasikmalaya	119,20	117,37	114,69	106,93	97,13	Sedang
23	Kota Bandung	122,32	111,32	103,05	97,15	91,95	Sedang
24	Kota Sukabumi	114,40	102,67	92,91	84,55	77,56	Sedang
25	Kota Depok	89,63	82,56	76,53	80,44	72,28	Sedang
26	Kota Cimahi	105,41	91,71	82,01	72,63	65,77	Sedang
27	Kota Bogor	75,75	65,38	71,01	63,49	58,03	Sedang

Sumber: IRBI Tahun 2025, BNPB
**Catatan: nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan*

Dari sisi relisiensi terhadap perubahan iklim digunakan *platform* baru pembangunan rendah karbon yang berarti bahwa kegiatan

pembangunan harus menggunakan sumber daya yang efisien, untuk menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan Rendah Karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu:

1. Lingkungan, melalui penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan ekonomi hijau; dan
3. Sosial melalui penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Rendah Karbon yang dilakukan di Jawa Barat selama 2020 sampai dengan 2024 diukur melalui indikator tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersifat capaian daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Upaya ini meliputi aksi-aksi penurunan emisi GRK yang dilakukan pada sektor kehutanan dan lahan, sektor energi, sektor persampahan dan limbah domestik, sektor pertanian dan peternakan, dan sektor transportasi. Pemerintah Pusat juga melakukan upaya serupa dalam hal penurunan emisi GRK dengan tambahan sektor Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK.

Sampai dengan tahun 2024 Jawa Barat telah berhasil menurunkan emisi GRK dari kondisi *baseline* 93.620.403 Ton CO_2eq menjadi 82.823.926,28 Ton CO_2eq di tahun 2024. Capaian penurunan emisi di tahun 2024 ini setara dengan 7,99 persen atau sebesar 10.796.476,42 Ton CO_2eq dari target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 13.446.822 atau 9,94 persen sebagaimana tercantum dalam dokumen RAD GRK kaji ulang 2018. Besaran penurunan emisi GRK tersebut merupakan kumulatif dari penurunan emisi GRK pada tahun-tahun sebelumnya yang terus menunjukkan capaian yang baik atau meningkat terhadap target penurunan emisi GRK kondisi *baseline* 2030. Capaian tingkat penurunan emisi GRK Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.36
Capaian Tingkat Penurunan Emisi GRK Tahun 2020-2024 (Ton CO_2eq)

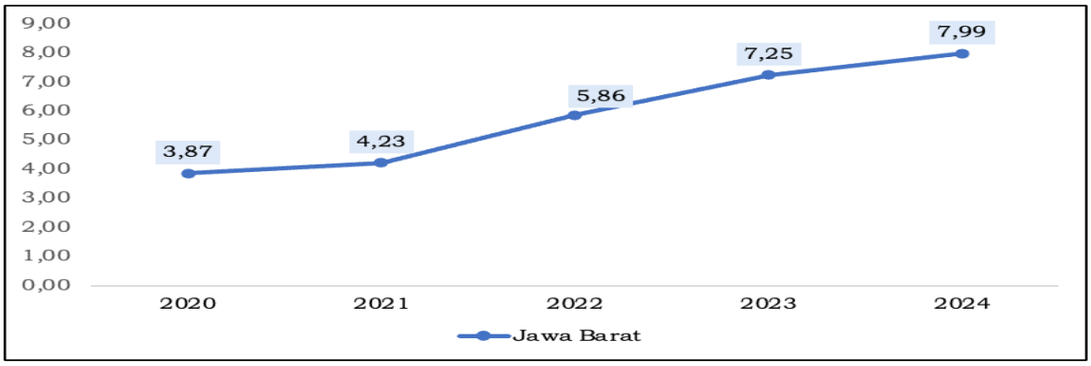

Sumber: Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Capaian tingkat penurunan emisi GRK Tahun 2024 terdiri dari kontribusi sektor kehutanan sebesar 1.140.671,64 Ton CO2eq, sektor energi sebesar 438.027,35 Ton CO2eq, sektor persampahan dan limbah domestik sebesar 510.774,33 Ton CO2eq, pertanian dan peternakan sebesar 45.077,93 Ton CO2eq, dan sektor transportasi sebesar 21.069,41 Ton CO2eq. Capaian penurunan emisi GRK Tahun 2024 ini masih bersifat daerah yang artinya kontribusi dari aksi-aksi penurunan emisi GRK di tingkat daerah. Sedangkan di tingkat pusat dengan kontribusi pada sektor yang sama ditambah dengan sektor industri dihitung secara terpisah, karena penurunan emisi pada sektor industri menjadi ranah implementasi dari RAN-GRK karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui:

1. Sektor Kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;
2. Sektor Pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya *System Rice Intensification* (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
3. Sektor Energi, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, diantaranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi serta substitusi bahan bakar fosil ke listrik antara lain dengan pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB);

4. Sektor Transportasi, meliputi pengembangan transportasi massal, pembangunan *Integrated Transportation System* (ITS) atau *Area Traffic Control System* (ATCS), pelaksanaan *Car Free Day* (CFD), peremajaan armada transportasi umum, penerapan manajemen parkir, dan pelatihan *eco-smart driving*; dan
5. Sektor Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPPAS Regional Lulut Nambo, Legok Nangka dan Cirebon Raya (Cira), pembangunan TPS Terpadu 3R (komposting dan daur ulang sampah), serta pembangunan IPAL domestik dan Sanimas.

Untuk perhitungan tahun 2025, pengukuran capaian penurunan emisi GRK dilakukan melalui indikator yang berbeda dengan sebelumnya, dimana secara imperatif Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator persentase penurunan emisi GRK kumulatif dan persentase penurunan emisi GRK tahunan, serta persentase penurunan intensitas emisi GRK untuk dijadikan indikator baru yang bersifat kewilayahan. Sehingga kedepan pengukuran capaian penurunan emisi GRK tidak terpisah antara di tingkat daerah dan di tingkat pusat, namun dihitung sebagai satu kesatuan utuh yang memerlukan integrasi perhitungan capaian pusat dan daerah.

Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geologi, iklim, dan topografi yang kompleks, sehingga rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan tsunami. Meski demikian, Indeks Risiko Bencana menunjukkan tren penurunan pada 2020–2024, mencerminkan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Upaya mitigasi juga dilakukan melalui pembangunan rendah karbon yang menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 7,99% dari target 2030, meliputi sektor kehutanan, energi, transportasi, pertanian, serta pengelolaan sampah dan limbah. Dari sisi demografi, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa dengan kepadatan tinggi, terutama di wilayah metropolitan dan kawasan industri, sehingga memerlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana serta perubahan iklim.

2.1.1.7 Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 tercatat mencapai 50.345.189 jiwa, menjadikannya sebagai provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia. Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang, dengan laki-laki sebanyak 25.492.197 jiwa dan perempuan sebanyak 24.852.992 jiwa. Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan populasi tertinggi mencapai lebih dari 5,8 juta jiwa, jauh melampaui wilayah lain. Di sisi lain, Kota Banjar tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 209 ribu jiwa. Sebagian besar wilayah di Jawa Barat memiliki jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa, mencerminkan konsentrasi kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di wilayah metropolitan dan penyangga seperti Bekasi, Bandung, dan Depok.

Gambar 2.37
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

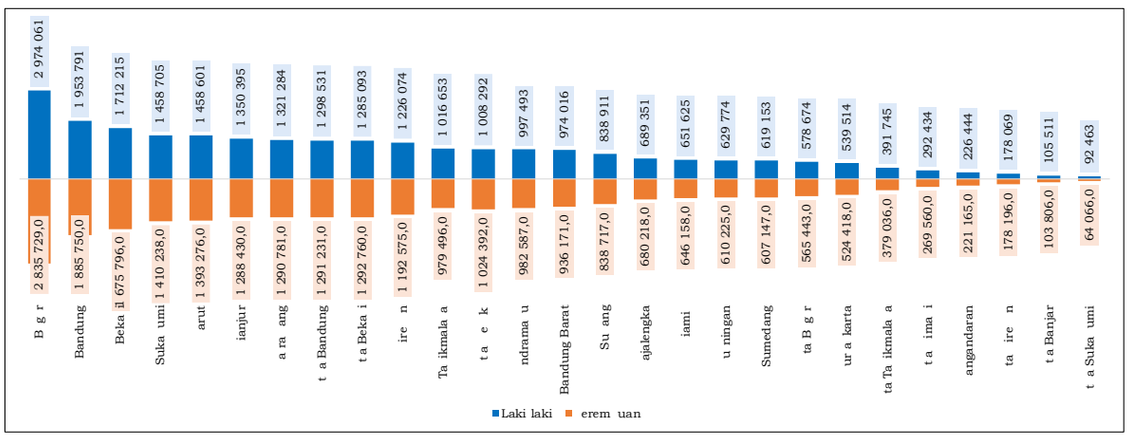

Sumber: SIAK Kementerian Dalam Negeri, 2024

Kepadatan penduduk yang tinggi sebesar 1.359 jiwa/km^2 terutama terkonsentrasi di wilayah yang terdapat banyaknya pusat-pusat industri dan pendidikan serta aktivitas ekonomi seperti Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Karawang menjadi salah satu alasan di Jawa Barat mengalami lonjakan penduduk, sebaliknya, pada wilayah selatan cenderung memiliki kepadatan yang lebih rendah, dengan topografi pegunungan dan lahan pertanian yang luas.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat tahun 2024 sebesar 1,13 lebih besar dari LPP Nasional sebesar 1,11. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.38
Kepadatan & Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024

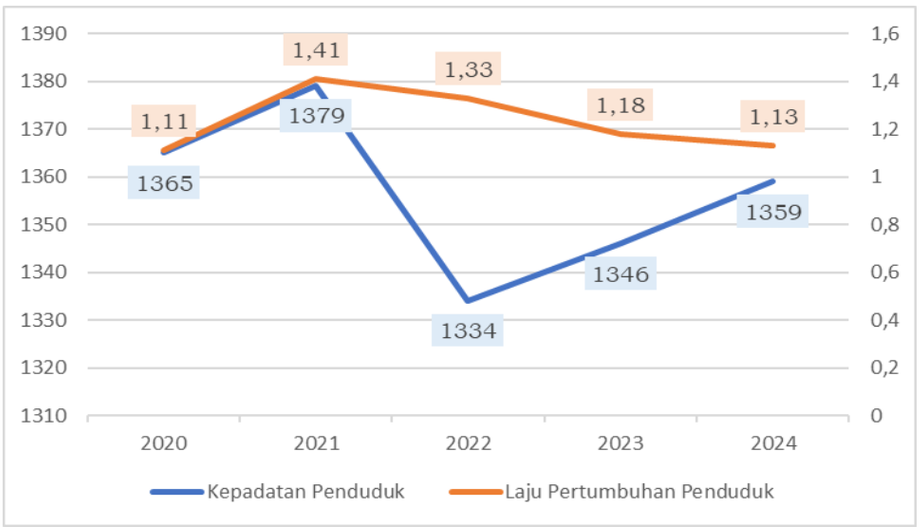

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dominasi penduduk Provinsi Jawa Barat oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), yang mencakup sekitar 70 persen dari total populasi. Hal ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar, namun juga menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan publik yang memadai.

Pengendalian kuantitas penduduk berimplikasi pada perubahan struktur penduduk di masa yang akan datang, antara lain: (1) bertambahnya persentase penduduk lansia; (2) penurunan penduduk usia muda namun tetap meningkat setelah *Total Fertility Rate* (TFR) berhasil ditahan; serta (3) peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH).

Adapun hasil proyeksi penduduk dari SP2020 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk cenderung positif dengan estimasi jumlah penduduk tahun 2025, diperkirakan sebanyak 50.759.003 jiwa yang tinggal di provinsi Jawa Barat (BPS, rilis 2024). Namun terjadi penurunan angka fertilitas, sehingga diperkirakan akan terjadi penurunan jumlah penduduk usia 0-14 tahun. Sebaliknya, komposisi penduduk lanjut usia (lansia) 65+ tahun akan mengalami peningkatan pada tahun 2032 menjadi 10,3 persen dari total penduduk Jawa Barat karena meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dimana sebelumnya 74,19 pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 80,78 pada tahun 2045. Berdasarkan data tersebut maka Jawa Barat akan memasuki *aging population* karena komposisi penduduk Jawa Barat berusia 65+ tahun sudah melebihi 10 persen.

Angka kematian merupakan bagian dari komponen populasi dan pertumbuhannya. Persentase mortalitas di Jawa Barat menunjukkan bahwa rata-rata lama hidup penduduk masih di bawah 75 tahun dengan penduduk perempuan lebih lama hidup dibandingkan penduduk laki-laki. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat angka kematian yang menyebar di 27 kabupaten/kota secara tidak seimbang. Berdasarkan sebaran umur, persentase kematian tertinggi terdapat pada distribusi umur 50-59 tahun. Umur tersebut tergolong usia produktif, sehingga hal ini menjadi perhatian bahwa kematian pada usia produktif disebabkan oleh kerentanan penyakit yang terdapat di Kabupaten Indramayu, Cianjur, Cirebon dan Bandung. Kematian terjadi pada umur tersebut akibat penyakit metabolis seperti Diare, Demam Berdarah *Dengue* (DBD), Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Tuberkulosis (TBC), dan diabetes.

Salah satu dampak pemindahan lokasi ibukota negara yang semula Daerah Khusus Jakarta menjadi IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur adalah urbanisasi Tinggi terjadi terutama di wilayah metropolitan seperti Bandung Raya dan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi). Pada wilayah tersebut menunjukkan tren urbanisasi yang pesat, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan yang memadai.

Dalam Pembangunan kependudukan di Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mencapai situasi *population optimum*, dimana penduduk tumbuh seimbang, populasi penduduk sesuai dengan kemampuan wilayah, sehingga penduduk dapat menjadi pelaku sekaligus penikmat dari hasil-hasil pembangunan. Pendekatan rekayasa menuju pembangunan kependudukan yang optimal mencakup pengaturan kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dalam interaksi yang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat 2024. data jumlah penduduk usia 16–18 tahun di Jawa Barat tahun 2024, Kabupaten Bogor tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak pada kelompok usia ini, yakni sebanyak 253.299 jiwa, disusul oleh Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung. Secara umum, kelompok usia ini menunjukkan proporsi yang relatif seimbang antara laki-laki dan

perempuan, yang mengindikasikan potensi besar untuk jenjang pendidikan menengah atas serta awal masa produktif.

Gambar 2.39
Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun

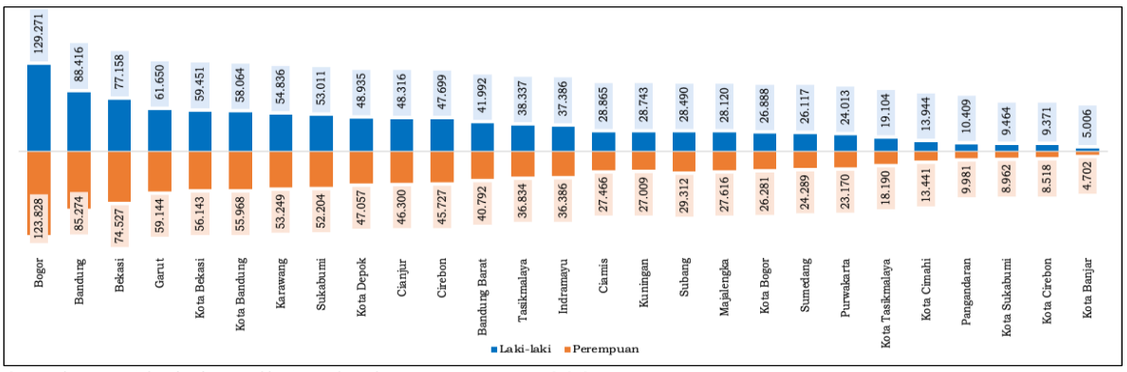

Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2024

Sementara itu, kelompok usia anak kurang dari 16 (enam belas) tahun secara keseluruhan menempati porsi yang sangat besar dalam komposisi penduduk Jawa Barat. Kabupaten Bogor kembali menempati posisi tertinggi dengan lebih dari 1,8 juta jiwa, diikuti oleh Bekasi dan Bandung. Jumlah ini menunjukkan beban tanggungan pendidikan dan layanan dasar masih tinggi, serta pentingnya perhatian pada pembangunan berbasis anak dan keluarga.

Gambar 2.40
Jumlah Penduduk Anak Kurang dari Usia 16 Tahun

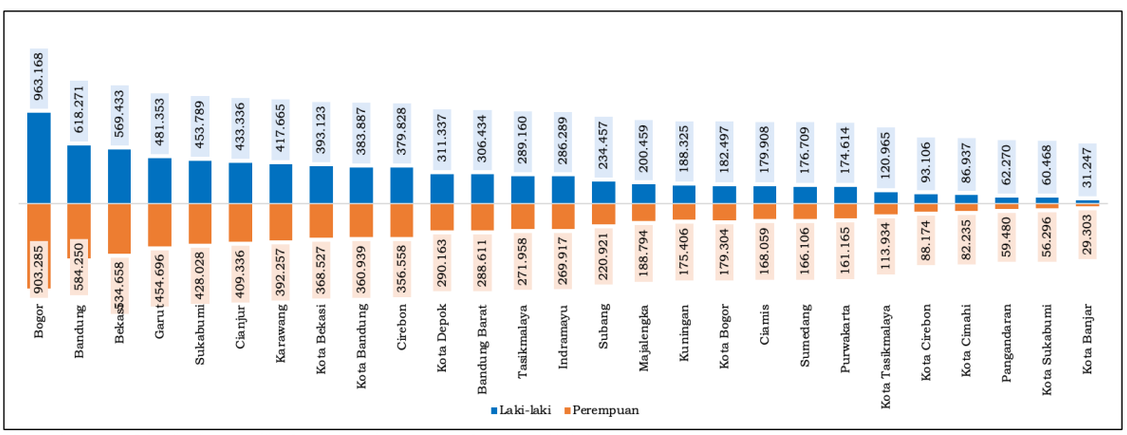

Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2024

Dalam kelompok usia produktif utama, yaitu 15–64 tahun, tren serupa kembali terlihat dengan Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni melebihi 4 juta jiwa. Ini menggambarkan bahwa Jawa Barat memiliki struktur demografi yang

sangat kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, asalkan diiringi dengan kebijakan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Gambar 2.41
Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun

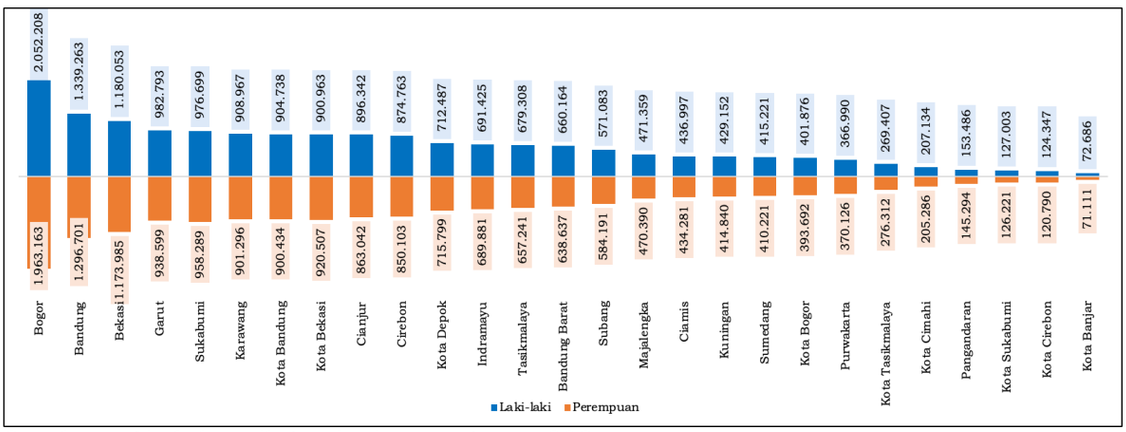

Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2024

Pada kelompok penduduk anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas, jumlah yang tercatat mencapai lebih dari 26.000 jiwa di seluruh provinsi, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan dan infrastruktur pendidikan inklusif serta layanan sosial yang lebih adaptif terhadap kebutuhan anak-anak dengan disabilitas di wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 2.42
Jumlah Penduduk Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas

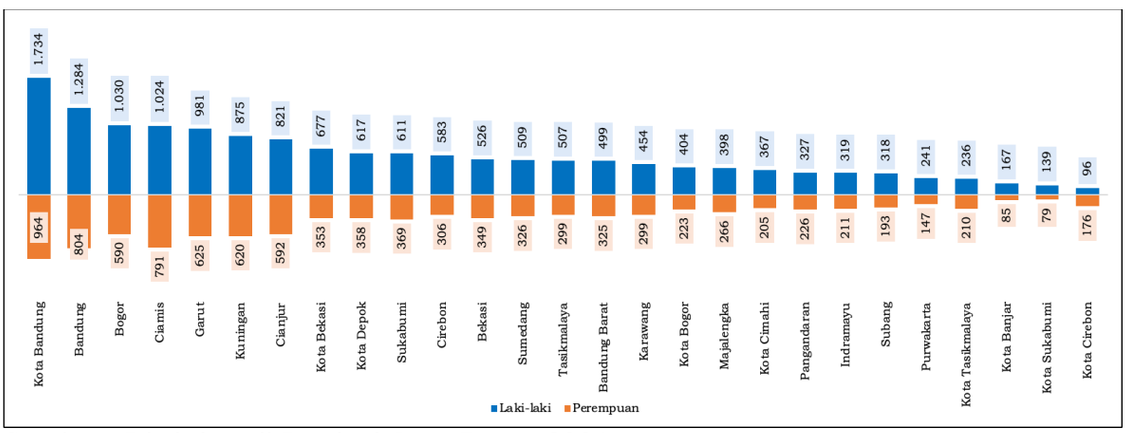

Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2024

Jika ditinjau dari kelompok perempuan usia 19 (sembilan belas) tahun ke atas, jumlahnya mencapai lebih dari 17,7 juta jiwa di Jawa Barat pada

tahun 2024, di mana Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi menjadi kontributor terbesar. Jumlah ini menunjukkan peran strategis perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan keluarga yang semakin signifikan, dan mengindikasikan perlunya penguatan program pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang terarah.

Gambar 2.43
Jumlah Penduduk Perempuan Usia 19 Tahun ke Atas

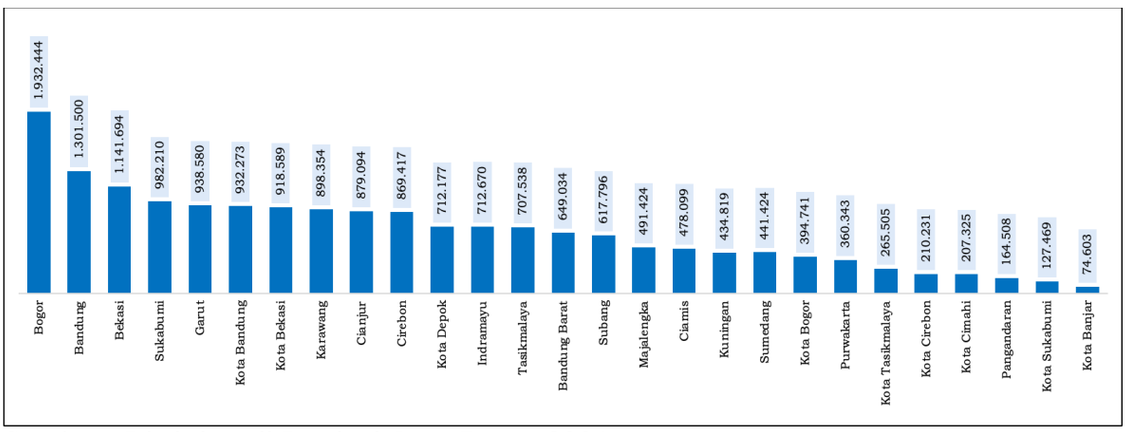

Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2024

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menempatkan pendekatan kependudukan sebagai arus utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui integrasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagai salah satu indikator strategis dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. IPBK menjadi sangat penting mengingat dinamika kependudukan yang kompleks, seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi cepat, ketimpangan antarwilayah, serta tantangan bonus demografi. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis data kependudukan, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk secara merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2025–2029 secara eksplisit mengarahkan kebijakan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap isu-isu kependudukan melalui integrasi IPBK dalam perumusan sasaran, indikator kinerja, dan strategi pembangunan.

Gambar 2.44
Tren Capaian IPBK Provinsi Jawa Barat dan IPBK Nasional
Tahun 2020-2024 (Poin)

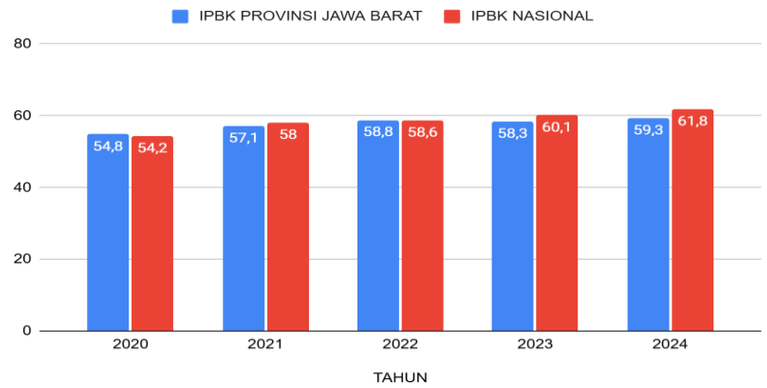

Sumber: Siperindu, BKKBN 2025

Grafik Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Provinsi Jawa Barat dan IPBK Nasional Tahun 2020–2024 memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten, namun laju peningkatannya cenderung melambat. Berdasarkan hasil pelaporan Kabupaten/Kota yang diterima Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh penurunan jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif serta berkurangnya kehadiran masyarakat di Posyandu yang menandakan bahwa partisipasi masyarakat menurun dan tidak merata di sejumlah wilayah. Meski sempat menurun akibat lemahnya koordinasi di lapangan, IPBK Provinsi Jawa Barat kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2024. Pemulihan ini menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, dengan pilar keberlanjutan dan inklusivitas yang menjadi faktor paling menonjol. Pilar keberlanjutan meningkat seiring dengan penguatan kembali layanan rutin berbasis masyarakat yang sempat terganggu selama pandemi.

Data BKKBN (2023) dan program-program prioritas nasional memperlihatkan adanya upaya untuk merevitalisasi Posyandu, serta mengaktifkan kembali kelompok BKB dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di berbagai kabupaten/kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melalui dinas terkait, juga mengalokasikan kembali anggaran untuk pelatihan kader dan pengadaan alat pelayanan dasar, yang membantu menjamin kontinuitas layanan pembangunan keluarga. Selain itu, pilar inklusivitas juga berperan penting melalui penguatan program pendampingan keluarga yang diarahkan

secara khusus untuk menjangkau kelompok rentan, seperti keluarga prasejahtera, ibu hamil berisiko, lansia, dan penyandang disabilitas.

Salah satu indikator yang dapat merefleksikan kondisi inklusivitas tersebut adalah indeks lansia berdaya. Berdasarkan data capaiannya, indeks lansia berdaya Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan dari 56,5 poin di tahun 2023 menjadi 56 poin di tahun 2024. Angka ini lebih rendah dari capaian rata-rata nasional sebesar 58 poin dan berada di peringkat ke-3 terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini disebabkan oleh sangat rendahnya dimensi sosial kemasyarakatan, serta belum optimalnya dimensi intelektual, profesional vokasional dan lingkungan. Sementara itu, dari sisi pengasuhan remaja di dalam keluarga, dapat direfleksikan dengan indikator indeks pengasuhan remaja Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan penurunan capaian dari 90 poin di tahun 2023 menjadi 83,5 poin di tahun 2024, bahkan capaian ini lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 84,6 poin. Penurunan capaian Jawa Barat disebabkan masih rendahnya cakupan remaja yang memiliki jaminan masa depan dan jaminan kesehatan.

Pada aspek inklusivitas, pemerintah pusat memperluas jangkauan layanan kepada keluarga miskin, rentan, dan marginal melalui berbagai skema seperti bantuan sosial terintegrasi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan layanan Keluarga Berencana gratis. Pilar holistik-integratif juga berkontribusi signifikan terhadap kenaikan IPBK nasional, dengan integrasi layanan lintas sektor antara Puskesmas, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan layanan sosial, serta penerapan sistem pelayanan satu pintu (*one-stop service*) di Posyandu. Pelayanan keluarga terpadu ini terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi, serta memberikan dukungan menyeluruh bagi keluarga. Selain itu, program pengarusutamaan kesetaraan gender turut memperkuat pencapaian pilar kesetaraan melalui edukasi publik dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Sejalan dengan itu, agar penduduk dapat tumbuh dengan seimbang maka dilakukan upaya pengendalian penduduk di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, pertumbuhan penduduk di Jawa Barat diantaranya dipengaruhi oleh peningkatan tren Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dengan angka persentase semula 11,9 persen di tahun 2021 menjadi 16,2 persen di tahun 2024 (BKKBN, 2025), bahkan berada di posisi ke-4 tertinggi

di Indonesia jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan/atau remaja dalam kondisi kehamilan yang tidak direncanakan karena belum atau tidak menginginkan kehamilan tersebut. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat memberikan dampak serius diantaranya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan bayi dengan risiko stunting. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, akses terhadap layanan Keluarga Berencana (KB), pernikahan usia dini, kekerasan seksual, dan lain sebagainya.

Meski demikian, telah dilakukan berbagai upaya dalam menyukseskan pengendalian penduduk di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat merefleksikan kondisi tersebut, antara lain capaian Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR) menunjukkan adanya penurunan dari 22,24 persen di tahun 2023 menjadi 18,17 persen pada tahun 2024. Prevalensi Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menunjukkan adanya peningkatan dari 19,11 persen pada tahun 2023 menjadi 22,8 persen pada tahun 2024. Dari sisi dukungan terhadap layanan KB, dapat dilihat dari Persentase Kampung KB di Jawa Barat yang mencapai 7,78 persen dengan total keseluruhan sebanyak 5.957 Kampung KB terbentuk di Jawa Barat, sedangkan dalam skala nasional telah terbentuk sebanyak 76.634 Kampung KB. Semakin banyaknya Kampung KB menunjukkan potensi besar dalam memperkuat upaya pengendalian penduduk di Jawa Barat, terutama untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

Dalam rangka mempertahankan capaian IPBK baik di tingkat provinsi maupun nasional, strategi utama yang dapat diterapkan meliputi penguatan fondasi kehidupan keluarga melalui bimbingan pranikah dan konseling keluarga, edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, pengasuhan, serta tumbuh kembang anak. Penguatan sistem data keluarga juga penting sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga yang lebih akurat dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kelima pilar IPBK diharapkan terjadi peningkatan tren capaian indeks ini, serta terwujudnya pembangunan kependudukan secara seimbang dan berbasis data.

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

Berdasarkan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020), yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 48.152.280 jiwa kemudian meningkat 49.860.370 jiwa pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 1.708.070 Jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat diproyeksikan terus mengalami peningkatan/pertumbuhan penduduk, hingga pada tahun proyeksi sesuai dengan periode RPJMD yaitu tahun 2029 mencapai 52.327.880 jiwa. Berikut ini disajikan tren perkembangan penduduk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 serta proyeksi jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030.

Gambar 2.45
Tren Perkembangan Penduduk Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 (Jiwa)

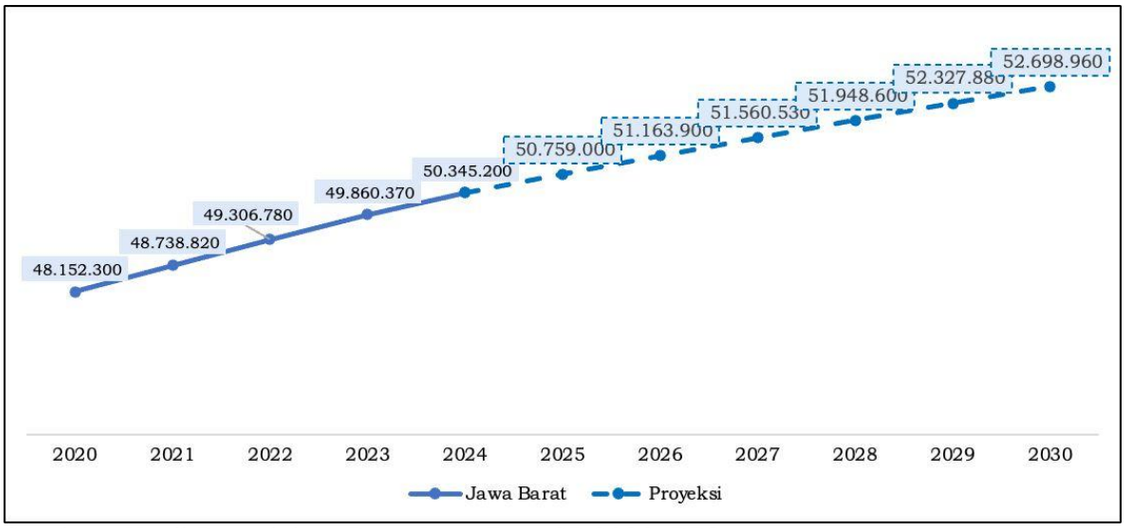

Sumber : Hasil Pengolahan Data *Long Form* SP 2020, BPS

Pada tahun 2024, penduduk Jawa Barat mencapai 50,3 juta jiwa, dimana lebih dari 65 persen penduduk menempati 55 persen luas wilayah. Konsentrasi penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bogor (5,6 juta), Kabupaten Bandung (3,7 juta), dan Kabupaten Bekasi (3,2 juta). Tingginya konsentrasi jumlah penduduk di ketiga wilayah ini diakibatkan oleh tingginya pembangunan industri, yang menjadi daya tarik tenaga kerja di dalam maupun luar Jawa Barat.

Lebih menarik diungkapkan bahwa, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi memiliki luas daerah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya. Jika dibandingkan, total luas wilayah Kabupaten Bandung dan Bekasi adalah 2.992 km^2 dengan total penduduk keduanya mencapai 7 juta jiwa, sementara itu daerah dengan luas yang hampir sama yaitu Kabupaten Bogor (2.991 km^2) hanya dihuni oleh 5,7 juta jiwa, kemudian Kabupaten Garut (3.101 km^2) dihuni 2,7 juta jiwa, dan bahkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung dan Bekasi jauh melampaui Kabupaten Cianjur (3.631 km^2) yang hanya sebanyak 2,5 juta jiwa.

Kepadatan penduduk ini dapat mendorong beberapa masalah sosial, diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Kondisi ini disebabkan karena padatnya jumlah penduduk mengakibatkan keterbatasan sumber daya, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta keterbatasan akses dan kecepatan layanan publik.

Gambar 2.46
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

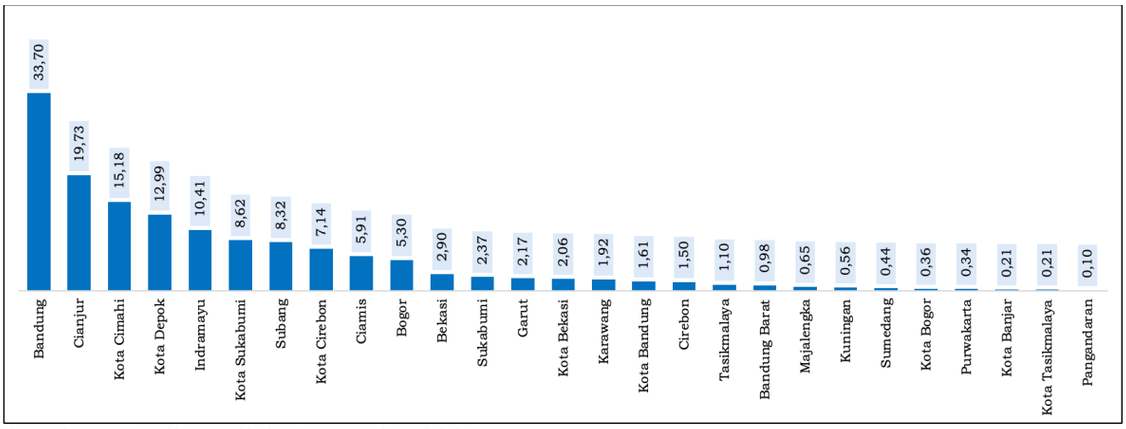

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Selain faktor tingginya urbanisasi dan migrasi tenaga kerja, angka kelahiran juga menjadi faktor penting dalam peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2024, tingkat kelahiran di Jawa Barat mencapai 2,11 kelahiran untuk setiap 1000 penduduk. Artinya, ketika jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 50,3 juta pada tahun 2024, maka akan terjadi 106,3 ribu kelahiran sepanjang 2024.

Daerah dengan tingkat kelahiran tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Garut, Purwakarta, Cianjur, dan Kuningan. Sementara itu, tingkat kelahiran di daerah kota yang bersifat metropolitan memiliki angka kelahiran di bawah rata-rata Jawa Barat, yaitu Kota Bandung (1,83), Kota Bekasi (1,85), dan Kota Bogor (1,87). Tingkat kelahiran di daerah pusat industri juga cenderung rendah jika dibandingkan dengan tingkat kelahiran provinsi, yaitu Kabupaten Bekasi (1,97), Kabupaten Bogor (2,02), dan Kabupaten Bandung (2,09).

Gambar 2.47
Tingkat Kelahiran di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2024

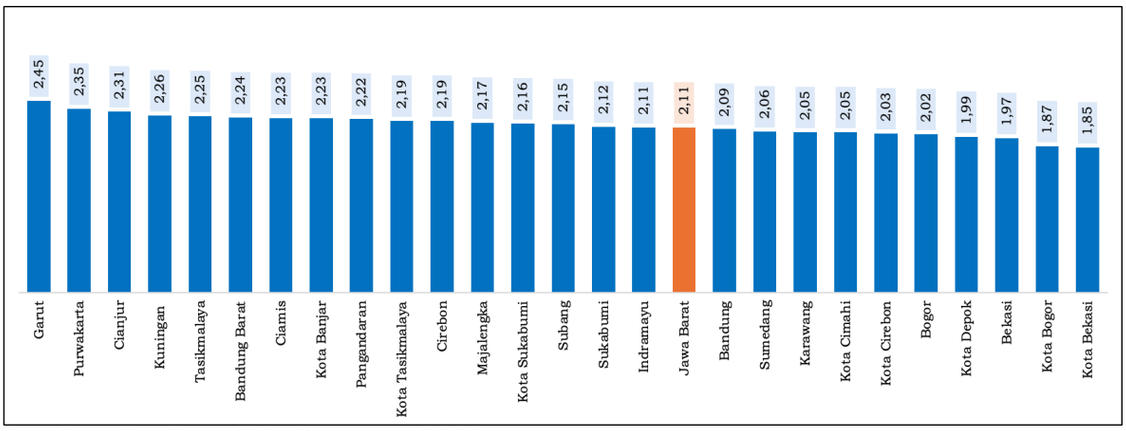

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Korelasi ini membawa pada hipotesis adanya dampak negatif dari industrialisasi dan urbanisasi terhadap tingkat kelahiran. Penelitian yang dilakukan Marianne H. Wanamaker di wilayah industrialisasi Carolina Selatan, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa industrialisasi (komoditas tekstil) menyebabkan penurunan sebesar 6-10 persen. Penurunan kelahiran disumbang secara signifikan oleh tenaga kerja migran, terutama akibat tingginya biaya membesarkan anak akibat terpisahnya keluarga migran dengan keluarga besarnya. Hipotesis yang didukung oleh temuan penelitian di atas, menjadi sinyal pentingnya meningkatkan kualitas kesehatan dan taraf ekonomi masyarakat di daerah industri dan metropolitan Jawa Barat.

Berdasarkan proyeksi, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020 hingga 2029. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 1.300,01 jiwa per kilometer persegi, kemudian meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Pada tahun 2025, kepadatan mencapai 1.370,38 jiwa/km², dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 1.412,74 jiwa/km² pada tahun 2029.

Gambar 2.48
Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2030

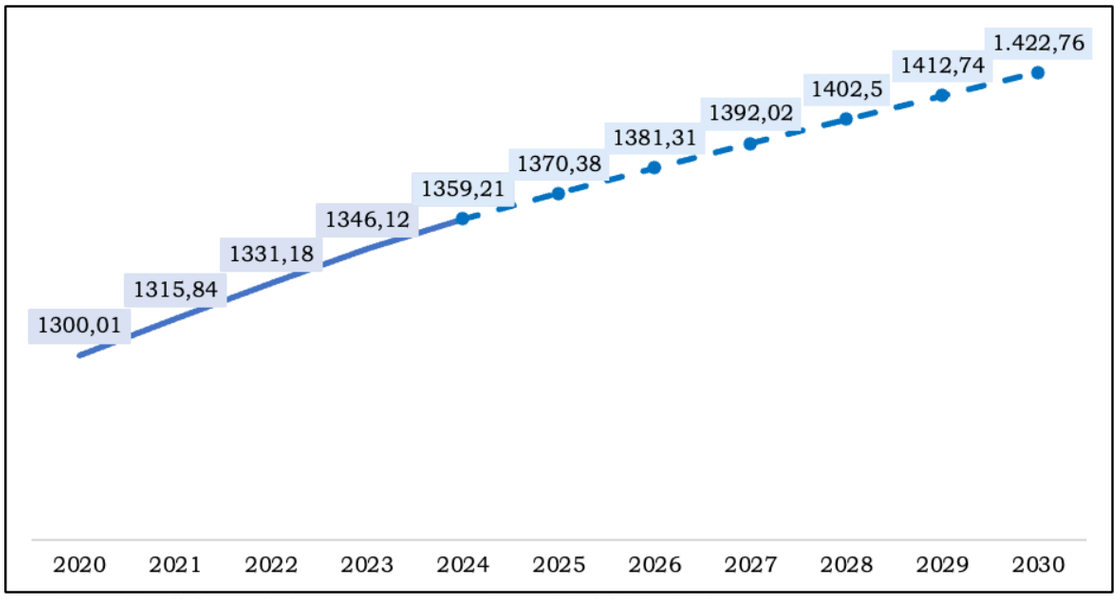

Sumber : Hasil Pengolahan Data *Long Form* SP 2020, BPS

Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Jawa Barat, sejalan dengan karakteristik provinsi ini sebagai wilayah dengan daya tarik ekonomi, urbanisasi, dan konsentrasi aktivitas penduduk yang tinggi. Tren peningkatan kepadatan penduduk ini menandakan adanya kebutuhan untuk perencanaan tata ruang yang lebih adaptif, penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta pengelolaan wilayah perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan guna mendukung kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.

Tabel 2.12
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

Parameter	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk						
Laki-Laki (000)	25.682	25.867	26.046	26.221	26.390	26.555
Perempuan (000)	25.077	25.297	25.514	25.728	25.938	26.144
Total (000)	50.759	51.164	51.561	51.949	52.328	52.699
Sex Ratio (%)	102,41	102,25	102,09	101,92	101,74	101,57
Komposisi Umur (%)						
▪ 0-14	23,07	22,85	22,64	22,44	22,24	22,04
▪ 15-64	69,75	69,61	69,44	69,25	69,06	68,86
▪ 65+	7,17	7,54	7,92	8,31	8,70	9,10
Dependency Ratio (%)	43,36	43,66	44,01	44,40	44,81	45,21
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR)	2,03	2,02	2,01	2,0	2,0	2,0

Parameter	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate (IMR)	10,89					9,28

Sumber : BPS Jawa Barat dan Hasil Olahan 2025

Perhitungan perkembangan penduduk baik dari segi jumlah dan penambahan dan/atau perubahan penduduk sesuai dengan faktor pengaruhnya menggunakan indikator masing-masing. Untuk angka kelahiran digunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), angka kematian menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta angka migrasi menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR).

Berdasarkan proyeksi indikator penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2030, diketahui pada aspek fertilitas terjadi penurunan angka kelahiran. Indikator yang memperlihatkan penurunan, antara lain:

1. *Total Fertility Rate* (TFR) diproyeksikan turun dari 2,03 di tahun 2025 menjadi 2,0 di tahun 2030;
2. *Infant Mortality Rate (IMR)* diproyeksikan turun dari 10,89 di tahun 2025 menjadi 9,28 di tahun 2030;
3. Sex Ratio mengalami trend penurunan sebesar 102,41 di tahun 2025 menjadi 101,57 di tahun 2030, sehingga jumlah penduduk laki-laki dan perempuan semakin berimbang; dan
4. Rasio ketergantungan *(Dependency Ratio)* mengalami trend kenaikan dari 43,36 persen di tahun 2025 menjadi 45,21 persen di tahun 2030.

Sedangkan dari aspek perpindahan penduduk, angka migrasi keluar dari Provinsi Jawa Barat akan lebih besar dari pada migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat, dimana perubahan yang terjadi adalah *Net Migration Rate* 0,18 (di tahun 2020) menjadi -0,16 (di tahun 2045). Kondisi ini disebabkan kebijakan Pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang diikuti oleh perpindahan penduduk khususnya ASN K/L dan keluarganya ke IKN dengan tahapan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa total ASN K/L yang akan dipindahkan ke IKN sampai dengan tahun 2045 sebanyak 100.023 orang.

Dampak relokasi industri keluar Jawa Barat diikuti oleh perpindahan pekerja terutama sektor industri padat karya. Hal ini sejalan dengan tren

investasi yang masuk ke Jawa Barat yang semakin bersifat padat modal dan padat teknologi yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja lebih sedikit, sehingga menurunkan daya tarik migrasi masuk.

Tren struktur penduduk merujuk pada perubahan dalam distribusi populasi berdasarkan umur dan jenis kelamin dari waktu ke waktu. Tren ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, serta kebijakan sosial dan ekonomi. Berikut ini adalah beberapa tren utama dalam struktur penduduk :

1. Penuaan Populasi

   Banyak negara, terutama negara maju, mengalami penuaan populasi. Ini berarti proporsi orang tua (di atas 65 tahun) meningkat sementara proporsi orang muda menurun.

   Faktor utama yang mempengaruhi penuaan populasi adalah penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan harapan hidup.

2. Penurunan Tingkat Kelahiran

   Banyak negara mengalami penurunan tingkat kelahiran, yang sering kali dikaitkan dengan perubahan sosial dan ekonomi, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan akses ke kontrasepsi.

3. Urbanisasi

   Semakin banyak orang pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Ini menyebabkan pertumbuhan populasi di kota-kota besar dan penurunan populasi di daerah pedesaan.

4. Migrasi

   Migrasi internasional dan domestik mempengaruhi struktur penduduk. Migrasi masuk dapat meningkatkan populasi muda dan produktif di negara atau daerah tujuan, sementara migrasi keluar dapat menyebabkan penurunan populasi di negara atau daerah asal.

5. Perubahan dalam Rasio Jenis Kelamin

   Di beberapa negara, ada perubahan dalam rasio jenis kelamin karena faktor budaya atau kebijakan (seperti preferensi anak laki-laki). Ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan jenis kelamin dalam populasi.

6. Penurunan Angka Kematian

   Kemajuan dalam bidang kesehatan dan sanitasi telah menurunkan angka kematian, terutama angka kematian bayi dan ibu. Ini berkontribusi pada peningkatan harapan hidup dan perubahan dalam struktur umur penduduk.

7. Pertumbuhan Populasi

   Di banyak negara berkembang, pertumbuhan populasi masih tinggi karena tingkat kelahiran yang masih tinggi meskipun angka kematian menurun. Ini menciptakan piramida penduduk yang lebih ekspansif.

8. Generasi *Baby Boom*

   Di beberapa negara, terutama negara maju, populasi yang lahir selama periode *baby boom* (misalnya, setelah Perang Dunia II) kini mencapai usia pensiun, menciptakan tantangan dalam hal pensiun dan perawatan kesehatan.

Proyeksi struktur penduduk adalah estimasi tentang bagaimana populasi suatu daerah akan berubah di masa depan berdasarkan tren saat ini dan asumsi tentang kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi ini sangat penting untuk perencanaan kebijakan, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan pensiun. Berikut ini proyeksi struktur penduduk di Provinsi Jawa Barat periode 2025-2030.

Tabel 2.13
Proyeksi Struktur Penduduk Berdasarkan Usia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-4	3.985.870	3.983.450	3.945.630	3.905.830	3.864.430	3.822.780	3.783.080
5-9	3.878.700	3.889.330	3.923.650	3.947.460	3.960.630	3.965.530	3.965.300
10-14	3.869.750	3.837.810	3.821.390	3.820.840	3.833.190	3.850.640	3.864.450
15-19	4.037.760	4.011.110	3.974.060	3.929.140	3.881.940	3.840.930	3.811.900
20-24	4.045.420	4.017.020	3.997.610	3.985.680	3.976.820	3.964.970	3.944.350
25-29	4.075.830	4.053.170	4.026.060	3.996.210	3.966.290	3.939.700	3.920.670
30-34	4.020.280	4.013.010	4.007.560	4.002.840	3.997.080	3.987.220	3.973.410
35-39	3.925.020	3.942.990	3.953.350	3.957.020	3.956.200	3.954.010	3.952.910
40-44	3.727.310	3.749.530	3.776.320	3.806.550	3.837.590	3.865.660	3.887.440
45-49	3.507.290	3.554.220	3.590.890	3.618.610	3.640.900	3.662.750	3.687.560
50-54	3.102.050	3.171.270	3.239.770	3.307.060	3.370.800	3.427.870	3.476.070
55-59	2.632.660	2.708.540	2.783.320	2.856.440	2.928.060	2.998.450	3.067.560

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
60-64	2.102.570	2.185.980	2.266.410	2.344.300	2.420.160	2.494.850	2.568.880
65-69	1.535.590	1.607.590	1.684.170	1.764.070	1.845.650	1.926.630	2.005.350
70-74	1.019.780	1.084.300	1.145.660	1.204.810	1.263.690	1.324.900	1.389.930
75+	879.320	949.680	1.028.050	1.113.670	1.205.170	1.301.000	1.400.100
Total	50.345.200	50.759.000	51.163.900	51.560.530	51.948.600	52.327.890	52.698.960

Sumber : Hasil Pengolahan Data *Long Form* SP 2020, BPS

Struktur penduduk berdasarkan usia di Provinsi Jawa Barat dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Penduduk usia produktif

   Usia produktif merujuk pada rentang umur di mana individu dianggap paling aktif secara ekonomi dan berada dalam masa puncak karier mereka. Rentang ini umumnya berada antara usia 15 hingga 64 tahun. Berdasarkan hasil proyeksi, di tahun 2030 kelompok usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun mendominasi di Provinsi Jawa Barat, yaitu mencapai 68,85 persen dari total jumlah penduduk Jawa Barat.
2. Penduduk usia lanjut

   Penduduk usia lanjut mengacu pada individu yang telah mencapai usia lanjut di atas 65 tahun (merujuk kepada klasifikasi BPS), tetapi masih aktif secara ekonomi dan berkontribusi dalam kegiatan produktif. Dengan meningkatnya harapan hidup dan kesehatan yang lebih baik, semakin banyak orang lanjut usia yang tetap bekerja atau terlibat dalam berbagai bentuk produktivitas. Berdasarkan hasil proyeksi, di tahun 2030 kelompok usia lanjut produktif, yaitu usia di atas 65 tahun sebesar 9,10 persen dari total jumlah penduduk Jawa Barat.
3. Penduduk Usia Muda/Belum Produktif

   Penduduk kelompok usia muda/belum produktif adalah individu yang biasanya berusia antara 0 hingga 14 tahun. Kelompok ini belum memasuki angkatan kerja dan masih dalam tahap perkembangan dan Pendidikan. Berdasarkan hasil proyeksi, di tahun 2030 kelompok usia muda/belum produktif, yaitu usia di atas 0-14 tahun sebesar 22,04 persen dari total jumlah penduduk Jawa Barat.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ini menjadi indikator demografi yang menunjukkan beban tanggungan terhadap angkatan kerja. Wilayah dengan rasio

ketergantungan tinggi cenderung mengalami penurunan produktivitas dan kesulitan berkembang, karena tingginya beban penduduk non-produktif. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang berisiko melambat.

Gambar 2.49
Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2030

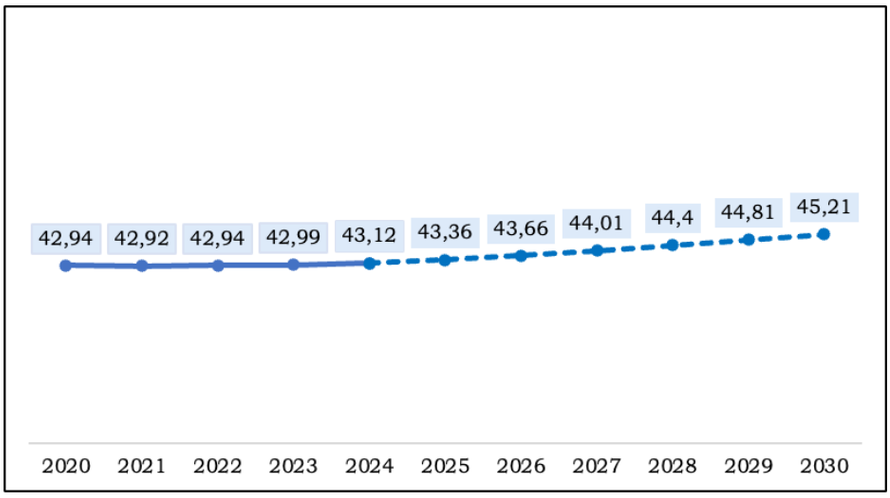

Sumber: BPS Jawa Barat, 2025 (diolah)

Tren rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan pelaku pembangunan yang berkualitas dengan mendorong kualitas penduduk usia belum produktif. Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga perlu mendorong terciptanya penduduk lanjut usia yang produktif (lansia produktif) sehingga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sampai dengan tahun 2030 cenderung menurun. Pada tahun 2030 tersebut *sex ratio*nya sebesar 101,57 persen yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, namun dengan kecenderungan penurunan, untuk 20 tahun ke depan bisa jadi *sex ratio* Jawa Barat, bisa berubah, dimana penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat ke depannya harus memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi seluruh penduduk

khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, termasuk disabilitas dan anak-anak (*safety, security, health as human needs).*

Gambar 2.50
Piramida Struktur Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2030

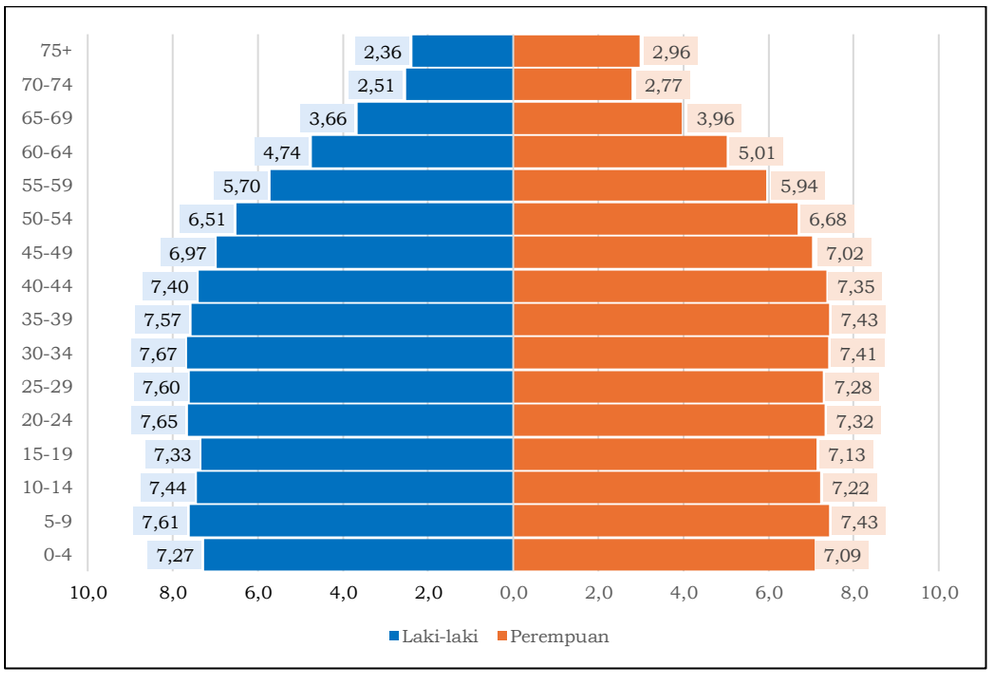

Sumber: BPS Jawa Barat, 2024 (diolah)

Piramida penduduk Jawa Barat tahun 2030 menunjukkan dominasi usia produktif (15–64 tahun), menandakan masa bonus demografi. Penurunan proporsi usia muda mencerminkan menurunnya angka kelahiran, sementara kelompok lansia mulai meningkat meski masih kecil. Komposisi gender relatif seimbang di semua kelompok usia. Kondisi ini memberi peluang pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi tenaga kerja produktif, sekaligus menuntut kesiapan menghadapi peningkatan jumlah lansia di masa depan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa dinamika kependudukan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan isu perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan menempatkan penduduk sebagai pusat, pelaku, dan tujuan pembangunan. Hal ini mencakup perhatian terhadap aspek kuantitas, kualitas, mobilitas, distribusi

penduduk, serta dinamika keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, setiap kebijakan dan program pembangunan dirancang berdasarkan kondisi dan proyeksi kependudukan yang akurat, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan integrasi ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif, adaptif terhadap perubahan demografi, serta mampu menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat.

B. Kebudayaan Lokal

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan pariwisata budaya. Hal ini di dukung dengan berbagai ciri warisan budaya khas dan nilai-nilai tradisional yang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat

Keberadaan kampung budaya dan kampung adat di Jawa Barat tidak hanya menjadi warisan sejarah dan identitas masyarakat Sunda, tetapi juga berperan dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya, edukasi, serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dukungan dalam bentuk pelestarian nilai budaya, perlindungan hukum, pengembangan ekonomi lokal, serta promosi budaya sangat diperlukan agar nilai-nilai tradisional tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Saat ini tercatat sebanyak 268 Kampung budaya yang tersebar di 27 kabupaten/kota yang selama ini masih melestarikan tradisi turun temurun di kampungnya masing-masing dan merupakan warisan budaya tak benda (*intangible*) bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang harus terus dijaga kelestarian seni budaya, tradisi, dan adat istiadatnya serta merupakan identitas atau asal-usul masyarakat Jawa Barat.

Gambar 2.51
Kampung Budaya Di Provinsi Jawa Barat

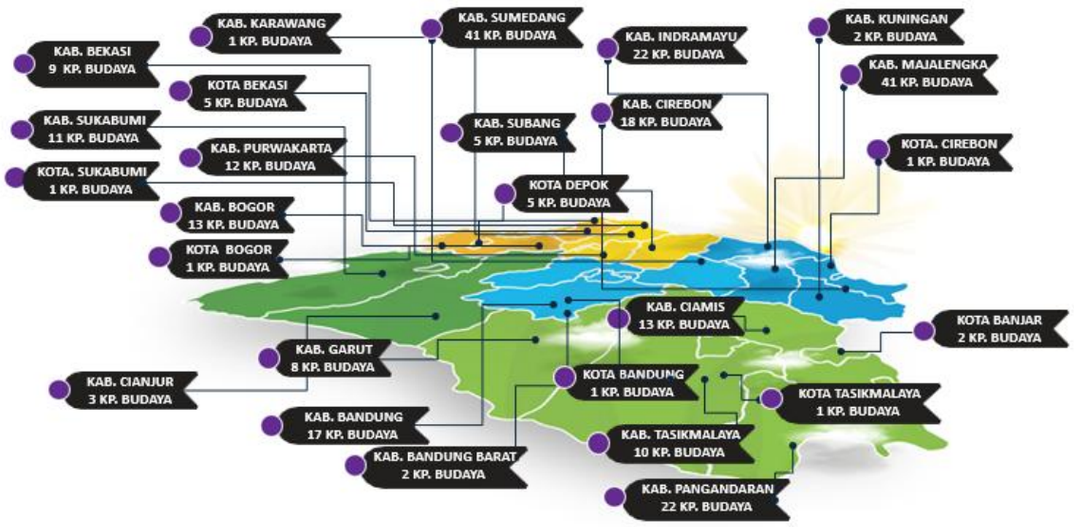

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat bersama Komite Masyarakat Adat Jawa Barat, 2024

Selain keberadaan kampung budaya, di Jawa Barat, terdapat 14 (empat belas) Kampung Adat yang telah ditetapkan pengakuan dan perlindungannya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang terdapat di 12 (dua belas) Desa/Kelurahan dan di 9 (sembilan) kabupaten/kota yaitu Kampung Adat atau KMHA Kuta di Kabupaten Ciamis, Kasepuhan atau KMHA Ciptagelar/ Gelaralam, KMHA Sinaresmi, KMHA Ciptamulya dan KMHA Girijaya di Kabupaten Sukabumi, KMHA Naga di Kabupaten Tasikmalaya, KMHA Dukuh dan KMHA Pulo di Kabupaten Garut, KMHA Urug dan KMHA Malasari di Kabupaten Bogor, KMHA Cikalong di Kabupaten Pangandaran, KMHA Miduana di Kabupaten Cianjur, KMHA Cireundeu di Kota Cimahi dan KMHA Kranggan di Kota Bekasi. Adapun Kampung Adat atau KMHA Kuta berbeda dengan yang lainnya. Kampung adat Kuta ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena selain penetapan sebagai KMHA juga diberikan penetapan terhadap Hutan Adatnya.

Gambar 2.52
Kampung Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)
Di Jawa Barat

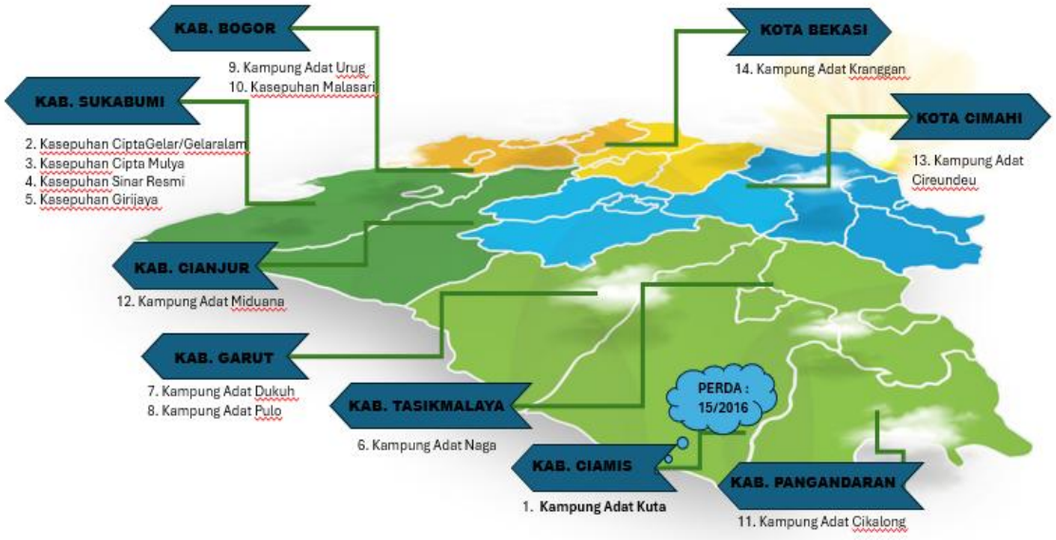

Sumber: Satu Data Jawa Barat, 2024

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, direncanakan sebanyak 17 (tujuh belas) Kampung Budaya akan dikaji menjadi Kampung Adat sebagai berikut:

Tabel 2.14
Rencana Kampung Budaya yang Akan Dikaji Menjadi Kampung Adat

No	Kab/Kota	Kampung	Desa	Kecamatan
1	Kab. Indramayu	Kp. Lelea/Ngarot	Lelea	Lele
		Kp. Dayak Segandu	Karimun	Losarang
2	Kab. Majalengka	Kp. Nunuk	Nunuk Baru	Maja
		Kp. Talaga	Telagawetan	Talaga
3	Kab. Sumedang	Kp. Karedok	Karedok	Jatigede
		Kp. Citengah	Citengah	Sumedang Selatan
		Kp. Rancakalong	Rancakalong	Rancakalong
		kp. Cigumentong	Sindulang	Cimanggung
4	Kab. Pangandaran	Kp. Dukuh Ranto Batang	Mekarsari	Cimerak
		Kp. Jagapati	Paledah	Padaherang
		Kp. Kondangjajar	Kondangjajar	Cijulang
5	Kab. Bandung	Kp. Babakan Asri	Mekarsari	Pasirjambu
		Kp. Gambung	Mekarsari	Pasirjambu
		Kp. Tutugan	Rawabogo	Ciwidey
6	Kab. Bogor	Kp. Kebon alas	Ciasmara	Pamijahan
		Kp. Cikandang	Mekarsari	Rumpin
7	Kota Bogor	Kp. Lembur sawah	Kel. Mulyaharja	Bogor Selatan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, 2024

Masyarakat adat di kampung budaya/tradisional merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan.

Gambar 2.53
Grafik Nilai Indeks Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

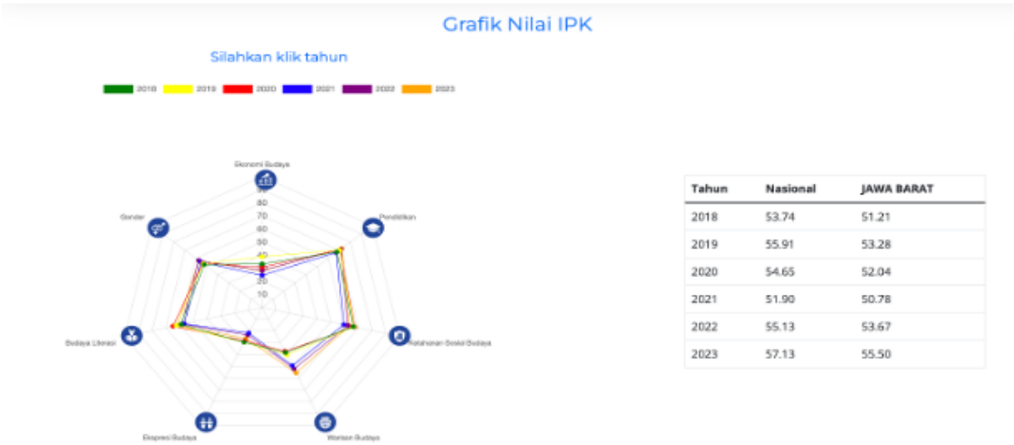

Tahun	Nasional	JAWA BARAT
2018	53.74	51.21
2019	55.91	53.28
2020	54.65	52.04
2021	51.90	50.78
2022	55.13	53.67
2023	57.13	55.50

Sumber: Indeks Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbudristek,2024

Perhitungan IPK merupakan komposit dari 7 (tujuh) Dimensi sebagai berikut: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Literasi Budaya dan Gender.

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu 50,3 juta jiwa pada 2024, dengan dominasi usia produktif sekitar 70 persen yang memberikan peluang bonus demografi namun juga tantangan dalam penyediaan lapangan kerja, layanan publik, dan infrastruktur. Kepadatan penduduk tinggi di wilayah metropolitan dan industri, sementara daerah selatan relatif jarang penduduk. Proyeksi hingga 2029 menunjukkan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk, penurunan angka kelahiran, serta bertambahnya proporsi lansia yang menandai transisi menuju aging population. Pemerintah Provinsi mengarusutamakan isu kependudukan melalui Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dalam RPJMD Tahun 2025–2029, dengan fokus pada kesetaraan akses layanan dasar, pemberdayaan kelompok rentan, dan penguatan data kependudukan. Selain itu, Jawa Barat memiliki kekayaan budaya berupa 268 kampung budaya dan 14 (empat belas) kampung adat yang dilestarikan sebagai identitas daerah sekaligus potensi pariwisata berbasis budaya, yang terus dikembangkan

untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi lokal, dan pelestarian warisan budaya.

2.1.1.8 Sektor Lapangan Usaha

Pada tingkat sektor lapangan usaha, penyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tertinggi adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta transportasi dan pergudangan.

Gambar 2.54
Perubahan *Share* Sektor Lapangan Usaha Utama Jawa Barat
Tahun 2020-2024

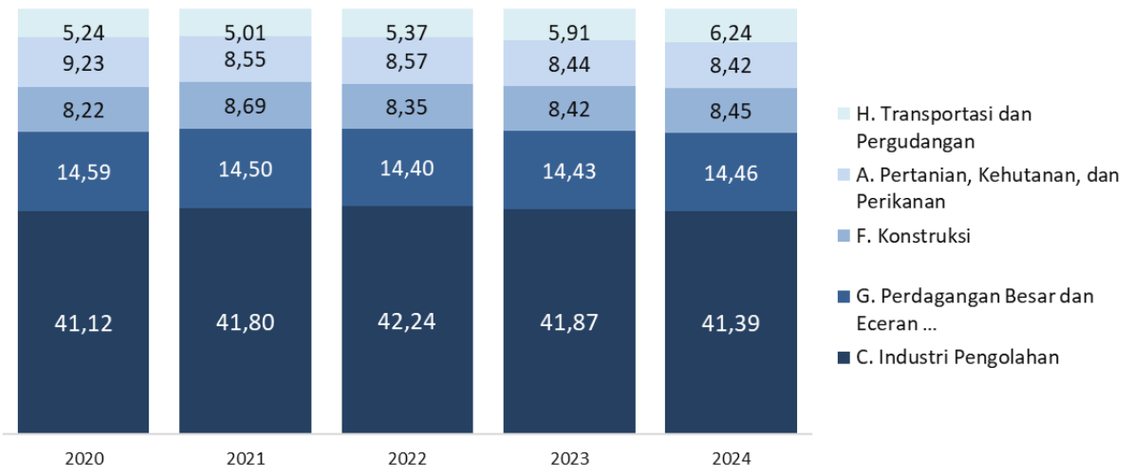

Sumber: BPS, 2025, diolah.

Berdasarkan data tersebut, diketahui terjadi perubahan proporsi kontribusi dari masing-masing sektor terhadap PDRB Jawa Barat selama periode 2020-2024. Sektor industri pengolahan telah menunjukkan kontribusi yang relatif stabil terhadap PDRB Jawa Barat sebagai kontributor utama. Meskipun berfluktuasi, kontribusi industri pengolahan mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2020 menuju tahun 2024. Menurut kementerian perindustrian, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah industri terbanyak, dimana 55 dari 170 kawasan industri nasional berada di provinsi Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bogor.

Sejalan dengan lapangan usaha industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran juga menunjukkan kontribusi yang stabil namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun

2024. Sementara itu, sektor konstruksi menunjukkan peningkatan kontribusi yang cukup stabil selama periode 2020-2024. Pada seri data yang lebih panjang, *share* sektor konstruksi telah tumbuh secara signifikan sejak tahun 2005 yaitu sebesar 3 persen menjadi lebih dari 8 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan pentingnya sektor konstruksi dalam pembangunan ekonomi melalui pembangunan wilayah dan penyediaan infrastruktur.

Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan telah mengalami penurunan kontribusi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan kontribusi sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi Jawa Barat dari sektor pertanian menuju sektor-sektor lain yang lebih berorientasi pada industri dan jasa.

Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan telah mengalami penurunan kontribusi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan kontribusi sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi Jawa Barat dari sektor pertanian menuju sektor-sektor lain yang lebih berorientasi pada industri dan jasa.

Gambar 2.55
Perubahan *Share* Sektor Jasa

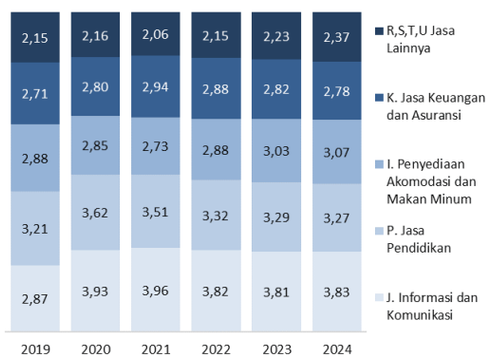

Beberapa sektor jasa paling dominan di Jawa Barat adalah Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Lainnya. Beberapa sekotor jasa seperti penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun pada sektor jasa lain seperti Jasa Informasi dan Komunikasi, Jasa pendidikan, serta jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun penurunan tidak terlalu siginfikan, namun hal ini menunjukkan adanya penurunan pada produktivitas masyarakat, disrupsi teknologi, dan penurunan konsumsi pada layanan jasa.

Gambar 2.56
Laju Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Utama Jawa Barat

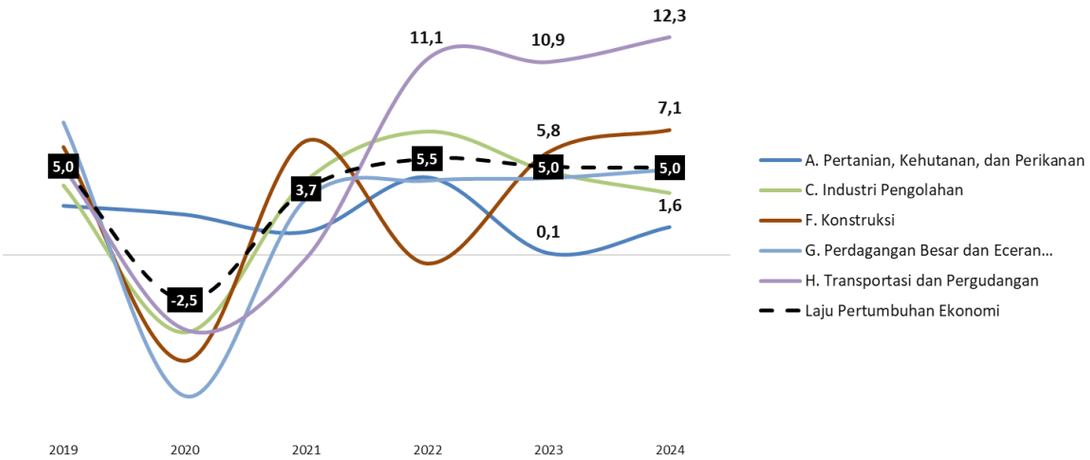

Sumber: BPS, 2025, diolah.

Pertumbuhan lapangan usaha menunjukan beberapa sektor masih mampu tumbuh diatas rata-rata Jawa Barat. Sektor transportasi dan pergudangan adalah sektor utama yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode 2019-2024, dengan capaian pertumbuhan pada tingkat 11-12 persen pada periode 2022-2024. Selain itu, sektor konstruksi juga masih tumbuh di atas capaian LPE Jawa Barat sebesar 5,8 dan 7,1 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Sementara itu sektor pertanian tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan capaian LPE. Pertumbuhan yang lambat pada tahun 2023 dan 2024 pada tingkat 0,1 dan 1,6 persen diakibatkan oleh kemarau panjang selama periode *El Nino*. Kondisi ini menyebabkan beberapa gagal panen di daerah pusat produksi pertanian, disamping bencana alam seperti longsor dan banjir rob di daerah pantai utara.

Posisi dan peran Provinsi Jawa Barat sebagai penghubung utama pusat-pusat ekonomi di pulau Jawa sangatlah strategis. Selain kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan nasional melalui; peran sebagai lumbung pangan, salah satu penyumbang PDRB terbesar, dan potensinya sebagai pendukung infrastruktur logistik dan transportasi, potensi sumber daya alam di Provinsi Jawa Barat masih cukup melimpah baik dari produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga kehutanan, serta potensi pengembangan pariwisata dan destinasi alam memberikan keunggulan komparatif yang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa

Barat yang lebih inklusif. Kondisi tersebut diperkuat oleh daya dukung lingkungan hidup yang masih memadai, seperti terpenuhinya kebutuhan air, pangan, energi, serta ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim yang didukung upaya mitigasi.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti fluktuasi produksi komoditas pertanian dan perkebunan akibat serangan hama, keterbatasan akses teknologi, alih fungsi lahan perkebunan, lahan kritis, hingga kondisi kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama DAS Citarum. Dalam menangani tantangan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang seimbang, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah Jawa Barat.

Struktur ekonomi Jawa Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama PDRB dengan pangsa sekitar 41 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta jasa. Perubahan struktur menunjukkan pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa seiring perkembangan teknologi, urbanisasi, dan peningkatan konsumsi layanan. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi yang tumbuh tercepat, sementara pertanian melambat akibat dampak iklim dan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat mencerminkan dinamika pertumbuhan dan tantangan dalam mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan distribusi pendapatan. Subbab ini menguraikan karakteristik kesejahteraan ekonomi melalui indikator-indikator kunci seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator lainnya, yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran utuh tentang capaian dan tantangan ekonomi daerah.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukan tren positif meskipun dalam 2 (dua) tahun terakhir mengalami perlambatan. Pola pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat setelah pandemi COVID-19 periode 2020-2024 lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi. Meskipun Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun pencapaian ini tidak sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan ditandai dengan pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan pemuda, serta belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan secara berarti.

Gambar 2.57
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia 2020-2024 serta Perbandingan Antar Provinsi di Pulau Jawa 2024 (%)

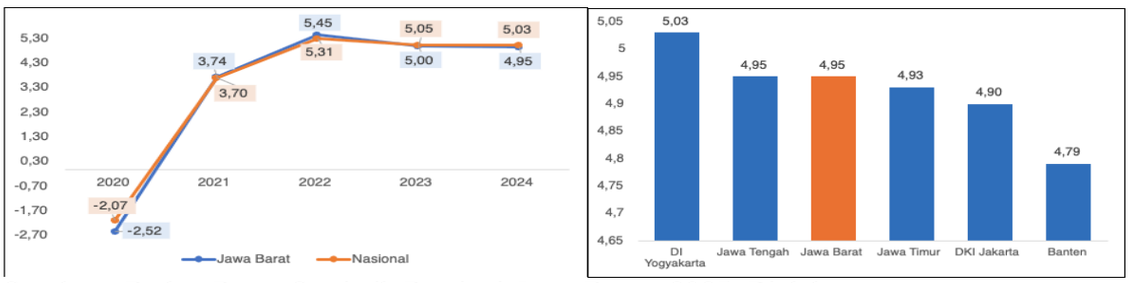

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2025. Diolah

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, serta berbagai hal positif lainnya. Secara spasial PDRB Jawa Barat sangat terpusat di kota-kota besar dengan dominasi sektor industri dan jasa (>50%), sementara daerah rural mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih lambat.

Pada tahun 2024, PDRB harga berlaku Jawa Barat berkontribusi sebesar 12,8 persen pada PDB, atau setara dengan Rp2.823 Triliun. Kontribusi ini hanya lebih rendah dari DKI Jakarta dan Jawa Timur yang masing-masing sebesar 16,7 dan 14,4 persen. Secara harga konstan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukan kinerja yang lebih moderat pada tingkat 4,95 persen. Capaian pertumbuhan ini menempatkan Jawa Barat pada posisi ke-16 pertumbuhan ekonomi tertinggi di tingkat nasional,

meskipun di sisi lain Jawa Barat masih memimpin pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa setelah provinsi DI Yogyakarta di tingkat 5,03 persen.

Kontribusi PDRB Jawa Barat dan pertumbuhannya yang terhitung masih resilien jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Jawa, harus diiringi dengan kualitas pembangunan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, menunjukan nilai tambah dari kegiatan usaha yang dilakukan di dalam regional tanpa membedakan wilayah atau negara asal pelakunya. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi harus terus didorong inklusifitas dan keberlanjutannya untuk menghasilkan pembangunan yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat terwujud di setiap kabupaten/kota yang diiringi dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan pengurangan ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2024 menunjukan kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat, terdapat 20 (dua puluh) kabupaten/kota yang tumbuh di atas agregat Jawa Barat. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Majalengka pada tingkat 6,38 persen. Sementara itu pertumbuhan terendah dicapai oleh Kabupaten Indramayu pada tingkat 2,18, dimana capaian ini adalah perlambatan signifikan dari capaian pertumbuhan 9,76 persen pada tahun 2023 yang merupakan sumbangan besar dari peningkatan produksi sektor industri pengolahan migas.

Gambar 2.58
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2024

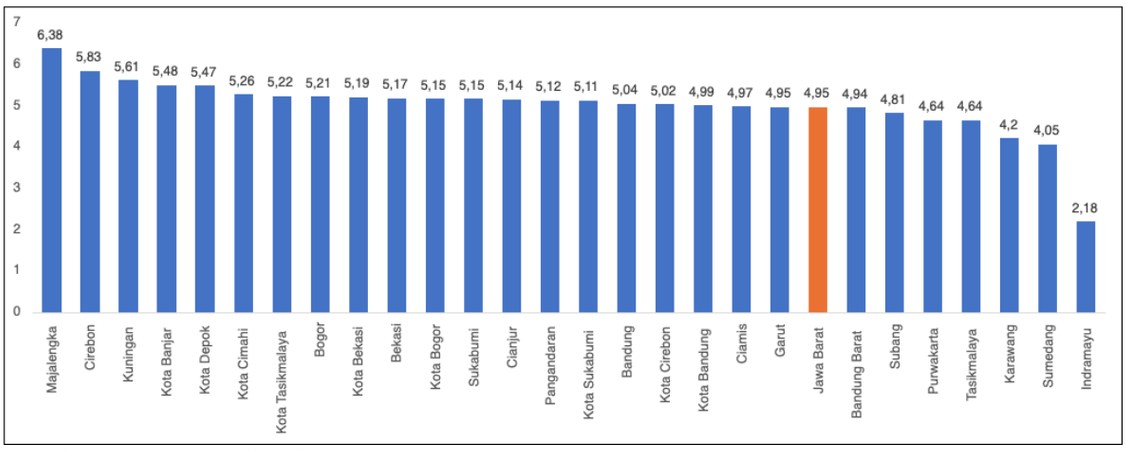

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Jawa Barat selama periode 2019-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat sebesar Rp9,414 juta (21,77 persen) dan atas dasar harga konstan naik sebesar Rp3,301 juta (10,94 persen). Kenaikan PDRB per kapita selama periode tahun tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi tengah berkembang. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Agar PDRB per kapita terus tumbuh, ekonomi harus terus tumbuh dan melampaui pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama Tahun 2020-2024 sebesar 1,13 persen. Artinya PDRB per kapita tumbuh lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduk, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per orang meningkat.

Dominasi sektor ekonomi di daerah tertentu sangat berpengaruh pada PDRB per kapita. Daerah dengan sektor industri manufaktur atau teknologi maju seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang cenderung memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang bergantung pada sektor pertanian. Hal ini menyebabkan adanya disparitas tingkat kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota.

Gambar 2.59
PDRB Per Kapita Jawa Barat 2020-2024 dan Perbandingan Antar Provinsi di Pulau Jawa 2024 (ribu rupiah)

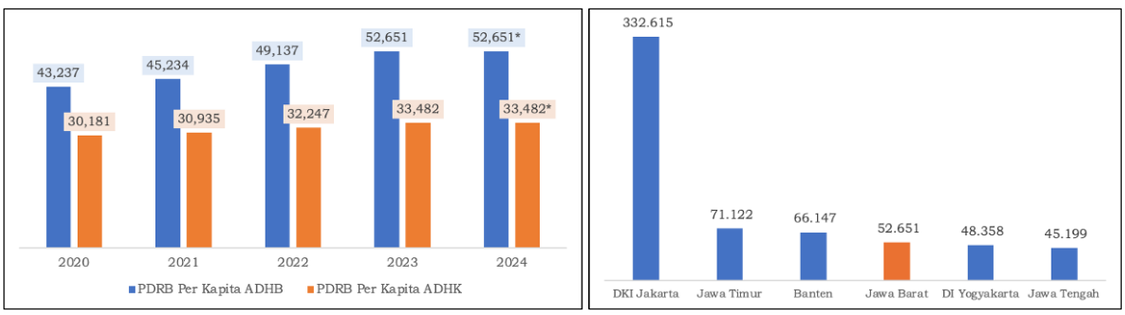

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2025. Diolah

C. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berdampak terhadap capaian pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi harus ditopang

oleh stabilitas harga yang terjaga. Ancaman resesi global yang sebelumnya mengancam perekonomian dunia perlahan mulai berkurang seiring dengan meredanya laju inflasi yang mencapai puncaknya pada tahun 2022. Meski begitu, tantangan baru muncul dalam bentuk ketegangan geopolitik yang mengancam kestabilan ekonomi global. Fragmentasi ekonomi dan meningkatnya proteksionisme berpotensi memperlambat perdagangan dan investasi internasional, serta menyulitkan upaya pengendalian inflasi secara global.

Sepanjang tahun 2023, inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan cukai rokok, penyesuaian harga BBM, dan lonjakan permintaan menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan. Di samping itu, fluktuasi harga minyak dunia turut memberikan tekanan tambahan pada dinamika inflasi. Kondisi cuaca panas ekstrem dan kemarau yang berkepanjangan masih menjadi isu utama dalam kenaikan beberapa komoditas pangan. Meskipun demikian, berbagai program pengendalian inflasi, misalnya yang dilakukan Bank Indonesia, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) memberikan pengaruh pada pengendalian harga melalui penguatan sektor pertanian, *urban farming,* dan kerja sama antar daerah. Dampak positif dari program ini terlihat pada komoditas-komoditas strategis seperti minyak goreng, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah yang menjadi penyumbang deflasi bulanan.

Gambar 2.60
Perkembangan Inflasi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (y-to-y) persen

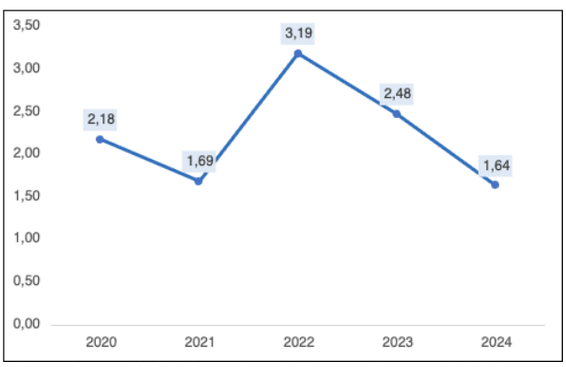

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2025, diolah

Gambar 2.61
Perbandingan Inflasi Jawa Barat Tahun 2023-2024 (m-to-m) (persen)

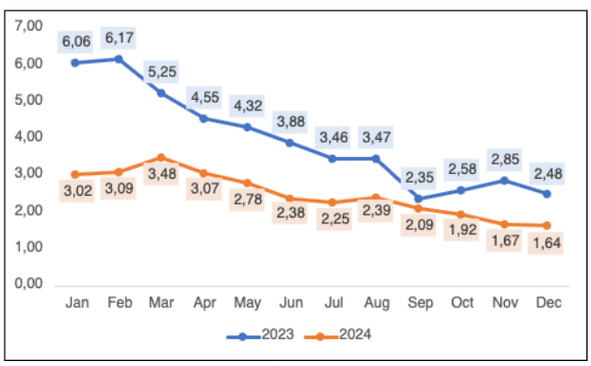

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2025, diolah

Perjalanan inflasi di Jawa Barat 5 (lima) tahun terakhir mencerminkan dinamika perekonomian yang penuh tantangan. Pada

gambar di atas Tahun 2021 menjadi titik terendah dengan inflasi 1,69 persen akibat pandemi, sebelum perlahan bangkit dan menjadi lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2022 sebesar 3,19 persen. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas global dan penyesuaian BBM. Jika dilihat secara *month-to-month*, Provinsi Jawa Barat memiliki kecenderungan mengalami deflasi di pertengahan tahun. Kondisi ini tidak terlepas dari deflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini menandakan upaya pengendalian inflasi yang efektif dan respon positif terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Sebaliknya, Gambar 2.61 menggambarkan perbandingan inflasi bulanan (*month-to-month*) antara tahun 2023 dan 2024. Inflasi bulan Januari 2023 tercatat pada 3,02 persen, kemudian mengalami variasi sepanjang tahun, mencapai 5,25 persen pada bulan Mei sebelum menurun kembali menjadi 2,85 persen pada bulan Desember 2024. Tren penurunan ini mencerminkan stabilitas harga yang lebih baik dan harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, analisis terhadap kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun inflasi mengalami peningkatan di awal periode, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif telah berhasil menstabilkan perekonomian dan mengurangi laju inflasi menuju tahun 2024. Keberhasilan ini dapat tercapai melalui sinergi berbagai kebijakan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

D. Gini Rasio

Tingkat kesenjangan ekonomi melalui Indeks Gini (Gini Rasio). Gini Rasio merupakan indikator dalam mengukur distribusi pendapatan suatu daerah. Besarnya Gini Rasio berkisar diantara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika indeks Gini sama dengan 0 (nol) hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merata sempurna, sedangkan indeks Gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan distribusi pendapatan sama sekali tidak merata.

Gambar berikut memperlihatkan perkembangan Gini Rasio di Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung meningkat. Berdasarkan data tersebut, gini rasio di Jawa Barat mengalami peningkatan secara konsisten dari 0,398 pada tahun 2020 menjadi 0,428 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan distribusi

pendapatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, gini rasio Nasional cenderung stabil dengan berkisar antara 0,381 hingga 0,388 selama periode yang sama. Stabilitas ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia secara keseluruhan relatif terkendali.

Gambar 2.62
Realisasi Gini Ratio di Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

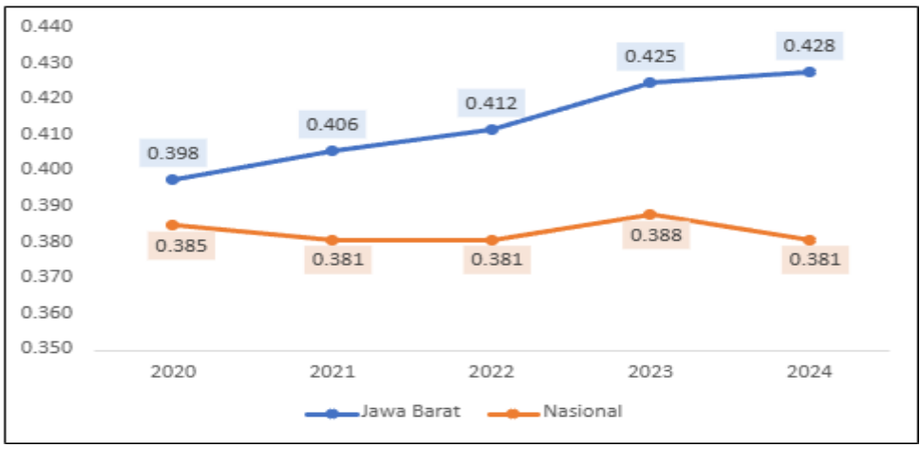

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah, 2024

Berdasarkan gambar di bawah, pada September 2024, gini rasio di daerah perkotaan adalah 0,439 dan apabila dibandingkan dengan Maret 2023 tidak ada perubahan. Sementara itu, gini rasio di daerah pedesaan justru meningkat dari 0,321 menjadi 0,327 pada September 2024. Meskipun ada perbedaan, nilai gini rasio di kedua wilayah masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Gini Rasio wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang di perdesaan. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih besar. Penurunan gini rasio didorong oleh pembangunan di kawasan metropolitan Rebana dan Jawa Barat bagian selatan yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Gambar 2.63
Perkembangan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan
Tahun 2020-2024

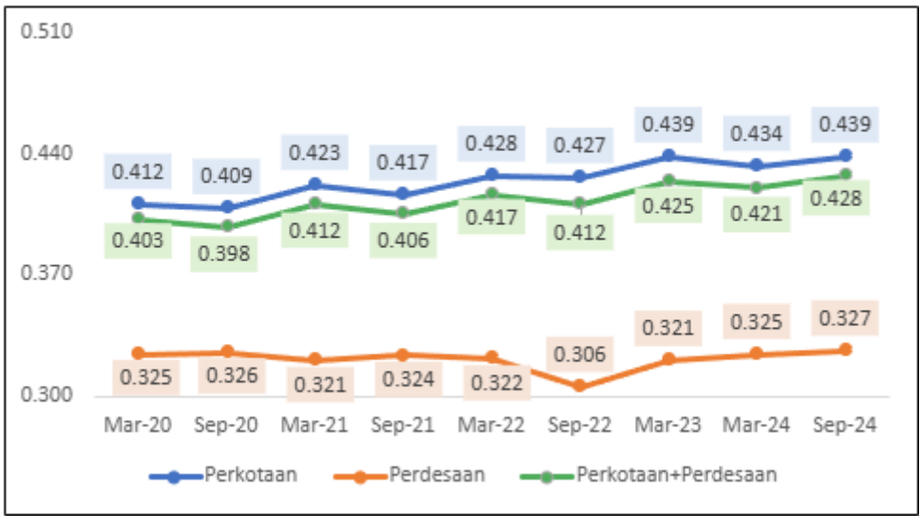

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan Jawa Barat pada September 2024 adalah 15,91 persen. Sementara persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2023 sebesar 20,74 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan di Jawa Barat termasuk ke dalam ketimpangan sedang sementara daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu:

a. Ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka;
b. Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil;
c. Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti dan saham; dan
d. Ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Hal ini terlihat saat terjadi goncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena

dampak karena menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Dalam konstelasi regional Jawa, jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya, Gini Rasio Provinsi Jawa Barat masih termasuk yang tertinggi ketiga dan melebihi Gini Rasio nasional, sehingga diperlukan program-program pembangunan berbasis pedesaan yang dilaksanakan cukup efektif mempersempit ketimpangan di wilayah pedesaan. Program pengembangan ekonomi di wilayah perkotaan kedepannya perlu memperkuat sisi inklusif dan pemerataan khususnya usaha mikro dan kecil, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.15
Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	0,400	0,411	0,412	0,431	0,431
Jawa Barat	**0,398**	**0,406**	**0,412**	**0,425**	**0,428**
Jawa Tengah	0,359	0,368	0,366	0,369	0,364
DI Yogyakarta	0,437	0,436	0,459	0,449	0,428
Jawa Timur	0,364	0,364	0,365	0,387	0,373
Banten	0,365	0,363	0,377	0,368	0,359
Nasional	**0,385**	**0,381**	**0,381**	**0,388**	**0,381**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam konteks Jawa Barat, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka *gini ratio* lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB kabupaten/kota tahun 2024 triwulan III terhadap pembentukan PDRB provinsi dimana 51 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten (Bogor, Bekasi, dan Karawang) dan 1 (satu) kota yaitu Kota Bandung. Dalam skala provinsi, ketimpangan kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Terdapat 2 (dua) kelompok kabupaten/kota yang terbagi berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadaro, yakni kelompok kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini rasio berkisar 0,36-0,49) dan kelompok kabupaten/kota dengan pemerataan yang relatif tinggi (angka gini rasio berkisar 0,20-0,35).

Pertumbuhan gini rasio kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Capaian gini rasio tingkat kabupaten/kota tahun 2024 belum

rilis dari BPS Provinsi Jawa Barat. Kabupaten/kota yang tingkat ketimpangan tertinggi pada tahun 2023 adalah Kota (Cirebon, Bogor, Bandung dan Sukabumi) dan Kabupaten (Tasikmalaya, Bekasi, Karawang). Kabupaten/kota yang termasuk kategori ketimpangan sedang, umumnya memiliki karakteristik perekonomian yang berbasis industri dan perdagangan. Adapun kelompok kabupaten/kota dengan distribusi pengeluaran yang merata memiliki karakteristik perekonomian yang berbasis pertanian. Hal ini disebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini pula yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pola spasial status pencapaian gini rasio kabupaten/kota ditunjukkan tahun 2023 pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.16
Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor	0,381	0,396	0,400	0,369	0,398
2	Sukabumi	0,334	0,343	0,309	0,355	0,342
3	Cianjur	0,350	0,372	0,313	0,319	0,338
4	Bandung	0,414	0,386	0,370	0,348	0,364
5	Garut	0,352	0,322	0,302	0,361	0,324
6	Tasikmalaya	0,343	0,378	0,378	0,404	0,363
7	Ciamis	0,336	0,342	0,337	0,341	0,326
8	Kuningan	0,361	0,349	0,345	0,351	0,369
9	Cirebon	0,338	0,339	0,355	0,361	0,374
10	Majalengka	0,336	0,354	0,367	0,342	0,354
11	Sumedang	0,384	0,359	0,394	0,366	0,337
12	Indramayu	0,319	0,321	0,301	0,344	0,306
13	Subang	0,350	0,329	0,360	0,331	0,32
14	Purwakarta	0,414	0,388	0,367	0,372	0,398
15	Karawang	0,327	0,374	0,353	0,389	0,376
16	Bekasi	0,372	0,340	0,373	0,397	0,367
17	Bandung Barat	0,376	0,356	0,368	0,374	0,4
18	Pangandaran	0,335	0,320	0,294	0,323	0,286
19	Kota Bogor	0,412	0,441	0,430	0,464	0,477
20	Kota Sukabumi	0,397	0,436	0,482	0,458	0,436
21	Kota Bandung	0,402	0,427	0,459	0,459	0,44
22	Kota Cirebon	0,421	0,489	0,468	0,468	0,424
23	Kota Bekasi	0,352	0,401	0,441	0,414	0,435
24	Kota Depok	0,344	0,367	0,394	0,402	0,398
25	Kota Cimahi	0,380	0,415	0,408	0,394	0,402
26	Kota Tasikmalaya	0,366	0,414	0,405	0,428	0,359
27	Kota Banjar	0,312	0,341	0,362	0,337	0,318

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Gambar 2.64
Peta Capaian Gini Ratio Tahun 2024

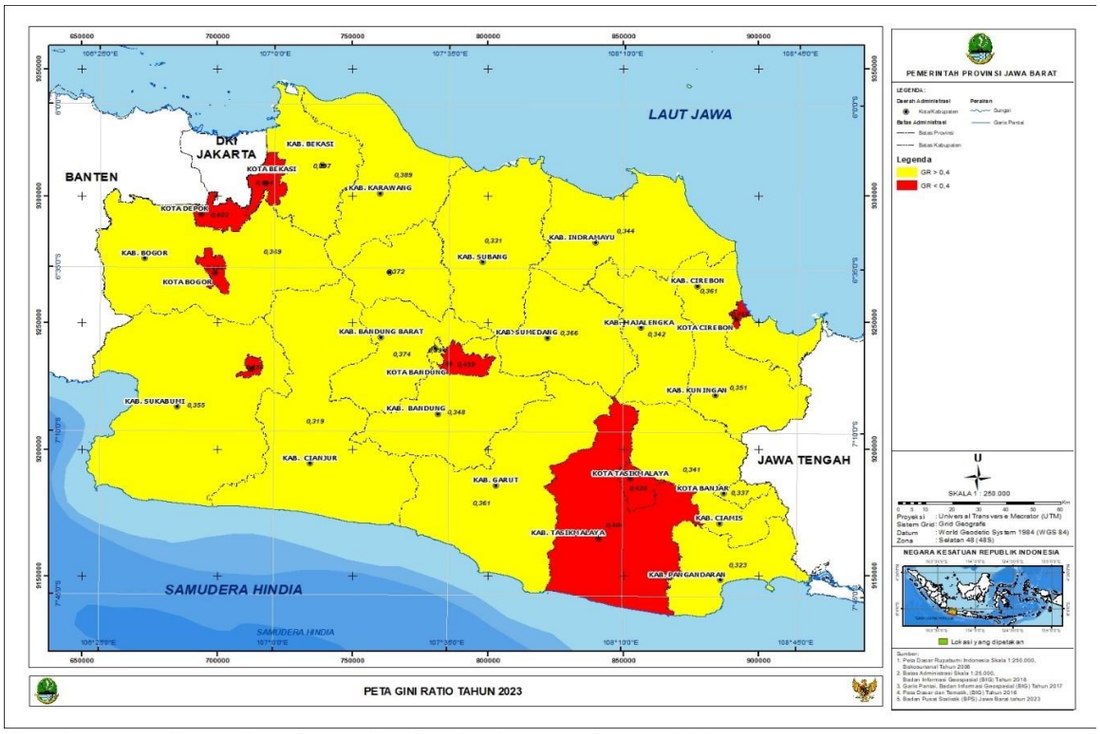

Sumber: Hasil analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Gini Rasio Jawa Barat adalah yang tertinggi di Indonesia, mencapai 0,428 di tahun 2024. Meskipun demikian, gini rasio bersifat lokal, artinya gini rasio antar daerah tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena akan terjadi bias pembangunan. Gini rasio dapat menunjukkan ketimpangan yang rendah ketika melihat suatu daerah yang merata kaya, dan juga daerah lain yang merata miskin. Oleh karena itu, pendekatan analisis gini rasio harus dilihat secara lokal.

Berdasarkan grafik di bawah, gini rasio yang rendah di Kabupaten Indramayu, Pangandaran, Garut, Subang, Majalengka, Cianjur, Tasikmalaya, Kuningan, Sumedang, dan Cirebon, terindikasi merata miskin, karena persentase kemiskinan yang masih tergolong tinggi di atas Jawa Barat. Sementara itu, gini rasio di daerah perkotaan cenderung tinggi tetapi diikuti oleh tingkat kemiskinan yang rendah, sehingga terindikasi adanya perbedaan pengeluaran yang sangat signifikan antar kelompok, mengingat jenis, sektor, dan posisi pekerjaan yang sangat beragam di perkotaan.

Gambar 2.65
Sandingan Gini Rasio dan Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2024

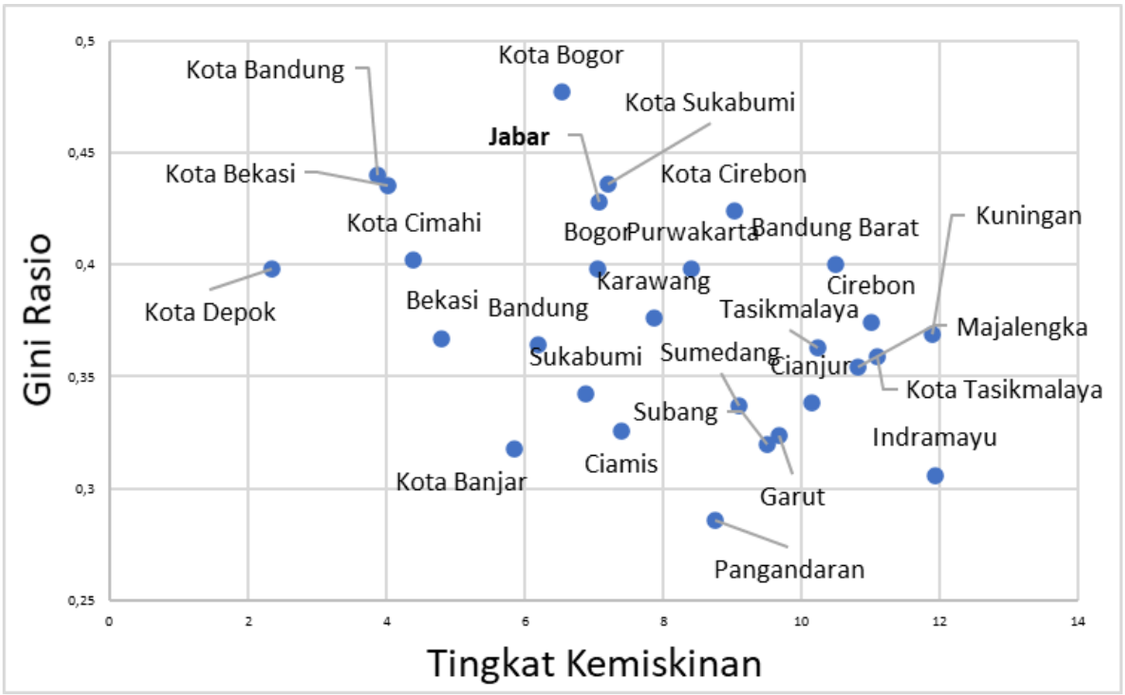

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah. Kualitas SDM seringkali dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. IPM Jawa Barat dapat menjadi barometer indikasi peningkatan kesejahteraan, yang meliputi angka harapan hidup dan rata-rata pengeluaran riil per kapita (daya beli).

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, IPM Jawa Barat telah menunjukkan peningkatan dari 74,24 tahun menjadi 74,92 tahun. Namun, kondisi IPM tersebut masih berada di bawah nasional, bahkan posisi kedua terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perkembangan dari IPM, Provinsi Jawa Barat masih perlu mengejar ketertinggalan dari Provinsi lainnya agar bisa menciptakan manusia yang berkualitas.

Gambar 2.66
Perbandingan IPM Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

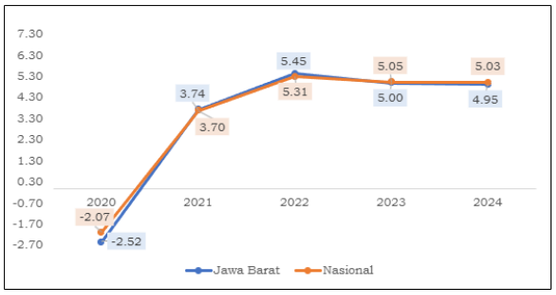

Gambar 2.67
Perbandingan IPM di Pulau Jawa Tahun 2024 (dalam poin)

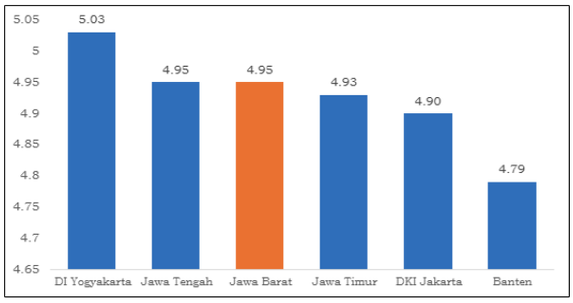

Sumber: BPS RI, BPS Jawa Barat, 2025

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, capaian IPM provinsi menunjukkan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta lebih maju dibandingkan provinsi lain dengan ca a ian ang uda ≥ 80 tahun yang berarti pembangunan sumber daya manu ia terma uk kateg ri "Sangat Tinggi" Sementara itu, ca aian pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat bersama 3 (tiga) provinsi lainn a ma i terg l n g kateg ri "Tinggi" yang disebabkan adanya disparitas pembangunan manusia antardaerah. Disparitas antar daerah tersebut terjadi karena perbedaan kesempatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, sehingga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah di Jawa Barat.

Tabel 2.17
Capaian IPM Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DKI Jakarta	81,92	82,25	82,77	83,55	84,15
2	**Jawa Barat**	**72,61**	**72,96**	**73,63**	**74,24**	**74,92**
3	Jawa Tengah	71,88	72,17	72,8	73,39	73,87
4	DI Yogyakarta	79,95	80,22	80,65	81,09	81,63
5	Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
6	Banten	74,41	74,68	75,252	75,77	76,35
Nasional		**72,81**	**73,16**	**73,77**	**74,39**	**75,02**

Sumber: BPS, 2024

Kualitas hidup manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya IPM pada tahun 2021 meskipun di tengah kondisi disrupsi pandemi. Peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat

merupakan resultan dari kemajuan pembangunan manusia di 27 kabupaten/kota. Pola spasial status pencapaian IPM kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 2.68 Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan permasalahan disparitas antarwilayah. Luasnya wilayah dan tidak meratanya pembangunan menjadi bagian dari faktor yang menyebabkan disparitas terjadi antar kabupaten/kota.

Gambar 2.68
Pola Spasial Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat tahun 2024 sebesar 74,92 poin tidak terlepas dari kontribusi capaian IPM kabupaten/kota di Jawa Barat. Di tingkat Kabupaten Kota, capaian IPM tertinggi didominasi oleh daerah perkotaan, utamanya Kota Bandung (83,75), Kota Bekasi (83,55), dan Kota Depok (83,05). Sementara itu capaian terendah didominasi daerah di Jabar Selatan, yaitu Kabupaten Cianjur (68,89), Garut (69,91), dan Tasikmalaya (69,98). Capaian IPM di tingkat Kabupaten Kota cenderung lebih rendah dari Jawa Barat, terhitung sebanyak 17 (tujuh belas) kabupaten memiliki IPM di bawah rata-rata Jawa Barat. Pemerataan pembangunan ke Jabar Selatan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan investasi pada potensi lokal diharapkan dapat meningkatkan IPM di Jabar Selatan.

Gambar 2.69
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

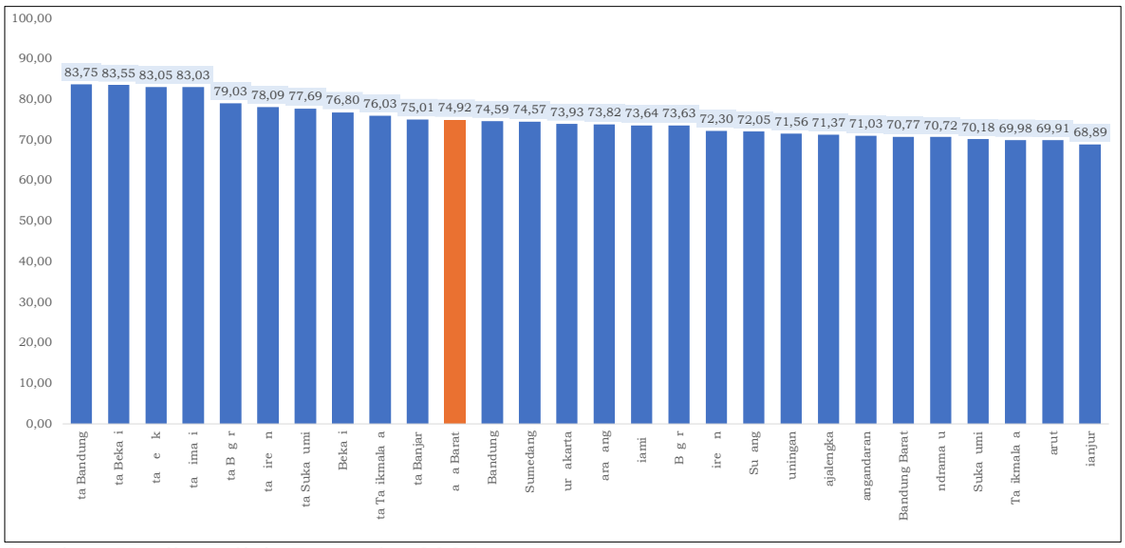

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Pertumbuhan IPM kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2024 dicapai oleh Kabupaten Cianjur dengan angka 1,04 persen, sedangkan pertumbuhan terendah tercatat di Kota Bandung sebesar 0,55 persen. Tahun 2024 beberapa kabupaten/kota mengalami pertumbuhan IPM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2023.

Tabel 2.18
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Rill per Kapita (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bogor	74,90	12,75	8,39	11.563
2	Sukabumi	74,85	12,39	7,34	9.815
3	Cianjur	74,80	12,04	7,33	9.026
4	Bandung	75,23	12,74	9,15	11.392
5	Garut	74,87	12,17	7,85	9.168
6	Tasikmalaya	74,06	12,64	7,97	8.965
7	Ciamis	75,26	14,30	8,10	10.085
8	Kuningan	75,22	12,27	7,90	10.418
9	Cirebon	74,98	12,42	7,65	11.529
10	Majalengka	74,98	12,27	7,53	10.842
11	Sumedang	75,29	13,02	8,74	11.589
12	Indramayu	74,82	12,32	6,95	11.010
13	Subang	75,08	12,11	7,46	11.894
14	Purwakarta	74,92	12,25	8,14	13.099

No.	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran Rill per Kapita (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Karawang	75,16	12,21	8,05	12.942
16	Bekasi	75,33	13,18	9,76	12.500
17	Bandung Barat	75,06	12,00	8,24	9.583
18	Pangandaran	75,11	12,31	8,10	9.654
19	Kota Bogor	75,80	13,51	10,71	13.154
20	Kota Sukabumi	75,11	13,62	10,38	12.252
21	Kota Bandung	75,83	14,25	11,07	18.795
22	Kota Cirebon	75,48	13,17	10,53	12.869
23	Kota Bekasi	76,14	14,14	11,79	16.775
24	Kota Depok	75,82	14,11	11,59	16.640
25	Kota Cimahi	75,55	13,85	11,52	13.278
26	Kota Tasikmalaya	75,31	13,50	9,63	11.431
27	Kota Banjar	74,99	13,28	8,83	11.811
Jawa Barat		**75,16**	**12,80**	**8,87**	**12.157**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

1. Pengeluaran per Kapita (Disesuaikan)

Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Capaian pengeluaran per kapita Tahun 2020-2024, terdapat tren peningkatan baik Nasional maupun Jawa Barat. Pengeluaran per kapita Indonesia terus meningkat dari Rp11.013 ribu pada 2020 menjadi Rp12.341 ribu pada 2024. Tren serupa terjadi di Jawa Barat, di mana pengeluaran per kapita juga meningkat dari Rp10.845 ribu pada 2020 menjadi Rp12.157 ribu pada 2024. Meskipun nilai pengeluaran per kapita di Jawa Barat berada di bawah rata-rata nasional sepanjang periode, selisih antara keduanya relatif stabil dan tidak terlalu signifikan.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan daya beli masyarakat, yang dapat dikaitkan dengan kebijakan ekonomi pemerintah, inflasi yang terkendali, atau peningkatan pendapatan riil. Namun, perbedaan pengeluaran antara Jawa Barat dan rata-rata nasional menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas ekonomi antarwilayah yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Gambar 2.70
Capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Tahun 2020-2024 (Rp.000)

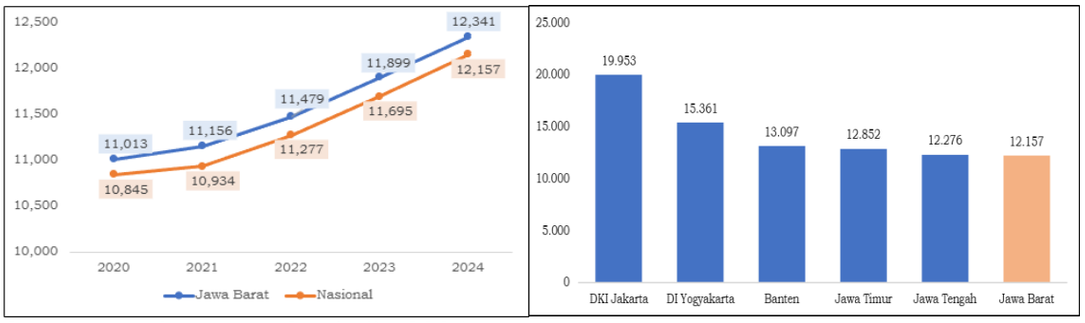

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2024, semua provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan pengeluaran per kapita kecuali Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan sebesar Rp1.081 ribu. Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan pengeluaran per kapita dari Rp10.845 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp12.157 ribu pada tahun 2024. Meskipun angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan positif, posisi Jawa Barat masih berada dibawah rata-rata nasional serta tertinggal dibandingkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pertumbuhan pengeluaran per kapita Jawa Barat yang stabil bisa diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring waktu. Sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kontribusi ekonomi secara nasional.

Tabel 2.19
Pengeluaran per Kapita Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024
(Rp.000/kapita/tahun)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DKI Jakarta	18.227	18.520	18.927	19.370	19.953
Jawa Barat	**10.845**	**10.934**	**11.277**	**11.695**	**12.157**
Jawa Tengah	10.930	11.034	11.377	11.835	12.276
DI Yogyakarta	14.015	14.111	14.482	14.924	15.361
Jawa Timur	11.601	11.707	11.992	13.870	12.852
Banten	11.964	12.033	12.216	12.601	13.097
Nasional	**11.013**	**11.156**	**11.479**	**11.899**	**12.341**

Sumber: BPS RI, 2024

Capaian pengeluaran per kapita kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Semua kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2024. Seluruh kabupaten/kota

mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar Rp18.795 ribu per kapita, sementara peningkatan pengeluaran per kapita terendah terjadi di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp8.965 ribu per kapita. Kondisi ini menyebabkan selisih antara nilai pengeluaran per kapita yang tertinggi (Kota Bandung) dengan yang terendah (Kabupaten Tasikmalaya) semakin besar mencapai Rp9.830 ribu per kapita pada tahun 2024.

Tabel 2.20
Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024
(Rp.000/kapita/tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor	11.563	10.410	10.860	11.153	11.563
2	Sukabumi	9.815	8.850	9.210	9.482	9.815
3	Cianjur	9.026	8.052	8.244	8.626	9.026
4	Bandung	11.392	10.307	10.588	11.018	11.392
5	Garut	9.168	7.961	8.227	8.685	9.168
6	Tasikmalaya	8.965	7.829	8.177	8.562	8.965
7	Ciamis	10.085	9.259	9.428	9.750	10.085
8	Kuningan	10.418	9.409	9.620	10.011	10.418
9	Cirebon	11.529	10.368	10.791	11.128	11.529
10	Majalengka	10.842	9.591	9.950	10.340	10.842
11	Sumedang	11.589	10.262	10.776	11.136	11.589
12	Indramayu	11.010	9.810	10.166	10.580	11.010
13	Subang	11.894	10.854	11.294	11.537	11.894
14	Purwakarta	13.099	11.669	12.193	12.619	13.099
15	Karawang	12.942	11.522	11.927	12.392	12.942
16	Bekasi	12.500	11.341	11.757	12.123	12.500
17	Bandung Barat	9.583	8.546	9.044	9.392	9.583
18	Pangandaran	9.654	9.065	9.389	9.406	9.654
19	Kota Bogor	13.154	11.716	12.058	12.656	13.154
20	Kota Sukabumi	12.252	10.942	11.229	11.799	12.252
21	Kota Bandung	18.795	16.996	17.639	18.236	18.795
22	Kota Cirebon	12.869	11.810	12.087	12.506	12.869
23	Kota Bekasi	16.775	15.903	16.239	16.479	16.775
24	Kota Depok	16.640	15.420	15.926	16.279	16.640
25	Kota Cimahi	13.278	12.019	12.500	12.883	13.278
26	Kota Tasikmalaya	11.431	10.213	10.578	11.063	11.431
27	Kota Banjar	11.811	10.476	10.967	11.356	11.811
Provinsi Jawa Barat		**12.157**	**10.934**	**11.277**	**11.695**	**12.157**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Pola Spasial Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan kabupaten/kota tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan untuk wilayah Jawa Barat bagian Selatan masih berada pada kisaran kurang dari Rp10.000.000 per tahun. Berbeda dengan Jawa Barat

bagian Utara yang secara umum menunjukkan nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada kisaran Rp10.000.000 hingga Rp16.000.000 per tahun. Gambaran ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah Jawa Barat bagian Utara dengan Jawa Barat bagian Selatan dalam hal ekonomi.

Gambar 2.71
Pola Spasial Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Rp.000/kapita/tahun)

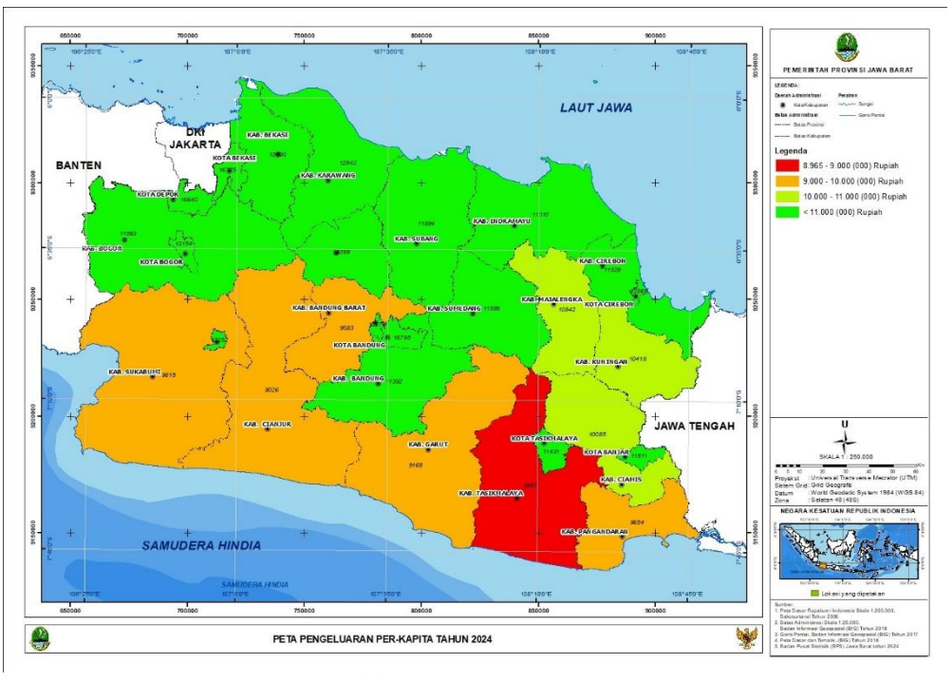

Sumber: Analisis Bappeda, 2025

2. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita Jawa Barat 2024 sebesar Rp56,08 juta. Di tingkat Kabupaten Kota, PDRB per kapita tertinggi didominasi oleh daerah perkotaan dan industri, utamanya di Kota Bandung (Rp147 juta), Kabupaten Bekasi (Rp128 juta), dan Kabupaten Karawang (Rp121 juta). Ketiga daerah ini memiliki PDRB per Kapita yang sangat signifkan tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai perbandingan, PDRB per kapita Kota Bandung hampir setara dengan enam kali lipat PDRB per kapita Kabupaten Cianjur, dan lebih dari dua kali lipat rata-rata Jawa Barat.

Sementara itu capaian terendah didominasi daerah di Jabar Selatan, yaitu Kabupaten Cianjur (Rp24,9 juta), Kabupaten Tasikmalaya (Rp25,9 juta), dan Kota Banjar (Rp26,45 juta). Ketimpangan pendapatan per kapita ini juga terlihat dari jumlah kabupaten kota yang berada di

bawah rata-rata Jawa Barat, yaitu sebanyak 20 (dua puluh) kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita di bawah Jawa Barat.

Gambar 2.72
Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2024

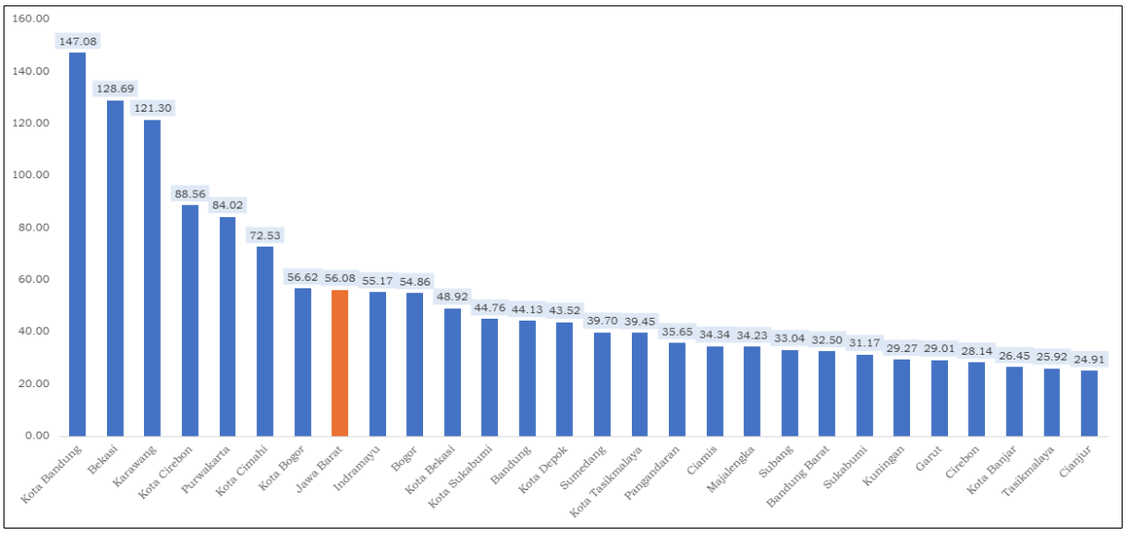

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

F. Kemiskinan

Indikator yang menggambarkan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, diukur melalui beberapa komponen sebagai berikut:

1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan adalah proporsi jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau *Cost of Basic Needs* (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Tingkat kemiskinan di Jawa Barat selama periode Tahun 2021-2024 menurun cukup signifikan dimana jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 346,6 ribu orang meskipun garis kemiskinan meningkat dari

Rp.427.402 menjadi Rp.524.052 per kapita per bulan. Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional dan beberapa provinsi di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan di Jawa Barat relatif lebih rendah. Berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, penduduk miskin di Jawa Barat terkonsentrasi di wilayah perkotaan (78,55 persen). Hal ini mengindikasikan banyak penduduk miskin yang bermigrasi ke perkotaan yang menawarkan beragam mata pencaharian dan lapangan kerja. Data BPS menunjukkan terdapat 67,73 persen penduduk miskin bekerja di sektor selain pertanian dan 62,87 persen bekerja di sektor informal.

Gambar 2.73
Persentase Penduduk Miskin 2020-2024 dan Perbandingan Antar Provinsi di Pulau Jawa 2024 (persen)

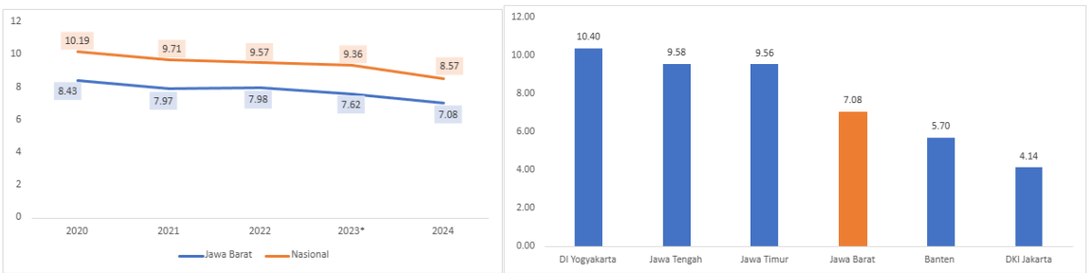

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan. Namun, perlu diperhatikan, konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang. Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp2.803.590 per bulan.

Sementara itu garis kemiskinan Jawa Barat September 2024 adalah Rp532.551 per kapita per bulan, kemudian jumlah anggota rumah tangga miskin di Jawa Barat adalah 4,58 orang, maka garis kemiskinan per rumah tangga per bulan di Jawa Barat adalah Rp2.439.083.

Kemiskinan di Jawa Barat sebesar 7,08 persen, setara dengan 3,7 juta orang atau 785.562 keluarga. Secara persentase, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Indramayu (11,93 persen), Kuningan (11,88 persen), dan Kota Tasikmalaya (11,1 persen). Sementara itu dari sisi jumlah, tertinggi adalah Kabupaten Bogor (446 ribu), Kabupaten Garut (259 ribu), dan Kabupaten Cirebon (245 ribu).

Gambar 2.74
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024

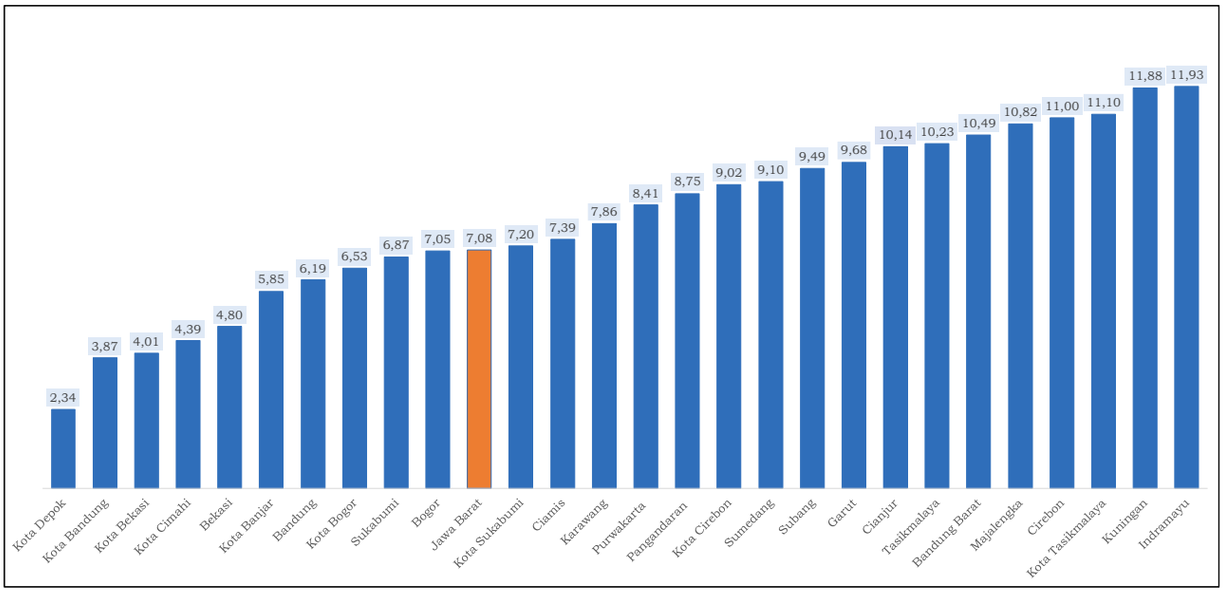

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

Gambar 2.75
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024

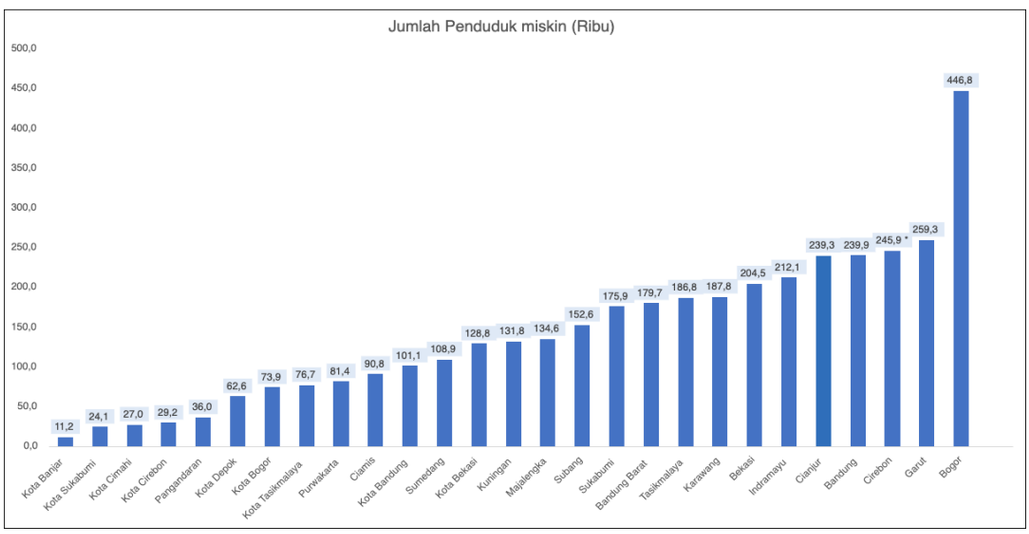

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

Tingkat kemiskinan yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan, kemudian disandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang menunjukan adanya keterbatasan untuk memiliki penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Gambar di bawah menunjukkan bahwa terdapat daerah dengan tingkat pengangguran tinggi tetapi tingkat kemiskinannya rendah, diantaranya adalah Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Banjar. Beberapa sumber menyebutkan bahwa resiliensi ini diakibatkan oleh

kuatnya jaring pengaman sosial, serta adanya sumber pendapatan lain seperti warisan, bantuan keluarga, atau sumber pendapatan pasif lainnya. Penelaahan lebih mendalam diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi ini di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

Terdapat 2 (dua) kelompok yang perlu menjadi perhatian, yaitu pengangguran tinggi dan kemiskinan tinggi sehingga memerlukan intervensi dalam membuka lapangan kerja, yaitu di Kabupaten Kuningan, Karawang, dan Bandung Barat. Kelompok kedua adalah kelompok dengan pengangguran rendah tetapi kemiskinan tinggi yang membutuhkan intervensi dalam peningkatan kualitas pekerjaan, diantaranya adalah Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Majalengka, Indramayu, dan Cianjur.

Gambar 2.76
Sandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

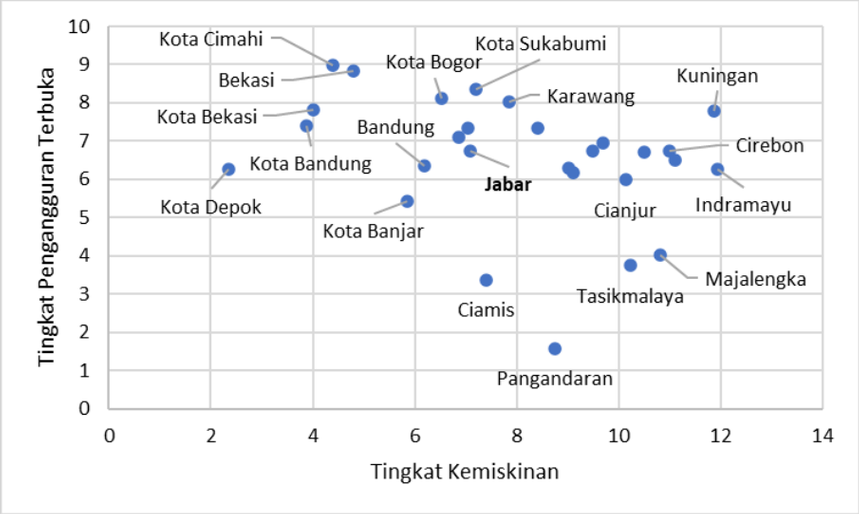

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

2. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai P1 maka semakin besar potensi ekonomi

untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Gambar di bawah, menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan pada periode 2020 hingga 2024 di Jawa Barat. Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran bahwa pada periode tersebut rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, artinya kondisi kemiskinan semakin memburuk. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, meskipun secara persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan perkotaan. Kondisi ini memberikan pesan bahwa kelompok penduduk miskin di wilayah perdesaan mengalami tekanan yang lebih berat akibat menurunnya atau bahkan hilangnya pendapatan imbas dari guncangan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut.

Gambar 2.77
Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024

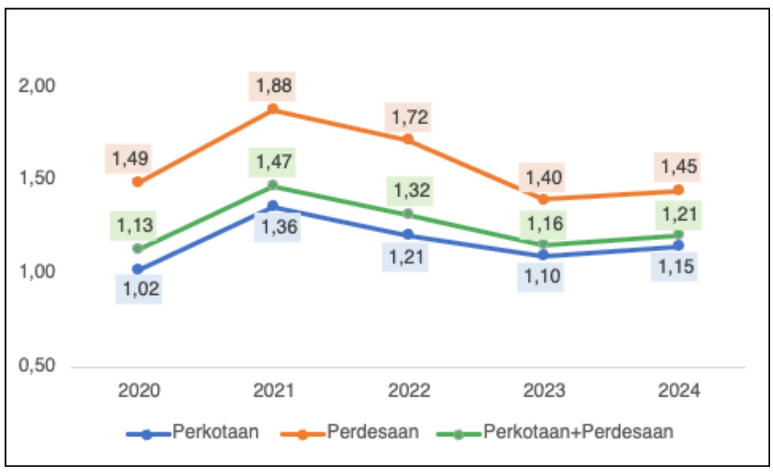

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam skala provinsi, indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota menunjukkan nilai yang bervariasi. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dialami Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di 3 (tiga) daerah tersebut yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya usaha yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, ketiga

daerah tersebut semestinya menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor	0,83	1,36	1,49	0,97	1,08
2	Sukabumi	0,80	1,04	0,93	1,01	0,88
3	Cianjur	1,38	1,83	1,35	1,29	1,58
4	Bandung	0,92	1,23	0,90	1,10	0,61
5	Garut	0,97	1,4	1,81	1,17	1,41
6	Tasikmalaya	0,83	1,57	1,42	1,61	1,01
7	Ciamis	0,92	0,88	1,07	0,90	0,99
8	Kuningan	2,41	2,02	2,14	1,87	2,02
9	Cirebon	1,30	1,94	2,27	1,98	1,69
10	Majalengka	1,41	2,44	1,55	1,34	1,76
11	Sumedang	1,72	1,72	1,98	1,64	1,6
12	Indramayu	2,18	2,46	1,72	2,20	2,05
13	Subang	1,29	1,93	1,55	1,90	1,63
14	Purwakarta	1,04	1,31	1,19	1,48	1,37
15	Karawang	1,28	1,27	1,58	1,06	1,18
16	Bekasi	0,72	0,91	0,74	0,82	0,7
17	Bandung Barat	1,40	1,62	1,70	1,54	1,17
18	Pangandaran	1,32	1,25	1,24	1,28	1,23
19	Kota Bogor	1,08	1,1	1,27	0,99	0,95
20	Kota Sukabumi	1,17	1,39	1,27	1,21	0,88
21	Kota Bandung	0,61	0,78	0,70	0,59	0,6
22	Kota Cirebon	1,68	2,22	1,34	1,29	1,18
23	Kota Bekasi	0,60	0,66	0,96	0,63	0,8
24	Kota Depok	0,29	0,34	0,42	0,24	0,34
25	Kota Cimahi	0,75	0,93	0,67	0,54	0,83
26	Kota Tasikmalaya	1,75	2,42	2,34	1,62	1,35
27	Kota Banjar	0,70	1,19	1,02	0,68	1,03
Provinsi Jawa Barat		**1,13**	**1,47**	**1,24**	**1,16**	**1,05**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2025

Pada gambar peta di bawah ini, memperlihatjan pola spasiall indeks kedalaman kemiskinan murni 2024 Pola tersebut memberikan gambaran skala prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. Terdapat dua Kabupaten/kota (Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan) yang memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan lebih dari 2 persen yang seharusnya menjadi lokus utama dan memerlukan upaya yang lebih keras untuk akselerasi penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang dimaknai dengan

pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, tentu saja akan memudahkan intervensi terhadap kelompok penduduk miskin agar dapat keluar dari zona kemiskinan (pengeluaran di atas garis kemiskinan) melalui konvergensi program-program penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2.78
Pola Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota
Maret 2024

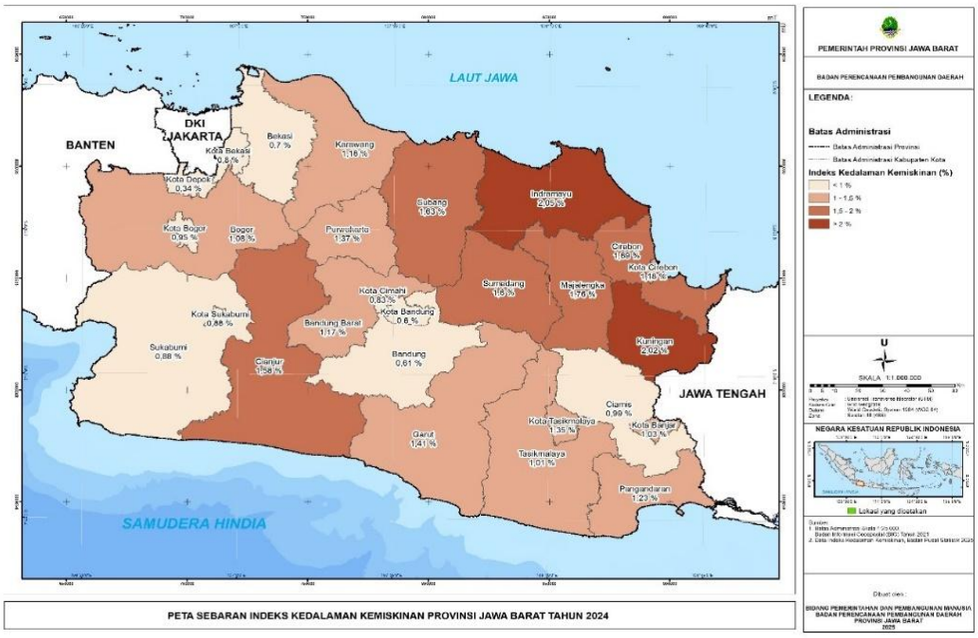

Sumber: Bappeda, 2025

Berdasarkan hasil Susenas September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Barat turun menjadi 1,05 persen, menandakan penyempitan kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin dibandingkan Maret 2023 yang tercatat 1,16 persen. Penurunan ini terutama terjadi di wilayah perkotaan, dari 1,10 persen menjadi 0,96 persen, sementara di perdesaan justru terjadi kenaikan dari 1,40 persen menjadi 1,44 persen.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah ukuran yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar ketimpangan pengeluaran yang terjadi di kalangan penduduk miskin. Dengan kata lain, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi tentang seberapa besar perbedaan pengeluaran antara penduduk miskin yang paling miskin dengan yang kurang miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga

menunjukkan penurunan dari 0,27 persen menjadi 0,24 persen, mencerminkan semakin sempitnya ketimpangan kemiskinan secara keseluruhan. Namun, tren yang sama tidak terlihat merata, karena meski P2 di perkotaan menurun dari 0,26 persen menjadi 0,21 persen, P2 di perdesaan justru naik dari 0,34 persen menjadi 0,36 persen.

Gambar 2.79
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024

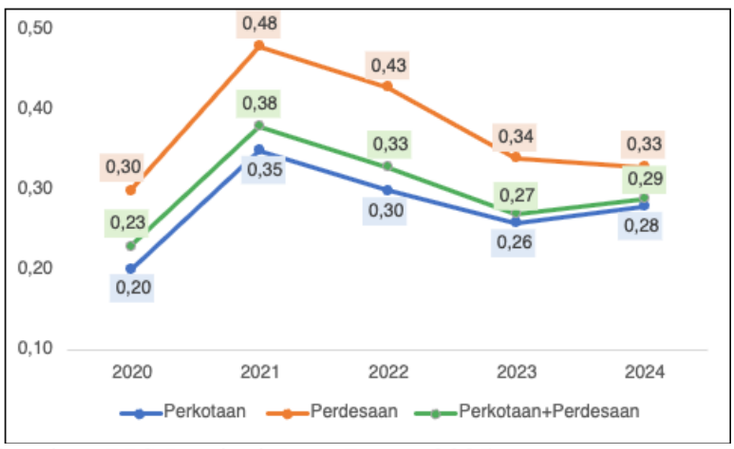

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam skala provinsi, indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota menunjukkan nilai yang bervariasi. Nilai indeks keparahan kemiskinan tertinggi dialami Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di 3 (tiga) kabupaten tersebut yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya usaha yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, ketiga daerah tersebut semestinya menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.22
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor	0,11	0,35	0,45	0,21	0,26
2	Sukabumi	0,12	0,23	0,19	0,23	0,2
3	Cianjur	0,27	0,46	0,27	0,26	0,41
4	Bandung	0,17	0,34	0,21	0,29	0,09
5	Garut	0,15	0,29	0,45	0,23	0,29

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Tasikmalaya	0,11	0,35	0,28	0,42	0,15
7	Ciamis	0,16	0,15	0,24	0,17	0,2
8	Kuningan	0,62	0,46	0,53	0,42	0,53
9	Cirebon	0,24	0,47	0,59	0,53	0,36
10	Majalengka	0,25	0,77	0,36	0,26	0,45
11	Sumedang	0,42	0,46	0,53	0,35	0,45
12	Indramayu	0,56	0,66	0,48	0,62	0,54
13	Subang	0,25	0,5	0,41	0,55	0,46
14	Purwakarta	0,20	0,3	0,25	0,36	0,35
15	Karawang	0,25	0,29	0,41	0,22	0,28
16	Bekasi	0,18	0,26	0,18	0,20	0,17
17	Bandung Barat	0,25	0,32	0,41	0,34	0,23
18	Pangandaran	0,28	0,27	0,26	0,27	0,29
19	Kota Bogor	0,26	0,27	0,29	0,20	0,24
20	Kota Sukabumi	0,22	0,36	0,38	0,31	0,18
21	Kota Bandung	0,13	0,24	0,17	0,15	0,14
22	Kota Cirebon	0,40	0,68	0,30	0,29	0,25
23	Kota Bekasi	0,15	0,16	0,27	0,13	0,21
24	Kota Depok	0,06	0,07	0,10	0,03	0,07
25	Kota Cimahi	0,18	0,21	0,14	0,10	0,21
26	Kota Tasikmalaya	0,39	0,69	0,65	0,32	0,26
27	Kota Banjar	0,12	0,28	0,28	0,12	0,29
Provinsi Jawa Barat		**0,23**	**0,38**	**0,38**	**0,27**	**0,29**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Gambar 2.80
Pola Spasial Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota
Maret 2024

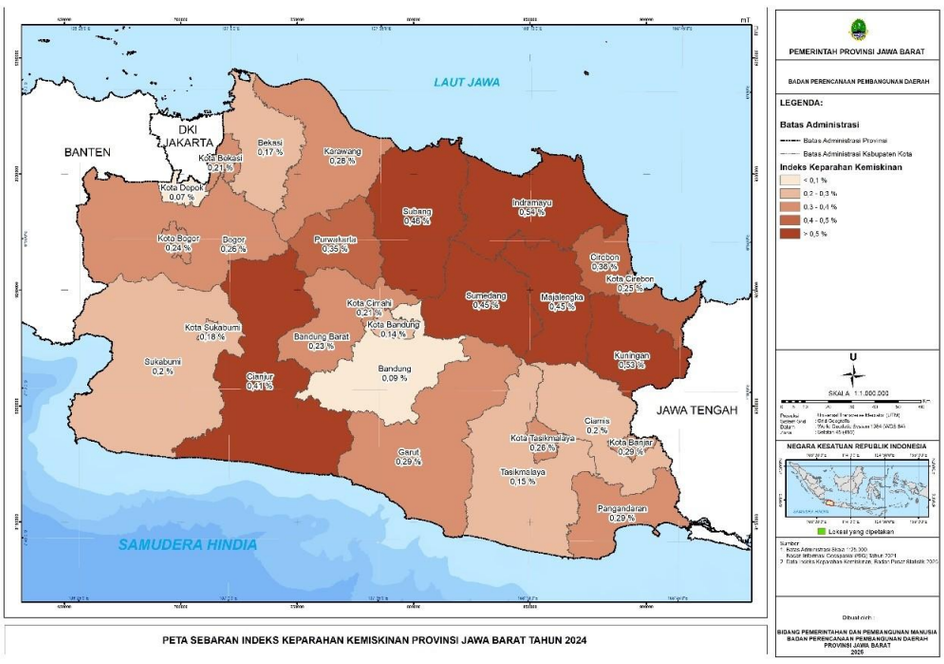

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Profil kemiskinan di Jawa Barat sebagaimana diuraikan di atas memberikan gambaran kondisi terkini. Jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 941,86 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 403,38 ribu jiwa pada tahun 2023. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor dengan jumlah 146,12 ribu jiwa pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 47,22 ribu jiwa pada tahun 2023. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem terendah berada di Kota Bekasi dan Kota Depok dengan jumlah 0 ribu jiwa pada tahun 2023.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	107,25	146,12	47,22
2	Sukabumi	24,61	19,90	24,05
3	Cianjur	57,04	36,16	11,89
4	Bandung	66,96	56,43	46,81
5	Garut	30,32	82,17	9,55
6	Tasikmalaya	28,24	15,74	27,12
7	Ciamis	5,51	17,90	1,32
8	Kuningan	24,03	31,89	15,7
9	Cirebon	64,44	81,89	36,64
10	Majalengka	43,84	24,13	10,64
11	Sumedang	31,71	36,82	6,37
12	Indramayu	75,82	53,05	38,55
13	Subang	57,51	35,44	34,61
14	Purwakarta	18,58	16,93	10,19
15	Karawang	28,22	64,02	17,89
16	Bekasi	56,00	25,82	19,82
17	Bandung Barat	28,25	33,59	15,04
18	Pangandaran	5,61	5,93	2,65
19	Kota Bogor	13,59	14,45	4,93
20	Kota Sukabumi	9,98	4,49	2,54
21	Kota Bandung	24,79	25,37	9,14
22	Kota Cirebon	13,06	5,32	1,09
23	Kota Bekasi	33,25	61,75	0,000
24	Kota Depok	9,44	17,57	0,000
25	Kota Cimahi	8,34	2,63	2,98
26	Kota Tasikmalaya	27,17	23,88	6,59
27	Kota Banjar	2,08	2,49	0,08
Provinsi Jawa Barat		**895,64**	**941,86**	**403,38**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat saat ini, didominasi oleh angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMK terutama pada bulan Agustus yang menunjukkan bahwa pelajar SMK yang lulus tidak bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi pemicu tingginya TPT pada jenjang pendidikan SMK. Selain itu, tingginya TPT pada jenjang pendidikan tersebut menunjukkan bahwa masih adanya masalah ketidaksesuaian antara lulusan sekolah vokasi dengan kebutuhan sektor industri di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.81
Tingkat Pengangguran Terbuka 2020-2024 dan Perbandingan Antar Provinsi di Pulau Jawa 2024 (persen)

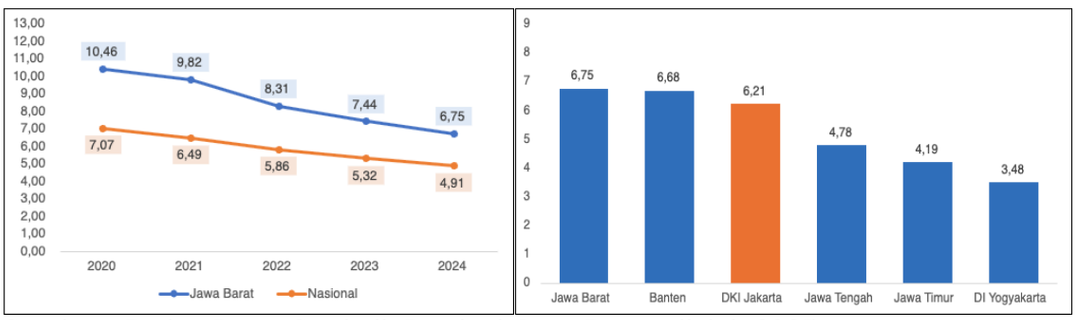

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah 2025

Jumlah angkatan kerja menunjukkan tren peningkatan dari 24,74 juta pada 2021 menjadi 26,19 juta pada 2024. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan atau bekerja semakin besar. Peningkatan ini bisa diartikan sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi, perbaikan iklim investasi, atau dorongan program pemerintah yang memotivasi partisipasi angkatan kerja, termasuk dari kalangan perempuan.

Jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan konsisten, dari 22,31 juta pada 2021 menjadi 24,42 juta pada 2024. Hal ini merupakan sinyal positif bahwa penciptaan lapangan kerja mampu mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan di sektor-sektor produktif yang berhasil menyerap tenaga kerja, meski tidak dijelaskan sektor mana yang dominan dalam menyerap tenaga kerja tersebut.

Jumlah pengangguran mengalami penurunan cukup signifikan dari 2,43 juta orang pada 2021 menjadi hanya 1,77 juta orang pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan atau program

pengurangan pengangguran, sekaligus menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi pasca-pandemi. Namun demikian, angka absolut ini tetap besar dan menunjukkan perlunya strategi berkelanjutan dalam menciptakan pekerjaan yang layak.

Bukan angkatan kerja mengalami penurunan dari 13,35 juta orang pada 2021 menjadi 12,48 juta orang pada 2024. Ini menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang memasuki pasar tenaga kerja, baik karena kebutuhan ekonomi maupun sebagai hasil dari kebijakan pemberdayaan. Penurunan ini juga bisa disebabkan oleh berkurangnya jumlah penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau tidak ingin/tidak mampu bekerja.

Tabel 2.24
Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (persen)

No.	Status Keadaan Ketenagakerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,53	64,95	66,15	66,49	67,71
	- Laki-Laki	81,9	81,68	83,93	84,63	84,51
	- Perempuan	46,79	47,88	48,01	47,98	50,59

Sumber : Sakernas Agustus BPS, 2025

Kenaikan TPAK mencerminkan semakin besarnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja maupun mencari kerja. Tren positif ini mengindikasikan perbaikan dalam motivasi kerja, perluasan kesempatan kerja, atau keberhasilan program-program peningkatan produktivitas dan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah daerah.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki secara konsisten berada pada tingkat yang tinggi, yaitu dari 81,68 persen pada 2021 hingga mencapai 84,51 persen pada 2024. Sementara itu, TPAK perempuan juga menunjukkan peningkatan, meskipun dengan nilai yang lebih rendah: dari 47,88 persen menjadi 50,59 persen. Peningkatan partisipasi perempuan menandakan kemajuan dalam aspek kesetaraan gender dan inklusi ekonomi, namun kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar, sehingga perlu kebijakan afirmatif untuk mendorong keterlibatan perempuan lebih luas dalam dunia kerja.

Tabel 2.25
Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024

No.	Umur	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
		SD ke Bawah	SMP	SMA	SMK	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	15 - 19	175.224	329.549	275.623	373.242	1.379	1.155.017
2	20 - 24	289.385	408.810	936.843	1.158.914	264.896	3.058.848
3	25 - 29	445.699	625.306	648.974	812.403	564.799	3.097.181
4	30 - 34	698.930	663.557	604.799	525.010	475.187	2.967.483
5	35 - 39	879.337	635.281	586.816	424.956	475.269	3.001.659
6	40 - 44	1.022.939	640.216	552.685	341.755	346.591	2.904.186
7	45 - 49	1.274.321	457.240	460.151	284.097	282.947	2.758.756
8	50 - 54	1.193.448	379.549	434.040	183.379	235.610	2.426.026
9	55 - 59	1.063.201	234.133	313.463	111.082	193.756	1.915.635
10	60+	2.322.435	218.278	159.659	77.091	123.082	2.900.545
Jawa Barat		9.364.919	4.591.919	4.973.053	4.291.929	2.963.516	26.185.336

Sumber : Sakernas Agustus BPS, 2024

Komposisi angkatan kerja di Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kelompok umur. Kelompok usia 20–24 dan 25–29 tahun mendominasi angkatan kerja dengan jumlah total lebih dari 6 juta orang. Ini mencerminkan bahwa usia produktif awal (lulusan baru) menjadi tulang punggung potensi tenaga kerja provinsi. Porsi lulusan SMK dan perguruan tinggi cukup besar dalam kelompok usia ini, menandakan adanya harapan bahwa mereka siap memasuki pasar kerja dengan bekal keterampilan atau keahlian tertentu.

Namun, proporsi lulusan SD ke bawah masih tinggi terutama di kelompok usia tua (60+), yang menunjukkan warisan pendidikan masa lalu dan potensi masalah produktivitas di kalangan pekerja usia lanjut. Terdapat lebih dari 2,3 juta orang berusia di atas 60 tahun yang masih termasuk dalam angkatan kerja, mayoritas berlatar belakang pendidikan rendah. Ini dapat menunjukkan adanya ketergantungan pada sektor informal atau kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka tetap bekerja di usia senja.

Angkatan kerja lulusan perguruan tinggi jumlahnya terus meningkat di kelompok umur 20–34 tahun, mencapai puncak pada usia 25–29 dan menurun pada usia di atasnya. Ini mengindikasikan lulusan

pendidikan tinggi relatif cepat memasuki pasar kerja dan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi meningkat. Namun, korelasi antara jumlah ini dengan angka pengangguran pada tabel lain perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai efektivitas serapan tenaga kerja berpendidikan tinggi.

Tabel 2.26
Karakteristik Pengangguran di Jawa Barat Tahun 2020-2024

No.	Karakteristik Pengangguran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
1	**TPT Menurut Jenis Kelamin :**					
	- Laki-laki	10,91	10,14	8,55	8,09	7,12
	- Perempuan	9,67	9,27	7,89	6,25	6,13
2	**TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal :**					
	- Perkotaan	11,07	10,57	8,92	7,92	6,98
	- Perdesaan	8,47	7,2	6,17	5,65	5,84
3	**TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan :**					
	- SD ke Bawah	5,68	6,07	4,69	3,93	2,89
	- Sekolah Menengah Pertama	10,7	9,53	8,22	6,92	6,07
	- Sekolah Menengah Atas	13,73	13,51	12,18	11,61	10,19
	- Sekolah Menengah Kejuruan	18,75	16,71	14,63	13,42	12,74
	- Diploma I/II/III	9,85	6,38	5,45	4,79	5,76
	- Universitas	10,19	7,21	5,71	4,77	5,53

Sumber : Sakernas Agustus BPS, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara umum mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2024, dari 10,46 persen menjadi 6,75 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan pasar kerja di Jawa Barat, yang kemungkinan didorong oleh pemulihan pasca pandemi serta intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat sektor informal serta UMKM.

Dari aspek usia, kelompok usia muda (15–24 tahun) tetap menunjukkan angka pengangguran yang tinggi. Pada tahun 2024, TPT kelompok usia 15–19 masih sangat tinggi (32,33 persen), walaupun penurunannnya cukup tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa kelompok ini cenderung belum siap masuk ke dunia kerja atau belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri.

Kelompok usia 20–24 juga masih menunjukkan angka pengangguran yang tinggi bahkan mencapai dua digit (20,34 persen pada

2024), walaupun tren menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak lulusan baru memasuki pasar kerja, tidak semuanya berhasil terserap. Faktor *missmatch* antara keterampilan dan kebutuhan pasar, atau kurangnya pengalaman kerja pertama, menjadi isu penting di kelompok usia ini.

Sementara itu, kelompok usia 30 tahun ke atas menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif rendah dan stabil, dengan angka di bawah 5 persen sejak 2022. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang telah berhasil masuk ke dunia kerja relatif bertahan dan memiliki kestabilan pekerjaan. Ini menegaskan pentingnya intervensi di usia muda untuk menurunkan pengangguran jangka panjang.

Dari sisi jenis kelamin, TPT laki-laki konsisten lebih tinggi dibanding perempuan. Pada tahun 2024, TPT laki-laki sebesar 7,12 persen, sedangkan perempuan 6,13 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih rentan terhadap dinamika pasar kerja, terutama karena mereka cenderung bekerja di sektor industri dan konstruksi yang sensitif terhadap gejolak ekonomi. Sementara itu, perempuan mungkin lebih banyak bekerja di sektor domestik atau informal yang cenderung lebih stabil tetapi kurang terdata dalam survei resmi.

Jika dilihat dari tempat tinggal, pengangguran di daerah perkotaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada tahun 2024, TPT di kota sebesar 6,98 persen, sedangkan di desa hanya 5,84 persen. Hal ini dapat dijelaskan oleh ketatnya persaingan kerja di perkotaan, tingginya migrasi penduduk dari desa ke kota, serta belum seimbangnya penciptaan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja. Sebaliknya, di desa, meskipun pekerjaan sering kali bersifat informal dan berpenghasilan rendah, masyarakat masih memiliki akses terhadap kegiatan subsistem seperti pertanian.

Tingkat pendidikan juga memainkan peran penting dalam tingkat pengangguran. Ironisnya, TPT tertinggi justru dialami oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), masing-masing sebesar 12,74 persen dan 10,19 persen pada 2024. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, meskipun TPT lulusan perguruan tinggi lebih rendah, terjadi peningkatan dari 2023 ke 2024, yang mungkin menandakan adanya *missmatch* antara ekspektasi lulusan dengan ketersediaan pekerjaan yang relevan.

Tabel 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Umur
Tahun 2020-2024 (persen)

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	15-19	38,45	38,8	45,61	42,52	32,33
2	20-24	25,17	23,77	23,42	22,45	20,34
3	25-29	14,06	13,38	9,59	8,54	8,59
4	30-34	8,1	7,62	4,81	4,09	4,17
5	35-39	5,71	5,74	2,97	2,65	2,8
6	40-44	6,23	4,78	2,72	2,07	2,73
7	45-49	5,63	5,13	2,78	2,25	2,87
8	50-54	5,28	3,3	2,91	2,97	2,79
9	55-59	5,16	3,65	2,99	2,42	2,21
10	60+	1,66	4,22	2,66	1,12	1,05
Keseluruhan		**10,46**	**9,82**	**8,31**	**7,44**	**6,75**

Sumber : Sakernas Agustus BPS, 2025

Tabel 2.28
Tingkat Penganguran Terbuka Berdasarkan
Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD ke Bawah	5,68	6,07	4,69	3,93	2,89
SMP	10,7	9,53	8,22	6,92	6,07
SMA	13,73	13,51	12,18	11,61	10,19
SMK	18,75	16,71	14,63	13,42	12,74
Diploma I/II/III	9,85	6,38	5,45	4,79	5,76
Universitas	10,19	7,21	5,71	4,77	5,53

Sumber : Sakernas Agustus BPS, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, tidak selalu berarti semakin rendah tingkat pengangguran. Meskipun tren umum menunjukkan penurunan TPT pada semua jenjang pendidikan, lulusan SMK secara konsisten mencatat angka pengangguran tertinggi (12,74 persen pada 2024). Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum SMK dan kebutuhan industri, atau kurangnya efektivitas program *link and match*.

Sebaliknya, TPT lulusan SD ke bawah terus menurun secara signifikan, hingga hanya 2,89 persen pada 2024. Ini bisa dikaitkan dengan dominasi mereka di sektor informal atau pekerjaan kasar yang tidak membutuhkan banyak seleksi. Dalam mencari mata pencaharian dibandingkan yang berpendidikan lebih tinggi. Namun, rendahnya

pengangguran di kelompok ini tidak bisa jadi cerminan keberhasilan, karena umumnya pekerjaan kelompok ini memiliki penghasilan yang relatif lebih rendah dengan tingkat perlindungan yang lebih rendah juga.

Lulusan perguruan tinggi (Diploma dan Universitas) menunjukkan angka pengangguran yang cukup fluktuatif. Meski sempat menurun pada 2022 dan 2023, terjadi sedikit peningkatan di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun memiliki keunggulan kompetitif, lulusan perguruan tinggi masih menghadapi tantangan dalam memasuki pasar kerja, terutama bila keterampilan yang dimiliki tidak relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Tabel 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (persen)

No.	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bogor	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34
2	Sukabumi	9,6	9,51	7,77	7,32	7,11
3	Cianjur	11,05	9,32	8,41	7,71	5,99
4	Bandung	8,58	8,32	6,98	6,52	6,36
5	Garut	8,96	8,68	7,6	7,33	6,96
6	Tasikmalaya	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74
7	Ciamis	5,66	5,06	3,75	3,52	3,37
8	Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
9	Cirebon	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
10	Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
11	Sumedang	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16
12	Indramayu	9,21	8,3	6,49	6,46	6,25
13	Subang	9,48	9,77	7,77	7,65	6,73
14	Purwakarta	11,07	10,7	8,75	7,72	7,34
15	Karawang	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
16	Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
17	Bandung Barat	12,25	11,65	9,63	8,11	6,7
18	Pangandaran	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
19	Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
20	Kota Sukabumi	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
21	Kota Bandung	11,19	11,46	9,55	8,83	7,4
22	Kota Cirebon	10,97	10,53	8,42	7,66	6,29
23	Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,9	7,82
24	Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
25	Kota Cimahi	13,3	13,07	10,77	10,52	8,97
26	Kota Tasikmalaya	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
27	Kota Banjar	6,73	6,09	5,53	5,43	5,44
Provinsi Jawa Barat		**10,46**	**9,82**	**8,31**	**7,44**	**6,75**

Sumber : Sakernas Agustus BPS, 2025

Tabel di atas memperlihatkan dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode 2020–2024. Secara umum, Provinsi Jawa Barat mencatat penurunan TPT dari 10,46 persen pada tahun 2020 menjadi 6,75 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, seiring dengan membaiknya mobilitas, aktivitas industri, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, meskipun tren provinsi membaik, perbedaan kondisi antarwilayah tetap signifikan dan menunjukkan kompleksitas yang memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda-beda.

Wilayah dengan TPT tertinggi secara konsisten adalah kota-kota industri seperti Kota Cimahi (13,3 persen pada 2021, 8,97 persen pada 2024) dan Kabupaten Karawang (11,83 persen pada 2021, 8,04 persen pada 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah yang bergantung pada sektor manufaktur menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menyerap tenaga kerja secara stabil. Ketergantungan pada industri padat karya yang rentan terhadap otomatisasi dan ketidakpastian pasar global kemungkinan menjadi faktor utama. Selain itu, urbanisasi cepat tanpa diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja berkualitas turut memperbesar angka pengangguran.

Sebaliknya, beberapa kabupaten dengan basis ekonomi agraris seperti Ciamis, Majalengka, dan Pangandaran menunjukkan TPT yang sangat rendah dan stabil. Pangandaran bahkan mencatat TPT hanya 1,58 persen pada 2024, terendah di Jawa Barat. Rendahnya angka pengangguran ini bisa disebabkan oleh tingginya tingkat partisipasi di sektor informal atau usaha keluarga yang tidak tercatat secara resmi. Namun, penting dicatat bahwa angka rendah tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaan yang baik, melainkan bisa menandakan terbatasnya aspirasi kerja formal atau minimnya pencari kerja muda akibat migrasi keluar daerah.

Wilayah metropolitan seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Bogor memiliki TPT menengah, berada pada kisaran 7–8 persen. Angka ini menunjukkan dinamika ekonomi perkotaan yang kompleks, di mana tersedia banyak lapangan kerja di sektor jasa dan kreatif, tetapi juga diiringi oleh kompetisi yang tinggi serta pertumbuhan penduduk usia produktif yang cepat. Tantangan utama di wilayah ini adalah meningkatkan

kapasitas penyerapan kerja formal dan menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan generasi muda.

Beberapa kabupaten/kota menunjukkan penurunan TPT yang cukup signifikan dalam waktu pendek. Misalnya, Cianjur menurun dari 11,05 persen (2020) menjadi 5,99 persen (2024). Penurunan drastis ini patut dicermati lebih lanjut apakah karena keberhasilan program ketenagakerjaan lokal, peningkatan UMKM, atau akibat perubahan struktur pencari kerja. Tren positif ini bisa menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain, terutama jika disertai dengan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.30
Serapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor	-196.257	102.829	143.399	-84.098	146.647
2	Sukabumi	-24.584	69.140	105.888	132.281	60.382
3	Cianjur	46.804	11.744	53.463	163.521	48.132
4	Bandung	-108.147	103.045	9.491	73.818	32.879
5	Garut	-32.328	43.561	133.084	60.527	48.637
6	Tasikmalaya	41.014	1.022	23.028	69.132	16.577
7	Ciamis	39.524	-3.665	2.498	-4.940	23.966
8	Kuningan	2.937	16.241	-655	40.908	50.365
9	Cirebon	-23.766	32.045	50.149	80.683	75.689
10	Majalengka	13.566	-11.159	2.903	72.501	19.679
11	Sumedang	34.948	6.491	-18.681	20.258	23.964
12	Indramayu	23.373	21.235	15.712	-10.138	48.727
13	Subang	-9.608	17.305	37.112	39.058	36.663
14	Purwakarta	-20.509	6.901	39.344	48.502	11.094
15	Karawang	10.648	-4.945	54.149	39.557	30.726
16	Bekasi	15.918	128.030	43.407	-348.046	25.456
17	Bandung Bara	-45.830	20.646	63.906	129.630	42.857
18	Pangandaran	6.290	560	22.981	13.702	1.737
19	Kota Bogor	-33.801	17.525	29.925	-12.236	31.950
20	Kota Sukabumi	-19.100	5.733	17.127	11.240	3.066
21	Kota Bandung	-50.013	17.774	112.914	-96.052	52.086
22	Kota Cirebon	736	63	10.463	17.177	4.130
23	Kota Bekasi	-23.815	27.917	75.776	-238.063	30.670
24	Kota Depok	-27.120	11.695	71.018	-199.119	21.155
25	Kota Cimahi	-15.279	-640	31.979	-3.640	1.482
26	Kota Tasikmalaya	5.289	505	7.750	21.445	24.169
27	Kota Banjar	131	-2.971	957	13.422	627
Provinsi Jawa Barat		**-388.979**	**638.627**	**1.139.087**	**51.030**	**913.512**

Sumber : Sakernas Agustus BPS, 2025

Jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 50,3 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebesar 67,7 persen, meningkat 1,2 poin dibandingkan Agustus 2023. TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang terkategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, dan pensiun, tidak terkategori ke dalam angkatan kerja. Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Barat pada Agustus 2024 adalah 38,67 juta orang, dengan TPAK 67,7 persen, maka yang menjadi angkatan kerja sebanyak 26,2 juta orang. Dari 26,2 juta angkatan kerja ini, terdapat sekitar 1,8 juta orang terkategori pengangguran, yang kemudian dibandingkan dengan angkatan kerjanya menjadi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,75 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di antara Kabupaten/Kota di Jawa Barat menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Kabupaten Pangandaran (1,58 persen) dan Kota Cimahi (8,97 persen). Tingkat pengangguran terbuka juga cenderung rendah di Kabupaten Ciamis (3,37 persen), Tasikmalaya (3,74 persen), dan Majalengka (4,01 persen).

Gambar 2.82
Sandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

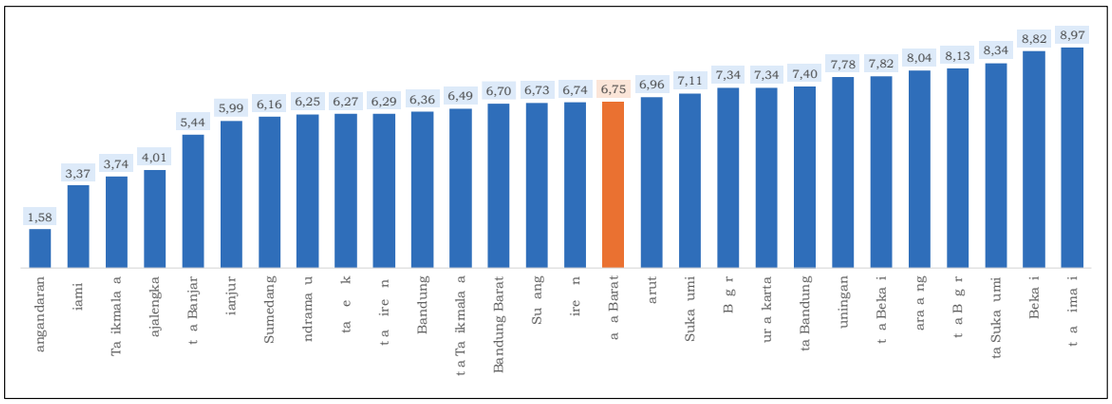

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Data TPT kemudian disandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Sandingan ini diharapkan dapat menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan pengangguran di Jawa Barat. Sebagaimana diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat mencapai 6,74 persen (tertinggi ketiga setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Papua). Selain tertinggi secara persentase, jumlah angkatan kerja yang tinggi (sebanding dengan jumlah penduduk) di Jawa Barat menjadikan

jumlah pengangguran juga menjadi yang tertinggi di tingkat nasional, pada tahun 2024 sebanyak 1,8 juta orang, menyebabkan adanya potensi pertumbuhan yang hilang.

Pada Gambar 2.83, dapat dilihat bahwa LPE dan TPT terdistribusi pada tingkat LPE 4-6 persen dan TPT 6-8 persen dengan pola berkebalikan, artinya semakin tinggi LPE maka TPT menjadi semakin rendah. Adapun beberapa daerah di luar distribusi tersebut perlu diperhatikan untuk diintervensi, yaitu daerah dengan LPE tinggi dan TPT tinggi untuk meningkatkan inklusi ekonomi, diantaranya adalah Kabupaten Bekasi, Karawang, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Bogor.

Gambar 2.83
Sandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2024

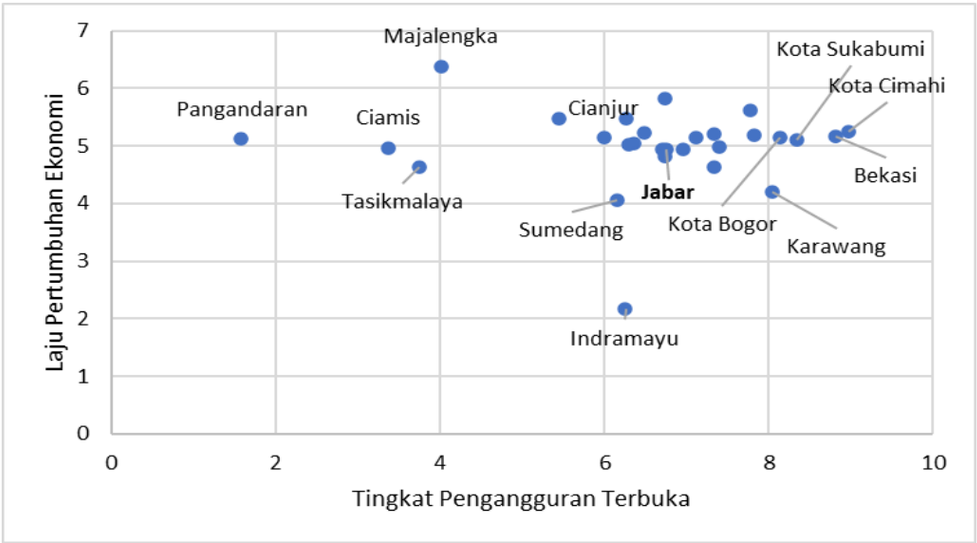

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Proyeksi tingkat pengangguran dilakukan dalam kerangka kerja *Financial Programing Policy* (FPP), dimana dalam skenarionya pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan. Skenario ini didasarkan pada *Okun's Law* yang menjelaskan hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Untuk menghasilkan proyeksi TPT yang lebih komprehensif, maka komponen pembentuk TPT juga diproyeksikan menggunakan pendekatan elastisitas terhadap laju pertumbuhan ekonomi, diantaranya jumlah penduduk usia produktif, tambahan jumlah penduduk bekerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 7,95 persen pada tahun 2029 yang didukung oleh intervensi kebijakan yang mendorong

pertumbuhan sektor ekonomi baru, pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah, serta peningkatan kualitas SDM, menjadi asumsi penting yang mendasari proyeksi serapan tenaga kerja setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 700-900 ribu orang per tahun selama periode 2025-2029. Penurunan TPT juga didukung oleh asumsi peningkatan rata-rata lama sekolah yang menyebabkan penambahan angkatan kerja menjadi lebih moderat jika dibandingkan dengan tambahan penduduk bekerja. Dengan demikian, target TPT Jawa Barat tahun 2029 sebesar 5,86 - 6,27 persen diharapkan dapat tercapai.

Tabel 2.31
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025-2030

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 - 6,99	6,31 - 6,66	6,05 - 6,49	6 - 6,53	5,94 - 6,56	5,86 - 6,27
Serapan Tenaga Kerja (Tambahan Penduduk Bekerja) (Ribu)	608 - 679	731 - 755	881 - 911	899 - 930	938 - 969	967 - 1008

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan, maka perlu memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup menunjukkan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Faktor-faktor yang berdampak pada capaian angka harapan hidup diantaranya adalah faktor kesehatan yaitu tingkat kelahiran dan kematian, pelayanan kesehatan, pengelolaan gizi masyarakat, pertumbuhan atau perkembangan penyakit menular dan tidak menular sampai kepada perilaku masyarakat hidup bersih sehat, selain itu dapat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial.

Gambar 2.84
Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 (Tahun)

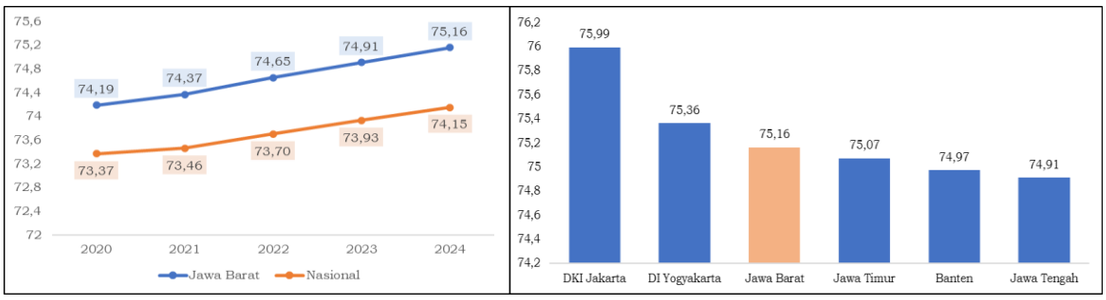

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Data capaian diatas menunjukkan perkembangan target dan capaian usia harapan hidup selama periode 2020 hingga 2024, UHH Indonesia telah meningkat sebesar 0,78 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, UHH Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang mengalami peningkatan UHH yang cukup tinggi menempati urutan ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan UHH di Provinsi Jawa Barat secara umum mengalami peningkatan dan mencapai target pada setiap tahunnya, walaupun tahun 2024 sedikit melambat menjadi 0,33 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan UHH pada 2023 yang sebesar 0,35 persen. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup dan pelayanan II-118imanaII-118an di Jawa Barat yang meningkatkan derajat II-118imanaII-118an II-118imanaII-118anII-118, walaupun masih belum optimal dalam segi pemerataan dan II-118imanaII-118anII-118n kesehatannya.

Perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan UHH, kesenjangan antara daerah dengan capaian AHH tertinggi dengan yang terendah juga semakin mengecil. Tahun 2024, selisih antara Kota Bekasi yang memiliki UHH tertinggi dengan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki UHH terendah sebesar 2,08 tahun.

Tabel 2.32
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun)

No.	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil *Long Form* SP 2020 (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor	73,9	74,09	74,42	74,67	74,9
2	Sukabumi	73,9	74,15	74,4	74,65	74,85

No.	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil *Long Form* SP 2020 (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Cianjur	73,9	74,1	74,37	74,61	74,8
4	Bandung	74,19	74,38	74,67	74,92	75,23
5	Garut	73,97	74,16	74,43	74,66	74,87
6	Tasikmalaya	73,06	73,22	73,64	73,87	74,06
7	Ciamis	74,23	74,42	74,69	74,96	75,26
8	Kuningan	74,25	74,43	74,67	74,91	75,22
9	Cirebon	73,97	74,16	74,43	74,71	74,98
10	Majalengka	73,95	74,14	74,44	74,73	74,98
11	Sumedang	74,3	74,49	74,77	75,04	75,29
12	Indramayu	73,88	74,09	74,39	74,61	74,82
13	Subang	73,99	74,22	74,46	74,87	75,08
14	Purwakarta	73,92	74,11	74,4	74,67	74,92
15	Karawang	74,17	74,35	74,63	74,9	75,16
16	Bekasi	74,54	74,65	74,86	75,09	75,33
17	Bandung Barat	74,05	74,23	74,59	74,78	75,06
18	Pangandaran	74,12	74,32	74,6	74,88	75,11
19	Kota Bogor	74,72	74,92	75,21	75,52	75,8
20	Kota Sukabumi	74,23	74,38	74,64	74,89	75,11
21	Kota Bandung	74,82	74,99	75,26	75,53	75,83
22	Kota Cirebon	74,43	74,59	74,87	75,17	75,48
23	Kota Bekasi	75,01	75,27	75,6	75,86	76,14
24	Kota Depok	74,8	74,97	75,24	75,53	75,82
25	Kota Cimahi	74,56	74,73	74,99	75,27	75,55
26	Kota Tasikmalaya	74,34	74,52	74,8	75,08	75,31
27	Kota Banjar	73,99	74,19	74,48	74,77	74,99
Provinsi Jawa Barat		**74,19**	**74,37**	**74,65**	**74,91**	**75,16**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025
UHH (LF SP2020)

Pola spasial capaian UHH kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tajam. Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur dengan capaian UHH paling rendah di bandingkan kabupaten/kota lain (<74,90 tahun). Hal ini mengindikasikan II-119imanaII-119anII-119n bidang II-119imanaII-119an di kedua kabupaten tersebut perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya. Capaian UHH pada tahun 2024 semakin meningkat dimana Kabupaten/Kota yang UHH paling rendah, pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Gambar 2.85
Pola Spasial Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Tahun 2024 (Tahun)

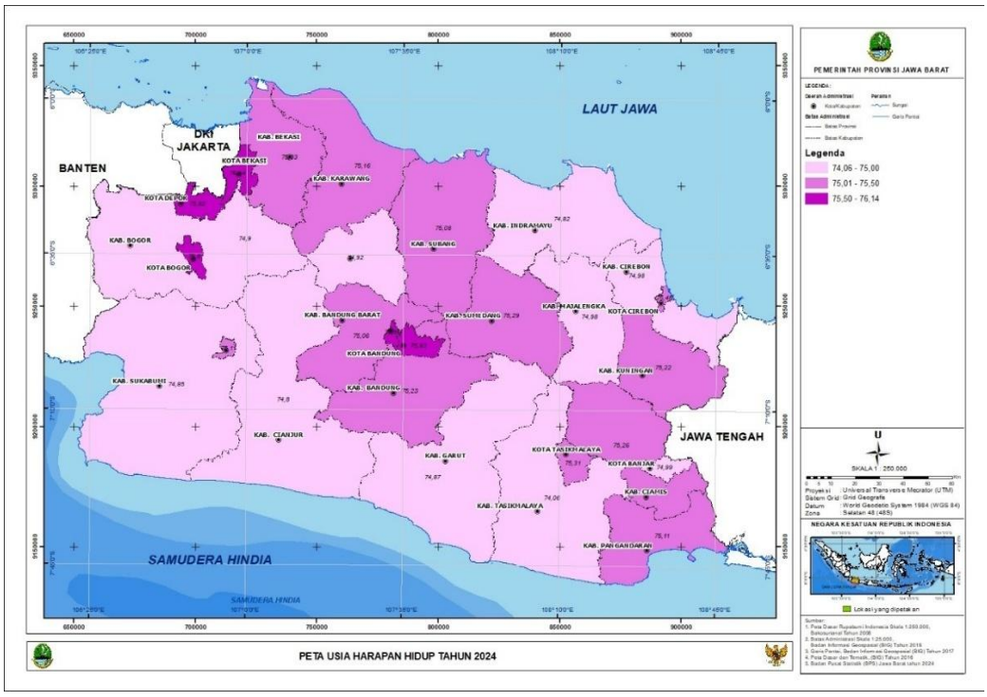

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peran keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Untuk melihat peran keluarga tersebut dapat digambarkan dari capaian Indeks Keluarga Sehat. Indeks Keluarga Sehat adalah indeks yang menggambarkan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan dan dilaksanakan oleh setiap keluarga yang dihitung dari 12 (dua belas) indikator turunannya.

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh dalam pedoman Program Indonesia Sehat – Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan.

Gambar 2.86
Capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024

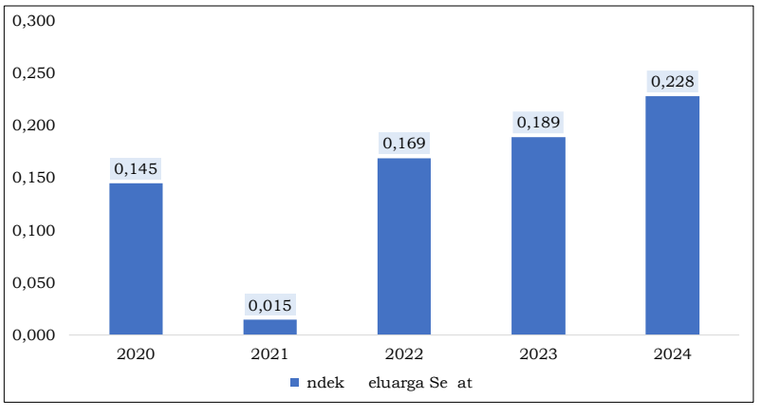

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2024

Meskipun Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 0,14 pada tahun 2020 menjadi 0,22 pada tahun 2024, capaian tersebut masih tergolong rendah dan menempatkan Jawa Barat dalam kategori keluarga tidak sehat. Dari 12 (dua belas) indikator IKS, terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya masih di bawah 50 persen, terutama terkait perilaku merokok dalam keluarga dan rendahnya tingkat pengobatan penyakit. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih serius, baik dari pemerintah maupun kesadaran setiap anggota keluarga, untuk mendorong pola perilaku hidup sehat.

Di sisi lain, pengelolaan gizi masyarakat juga masih menjadi isu penting, mengingat status gizi sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi gizi masyarakat adalah prevalensi *stunting*, yaitu gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar.

Gambar 2.87
Capaian Prevalensi *Stunting* Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024

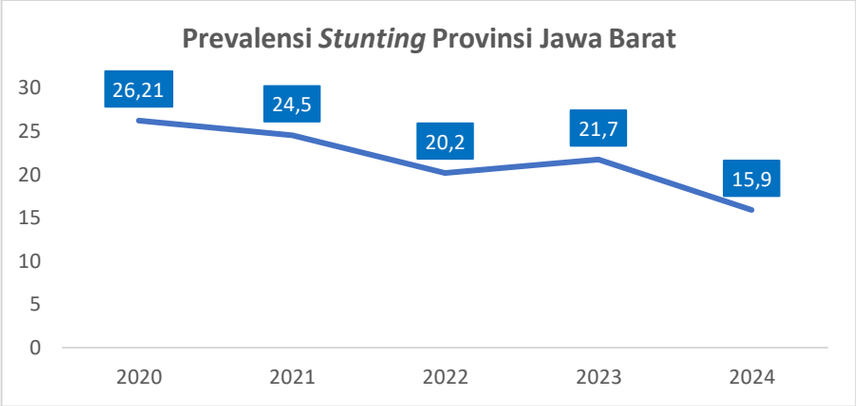

Sumber: Survey Kesehatan Indonesia, 2025

Grafik prevalensi *stunting* di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir, dengan penurunan signifikan dari 26,21 persen pada 2020 menjadi 15,9 persen pada 2024. Penurunan tersebut menjadikan capaian prevalensi *stunting* Jawa Barat berada di Bawah nasional dan standar WHO namun dalam penurunannya tetap memerlukan pencegahan adanya kasus *stunting* baru dan percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi berdasarkan kelompok sasaran yaitu ibu hamil dan ibu nifas melalui pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), anak usia 0-23 bulan melalui pemberian ASI eksklusif, anak usia 24-59 bulan melalui pemberian makanan tambahan, remaja putri melalui konsumsi tablet tambah darah serta pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin. Selain dari sektor kesehatan, diperlukan dukungan dari lintas sektor lainnya seperti ketersediaan pangan bergizi, peningkatan akses sanitasi, dan air minum layak untuk menjamin kesehatan lingkungan sekitar tempat tinggal agar proses penyerapan nutrisi pada anak bisa terlaksana secara optimal. Selain itu, program keluarga berencana juga mendukung pencegahan *stunting* karena kehamilan yang terlalu sering dapat menyebabkan bayi lahir *stunting* yang disebabkan oleh jarak kelahiran yang terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya.

Berdasarkan data prevalensi *stunting* di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antarwilayah. Hasil SSGI 2024 pada bulan Mei 2025, masih terdapat 5

(lima) kabupaten/kota yang capaiannya belum diumumkan hasilnya oleh Kementerian Kesehatan karena masih membutuhkan analisis lebih lanjut yang disebabkan oleh terjadinya perubahan prevalensi *stunting* yang sangat ekstrem>10 persen dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Cianjur menempati posisi prevalensi stunting terendah sebesar 7,2 persen, sementara Kabupaten Bandung Barat menempati posisi tertinggi dengan angka 30,8 persen, dengan capaian prevalensi stunting Provinsi Jawa Barat sebesar 15,9 persen terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota memiliki prevalensi di bawah rata-rata provinsi, diantaranya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cirebon. Hal tersebut menunjukkan beberapa wilayah berhasil menurunkan prevalensi *stunting* dengan berbagai inovasi dan komitmen yang dimiliki meskipun tetap perlu mempertahankan dan memperkuat berbagai intervensi agar tidak ada lagi kasus *stunting* baru. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan dalam penyelesaian permasalahan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kondisi sosial ekonomi antarwilayah di Jawa Barat, saat ini sedang disusun regulasi dan kebijakan terbaru terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* oleh pemerintah pusat mengingat regulasi yang ada sudah perlu diperbaharui.

Gambar 2.88
Capaian Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

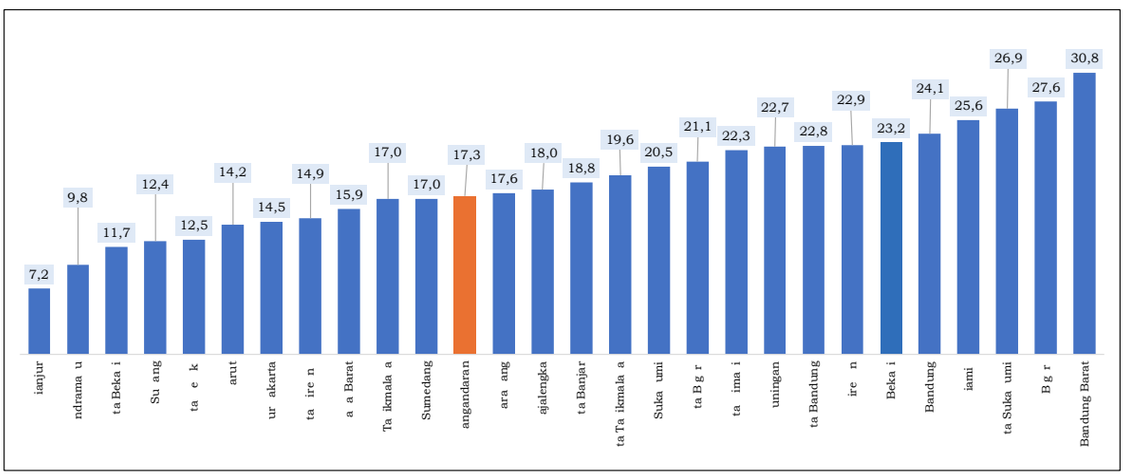

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Selain masalah gizi, tantangan lain dalam pembangunan kesehatan di Jawa Barat adalah tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, hal tersebut berdampak langsung pada pencapaian angka harapan hidup sehat yang merupakan salah satu fokus utama Kementerian Kesehatan dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Capaian penyakit menular dapat dilihat pada profil kesehatan Jawa Barat setiap tahunnya sedangkan untuk capaian penyakit tidak menular dihitung oleh Kementerian Kesehatan setiap 5 (lima) tahun sekali yaitu Riksedas Tahun 2018 dan SKI Tahun 2024. Dilihat dari banyaknya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, pencegahan dan penanggulangannya penyakit menular dan tidak menular menjadi prioritas untuk mewujudkan SDM Jawa Barat yang unggul.

Tabel 2.33
Capaian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TBC	79.840	85.681	160.661	211.959	229.683
HIV	4.758	5.444	8.812	9.710	10.405
AIDS	1.370	337	392	2.178	3.075
Malaria	329	246	501	529	512
Kusta (kasus per 10.000 penduduk)	0,35	0,32	0,39	0,46	0,45
DBD	24.471	23.959	36.608	36.608	61.423
Kanker (kasus Per 1.000 Penduduk)	N/A	N/A	N/A	1,1	N/A
Jantung	N/A	N/A	N/A	1,18%	N/A
Stroke (kasus Per 1.000 Penduduk)	N/A	N/A	N/A	10	N/A
Ginjal	N/A	N/A	N/A	0,20%	N/A
Diabetes Melitus	N/A	N/A	N/A	1,70%	N/A

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2024 SKI, 2024

Selanjutnya, sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dimana Tahun 2025-2029 adalah tahapan fondasi, maka pemerataan dan pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi salah satu fokus pembangunan kesehatan. Berikut ini gambaran kondisi eksisting fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Jawa Barat.

Gambar 2.89
Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

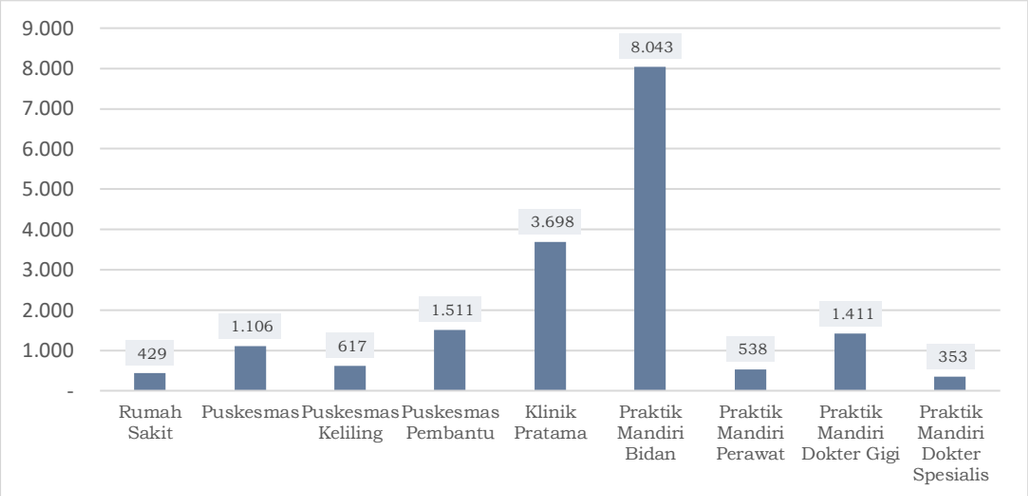

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan Gambar 2.89 secara umum ketersediaan sarana fasilitasi pelayanan kesehatan sudah cukup memadai walaupun jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, pemerataan dan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan antar wilayah sesuai dengan kondisi geografis di beberapa daerah di Jawa Barat masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan lain terkait pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum optimalnya integrasi layanan primer dan sistem rujukan, termasuk keterbatasan rumah sakit rujukan dengan layanan unggulan menyebabkan keterlambatan penanganan kasus-kasus gawat darurat atau penyakit kronis.

Tabel 2.34
Rasio Layanan Tenaga Medis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Rasio/100 ribu Penduduk	Target Rasio/100 ribu penduduk	Capaian
		(2024)	(2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dokter Spesialis	29,79	12	248,23%
2	Dokter Umum	43,13	50	86,26%
3	Dokter Gigi	11,36	14	81,18%
4	Perawat	149,19	200	74,60%
5	Bidan	70,46	130	54,20%
6	Apoteker	19,00	15	126,65%
7	Tenaga Teknis Kefarmasian	19,75	30	65,83%

No	Jenis Tenaga	Rasio/100 ribu Penduduk (2024)	Target Rasio/100 ribu penduduk (2025)	Capaian
8	SKM	7,09	18	39,36%
9	Sanitarian	3,95	20	19,77%
10	Gizi	5,92	18	32,87%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 2.34 secara umum ketersediaan sumber daya kesehatan di Jawa Barat sudah cukup memadai namun yang masih menjadi tantangan adalah pemerataan dan distribusi antar wilayah sesuai dengan kondisi geografis di beberapa daerah di Jawa Barat. Tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum optimalnya integrasi layanan primer dan sistem rujukan, termasuk keterbatasan rumah sakit rujukan dengan layanan unggulan menyebabkan keterlambatan penanganan kasus-kasus gawat darurat atau penyakit kronis. Minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi kesehatan pun menjadi tantangan tersendiri termasuk pembiayaan kesehatan yang belum optimal. Jika dilihat dari jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhannya adalah pemerataan dan distribusi antar wilayah sesuai dengan kondisi geografis dan perhitungan sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Standar Ketenagaan Minimal (SKM). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis di Rumah Sakit adalah melalui beasiswa dokter spesialis dimana masih dibutuhkan sekitar 365 dokter spesialis berdasarkan perhitungan analisis beban kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu terdapat tantangan pada sektor kesehatan diantaranya adalah masalah kesehatan dasar dan baru, terkait dengan norma budaya yang dapat menjadi penghambat pelayanan kesehatan yang aman dan perilaku tidak sehat masyarakat termasuk perubahan iklim yang berdampak pada kesehatan. Perlu upaya peningkatan literasi dan perubahan cara pandang (*mindset*) masyarakat untuk dapat berperilaku hidup bersih, sehat, dan aman termasuk bagaimana menyikapi perubahan iklim yang akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta pembiayaan kesehatan yang belum optimal.

Untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Jawa Barat mendapatkan akses layanan kesehatan secara adil, tidak hanya

pemenuhan dan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan perlu diiringi dengan peningkatan capaian cakupan jaminan kesehatan nasional. Cakupan kepesertaan JKN penduduk Provinsi Jawa Barat per April 2025 telah mencapai 97,25 persen dengan keaktifan peserta sebesar 74,14 persen, artinya masih terdapat 25,86 persen peserta JKN yang tidak aktif membayar iuran terutama diperkirakan pada segmen peserta mandiri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya *Universal Health Coverage* (UHC) di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Berdasarkan target cakupan kepesertaan JKN pada RPJMN sebesar 98 persen, masih terdapat 12 kabupaten/kota yang capaian UHC nya belum mencapai 98 persen. Berikut adalah capaian UHC Kabupaten/Kota.

Tabel 2.35
Capaian UHC kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Peserta JKN-KIS			
		(Sem II Tahun 2024)	Jumlah Peserta	%	Jml Peserta Aktif	% Keaktifan Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)
1	Kota Tasikmalaya	770.839	780.666	101,27%	670.852	87,03%
2	Kota Cirebon	356.629	359.471	100,80%	319.995	89,73%
3	Kab.Karawang	2.612.065	2.627.508	100,59%	2.011.104	76,99%
4	Kota Depok	2.010.912	2.021.154	100,51%	1.542.271	76,70%
5	Kab.Subang	1.677.628	1.670.701	99,59%	1.191.041	71,00%
6	Kab. Kuningan	1.239.999	1.229.770	99,18%	907.299	73,17%
7	Kota Cimahi	581.994	577.098	99,16%	480.100	82,49%
8	Kota Bogor	1.144.108	1.133.274	99,05%	921.887	80,58%
9	Kab. Pangandaran	447.272	442.937	99,03%	384.533	85,97%
10	Kota Bandung	2.591.763	2.562.592	98,87%	2.061.453	79,54%
11	Kota Sukabumi	370.096	365.839	98,85%	286.414	77,39%
12	Kota Bekasi	2.572.209	2.536.845	98,63%	2.051.335	79,75%
13	Kab. Cirebon	2.489.046	2.451.841	98,51%	1.825.615	73,35%
14	Kab. Bandung	3.839.721	3.778.154	98,40%	2.671.992	69,59%
15	Kota Banjar	209.317	205.707	98,28%	175.532	83,86%
16	Kab. Majalengka	1.369.569	1.341.735	97,97%	1.041.328	76,03%
17	Kab. Indramayu	1.980.080	1.939.574	97,95%	1.466.307	74,05%
18	Kab. Bekasi	3.387.601	3.315.045	97,86%	2.761.736	81,52%
19	Kab. Purwakarta	1.063.932	1.035.200	97,30%	786.948	73,97%
20	Kab. Sukabumi	2.868.943	2.786.867	97,14%	2.004.210	69,86%
21	Kab. Bandung Barat	1.911.661	1.853.375	96,95%	1.403.084	73,40%
22	Kab. Bogor	5.809.790	5.630.545	96,91%	4.488.539	77,26%
23	Kab. Ciamis	1.297.783	1.237.251	95,34%	847.351	65,29%

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Peserta JKN-KIS			
		(Sem II Tahun 2024)	Jumlah Peserta	%	Jml Peserta Aktif	% Keaktifan Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)	(7)=(6)/(3)
24	Kab. Sumedang	1.226.660	1.166.014	95,06%	904.902	73,77%
25	Kab. Cianjur	2.638.825	2.506.604	94,99%	1.796.421	68,08%
26	Kab. Garut	2.851.877	2.635.538	92,41%	1.836.441	64,39%
27	Kab. Tasikmalaya	1.996.059	1.715.534	85,95%	1.208.959	60,57%
Provinsi Jawa Barat		**51.316.378**	**49.906.839**	**97,25%**	**38.047.649**	**74,14%**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam mencapai UHC tidak bisa hanya berfokus pada cakupan kepesertaannya saja namun perlu ditingkatkan cakupan keaktifan peserta, untuk mengatasi hal tersebut setiap Kabupaten/Kota perlu melakukan *cleaning* data secara berkala agar penerima iuran jaminan kesehatan tepat sasaran serta melakukan peningkatan kesadaran, edukasi, dan dukungan pembiayaan agar keaktifan peserta dapat terjaga dan berkelanjutan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Dalam konteks ini, visi besar yang terus diupayakan adalah menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, yakni pendidikan yang tidak hanya unggul dari sisi mutu, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, daerah tertinggal maupun kawasan perbatasan.

Upaya pemerataan pendidikan di Jawa Barat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang menjangkau wilayah terpencil, pembangunan unit sekolah baru, revitalisasi sekolah kejuruan, serta penguatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan secara merata di seluruh kabupaten/kota. Program beasiswa untuk siswa kurang mampu, pendidikan inklusif, digitalisasi sekolah, serta kolaborasi dengan swasta dan dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam menjembatani kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan berkualitas di Jawa Barat tidak hanya dilihat dari aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, keterampilan abad 21, serta kesiapan menghadapi tantangan global. Kurikulum yang adaptif, pembelajaran

berbasis teknologi, serta integrasi nilai lokal dalam proses pendidikan menjadikan pendidikan di Jawa Barat semakin kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Meskipun masih terdapat tantangan seperti disparitas Rata-rata Lama Sekolah (RLS), partisipasi pendidikan menengah, serta kesenjangan kualitas antarwilayah, namun Pemerintah Daerah terus mendorong pendekatan afirmatif dan kolaboratif untuk mempercepat transformasi pendidikan. Melalui semangat inovasi dan gotong royong, cita-cita menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata bukanlah sekadar harapan, tetapi menjadi komitmen nyata dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.

Kondisi pendidikan masyarakat merupakan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat tumbuh selama periode 2020 hingga 2024. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Jawa Barat yang lebih baik. Pada tahun 2024, secara rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat usia 15 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,24 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas II).

Gambar 2.90
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun)

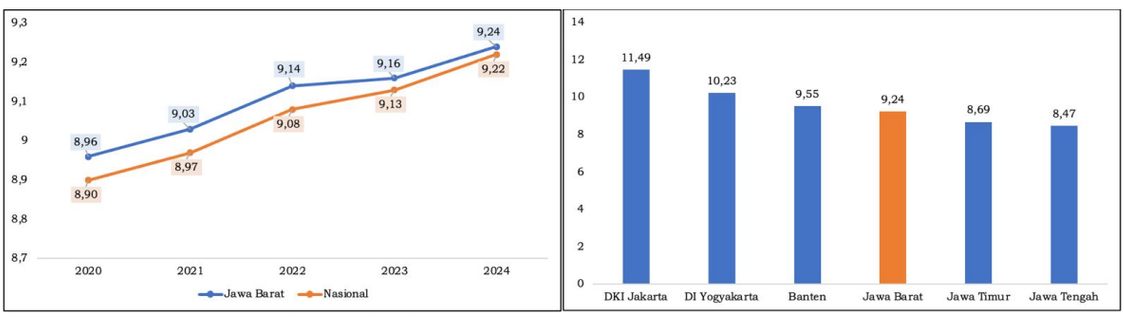

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa meningkat dari 8,48 tahun pada 2020 menjadi 8,85 tahun pada 2024, termasuk di Jawa Barat yang menempati posisi keempat pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya akses pendidikan berkat kebijakan pemerintah, meskipun

masih terdapat disparitas antarprovinsi yang menunjukkan ketimpangan pemerataan pendidikan dan perlu mendapat perhatian.

Tabel 2.36
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa
Tahun 2020-2024 (Tahun)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	11,17	11,20	11,30	11,42	11,49
Jawa Barat	**8,96**	**9,03**	**9,14**	**9,16**	**9,24**
Jawa Tengah	8,19	8,26	8,38	8,44	8,47
DI Yogyakarta	9,95	10,04	10,07	10,16	10,23
Jawa Timur	8,31	8,37	8,50	8,53	8,69
Banten	9,22	9,29	9,46	9,48	9,55
Indonesia	**8,90**	**8,97**	**9,08**	**9,13**	**9,22**

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan (Tabel 2.37) yang merefleksikan disparitas pembangunan manusia dalam skala kabupaten/kota. Disparitas komponen RLS jauh lebih tinggi dibandingkan HLS. Pada tahun 2024 adalah Kota Bekasi memiliki nilai RLS tertinggi dan Kabupaten Indramayu memiliki nilai RLS terendah. Tren ketimpangan RLS kedua wilayah ini berfluktuatif dan disparitas RLS di kedua wilayah tetap lebar dan selisihnya meningkat dari 4,23 poin di tahun 2023 menjadi 4,45 poin di tahun 2024.

Tabel 2.37
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	8,55	8,74	8,82	8,86	8,89
2	Sukabumi	7,82	7,71	7,69	7,84	7,75
3	Cianjur	7,69	7,3	7,47	7,38	7,91
4	Bandung	9,27	9,4	9,34	9,36	9,45
5	Garut	7,99	7,96	8,36	8,25	8,31
6	Tasikmalaya	7,94	7,93	8,25	8,31	8,32
7	Ciamis	8,02	8,28	8,42	8,45	8,33
8	Kuningan	8,23	8,26	8,42	8,23	8,18
9	Cirebon	7,83	7,96	8,23	8,3	8,06
10	Majalengka	7,99	7,84	8,07	7,95	7,99
11	Sumedang	9,04	8,76	9,09	9,00	8,86
12	Indramayu	6,98	7,38	7,76	7,51	7,45
13	Subang	7,63	7,57	7,82	8,00	7,88
14	Purwakarta	8,52	8,43	8,41	8,36	8,40
15	Karawang	8,35	8,04	8,39	8,50	8,54
16	Bekasi	9,8	9,72	9,84	9,87	10,19
17	Bandung Barat	8,67	8,4	8,49	8,41	8,57
18	Pangandaran	8,19	8,24	8,47	8,37	8,47
19	Kota Bogor	10,28	10,9	10,72	10,62	10,79
20	Kota Sukabumi	9,75	10,26	10,41	10,45	10,44
21	Kota Bandung	10,82	11,33	11,01	11,09	11,05
22	Kota Cirebon	9,92	10,42	10,46	10,47	10,66
23	Kota Bekasi	11,32	11,63	11,75	11,74	11,90

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
24	Kota Depok	11,34	11,5	11,48	11,55	11,58
25	Kota Cimahi	10,86	11,15	11,19	11,33	11,47
26	Kota Tasikmalaya	9,6	9,77	9,69	9,72	9,86
27	Kota Banjar	8,84	9,08	9,17	8,99	9,15
	Provinsi Jawa Barat	**8,96**	**9,03**	**9,14**	**9,16**	**9,24**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pola spasial capaian RLS kabupaten/kota pada tahun 2024 menunjukkan disparitas RLS antara wilayah Tengah dengan wilayah Utara dan Selatan serta wilayah Timur Jawa Barat. Kabupaten/kota di wilayah Tengah pada umumnya memiliki capaian RLS di atas 8 (delapan) tahun, sedangkan wilayah kabupaten yang terletak di bagian Utara, Selatan dan Timur hampir seluruhnya memiliki capaian RLS dibawah 8 (delapan) tahun. Artinya secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun keatas di wilayah tersebut telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII.

Gambar 2.91
Pola Spasial Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Tahun 2024 (Tahun)

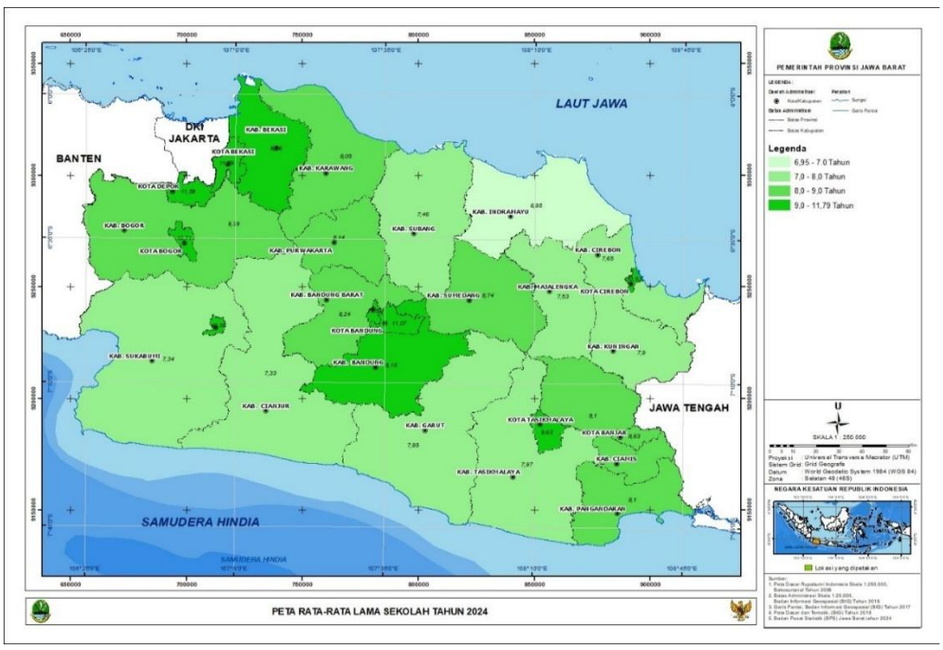

Sumber: BPS dan Bappeda, 2025

Sementara itu, Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator *output* pembangunan dalam jangka panjang. HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*)

kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. HLS terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024 HLS Jawa Barat mencapai 13,21 tahun, yang berarti anak umur 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I.

Pada Gambar 2.92 menunjukkan data capaian harapan lama sekolah dalam untuk Provinsi Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan selama periode 2020-2024. Berdasarkan grafik tersebut, terdapat tren peningkatan di kedua wilayah. Capaian harapan lama sekolah di tingkat nasional secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses atau kualitas pendidikan tingkat regional. Dalam konteks ekonomi, peningkatan harapan lama sekolah mencerminkan investasi yang lebih baik pada modal manusia, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Gambar 2.92
Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun)

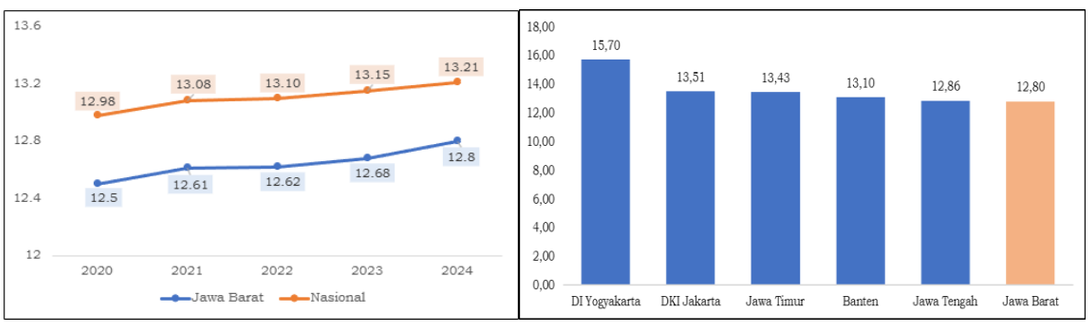

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, HLS Provinsi Jawa Barat merupakan yang terendah dibanding 5 (lima) provinsi lainnya (Tabel 2.38). Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan di lima provinsi tersebut lebih lama dibandingkan di Jawa Barat.

Tabel 2.38
Harapan Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Tahun)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	12,98	13,07	13,08	13,33	13,51
Jawa Barat	**12,50**	**12,61**	**12,62**	**12,68**	**12,80**
Jawa Tengah	12,70	12,77	12,81	12,85	12,86
DI Yogyakarta	15,59	15,64	15,65	15,66	15,70
Jawa Timur	13,19	13,36	13,37	13,38	13,43

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
Banten	12,89	13,02	13,05	13,09	13,10
Indonesia	**12,98**	**13,08**	**13,10**	**13,15**	**13,21**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian HLS kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Perbedaan HLS mengindikasikan adanya disparitas dalam mengakses fasilitas pendidikan antardaerah kabupaten/kota. Disparitas tersebut terlihat dari capaian HLS tertinggi sebesar 14,30 tahun di Kabupaten Ciamis dan terendah sebesar 12,00 tahun di Kabupaten Bandung Barat (Tabel 2.39). Selisih 2,3 tahun menandakan perbedaan jumlah tahun (kesempatan) untuk menempuh pendidikan bagi penduduk usia 7 (tujuh) tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 baik Kabupaten Ciamis maupun Kabupaten Bandung Barat capaian HLS meningkat pada tahun 2024.

Tabel 2.39
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	12,48	12,49	12,50	12,64	12,75
2	Sukabumi	12,23	12,24	12,25	12,38	12,39
3	Cianjur	11,99	12,00	12,01	12,03	12,04
4	Bandung	12,69	12,70	12,71	12,73	12,74
5	Garut	11,91	12,03	12,15	12,16	12,17
6	Tasikmalaya	12,53	12,54	12,59	12,63	12,64
7	Ciamis	14,06	14,20	14,28	14,29	14,30
8	Kuningan	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
9	Cirebon	12,25	12,27	12,28	12,41	12,42
10	Majalengka	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
11	Sumedang	12,97	12,98	12,99	13,01	13,02
12	Indramayu	12,25	12,26	12,27	12,29	12,32
13	Subang	11,70	11,71	11,78	11,91	12,11
14	Purwakarta	12,11	12,12	12,13	12,18	12,25
15	Karawang	12,09	12,10	12,19	12,20	12,21
16	Bekasi	13,09	13,10	13,11	13,17	13,18
17	Bandung Barat	11,87	11,88	11,89	11,91	12,00
18	Pangandaran	12,07	12,08	12,11	12,30	12,31
19	Kota Bogor	13,41	13,42	13,43	13,45	13,51
20	Kota Sukabumi	13,47	13,58	13,59	13,60	13,62
21	Kota Bandung	14,20	14,21	14,23	14,24	14,25
22	Kota Cirebon	13,12	13,13	13,14	13,16	13,17
23	Kota Bekasi	14,00	14,10	14,11	14,12	14,14
24	Kota Depok	13,92	13,93	13,94	13,96	14,11
25	Kota Cimahi	13,80	13,81	13,82	13,84	13,85
26	Kota Tasikmalaya	13,45	13,46	13,47	13,49	13,50
27	Kota Banjar	13,23	13,24	13,25	13,27	13,28
	Provinsi Jawa Barat	**12,50**	**12,61**	**12,62**	**12,68**	**12,80**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pola spasial capaian HLS kabupaten/kota (Gambar 2.93) memperlihatkan disparitas yang cukup tajam. Terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan HLS >13 tahun, 15 (lima belas) kabupaten/kota dengan capaian HLS antara 12-13 tahun, dan tidak ada kabupaten/ kota dengan capaian HLS < 12 tahun pada tahun 2024. Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah yang relatif tertinggal dibanding daerah lain dalam hal pembangunan bidang pendidikan. Sementara, Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan capaian HLS tertinggi melampaui capaian HLS Kota Bandung dan Kota Bekasi.

Gambar 2.93
Pola Spasial Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Tahun 2024 (Tahun)

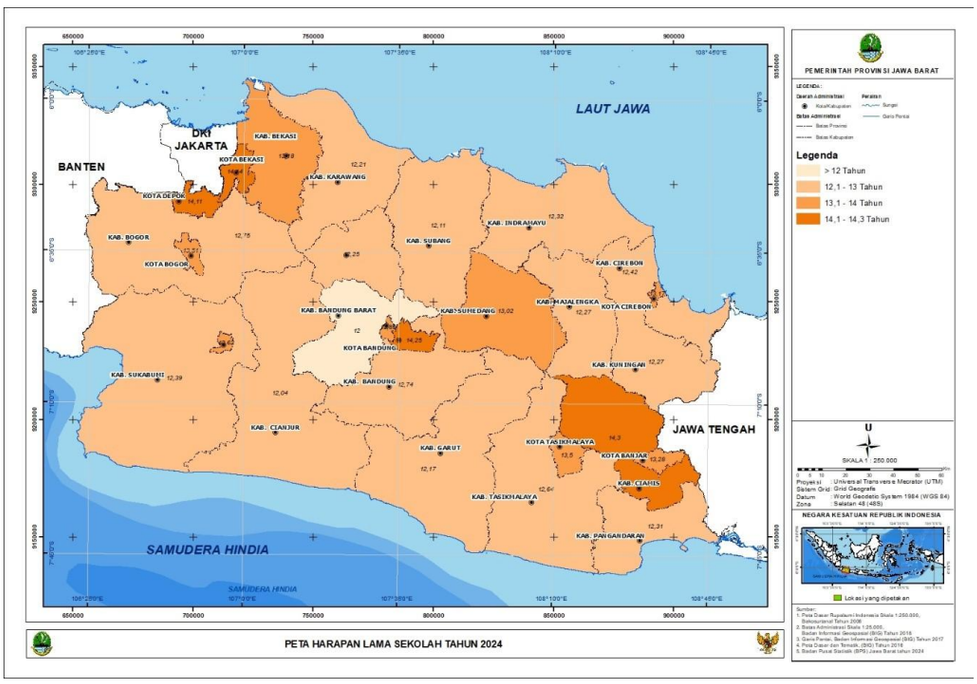

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Rasio guru terhadap siswa merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan pendidikan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran. Rasio ini mencerminkan seberapa banyak siswa yang ditangani oleh seorang guru dalam suatu satuan pendidikan. Idealnya, rasio guru dan siswa harus seimbang agar guru dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa, melaksanakan pembelajaran yang efektif, dan melakukan penilaian secara optimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 17 menetapkan rasio minimal jumlah siswa per guru sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi (TPG).

Tabel 2.40
Rasio Minimal Jumlah Siswa Per Guru

Jenjang Sekolah (Sederajat)	TK, RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	MAK
Rasio Guru:Siswa	1:15	1:20	1:15	1:20	1:15	1:20	1:15	1:15	1:12

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, meskipun jumlah sekolah dan guru terus meningkat, distribusi guru yang belum merata menyebabkan rasio guru-siswa di beberapa sekolah masih cukup tinggi. Hal ini banyak dijumpai di wilayah perkotaan yang padat maupun daerah terpencil yang kekurangan tenaga pendidik. Ketidakseimbangan ini berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar serta pencapaian hasil belajar siswa. Untuk itu, dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemerataan distribusi guru melalui kebijakan zonasi, pengangkatan guru ASN dan PPPK secara selektif, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh sebagai solusi di daerah dengan rasio tinggi. Rasio yang ideal tidak hanya mendukung keberhasilan akademik, tetapi juga penting untuk membentuk lingkungan belajar yang inklusif, personal, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Gambar 2.94
Rasio Pelayanan Guru terhadap Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan per Kabupaten/Kota Tahun 2024

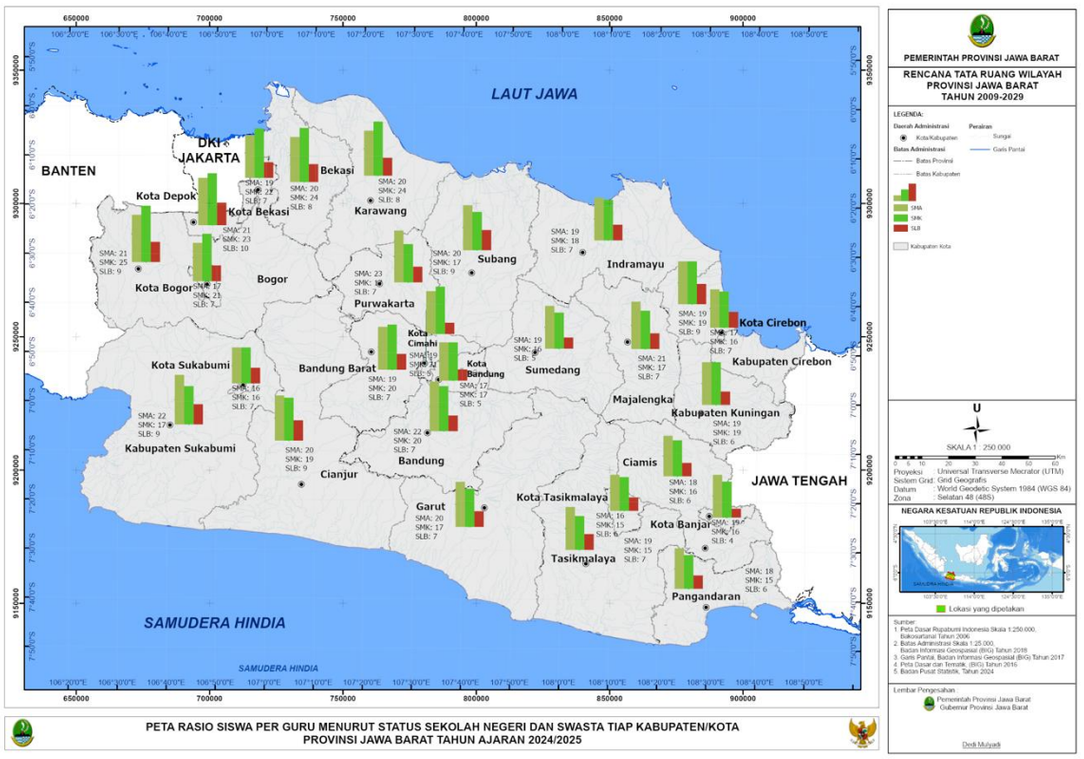

Sumber: Hasil Analisis Bappeda berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan, 2025

Selain tingkat pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, pesantren memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pendidikan di Provinsi Jawa Barat, baik dari aspek pemerataan akses, peningkatan kualitas dan Mutu Pendidikan, maupun penguatan karakter peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Nusantara, pesantren tidak hanya menjadi pusat pembelajaran keagamaan, tetapi juga telah berevolusi menjadi lembaga yang berkontribusi terhadap pendidikan formal, informal, dan nonformal. Di Jawa Barat, dengan jumlah pesantren yang mencapai lebih dari 15.000 lembaga dan jutaan santri, keberadaan pesantren menjadi kekuatan sosial dan kultural yang signifikan dalam mendukung peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Melalui pendidikan berbasis keagamaan yang terintegrasi dengan kurikulum formal seperti MI, MTs, MA, hingga SMK dan pendidikan tinggi keislaman, pesantren berkontribusi pada penyerapan peserta didik yang berpotensi putus sekolah, terutama di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal. Pesantren juga menjadi alternatif pendidikan yang inklusif dan

berbasis nilai-nilai moral, sehingga mendukung misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membentuk generasi muda yang cerdas, agamis, dan berkarakter. Selain itu, melalui penguatan program *life skills*, kewirausahaan santri, serta integrasi pendidikan vokasional di pesantren, lembaga ini turut menjawab tantangan dunia kerja dan menurunkan angka pengangguran terbuka, terutama di kalangan lulusan pendidikan dasar dan menengah.

Dengan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan organisasi keagamaan, fasilitasi dana pendidikan, pesantren dapat menjadi pilar utama dalam percepatan pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik pesantren, digitalisasi pembelajaran, serta integrasi pesantren dalam ekosistem pendidikan daerah akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengakselerasi transformasi pendidikan yang holistik dan berkelanjutan di Tanah Pasundan.

Melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang pesantren di Jawa Barat merujuk pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, menurut BPK RI. Perda ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren di Jawa Barat, melalui Perda ini dapat dilihat bagaimana peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.41
Rekapitulasi Data Lembaga Pesantren di Jawa Barat Tahun 2024

No	Kota/Kabupaten	Total Lembaga			Santri			Ustadz		
		Kitab Kuning	Kitab Kuning & Pendidikan Formal	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	BOGOR	1126	369	1495	43704	38817	82521	4282	2457	6739
2	SUKABUMI	846	184	1030	28049	26772	54821	2215	1315	3530
3	CIANJUR	673	138	811	25250	23868	49118	2042	1113	3155
4	BANDUNG	353	92	445	13487	13860	27347	1315	781	2096
5	GARUT	753	713	1466	39573	38599	78172	4058	2213	6271
6	TASIKMALAYA	1030	411	1441	31977	32365	64342	3182	1899	5081
7	CIAMIS	489	37	526	8633	9998	18631	1110	750	1860
8	KUNINGAN	208	19	227	9481	8858	18339	891	557	1448
9	CIREBON	451	417	868	16721	15577	32298	1288	656	1944
10	MAJALENGKA	344	172	516	10649	10122	20771	1732	1037	2769
11	SUMEDANG	156	153	309	8202	8093	16295	988	557	1545
12	INDRAMAYU	132	44	176	11997	11075	23072	1039	698	1737
13	SUBANG	219	36	255	9963	9870	19833	1259	790	2049
14	PURWAKARTA	264	70	334	10275	11347	21622	697	432	1129
15	KARAWANG	504	114	618	11259	10522	21781	1390	808	2198
16	BEKASI	124	204	328	12283	10698	22981	1433	841	2274
17	BANDUNG BARAT	752	72	824	11845	11261	23106	1643	940	2583
18	PANGANDARAN	174	24	198	3907	4264	8171	439	218	657
19	KOTA BOGOR	79	57	136	3395	2750	6145	346	192	538
20	KOTA SUKABUMI	90	30	120	2496	2568	5064	340	171	511
21	KOTA BANDUNG	64	29	93	3541	3822	7363	475	243	718
22	KOTA CIREBON	23	30	53	1945	2356	4301	260	161	421
23	KOTA BEKASI	97	10	107	5188	4914	10102	608	344	952
24	KOTA DEPOK	85	50	135	8405	7357	15762	748	418	1166
25	KOTA CIMAHI	31	11	42	1278	1106	2384	148	79	227

No	Kota/Kabupaten	Total Lembaga			Santri			Ustadz		
		Kitab Kuning	Kitab Kuning & Pendidikan Formal	Total	L	P	Total	L	P	Total
26	KOTA TASIKMALAYA	85	198	283	8648	9762	18410	1003	776	1779
27	KOTA BANJAR	35	16	51	1995	2327	4322	257	176	433
SUMMARY TOTAL		**9187**	**3700**	**12887**	**344146**	**332928**	**677074**	**35188**	**20622**	**55810**

Sumber: Kementerian Agama, 2025

Madrasah Aliyah (MA) sebagai lembaga pendidikan menengah berciri khas keislaman memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Dengan kurikulum nasional yang diintegrasikan dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, MA tidak hanya mencetak lulusan yang unggul dalam akademik, tetapi juga dalam aspek moral dan karakter. Peran MA menjadi semakin penting dalam mendorong peningkatan indikator pendidikan seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta dalam menekan Angka Putus Sekolah (APS/APS-SMP/APS-SMA).

Sebaran MA yang merata hingga ke daerah perdesaan dan pinggiran perkotaan membuka akses pendidikan menengah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mungkin menghadapi hambatan ekonomi atau geografis untuk bersekolah di SMA/SMK. Banyak MA yang diselenggarakan oleh masyarakat, ormas keagamaan, dan yayasan Islam, menjadikannya alternatif pendidikan menengah yang terjangkau dan inklusif. Hal ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, yang menjadi tantangan utama dalam pemerataan akses pendidikan di Jawa Barat. Di sisi lain, kehadiran MA turut memperpanjang Rata-Rata Lama Sekolah, karena siswa yang melanjutkan pendidikan ke MA berarti memperpanjang masa sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang MA. Dalam jangka panjang, ini juga berdampak positif terhadap Harapan Lama Sekolah, terutama bagi anak-anak usia dini yang melihat peluang dan aspirasi untuk melanjutkan pendidikan ke MA sebagai bagian dari jalur keberhasilan pendidikan mereka.

Lebih lanjut, MA juga berperan dalam penurunan angka putus sekolah, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Banyak MA yang memberikan fleksibilitas biaya, sistem *boarding* (asrama), serta pembinaan spiritual yang mendorong siswa bertahan dan menyelesaikan pendidikan. Tak sedikit pula MA yang

memiliki program kejuruan atau keterampilan, menjadikan lulusannya memiliki daya saing di dunia kerja sekaligus mengurangi risiko putus sekolah akibat faktor ekonomi atau motivasi belajar. Oleh karena itu, perlu terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama dan lembaga penyelenggara MA dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, dukungan sarana prasarana, serta integrasi data pendidikan madrasah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan diperlukan pembangunan literasi di masyarakat, termasuk literasi digital. Pembangunan literasi masyarakat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator pembangunnya meliputi: 1) Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1); 2) Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2); 3) Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3); 4) Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari (UPLM 4); 5) Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (UPLM 5); 6) Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6); dan 7) Jumlah Anggota Perpustakaan (UPLM 7).

Gambar 2.95
Capaian IPLM Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

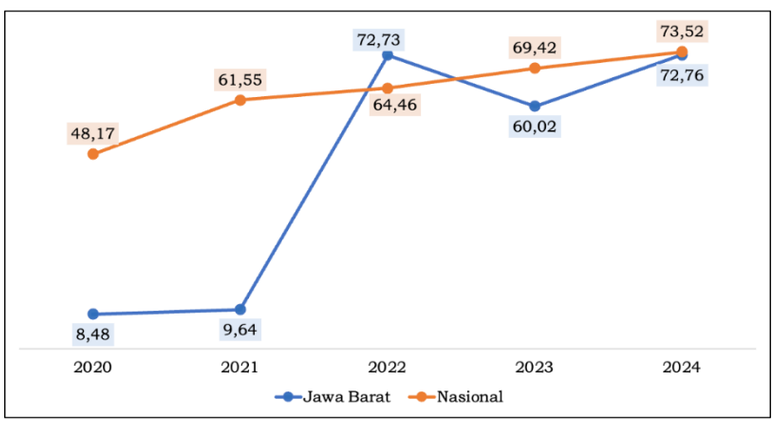

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2025 (diolah)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Barat menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024 (Gambar 2.96). Data ini mencerminkan kemajuan besar Jawa Barat dalam pembangunan literasi, meski masih disertai ketidakstabilan dari tahun ke tahun.

Gambar 2.96
Capaian Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

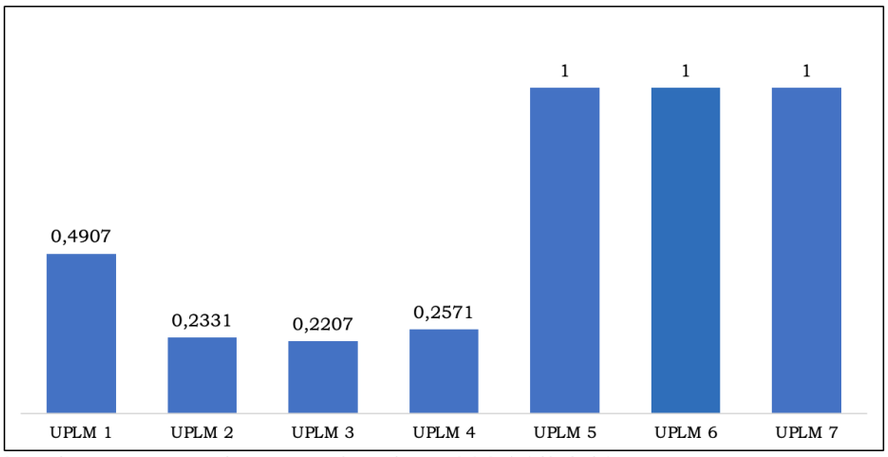

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2025 (diolah)

Apabila dilihat lebih dalam, terdapat 3 (tiga) Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang berkontribusi besar terhadap capaian IPLM Provinsi Jawa Barat tahun 2024, diantaranya yaitu Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (UPLM 5), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6), dan Jumlah Anggota Perpustakaan (UPLM 7). Sementara itu, capaian UPLM yang tergolong rendah berkaitan dengan pemerataan layanan, ketercukupan koleksi dan tenaga perpustakaan, serta kunjungan masyarakat per hari. Sehingga UPLM yang masih rendah tersebut perlu menjadi fokus intervensi dalam pembangunan literasi masyarakat kedepan.

Gambar 2.97
Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024

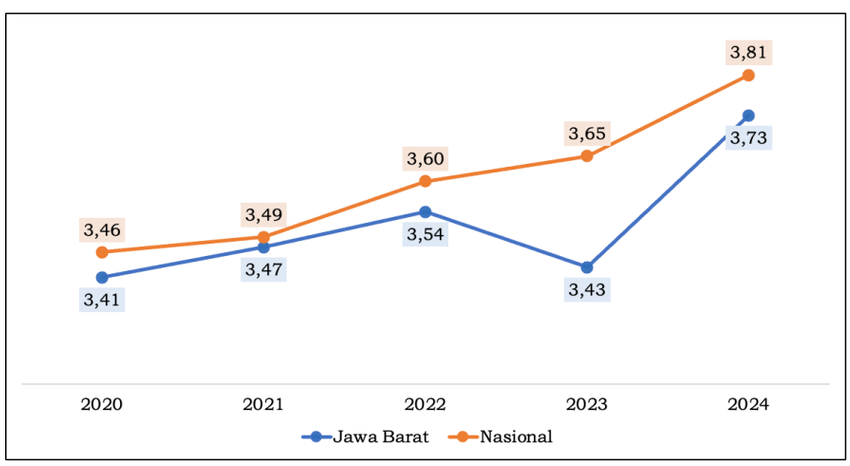

Sumber: literasidigital.id, 2025 (diolah)

Pada era digitalisasi saat ini, Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengembangan layanan perpustakaan di Jawa Barat dengan menyediakan layanan perpustakaan digital (digital *library*) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, masyarakat di Jawa Barat harus memiiki literasi digital yang memadai. Semakin baik literasi digital masyarakat, maka akan semakin membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital. Literasi digital di Provinsi Jawa Barat diukur dengan Indeks Literasi Digital. Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun terjadi penurunan sebesar 0,11 Poin pada 2023. Peningkatan nilai Indeks Literasi Digital Jawa Barat, menandakan adanya perbaikan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital. Namun, pencapaian ini masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat mengalami kemajuan, namun secara rata-rata kemampuan literasi digital masyarakatnya masih menjadi tantangan.

Jika ditelusuri lebih dalam, Budaya Digital (*Digital Culture*) di Provinsi Jawa Barat merupakan pilar yang berkontribusi besar dalam pencapaian Indeks Literasi Digital. Sehingga Provinsi Jawa Barat perlu melakukan upaya lebih untuk meningkatkan capaian 3 (tiga) pilar lainnya yaitu Kecakapan Digital (*Digital Skill*), Etika Digital (*Digital Ethics*), dan Keamanan Digital (*Digital Safety*). Namun demikian, pilar Keamanan Digital membutuhkan perhatian lebih mengingat kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat masih menjadi tantangan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif adalah sistem perlindungan sosial yang menyesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dinamis. Hal ini menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan kesempatan kerja, tetapi juga harus menjamin perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) merupakan salah satu instrumen strategis

untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, dan ketidakmampuan ekonomi akibat berhenti bekerja. Jamsostek dapat meningkatkan daya tahan ekonomi dan dapat menekan timbulnya angka kemiskinan baru akibat risiko ketenagakerjaan. Tanpa skema perlindungan yang memadai, masyarakat pekerja akan lebih rentan terhadap guncangan sosial dan ekonomi, terlebih di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Di Provinsi Jawa Barat, meskipun Pekerja cukup besar dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil, namun tingkat perlindungan sosial terhadap pekerja masih belum optimal, terutama pada kelompok pekerja rentan dan sektor informal. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan , di bulan maret dari Jumlah Penduduk Bekerja (Diluar ASN/TNI/POLRI dll) sebanyak 19,1 juta orang, jumlah pekerja yang aktif menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan adalah sebesar 6,4 juta orang atau 33,54 persen. Untuk pekerja formal dari 9,6 juta orang hanya 5,26 juta (54,68 persen) saja yang aktif sedangkan untuk untuk pekerja informal dari 9,48 juta orang hanya 1,15 juta (12,1 persen) saja yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2.42
Cakupan Kepesertaan Jamsostek di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025

Sektor	*Coverage*	Peserta Aktif	Belum Aktif
FORMAL	9.624.473	5.262.487	4.361.986
		(54,70%)	(45,30%)
INFORMAL	9.481.439	1.145.254	8.336.185
		(12,10%)	(87,90%)
TOTAL	19.105.912	6.407.741	12.698.171
		(33,50%)	(66,50%)

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, Maret 2025

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 menganggarkan Rp6.588.993.600 untuk membantu iuran Jamsostek bagi 43.578 pekerja rentan (tenaga pendidik keagamaan), termasuk pembayaran Jamsostek bagi seluruh Pegawai Non-ASN. Oleh karena itu, upaya peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Barat menjadi sangat mendesak, terutama bagi pekerja sektor informal dan kelompok rentan yang selama ini kurang terjangkau oleh skema perlindungan yang ada. Ketimpangan antara jumlah pekerja dan tingkat kepesertaan menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif,

kolaboratif, dan adaptif terhadap karakteristik dunia kerja saat ini. Tanpa langkah strategis yang terintegrasi, ketidakadilan perlindungan sosial akan terus berlanjut dan berpotensi melemahkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat ke depan.

Provinsi Jawa Barat telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. Mengedukasi dan mendorong Perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
c. Peningkatan literasi sosial ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui edukasi massal dan kampanye publik di media sosial dan komunitas.

Sehingga untuk mencapai cakupan yang lebih luas dan inklusif, kedepan akan dilaksanakan beberapa langkah strategis yaitu:

a. Pengembangan *roadmap universal coverage* Jamsostek dengan target tahunan dan peta jalan intervensi berbasis data, yang didalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
b. Pengalokasian APBD untuk bantuan iuran bagi kelompok prioritas;
c. Pemanfaatan dana desa (APBDes) untuk mendukung perlindungan sosial pekerja desa; dan
d. Kolaborasi dengan BUMD, CSR swasta, Lembaga Zakat, filantropi dan lainnya untuk perluasan bantuan iuran.

Penyandang disabilitas juga perlu memiliki kesempatan dan akses untuk bekerja di sektor formal yang memilki sistem ketenagakerjaan dengan aturan resmi, sebagaimana yang disampaikan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang Mewajibkan Pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk memperkerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari total pegawai. Selain itu, menjamin hak yang sama atas pekerjaan warga negara, termasuk penyandang disabilitas sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023

tentang Ketenagakerjaan. Adapun jumlah pekerja disabilitas di sektor formal di Jawa Barat, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.98
Jumlah Pekerja Disabiltas di Jawa Barat
Tahun 2019-2024

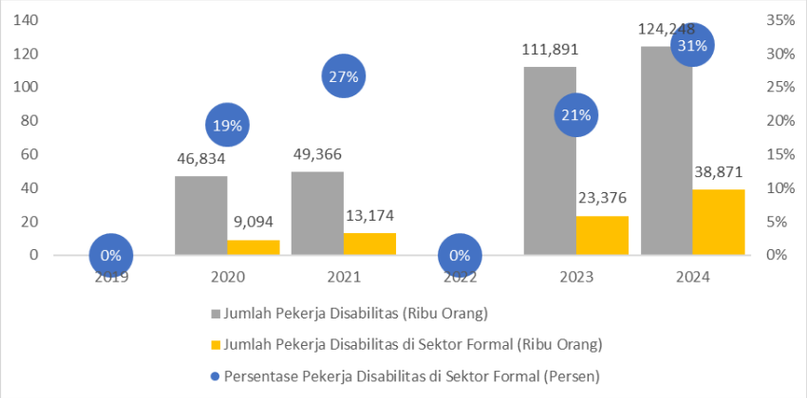

Sumber: SAKERNAS, 2025

Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat memerlukan perhatian serius dari pemerintah melalui program dan kegiatan perlindungan sosial yang adaptif guna meningkatkan ketahanan, inklusivitas, dan kemandirian masyarakat. Perlindungan sosial ini berperan penting dalam membantu masyarakat miskin dan rentan menghadapi tekanan ekonomi serta beradaptasi terhadap perubahan global.

Untuk mengukur efektivitas upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan berbagai indikator seperti Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) yang terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial.

Grafik menunjukkan tren perkembangan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020 hingga 2024 (Gambar 2.98). Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika Ikesos melonjak menjadi 44,57 persen. Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada awal periode, kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Barat terus membaik secara konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Gambar 2.99
Perkembangan Indeks Kesejahteraan Sosial
di Jawa Barat Tahun 2020-2024

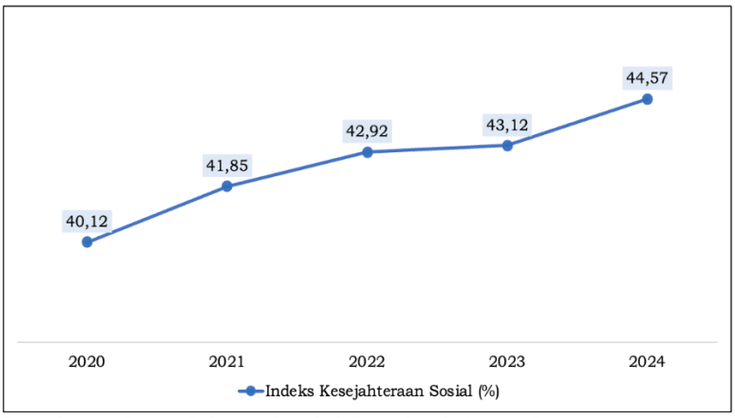

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia dan Provinsi, dengan 3 (tiga) dimensi utama yang ditekankan, yaitu toleransi antar umat beragama, kesetaraan antar umat beragama, dan kerja sama antar umat beragama.

Tabel 2.43
Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukuran Umat Beragama	70,52	72,21	74,10	76,47

Sumber: Kementerian Agama 2025

Berdasarkan hasil survei Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat tahun 2024 mendapatkan skor sebesar 76,47 yang meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,10. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi kerukunan beragama di Provinsi Jawa Barat semakin baik dibanding tahun sebelumnya dan termasuk ke dalam kategori Tinggi dalam hal kerukunan umat beragama.

Aspek budaya juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memandang kebudayaan sebagai elemen strategis dalam pembangunan daerah yang holistik dan berkelanjutan. Dukungan terhadap pemajuan kebudayaan diwujudkan melalui penyusunan kebijakan,

program, dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, yang berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan seni dan budaya, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan, pariwisata, dan tata kelola pembangunan.

Sebagai indikator capaian, digunakan persentase pemajuan kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang mencerminkan tingkat keterlaksanaan tujuh aspek utama pemajuan kebudayaan, yaitu: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pendokumentasian, penguatan kelembagaan, dan pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan. Pada tahun 2024 capaian indikator ini telah mencapai 38,39 persen dari target 32,64 persen, meningkat sebesar 7,24 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 31,15 persen. Tren positif ini menunjukkan penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan potensi budaya lokal.

Peningkatan capaian indikator pemajuan kebudayaan akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah khususnya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan karakter, dan penguatan identitas budaya Jawa Barat.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas menjadi fondasi utama dalam upaya membangun manusia menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui implementasi fungsi keluarga. hal ini berkaitan erat dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diharapkan memiliki keuletan dan ketangguhan, kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri, serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Keluarga berkualitas direfleksikan dengan indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). IPKK terdiri dari 3 (tiga) dimensi pengukur meliputi ketahanan, kesejahteraan, dan partisipasi. Namun pada prosesnya, perhitungan dari IPKK ini mengalami penyesuaian sehingga terjadi perubahan pada *baseline* capaiannya.

Gambar 2.100
Capaian IPKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

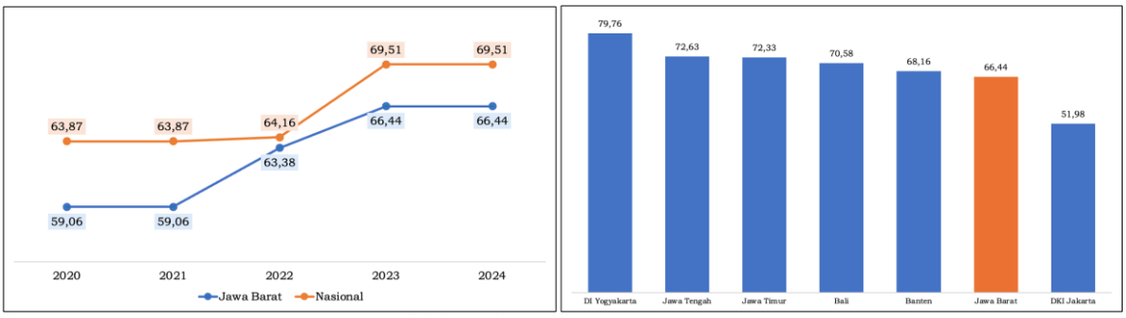

Sumber: BPS dan Bappenas RI, 2025 (diolah)

Capaian IPKK Provinsi Jawa Barat tahun 2023 masih berada di bawah capaian nasional dan dibawah capaian Provinsi lainnya. Masih rendahnya kualitas keluarga di Jawa Barat ini dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, resiliensi terhadap perubahan perubahan kondisi, serta peran dan kontribusi keluarga dalam menjalankan fungsinya. Dilihat dari salah satu indikator proxy, capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan adanya peningkatan dari 60,15 Poin di Tahun 2023 menjadi 61,23 Poin di Tahun 2024 yang dipengaruhi oleh dimensi kebahagiaan yang cukup baik.

Pada dasarnya, implementasi fungsi keluarga perlu memperhatikan kesetaraannya agar membangun hubungan yang adil antar anggota keluarga. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengindikasikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, tanpa memandang gender. Sehingga laki-laki dan perempuan dapat memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Namun kesetaraan gender tersebut masih menjadi tantangan bagi Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan kondisi ketimpangan gender Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Provinsi Jawa Barat paling tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Jawa. Sehingga dibutuhkan adanya perbaikan dari berbagai dimensi pengukurnya meliputi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

Gambar 2.101
Capaian IKG Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

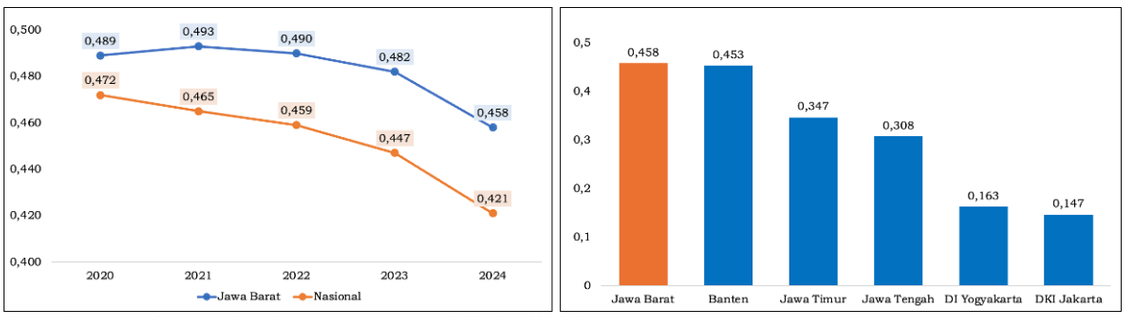

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Adapun capaian IPG Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung menurun dan capaiannya berada di bawah nasional. Capaian IPG Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menjadi capaian terendah jika dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Jawa Barat belum mencapai kesetaraan, karena masih adanya gap antara pencapaian pembangunan perempuan dengan pencapaian pembangunan laki-laki.

Gambar 2.102
Capaian IPG Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

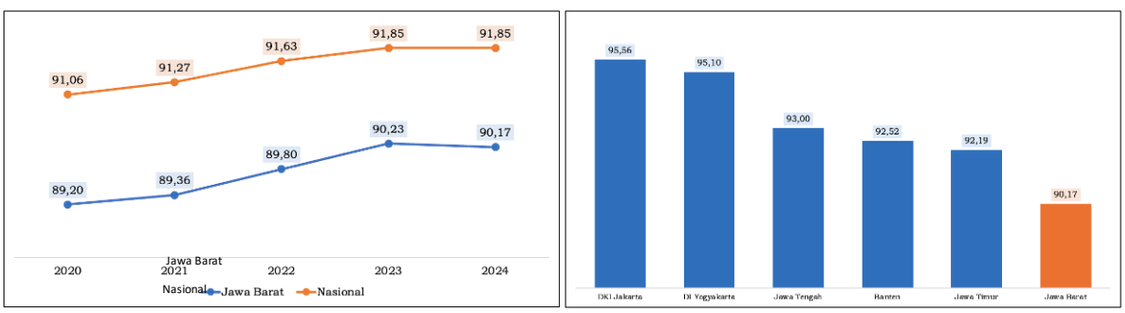

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Adapun capaian IPG Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung menurun dan capaiannya berada dibawah nasional. Capaian IPG Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menjadi capaian terendah jika dibandingkan dengan Provinsi di Jawa-Bali. Artinya pembangunan manusia di Jawa Barat belum mencapai kesetaraan, karena masih adanya gap antara pencapaian pembangunan perempuan dengan pencapaian pembangunan laki-laki. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan manusia kedepan.

Di sisi lain, pembangunan manusia tersebut tidak terlepas dari anak-anak yang akan memegang peranan penting dalam upaya perwujudan generasi yang unggul untuk Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya dalam memastikan kualitas pembangunan bagi anak-anak adalah dengan memenuhi hak dan memberikan perlindungan yang direfleksikan dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indikator ini terdiri dari 2 (dua) indikator komposit yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) meliputi 4 (empat) klaster pengukurnya yaitu: 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sedangkan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) meliputi 1 (satu) klaster yaitu perlindungan khusus. Secara keseluruhan, perhitungan IPA ini dilakukan berdasarkan 27 indikator komponen dari seluruh klaster pembangun IPA.

Gambar 2.103
Capaian IPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

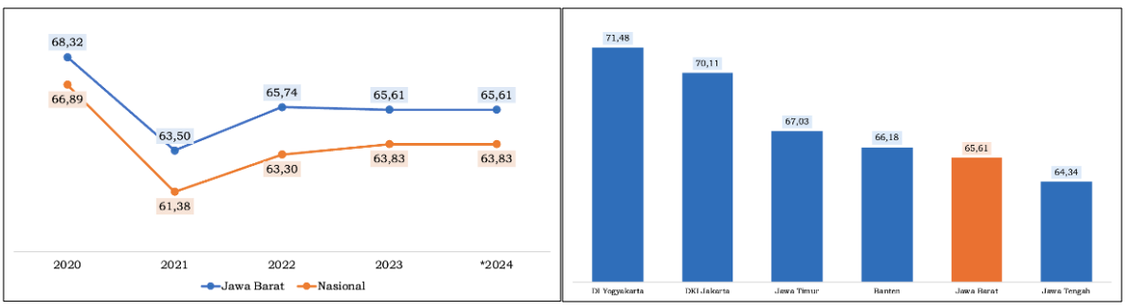

Sumber: Kemenpppa RI, 2024 (diolah)
*) Angka Sementara

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa capaian IPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 cenderung dinamis. Meskipun sudah mampu melampui capaian nasional, namun capaian IPA Provinsi Jawa Barat tahun 2023 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022, serta belum mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan capaian tertingginya di tahun 2020. Secara posisi di nasional, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-7 untuk capaian IPA tertinggi di Indonesia tahun 2023, posisi ini turun dari tahun sebelumnya yang berhasil berada di peringkat ke-4.

Apabila dilihat dari indikator komposit IPA, capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 62,02, menurun dari capaian sebelumnya yaitu 62,04. Hal ini disebabkan

oleh penurunan pada klaster hak sipil dan kebebasan, serta adanya 2 (dua) klaster yang masih rendah yaitu klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak sipil dan kebebasan. Sehingga klaster-klaster ini yang membutuhkan perhatian lebih kedepannya.

Kondisi serupa ditunjukkan oleh capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 80,13 menjadi 79,96 di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan dari klaster perlindungan anak, yang dapat dipengaruhi oleh tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta banyaknya anak yang berada dibawah garis kemiskinan di Jawa Barat. Meski demikian, capaian Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Provinsi Jawa Barat berhasil mencapai 100 persen dengan berdasarkan pengaduan yang disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu, dari aspek daerah ramah anak dapat dilihat dengan persentase kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat dalam KLA yang berhasil mencapai 100 persen, sehingga Jawa Barat telah berhasil mencapai Provinsi Layak Anak (Provila). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian predikat ini belum berjalan beriringan dengan capaian IPA di daerah.

Masa anak-anak mencakup usia 0-18 tahun. Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal agar lebih siap transisi menuju fase pemuda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun yang sedang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Peran pemuda yaitu berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan potensi pemuda sebagai motor penggerak pembangunan yang harus didukung oleh kualitas yang memadai.

Dengan persentase pemuda Jawa Barat sebesar 23,81 persen dari keseluruhan penduduk satu provinsi (Susenas, 2024), Jawa Barat menghadapi tantangan pembangunan pemuda yang tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai berikut.

Gambar 2.104
Capaian IPP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

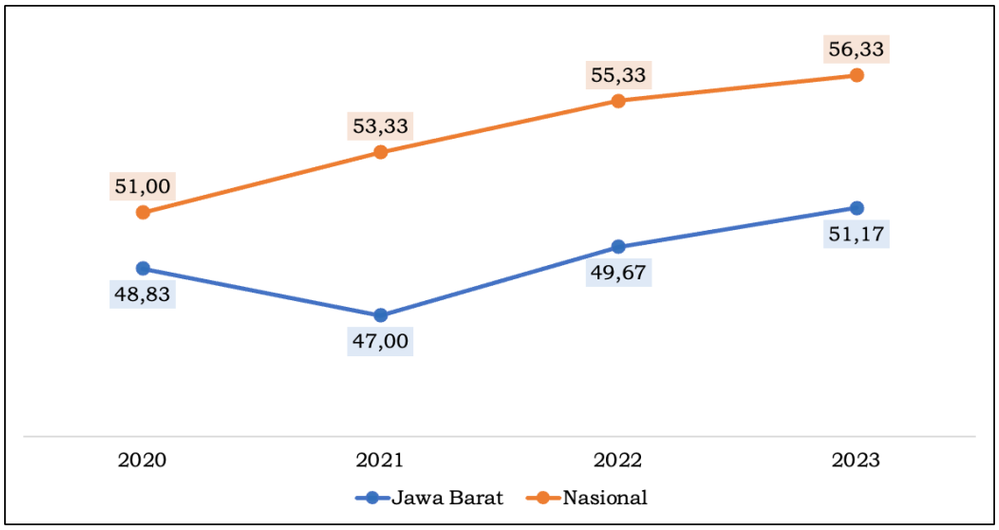

Sumber: Kemenpora, 2024

Pembangunan pemuda Tahun 2019-2023 diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang terdiri dari 5 (lima) domain, meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan dan kesejahteraan; 3) lapangan dan kesempatan kerja; 4) partisipasi dan kepemimpinan; serta 5) gender dan diskriminasi. Pada tahun 2021 capaian IPP Jawa Barat terendah selama kurun 5 (lima) tahun terakhir yang disebabkan oleh disrupsi Pandemi COVID-19. Pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan namun masih di bawah capaian nasional.

Dibandingkan dengan kinerja nasional, provinsi Jawa Barat perlu memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kualitas pemuda. Hal ini dikarenakan semua nilai domain IPP berada di bawah capaian rata-rata nasional.

Gambar 2.105
Perbandingan Nilai Domain IPP Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

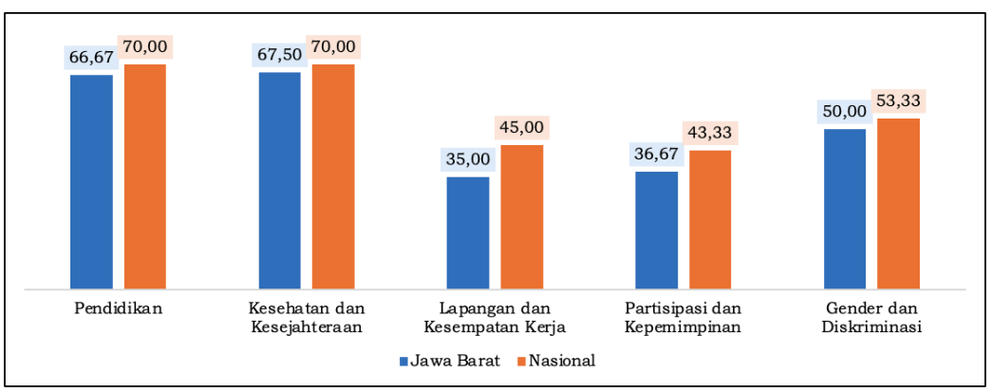

Sumber: Laporan IPP 2024

Dilihat dari grafik di atas, *gap* tertinggi antara capaian nasional dengan Jawa Barat yaitu 10 poin pada domain lapangan dan kesempatan kerja. Pada domain ini yang perlu menjadi perhatian adalah menekan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Indikator tingkat pengangguran terbuka pemuda memiliki persentase yang jauh lebih tinggi yaitu 18,83 persen dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional yaitu 13,41 persen dan termasuk ke dua besar nasional. Perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi untuk menekan tingkat pengangguran terbuka pemuda.

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan pemuda, setidaknya terdapat hal-hal kunci yang perlu dipenuhi, seperti: 1) Meningkatkan produktivitas pemuda agar mampu menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas sehingga dapat berdaya saing; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya modal manusia; 3) Penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Selain itu, perubahan cara pandang terhadap pemuda harus segera ditanamkan kepada seluruh pihak bahwa kunci keberhasilan pembangunan pemuda yang paling dasar adalah tingginya kepedulian terhadap masa depan pemuda.

Di sisi lain, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, salah satu tujuan keolahragaan adalah memelihara kesehatan dan kebugaran, prestasi olahraga, kecerdasan, dan kualitas manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan secara sistematis dari tahap pengenalan, pembudayaan, pengembangan bakat sejak usia muda secara berkelanjutan, dan peningkatan prestasi.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) mengukur pembangunan olahraga dengan 9 (sembilan) dimensi yaitu sumber daya manusia olahraga, literasi fisik, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.

Gambar 2.106
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Barat
Tahun 2021-2024

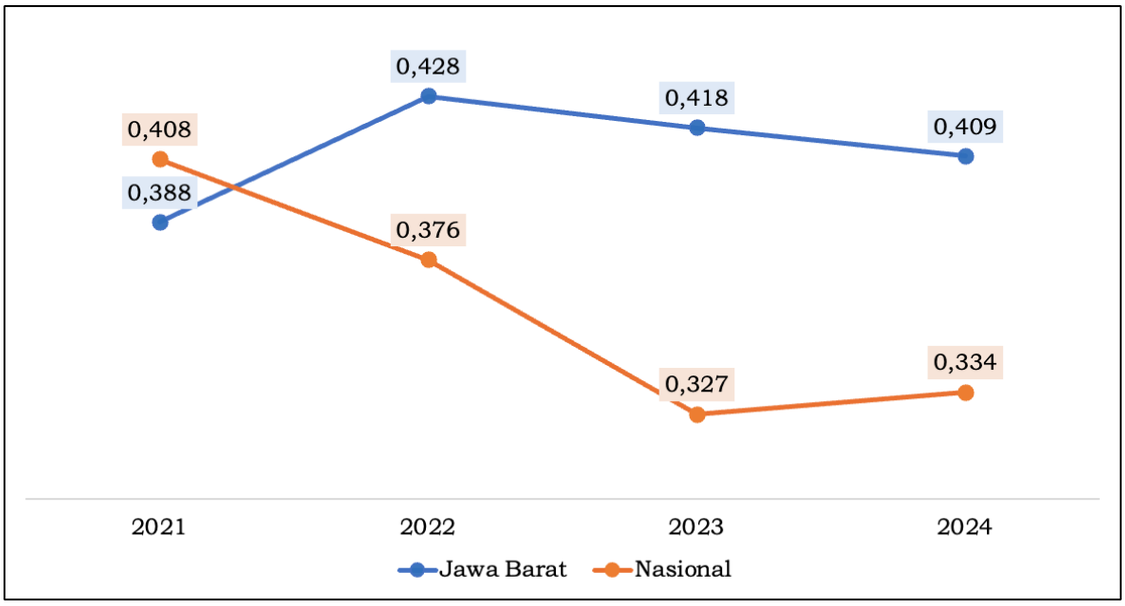

Sumber: Kemenpora, 2025

Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Barat tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023. Secara prestasi, Jawa Barat telah menunjukkan performa terbaiknya pada *event* olahraga nasional dan mendapatkan poin penuh pada dimensi performa. Namun, di sisi lain partisipasi masyarakat berusia 10-60 tahun dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir masih rendah (0,208 poin), terendah keempat nasional. Jawa Barat harus berupaya meningkatkan literasi fisik dan partisipasi masyarakat berolahraga yang dapat menimbulkan *butterfly effect* pada kebugaran jasmani, perkembangan dan kualitas individu, prestasi, serta ekonomi industri olahraga.

Aspek kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat menunjukkan capaian positif dalam membangun masyarakat yang sejahtera, sehat, berpendidikan, dan inklusif, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat sebagai motor penggerak utama. Dari perspektif kesejahteraan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas rata-rata nasional, PDRB per kapita yang, serta penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berkorelasi positif dengan penurunan Indeks Gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Di bidang kesehatan untuk semua, usia harapan hidup yang meningkat didukung oleh penurunan prevalensi

stunting dan peningkatan Indeks Keluarga Sehat, menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan layanan kesehatan dasar. Pendidikan berkualitas yang merata tercermin dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang terus meningkat, dengan peningkatan angka literasi dan numerasi serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Perlindungan sosial yang adaptif semakin kuat melalui cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, memberikan jaring pengaman bagi pekerja dan keluarga miskin dalam menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Aspek beragama dan berkebudayaan maju sebagai fondasi dasar kemasyarakatan menguat yang ditandai dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang tinggi dan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang meningkat. Sementara itu, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif didukung oleh Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, serta Indeks Pembangunan Pemuda yang terus mengalami perbaikan.

Meskipun demikian, tantangan ke depan yang muncul dari dinamika ini, seperti ketimpangan regional dalam akses pendidikan dan kesehatan, kemiskinan di wilayah pedesaan, peningkatan pengangguran pemuda akibat *miss match* keterampilan, serta pengaruh global seperti perubahan iklim terhadap ketahanan sosial, menuntut strategi pembangunan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Pengukuran daya saing daerah memperhatikan komponen-komponen seperti kualitas SDM, pemanfaatan IPTEK, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan aspek lainnya yang diuraikan dalam penjelasan berikut.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Daerah yang menunjukkan daya saing Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat yaitu Angka/Rasio Ketergantungan. Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk

65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Berdasarkan struktur umur penduduk, Jawa Barat memiliki komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia ini menjadi kekuatan utama dalam aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, keberadaan penduduk usia muda (0-14 tahun) yang cukup besar mencerminkan potensi generasi penerus, meskipun menuntut investasi besar dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja berkualitas.

Gambar 2.107
Kelompok Usia Penduduk Tahun 2020-2030

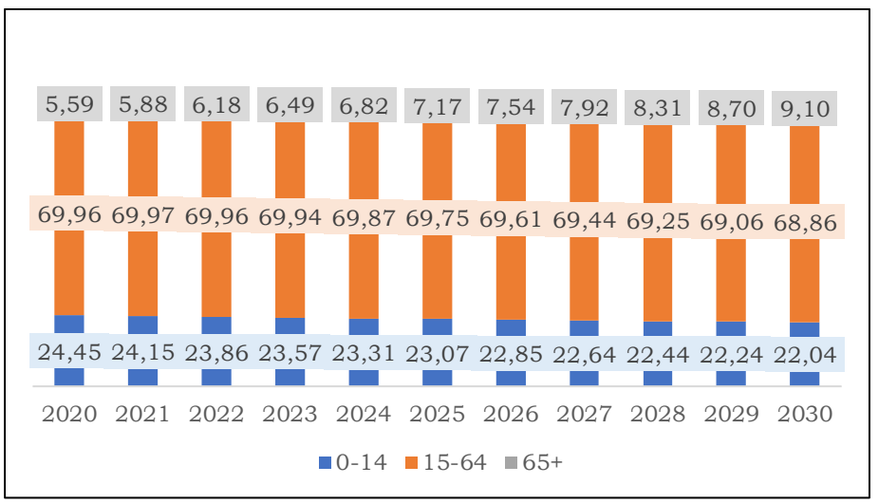

Sumber : BPS, 2024, diolah

Proporsi penduduk usia produktif yang besar memberi peluang bagi Jawa Barat untuk memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif, yaitu anak-anak (0-14 tahun) dan lansia (>64 tahun). Kondisi ini memungkinkan daerah untuk meningkatkan *output* ekonomi jika penduduk produktif didukung oleh keterampilan yang relevan dan lapangan kerja yang memadai. Namun, tanpa persiapan yang baik, potensi ini bisa menjadi beban, terutama jika terjadi pengangguran massal.

Namun, proporsi usia produktif di Provinsi Jawa Barat terlihat sedikit demi sedikit terus mengalami penurunan dari sebesar 69,96 persen pada tahun 2020 menjadi 69,87 persen pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan menjadi 68,86 persen di tahun 2030.

Terjadinya pengurangan usia produktif utamanya disebabkan oleh semakin rendahnya tingkat kelahiran dan semakin tingginya derajat kesehatan yang menyebabkan peningkatan usia harapan hidup yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut.

Meskipun jumlah penduduk usia lanjut masih relatif kecil, tren penuaan penduduk tetap perlu diantisipasi. Dalam beberapa dekade mendatang, peningkatan angka harapan hidup akan meningkatkan proporsi penduduk lansia. Hal ini menuntut perhatian khusus terhadap kebijakan pensiun, layanan kesehatan lansia, dan sistem perlindungan sosial yang memadai.

Untuk melihat besaran beban yang harus ditanggung usia produktif terhadap usia non produktif digunakan indeks yang disebut dengan rasio ketergantungan. Kaitannya dengan aspek daya saing daerah, ditunjukkan dengan membandingkan dengan angka nasional dan Pulau Jawa. Gambar berikut menunjukkan proyeksi rasio ketergantungan untuk Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan pada periode 2020-2030.

Gambar 2.108
Proyeksi Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2030

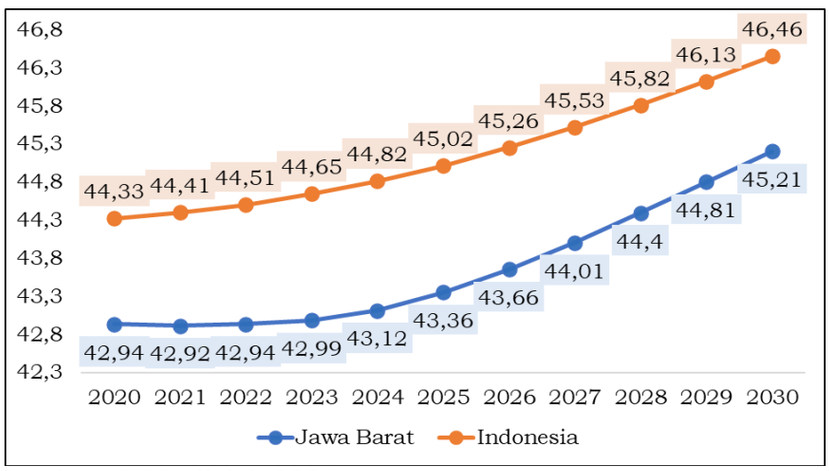

Sumber : BPS, diolah 2024

Gambar di bawah membandingkan rasio ketergantungan pada tahun 2024 di berbagai provinsi di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat. Dengan rasio ketergantungan sebesar 43,36. Rasio ini berpengaruh pada kemampuan daya saing sumber daya manusia di masing-masing wilayah.

Gambar 2.109
Perbandingan Rasio Ketergantungan di Provinsi Jawa Barat dan Pulau Jawa Tahun 2024

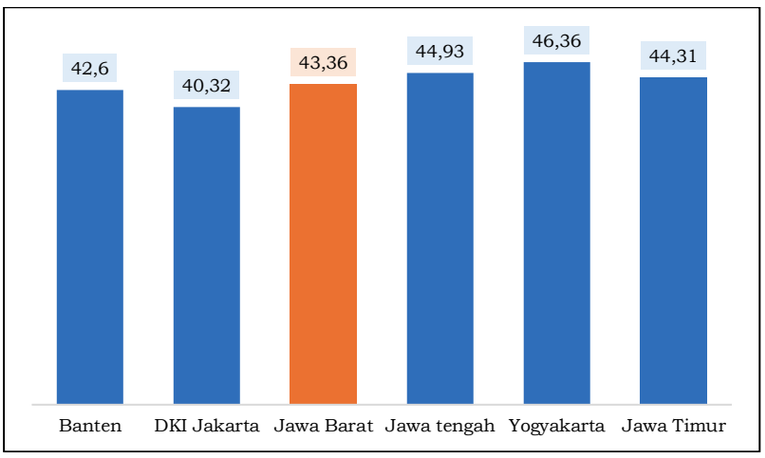

Sumber : BPS, 2024, diolah

Dibandingkan dengan daerah lainnya, Jawa Barat termasuk memiliki proporsi usia produktif yang relatif seimbang. Struktur umur penduduk yang relatif mendukung ini memberi Jawa Barat peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun, potensi tersebut hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur memadai, dan pengelolaan sumber daya manusia yang terarah agar kekuatan demografi benar-benar menjadi keunggulan pembangunan daerah.

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 terus mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan penyelenggaraan inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya terus melakukan perbaikan melalui berbagai program dan kegiatan sehingga penyelenggaraannya terus meningkat. Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar 81,27 poin dengan predikat Sangat Inovatif membawa Jawa Barat menjadi Peringkat ke-3 secara nasional di atas Provinsi lainnya di Indonesia, meningkat dari Tahun 2023 yang mendapat peringkat ke-4. Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat ini menggambarkan bahwa tingkat inovasi Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik. Capaian Indeks Inovasi Daerah sebagai salah satu gambaran dari Daya Saing Jawa Barat ini diharapkan dapat

menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Gambar 2.110
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2024

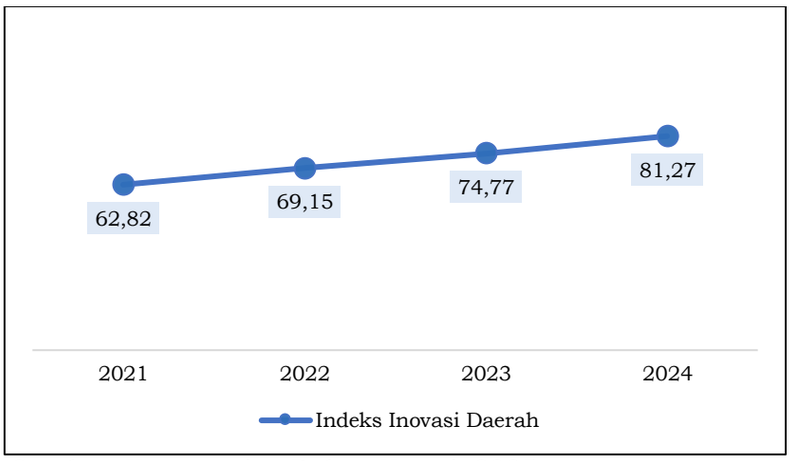

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Dari aspek produktivitas ekonomi, kondisi ketenagakerjaan dan dinamika pasar kerja memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas sektor ekonomi. Tiga elemen utama dalam analisis pasar tenaga kerja adalah Penduduk Usia Kerja (PUK), Angkatan Kerja (AK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Jumlah penduduk usia kerja yang besar mencerminkan potensi besar untuk pengembangan ekonomi, tergantung bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan. Menurut BPS, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas, tanpa batas usia maksimal, sehingga kelompok usia 65 tahun ke atas pun tetap masuk kategori ini meskipun secara umum dianggap tidak lagi produktif.

Namun, tidak semua penduduk usia kerja aktif secara ekonomi, karena ada yang masih bersekolah atau mengurus rumah tangga. Penduduk yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja, dan tingkat keterlibatan mereka diukur melalui TPAK. Indikator TPAK menunjukkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi dan mencerminkan pemanfaatan potensi tenaga kerja. TPAK yang tinggi umumnya menandakan pasar tenaga kerja yang sehat, meskipun perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi kualitas pekerjaan dan ketenagakerjaan secara keseluruhan.

Gambar 2.111
TPAK Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2024

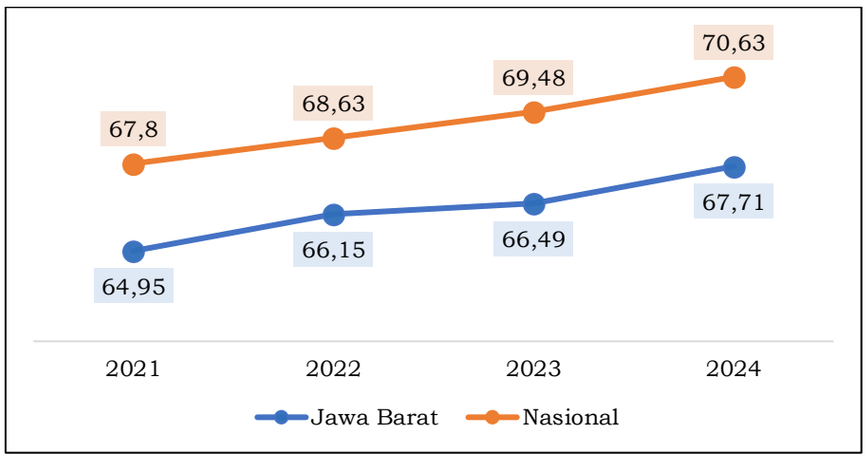

Sumber : BPS, 2025

Grafik menunjukkan selama periode 2021–2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Meskipun tren TPAK di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif, kesenjangan dengan tingkat nasional tetap terlihat. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, TPAK Jawa Barat pada 2024 menempati posisi kedua terendah, yang menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja Jawa Barat masih relatif rendah meski terus membaik.

Gambar 2.112
Perbandingan TPAK Jawa Barat dengan Provinsi Lain

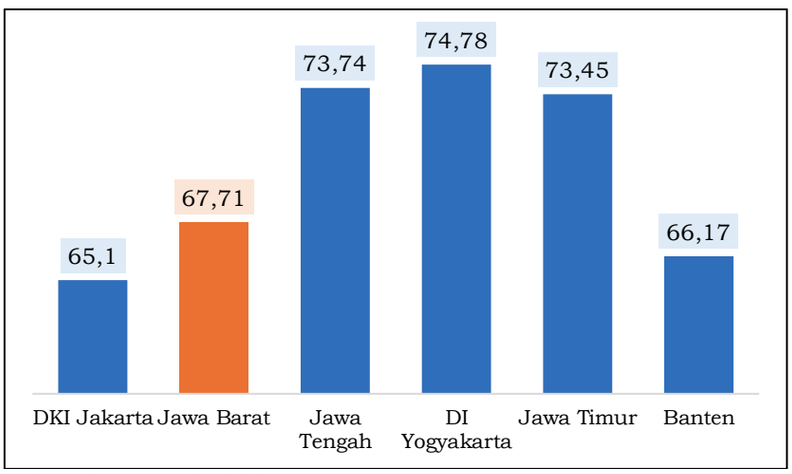

Sumber : BPS, 2024

Meskipun TPAK Jawa Barat menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan besar untuk mengejar

ketertinggalan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi di sektor produktif. Dengan penguatan kebijakan di bidang pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing ketenagakerjaan dan menyamai capaian provinsi lain di Pulau Jawa.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pengembangan Ekonomi Hijau menjadi sasaran utama dalam meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan pada pengukuran indeks ekonomi hijau di Jawa Barat hanya mengukur 14 (empat belas) indikator dari 15 (lima belas) indikator multidimensi yang mencakup keterkaitan antara lingkungan, masyarakat, dan ekonomi sebagai tiga pilar utama keberlanjutan. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya indikator lahan gambut pada daerah administrasi Provinsi Jawa Barat sehingga indikator tersebut tidak dimasukkan untuk menghitung indeks ekonomi hijau di Provinsi Jawa Barat.

Secara keseluruhan, Indeks Ekonomi Hijau Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan selama periode 9 (sembilan) Tahun (2015-2023), seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut dengan skor komposit 52,67 poin pada tahun 2023 dengan pilar tertinggi dari pilar ekonomi sebesar 72,85 poin.

Gambar 2.113
Capaian Indeks Ekonomi Hijau Jawa Barat Tahun 2015-2023

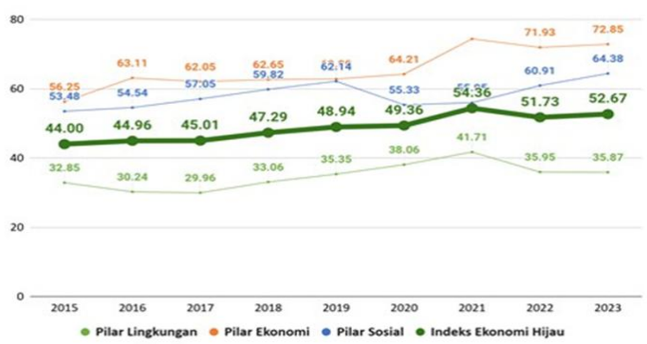

Sumber : Bappenas, 2024

Skor komposit pilar sosial mencapai 64,38 poin, dipengaruhi oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup yang masing-

masing masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Sementara itu, pilar lingkungan mencatat indeks komposit terendah, disebabkan oleh tantangan dalam hal tutupan lahan, kualitas air permukaan (parameter BOD), dan penurunan emisi gas rumah kaca. Meski demikian, kualitas udara tercatat memberi kontribusi positif pada pilar lingkungan, terutama pada tahun 2015 dan 2023. Namun, intervensi yang lebih masif tetap diperlukan, khususnya pada sektor energi dan pengendalian pencemaran air.

Selain fokus pada ekonomi hijau, Jawa Barat juga mulai mengembangkan pendekatan ekonomi biru, yakni konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan.

Gambar 2.114
Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia Tahun 2023

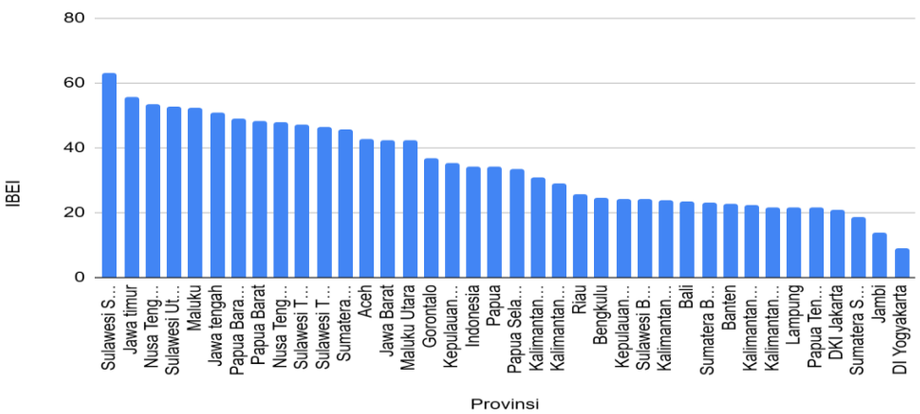

Sumber : Bappenas, 2024

Hasil dari perhitungan Bappenas menggambarkan bahwa secara keseluruhan dari 3 pilar, poin Indeks Ekonomi Biru Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar 42,56 berada diatas rata-rata Nasional sebesar 34,25. Namun dibandingkan dengan Provinsi lain Jawa Barat menduduki ranking 14.

Gambar 2.115
Analisis Kuadran IBEI Tahun 2023

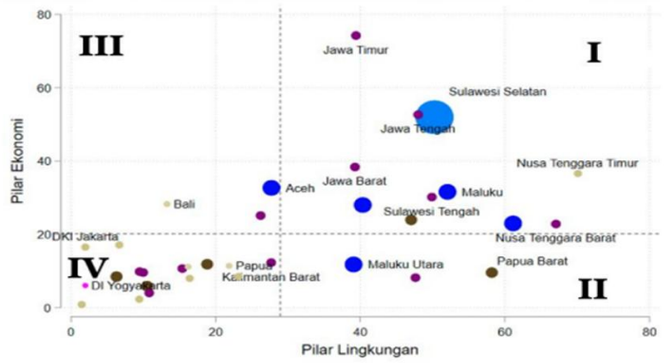

Sumber : Bappenas, 2024

Berdasarkan grafik analisis kuadran IBEI 2023, Provinsi Jawa Barat berada di kuadran I yang memiliki arti bahwa skor pilar lingkungan dan ekonomi berada di atas rata-rata nasional. Namun, poin pilar sosial IBEI Provinsi Jawa Barat berada di bawah rata-rata nasional yang memiliki poin sebesar 53,22, sedangkan Jawa Barat sebesar 47,89 poin, hal ini terjadi karena Indeks pilar sosial subpilar kesehatan yang pembobotannya mencapai 20,78 persen, poin Jawa Barat Kecil, terutama pada indikator Persentase penduduk desa pesisir yang memiliki jaminan kesehatan poinnya 0,01.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diukur melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Indeks Transformasi Digital Nasional.

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sampai dengan 2023 selalu berada di atas IP-TIK nasional. IP-TIK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pun terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jawa Barat terus bertumbuh. Sementara itu, pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,01 poin. Terjadi penurunan poin pada sub indeks Akses dan Infrastruktur TIK serta sub indeks Keahlian TIK. Meski pun penurunan

yang terjadi relatif tidak signifikan, namun hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus bagi Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bentuk upaya transformasi digital di Jawa Barat.

Gambar 2.116
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

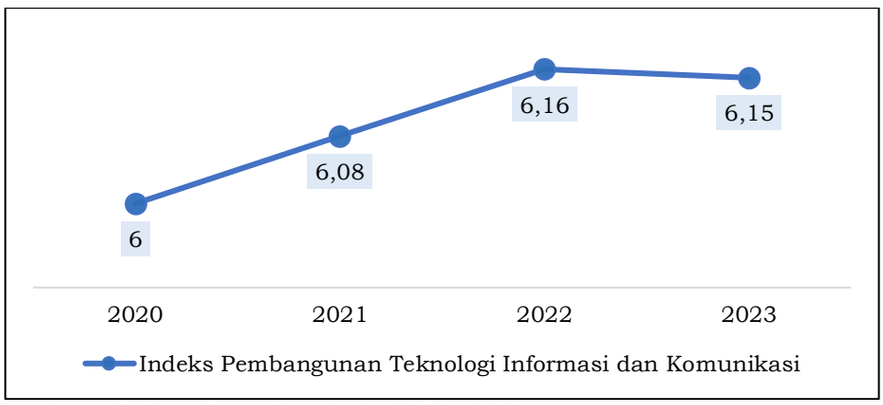

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

B. Indeks Transformasi Digital

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah. Dalam hal ini, Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Gambar 2.117
Indeks Transformasi Digital Nasional
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

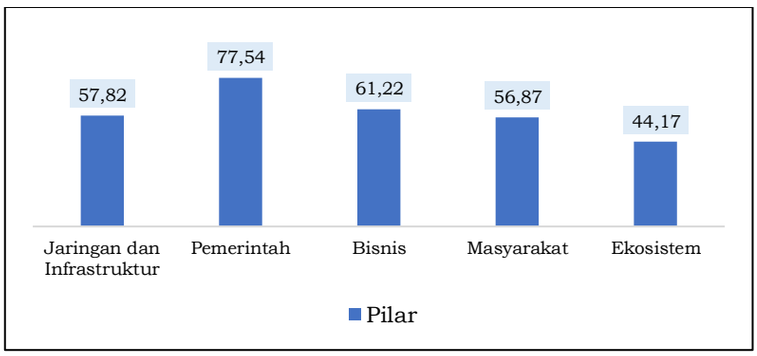

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024

Hasil Indeks Transformasi Digital Nasional menunjukkan Provinsi Jawa Barat telah memiliki tingkat transformasi digital yang relatif cukup baik di Indonesia. Nilai Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebesar 60,26 poin. Berdasarkan hasil analisis per pilar, pilar pemerintah digital menjadi satu-satunya pilar yang masuk ke dalam Klasifikasi A. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menciptakan lingkungan investasi dan kebijakan yang progresif dalam mendukung percepatan transformasi digital, penerapan teknologi digital dalam peningkatan efektivitas pelayanan publik, dan kesiapan pemerintah dalam mengadopsi berbagai *new emerging technologies*. Dalam pemerintahan digital, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Provinsi guna mengamankan dan melindungi informasi yang dikelola Pemerintah Daerah menjadi hal yang penting. Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi Provinsi Jawa Barat oleh BSSN pun setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Guna memperkuat persandian dan siber, Provinsi Jawa Barat telah membentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer sejak Tahun 2020 serta terus melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 17 Kabupaten/Kota yang juga telah membentuk CSIRT, yang artinya masih terdapat 10 Kabupaten/Kota yang belum membentuk CSIRT. Provinsi Jawa Barat terus berupaya melakukan penguatan dan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber/CSIRT baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini selaras dengan arahan Presiden dalam buku 130 Hari Kabinet Merah Putih terkait percepatan Tim Tanggap Insiden Siber untuk seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada, Provinsi Jawa Barat perlu terus melakukan peningkatan pelayanan publik, komunikasi dan informasi, serta keamanan siber dan aspek pemerintahan lainnya untuk mendukung transformasi digital di Jawa Barat.

Selain itu, pilar bisnis juga memiliki kinerja yang cukup baik, ditandai dengan perolehan skor sebesar 61,22 dan dikategorikan ke dalam Klasifikasi B pada tahun 2022. Perolehan skor yang cukup baik pada pilar pemerintah dan bisnis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi strategis untuk menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan

ekonomi digital di tingkat regional, yang berpotensi menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

Meskipun pilar-pilar pembangunan digital di Jawa Barat telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, tetapi masih terdapat ruang untuk mengembangkan beragam potensi yang mendukung kemajuan dan keberlanjutan pembangunan digital. Penguatan dalam aspek infrastruktur digital dan masyarakat digital menjadi kunci utama dalam mengakselerasi pertumbuhan digital. Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya peningkatan infrastruktur digital seperti pusat data Jawa Barat dan penyediaan akses internet melalui *wifi* gratis di area publik serta upaya dalam pengentasan desa *blank spot*. Meski demikian, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dan survei lapangan masing-masing Dinas Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa masih terdapat 7 desa *blank spot* dengan kriteria tanpa selular yang tersebar di 4 kabupaten dan 60 desa *blank spot* dengan kriteria tanpa konektivitas fiber optik yang tersebar di 11 Kabupaten.

Selanjutnya, pilar masyarakat di Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan perbaikan setiap tahunnya. Namun, terdapat aspek yang masih perlu ditingkatkan, utamanya pada upaya untuk meningkatkan keterampilan digital bagi masyarakat umum dan kelompok masyarakat khusus. Program pelatihan perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan digital dan mempercepat adaptasi masyarakat terhadap teknologi yang terus berkembang.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global menggambarkan kondisi keterkaitan sistem perekonomian daerah dengan perekonomian domestik dan global. Keterkaitan tersebut mencakup penguatan rantai pasok produksi-industri, sistem perdagangan dalam dan luar negeri, investasi, serta infrastruktur logistik yang efisien. Integrasi ekonomi domestik dan global bertujuan untuk memperkuat sistem industri dan perdagangan daerah yang lebih efisien, kokoh dan berdaya saing, memperluas pasar ekspor produk barang dan jasa (termasuk ke dalamnya menarik wisatawan dari luar daerah dan mancanegara), serta meningkatkan arus investasi PMA ke daerah. Integrasi ekonomi domestik dan global menempatkan sektor-

sektor perekonomian Jawa Barat menjadi bagian dari sistem perekonomian domestik dan global dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke level yang lebih tinggi.

A. Perdagangan

Kinerja pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran, menunjukkan ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi sebesar 12,09 persen, menandakan ketergantungan signifikan terhadap pasar global. Nilai ekspor pada 2024 mencapai USD 37,87 miliar, meningkat 3,39 persen dibandingkan tahun 2023, dengan ekspor nonmigas mendominasi sebesar USD 37,53 miliar. Kinerja pertumbuhan sektor perdagangan dan ekspor Jawa Barat sebagaimana Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3,19	4,22	4,36	4,85
Laju Pertumbuhan Eksport Nonmigas	Persen	27,51	13,75	5,22	3,45
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Triliun	319,59	349,00	378,83	408,25

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Di sisi lain, perdagangan Jawa Barat mengalami surplus perdagangan signifikan dengan nilai ekspor mencapai USD 31,52 miliar, berkontribusi 14,51 persen terhadap total ekspor Indonesia, dengan negara tujuan utama Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand; meskipun ekspor mengalami penurunan 1,96 persen pada Desember 2024, neraca perdagangan tetap surplus USD 1,98 miliar, menunjukkan ketergantungan ekonomi yang kuat pada pasar ekspor.

Gambar 2.118
Proyeksi Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Ekonomi
Tahun 2025-2030 (Persen)

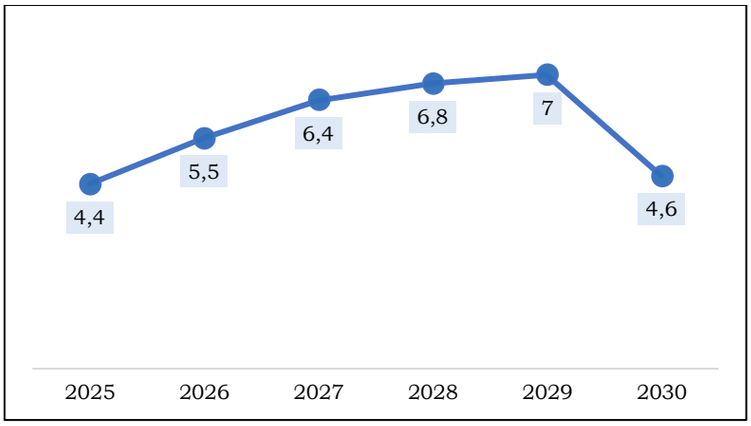

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

B. Perindustrian

Dalam struktur ekonomi Jawa Barat selama periode 2021–2024, terdapat empat sektor yang konsisten menyumbang lebih dari 8 persen terhadap PDRB, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran (termasuk reparasi kendaraan bermotor), pertanian-kehutanan-perikanan, serta konstruksi. Diantara sektor-sektor tersebut, industri pengolahan tetap menjadi yang paling dominan. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan sektor ini menurun dari 4,74 persen pada 2023 menjadi 3,52 persen, akibat menurunnya permintaan global, kenaikan biaya produksi karena fluktuasi harga bahan baku dan energi, serta melambatnya investasi di beberapa subsektor strategis.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Bidang Perindustrian
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,22	7,00	4,74	3,52
PDRB Industri Non Migas	Rp Triliun	921,58	1.023,40	1.009,08	1.168,54

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Pemenuhan bahan baku dalam negeri untuk industri perlu terus di dorong dalam rangka mempercepat integrasi ekonomi domestik di sektor industri. Kecepatan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan didukung oleh peran Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan

pangan nasional yang berimplikasi pada program-program strategis nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota yang mendorong peningkatan layanan irigasi, pengembangan wilayah DAS, inovasi pengairan, pengembangan dan penyebaran bibit unggul, optimasi peran pelabuhan, pengembangan garam, pengendalian alih fungsi lahan, hingga pengembangan model pertanian baru.

Pertumbuhan sektor primer yang lebih tinggi juga dapat didorong untuk meningkatkan kinerja industri pengolahan melalui upaya hilirisasi produk primer. Kinerja industri pengolahan yang lebih tinggi juga didukung oleh beroperasinya berbagai industri besar di berbagai Kawasan Industri Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan luas kawasan industri terbesar di Indonesia, yakni seluas 28.328 Ha atau setara dengan 33,7 persen dari keseluruhan kawasan industri di Indonesia dengan jumlah perusahaan sebanyak 50 perusahaan.

Kawasan-kawasan Industri tersebut tersebar di 8 kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Karawang. Lokasi kawasan tersebut saat ini telah terkoneksi dengan infrastruktur logistik seperti jalan tol yang terhubung dengan hub pelabuhan dan bandara berskala internasional. Pembangunan jalan tol Cipali-Patimban dan optimalisasi bandara BIJB akan memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi daerah dengan domestik dan global.

Gambar 2.119
Peta Sebaran Kawasan Industri di Provinsi Jawa Barat

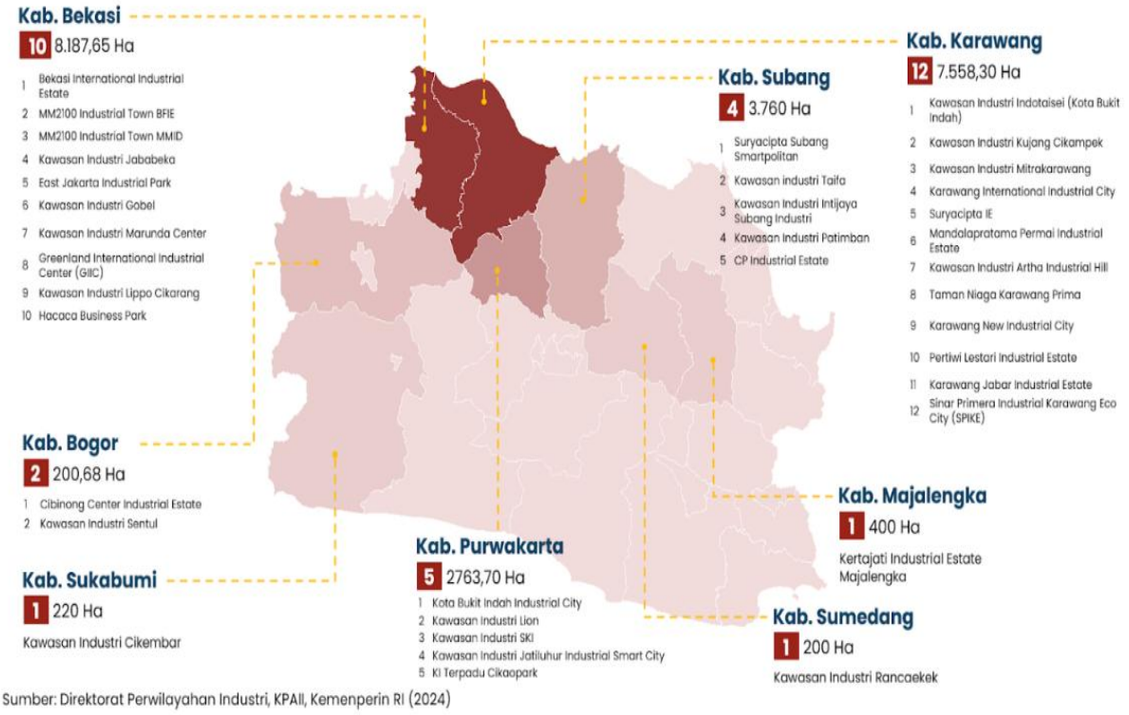

Sumber: Direktorat Perwilayahan Industri, KPAII, Kemenperin RI (2024)

Sumber : Direktorat Perwilayahan Industri, KPAII, Kemenperin RI (2024)

Secara rinci, data persebaran industri besar dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Barat, bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Data Sebaran Industri Besar dan IKM di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Kab. Bandung	704	766	940	1.177
2	Kab. Bandung Barat	246	273	330	747
3	Kab. Bekasi	2.436	2.569	2.784	2.986
4	Kab. Bogor	1.141	1.303	1.685	2.235
5	Kab. Ciamis	16	28	43	153
6	Kab. Cianjur	79	88	101	164
7	Kab. Cirebon	261	286	338	445
8	Kab. Garut	40	76	117	188
9	Kab. Indramayu	31	40	51	74
10	Kab. Karawang	668	701	762	836
11	Kab. Kuningan	20	24	46	105
12	Kab. Majalengka	65	79	127	341
13	Kab. Pangandaran	2	3	8	197
14	Kab. Purwakarta	215	263	287	333
15	Kab. Subang	109	120	138	165
16	Kab. Sukabumi	166	196	252	342
17	Kab. Sumedang	112	125	171	204
18	Kab. Tasikmalaya	15	50	78	150

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
19	Kota Bandung	618	701	907	1.190
20	Kota Banjar	37	40	45	55
21	Kota Bekasi	723	800	965	1.118
22	Kota Bogor	142	164	224	372
23	Kota Cimahi	186	207	258	353
24	Kota Cirebon	34	40	46	73
25	Kota Depok	156	198	278	451
	Jawa Barat	**8.287**	**9.215**	**11.084**	**14.620**

Sumber : Satu Data Disperindag, 2025

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam ekosistemnya, UMKM memiliki keterkaitan dan saling bersinergi dengan sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Ekonomi Kreatif. Produktivitas di sektor UMKM akan berdampak positif terhadap daya saing produk lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat bagi pembangunan ekonomi. Adapun kondisi eksisting UMKM di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
di Jawa Barat Tahun 2021-2024 (Unit)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
	Provinsi Jawa Barat	622.225	667.795	641.639	3.069.078
1	Bogor	45.013	43.138	35.524	203.221
2	Sukabumi	51.796	51.307	42.155	142.661
3	Cianjur	44.089	36.331	49.395	125.097
4	Bandung	40.136	41.220	46.614	118.127
5	Garut	62.842	69.365	41.183	184.900
6	Tasikmalaya	46.132	77.632	46.827	123.639
7	Ciamis	29.628	30.454	33.831	92.674
8	Kuningan	16.180	11.317	16.485	104.691
9	Cirebon	18.053	21.939	24.534	134.278
10	Majalengka	26.634	33.468	25.413	122.525
11	Sumedang	19.160	24.739	21.735	92.854
12	Indramayu	16.481	18.946	13.178	121.570
13	Subang	18.014	6.958	13.321	96.205
14	Purwakarta	14.504	13.486	12.415	32.217
15	Karawang	14.239	15.410	23.253	211.980
16	Bekasi	20.610	19.111	23.795	226.415
17	Bandung Barat	22.366	20.213	28.536	116.254
18	Pangandaran	12.906	32.043	25.842	70.510
19	Kota Bogor	5.669	4.620	11.509	48.489
20	Kota Sukabumi	5.392	5.787	3.505	31.972
21	Kota Bandung	22.230	18.174	38.058	253.334
22	Kota Cirebon	4.767	4.335	3.899	33.712
23	Kota Bekasi	10.824	8.971	15.156	116.714
24	Kota Depok	13.916	11.429	15.180	117.825

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
25	Kota Cimahi	6.552	6.087	8.020	55.231
26	Kota Tasikmalaya	30.306	26.706	17.234	71.602
27	Kota Banjar	3.786	4.609	5.042	20.381

Sumber : Data Th. 2021-2023 BPS, Terakhir Diperbarui : 16 Januari 2025
DataTh.2024 Dinas KUK (Data sementara)

D. Realisasi Investasi

Kondisi infrastruktur logistik yang relatif telah terintegrasi dengan pewilayahan industri, angkatan kerja berlimpah, serta pangsa pasar dan konsumsi domestik yang prospektif menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu daerah tujuan investasi asing yang menarik di wilayah Asia Tenggara. Beberapa perusahaan multi nasional secara konsisten terus menamkan investasinya untuk mengembangkan fasilitas manufaktur di Jawa Barat dan bagian dari rantai pasok industri serta pemasaran di kawasan asia tenggara dan global.

Perusahaan multinasional dari Negara Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok secara konsisten menjadi investor PMA utama di Jawa Barat. Proyek-proyek yang menjadi fokus investasi antara lain industri manufaktur otomotif, industri makanan dan minuman, informasi dan komunikasi, serta konstruksi.

Sejalan dengan membaiknya iklim investasi daerah, kinerja realisasi investasi ke Jawa Barat pasca Pandemi COVID-19 menunjukan pertumbuhan positif pada level 13 s.d. 28 persen setiap tahunnya. Nilai realisasi investasi ke Jawa Barat terus meningkat dari Rp124 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp251,1 triliun di tahun 2024 (gambar 2.119). Sebagian dari realisasi investasi tersebut menjadi sumber Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai komponen PDRB dari sisi pengeluaran.

Gambar 2.120
Kinerja PMTB dan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Barat
Tahun 2020-2024

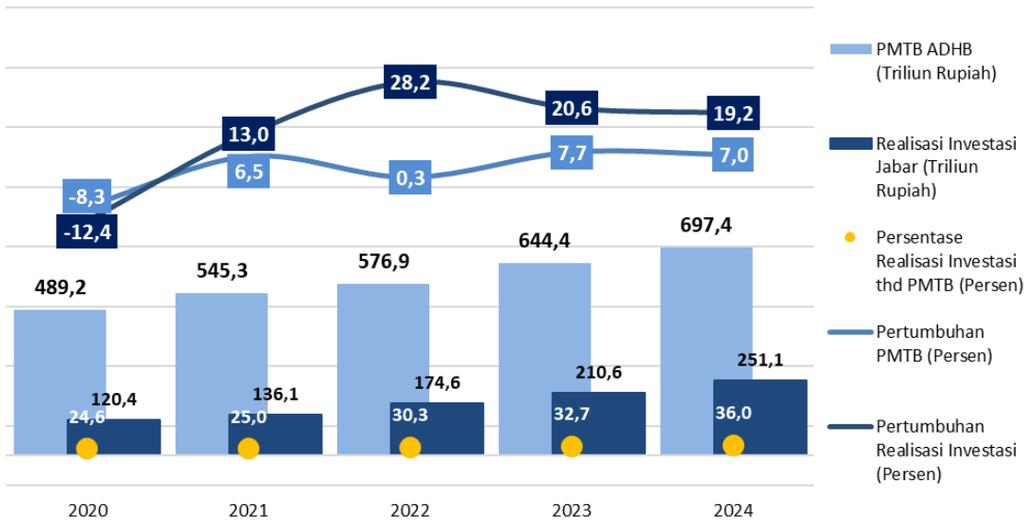

Sumber: BKPM, diolah.

Perkembangan nilai PMTB secara konsisten mengalami peningkatan seiring dengan realisasi investasi yang tumbuh positif setiap tahunnya. Kinerja pertumbuhan PMTB pasca pandemi COVID-19 berada pada rentang 6 s.d. 7 persen, di atas dari rata-rata capaian pertumbuhan ekonominya. Namun demikian, kinerja investasi dan PMTB dalam menciptakan tambahan output barang dan jasa masih belum mencapai level optimalnya. Hal tersebut diindikasikan oleh masih tingginya nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), yaitu sebesar 5,0 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa produktivitas dari investasi/PMTB dalam menghasilkan nilai produksi ekonomi masih belum berada pada level optimalnya. Untuk meningkatkan kinerja investasi yang lebih efisien dan produktif terhadap PDRB, investasi ke depan diarahkan pada sektor-sektor dengan produk bernilai tinggi yang didukung oleh perbaikan teknologi produksi serta pengembangan SDM dengan keahlian menengah-tinggi (*medium-high skill*).

Pertumbuhan realisasi investasi yang tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta pengangguran di Jawa Barat. Kinerja penyerapan berkontribusi dalam penurunan tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi PMDN di Jawa Barat terus mengalami perbaikan sejak tahun 2020 (534 orang) ke tahun 2024 (2.122 orang). Hal ini yang menunjukkan bahwa investasi PMDN cenderung padat karya dengan spesifikasi tenaga kerja yang tersedia di Jawa Barat. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi PMA masih cenderung

lebih rendah dan berfluktuasi antara 900 - 1100 tenaga kerja. Kondisi ini terjadi dikarenakan oleh karakteristik PMA yang cenderung padat modal dengan spesfikasi kompetensi tenaga kerja berkeahlian tinggi.

Gambar 2.121
Kinerja PMTB dan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Jawa Barat
Tahun 2020-2024

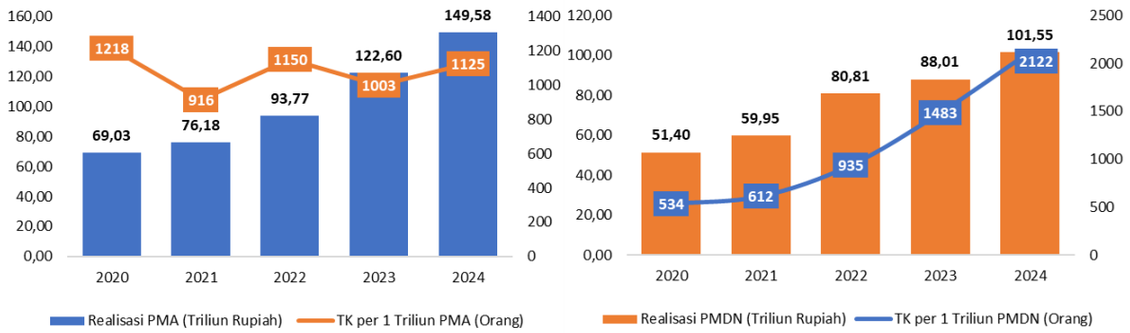

Sumber: BKPM, diolah 2025

Adapun Tingginya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat utamanya didukung oleh kematangan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor, dan Purwakarta. Realisasi investasi Jawa Barat sebesar Rp251 triliun terkonsentrasi lebih dari 60 persen di Jawa Barat bagian barat, utamanya Kabupaten Bekasi (28,6 persen), Kabupaten Karawang (27,3 persen), dan Kabupaten Bogor (9,12 persen). Investasi yang terkonsentrasi signifikan di suatu wilayah dengan porsi investasi PMA yang mencapai 59,5 persen dapat menyebabkan kondisi *enclave economy*. Kondisi tersebut ditandai dengan mekanisasi dan otomasi proses produksi, minim dampak terhadap UMKM dan IKM, tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan lebih berfokus pada penyerapan tenaga kerja terampil. Kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, ketidakmerataan wilayah investasi, serta ketimpangan wilayah semakin lebar.

Investasi yang tinggi dan terkonsentrasi di wilayah industri menyisakan investasi di kawasan Jabar Selatan. Sementara di Kawasan Rebana realisasi barumenyumbang sekitar 9,26 persen dari total investasi di Jawa Barat.

Gambar 2.122
Sebaran Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) di Tingkat Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Barat Tahun 2024

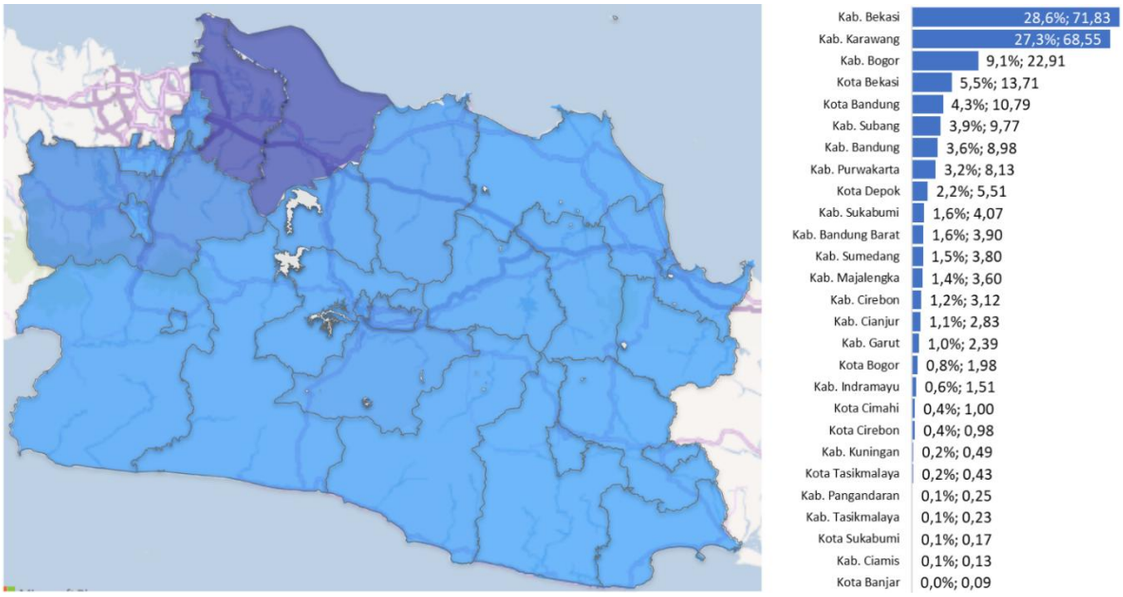

Sumber: DPMPTSP Jawa Barat, diolah.

Dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen di tahun 2029, realisasi investasi di Jawa Barat perlu didorong tumbuh lebih terakselerasi dan ekspansif.

Total Realisasi investasi ditargetkan meningkat dari Rp279 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp423 triliun pada tahun 2029. Sejalan dengan hal tersebut, PMTB (ADHB) juga meningkat dari Rp740 triliun menjadi Rp1.084 triliun, dengan laju pertumbuhan yang menguat dari 5,34 persen menjadi 9,74 persen dalam periode yang sama. Kenaikan ini menandakan bahwa kapasitas produksi dan infrastruktur ekonomi Jawa Barat terus bertumbuh secara signifikan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dari investasi juga mengalami peningkatan dari 440 ribu orang pada 2025 menjadi 668 ribu orang pada 2029, yang menunjukkan kontribusi nyata investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Gambar 2.123
Proyeksi Kinerja PMTB, Realisasi Investasi (PMA dan PMDN), dan Serapan Tenaga Kerja Jawa Barat Tahun 2025-2029

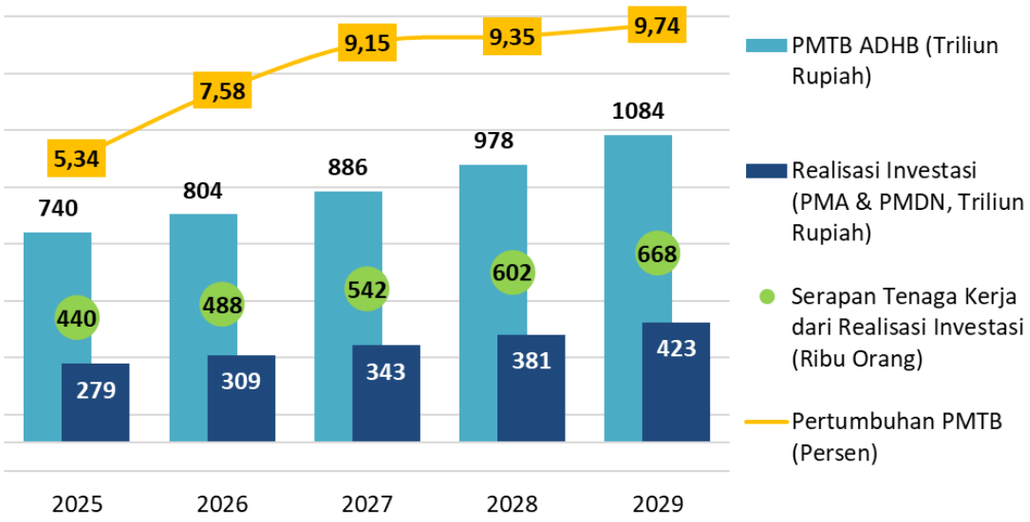

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Lebih jauh, arah kebijakan investasi yang inklusif memiliki potensi besar dalam menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan disparitas pembangunan antardaerah. Investasi yang tersebar merata ke berbagai wilayah di Jawa Barat akan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan perkotaan utama, sehingga mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selain itu, masuknya investasi padat karya, khususnya di sektor manufaktur dan agribisnis, dapat memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat berpendidikan menengah, termasuk lulusan SMK dan SMA yang ditahun 2024 masih mendominasi kelompok pengangguran terbuka.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kawasan perkotaan dan perdesaan yang membentuk satu sistem saling melengkapi. Untuk mendukung hubungan ini, ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai sangat diperlukan, yang diukur melalui Indeks Kualitas Infrastruktur. Pada tahun 2024, indeks kualitas infrastruktur Provinsi Jawa Barat 2024 mencapai angka 76,06 persen, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 75,91 persen. Hal ini menunjukkan secara umum kinerja pembangunan serta layanan

infrastruktur di Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik serta menunjukkan kemajuan yang cukup progresif pada tahun 2024. Perkembangan capaian Indeks Kualitas Infrastruktur dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.124
Capaian Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)
Tahun 2021-2024

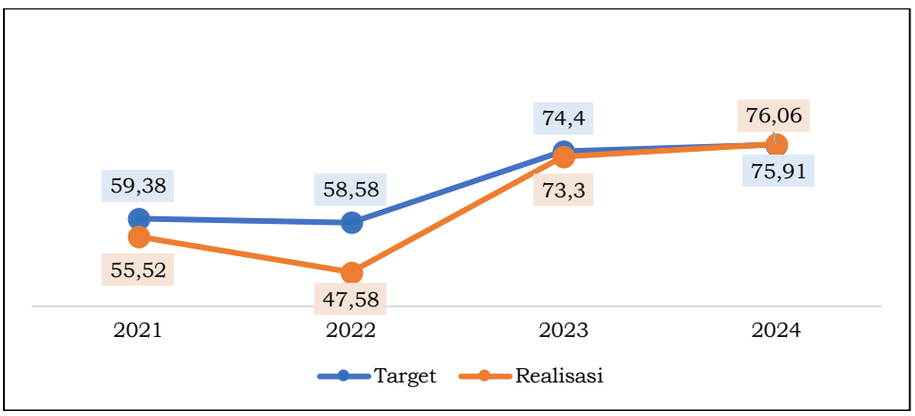

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 2.48
Target dan Capaian Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI)
Tahun 2024

Sektor	Ruang Lingkup (Indikator)	2024			
		Target Indikator	Realisasi Indikator	Target Komposit	Realisasi Komposit
Jalan & Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	90,50%	90,22%	22,63%	22,56%
Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	56,60%	57,04%	15,26%	15,41%
	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung	0,265%	0,437%		
Perumahan & Permukiman	Akses Terhadap Air Minum Layak	98,37%	99,27%	23,03%	22,81%
	Askes Terhadap Sanitasi Layak	86,79%	86,89%		
	Akses Penanganan Sampah Perkotaan	76,00%	70,77%		
	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	56,00%	56,25%		
Energi/ Kelistrikan	Konsumsi Listrik Perkapita	100,00%	101,88%	15,00%	15,28%
NILAI INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR				**75,91%**	**76,06%**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Realisasi indikator tingkat kemantapan jalan menunjukkan angka 90,22 persen, sedikit berada di bawah target yaitu 90,50 persen. Ketidak tercapainya target indikator tingkat kemantapan jalan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kejadian bencana alam gempa bumi dan tanah longsor di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi pada akhir tahun 2024. Ruas jalan yang terdampak yaitu Ruas Jalan Sukanagara – Sindangbarang sepanjang 1.2 km, Ruas Jalan Bts.Kab.Bandung/Cianjur - Kebon Muncang – Cikadu sepanjang 0.2km, Ruas Jalan Sukabumi (Baros) – Sagaranten sepanjang 4.2 km, Sagaranten – Tegalbuleud sepanjang 0.2 km, Jampang Tengah – Kiara Dua sepanjang 1.00 km, SP.Karanghawu – Cikotok sepanjang 0.4 km dan Ruang Jalan Loji – Puncak Darma sepanjang 0.40 km.

Meskipun demikian, secara umum jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat telah berhasil menghubungkan titik-titik pusat kegiatan utama, termasuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Ketersambungan ini mencerminkan peran strategis infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah provinsi. Namun demikian, meskipun konektivitas antar pusat kegiatan tersebut telah terbentuk, dari sisi kondisi fisik jalan, masih terdapat sejumlah ruas yang belum berada dalam kondisi mantap. Ketimpangan kualitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan efisiensi dan keselamatan transportasi, sehingga perlu mendapat perhatian melalui program pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, total panjang jaringan jalan di provinsi ini mencapai 57.318,94 km, mencakup jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga jalan desa yang tersebar dari kawasan perkotaan hingga perdesaan.

Tabel 2.49
Panjang Ruas Jalan berdasarkan Kewenangan Pengelolaan

No	Kewenangan Pengelolaan	Panjang Ruas (km)	Kondisi Kemantapan (%)
1.	Jalan Nasional	1.780,88	97,97 (2023)
2.	Jalan Provinsi	2.362,183	86,44 (2024)
3.	Jalan Kabupaten/Kota	25.244,00	83,48 (2024)

No	Kewenangan Pengelolaan	Panjang Ruas (km)	Kondisi Kemantapan (%)
4.	Jalan Desa	27.932,75	65,46 (2024)

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dalam lingkup administrasi Provinsi Jawa Barat, ruas jalan nasional memiliki panjang total 1.780,00 km, dengan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2023 mencapai 97,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ruas jalan nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi yang relatif sangat baik, sebagaimana dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Kondisi Jalan Nasional

No	Provinsi Jawa Barat	Ruas Jalan Kewenangan Nasional					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Provinsi Jawa Barat	97,97	1782,65	630,1	1116,47	36,02	0

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Selain itu, dalam konteks jalan nasional, Provinsi Jawa Barat juga memiliki jaringan jalan tol yang luas dan strategis, memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Hingga tahun 2025, Total panjang jalan tol yang beroperasi di Jawa Barat mencapai lebih dari 570 km, mencakup berbagai koridor strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah, efisiensi logistik, dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.51
Kondisi Jalan Tol yang Beroperasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Nama Ruas Tol Beroperasi	Panjang (km)	Wilayah yang Dihubungkan	Keterangan
1.	Cikopo–Palimanan (Cipali)	116,7	Cikopo (Purwakarta) – Palimanan (Cirebon)	Bagian dari Tol Trans-Jawa; menghubungkan Jakarta dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2.	Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang)	58,5	Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Bandung Barat)	Menghubungkan Jakarta dengan Bandung melalui jalur selatan.

No	Nama Ruas Tol Beroperasi	Panjang (km)	Wilayah yang Dihubungkan	Keterangan
3.	Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu)	60,3	Cileunyi – Sumedang – Kertajati (Majalengka)	Terowongan kembar pertama di Indonesia; akses ke Bandara Internasional Kertajati.
4.	Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi)	53,6	Ciawi (Bogor) – Sukabumi	Meningkatkan aksesibilitas ke wilayah selatan Jawa Barat.
5.	Soreang–Pasir Koja (Soroja)	10,6	Soreang – Pasir Koja (Bandung)	Menghubungkan ibu kota Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung.
6.	Cimanggis–Cibitung (Cimaci)	26	Cimanggis – Cibitung	Bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2; mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek.
7.	Jakarta–Cikampek (Japek)	83	Jakarta – Cikampek	Jalur utama penghubung Jakarta dengan wilayah timur Jawa Barat dan Jawa Tengah.
8.	Padalarang–Cileunyi (Padaleunyi)	64,4	Padalarang – Cileunyi (Bandung)	Menghubungkan wilayah barat dan timur Bandung.
9.	Palimanan–Kanci	26,3	Palimanan – Kanci (Cirebon)	Bagian dari Tol Trans-Jawa; melanjutkan konektivitas dari Cipali ke arah timur.
10.	Kanci–Pejagan	35	Kanci (Cirebon) – Pejagan (Brebes)	Menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah bagian utara.

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Dalam konteks jalan kewenangan provinsi, saat ini jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ini memiliki panjang 2.362,183 km, dengan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2024 mencapai 86,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi yang relatif cukup baik, namun masih menyisakan sejumlah ruas yang perlu penanganan baik itu rekonstuksi maupun pemeliharaan berkala. Dari segi pemerataan, ruas jalan provinsi di wilayah Jawa Barat bagian selatan masih cenderung memerlukan penanganan jika dibandingkan dengan wilayah tengah maupun utara.

Tabel 2.52
Kondisi Jalan Provinsi berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Provinsi					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Bogor	88,44	131,97	85,67	31,04	9,54	5,70
2	Kabupaten Sukabumi	78,93	309,99	111,32	133,34	42,80	27,09
3	Kabupaten Cianjur	75,04	186,25	90,61	49,14	13,50	33,00
4	Kabupaten Tasikmalaya	91,32	129,06	58,04	59,82	11,10	0,10
4	Kabupaten Bandung	93,81	127,37	60,04	59,44	7,89	0,00
5	Kabupaten Garut	87,73	286,03	143,79	107,15	31,89	3,20
7	Kabupaten Ciamis	81,84	28,63	13,23	10,20	5,20	0,00
8	Kabupaten Kuningan	74,63	86,33	28,75	35,68	17,00	4,90
9	Kabupaten Cirebon	96,75	72,37	42,57	27,45	2,35	0,00
10	Kabupaten Majalengka	95,78	126,84	68,77	52,72	3,75	1,60
11	Kabupaten Sumedang	87,46	115,63	61,80	39,33	11,10	3,40
12	Kabupaten Indramayu	84,09	157,62	49,26	83,29	17,97	7,10
13	Kabupaten Subang	86,74	167,86	108,27	37,33	21,84	0,40
14	Kabupaten Purwakarta	87,86	58,81	29,83	21,84	7,14	0,00
15	Kabupaten Karawang	77,14	91,53	58,13	12,48	13,62	7,30
16	Kabupaten Bekasi	99,37	31,74	22,00	9,54	0,20	0,00
17	Kabupaten Bandung Barat	96,04	73,17	56,30	13,97	2,90	0,00
18	Kabupaten Pangandaran	94,38	8,89	1,50	6,89	0,50	0,00
19	Kota Bogor	100,00	12,20	10,20	1,99	0,00	0,00
20	Kota Sukabumi	86,33	37,74	18,51	14,07	0,50	0,10
21	Kota Bandung	97,05	39,27	12,89	25,22	1,06	0,10
22	Kota Cirebon	100,00	6,55	5,17	1,38	0,00	0,00
23	Kota Bekasi	90,80	21,75	16,85	2,90	2,00	0,00
24	Kota Depok	100,00	11,73	10,86	0,87	0,00	0,00
25	Kota Cimahi	100,00	9,36	6,01	3,35	0,00	0,00
26	Kota Tasikmalaya	91,02	24,55	13,85	8,50	2,21	0,00
27	Kota Banjar	97,77	8,97	3,57	5,20	0,20	0,00
	Provinsi Jawa Barat	**86,44**	**2.362,183**	**1.187,78**	**854,12**	**226,26**	**93,98**

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Untuk jalan kewenangan kabupaten/kota, saat ini jalan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ini memiliki total panjang mencapai 25.244,00 km, dengan tingkat kemantapan 83,48 persen pada tahun 2024. Pada beberapa kabupaten seperti Sukabumi, Cianjur dan

Tasikmalaya, masih terdapat cukup banyak ruas jalan yang memiliki kondisi rusak berat.

Tabel 2.53
Kondisi Jalan Kabupaten/Kota berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Bogor	86,61	1.763,69	1.234,29	293,30	102,17	133,93
2	Kabupaten Sukabumi	60,58	1.424,36	572,16	290,67	54,05	507,48
3	Kabupaten Cianjur	75,06	1.335,22	789,93	212,27	53,55	279,48
4	Kabupaten Tasikmalaya	67,36	1.230,47	699,00	129,90	104,67	296,90
4	Kabupaten Bandung	83,09	1.428,37	942,50	244,31	101,66	139,90
5	Kabupaten Garut	93,55	829,00	569,83	205,66	6,50	47,01
7	Kabupaten Ciamis	90,12	1.098,13	805,67	183,96	63,18	45,32
8	Kabupaten Kuningan	82,35	771,57	463,62	171,78	35,31	100,86
9	Kabupaten Cirebon	84,91	1.240,31	758,68	294,42	91,32	95,89
10	Kabupaten Majalengka	86,65	915,02	445,86	346,97	89,56	32,64
11	Kabupaten Sumedang	87,54	811,32	577,01	133,19	29,46	71,66
12	Kabupaten Indramayu	88,12	827,42	528,92	200,22	56,37	41,92
13	Kabupaten Subang	79,57	1.163,78	801,15	124,84	44,07	193,72
14	Kabupaten Purwakarta	81,49	728,92	429,27	164,74	80,37	54,55
15	Kabupaten Karawang	82,15	1.798,07	1.300,20	176,92	53,69	267,26
16	Kabupaten Bekasi	70,34	1.077,39	482,31	275,51	102,86	216,71
17	Kabupaten Bandung Barat	75,90	648,06	374,33	117,54	47,52	108,67
18	Kabupaten Pangandaran	80,35	632,54	468,60	39,63	51,10	73,21
19	Kota Bogor	90,03	207,98	53,75	133,49	20,74	-
20	Kota Sukabumi	60,58	1.424,36	572,16	290,67	54,05	507,48
21	Kota Bandung	97,92	647,47	591,42	42,61	9,25	4,19
22	Kota Cirebon	94,34	159,17	135,76	14,41	2,09	6,92
23	Kota Bekasi	98,62	303,96	290,55	9,21	0,92	3,29
24	Kota Depok	89,46	1.957,93	1.396,36	355,30	128,13	78,14
25	Kota Cimahi	98,43	105,19	84,57	18,97	1,66	-
26	Kota Tasikmalaya	91,52	461,21	397,59	24,49	22,64	16,50
27	Kota Banjar	77,46	253,09	134,40	61,65	31,98	25,06

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi Jawa Barat		**83,48**	**25.244,00**	**15.899,89**	**4.556,61**	**1.438,85**	**3.348,66**

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Tingkat kemantapan jalan desa pada tahun 2024 baru sebesar 65,46%. Angka ini menunjukkan bahwa banyak ruas jalan desa masih dalam kondisi rusak, baik ringan maupun berat, dan sebagian besar masih berupa jalan tanah yang belum dilapisi perkerasan khususnya pada kawasan rebana (Cirebon, Patimban, kertajati) dan Jawa Barat bagian Selatan.

Tabel 2.54
Kondisi Jalan Desa berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Desa					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Bogor	83,01	1.891,45	1.407,11	163,06	139,67	181,60
2	Kabupaten Sukabumi	46,82	2.902,06	968,10	390,52	491,92	1.051,52
3	Kabupaten Cianjur	59,10	2.376,48	1.098,38	306,11	368,01	603,98
4	Kabupaten Tasikmalaya	57,24	2.485,00	1.038,59	383,78	487,58	575,05
4	Kabupaten Bandung	71,11	918,19	550,94	102,00	98,77	166,47
5	Kabupaten Garut	54,61	2.443,42	987,51	346,82	430,19	678,91
7	Kabupaten Ciamis	58,24	2.390,31	1.115,20	276,93	358,80	639,38
8	Kabupaten Kuningan	76,43	1.464,66	964,45	155,00	135,33	209,88
9	Kabupaten Cirebon	67,77	1.104,77	623,65	125,05	141,26	214,81
10	Kabupaten Majalengka	69,43	1.079,85	622,67	127,11	129,16	200,92
11	Kabupaten Sumedang	55,31	1.693,52	748,77	187,86	223,78	533,11
12	Kabupaten Indramayu	67,12	1.300,62	774,15	98,76	133,03	294,68
13	Kabupaten Subang	75,67	1.075,07	735,45	78,10	91,88	169,65
14	Kabupaten Purwakarta	64,19	438,43	230,67	50,75	68,76	88,25
15	Kabupaten Karawang	89,85	1.427,33	1.236,59	45,80	45,35	99,58
16	Kabupaten Bekasi	77,04	602,23	411,78	52,20	56,53	81,72
17	Kabupaten Bandung Barat	45,78	1.440,97	499,79	159,84	228,69	552,65
18	Kabupaten Pangandaran	54,57	757,68	328,12	85,34	119,74	224,49
19	Kota Bogor	-	-	-	-	-	-
20	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-	-
21	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-

No	Kab/Kota	Ruas Jalan Kewenangan Desa					
		Kemantapan (%)	Panjang Jalan	Kondisi Jalan			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	
23	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-
24	Kota Depok	-	-	-	-	-	-
25	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-
26	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	
27	Kota Banjar	70,39	140,72	87,64	11,41	27,17	14,51
Provinsi Jawa Barat		**65,46**	**27.932,75**	**14.429,54**	**3.146,44**	**3.775,63**	**6.581,15**

Sumber: BPS (2025) dan Hasil Perhitungan (2025)

Gambar 2.125
Peta Jaringan Jalan Eksisting Provinsi Jawa Barat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Capaian indikator disektor perumahan dan kawasan permukiman terus mengalami peningkatan, menandakan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan lingkungan permukiman yang lebih tertata. Perwujudan permukiman yang lebih tertata juga dapat dilihat dari penanganan kawasan kumuh. Penetapan kawasan kumuh di level nasional ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR dan pada level provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui SK Kepala Daerah. Secara total terdapat 8.658,97 hektar kawasan kumuh di Provinsi Jawa Barat yang merupakan penggabungan dari kewenangan pemerintah pusat (3.127,40 hektar), pemerintah provinsi (963,57 hektar), dan pemerintah kab/kota (4.568 hektar). Penanganan kawasan kumuh secara kolaboratif (pemerintah pusat, provinsi, dan kab-kota) dari tahun 2020 – 2023 mencapai 2.319 hektar, sehingga sampai tahun 2023 kawasan kumuh secara total di Provinsi Jawa Barat masih tersisa seluas 6.340,05 hektar dengan rincian sebagai berikut:

- proporsi pemerintah pusat masih tersisa 2.080,17 hektar;
- proporsi pemerintah provinsi masih tersisa 787,19 hektar; dan
- proporsi pemerintah kab/kota masih tersisa 3.472,68 hektar.

Penangan kawasan kumuh tersebut juga merupakan bagian dari pencapaian penanganan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang Data dari salah satu indikator kunci, yaitu Persentase Rumah Tangga Hunian Layak mengalami peningkatan dari 52,28 persen pada tahun 2020 menjadi 56,25 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.126
Capaian Persentase Rumah Tangga Hunian Layak
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

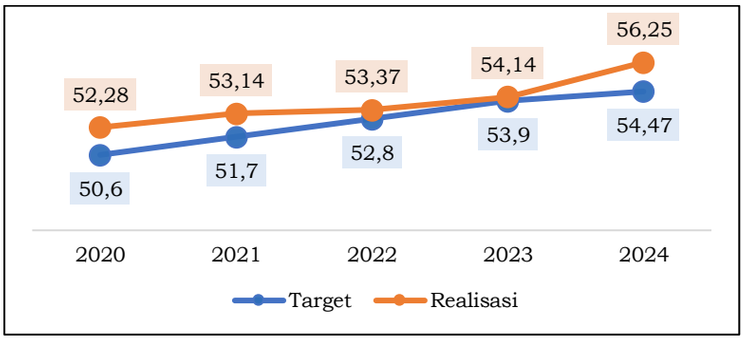

Sumber : BPS, 2025

Belum semua rumah tangga memiliki rumah sendiri (ada *backlog* kepemilikan rumah) serta masih terdapat rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni (Tabel 2.55). Angka pada tabel tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan kepemilikan hunian bagi masyarakat serta masih adanya penduduk yang hidup dalam kondisi hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan, hal ini berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.55
Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri (RT)	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah (RT)	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni (RT)	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni (RT)
		(2023)	(2023)	(2024)	(2024)	(2024)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(8)
1	Kab. Bogor	1.400.324	1.401.318	1.222.230	179.088	654.416	746.902
2	Kab. Sukabumi	949.015	765.722	698.338	67.384	251.387	514.335
3	Kab. Cianjur	827.627	697.418	635.836	61.582	267.041	430.377
4	Kab. Bandung	1.039.634	966.456	774.614	191.842	523.433	443.023
5	Kab. Garut	789.962	660.627	605.729	54.898	228.643	431.984
6	Kab. Tasikmalaya	579.826	536.222	498.686	37.536	201.727	334.495
7	Kab. Ciamis	343.286	373.505	343.923	29.582	251.070	122.435
8	Kab. Kuningan	291.978	309.121	280.342	28.779	239.723	69.398
9	Kab. Cirebon	776.436	616.780	477.079	139.701	495.829	120.951
10	Kab. Majalengka	373.386	396.620	353.349	43.271	298.893	97.727
11	Kab. Sumedang	388.442	349.178	316.739	32.439	240.933	108.245
12	Kab. Indramayu	539.503	550.023	456.079	93.944	471.810	78.213
13	Kab. Subang	482.999	465.100	442.124	22.976	387.289	77.811
14	Kab. Purwakarta	280.213	273.667	250.323	23.344	182.016	91.651
15	Kab. Karawang	608.755	678.799	615.942	62.857	481.812	196.987
16	Kab. Bekasi	828.608	881.763	739.623	142.140	562.565	319.198
17	Kab. Bandung Barat	407.309	492.600	421.074	71.526	191.474	301.126
18	Kab. Pangandaran	133.739	129.818	123.574	6.244	80.370	49.448
19	Kota Bogor	242.443	264.578	184.596	79.982	131.045	133.533
20	Kota Sukabumi	103.303	92.116	66.324	25.792	33.438	58.678

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri (RT)	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah (RT)	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni (RT)	Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni (RT)
		(2023)	(2023)	(2024)	(2024)	(2024)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(8)
21	Kota Bandung	519.288	659.343	372.067	287.276	276.726	382.617
22	Kota Cirebon	80.217	88.403	54.748	33.655	65.692	22.711
23	Kota Bekasi	748.157	670.981	487.870	183.111	441.640	229.341
24	Kota Depok	457.256	547.091	402.002	145.089	270.208	276.883
25	Kota Cimahi	121.495	155.678	93.547	62.131	85.405	70.273
26	Kota Tasikmalaya	204.791	192.461	158.472	33.989	86.627	105.834
27	Kota Banjar	51.885	57.906	52.799	5.107	48.357	9.549
	Provinsi Jawa Barat	**13.569.877**	**13.273.294**	**11.075.237**	**2.198.057**	**7.466.228**	**5.807.066**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Sebanyak 309.909 unit rumah berada di kawasan rawan bencana gunung api (sekitar lereng gunung aktif), kawasan rawan gempa bumi (tersebar 27 kabupaten/kota) dan di kawasan potensi gelombang ekstrim dan abrasi pantai (wilayah pesisir utara dan selatan Jawa Barat), serta di kawasan rawan tsunami (pantai selatan). Secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.127.

Gambar 2.127
Jumlah Rumah Pada Kawasan Rawan Bencana
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

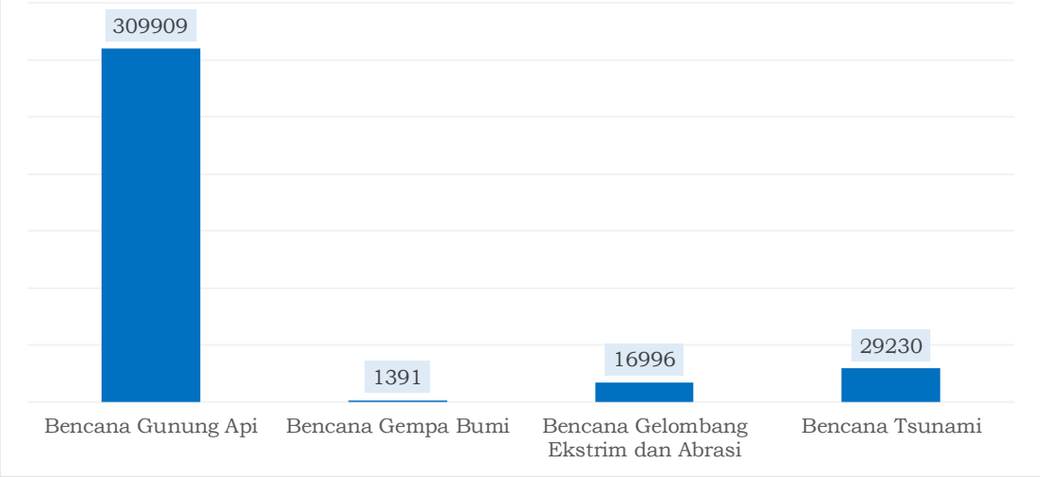

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (2025)

Selain Kawasan Perkotaan, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat memiliki peranan penting dalam Ketahanan Ekonomi wilayah, Ketahanan Pangan, Ketahanan Sosial dan Budaya serta Ketahanan Ekologi dan Lingkungan. Transformasi Pembangunan Desa dan kawasan perdesaan mengalami pergeseran yang menempatkan Desa sebagai penguatan kapasitas lokal dengan model yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pengintegrasian teknologi digital dalam pengelolaan desa dan inovasi sosial sebagai fokus utama. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan telah menjadi fokus penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial-ekonomi serta keberlanjutan lingkungan. Dalam mengukur Perkembangan Pembangunan Desa, indikator Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi alat ukur yang digunakan dalam menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa dalam pembangunan. Tujuan utama perhitungan IDM adalah untuk

mendorong pembangunan desa yang terarah, terukur dan berkelanjutan yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Namun pada tahun 2025, Pemerintah mengeluarkan indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa yaitu Indeks Desa (ID) sebagai pengembangan dari IDM yang digunakan pada RPJPN 2025-2045. ID dihitung berdasarkan 6 (enam) dimensi yaitu dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola.

Gambar 2.128
Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2024

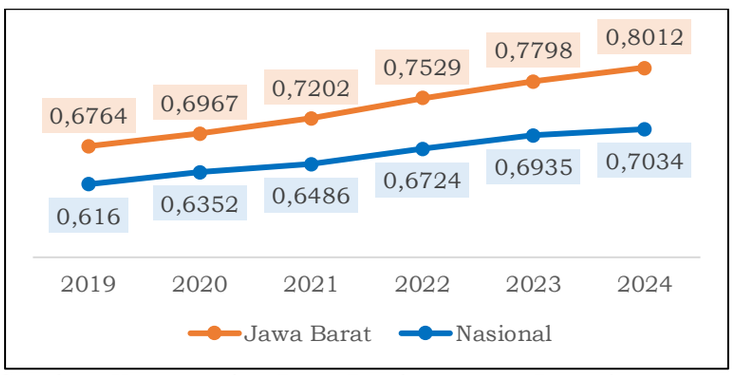

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2025 (diolah)

Gambar 2.129
Perbandingan IDM Pulau Jawa dan Bali Tahun 2024

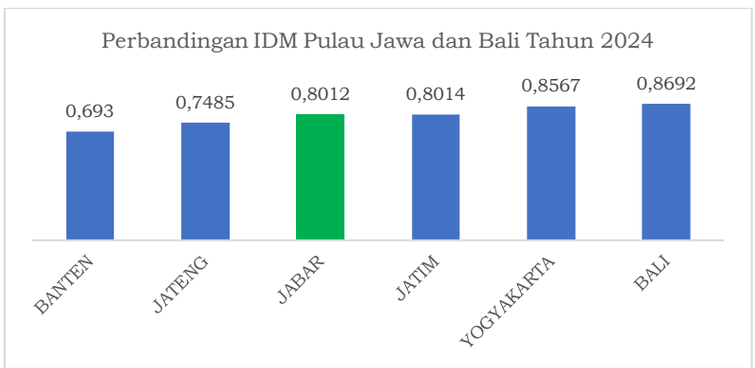

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2025 (diolah)

Perkembangan Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2019-2020, IDM Provinsi Jawa Barat berada pada status berkembang, tetapi tahun pada 2021 sudah mengalami kenaikan status

menjadi maju. Jika dilihat dari nilai IDM, Provinsi Jawa Barat selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, nilai IDM Provinsi Jawa Barat meningkat dari tahun sebelumnya dari 0,7798 menjadi 0,8692 dan nilai tersebut melampaui rata-rata nilai IDM nasional. Secara keseluruhan pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat keenam nasional dengan status maju.

Capaian IDM Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019-2024 mengalami kenaikan yang signifikan dari kategori berkembang menjadi kategori maju. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi dengan jumlah desa terbesar memiliki tantangan untuk meningkatkan status IDM menjadi Kategori Maju. Hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan dari ketiga indeks komposit IDM, pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat memiliki nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Sosial yaitu sebesar 0,8577, nilai Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,8006, dan nilai terendah pada Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu sebesar 0,7456. Hal ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah maupun *stakeholders* dalam membangun desa untuk dapat meningkatkan pada pengembangan aspek ekonomi.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi COVID-19 menunjukkan tren pemulihan menuju kondisi normal yang didukung oleh membaiknya mobilitas dan konsumsi masyarakat, serta mulai kembalinya aktivitas pada lapangan usaha strategis. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi pasca pandemi masih dihadapkan pada berbagai tantangan global, terutama akibat dinamika geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang memberikan tekanan terhadap rantai pasok global. Dinamika tersebut merambat ke perekonomian Jawa Barat melalui jalur perdagangan, harga komoditas, dan keuangan. Selain tensi geopolitik, perubahan iklim juga menjadi tantangan tersendiri pada upaya peningkatan produksi sektor-sektor primer, terutama pada komoditas tanaman pangan.

Gambar 2.130
Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (yoy) Jawa Barat
Tahun 2019-2024

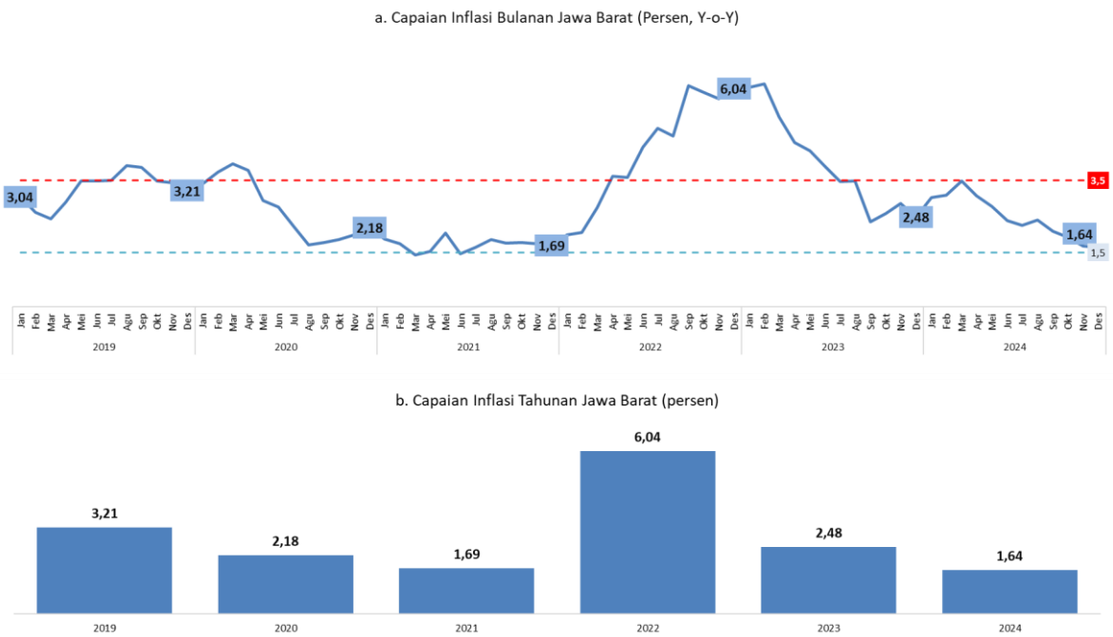

Sumber: Badan Pusat Statisik, diolah, 2025

Salah satu indikator penting dalam mengukur dampak dari dinamika tersebut adalah inflasi.Penyebab inflasi dibagi menjadi *cost push inflation* dan *demand pull inflation*. Peningkatan tensi geopolitik di timur tengah dapat menyebabkan peningkatan inflasi di dalam negeri, utamanya pada komoditas minyak dunia dan peningkatan biaya logistik perdagangan internasional. Peningkatan harga minyak dunia tersebut diredam melalui pengaturan pada instrumen-instrumen *administered price*, sehingga harga bahan bakar di dalam negeri dapat terkendali.

Kinerja inflasi Jawa Barat dalam lima tahun terakhir relatif terjaga, meskipun tetap menghadapi fluktuasi akibat tekanan internal maupun eksternal. Faktor internal seperti dinamika permintaan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), keterbatasan pasokan pangan, dan pola distribusi mempengaruhi pergerakan inflasi di tingkat daerah. Sementara itu, faktor eksternal seperti kenaikan harga energi, komoditas impor, serta gejolak nilai tukar juga memberi tekanan tambahan. Komoditas pangan strategis—misalnya beras, cabai, dan daging ayam—seringkali menjadi penyumbang utama inflasi, terutama ketika terjadi gangguan produksi atau distribusi. Dalam menghadapi dinamika tersebut, tata kelola pengendalian inflasi melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi instrumen penting. Upaya sinergi pemerintah daerah dengan

pemerintah pusat, BI, dan stakeholder lainnya diarahkan untuk menjaga pasokan, memperlancar distribusi, serta menekan gejolak harga agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Inflasi yang relatif rendah pada tahun 2024 walaupun masih dalam batas terkendali namun hal tersebut mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat yang menurunkan sisi *demand pull inflation*. Merespon fenomena pelemahan daya beli tersebut, pengendalian inflasi harus diarahkan juga untuk mendorong daya beli masyarakat melalui aspek yang lebih fundamental, yaitu penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, pemberian subsidi yang tepat sasaran dan berfokus pada sektor produktif, serta subsidi layanan publik.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten dan terstruktur. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren positif yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam manajemen pemerintahan, pelayanan publik, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperlihatkan hasil yang signifikan, tercatat pada tahun 2023 memperoleh nilai 93,08 dan meningkat 5,93 poin menjadi 99,01 di Tahun 2024. Capaian ini juga diikuti oleh peningkatan rata-rata capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tercatat pada tahun 2023 sebesar 75,61 poin dan meningkat 8,41 poin 84,02 poin di Tahun 2024. Capaian kabupaten/kota ini jauh melampaui target minimal capaian Indeks Reformasi Birokrasi secara Nasional yaitu minimal sebesar 60,01 poin sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Laporan Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Instansi	2020	2021	2022	2023	2024	Predikat 2024
1	Kabupaten Bandung	64,33	63,25	63,32	83,67	87,37	A-
2	Kabupaten Bandung Barat	57,60	57,81	60,97	72,27	80,77	A-
3	Kabupaten Bekasi	59,66	58,33	59,83	72,96	83,78	A-
4	Kabupaten Bogor	67,03	67,97	67,76	78,02	86,15	A-
5	Kabupaten Ciamis	57,47	59,26	63,59	77,05	82,37	A-
6	Kabupaten Cianjur	59,65	60,25	62,39	64,86	84,85	A-
7	Kabupaten Cirebon	56,18	56,81	56,95	67,83	81,14	A-
8	Kabupaten Garut	66,25	66,65	68,89	68,50	86,53	A-
9	Kabupaten Indramayu	57,99	58,7	59,84	68,73	81,23	A-
10	Kabupaten Karawang	62,20	60,16	63,36	81,50	84,09	A-
11	Kabupaten Kuningan	53,03	54,75	56,78	68,22	75,02	BB
12	Kabupaten Majalengka	53,88	56,84	58,46	73,52	82,41	A-
13	Kabupaten Pangandaran	52,06	53,64	56,48	73,72	76,46	BB
14	Kabupaten Purwakarta	60,06	61,41	62,42	74,10	84,95	A-
15	Kabupaten Subang	57,20	58,33	58,03	70,86	79,08	BB
16	Kabupaten Sukabumi	61,11	62,45	63	78,08	85,94	A-
17	Kabupaten Sumedang	66,74	68,75	71,82	81,98	89,65	A-
18	Kabupaten Tasikmalaya	54,05	53,86	58,95	71,22	78,47	BB
19	Kota Bandung	71,75	72,66	75,18	83,58	88,02	A-
20	Kota Banjar	55,93	57,07	58,76	80,74	85,71	A-
21	Kota Bekasi	66,65	64,75	66,32	78,94	83,46	A-
22	Kota Bogor	67,01	67,67	70,76	80,97	90,36	A-
23	Kota Cimahi	59,22	60,01	62,96	81,26	86,29	A-
24	Kota Cirebon	62,84	63,53	66,57	73,91	85,14	A-
25	Kota Depok	62,90	63,13	64,78	82,14	87,11	A-
26	Kota Sukabumi	68,25	67,91	71,05	74,78	87,10	A-
27	Kota Tasikmalaya	57,58	60,04	61,7	78,14	85,16	A-
28	Provinsi Jawa Barat	75,63	76,68	80,7	93,08	99,01	A-
	RATA-RATA	**61,22**	**61,88**	**63,99**	**76,24**	**84,56**	**A-**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Capaian ini menandakan bahwa reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi telah bertransformasi dari sekadar pemenuhan administratif menjadi perubahan sistemis yang menyentuh aspek kinerja, kualitas layanan, serta budaya kerja ASN. Strategi reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan inovatif, antara lain integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), digitalisasi pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, penerapan merit sistem dalam manajemen ASN, serta pembudayaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Secara khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga

telah mengembangkan sejumlah program unggulan seperti Jabar *Digital Service*, SAPA Warga, LAPOR Jabar, dan Jabar *Command Center*, yang mampu meningkatkan partisipasi publik dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Peningkatan indeks ini juga menunjukkan keberhasilan dalam mengelola perubahan kelembagaan, di mana unit-unit organisasi di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja reformasi yang semakin matang, termasuk dalam perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, penguatan pengawasan internal, serta manajemen perubahan berbasis *roadmap* RB yang terintegrasi. Penilaian Indeks RB ini tidak hanya mengukur kepatuhan prosedural, tetapi juga sejauh mana reformasi mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, capaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi bukti nyata bahwa birokrasi yang adaptif, transparan, dan melayani adalah keniscayaan yang bisa diwujudkan dengan kepemimpinan yang visioner, sinergi lintas sektor, serta komitmen kuat dari seluruh ASN.

Selain capaian di tingkat provinsi, kemajuan reformasi birokrasi juga mulai merata di tingkat kabupaten dan kota seluruh Jawa Barat, meskipun masih menunjukkan disparitas capaian antarwilayah. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, hingga tahun 2023 terdapat 6 daerah yang memperoleh predikat "A – Sangat Baik", antara lain Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Sementara itu, 18 kabupaten/kota lainnya berada pada kategori "BB – Baik", dan sisanya masih berada pada level "B – Cukup Baik", menandakan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan dalam pemerataan kualitas reformasi birokrasi masih cukup besar. Kabupaten Sumedang menjadi contoh terbaik dalam penerapan RB di tingkat daerah, terutama melalui pemanfaatan teknologi dalam layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *Command Center* yang sudah menjadi rujukan nasional. Keberhasilan reformasi birokrasi di daerah-daerah ini tidak lepas dari peran kepemimpinan kepala daerah yang kuat, komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan peta jalan reformasi, serta penguatan kapasitas SDM aparatur.

Namun demikian secara kategori masih terdapat 4 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai dibawah 80,01 poin atau baru mencapai kategori BB

yaitu Kabupaten Subang 79,08 poin, Kabupaten Tasikmalaya 78,47 poin, Kabupaten Pangandaran 76,46 poin dan Kabupaten Kuningan 75,02 poin. Sehingga diharapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat minimal memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi 80,01 poin. Untuk itu diperlukan penguatan advokasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota oleh seluruh perangkat daerah provinsi pengampu komponen indikator reformasi birokrasi di Jawa Barat.

Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh sebagian kabupaten/kota, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman substansi reformasi birokrasi, dan belum optimalnya manajemen perubahan di internal birokrasi. Untuk mendorong percepatan dan pemerataan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Organisasi dan Bappeda telah menginisiasi program coaching clinic dan asistensi teknis penyusunan *roadmap* reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas bagi kabupaten/kota yang masih tertinggal. Selain itu, Provinsi juga mendorong kolaborasi antar-daerah melalui mekanisme *sharing knowledge* dan replikasi inovasi layanan publik yang berhasil, seperti adopsi *Smart City*, *e-Government, e-Budgeting, dan e-Performance*. Capaian indeks RB di kabupaten/kota di Jawa Barat kedepan sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan reformasi birokrasi, kemampuan membangun budaya kerja berintegritas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap kinerja pemerintahan. Secara keseluruhan, tren peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di kabupaten/kota Jawa Barat mencerminkan keberhasilan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Harapannya, dengan langkah-langkah strategis yang terus diperkuat dan dikawal, seluruh wilayah di Jawa Barat dapat mencapai predikat A di masa mendatang, sehingga semangat reformasi birokrasi benar-benar menjadi gerakan kolektif dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diterapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Capaian Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.131
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024

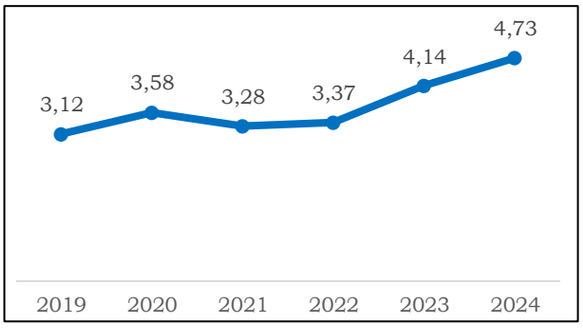

Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Nilai SPBE Jawa Barat tahun 2024 sebesar 4,73 poin, mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan layanan administrasi dan publik secara digital. Meskipun capaian ini sangat positif, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, khususnya pada domain manajemen SPBE yang mencatat skor terendah sebesar 3,82 poin, terutama dalam sub domain Audit TIK, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan dan evaluasi sistem teknologi informasi secara menyeluruh.

Selain hal di atas, tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, memerlukan dukungan data yang andal dan tepat sasaran, sehingga penyelenggaraan statistik sektoral menjadi elemen krusial. Adapun nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Gambar 2.132
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023-2024

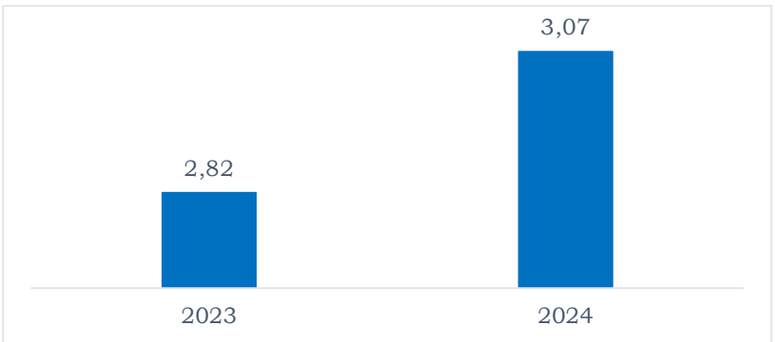

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 3,07 yang mana hal tersebut berarti bahwa kematangan statistik sektoral Provinsi Jawa Barat tergolong ke dalam kategori baik. Nilai IPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,25 poin dari Tahun 2023. Secara lebih spesifik, kenaikan tersebut terdapat pada domain Kualitas Data, Kelembagaan, dan Statistik Nasional. Namun, kenaikan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral tersebut relatif kurang signifikan yang mana hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada seluruh aspek atau domain terutama pada aspek atau domain Prinsip Satu Data Indonesia dan Proses Bisnis Statistik.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Keamanan Nasional berkaitan erat dengan aspek Demokrasi dan penerapan Hukum yang Berkeadilan. Faktor keamanan nasional yang kondusif sangat mempengaruhi daya saing daerah sehingga dapat menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Iklim demokrasi yang diukur dengan Indeks Demokrasi juga memiliki peran penting sebagai pendeteksi dini dalam mengatasi kelemahan sistem demokrasi.

Gambar 2.133
Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Grafik menunjukkan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Barat dari 2009 hingga 2023 yang mengalami fluktuasi cukup signifikan. Setelah mencatat angka 71,07 pada 2009, indeks menurun tajam hingga mencapai titik terendah 57,05 pada 2012,

lalu perlahan mengalami perbaikan. Tren peningkatan mulai tampak jelas sejak 2020, menandai fase pemulihan demokrasi di Jawa Barat, hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan skor 83,34 dan sedikit turun menjadi 83,04 pada 2023. Capaian IDI di atas 80 dalam dua tahun terakhir menandakan kualitas demokrasi yang sangat baik, mencerminkan perbaikan dalam kebebasan sipil, hak politik, dan fungsi lembaga demokrasi, meskipun penurunan kecil pada 2023 tetap perlu menjadi perhatian untuk menjaga stabilitas demokrasi di masa mendatang.

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, Aspek ketenteraman dan ketertiban berkaitan pula dengan faktor Keamanan Nasional dan merupakan salah satu syarat dalam mendukung kelancaran pembangunan, semakin kondusif daerah tersebut maka gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan semakin kecil. Selama 5 (lima) tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada 2019, indeks berada di angka 77,5 dan meningkat tajam menjadi 88,4 pada 2020. Setelah itu, angka indeks sedikit menurun namun stabil di 87,5 pada 2021 dan 2022. Peningkatan signifikan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sempurna sebesar 100,0. Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas penyelenggaraan trantibum di Jawa Barat, yang dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta kenyamanan masyarakat secara optimal.

Gambar 2.134
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Provinsi Jawa Barat

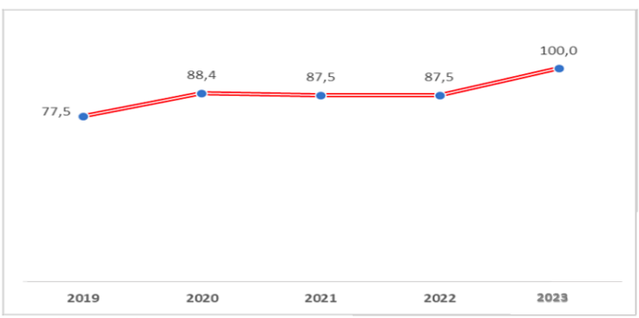

Sumber: Satpol PP Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Pemanfaatan dan optimalisasi potensi suatu daerah sangat dipengaruhi produktivitas daerah itu sendiri. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah membuat instrumen pengukuran berupa Indeks Daya Saing Daerah

(IDSD) yang merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat daerah untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Gambar 2.135
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat 2022-2024

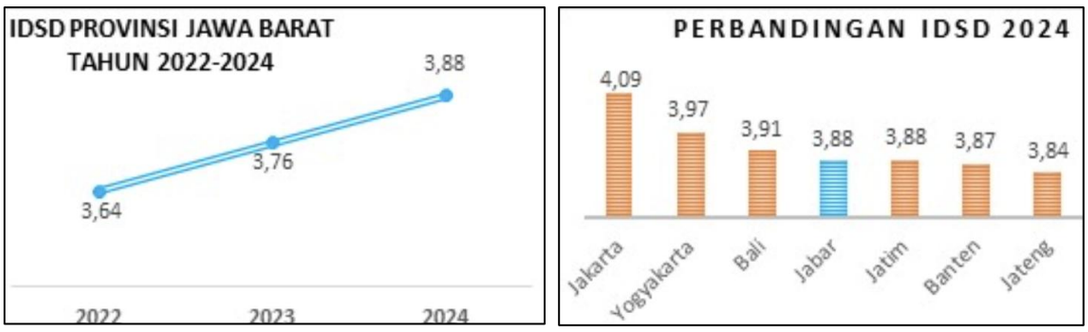

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat mencatat skor Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,88, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 3,43 dan menempatkan provinsi ini di peringkat keempat baik di tingkat Pulau Jawa dan Bali maupun secara nasional. Komponen dengan skor tertinggi dalam indeks tersebut adalah aspek inovasi, yang mencakup pilar dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi, mencerminkan kemudahan dalam memulai maupun menghentikan usaha serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi bernilai tambah. Kekuatan ini menjadi modal penting bagi daya saing Jawa Barat. Namun demikian, perhatian lebih perlu diberikan pada aspek pasar yang mencatat skor terendah dibandingkan komponen lainnya, khususnya pada pilar pasar produk yang menunjukkan masih rendahnya keterbukaan dan kesetaraan peluang bersaing antar pelaku usaha. Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang adil, khususnya di sektor jasa dan pengendalian dominasi pasar.

2.1.4.4 Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan suatu urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah dicapai mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. IKD disajikan berdasarkan urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar,

urusan pilihan, unsur pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah, pengawasan, dan pemerintahan umum.

Dengan memotret capaian bidang urusan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Dari berbagai urusan yang telah dicapai dapat diperhatikan masih ada beberapa urusan yang masih perlu untuk diberikan perhatian dan usaha lebih dalam mencapai target kinerjanya diantaranya yaitu:

1. Urusan Pendidikan, pada sektor ini menunjukkan beberapa tantangan dalam mencapai target-target yang ditetapkan. Meskipun ada perbaikan pada indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022, capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. Salah satu tantangan utama adalah akses pendidikan yang masih tidak merata antara kota dan desa.
2. Urusan Kesehatan, meskipun terdapat peningkatan di tahun 2023, namun pada beberapa target seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan AKI belum sepenuhnya tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang masih kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai.
3. Urusan Infrastruktur dan Transportasi, Capaian dalam urusan ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi, terutama di daerah yang lebih terpencil. Infrastruktur jalan dan transportasi menjadi salah satu tantangan besar dalam memastikan aksesibilitas yang baik antar daerah.
4. Urusan Lingkungan Hidup, Capaian pada indikator terkait lingkungan hidup menunjukkan adanya kemajuan, namun beberapa indikator seperti Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Udara menunjukkan adanya celah dalam pencapaian target. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pengelolaan lingkungan yang belum sepenuhnya optimal.
5. Urusan Perekonomian, Pada urusan perekonomian, terdapat tantangan signifikan dalam mencapai target Tingkat Pengangguran dan Indeks Kemiskinan. Meskipun beberapa indikator menunjukkan ada sedikit perbaikan pada tahun 2022 dan 2023, namun kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah utama di beberapa daerah.
6. Urusan Tata Ruang, Dalam urusan tata ruang, meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam pengelolaan ruang, namun masih banyak

daerah yang belum memiliki tata ruang yang terencana dengan baik, menyebabkan potensi penyalahgunaan lahan dan kerusakan lingkungan.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

2.1.5.1 Sektor Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah tingkat provinsi adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi, terdiri atas :

A. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar, yang terdiri dari:
    1. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
    2. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
B. Penerima pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
2. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus.

Berikut tabel capaian dan target SPM sektor pendidikan.

Tabel 2.57
Capaian SPM Sektor Pendidikan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Pendidikan Menengah)			Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Pendidikan Khusus)		
		Target	Capaian	Capaian (%)	Target	Capaian	Capaian (%)
1	2022	100%	91,59%	100	100%	89,21%	100
2	2023	100%	99,58%	100	100%	98,89%	100
3	2024	1.657.571	1.672.345	100	28,06	29,141	100

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 2.58
Target SPM Sektor Pendidikan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator SPM	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Pendidikan Menengah) (Jumlah Warga)	2.162.653	2.162.653	2.195.092	2.228.019	2.261.439	2.261.439
2	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Pendidikan Khusus)	35,373	35,373	35,727	36,083	36,444	36,444

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.5.2 Sektor Kesehatan

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Kesehatan di Bidang Kesehatan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut penerapan jenis pelayanan dasar urusan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat dibagi berdasarkan kewenangan Tingkat Provinsi dan

Tingkat Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; dan
b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib memenuhi mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar dengan memenuhi standar teknis yang terdiri atas jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Selama ini capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan kewenangan provinsi sudah mencapai 100 persen, sehingga perlu dipastikan untuk capaian tetap maksimal dengan memperhatikan pemenuhan mutu pelayanan yang disusun berdasarkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut tabel capaian dan target SPM sektor kesehatan.

Tabel 2.59
Capaian SPM Sektor Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	2022	100%	100%	100	100%	100%	100
2	2023	100%	100%	100	100%	100%	100
3	2024	26621	26621	100	2431	2431	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 2.60
Target SPM Sektor Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator SPM	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	2.415	4.831	7.246	14.493	19.324	19.324

No	Indikator SPM	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	145	145	145	146	147	149

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.5.3 Sektor Pekerjaan Umum

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada bidang urusan pekerjaan umum, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dan
2. Penyediaan layanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pelayanan dasar tersebut ditujukan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, dan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat. Berikut tabel capaian dan target SPM sektor pekerjaan umum.

Tabel 2.61
Capaian SPM Sektor Pekerjaan Umum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota			Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		
		Target (l/d)	Capaian (l/d))	Capaian (%)	Target (jiwa)	Capaian (jiwa)	Capaian (%)
1	2022	350	350	100	145906	145906	100
2	2023	5979	5979	100	750	750	100
3	2024	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100	6 Kab/kota	6 Kab/Kota	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 2.62
Target SPM Sektor Pekerjaan Umum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator SPM	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah	3.068 jiwa	3.200 jiwa	3.200 jiwa	3.200 jiwa	33.920 0 jiwa	N/A

No	Indikator SPM	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	lintas kabupaten/kota						
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	0	0	0	0	0	N/A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota, penyesuaian kebutuhan air minum harus sesuai dengan demand kebutuhan air minum curah.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antaralain: • Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. • Berwarna: air minum terlihat berwana seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. • Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. • Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. • Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

2.1.5.4 Sektor Perumahan Rakyat

Berdasarkan data capaian, seluruh target pelayanan dasar telah terpenuhi dengan tingkat pencapaian yang maksimal (100 persen). Secara rinci, untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, telah dilaksanakan program rehabilitasi rumah yang terdampak

bencana dengan mutu pelayanan mencapai 100 persen. Sementara itu, untuk indikator fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi, pencapaian juga menunjukkan hasil optimal, yaitu melalui fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan yang juga tercapai 100 persen. Berikut tabel capaian SPM Sektor Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.64
Capaian SPM Sektor Perumahan Rakyat
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi (Unit)			Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		
		Target (Unit)	Capaian (Unit)	Capaian (%)	Target (Unit)	Capaian (Unit)	Capaian (%)
1	2022	59	59	100	200	200	100
2	2023	60472	60472	100	80	80	100
3	2024	80	80	100	672	672	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2025

Capaian Sektor Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi hak dasar masyarakat di sektor perumahan, serta memperkuat implementasi SPM sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi dasar penting khususnya dalam menjamin akses terhadap hunian yang layak bagi masyarakat rentan bencana dan terdampak kebijakan pembangunan. Pemerintah Provinsi memiliki peran penting dalam hal pemberian bantuan teknis meliputi: a) Pendampingan penggantian kerugian; b) Penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus; c) Pembangunan Rumah Susun Umum; d) Pembangunan Rumah Khusus; dan/atau; e) Pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Adapun target SPM Sektor Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Barat sebagaimana berikut.

Tabel 2.65
Target SPM Sektor Perumahan Rakyat
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator SPM	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi (Unit)	40	220	220	220	220	N/A
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (Unit)	87	20	20	20	20	N/A

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.5.5 Sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah tingkat provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah

kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berikut tabel capaian dan target SPM Sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.66
Capaian SPM Sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	2022	100%	100%	100
2	2023	100%	100%	100
3	2024	50	50	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 2.67
Target SPM Sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator SPM	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	78	150	150	150	150	150

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.5.6 Sektor Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota), bahwa Jenis

Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah tingkat provinsi adalah yang di dalam panti, sedangkan yang di luar panti menjadi kewenangan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal urusan sosial yang menjadi kewenangan tingkat provinsi, terdiri atas :

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial berkomitmen untuk melaksanakan dan memenuhi kebutuhan SPM masyarakat urusan sosial secara optimal. Selama ini target-target pemenuhan SPM urusan sosial yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan ditargetkan tercapai 100 persen. Realisasi atau capaian Standar Pelayanan Minimal urusan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat di yang menjadi kewenangan provinsi telah mencapai 100 persen, hal ini berarti target dan realisasi pemenuhan kebutuhan SPM di Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencapai 100 persen. Berikut tabel capaian dan target SPM Sektor Sosial Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.68
Capaian SPM Sektor Sosial
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

No.	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	105	121	115,24	100%	100%	100	185	185	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	600	737	122,83	100%	100%	100	595	595	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia	350	453	129,43	100%	100%	100	350	350	100

No.	Indikator SPM	2022			2023			2024		
		Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)	Target (Orang)	Capaian (Orang)	Capaian (%)
	Telantar di dalam Panti									
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	140	140	100	100%	100%	100	150	150	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	345.246	345.246	100	100%	100%	100	10.000	10.000	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 2.69
Capaian SPM Sektor Sosial
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

No	Indikator SPM	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	200	200	200	200	200	200
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	640	640	620	620	620	620
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	400	400	400	400	400	400
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	150	150	170	170	170	170
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.6 Kerjasama Daerah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan keberlangsungan pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan, serta untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kerja sama daerah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum utama, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Sebagai wujud nyata dari komitmen untuk mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara aktif memfasilitasi berbagai inisiatif kerja sama daerah. Berdasarkan laporan pelaksanaan fasilitasi dokumen kerja sama tahun anggaran 2024, yang mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat telah berhasil memfasilitasi sebanyak 201 dokumen kerja sama yang terbagi ke dalam 4 (empat) kategori utama, yaitu:

1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

   Sebanyak 86 dokumen kerja sama telah dijalin dengan pemerintah daerah lain, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kemitraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara sinergis dan saling menguntungkan.
2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Terdapat 78 dokumen kerja sama yang melibatkan pihak ketiga, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk menghadirkan inovasi, investasi, dan keahlian spesifik dalam berbagai program pembangunan, seperti kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, asosiasi, pihak dunia usaha (swasta), serta dengan instansi vertikal.

3. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
   Sebanyak 26 dokumen difokuskan pada sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mencakup integrasi data, program, dan kebijakan dengan berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Kerja Sama dengan Pemerintah/Lembaga Luar Negeri
   Telah difasilitasi sebanyak 11 (sebelas) dokumen kerja sama dengan mitra internasional. Ini menunjukkan peran aktif Jawa Barat dalam diplomasi sub-nasional untuk menarik investasi, alih teknologi, dan memperluas akses pasar global.

Dalam hal mengakselerasi pembangunan serta pengembangan layanan publik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga memandang perlu untuk menjalin kerja sama dengan provinsi tetangga. Wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas antar daerah, pemerataan pembangunan, serta integrasi sosial ekonomi lintas wilayah.

Namun demikian, wilayah perbatasan kerap menghadapi tantangan layanan publik berupa keterbatasan akses infrastruktur dasar, ketimpangan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Kawasan ini umumnya berada di posisi geografis yang berbatasan langsung dengan provinsi lain seperti Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, arah pengembangan layanan publik di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat difokuskan pada 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu:

1. Penguatan aksesibilitas diarahkan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang menghubungkan pusat pertumbuhan daerah dengan desa-desa terpencil di kawasan perbatasan. Jalan, jembatan, jaringan air bersih, listrik, serta layanan transportasi publik menjadi fokus utama

untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mengakses hak-haknya.

2. Integrasi layanan publik lintas sektor dan lintas wilayah diperkuat melalui sinergi antar perangkat daerah dan mekanisme kerja sama antar daerah. Hal ini mencakup penyediaan layanan pendidikan menengah dan vokasi, layanan kesehatan rujukan, serta dukungan terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang menjangkau seluruh penduduk perbatasan. Sehingga tidak ada lagi warga di wilayah perbatasan tidak mendapatkan hak pelayanan dasar sosialnya.
3. Pemberdayaan wilayah dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, dan dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam pengembangan dan Pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan kesepakatan bersama bersama 3 (tiga) Provinsi di Perbatasan Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan Bersama antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah Melalui Kesepakatan Bersama Nomor 16/DG.02.02.01/Pemotda tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik yang didalamnya termuat Ruang lingkup meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan;
4. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan
5. Pembangunan wilayah perbatasan.

Kesepakatan Bersama antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Melalui Kesepakatan Bersama Nomor 41/DG.02.02.01/Pemotda dan Nomor 120.23/Mou.03-Huk/2024 tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik yang didalamnya termuat Ruang lingkup meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan;

4. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan
5. Pembangunan wilayah perbatasan.

Kesepakatan Bersama antara Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Melalui Kesepakatan Bersama Nomor 32 Tahun 2021 Nomor: 90/DG.02.02.01/Pemotda tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik yang didalamnya termuat ruang lingkup meliputi :

1. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
2. Pertanian, Perikanan, dan Peternakan;
3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Perindustrian dan Perdagangan;
5. Perhubungan;
6. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Penanaman Modal;
8. Perumahan dan Permukiman;
9. Kesehatan;
10. Lingkungan dan Ketahanan Iklim;
11. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
12. Bidang-bidang lain yang disepakati.

Arah pengembangan layanan publik di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dalam 3 (tiga) Kesepakatan Bersama di atas difokuskan pada 4 (empat) pilar strategis, yaitu pemerataan akses dan kualitas layanan publik, integrasi lintas wilayah, transformasi digital, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerataan akses diarahkan untuk memastikan seluruh warga, termasuk yang berada di desa terpencil dan sulit dijangkau mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi secara setara. Integrasi lintas wilayah dilakukan melalui kerja sama antar daerah untuk menghadirkan layanan bersama yang efisien dan merata, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Transformasi digital didorong melalui implementasi Desa Digital, layanan *mobile*, serta pemanfaatan sistem berbasis data kependudukan dan spasial guna meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat perbatasan difokuskan pada penguatan UMKM lokal, pelatihan vokasi, dan perlindungan sosial, sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menempatkan pengembangan wilayah perbatasan sebagai bagian integral dari Perencanaan 5 (lima) tahun ke depan dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022-2042. Upaya ini juga diperkuat dengan kolaborasi lintas provinsi melalui forum-forum kerja sama antar daerah, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Melalui pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan, arah pengembangan layanan publik wilayah perbatasan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkokoh keutuhan dan daya saing Provinsi Jawa Barat dalam konteks regional maupun nasional.

Selain kerja sama yang sudah dilaksanakan sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga secara aktif melanjutkan dan mengelola berbagai perjanjian kerja sama strategis yang telah terjalin pada tahun-tahun sebelumnya. Komitmen ini menunjukkan adanya kesinambungan program dan hubungan kemitraan jangka panjang yang konsisten.

Kerja sama daerah juga menjadi fondasi yang kuat untuk implementasi kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong dan memperluas cakupan kerja sama daerah dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai visi pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus akan diberikan pada penguatan kemitraan strategis yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan yang diantaranya melalui kerja sama dengan berbagai instansi seperti pihak Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Badan Pusat Statistik, serta instansi lainnya.

2.1.7 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Jawa Barat merupakan bagian integral dari manajemen keuangan daerah yang bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, efisiensi pemanfaatan aset, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam kurun

waktu 2020–2024, nilai total aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dari Rp40,09 triliun (2020) menjadi Rp49,96 triliun (2024).

Aset tersebut terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan properti investasi.

Sampai dengan 31 Desember 2024, total sebaran aset tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 5.680 bidang (17.221 Ha) senilai Rp13,49 triliun. adapun proporsi legalitas tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 2.70
Proporsi Legalitas Tanah Milik Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Uraian	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Total
Bidang	2.425	3.255	5.680
Luas (Ha)	8.602,49	8.618,64	17.221,13
Nilai (Miliar Rp)	8.003,35	5.489,07	13.492,42

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2025

Masih terdapat 3.255 atau 57 persen bidang tanah belum bersertifikat yang sebagian besar berada di wilayah Cirebon (53 persen), Priangan (15 persen), Bandung Raya (15 persen), Wilayah Bogor (9 persen), dan Wilayah Purwakarta (8 persen). Proporsi tanah belum bersertifikat berdasarkan penggunaan menunjukkan bahwa sebagian besar aset dimanfaatkan untuk infrastruktur (69 persen), fasilitas publik (22 persen), dan sarana kantor (8 persen). Adapun tanah *idle* yang belum digunakan secara optimal mencapai 54 lokasi dengan nilai sebesar Rp204,7 miliar.

Pendapatan dari pengelolaan aset daerah juga menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2024, total realisasi PAD dari pemanfaatan aset mencapai Rp53,33 miliar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.71
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Aset
Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024		
				Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.671.025.585	14.613.093.925	14.485.876.083	25.279.918.636	30.599.931.815	121,04%
Penjualan BMD (Bongkaran)	177.120.675	507.494.836	917.142.934	-	917.597.200	∞
Pemanfaatan Aset	6.671.733.368	12.494.499.718	16.203.932.031	26.079.490.567	21.821.599.485	83,67%
Total Sub Jumlah	18.519.879.628	27.615.088.479	31.606.951.048	51.359.409.203	53.339.128.500	103,85%
Total PAD (semua sumber)	20.333.679.966.126	23.249.622.253.957	24.375.389.630.532	24.882.208.619.701	25.311.062.568.010	101,72%
% PAD dari Pengelolaan Aset	0,09%	0,12%	0,13%	0,21%	0,21%	-

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2025

Namun demikian, kontribusi terhadap total PAD Provinsi Jawa Barat masih tergolong kecil, yakni sekitar 0,21 persen dari total PAD sebesar Rp25,31 triliun tahun 2024. Oleh karena itu, strategi optimalisasi pemanfaatan aset *idle* dan peningkatan kerja sama dengan sektor swasta akan menjadi bagian penting dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

2.1.8 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten dan kota melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini rencana dan proyek pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Provinsi Jawa Barat, baik itu lingkup proyek/program yang dibiayai oleh APBN maupun rencana pembangunan infrastruktur oleh APBD provinsi di kabupaten/kota:

2.1.8.1 Proyek/Program Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat

Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka

Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Berikut ini daftar PSN yang berada di lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat:

a. Proyek, yang meliputi :
   1. Sektor Kawasan, yaitu berupa Kawasan Industri Patimban Industrial Estate.
   2. Sektor Perumahan, yaitu berupa Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya.
   3. Sektor Air Bersih dan Sanitasi, yaitu SPAM Regional Jatiluhur.
   4. Tanggul Pantai, yaitu Tanggul Pantai yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat
   5. Sektor Energi, yang terdiri dari :
      - Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/ Refinery Development Master Plan (RDMP).
      - Pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang (Tahap I Ruas Semarang-Batang dan Tahap II Ruas Batang-Indramayu).
   6. Sektor Pendidikan, yaitu berupa Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia.

b. Program, yang meliputi :
   1. Program Ketenagalistrikan
   2. Program Pemerataan Ekonomi
   3. Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll
   4. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
   5. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional / Food Estate
   6. Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan
   7. Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;
   8. Program Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung proyek strategis nasional tersebut melalui program/proyek strategis provinsi, diantaranya pembangunan ekosistem pertanian organik, pembangunan ruang kelas baru, Pembangunan RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus, Program Sanitasi Lingkungan, peningkatan kondisi jaringan irigasi, serta Program

Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi, akses sentra industri dan akses simpul transportasi).

Tabel 2.72
Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Pembangunan Ruang Kelas Baru	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	▪ Pembangunan Unit Sekolah Baru; ▪ Pembangunan 10 sekolah kejuruan unggulan	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Pembangunan RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Program Sanitasi Lingkungan	DAS Citarum, serta kabupaten/kota yang belum ODF *(Open Defecation Free)*
6	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	Jawa Barat	▪ Pendidikan berkarakter; ▪ Program beasiswa D3/S1/S2 di perguruan tinggi Jawa Barat	Kota Depok dan 27 Kab/kota di Jawa Barat
7	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	▪ Pengamanan Mata Air ▪ Reboisasi hutan dan lahan ▪ Pengembangan kampung adat berbasis hutan dan aliran sungai	Kabupaten/kota pada DAS Citarum, Ciliwung, Cilamaya, serta DAS kritis lainnya
8	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Nasional	▪ Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis; ▪ Normalisasi Sungai dan Muara; ▪ Pengamanan Mata Air; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan	Kabupaten/kota di WS Citarum,Cimanuk, Citanduy, Cisadea-Cibarena, Ciwulan-Cilaki

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
			(Jalan menuju sentra produksi);	
9	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi)	Kabupaten di wilayah REBANA, Cekungan Bandung (Kab. Bandung, Bandung Barat), Bodebek (Kabupaten Bogor) dan Kabupaten/kota Jawa Barat Bagian Selatan
10	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	▪ Pembangunan Kampung Adat Nelayan; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di Pesisir Utara dan Selatan jawa barat
11	Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa	DKI Jakarta, **Jawa Barat**, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah	Dukungan untuk normalisasi Sungai dan Muara pada Wilayah Sungai kewenangan pusat dan Normalisasi Sungai dan muara di WS Provinsi	Kabupaten/kota di Pantura Jawa Barat
12	Bioetanol (Berbasis Tebu)	Sumatera Utara, Lampung, **Jawa Barat**, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan	Industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan
13	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Kepulauan Riau (Batam), Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, **Jawa Barat (Bekasi)**, dan Sulawesi Tenggara (Palu)	▪ Program Energi ramah lingkungan; ▪ Mitigasi Dampak Sosial Lingkungan;	Kabupaten/kota Bodebek (Kabupaten Bekasi), Cekungan Bandung
14	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar	Papua, Sumatera, **Jawa**, dan Nusa Tenggara	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan
15	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, **Jawa**	▪ Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ▪ Pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
		Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat		
16	Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, Tembaga	Banten, **Jawa Barat**, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Rieu, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat	Program pengelolaan tambang berwawasan lingkungan	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran
17	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Nasional	Optimalisasi BIJB (bandara internasional Jawa Barat)	Kabupaten Majalengka, Indramayu, Cirebon, Subang, Kuningan, serta Kota Cirebon dan Kota Bandung
18	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Program Transformasi Birokrasi	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
19	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Transformasi birokrasi	
20	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir); ▪ Program Sanitasi Lingkungan	Kabupaten Subang
21	Pembangunan Jakarta Metropolitan	DKI Jakarta, **Jawa Barat**, dan Banten	▪ Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Massal	Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi,

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
	Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat		- *Bus Rapid Transit* (Pengelolaan); - Kereta api perkotaan; - Reaktivasi rel kereta api; ▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (konektivitas menuju jalan simpul transportasi) ▪ Program Mitigasi Dampak Sosial dan lingkungan; ▪ Pembangunan kelembagaan Pengelola Transportasi	Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bandung Barat, Pangandaran, Ciamis serta Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Cimahi, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Banjar
22	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	▪ Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir);	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat
23	Pembangunan 3 Juta Rumah	Nasional	Pembangunan rumah rakyat miskin	27 Kabupaten/kota di Jawa Barat;
24	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	DKI Jakarta, Banten (Tangerang, Tangerang Selatan), **Jawa Barat (Bekasi, Bandung)**, Jawa Tengah (Semarang), Sulawesi Selatan (Makassar), Bali (Denpasar), Sumatera Selatan (Palembang), dan Sulawesi Utara (Manado)	▪ Pembangunan TPPAS Regional ○ Pembangunan TPPASR Legok Nangka (Progres sedang tahap penyiapan pemenuhan perolehan pembiayaan-*financial closed*); ○ Pembangunan TPPASR Lulut Nambo (Progres sedang pencarian mitra investor baru untuk pembangunan kapasitas 1800-2300 ton/hari, serta telah terbangun fase I pelayanan tambahan sebelum operasional sebesar 50 ton/hari); ○ Pembangunan TPPASR Cirebon Raya dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres : penyusunan Kajian FS);	Kabupaten Bandung, Cirebon, Karawang

No.	Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi	Lokasi
			○ Pembangunan TPPASR Bodebek dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres telah tersusun DED Fasilitas pengolah sampah dan sedang disusun DED Jalan akses) ▪ Pengelolaan Sampah Mandiri	

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2030; Bappeda Provinsi Jawa Barat, (Diolah)

2.1.8.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, terdapat program pembangunan infrastruktur sebagai indikasi program utama penataan ruang. Program infrastruktur tersebut yang diidentifikasi bernilai strategis, antara lain:

A. Transportasi

1. Pengembangan Pelabuhan Patimban;
2. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru;
3. Pengembangan Kereta Api Perkotaan;
4. Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api
5. Elektrifikasi Jalur Kereta Api
6. Pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan Kawasan Perkotaan Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon Raya;
7. MRT *East-West*;
8. Pembangunan Kereta Cepat Bandung-Surabaya;
9. Pembangunan Jalur Tengah Selatan;
10. Pengembangan Jalan Kolektor Primer Naringgul - Cidaun
11. Pembangunan Tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang;
12. Pembangunan Tol Gedebage Tasik Cilacap;
13. Pembangunan Tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya;
14. Pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road;
15. Pembangunan Jalan Tol JORR 3;
16. Pembangunan Jalan khusus Tambang;
17. Pembangunan Tol Kertajati-Indramayu;

18. Pembangunan Tol Akses Patimban;
19. Pembangunan Tol Soreang–Ciwidey-Cidaun; dan
20. Pelebaran Tol Cibadak – Palabuhanratu.

Gambar 2.136
Peta Rencana Infrastruktur Transportasi Strategis
Provinsi Jawa Barat

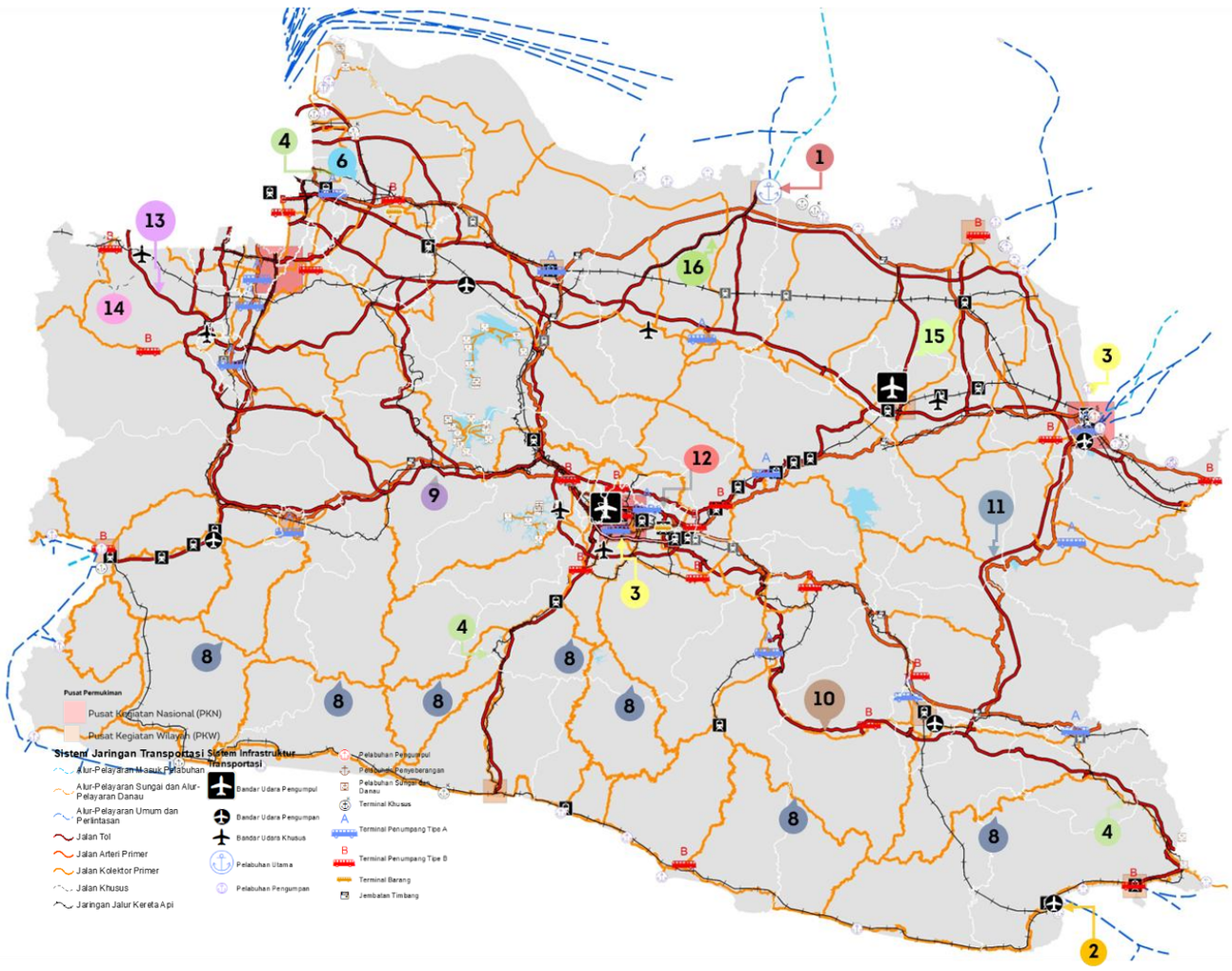

Sumber: Lampiran Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 (diolah)

B. Sumber Daya Air

1. Pembangunan Bendungan Cipunagara Kab. Subang.
2. Pembangunan Bendungan Kadumalik Kab.Majalengka.
3. Pembangunan Bendungan Matenggeng Kab Ciamis - Cilacap.
4. Bendungan Cibeet, Kab. Bogor.
5. Bendungan Cijuray, Kab. Bogor.
6. Pembangunan Waduk Multiguna di kawasan Cekungan Bandung

7. Pembangunan Daerah Irigasi Baru Cikalong, Kab. Tasikmalaya.
8. Pembangunan Daerah Irigasi Parigi, Kab. Pangandaran
9. Pembangunan DI Curug Dengdeng, Kab. Cianjur, DI. Candragoyang,Kab. Garut.
10. Modernisasi Daerah Irigasi Renrang, WS Cimanuk-Cisanggarung.

Gambar 2.137
Peta Rencana Infrastuktur Sumber Daya Air Strategis
Provinsi Jawa Barat

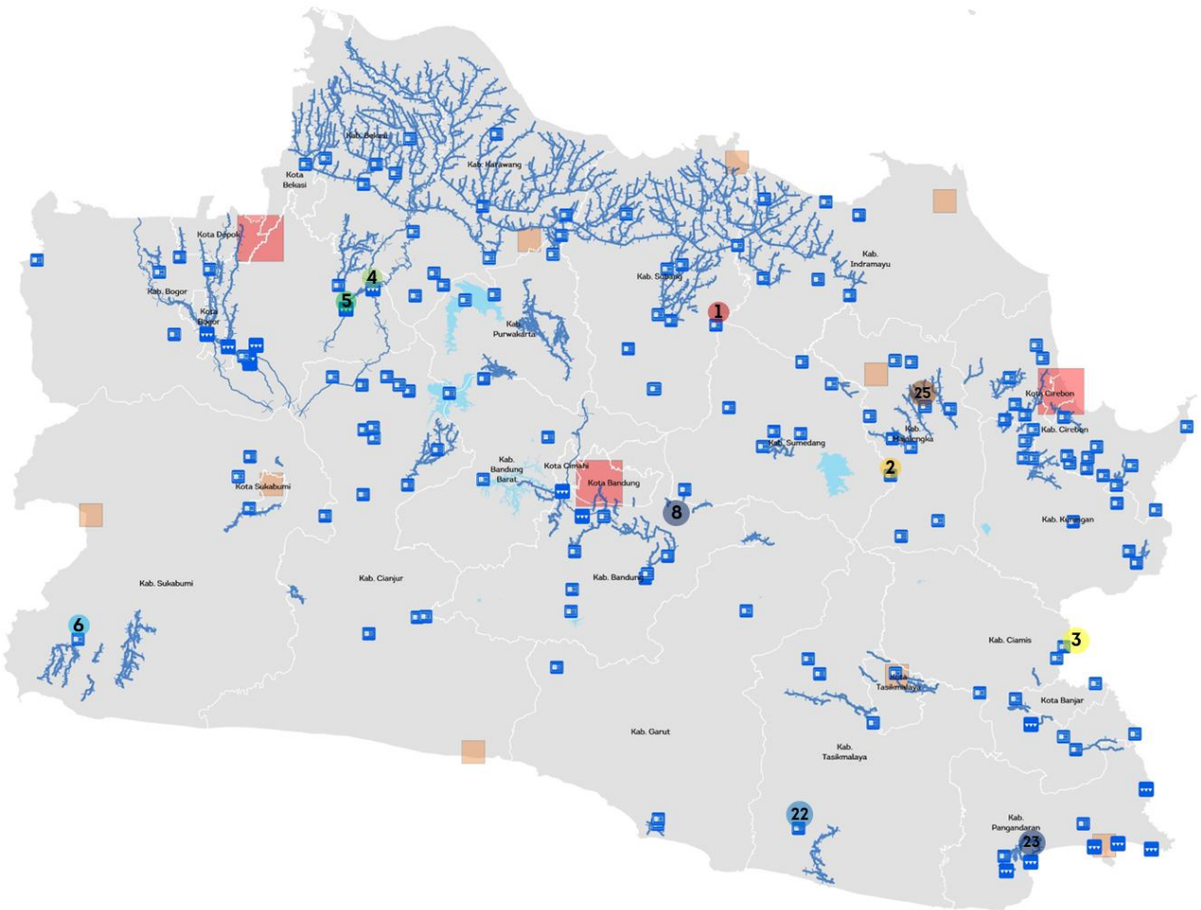

Sumber: Lampiran Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 (diolah)

Persampahan dan Air Bersih

1. Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka.
2. Pembangunan TPPAS Regional Nambo.
3. Pembangunan TPPAS Regional Bekasi Karawang Purwakarta (Bekarpur).
4. Pembangunan TPPAS Regional Cirebon Raya.
5. Pembangunan TPA Bersama Sukabumi.
6. Pembangunan TPA Bersama Tasikmalaya.

7. Pembangunan SPAM Sinumbra.
8. Pembangunan SPAM Jatiluhur I.
9. Pembangunan SPAM Bandung Selatan.

Gambar 2.138
Peta Rencana Infrastruktur Strategis Lainnya Provinsi Jawa Barat

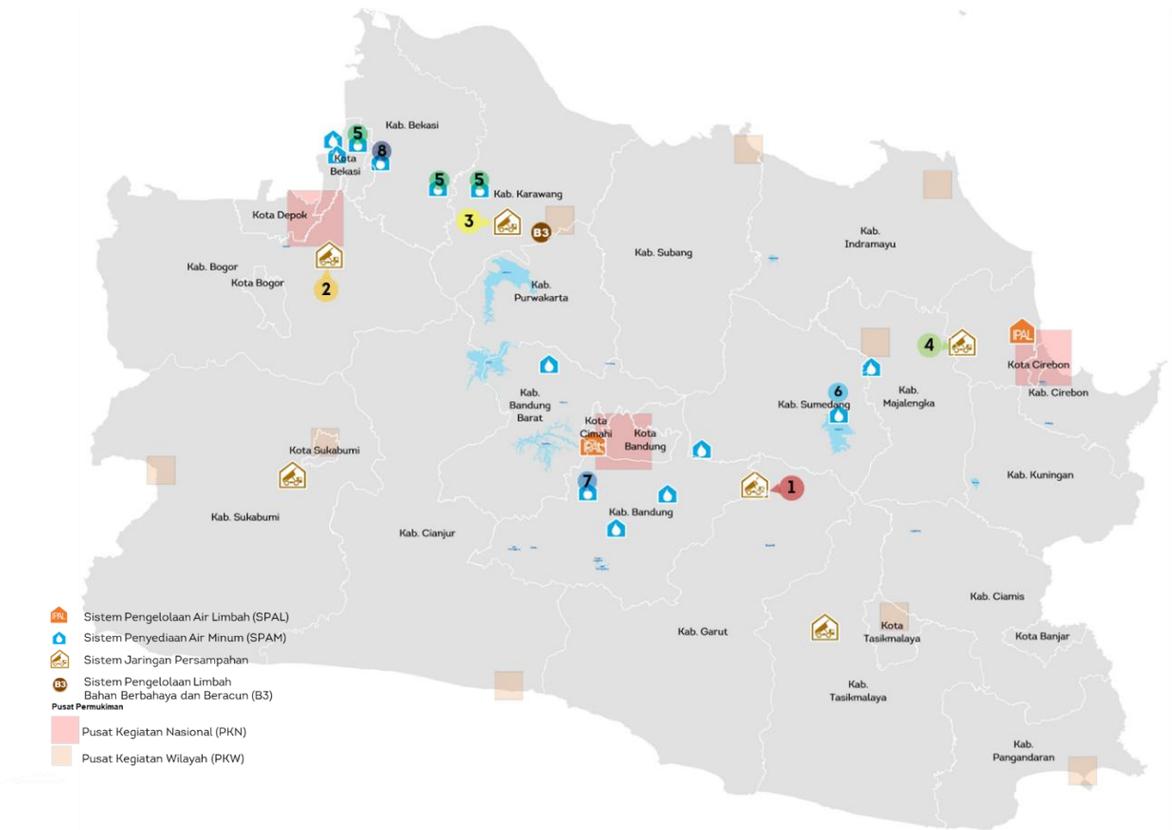

Sumber: Lampiran Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 (diolah)

2.1.9 Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Perekonomian dan Fiskal Daerah

Jumlah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2024 mencapai 37 BUMD yang terdiri atas: 9 (sembilan) BUMD Non Lembaga Keuangan dan 28 BUMD Lembaga Keuangan Berdasarkan statusnya, sebanyak 18 (delapan belas) BUMD berstatus sehat, 11 (sebelas) BUMD cukup sehat, 6 (enam) BUMD tidak sehat, 2 (dua) BUMD berstatus tidak aktif serta 3 (tiga) BUMD yang sudah merger.

Gambar 2.139
BUMD Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

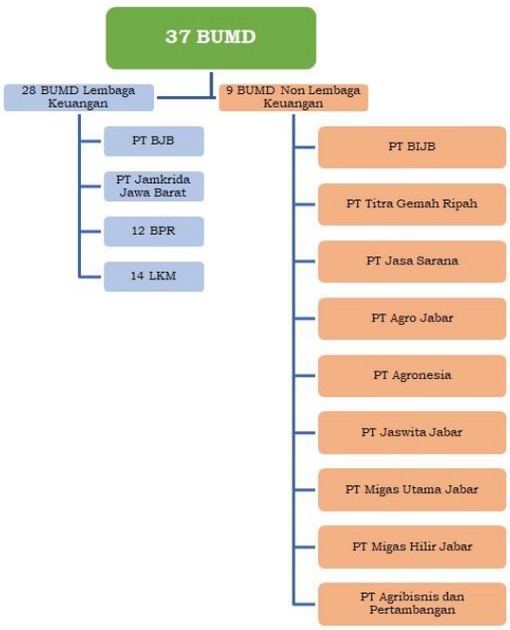

Sumber: Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 2025

Sebagai badan usaha yang dibentuk untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, BUMD menyelenggarakan kegiatan bisnis sesuai dengan bidang usaha ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan BUMD. Beberapa program dan kegiatan prioritas daerah dalam pelaksanaannya melibatkan peran BUMD melalui skema penugasan maupun penyertaan modal daerah untuk pembiayaan. Pada periode 2019-2024, beberapa proyek penugasan kepada BUMD meliputi :

1) penyelenggaraan SPAM Bandung Selatan serta keikutsertaan dalam pengembangan SPAM Jatiluhur II (PT TGR);
2) pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) serta penyaluran bahan pangan/operasi pangan murah untuk pengendalian inflasi daerah (PT Agro Jabar);
3) pengelolaan pasar kreatif Jabar dan objek wisata Waduk Darma Kab Kuningan (PT Jaswita);
4) penyelenggaraan pengelolaan sampah (TPPAS) regional Nambo dan pencarian mitra investor baru, serta penyediaan layanan dan operasional angkutan masal (*Bus Rapid Transit*-BRT) di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (PT Jasa Sarana); dan
5) operasionalisasi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (PT BIJB).

Selain proyek/kegiatan yang bersifat penugasan, beberapa BUMD juga didorong untuk melaksanakan *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik di sektor air minum dan transportasi, akses terhadap pangan yang lebih terjangkau, serta akses keuangan yang lebih inklusif. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui skema PSO oleh BUMD, seperti pelaksanaan operasi pasar bersubsidi (OPADI) oleh PT Agro Jabar.

Peran BUMD dalam mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah diwujudkan melalui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk dividen. Beberapa BUMD berkategori sehat telah memberikan dividen cukup signifikan terhadap PAD. Total kontribusi dividen BUMD terhadap PAD pada tahun 2024 sebesar Rp430.658.809.497 yang disumbang oleh 2 (dua) BUMD non keuangan (PT. Jaswita dan PT Migas Hulu Jabar) dan 4 (empat) BUMD Keuangan (PT BPD Jabar dan Banten, PT Jamkrida, 12 BPR, dan 14 LKM). Untuk BUMD lainnya tidak memberikan kontribusi PAD antara lain disebabkan kondisi perusahaan yang tidak sehat atau tidak aktif.

Terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam pengelolaan BUMD saat ini terkait:

1. Kontribusi dividen masih rendah dibandingkan harapan dan potensi yang dimiliki;
2. Portofolio bisnis beragam, namun belum terintegrasi secara strategis;
3. Kinerja BUMD tidak merata, ada yang positif namun Sebagian masih membutuhkan pembinaan intensif;
4. Tumpeng tindih bidang usaha antar BUMD yang menyebabkan inefisiensi persaingan internal;
5. Skala usaha yang kecil membuat daya saing BUMD terbatas;
6. Keterbatasan modal yang menghambat ekspansi dan pengembangan usaha;
7. Efisiensi operasional rendah karena sistem manajemen dan tata Kelola belum optimal.

Untuk itu, dalam mewujudkan peran BUMD yang lebih optimal terhadap perekonomian dan fiskal daerah, penataan dan Pengembangan BUMD ke depan dihadapkan pada tantangan peningkatan kesehatan BUMD melalui restrukturisasi BUMD serta penguatan kelembagaan dalam

pengelolaan BUMD. Restrukturisasi BUMD dapat berupa penggabungan BUMD sejenis/sesuai klaster agar dapat melakukan bisnis secara lebih efisien, pembubaran BUMD berstatus tidak aktif, serta meningkatkan pelayanan publik yang diperlukan sesuai dengan Isu Pembangunan diantaranya pembentukan BUMD pada bidang transportasi di wilayah metropolitan. Restrukturisasi didasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan utama yaitu,

1. Aspek Strategis:
   a. Menciptakan sinergi antar BUMD untuk meningkatkan daya saing kolektif;
   b. Konsolidasi sumberdaya untuk efisiensi dan efektivitas bisnis;
   c. Membangun skala ekonomi yang lebih besar dan kompetitif.
2. Aspek Manajerial:
   a. Penyederhanaan struktur organisasi dan manajemen *holding*;
   b. Penerapan standarisasi tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*);
   c. Optimalisasi Portofolio bisnis agar lebih fokus dan produktif.
3. Aspek Keuangan:
   a. Penguatan struktur permodalan melalui konsolidasi entitas BUMD;
   b. Peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan;
   c. Optimalisasi pemanfaatan aset yang saat ini belum digunakan secara maksimal.

Total Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemerintah provinsi Jawa Barat kepada BUMD periode 2019-2024 sebesar Rp 1.010.680.884.550 yang diberikan kepada PT Jaswita, PT Jasa Sarana, PT Tirta Gemah Ripah, PT Agro Jabar, PT BIJB, PT BPD Jabar Banten, PT Jamkrida, dan BPR. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung proyek-proyek yang bersifat penugasan maupun untuk pengembangan bisnis perusahaan. Dalam rangka mendorong tingkat kesehatan dan kinerja BUMD periode 2025-2029, diperlukan beberapa kebijakan antara lain dalam bentuk PMD kepada BUMD untuk memenuhi pembiayaan untuk proyek penugasan maupun pengembangan bisnis perusahaan. Sampai dengan tahun 2024, dalam rangka pemenuhan modal dasar BUMD yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi sebesar 51

persen tersebut dibutuhkan pembiayaan sebesar Rp1,33 Triliun dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.73
Kebutuhan Pemenuhan Modal Dasar BUMD Tahun 2024

No	BUMD	Sisa kewajiban PMD (Rp) [1)]	Peruntukan
1	PT Bjb	622.195.840.400	peningkatan layanan jasa keuangan
2	PT Jamkrida	270.891.200.000	peningkatan jasa penjaminan kredit
3	BPR Karya Utama Jabar	53.249.250.000	peningkatan layanan jasa keuangan
4	PT TGR	63.400.000.000	pengembangan penyediaan air minum
5	PT MUJ	105.000.000.000	pengembangan bisnis migas
6	PT Agro Jabar	21.026.000.000	pengembangan bisnis agro
	Total	1.333.139.290.400	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025
Catatan : [1)] nilai sisa kewajiban pemerintah provinsi dalam memenuhi kewajiban minimal komposisi saham 51% dari modal dasar perusahaan yang ditetapkan.

Pemenuhan kebutuhan penyertaan modal daerah dari pemerintah provinsi kepada BUMD tersebut di atas mengacu kepada peraturan daerah tentang modal dasar setiap BUMD, rencana bisnis perusahaan, kebijakan penugasan kepada BUMD, pembentukan BUMD baru, serta kemampuan pembiayaan dari APBD Provinsi.

Pengembangan bisnis BUMD juga didukung melalui optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah provinsi maupun aset yang telah dipisahkan dan digunakan oleh BUMD, serta kerjasama bisnis antar badan usaha. Beberapa aset pemerintah provinsi yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis tersebut antara lain pasar kreatif (Kota Bandung), Pusat Distribusi Provinsi (Kab Purwakarta), serta aset lainnya. Terdapat beberapa aset yang dikelola BUMD saat ini belum dapat dioptimalkan pemanfaatannya sehubungan masih memerlukan upaya pengamanan dan penyelesaian status hak guna.

2.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat. Hal ini didasarkan fakta bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat saat ini merupakan yang terbesar dan 20 (dua puluh) tahun ke depan akan makin meningkat. Untuk itu, proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat.

2.2.1 Kebutuhan Hunian

Dalam menghitung kebutuhan rumah, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu data demografi dan data *backlog*. Data demografi berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk dan asumsi jumlah rumah tangga yang menghuni satu rumah. Berdasarkan data BPS, Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 50.759.000 jiwa, dan diproyeksikan meningkat menjadi 52.698.960 jiwa pada tahun 2030, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 0,8% per tahun. Jika tidak diiringi dengan penyediaan hunian yang memadai, maka angka *backlog* kepemilikan rumah diproyeksikan naik menjadi sekitar 2.242.086 rumah tangga pada tahun 2030, menandakan kebutuhan intervensi serius dalam sektor perumahan. Sementara itu, data *backlog* dihitung dengan mengurangi jumlah rumah yang sudah ada dari jumlah kebutuhan rumah.

Gambar 2.140
Proyeksi Jumlah hunian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2030

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dan Hasil Olahan, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan dibutuhkan tambahan hunian sebanyak 373.681 unit per tahun untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah rumah tangga dan menekan *backlog* kepemilikan rumah. Oleh karena itu, kebutuhan hunian tersebut dibagi ke dalam dua kebutuhan hunian, yaitu 226.455 unit per tahun dialokasikan untuk rumah tapak (*landed house*) dan 146.317 unit per tahun dialokasikan untuk hunian vertikal (seperti rumah susun dan apartemen). Proyeksi ini mempertimbangkan tren pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta ketersediaan lahan di masing-masing kabupaten/kota.

Gambar 2.141
Proyeksi Jumlah Rumah Tapak dan Hunian Vertikal
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

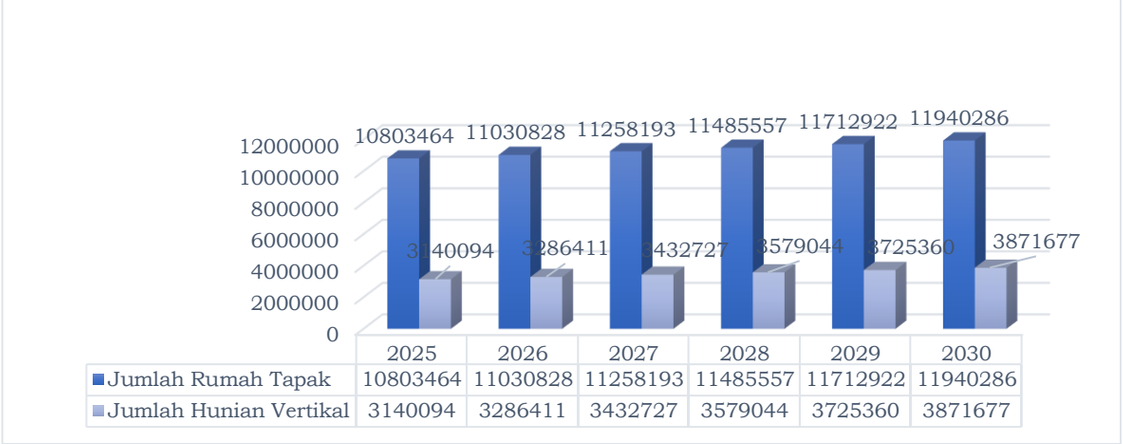

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, diolah (2024)

Pembangunan hunian vertikal akan lebih difokuskan pada wilayah perkotaan atau kabupaten/kota dengan keterbatasan lahan permukiman sehingga dengan asumsi apabila 1 *twin block* rusun terdiri atas 98 unit satuan rumah susun (sarusun), maka sampai tahun 2030 dibutuhkan kurang lebih sekitar 8.958 *twin block* rusun. Perhitungan proyeksi di wilayah yang cukup padat seperti Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi dan Kab. Bandung Barat menggunakan proporsi 50 persen. Kemudian untuk wilayah yang sangat padat seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Cimahi menggunakan proporsi rumah tapak sebesar 15 persen dan hunian vertikal sebesar 85 persen. Sedangkan pembangunan kabupaten/kota lainnya lebih relevan untuk dibangun rumah tapak khususnya diwilayah yang memiliki ketersediaan lahan seperti suburban dan rular.

Tabel 2.74
Proyeksi Jumlah Rumah Tapak dan Hunian Vertikal Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Rumah Tapak						Proyeksi Hunian Vertikal					
		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(8)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(8)
1	Kab. Bogor	1,431,412	1,462,499	1,493,587	1,524,674	1,555,762	1,586,849	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Sukabumi	960,773	972,532	984,290	996,049	1,007,807	1,019,565	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Cianjur	838,448	849,269	860,090	870,911	881,732	892,554	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Bandung	1,073,033	1,106,432	1,139,831	1,173,230	1,206,630	1,240,029	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Garut	799,716	809,471	819,225	828,979	838,734	848,488	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Tasikmalaya	586,351	592,876	599,401	605,926	612,451	618,976	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Ciamis	348,366	353,446	358,526	363,606	368,686	373,766	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Kuningan	297,033	302,089	307,144	312,199	317,255	322,310	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Cirebon	801,080	825,725	850,369	875,014	899,658	924,302	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Majalengka	380,928	388,471	396,013	403,556	411,098	418,640	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Sumedang	394,062	399,683	405,303	410,924	416,544	422,164	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Indramayu	555,984	572,465	588,946	605,427	621,908	638,388	0	0	0	0	0	0
13	Kab. Subang	486,981	490,963	494,945	498,927	502,908	506,890	0	0	0	0	0	0
14	Kab. Purwakarta	142,183	144,259	146,335	148,411	150,487	152,563	142,183	144,259	146,335	148,411	150,487	152,563
15	Kab. Karawang	309,921	315,464	321,007	326,550	332,093	337,636	309,921	315,464	321,007	326,550	332,093	337,636
16	Kab. Bekasi	426,747	439,190	451,633	464,075	476,518	488,961	426,747	439,190	451,633	464,075	476,518	488,961
17	Kab. Bandung Barat	210,045	216,436	222,827	229,218	235,609	242,000	210,045	216,436	222,827	229,218	235,609	242,000
18	Kab. Pangandaran	134,809	135,879	136,949	138,019	139,089	140,159	0	0	0	0	0	0
19	Kota Bogor	38,426	40,485	42,544	44,603	46,662	48,722	217,745	229,414	241,083	252,751	264,420	276,089
20	Kota Sukabumi	16,191	16,887	17,583	18,278	18,974	19,670	91,750	95,692	99,635	103,577	107,520	111,462
21	Kota Bandung	85,411	92,930	100,448	107,966	115,485	123,003	483,998	526,602	569,205	611,809	654,412	697,016
22	Kota Cirebon	12,910	13,787	14,665	15,542	16,419	17,297	73,156	78,128	83,100	88,072	93,044	98,016

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Rumah Tapak						Proyeksi Hunian Vertikal					
		(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(8)	(3)	(4)	(6)	(8)	(6)	(8)
23	Kota Bekasi	116,858	121,493	126,128	130,763	135,397	140,032	662,197	688,461	714,724	740,988	767,252	793,515
24	Kota Depok	72,287	75,985	79,684	83,382	87,081	90,779	409,626	430,584	451,542	472,501	493,459	514,417
25	Kota Cimahi	19,893	21,561	23,230	24,898	26,567	28,236	112,726	122,181	131,636	141,091	150,546	160,001
26	Kota Tasikmalaya	210,829	216,867	222,904	228,942	234,980	241,018	0	0	0	0	0	0
27	Kota Banjar	52,786	53,686	54,587	55,487	56,388	57,288	0	0	0	0	0	0
	Provinsi Jawa Barat	**10,803,464**	**11,030,828**	**11,258,193**	**11,485,557**	**11,712,922**	**11,940,286**	**3,140,094**	**3,286,411**	**3,432,727**	**3,579,044**	**3,725,360**	**3,871,677**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Hunian bagi masyarakat tidak terlepas dari penataan lingkungan di sekitarnya, lingkungan yang kumuh merupakan cerminan ketimpangan pembangunan dan rendahnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan infrastruktur dasar. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi, Jawa Barat menghadapi tekanan besar terhadap ketersediaan lahan permukiman, infrastruktur dasar, serta daya dukung lingkungan, yang berujung pada tumbuhnya kawasan kumuh di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pinggiran kota. Saat ini, sisa luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi pada tahun 2024 seluas 646,068 Ha dengan target penanganan tuntas kumuh ditahun 2030 (0 Ha Kawasan Kumuh)). Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat.

Gambar 2.142
Proyeksi Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Tahun 2025-2030

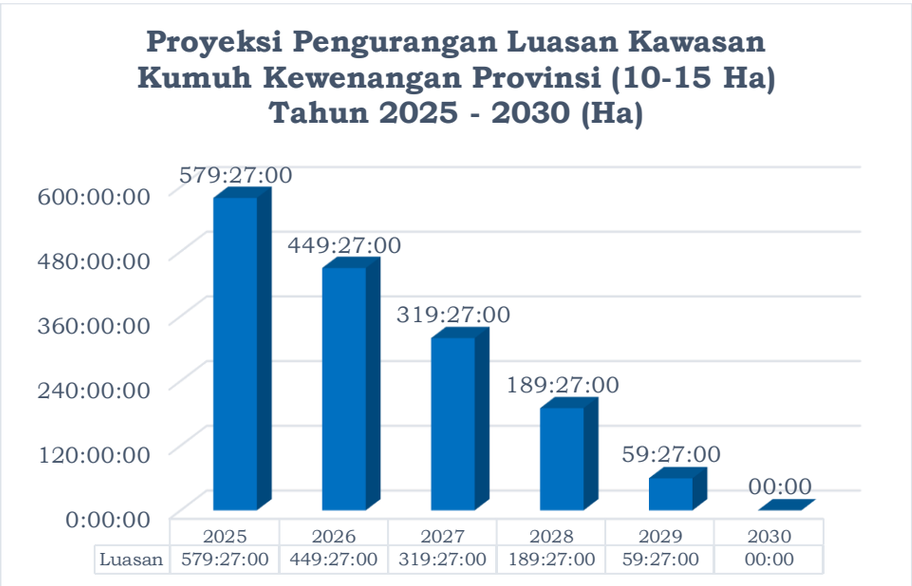

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (2025)

2.2.2 Kebutuhan Air Bersih

Sumber Daya Air adalah semua bentuk air yang terdapat di permukaan maupun bawah tanah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, irigasi, industri. Pengelolaan Sumber Daya Air harus dilakukan secara terpadu mengacu ke perundangan-undangan yang berlaku serta dokumen perencanaan yang telah disusun berjenjang dan

terintegrasi dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

A. Penyediaan Air Baku

Air baku merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor, termasuk rumah tangga, industri, dan pertanian. Karena sifatnya yang lintas sektor dan lintas wilayah, ketersediaan air baku perlu diperhitungkan secara menyeluruh dan holistik. Oleh karena itu, target lima tahun ke depan difokuskan pada ketercapaian pemenuhan kebutuhan air baku melalui formulasi kebijakan yang tepat dan pemutakhiran data sumber-sumber air, seperti waduk, situ, dan embung, yang dikaitkan dengan jumlah penduduk serta pemakaian air per orang (liter/detik). Sejalan dengan upaya tersebut, data baseline dan proyeksi kapasitas air baku di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2025 hingga 2045. Kapasitas air baku berdasarkan perhitungan pusat meningkat dari 4,93 m^3/detik pada 2025 menjadi 63,12 m^3/detik pada 2045, sementara perhitungan provinsi menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, dari 105,28 m^3/detik pada 2025 menjadi 278,71 m^3/detik pada 2045. Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi pendekatan metodologis, namun secara umum menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kapasitas air baku guna mendukung kebutuhan air di masa depan.

Gambar 2.143
Baseline dan Proyeksi Kapasitas Air Baku
Provinsi Jawa Barat

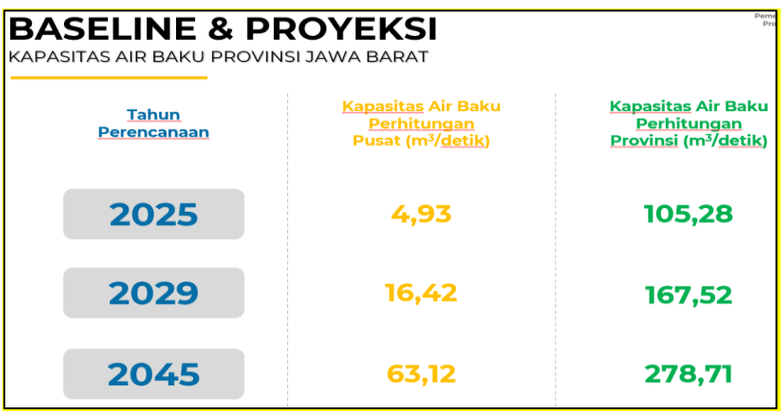

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Analisis kebutuhan air baku di Provinsi Jawa Barat didasarkan pada pemutakhiran data dari berbagai dokumen perencanaan seperti RISPAM, RTRW, RPSDA, dan RPJMN. Berdasarkan analisis tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurunkan Indeks Kapasitas Air Baku ke tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi kebijakan yang sejalan dengan visi RPJPD tahap I (2025–2030) yang dituangkan dalam RPJMD 2025–2029. Upaya ini ditujukan untuk membangun fondasi ketahanan air secara holistik yang mendukung pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, baik untuk kebutuhan domestik maupun mendukung arah industrialisasi daerah. Kebutuhan air minum sendiri dihitung berdasarkan konsumsi per kapita dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan klasifikasi jenis kebutuhan. Kebutuhan tersebut mencakup air domestik, non-domestik, dan kehilangan air, yang masing-masing dihitung berdasarkan jumlah penduduk terlayani, jenis fasilitas, serta estimasi kehilangan teknis, dengan asumsi peningkatan layanan hingga 100% dan perhitungan mempertimbangkan faktor koefisien jam puncak dan maksimum.

Di sisi lain, kebutuhan air untuk sektor industri dihitung dengan dua pendekatan utama. Jika tersedia data luas lahan industri, maka kebutuhan air dihitung menggunakan parameter baku sebesar 0,4 liter/detik/hektar, sebagaimana diterapkan di wilayah WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Ciliwung-Cisadane, dan WS Citanduy. Namun jika data lahan tidak tersedia, pendekatan yang digunakan adalah dengan mengasumsikan kebutuhan air industri sebesar 10% dari total konsumsi air domestik, mengikuti standar perhitungan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Metode ini digunakan, misalnya, di wilayah WS Ciwulan-Cilaki dan WS Cisadea-Cibareno. Dengan pendekatan ini, integrasi perencanaan kebutuhan air domestik dan industri diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan ketahanan air yang berbasis kebutuhan aktual dan proyeksi pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Tabel 2.75
Kebutuhan Air Baku Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	2025				2029				2045			
		Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/detik)	Kebutuhan Industri (m3/detik)	Total Kebutuhan Air (m3/detik) yang didefinisikan sebagai kapasitas air baku yang harus dipenuhi	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/detik)	Kebutuhan Industri (m3/detik)	Total Kebutuhan Air (m3/detik) yang didefinisikan sebagai kapasitas air baku yang harus dipenuhi	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum Domestik & Perkotaan (m3/detik)	Kebutuhan Industri (m3/detik)	Total Kebutuhan Air (m3/detik) yang didefinisikan sebagai kapasitas air baku yang harus dipenuhi
1	Kabupaten Bogor	5,721,618	7.87	4.48	12.35	5,878,930	14.55	4.93	19.48	6,420,826	26.49	6.72	33.21
2	Kota Bekasi	2,648,272	3.64	2.30	5.94	2,671,235	6.61	2.56	9.17	2,792,462	11.52	3.58	15.10
3	Kota Depok	2,167,961	2.98	1.94	4.92	2,198,531	5.44	2.21	7.65	2,433,126	10.04	3.30	13.34
4	Kota Bogor	1,083,776	1.49	0.80	2.29	1,105,163	2.74	0.86	3.60	1,171,187	4.83	1.12	5.95
5	Kabupaten Bekasi	3,303,023	4.54	1.84	6.38	3,411,889	8.44	1.93	10.37	3,777,149	15.58	2.28	17.86
6	Kabupaten Bandung	3,783,213	5.20	4.37	9.57	3,893,004	9.64	4.37	14.01	4,164,490	17.18	4.37	21.55
7	Kabupaten Bandung Barat	1,907,824	2.62	1.93	4.55	1,997,799	4.94	1.93	6.87	2,277,818	9.40	1.93	11.33
8	Kabupaten Purwakarta	1,062,965	1.46	1.72	3.18	1,109,328	2.75	1.83	4.58	1,242,355	5.12	2.24	7.36
9	Kabupaten Karawang	2,581,245	3.55	2.34	5.89	2,678,753	6.63	2.47	9.10	2,946,025	12.15	2.98	15.13
10	Kabupaten Subang	1,675,519	2.30	1.48	3.78	1,718,643	4.25	1.55	5.80	1,806,378	7.45	1.80	9.25
11	Kota Bandung	2,548,784	3.50	2.92	6.42	2,627,011	6.50	2.95	9.45	2,836,641	11.70	3.04	14.74
12	Kota Cimahi	606,375	0.83	0.66	1.49	635,779	1.57	0.69	2.26	722,769	2.98	0.82	3.80
13	Kabupaten Ciamis	1,266,331	1.74	1.85	3.59	1,291,249	3.20	1.96	5.16	1,332,571	5.50	2.41	7.90
14	Kota Tasikmalaya	759,370	1.04	0.02	1.06	792,012	1.96	0.02	1.98	891,049	3.68	0.02	3.70
15	Kota Banjar	211,964	0.29	1.57	1.86	219,946	0.54	1.66	2.20	241,303	1.00	2.03	3.03
16	Kabupaten Kuningan	1,225,493	1.69	0.71	2.40	1,268,644	3.14	0.24	3.38	1,394,061	5.75	0.49	6.24
17	Kabupaten Cirebon	2,413,814	3.32	0.03	3.35	2,504,797	6.20	0.03	6.23	2,727,616	11.25	0.03	11.28
18	Kabupaten Majalengka	1,363,755	1.88	0.02	1.90	1,404,378	3.48	0.03	3.50	1,504,487	6.21	0.03	6.24
19	Kota Cirebon	347,537	0.48	0.15	0.63	357,193	0.88	0.16	1.04	378,478	1.56	0.16	1.72
20	Kabupaten Indramayu	1,932,522	2.66	2.23	4.89	1,998,278	4.95	2.24	7.19	2,157,578	5.93	2.27	8.20
21	Kabupaten Sumedang	1,195,531	1.64	0.62	2.26	1,226,396	3.04	0.63	3.66	1,301,262	5.37	0.66	6.03
22	Kabupaten Garut	2,748,699	3.78	0.38	4.16	2,866,932	7.10	0.71	7.81	3,199,986	13.20	1.32	14.52
23	Kabupaten Tasikmalaya	1,933,814	2.66	0.27	2.92	1,979,391	4.90	0.49	5.39	2,071,033	8.54	0.85	9.40
24	Kabupaten Pangandaran	436,494	0.60	0.06	0.66	444,329	1.10	0.11	1.21	453,934	1.87	0.19	2.06
25	Kabupaten Cianjur	2,610,316	3.59	0.36	3.95	2,702,366	6.69	0.67	7.36	2,954,442	12.19	1.22	13.41
26	Kabupaten Sukabumi	2,852,107	3.92	0.39	4.31	2,939,162	7.27	0.73	8.00	3,153,314	13.01	1.30	14.31
27	Kota Sukabumi	370,681	0.51	0.05	0.56	389,833	0.96	0.10	1.06	453,436	1.87	0.19	2.06
JAWA BARAT		**50,759,003**	**69.79**	**35.49**	**105.28**	**52,310,971**	**129.47**	**38.05**	**167.52**	**56,805,776**	**231.36**	**47.35**	**278.71**

Sumber : Analisis pemutakhiran Rispam dan RPSDA,2024

Berdasarkan data dari bidang geologi dan air tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, total potensi air tanah di Jawa Barat mencapai 12.241,57 juta m^3/tahun. Bila dihitung secara koefisien, rata-rata potensi air tanah di Jawa Barat masuk dalam kategori kecil hingga sedang yaitu antara 0,5 - 0,75.

B. Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)

Layanan irigasi ini merupakan salah satu yang mendukung ketahanan pangan, berdasarkan capaian tahun 2018-2024 rata-rata capaian indeks kinerja sistem irigasi kisaran 52,02 - 57,04 % dimana kondisi tersebut masih dibawah kondisi baik, maka dalam perencanaan RPJMD tahun 2025-2029 ini dilakukan analisis perhitungan target capaian IKSI 5 tahun agar optimal menuju kondisi baik jaringan irigasi yaitu 70 %. Hal ini dilakukan dengan dasar agar kualitas layanan irigasi terus mengalami peningkatan secara signifikan baik secara sarana dan prasarana jaringan irigasi fungsional, kelembagaannya serta indeks produktivitas tanam. Ketercapaian kondisi baik irigasi di tahap fondasi (RPJMD 2025-2029) nanti dapat mendorong untuk dilakukannya modernisasi irigasi (antara lain keunggulannya efisiensi penggunaan air dan pengurangan biaya operasional), berikut ini adalah proyeksi capaian IKSI 2025-2030 di lingkup kewenangan Provinsi.

Tabel 2.76
Proyeksi Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

IKSI (Poin)	Baseline 2024	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Provinsi	57,04	58,53	59,33	60,57	61,17	61,30	62,00

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, optimalisasi IKSI ini perlu dukungan optimalisasi layanan irigasi juga di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota, adapun pada tahun 2024 kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten/Kota 30 – 55 persen dengan kondisi jaringan irigasi baik 36,83 persen, rusak ringan 16,24 persen, rusak sedang 18,68 persen serta rusak berat 28.25 persen. Untuk kondisi jaringan irigasi tahun 2024 kewenangan Pusat dengan rincian kondisi jaringan irigasi baik 40,31

persen, rusak ringan 23,58 persen, rusak sedang 20,37 persen serta rusak berat 15,75 persen. Mengacu pada capaian kondisi jaringan irigasi tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kondisi tersebut secara bertahap dengan menitikberatkan rehabilitasi pada kondisi jaringan irigasi rusak berat agar tercapai kondisi irigasi baik (60-80 persen) guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

C. Persentase Penurunan Titik Banjir pada 2 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

Penanganan banjir di wilayah sungai baik kewenangan Pusat dan Provinsi mengedepankan kombinasi metode teknis (perbaikan sungai, pembangunan infrastruktur, normalisasi, sudetan) dan non-teknis (pelestarian lingkungan, edukasi masyarakat, sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor). Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aliran sungai, mengurangi debit puncak banjir, dan menumbuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai. Untuk merepresentasikan penanganan banjir khususnya pada 2 WS kewenangan Provinsi yang merupakan indikator kinerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2025 maka dihitung proyeksi Persentase Penurunan Titik Banjir 2025-2030 pada 2 (dua) Wilayah Sungai kewenangan Provinsi yaitu Ciwulan-Cilaki dan Cisadea-Cibareno dengan target pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.77
Proyeksi Persentase Penurunan Titik Banjir pada 2 WS Kewenangan Provinsi

Indeks (%)	Baseline 2024	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proyeksi Persentase Penurunan Titik Banjir pada 2 WS Kewenangan Provinsi	N/A	100	88	76	64	52	40

Sumber: Hasil Analisis Bappeda – DSDA Provinsi Jawa Barat, 2025

Melalui program ini, diharapkan terjadi penurunan signifikan titik banjir di wilayah sungai tersebut. Pengelolaan drainase yang lebih baik juga menjadi bagian penting dalam strategi ini, dengan normalisasi saluran drainase dan pembangunan infrastruktur penampung air seperti embung

dan kolam retensi. Selain itu, revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan turut mendukung pengendalian debit air sehingga mengurangi risiko banjir.

Kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program ini, mengingat besarnya kebutuhan dana. Selain itu, program ini juga selaras dengan upaya peningkatan ketahanan pangan, karena pengendalian banjir berdampak langsung pada produktivitas lahan pertanian di sepanjang wilayah sungai.

D. Persentase Penurunan Titik Abrasi Pantai pada 2 Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

Abrasi pantai merupakan salah satu ancaman serius yang dihadapi wilayah pesisir di Jawa Barat, khususnya di dua wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi. Proses pengikisan pantai oleh gelombang dan arus laut ini telah menyebabkan hilangnya daratan, merusak pemukiman, infrastruktur, serta mengancam aktivitas sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Penanganan yang abrasi ini tidak hanya melindungi aset fisik dan lingkungan, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dengan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Keberhasilan penurunan titik abrasi di dua wilayah sungai kewenangan provinsi ini menjadi bagian dari program pengelolaan sumber daya air dan pengendalian bencana yang terintegrasi, yang terus dikembangkan untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir Jawa Barat terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Berikut ini adalah proyeksi Persentase Penurunan Titik Abrasi Pantai 2025-2030 pada 2 (dua) Wilayah Sungai kewenangan Provinsi yaitu Ciwulan-Cilaki dan Cisadea-Cibareno.

Tabel 2.78
Proyeksi Persentase Penurunan Titik Abrasi Pantai pada 2 WS Kewenangan Provinsi

Indeks (%)	Baseline 2024	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proyeksi Persentase Penurunan	N/A	100	91,67	83,34	75,01	66,68	50

Indeks (%)	Baseline 2024	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Titik Abrasi Pantai pada 2 WS Kewenangan Provinsi							

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

2.2.3 Kebutuhan Ketenagalistrikan

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita.

Tabel 2.79
Kebutuhan Tenaga Listrik Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

Kelompok Konsumen	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rumah Tangga	28.171	28.917	29.725	30.626	31.713	33.036
Industri	37.901	38.655	39.475	40.409	41.588	42.960
Bisnis	9.397	9.724	10.075	10.459	10.909	11.444
Publik	2.997	3.091	3.192	3.305	3.438	3.599
Transportasi	292	550	932	1.444	2.092	2.874
Total	**78.758**	**80.939**	**83.399**	**86.243**	**89.739**	**93.913**
Pertumbuhan (%)	**3,9**	**2,8**	**3,0**	**3,4**	**4,1**	**4,7**
Konsumsi Listrik/Kapita (kWh)	**1.508**	**1.535**	**1.566**	**1.604**	**1.654**	**1.716**

Sumber: Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Barat 2022-2050

Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Jawa Barat, kebutuhan energi/kelistrikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dengan target sebesar 1.340 kWh per kapita. Apabila diproyeksikan hingga tahun 2029, kebutuhan energi/kelistrikan sebesar 1.674 kWh per kapita dengan jumlah penduduk sebesar 52.327.900 jiwa. Pada tahun 2022 konsumsi listrik industri sebesar 34.898 GWh, rumah tangga 25.738 GWh, bisnis 8.263 GWh, publik 2.701 GWh, dan transportasi 19 GWh. Kemudian kebutuhan listrik meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2029, sektor industri sebesar 41.948 GWh, rumah 32.063 GWh, bisnis 11.035 GWh, publik 3.479 GWh, dan transportasi 2.358 GWh

Gambar 2.144
107 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

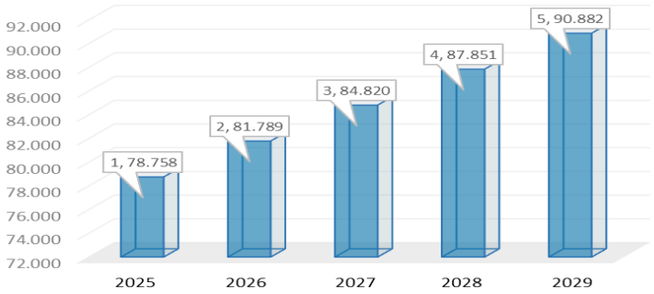

Sumber: Pengolahan Data BPS dan Data RUKD, 2023

Gambar 2.145
Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Sumber
Pembangkit Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

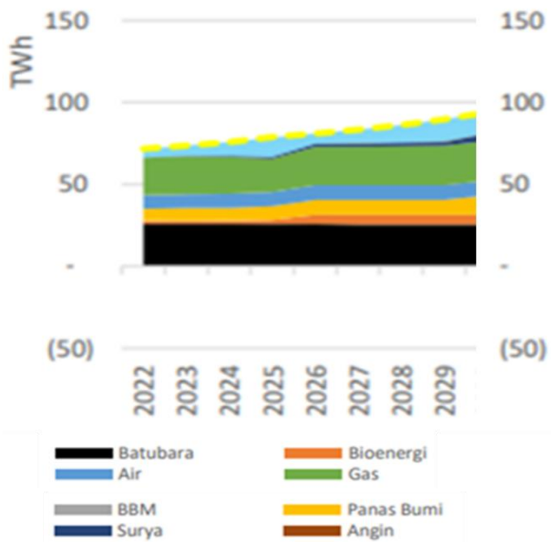

Sumber: Pengolahan Data RUKD 2023

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor industri di Provinsi Jawa Barat, kebutuhan akan pasokan listrik mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penyediaan sumber energi listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki keekonomian yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berdasarkan proyeksi kebutuhan energi pada awal periode perencanaan, pemenuhan kebutuhan listrik masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil, seperti batubara dan gas. Namun demikian, diharapkan mulai tahun 2025 proporsi penggunaan energi baru terbarukan mulai menunjukkan peningkatan, sehingga pada akhir periode

proyeksi kontribusi pembangkit listrik berbasis fosil dapat semakin berkurang secara bertahap.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk alokasi murni tahun 2025, terlihat bahwa beberapa wilayah mencatatkan kebutuhan penyambungan listrik yang cukup tinggi. Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah CPCL tertinggi, yang mengindikasikan adanya kebutuhan pengembangan infrastruktur kelistrikan yang signifikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Pangandaran menunjukkan jumlah CPCL yang relatif lebih rendah, mencerminkan cakupan sambungan listrik yang lebih terbatas dibandingkan wilayah lainnya. Realokasi anggaran yang dilakukan untuk mendukung CPCL diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses listrik serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah sasaran.

Meskipun percepatan penyambungan listrik telah diupayakan melalui alokasi murni maupun realokasi anggaran, data yang dihimpun dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bidang Ketenagalistrikan, menunjukkan masih terdapat sebanyak 4.112 desa yang belum terverifikasi jumlah rumah tangga yang belum berlistrik. Berdasarkan estimasi, kebutuhan sambungan listrik di desa-desa tersebut diperkirakan mencapai sekitar 360.371 satuan sambungan (SS). Mengingat banyaknya jumlah sambungan yang berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran, maka untuk penyelesaian program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun. Adapun rincian pelaksanaan dan estimasi kebutuhan anggaran per tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Estimasi Anggaran Penyelesaian Desa Belum Terverifikasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2030

Tahun	Jumlah Sambungan	Anggaran (Rp)
2025	72.720	186.251.670.599
2026	40.000	106.400.000.000
2027	45.000	124.200.000.000
2028	50.000	143.000.000.000
2029	55.000	162.800.000.000
2030	60.000	183.600.000.000
Total		**906.251.670.599**

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2.2.4 Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Perkembangan pengelolaan sampah yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dimana pendekatannya berkembang menjadi "kum ul – pilah – olah – angkut – u ang" a radigma ini memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS).

Dalam konteks dimensi waktu jangka pendek, menengah dan panjang, dimana periode RPJMD berada di dalamnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan paradigma *zero waste* dan prinsip *circular economy* dalam pengelolaan sampah, regulasi pengelolaan sampah berupaya meminimalisir jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan cara memaksimalkan pengelolaan sampah di sumbernya. Karenanya, kebutuhan sarana dan prasarana persampahan yang perlu relatif meningkat kedepan adalah sarana dan prasarana pengolahan sampah seperti TPST, TPS3R, Bank Sampah, atau bahkan dalam jangka waktu dekat adalah incenerator ramah lingkungan.

Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang pesat di Provinsi Jawa Barat, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan aktual dan kapasitas pengelolaan sampah yang ada. Karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat perlu difokuskan pada penanganan sampah di hulu sehingga tidak ada penambahan TPA dan TPPAS Regional. Adapun yang akan dibangun adalah yang sudah masuk dalam tahapan perencanaan dan konstruksi, khususnya untuk TPPAS Regional sehubungan didalamnya sudah menggunakan teknologi baik *Waste to Electricity* (WtE), *Refuse Derived Fuel* (RDF), maupun *Waste to Hydrogen* (WtH). Sedangkan penanganan sampah lebih menitikberatkan pada pembangunan TPST dan TPS3R.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan asumsi pertumbuhan dan proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2030, timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat diprediksi akan mencapai 26.906,69 Ton/hari. Kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada tahun 2030 diperkirakan akan membutuhkan tambahan 131 unit TPS3R kapasitas 2 ton/hari, 284 Unit Bank Sampah kapasitas 200 kg/hari,-97 unit TPST kapasitas 20 ton/hari, 299 unit incenerator ramah lingkungan kapasitas 1 ton/hari dan 5 ton/hari, pembangunan TPPAS Regional Nambo dengan mengunakan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF).

Tabel 2.81
Proyeksi Timbunan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2030

Kabupaten/Kota		Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/hari)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kabupaten							
1	Bogor	2.860,81	2.883,63	2.905,98	2.927,86	2.949,23	2.970,15
2	Sukabumi	1.682,74	1696,17	1.709,32	1.722,18	1.734,76	1.747,06
3	Cianjur	1.279,06	1.289,26	1.299,25	1.309,03	1.318,59	1.327,94
4	Bandung	1.324,12	1.334,69	1.345,03	1.355,16	1.365,05	1.374,73
5	Garut	1.236,92	1.246,78	1.256,45	1265,90	1.275,15	1.284,19
6	Tasikmalaya	773,52	779,69	785,74	791,65	797,43	803,09
7	Ciamis	519,20	523,34	527,39	531,36	535,24	539,04
8	Kuningan	600,49	605,28	609,97	614,56	619,05	623,44
9	Cirebon	1.279,32	1.289,52	1.299,52	1.309,30	1.318,86	1.328,21
10	Majalengka	681,88	687,32	692,65	697,86	702,96	707,94
11	Sumedang	490,17	494,08	497,91	501,65	505,32	508,90
12	Indramayu	1.140,19	1.149,28	1.158,19	1.166,91	1.175,43	1.183,76
13	Subang	686,96	692,44	697,81	703,06	708,20	713,22
14	Purwakarta	425,19	428,58	431,90	435,15	438,33	441,44
15	Karawang	1.161,56	1.170,83	1.179,90	1.188,79	1.197,46	1.205,96
16	Bekasi	2.312,11	2.330,56	2.348,62	2.366,30	2.383,58	2.400,48
17	Bandung Barat	763,13	769,22	775,18	781,01	786,72	792,29
18	Pangandaran	178,96	180,39	181,79	183,16	184,49	185,80
Kota/City							
1	Bogor	791,16	797,47	803,65	809,70	815,61	821,40
2	Sukabumi	189,05	190,55	192,03	193,48	194,89	196,27
3	Bandung	1.503,78	1.515,78	1.527,53	1.539,02	1.550,26	1.561,25
4	Cirebon	222,43	224,20	225,94	227,64	229,30	230,93
5	Bekasi	1.774,34	1.788,49	1.802,36	1.815,92	1.829,18	1.842,15
6	Depok	1.365,81	1.376,71	1.387,38	1.397,82	1.408,03	1.418,02
7	Cimahi	242,55	244,49	246,38	248,24	250,05	251,82
8	Tasikmalaya	341,72	344,44	347,11	349,73	352,28	354,78
9	Banjar	89,02	89,73	90,43	91,11	91,77	92,43
Jawa Barat		**25.916,19**	**26.122,92**	**26.325,43**	**26.523,57**	**26.717,22**	**26.906,69**

Sumber Data : Analisis Data Bappeda 2025

Tabel 2.82
Proyeksi Kebutuhan Penambahan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2030

Kabupaten/Kota		Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah																											
		Bank Sampah (0,2 Ton/Hari)						TPS3R (2 Ton/Hari)						Insinerator (5 Ton/Hari)						TPST (20 Ton/Hari)						TPPAS Regional					
Kabupaten		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bogor	5	4	3	2	2	0	0	3	3	3	3	3	0	6	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Sukabumi	0	0	9	9	9	0	0	2	2	1	1	1	0	3	2	1	0	4	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Cianjur	5	5	5	4	4	0	0	1	1	1	1	1	1	14	5	7	10	3	0	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0
4	Bandung	6	6	5	5	5	0	0	1	1	1	1	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	Garut	5	5	5	4	4	0	0	1	1	1	1	1	0	6	3	5	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Ciamis	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kuningan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Cirebon	5	5	5	5	4	0	0	1	1	1	1	1	0	2	1	2	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
10	Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	7	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Indramayu	4	4	3	3	3	0	0	1	1	1	1	1	0	2	3	4	1	1	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
13	Subang	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	12	0	1	3	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	Purwakarta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Karawang	4	4	4	3	3	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	2	0	4	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
16	Bekasi	0	8	7	6	5	0	0	3	2	2	2	2	1	3	2	2	1	3	0	1	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0
17	Bandung Barat	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pangandaran	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kota/City		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bogor	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	3	1	1	2	3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Sukabumi	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bandung	8	8	8	7	7	0	0	1	1	1	1	1	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Cirebon	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bekasi	2	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	3	0	1	5	0	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Depok	7	6	6	5	5	0	0	1	1	1	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Cimahi	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tasikmalaya	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Banjar	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Jawa Barat		**51**	**56**	**60**	**53**	**66**	**0**	**0**	**33**	**24**	**26**	**23**	**25**	**97**	**63**	**44**	**32**	**30**	**33**	**0**	**30**	**17**	**24**	**15**	**11**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**
Total		**286**						**131**						**299**						**97**						**2**					

Sumber Data : Hasil Analisis Bappeda 2025

Penting bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk segera mengatasi persoalan persampahan. Diperlukan investasi signifikan dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R dan TPST baru dan peningkatan teknologi dan kapasitas TPA yang sudah ada. Selain itu, pendekatan yang berbasis pada pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang efisien perlu diperkuat (Gambar 2.146). Langkah-langkah strategis juga harus diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Gambar 2.146
Strategi Penanganan Persampahan Jawa Barat Tahun 2025-2030

Strategi pengelolaan sampah di Jawa Barat diarahkan kepada dua upaya, yaitu pengurangan sebesar 30% dari timbulan sampah, dan penanganan serta pengolahan sebesar 70% dari timbulan sampah yang dihasilkan di setiap Kab/Kota.

Pada aksi pengurangan perlu dilakukan upaya pembatasan timbulan sampah dan daur ulang sampah. Pembatasan timbulan sampah dapat dilakukan terhadap sampah organik melalui kebijakan penggunaan biopori dengan kewajiban 1 RT untuk 1 biopori, pemanfaatan sisa makanan sebagai pakan ternak, pengembangan magotisasi di lingkup RT/RW, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran untuk peduli lingkungan. Sedangkan terhadap sampah non organik dimulai dengan kebijakan pembatasan penggunaan plastik, penggunaan barang yang mudah didaur ulang, serta kebijakan untuk industri besar maupun UMKM untuk meminimalisasi produksi sampah atau lebih menerapkan sirkular

ekonomi dalam proses bisnisnya. Selain itu upaya mendaur ulang juga perlu dioptimalkan dengan mengintegrasikan sistem penanganan sampah SIPSN dan Sampah kita, proses bisnis dan juga kepastian *offtaker*, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM.

Dalam upaya penanganan, kebijakan dari mulai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir perlu betul-betul dioptimalkan. Pengoptimalan TPS dan TPST yang tidak aktif, perlu sangat ditingkatkan sehingga bisa memaksimalkan pengumpulan serta pengolahan sampah yang ada. Dari sisi pengumpulan armada angkut serta kehadiran Stasiun Peralihan Antara (SPA) akan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pelayanan persampahan di setiap fasilitas pengolahan sampah, dan mencegah masuknya sampah ke badan air yang kemudian menghasilkan pencemaran air. Namun apabila timbulan sampah semakin banyak atau mungkin masuk dalam badan air, *incenerator* akan menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan Mengurangi sampah yang diangkut dari badan air / sungai (sebagai upaya normalisasi DAS dari sampah). Kemudian sebagai upaya terakhir adalah melakukan pengolahan pada Tingkat TPST ataupun TPA eksisiting dengan memanfaatkan teknologi seperti RDF, *Waste to Electicity* (WtE), *Waste to Hydrogen*, dan teknologi lainnya. Hal ini juga sebagai Upaya tindak lanjut atas Edaran Kementerian Lingkungan Hidup bahwa di tahun 2030, tidak boleh ada lagi pembukaan TPA baru. Maka mulai dari sekarang perlu dilakukan pengelolaan sampah dari sumbernya. Memilah sampah organik, anorganik, dan residu yang hanya bisa dibuang ke TPA.

Kaitan dengan TPA yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, terdapat beberapa TPPAS Regional yang sedang disiapkan oleh Jawa Barat diantaranya TPPAS Regional Legok Nangka, TPPAS Regional Nambo, TPPAS Regional Cirebon Raya, serta TPPAS Regional Bekapur, termasuk TPAS Sarimukti yang saat ini melayani persampahan Bandung Raya. Berikut ini gambaran mengenai sarana dan prasarana pengelolaan persampahan regional kewenangan provinsi yang ada di Jawa Barat.

1. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo

   Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo merupakan proyek pengelolaan sampah perkotaan dengan

pengembangan energi terbarukan, khususnya daur ulang sampah menjadi energi dengan skema KPBU dengan skema investasi KPBU *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan nilai investasi Rp. 900 milyar. PT Jabar Lestari (PT JBL) menggunakan teknologi MBT untuk mengkonversi sampah menjadi *Refused Derived Fuel* (RDF) dan kompos. Pada area 55 hektar, produksi RDF diestimasikan 30-35% dari potensi sampah yang masuk ke *plant*, produk tersebut langsung digunakan oleh PT. Indocement sebagai *offtaker*. Lokasi TPPASR ini berada di Desa Lulut dan Desa Nambo, Kabupaten Bogor, yang akan melayani Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. TPPAS Lulut Nambo dirancang untuk mengolah sekitar 1.800-2300 ton sampah per hari. Selain menghasilkan RDF TPPASR Nambo ini juga menghasilkan biomassa yang dapat digunakan sebagai pupuk. Rencana Tanggal Operasional Komersialnya ditargetkan pada tahun 2027.

Gambar 2.147
TPPAS Regional Nambo kapasitas 1853-2131 Ton/hari

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

   Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka merupakan proyek pengelolaan sampah perkotaan berlokasi di Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung dengan luas area 90 Ha dan kapasitas 1.853 – 2.131 ton/hari yang bersumber dari 6 (enam) kabupaten/kota yaitu, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Lingkup proyek meliputi desain, konstruksi, pendanaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah. TPPAS ini menggunakan teknologi pengolahan sampah modern seperti *Waste-to-Energy* (WTE), di mana sampah diubah menjadi energi melalui pembakaran yang menghasilkan listrik. Teknologi ini memungkinkan pemanfaatan sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi sumber energi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Rencana Tanggal Operasional Komersil (TOK) ditargetkan terjadi di tahun 2028/2029.

3. Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Sarimukti.

   Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Sarimukti semula merupakan Fasilitas pengolah kompos. Namun dikarenakan terdapat kedaruratan paska kejadian bencana TPA leuwigajah, maka Sarimukti menjadi prioritas pertama penanganan sampah Bandung Raya. Saat ini pelayanan sampah dilakukan di zona 1 sampai dengan zona 3 dengan metode *Controlled Landfill*. Di tahun 2025 DLH Provinsi Jawa Barat melalui UPTD sedang membangun tambahan zona pelayanan (zona 5) seluas 6,3 Ha untuk menangani persampahan Bandung Raya sebelum TPPAS Regional Legok Nangka beroperasi. Zona 5 ini akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025. Adapun untuk memitigasi kejadian bencana kebakaran akibat gas metan dari sampah di Sarimukti, di tahun 2025 DLH sedang menjajaki upaya kerjasama penanganan gas metan melalui skema pemanfaatan gas metan untuk diolah menjadi hidrogen (*waste to Hydrogen*-WtH) bersama pemerintah Korea dan juga Pertamina. Diharapkan dengan adanya zona 5 dan juga pengelolaan *Waste to Hydrogen* ini akan dapat mengatasi permasalahan persampahan di Bandung Raya.

2.2.5 Kebutuhan Infrastruktur Transportasi

Pertumbuhan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi. Namun, jika pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan yang memadai, maka potensi terjadinya kemacetan akan semakin tinggi.

2.2.5.1 Jalan

Dengan proyeksi jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 56,8 juta jiwa pada tahun 2045, untuk mengakomodasi tambahan 6,46 juta

penduduk, diperlukan penambahan jalan sekitar 812,19 km. Proyeksi kebutuhan penambahan panjang jalan pada tahun 2030 sebesar 295,90 km untuk mengakomodir pertambahan penduduk yang diperkirakan mencapai 2,35 juta jiwa, (dari semula total panjang jalan di Provinsi Jawa Barat sebesar 57.318,94 km menjadi 57.615,72 km). Jaringan ini terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.791 km, jalan provinsi 2.374,94 km, jalan kabupaten/kota 25.397,79 km, dan jalan desa 28.052 km. Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Bogor menjadi wilayah dengan panjang jalan tertinggi, sedangkan kota-kota seperti Cimahi dan Cirebon memiliki jaringan jalan yang relatif lebih terbatas. Informasi ini menjadi dasar perencanaan untuk pengembangan infrastruktur jalan yang merata dan berkelanjutan di Jawa Barat.

Tabel 2.83
Proyeksi Kebutuhan Penambahan Panjang Jalan Tahun 2030

No	Kab/Kota	Proyeksi Kebutuhan Penambahan Panjang Jalan 2030 (km)				
		Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Desa	Total
1	2	3	4	5	6	6
1	Kabupaten Bogor	1,05	1,12	14,99	16,07	33,23
2	Kabupaten Sukabumi	0,72	1,06	4,89	9,95	16,63
3	Kabupaten Cianjur	0,77	0,69	4,98	8,86	15,30
4	Kabupaten Bandung	0,90	1,09	12,19	7,84	22,01
5	Kabupaten Garut	0,43	1,27	3,69	10,87	16,26
6	Kabupaten Tasikmalaya	0,21	0,37	3,51	7,09	11,18
7	Kabupaten Ciamis	0,18	0,06	2,22	4,83	7,29
8	Kabupaten Kuningan	0,11	0,26	2,35	4,46	7,18
9	Kabupaten Cirebon	0,57	0,41	6,99	6,22	14,19
10	Kabupaten Majalengka	0,15	0,47	3,36	3,97	7,94
11	Kabupaten Sumedang	0,20	0,30	2,08	4,35	6,93
12	Kabupaten Indramayu	0,50	0,75	3,91	6,15	11,31
13	Kabupaten Subang	0,18	0,66	4,61	4,26	9,71
14	Kabupaten Purwakarta	0,21	0,29	3,62	2,17	6,29
15	Kabupaten Karawang	0,23	0,41	8,10	6,43	15,18
16	Kabupaten Bekasi	0,32	0,35	11,95	6,68	19,31
17	Kabupaten Bandung Barat	0,32	0,37	3,30	7,35	11,34
18	Kabupaten Pangandaran	0,19	0,01	1,05	1,25	2,51
19	Kota Bogor	0,72	0,31	5,21	0,00	6,24

No	Kab/Kota	Proyeksi Kebutuhan Penambahan Panjang Jalan 2030 (km)				
		Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Desa	Total
1	2	3	4	5	6	6
20	Kota Sukabumi	0,01	0,06	2,15	0,00	2,22
21	Kota Bandung	0,95	0,80	13,11	0,00	14,86
22	Kota Cirebon	0,10	0,08	1,84	0,00	2,02
23	Kota Bekasi	0,61	0,96	13,45	0,00	15,03
24	Kota Depok	0,21	0,07	12,11	0,00	12,39
25	Kota Cimahi	0,13	0,28	3,20	0,00	3,61
26	Kota Tasikmalaya	0,09	0,22	4,18	0,00	4,49
27	Kota Banjar	0,04	0,03	0,76	0,42	1,25
Provinsi Jawa Barat		**10,12**	**12,76**	**153,79**	**119,24**	**295,90**

Selain itu, kebutuhan penambahan ruas jalan baru dan peningkatan aksesibilitas juga berkaitan dengan rencana pembangunan ruas-ruas tol baru. Terkait hal ini, pemerintah pusat memiliki 9 (Sembilan) ruas Jalan Tol di lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat yang direncanakan untuk dibangun dan beroperasi pada periode 2025-2029, sebagaimana dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84
Ruas Rencana Jalan Tol di Lingkup Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2029

No	Rencana Ruas Tol	Panjang (km)	Indikasi Biaya Investasi	Tahun Konstruksi
1.	Cikunir-Karawaci (Elevated)	40,00	26.150.000.000.000	2027-2029
2.	Bogor-Serpong via Parung (JORR III)	32,03	12.352. 000.000.000	2025-2027
3.	Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III)	33,62	33.338.000.000.000	2025-2028
4.	Sukabumi-Ciranjang	28,80	9.405.000.000.000	2027-2029
5.	Ciranjang-Padalarang	27,80	7.792.000.000.000	2027-2029
6.	Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (segmen Gedebage-Nagreg)	45,21	34.190.000.000.000	2025-2029
7.	Akses Patimban Extend	22,69	5.470.000.000.000	2026-2028
8.	Caringin-Cisarua	18,41	8.083.000.000.000	2026-2028

No	Rencana Ruas Tol	Panjang (km)	Indikasi Biaya Investasi	Tahun Konstruksi
9.	Bandung Inter Urban Toll Road	18,10	10.113.000.000.000	2028-2029
	Total	**266,66**	**134.541.000.000.000**	

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Selain jalan, infrastruktur penting lain yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Jawa Barat adalah jembatan. Saat ini total unit jembatan yang menghubungkan ruas jalan provinsi di Jawa Barat sebanyak 1.295 unit (16.485 meter) dimana 58% nya memiliki umur teknis lebih dari 30 tahun. Dalam hal ini terdapat 1.194 unit yang memiliki nilai kondisi (NK) < 3 sementara 101 unit lainnya memiliki NK >= 3.

2.2.5.2 Perhubungan dan Aksesibilitas Transportasi

Infrastruktur perhubungan berkaitan erat dengan tingkat aksesibilitas yang didukung oleh ketersediaan simpul-simpul transportasi wilayah yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Barat. Tingkat aksesibiltas transportasi merupakan komponen penting dalam Pembangunan sektor transportasi di Jawa Barat.

Kondisi tingkat aksesibiltas di provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar 57,58 persen menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur di provinsi Jawa Barat masih perlu ditingkatkan. Komponen dari tingkat aksesibilitas yang perlu ditingkatkan pada tahun 2025-2029 yaitu tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi untuk tahun 2024 baru mencapai 51,28 persen, revitalisasi terminal tipe B yang sesuai standar baru mencapai 44,4 persen dari total 14 terminal yang menjadi tanggung jawab provinsi, dan *moda share* angkutan umum masih 13 persen hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan angkutan pribadi sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan di kawasan perkotaan di Jawa Barat.

Tabel 2.85
Tingkat Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat Tahun 2025-2030

No	Uraian	Base Line 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat		**57,58%**	**60,34%**	**62,14%**	**64,27%**	**65,41%**	**67,38%**	**68,49%**
A	**Konektivitas Transportasi di Jawa Barat**	**90,35%**	**90,47%**	**90,81%**	**91,10%**	**91,10%**	**93,48%**	**93,48%**
1	Konektivitas Transportasi Darat	95,11%	95,49%	96,49%	97,37%	97,37%	97,37%	97,37%
	- Jumlah Trayek AKDP	584	584	584	584	584	584	584
	- Jumlah Trayek AKAP	172	172	172	172	172	172	172
	- Jumlah Trayek BRT Cekungan Bandung	3	3	6	14	21	21	21
2	Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	83,08%	83,08%	83,08%	83,08%	83,08%	83,08%	83,08%
	- Panjang Jalur Aktif KAI (km)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	- Panjang Jalur Aktif KCIC (km)	290	290	290	290	290	290	290
	- Panjang Jalur Aktif LRT Jabodetabek (km)	68	68	68	68	68	68	68
3	Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	92,86%	92,86%	92,86%	92,86%	92,86%	100%	100%
	- Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan di Jawa Barat	13	13	13	13	13	14	14
B	**Kelancaran dan Keselamatan Transportasi**	**53,64%**	**61,32%**	**68,79%**	**71,90%**	**74,89%**	**77,25%**	**78,00%**
1	Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang	49,84%	65,80%	73,01%	80,20%	87,03%	93,68%	100%
	- Jumlah PJU (Penerangan Jalan Umum)	17.740	15.741	3.128	3.128	3.128	3.128	2843
	- Jumlah Rambu -Rambu	9.520	4.808	830	811	509	350	244
	- Jumlah Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	28.178	1.367	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	- Panjang Marka Jalan (meter)	1.537.270	395.030	217.886	217.886	217.886	217.886	217.886
	- Jumlah APILL/WARNING LIGHT	953	68	80	80	80	80	74
C	**Simpul Transportasi Sesuai Standar**	**9,39%**	**9,92%**	**10,68%**	**12,41%**	**13,16%**	**13,81%**	**14,49%**
1	Persentase Terminal Penumpang Tipe B yang sesuai standar	44,40%	46,53%	49,81%	57,92%	61,20%	63,90%	66,80%
2	Persentase Pelabuhan ASDP yang sesuai standar	13,09%	13,09%	14,95%	15,11%	15,19%	15,62%	16,11%
Modal Share Angkutan Umum		**0,00%**	**13,00%**	**13,26%**	**13,53%**	**13,80%**	**14,08%**	**14,36%**
D	**Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Darat**	0.00%	3.00%	6.00%	9.00%	12.00%	15.00%	18.00%

No	Uraian	Base Line 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
E	**Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Laut dan ASDP**	0.00%	1.00%	2.00%	3.00%	4.00%	5.00%	6.00%
F	**Persentase Peningkatan Pengguna Kereta Api**	0.00%	3.00%	6.00%	9.00%	12.00%	15.00%	18.00%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Di sisi lain, penyediaan infrastruktur perhubungan memperlihatkan tingkat ketersediaan simpul transportasi di Provinsi Jawa Barat yang meliputi Bandarudara, Pelabuhan, Terminal, Stasiun, Dryport. Bandarudara di Jawa Barat saat ini terdiri dari Bandara Internasional Kertajati (BIJB) merupakan bandara terbesar dan melayani penerbangan haji dan umroh serta penerbangan domestik dan internasional berlokasi di Kabupaten Majalengka yang dikelola oleh PT. BIJB dan Angkasa Pura II. Bandara militer dan charter yaitu Bandara Husein Sastranegara, Bandara Wiriadinata. Bandara Cakrabhuwana dan Bandara Nusawiru melayani bandara perintis dan latih. Pelabuhan pelabuhan laut di Jawa Barat dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan status pengelolaannya yang terdiri dari pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan lokal. Untuk pelabuhan umum terdiri dari Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan utama yang dikelola oleh Pelindo, Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan internasional berada di Kabupaten Subang, Pelabuhan Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi sebagai pelabuhan pengumpul, dan Pelabuhan Lokal Bojongsalawe di Kabupaten Pangandaran

Berikutnya adalah dryport atau inland port atau inland container depot (ICD) merupakan fasilitas terminal logistik darat yang berfungsi seperti pelabuhan laut sebagai tempat bongkar muat kontainer, penanganan kargo ekspor-impor, pemeriksaan bea cukai, penyimpanan sementara barang. Fungsi dari *dryport* menjadi simpul integrasi transportasi darat dengan pelabuhan. *Dryport* yang ada di Jawa Barat dan masih berjalan yaitu Cikarang *Dryport* yang mendukung efisiensi logistik industri Bekasi - Karawang. Potensi besar untuk mengembangkan *dryport* di Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang namun perlu akselerasi pembangunan. Namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengoptimalkan keberadaan simpul transportasi tersebut sehingga dapat memberikan *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel 2.86
Kondisi dan Rencana Infrastruktur Perhubungan (Simpul) Transportasi di Jawa Barat

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah Eksisting	Rencana 2030	Tingkat Ketersediaan	Keterangan
1	Terminal Tipe A	12	12	100,0%	Optimalisasi kondisi (kewenangan Pusat)
2	Terminal Tipe B	14	14	100,0%	Optimalisasi kondisi dan penyelesaian P3D

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah Eksisting	Rencana 2030	Tingkat Ketersediaan	Keterangan
3	Terminal Tipe C	129	129	100,0%	Optimalisasi kondisi
4	Bandar Udara	5	5	100,00%	Optimalisasi bandara eksisting (BIJB, Nusawiru) termasuk Bandara militer
5	Pelabuhan Laut	6	8	80,0%	Penambahan 2 Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Selatan (Pelabuhan Regional Palabuhan Ratu dan Pelabuhan Palangpang Ciletuh)
6	Pelabuhan ASDP	33	33	100,0%	Optimalisasi kondisi
7	Jembatan Timbang	8	8	100,0%	Optimalisasi kondisi (kewenangan Pusat)
8	Stasiun KA	142	142	100%	Penambahan stasiun implikasi pembangunan reaktivasi kereta api di Jawa Barat
9	Pelabuhan Khusus	14	14	100,0%	Pelabuhan khusus oleh swasta
10	Dry Port	2	3	66,7%	Optimasi kondisi serta penambahan dry port di Kawasan REBANA (Subang Smartpolitan oleh badan usaha)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Kondisi terminal tipe A, tipe B, dan Tipe C memiliki ketersediaan yang cukup baik, namun tantangan utamanya adalah bagaimana mengoptimalkan keberadaan terminal tersebut karena sebagian besar terminal yang sudah ada memiliki kondisi yang dibawah standar (kondisi terminal tipe B di provinsi jawa barat yang sesuai standar baru sebesar 44,4 persen pada tahun 2024) termasuk banyaknya terminal yang tidak optimal penggunaanya. Oleh karena itu Upaya optimalisasi melalui Pembangunan multi aktivitas di terminal-terminal penumpang angkutan darat serta rehabilitasi terminal sesuai standar perlu didorong dalam 5 tahun ke depan.

Selain terminal, simpul transportasi yang tidak kalah pentingnya di Provinsi Jawa Barat yaitu Bandar Udara dan Pelabuhan. Keberadaan Bandara Internasional Kertajati serta Pelabuhan Patimban perlu dioptimalkan untuk memberikan *multiplier effect dan* pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Rebana (Cirebon Patimban-Kertajati). Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan jawa barat bagian selatan, perlu di lakukan optimalisasi terhadap bandaran dan pelabuhan eksisting (Bandaran Nusawiru dan Palabuhan Bojong salawe) serta

pembangunan Pelabuhan Regional Palabuhan Ratu yang harus dibangun dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

2.2.5.3 Angkutan Massal Perkotaan

Penyediaan angkutan massal di kawasan perkotaan, terutama pada perkotaan metropolitan, merupakan urgensi saat ini yang dapat membantu efisiensi pemanfaatan energi dan mengurangi kemacetan dalam mendukung mobilitas penduduk perkotaan. Salah satu angkutan massal perkotaan yang direncanakan sejak jauh hari untuk dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Kondisi moda *share* angkutan umum masih 13 persen hal ini menunjukkan masih tingginya penggunaan angkutan pribadi sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan di kawasan perkotaan di Jawa Barat.

BRT Bandung Raya merupakan rencana besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan atau *Bus Rapid Transit (BRT)* di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai salah satu upaya untuk menekan kemacetan perkotaan dan merupakan layanan jasa angkutan massal perkotaan berupa bus yang memperkuat konektivitas moda transportasi. Pengembangan transportasi massal perkotaan melalui BRT ini direncanakan sebanyak 21 koridor yang akan beroperasi secara penuh di tahun 2027/2028, terdiri dari:1) 5 koridor eksisting yaitu Teman Bus program dari Kementerian Perhubungan dan 2) 16 koridor baru yang dilakukan secara bertahap.

Pengoperasian armada BRT menggunakan skema *Buy The Service* (BTS) atau membayar rupiah per kilometer, dimana pada prinsipnya pengoperasian armada menggunakan anggaran pemerintah untuk membeli layanan jasa angkutan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati. Dalam skema pembelian layanan ini, penumpang akan membayar tarif lebih rendah karena sebagian tarif dibayarkan oleh pemerintah.

Dalam prosesnya, pada tahun 2021 sudah disusun dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 5 Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di kawasan Perkotaan Cekungan Bandung untuk membangun sistem

Bus Rapid Transit (BRT). Adapun pembagian peran dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

- Pemerintah pusat: pembangunan infrastruktur (seperti jalur koridor khusus bus, halte, depo bus dan lain-lain).
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung menyiapkan perencanaan termasuk penyiapan regulasi dan kebijakan, memastikan pengadaan sarana operasional BRT, membentuk kelembagaan operasional angkutan jalan, dan menyelenggarakan operasional BRT.

Program Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ini selain sebagai salah satu upaya dalam menekan kemacetan perkotaan, juga secara bertahap merubah kebiasaan masyarakat dari yang terbiasa menggunakan angkutan pribadi menjadi pengguna angkutan umum.

2.2.5.4 Perkeretapiaan

Layanan perkerataapian di Jawa Barat sampai dengan tahun 2024 panjang jalur kereta api 1.761 km dengan jalur yang masih aktif sepanjang total 1.463 km dan non aktif 298 km. Jumlah perlintasan di jalan provinsi total 681 dengan rincian sebidang 522 dan tidak sebidang 159.

Mengacu pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018, ditargetkan bahwa hingga tahun 2030 jaringan perkeretaapian nasional akan mencapai panjang total 10.524 kilometer, termasuk di dalamnya 3.755 kilometer jaringan kereta api perkotaan. Di Provinsi Jawa Barat, sejumlah proyek strategis telah direalisasikan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tahun 2020–2024, di antaranya pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan jalur ganda Kiaracondong–Cicalengka. Selanjutnya, untuk periode 2025–2030, terdapat beberapa rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah Jawa Barat yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan. Beberapa rencana pembangunan perekeretaapian di Provinsi Jawa Barat diantaranya yang menjadi target tahun 2025-2030, sebagai berikut:

1) Perkerataapian Perkotaan Metropolitan Bandung

Permasalahan dan isu pengembangan perkeretaapian perkotaan saat ini belum sepenuhnya mendukung pergerakan dalam perkotaan karena lebih difokuskan untuk layanan antar kota. Belum terintegrasinya transportasi antar moda menjadi salah satu permasalahan transportasi perkotaan saat ini yang menjadi salah satu hambatan dalam mendorong perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan massal perkotaan. Selain itu permasalahan lahan yang selalu menjadi faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur.

Rencana pengembangan sistem perkeretaapian perkotaan di wilayah Metropolitan Bandung dilaksanakan secara bertahap selama periode lima tahun, yakni 2025 hingga 2030, dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Pendanaan Hibah Luar Negeri (PHLN). Pada tahap awal, yaitu tahun 2025–2026, kegiatan difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan, termasuk penyusunan *Feasibility and Business Case* (FBC) dalam kerangka KPBU, serta penyelesaian dokumen pendukung untuk pengajuan PHLN. Selanjutnya, pada tahun 2027–2028, akan dilakukan persiapan kelembagaan dan pembebasan lahan. Berikut adalah profil perkertaapian perkotaan metropolitan Bandung.

- P1 Koridor Tegalluar – Gedebage - Leuwipanjang (Timur-Barat), dengan estimasi panjang trase 16,5 km dengan 16 stasiun
- P2 Koridor Babakan Siliwangi – Leuwipanjang – Margahayu (Utara-Selatan), dengan estimasi panjang trase 16,4 km dengan 17 stasiun

2) Reaktivasi Jalur Kereta Api

Upaya reaktivasi jalur-jalur kereta api tersebut direncanakan sejalan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat, serta penguatan konektivitas antarwilayah. Secara keseluruhan, terdapat 11 jalur kereta api tidak aktif di wilayah Jawa Barat yang menjadi target program reaktivasi.

1. Reaktivasi Jalur KA segmen Padalarang-Cipatat
2. Reaktivasi Jalur KA Rancaekek-Tanjungsari
3. Reaktivasi Jalur KA Cirebon-Kadipaten
4. Reaktivasi Jalur KA Cikudapateuh-Soreang-Ciwidey

5. Reaktivasi Jalur KA Banjar-Cijulang
6. Reaktivasi Jalur KA Garut-Cikajang
7. Reaktivasi Jalur KA Tasikmalaya-Singaparna
8. Reaktivasi Jalur KA Dayeuhkolot-Majalaya
9. Reaktivasi Jalur KA Jatibarang-Indramayu
10. Reaktivasi Jalur KA Jatibarang-Karangampel
11. Reaktivasi Jalur KA Klangenan-Gunung Giwur

Dari 11 jalur kereta api yang tidak aktif tersebut berdasarkan hasil kajian studi kelayakan reaktivasi yang dilakukan oleh DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2022 terdapat 5 reaktivasi jalur KA yang menjadi prioritas. Penentuan kriteria prioritas reaktivasi jalur kereta api yaitu berdasarkan dokumen perencanaan, fungsi hubungan atau konektivitas wilayah, transportasi dan hambatan. Kelima koridor jalur kereta api yang menjadi prioritas sebagai berikut

1. Koridor Jalur KA Sukabumi-Cianjur-Padalarang
2. Koridor Jalur KA Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari
3. Koridor Jalur KA Cikudapateuh-Soreang-Ciwidey
4. Koridor Jalur KA Banjar-Pangandaran-Cijulang
5. Koridor Jalur KA Cibatu-Garut-Cikajang

Tabel 2.87
Prioritas Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat

Nama Jalur	Progres	Kendala	Estimasi	Potensi
Cipatat-Padalarang	• 2019 : Studi Kelayakan Pembangunan Shortcut Jalur KA antara Cipatat-Cilame • 2021 Studi investigasi dan rancang dasar jalur KA antara Cipatat-Sasaksaat-Cilame • 2023 DED jalur KA jembatan dan fasop jalur KA Cipatat-	• Belum dilakukan penetapan trase karena terjadi perubahan trase disebabkan trase awal terkendala kontur tanah yang tidak memungkinkan • Proses penyusunan dokumen perencanaan (DED) • Perlu dilakukan penyusunan	• Panjang 16,4 km • 4 Stasiun • Potensi Penumpang +/- 24.000 penumpang/hari • Perkiraan biaya prasarana +/- Rp1,1 T • Perkiraan biaya sarana +/- Rp 3,5 T	• Sebagai jalur penghubung ke jalur KA Lintas Selatan Jawa(Jakarta-Bogor-Bandung)

Nama Jalur	Progres	Kendala	Estimasi	Potensi
	Sasaksaat-Cilame	dokumen AMDAL, LARAP dan ANDALALIN • Perlu pengadaan lahan		
Rancaekek-Tanjungsari	• 2014 dan 2015 DED jalur dan jembatan oleh DIshub Jabar (perlu di reviu) • 2015 Disusun AMDAL • 2016 Dilakukan Pembahasan terkait kendala teknis dan jalan	• Dokumen perencanana (FS, SID/BED, DED, AMDAL, LARAP dan ANDALALIN)perlu dilakukan reviu dan penyusunan • Kendala terjadi banyak alih status lahan sehingga perlu pengadaan lahan • Terdapat 972 bangunan eksisting permanen hasil survey trase eksiting dari Rancaekek-Jatinangor • Perjanjian Kerjasama (PKS) perlu pembaharuan • Perlu pengecekan kembali kondisi kelayakan jembatan perbaikan atau dibangun baru	• Panjang 11,5 km • 2 Stasiun • Potensi Penumpang +/- 10.250 penumpang/hari • Perkiraan biaya (Tahun 2022) Perkiraan biaya sarana +/- Rp 2T Perkiraan biaya tahap Pembangunan prasarana +/- Rp 1T Lokasi: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang	• Penumpang Komuter • Kawasan Pendidikan (Jatinangor) • Kawasan industri
Banjar – Pangandaran-Cijulang	• 2007 Studi Kelayakan • 2014 DED pembangunan kembali lintas Banjar – Cijulang sepanjang 82, 16 km termasuk 3 terowongan dan 4 jembatan bentang > 50 m • 2016 Studi dampak sosial dan lahan	• Dokumen perencanana (FS, SID/BED, DED, AMDAL, LARAP dan ANDALALIN)perlu dilakukan reviu dan penyusunan • Terjadi banyak alih status lahan sehingga perlu pengadaan lahan • Diperlukan konstruksi	• Panjang 82,2 km • Banjar – Pangandaran 60 km • Pangandaran – Cijulang 22 km • 6 Stasiun 6 Halte • Potensi Penumpang +/- 7.500 penumpang/hari • Perkiraan biaya (Tahun 2022) prasarana +/- Rp 5.5 T Perkiraan biaya sarana +/- Rp 2 ,4 T	• Konektivitas Utara-Selatan • Wisata Pangandaran-Cijulang

Nama Jalur	Progres	Kendala	Estimasi	Potensi
	• 2017 studi kelayakan Pembangunan jalur KA Lintas Banjar Cijulang	jembatan dan terowongan		
Bandung - Ciwidey	• 2010 studi pengoperasian kembali dan LARAP lintas Laswi-Soreang-Ciwidey • 2015 DED Pembangunan kembali lintas Bandung-Ciwidey sepanjang 38 km termasuk 10 jembatan bentang >20 m	• Dokumen perencanana (FS, SID/BED, DED, AMDAL, LARAP dan ANDALALIN)perlu dilakukan reviu dan penyusunan • Kendala terjadi banyak alih status lahan sehingga perlu pengadaan lahan • Diperlukan konstruksi jembatan	• Panjang 37,8 km • 6 Stasiun • Potensi Penumpang +/- 5.087 penumpang/hari • Perkiraan biaya (Tahun 2022) sarana +/- Rp 3T Lokasi: Kota bandung dan Kabupaten Bandung	• Potensi Penumpang Komuter di Kawasan Bandung Selatan (area perumahan) • Kawasan wisata Ciwidey dan sekitarnya • Komoditas perkebunan
Cibatu – Garut - Cikajang	• 2016 Studi kelayakan rekativasi jalur KA antara Cibatu – Garut – Cikajang • 2020: segmen Cibatu – Garut sepanjang 19,7 km sudah diselesaikan reaktivasinya oleh PT KAI sednagkan segmen Garut – Cikajang ditunda dikarenakan maslaah lahan • 2022 beroperasi KA Cibatu-Garut	• Dokumen perencanana (FS, SID/BED, DED, AMDAL, LARAP dan ANDALALIN)perlu dilakukan reviu dan penyusunan • Terjadi banyak alih status lahan sehingga perlu pengadaan lahan	• Panjang trase 47,5 km • Cibatu-Garut 19,29 km • Garut-Cikajang 28,214 km • 2 Stasiun 4 Halte • Potensi Penumpang +/- 1.113 penumpang/hari • Perkiraan biaya (Tahun 2022) sarana +/- Rp 1T Lokasi: Kabupaten Garut	Potensi Wisata Kawasan Garut

Sumber: Hasil Kajian FS jalur Tidak Aktif di Provinsi Jawa Barat, 2022

Reaktivasi juga diarahkan untuk memperkuat akses menuju kawasan-kawasan wisata potensial seperti Pangandaran, Cijulang, dan Ciwidey. Upaya ini diharapkan dapat menyediakan moda transportasi alternatif yang efisien, ramah lingkungan, serta mendukung mobilitas

masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Namun demikian, pelaksanaan program reaktivasi dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kompleksitas dalam penertiban dan pembebasan lahan akibat alih fungsi lahan, belum optimalnya kesiapan dokumen perencanaan, serta perlunya pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting. Selain itu, pembangunan infrastruktur perkeretaapian juga memerlukan investasi yang besar. Berdasarkan kondisi tersebut, tahapan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat untuk lima tahun ke depan (2025–2030) akan disusun secara bertahap melalui program penyelenggaraan perkeretaapian yang terencana dan terintegrasi.

Tabel 2.88
Pentahapan Program Penyelenggaraan Perkeretaapian
Tahun 2025-2030

Tahun	Kegiatan	Penanggung Jawab
2025	Peninjauan ulang Studi Kelayakan (FS) reaktivasi jalur KA hasil kajian DJKA tahun 2022	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
2026	Penyusunan SID/BED dan dokumen perencanaan: AMDAL, LARAP, ANDALALIN	Pihak pelaksana konstruksi & Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
2027–2028	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Pihak pelaksana konstruksi
2027–2028	Persiapan pengadaan dan penertiban lahan berdasarkan hasil LARAP	Pemerintah Daerah & pihak terkait
2029–2030	Persiapan pelaksanaan konstruksi	Pemerintah Daerah & pelaksana teknis

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

3) Elektrifikasi Jalur Kereta Api

Elektrifikasi jalur kereta api juga menjadi bagian dari prioritas pengembangan perkeretaapian di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan jumlah *train set* dan jumlah perjalanan kereta api yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penumpang. Elektrifikasi jalur kereta api ini didorong pada kawasan perkotaan Cekungan Bandung khususnya pada segmen Padalarang – Cicalengka yang memiliki potensi permintaan (*demand*) pergerakan yang tinggi pada koridor Barat – Timur. Dalam 5 tahun kedepan rencana pelaksanaan elektrifikasi ini akan difokuskan pada lintas Padalarang-

Cicalengka Tahap I yaitu Segmen Bandung – Cicalengka dan lintas Padalarang - Cicalengka Tahap II Segmen Padalarang - Bandung.

2.2.6 Kebutuhan Pengelolaan Limbah

Sarana dan prasarana air limbah domestik Provinsi Jawa Barat direncanakan melalui kegiatan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik, terdiri dari SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD).

Penyelenggaraan air limbah domestik Provinsi Jawa Barat masih difokuskan pada pemenuhan akses layak yang identik dengan tersedianya Kloset Leher Angsa dilengkapi dengan Septik Tank dimana capaian sampai dengan tahun 2023 baru mencapai angka 74,88 persen. Tren ke depan, air limbah domestik (*blackwater, greywater*, dan lumpur tinja) dikelola secara aman sesuai dengan proxy SDGs 2030 yang identik dengan adanya kegiatan penyedotan tinja secara berkala pada septik tank atau IPAL Komunal (SPALD-S) dan dibuang ke IPLT atau sanitasi yang dikelola dalam sarana prasarana SPALD-T berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana air limbah domestik tersebut diperhitungkan berdasarkan proyeksi penduduk dan disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan akses layak serta akses aman sesuai dengan tahapan yang diarahkan pemerintah pusat. Pada tahun Provinsi Jawa Barat adalah : 1) SPALD-S (Tangki Septik Individual 1 (satu) KK sebanyak 9,835,514 unit dan Tangki Septik Komunal 10 (sepuluh) KK sebanyak 3,934,206 unit); 2) SPALD-T (SPALD-T Permukiman 70 KK sebanyak 147,695 KK dan SPALD-T IPAL Kota untuk 284,029 KK; 3) IPAl Kawasan/Perkotaan 10 (sepuluh) Unit ; 4) IPLT 429 unit, dengan jumlah penduduk sebesar 56.805.776 jiwa.

Penyelenggaraan air limbah domestik/sanitasi merupakan suatu sistem terintegrasi untuk peningkatan kesehatan lingkungan. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah domestik harus didukung dengan

perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui dukungan kegiatan pemicuan oleh tenaga kesehatan serta tata kelola serta dan penciptaan ekosistem yang mendorong penyelenggaraan SPALD yang berkelanjutan.

2.2.7 Kebutuhan Internet

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik Provinsi Jawa Barat terus berinovasi melalui pelayanan publik berbasis digital sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan publik berbasis digital tentu harus ditunjang dengan ketersediaan internet sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik berbasis digital. Digitalisasi pelayanan publik tidak akan berdampak signifikan apabila cakupan internet (*internet coverage*) sebagai akses untuk mendapatkan pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak menjangkau seluruh masyarakat atau belum merata. Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat infrastruktur digital termasuk untuk pengentasan desa *blank spot*. Namun, saat ini di Jawa Barat masih terdapat Desa *blank spot* (Desa Tanpa Sinyal Selular dan Desa Tanpa Konektivitas Fiber Optik) yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.89
Desa Blank Spot Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Desa Tanpa Sinyal Selular			Desa Tanpa Konektivitas Fiber Optik		
No	**Kabupaten**	**Jumlah Desa**	**No**	**Kabupaten**	**Jumlah Desa**
1	Kabupaten Bandung Barat	1	1	Kabupaten Bandung Barat	2
2	Kabupaten Garut	2	2	Kabupaten Bekasi	4
3	Kabupaten Sukabumi	3	3	Kabupaten Bogor	1
4	Kabupaten Tasikmalaya	1	4	Kabupaten Cianjur	22
			5	Kabupaten Garut	7
			6	Kabupaten Karawang	5
			7	Kabupaten Majalengka	2
			8	Kabupaten Purwakarta	2
			9	Kabupaten Subang	5
			10	Kabupaten Sukabumi	7
			11	Kabupaten Tasikmalaya	3
Jumlah		**7**	**Jumlah**		**60**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

2.2.8 Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Infrastruktur kesehatan adalah seluruh fasilitas, sumber daya, sistem, dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Infrastruktur kesehatan mencakup berbagai komponen yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat, serta untuk mengatasi penyakit dan kondisi kesehatan. Pemenuhan infrastruktur kesehatan salah satunya dilakukan melalui pemenuhan jumlah kebutuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan.

Gambar 2.148
Jumlah Rumah Sakit Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

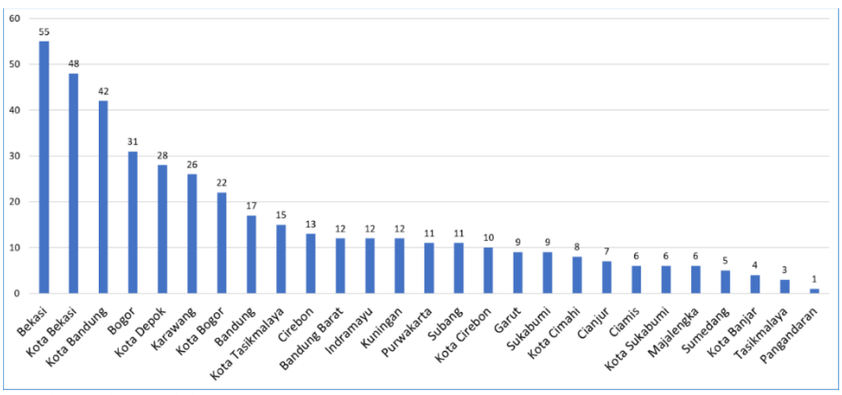

Sumber: SIM RS, Februari 2025

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Per 25 Februari 2025, jumlah rumah sakit sebanyak 429 unit dan distribusinya belum merata. Dari jumlah itu, rumah sakit swasta lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah rumah sakit pemerintah. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan swasta dalam peningkatan akses maupun kualitas RS cukup besar dan perlu dilibatkan dalam sistem rujukan.

Dalam merencanakan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya rumah sakit dapat dilakukan dengan menghitung kebutuhan tempat tidur terhadap jumlah penduduk. Menurut WHO, suatu negara idealnya memiliki 1 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1000 penduduk, sehingga kecukupan tempat tidur suatu daerah dihitung dengan rasio tersebut. Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022, jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit sebanyak 57.118 unit Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat memiliki 429 Rumah Sakit dengan jumlah tempat

tidur sebanyak 60.692 yang tersebat di 27 Kab/Kota, mengacu pada standar WHO tersebut maka ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Provinsi Jawa Barat sudah mencukupi. Namun jika dibagi berdasarkan regional di Provinsi Jawa Barat masih terdapat wilayah yang kurang tempat tidurnya.

Tabel 2.90
Kecukupan Tempat Tidur Rumah Sakit Berdasarkan Regional Provinsi Jawa Barat

Kota/Kab	Jumlah Penduduk 2024	Kebutuhan BED 1:1000	Jumlah BED Existing	Rasio 1 : 1.000 Penduduk	Keterangan
Bandung	3.753.116	3.753	2.463	0,66	Kurang TT
Bandung Barat	1.884.191	1.884	1.193	0,63	Kurang TT
Bekasi	3.273.868	3.274	6.585	2,01	Lebih TT
Bogor	5.682.303	5.682	5.178	0,91	Kurang TT
Ciamis	1.259.226	1.259	791	0,63	Kurang TT
Cianjur	2.584.994	2.585	1.166	0,45	Kurang TT
Cirebon	2.387.961	2.388	2.615	1,10	Lebih TT
Garut	2.716.950	2.717	1.201	0,44	Kurang TT
Indramayu	1.914.037	1.914	1.766	0,92	Kurang TT
Karawang	2.554.384	2.554	3.629	1,42	Lebih TT
Kota Bandung	2.528.163	2.528	6.866	2,72	Lebih TT
Kota Banjar	209.791	210	515	2,45	Lebih TT
Kota Bekasi	2.644.058	2.644	5.868	2,22	Lebih TT
Kota Bogor	1.078.351	1.078	3.410	3,16	Lebih TT
Kota Cimahi	598.698	599	1.579	2,64	Lebih TT
Kota Cirebon	344.851	345	1.459	4,23	Lebih TT
Kota Depok	2.163.635	2.164	3.959	1,83	Lebih TT
Kota Sukabumi	365.735	366	1.096	3,00	Lebih TT
Kota Tasikmalaya	750.727	751	1.373	1,83	Lebih TT
Kuningan	1.213.927	1.214	1.372	1,13	Lebih TT
Majalengka	1.352.541	1.353	936	0,69	Kurang TT
Pangandaran	434.104	434	235	0,54	Kurang TT
Purwakarta	1.050.344	1.050	1.622	1,54	Lebih TT
Subang	1.663.156	1.663	1.038	0,62	Kurang TT
Sukabumi	2.828.024	2.828	1.659	0,59	Kurang TT
Sumedang	1.187.133	1.187	775	0,65	Kurang TT
Tasikmalaya	1.920.921	1.921	343	0,18	Kurang TT
TOTAL	**50.345.189**	**50.345**	**60.692**		

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan data diatas, dari 27 Kab/kota masih terdapat 13 Kab/Kota yang jumlah ketersediaan tempat tidurnya di bawah standar minimal. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan fasilitas kesehatan terutama rumah sakit berfokus pada pemenuhan tempat tidur pada 13 Kab/Kota tersebut. Rencana pengembangan Rumah Sakit selama Tahun 2025-2030 dihitung berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2030

sebanyak 52.698.970 dan kebutuhan tempat tidur sebanyak 52.699 unit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dihitung proyeksi kebutuhan tempat tidur pada 13 Kab/Kota yang nantinya akan diklasifikasikan kepada pembangunan RS sesuai dengan standar jumlah tempat tidur masing-masing tipe, dengan tujuan agar semua Kabupaten/kota di Jawa Barat dapat memenuhi standar minimal 1:1.000. Proyeksi kebutuhan penambahan tempat tidur dan Rumah Sakit Tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 2.91
Proyeksi Kebutuhan Penambahan Tempat Tidur dan Rumah Sakit pada 13 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kota/Kab	Proyeksi 2030			Proyeksi Kebutuhan Penambahan 2026-2030																	
					2025			2026			2027			2028			2029			2030		
	Jumlah Penduduk (2030)	Kebutuhan BED 1:1000 (2025)	Jumlah BED Existing (Des 2024)	Kebutuhan Penamba-han BED	Bed	RS	Tipe RS	Bed	RS	Tipe RS	Bed	RS	Tipe RS	Bed	RS	Tipe RS	Bed	RS	Tipe RS	Bed	RS	Tipe RS
Bandung	3.920.450	3.920	2.463	1.457	150	1	C	150	1	C	300	2	B,C	300	2	B,C	300	2	B,C	257	2	B,C
Bandung Barat	2.020.290	2.020	1.193	827	150	1	C	150	1	C	300	2	B,C	227	1	B	-	-	-	-	-	-
Bogor	5.918.260	5.918	5.178	740	150	1	C	150	1	C	300	2	B,C	140	1	C	-	-	-	-	-	-
Ciamis	1.297.480	1.297	791	506	150	1	C	150	1	C	206	1	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cianjur	2.725.380	2.725	1.166	1.559	300	2	B, C	150	1	C	300	2	B,C	300	2	B,C	300	2	B,C	209	1	B
Garut	2.896.490	2.896	1.201	1.695	300	2	B, C	300	2	B,C	300	2	B,C	300	2	B,C	300	2	B,C	195	1	C
Indramayu	2.014.720	2.015	1.766	249	150	1	C	99	1	D	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Majalengka	1.414.530	1.415	936	479	150	1	C	150	1	C	179	1	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pangandaran	446.290	446	235	211	150	1	C	61	1	D	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subang	1.729.420	1.729	1.038	691	150	1	C	150	1	D	391	2	B,C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukabumi	2.960.930	2.961	1.659	1.302	150	1	C	300	2	B,C	300	2	B,C	300	2	B,C	252	2	C	-	-	-
Sumedang	1.234.110	1.234	775	459	150	1	C	150	1	C	159	1	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasikmalaya	1.990.790	1.991	343	1.648	150	1	C	300	2	B,C	300	2	B,C	300	2	B,C	300	2	B,C	298	2	B,C
TOTAL	**30.569.140**	**30.569**	**18.744**	**11.825**	**2.250**	**15**		**2.260**	**16**		**3.036**	**19**		**1.867**	**12**		**1.452**	**10**		**960**	**6**	

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam hal pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit di kabupaten/kota terutama pada daerah perbatasan atau yang sulit mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan rujukan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Provinsi dalam upaya kesehatan salah satunya adalah upaya kesehatan perorangan (rujukan) dan upaya kesehatan masyarakat tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota serta penerbitan izin RS Kelas B, sehingga dalam melakukan pengembangan RS di Jawa Barat dapat dilakukan terhadap RS Miliki Pemerintah provinsi dan RS di daerah lintas batas Kabupaten/Kota. Meskipun penerbitan izin RS Kelas C berada pada kewenangan Kabupaten/Kota, pemerintah pusat memiliki komitmen sesuai dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk mengembangkan atau membangun RS Tipe C di Kab/Kota oleh sebab itu Pemerintah Provinsi juga dapat melakukan hal yang sama dalam mendukung pembangunan RS Tipe C di Kabupaten/Kota terutama pada daerah perbatasan atau sulit mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan rujukan.

Selanjutnya selain dengan membangun dan mengembangkan RS, dalam upaya menambah kekurangan tempat tidur, sesuai dengan arahan Gubernur dapat dikembangkan pula puskesmas rawat inap di Kabupaten/Kota walaupun peran puskesmas tidak bisa menggantikan peran rawat inap yang diberikan oleh Rumah Sakit. keberanaan puskesmas rawat inap mampu menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah atau ditangani lebih awal. Pembangunan puskesmas rawat inap sesuai dengan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas dinyatakan bahwa pelayanan rawat inap di puskesmas diselenggarakan di Puskesmas dengan kategori perdesaan, terpencil dan sangat terpencil namun puskesmas perkotaan dapat melaksanakan pelayanan rawat inap atas persetujuan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan standar minimal jumlah puskesmas pada suatu daerah adalah 1:30.000 yang artinya 1 puskesmas dapat memberikan pelayanan kepada 30.000 penduduk. Tahun 2024 jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.106 yang terdiri dari 822 Puskesmas Non Rawat Inap dan 284 Puskesmas Rawat Inap. Dibandingakan dengan jumlah proyeksi penduduk Jawa Barat Tahun 2030 sebanyak 52.698.970 maka

minimal jumlah puskesmas yang harus dimiliki Jawa Barat adalah sebanyak 1.757 puskesmas sehingga perlu ada penambahan pembangunan puskesmas sebanyak 665 selama 2025-2030.

Tabel 2.92
Proyeksi Kebutuhan Penambahan Puskesmas di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 2030	Rasio Puskesmas terhadap Penduduk 1 : 30.000	Jumlah Puskesmas Ekisiting (Des 2024)	Kebutuhan Penambahan Puskesmas 2025-20230
1	Kab Bandung	3.920.450	131	62	69
2	Kab Bandung Barat	2.020.290	67	32	35
3	Kab Bekasi	3.439.110	115	51	64
4	Kab Bogor	5.918.260	197	101	96
5	Kab Ciamis	1.297.480	43	37	6
6	Kab Cianjur	2.725.380	91	47	44
7	Kab Cirebon	2.527.540	84	60	24
8	Kab Garut	2.896.490	97	67	30
9	Kab Indramayu	2.014.720	67	49	18
10	Kab Karawang	2.703.130	90	50	40
11	Kab Kuningan	1.279.430	43	37	6
12	Kab Majalengka	1.414.530	47	32	15
13	Kab Pangandaran	446.290	15	15	-
14	Kab Purwakarta	1.120.920	37	20	17
15	Kab Subang	1.729.420	58	40	18
16	Kab Sukabumi	2.960.930	99	58	41
17	Kab Sumedang	1.234.110	41	35	6
18	Kab Tasikmalaya	1.990.790	66	40	26
19	Kota Bandung	2.646.570	88	80	8
20	Kota Banjar	221.940	7	10	-
21	Kota Bekasi	2.676.980	89	48	41
22	Kota Bogor	1.110.510	37	25	12
23	Kota Cimahi	643.130	21	13	8
24	Kota Cirebon	359.610	12	22	-
25	Kota Depok	2.206.170	74	38	36
26	Kota Sukabumi	394.620	13	15	-
27	Kota Tasikmalaya	800.170	27	22	5
	Total	**52.698.970**	**1.757**	**1.106**	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam menambah tempat tidur pada fasilitas kesehatan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Jenis fasilitas kesehatan yang akan dibangun atau ditingkatkan kapasitasnya;

2. Tipe rumah sakit yang akan dibangun dengan mempertimbangkan jumlah kasus penyakit tertinggi di setiap daerah;
3. Lokasi pembangunan infrastruktur kesehatan berdasarkan kebutuhan dan dokumen RTRW masing-masing daerah; dan
4. Jenis pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat.

2.2.9 Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yakni lebih dari 50 juta jiwa atau sekitar 20% dari total populasi nasional, menghadapi tantangan strategis dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan menengah. Tingginya jumlah penduduk ini berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan di seluruh jenjang, khususnya pada tingkat SMA, SMK, dan SLB. Namun demikian, pertumbuhan permintaan pendidikan tidak tersebar merata. Wilayah perkotaan cenderung menjadi pusat pertumbuhan peserta didik, sedangkan daerah-daerah lain masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah keterbatasan daya tampung sekolah serta kurangnya ruang kelas yang layak. Banyak satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, termasuk satuan pendidikan luar biasa (SLB), terpaksa menyelenggarakan proses belajar mengajar di ruang-ruang non-instruksional seperti laboratorium, aula, atau ruang praktik akibat kekurangan ruang kelas. Berdasarkan kondisi terkini, tercatat terdapat 14 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, serta 128 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, yang menunjukkan adanya ketimpangan spasial layanan pendidikan menengah. Di sisi lain, kebutuhan untuk pembelian lahan sekolah dari satuan pendidikan yang telah terdata mencapai lebih dari Rp551 miliar. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun rencana pendanaan infrastruktur pendidikan untuk periode 2025–2029, dengan estimasi total anggaran yang dibutuhkan melebihi Rp3,3 triliun.

Dari sisi kebutuhan infrastruktur fisik, proyeksi kebutuhan ruang kelas baru (RKB) untuk mendukung pendidikan menengah mencapai 35.098 unit berdasarkan kondisi rombongan belajar (rombel) eksisting, dan

meningkat drastis hingga 628.841 unit apabila mengacu pada kebutuhan ideal dengan jumlah maksimal rombel. Untuk mengatasi persoalan ini, dua bentuk intervensi strategis yang mendesak dilakukan, yakni **pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)** di wilayah yang belum memiliki sekolah, **serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)** di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar. Kedua upaya ini menjadi langkah penting guna memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing di Jawa Barat ke depan.

2.2.9.1 Unit Sekolah Baru

Pemerataan akses pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar, terutama di tingkat kecamatan. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat 127 kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan negeri jenjang SMA/SMK (Tabel 2.93), dan 14 kecamatan di antaranya bahkan sama sekali tidak memiliki sekolah menengah, baik negeri maupun swasta (Tabel 2.94). Ketimpangan ini menghambat akses peserta didik, meningkatkan risiko putus sekolah, serta memperbesar beban biaya pendidikan akibat jauhnya jarak tempuh. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi strategis melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) guna mempercepat pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Tabel 2.93
Jumlah Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMK Sederajat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1	Kabupaten Bandung	8
2	Kabupaten Ciamis	9
3	Kabupaten Cianjur	2
4	Kabupaten Cirebon	13
5	Kabupaten Garut	9
6	Kabupaten Indramayu	4
7	Kabupaten Karawang	1
8	Kabupaten Kuningan	13
9	Kabupaten Majalengka	5
10	Kabupaten Pangandaran	1
11	Kabupaten Purwakarta	1
12	Kabupaten Subang	5
13	Kabupaten Sukabumi	15
14	Kabupaten Sumedang	11
15	Kabupaten Tasikmalaya	14
16	Kota Bandung	11

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
17	Kota Cirebon	1
18	Kota Sukabumi	2
19	Kota Tasikmalaya	2
Total		**127**

Sumber: dapo.kemdikbud.go.id, 2024

Tabel 2.94
Daftar Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMA Negeri dan Swasta

No	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Kec. Banjaranyar	Kabupaten Ciamis
2	Kec. Sukamantri	
3	Kec. Tambaksari	
4	Kec. Cisarua	Kabupaten Sumedang
5	Kec. Cisitu	
6	Kec. Ganeas	
7	Kec. Jatigede	
8	Kec. Cibeureum	Kabupaten Kuningan
9	Kec. Cilebak	
10	Kec. Cimahi	
11	Kec. Hantara	
12	Kec. Kalimanggis	
13	Kec. Karangkancana	
14	Kec. Nusaherang	

Sumber: dapo.kemdikbud.go.id, 2024

Kabupaten Kuningan merupakan daerah dengan jumlah kecamatan terbanyak yang belum memiliki satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/sederajat) baik negeri maupun swasta, yaitu sebanyak 7 kecamatan. Kabupaten Ciamis menyusul dengan 3 kecamatan, sedangkan Kabupaten Sumedang terdapat 4 kecamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi layanan pendidikan menengah yang masih cukup nyata di beberapa wilayah, sehingga memerlukan prioritas pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan.

Gambar 2.149
Jumlah Kecamatan yang Tidak Memiliki SMA/SMK Sederajat Negeri

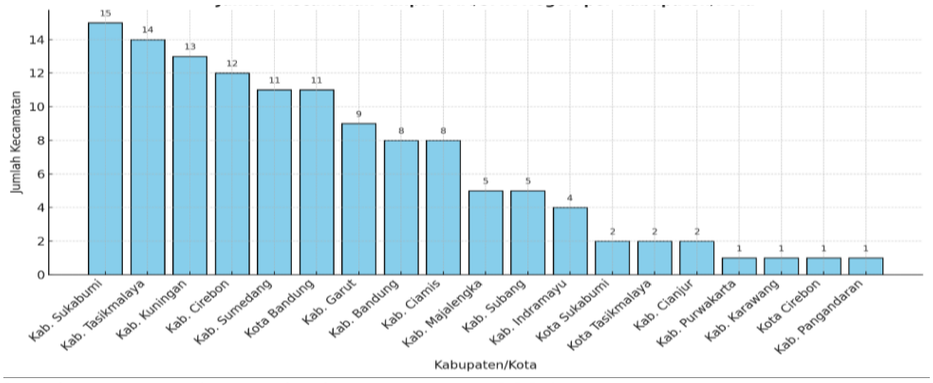

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah kecamatan terbanyak yang belum memiliki satuan pendidikan negeri jenjang SMA/SMK negeri, yakni sebanyak 14 kecamatan. Disusul oleh Kabupaten Sukabumi sebanyak 15 kecamatan dan Kabupaten Kuningan sebanyak 13 kecamatan. Selain itu, beberapa kota seperti Kota Bandung dan Kota Sukabumi juga masih memiliki kecamatan yang belum terjangkau sekolah negeri. Kondisi ini menunjukkan perlunya prioritas pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan menengah negeri di Jawa Barat.

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) menjadi prioritas di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri jenjang SMA atau SMK. Beberapa daerah dengan kebutuhan tertinggi antara lain Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Ciamis. Kota Bekasi mengajukan tiga USB dengan total anggaran Rp32,7 miliar, mencerminkan tingginya tekanan kapasitas di kawasan padat penduduk tersebut. Kabupaten Bandung mengusulkan empat USB senilai Rp28,4 miliar, sementara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor masing-masing mengajukan dua USB dengan kebutuhan anggaran Rp20,7 miliar dan Rp18,2 miliar. Kabupaten Ciamis juga mengajukan satu USB dengan nilai Rp11,29 miliar, sejalan dengan luasnya sebaran desa di wilayah tersebut. Rincian usulan pembangunan USB dari masing-masing daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Rincial Kebutuhan Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru

Kabupaten/Kota	Penduduk	Keterangan
Kota Bekasi	3 unit	Rp32,7 miliar
Kab. Bandung	4 unit	Rp28,4 miliar
Kab. Bekasi	2 unit	Rp20,7 miliar
Kab. Bogor	2 unit	Rp18,2 miliar
Kab. Ciamis	1 unit	Rp11,29 miliar

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2.2.9.2 Ruang Kelas Baru

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung penyediaan infrastruktur pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Kebutuhan ini terutama dirasakan di satuan pendidikan luar biasa (SLB) yang memerlukan ruang pembelajaran dengan karakteristik khusus. Sejumlah SLB di Kabupaten Ciamis, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Subang telah mengidentifikasi kebutuhan tambahan ruang kelas untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih optimal.

Sebagian besar pembangunan RKB yang diusulkan bertujuan untuk menggantikan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat serta menambah kapasitas akibat peningkatan jumlah peserta didik. Di SLB, kebutuhan ruang menjadi lebih kompleks karena diperlukan fasilitas tambahan seperti ruang terapi dan ruang pembelajaran individual. Secara keseluruhan, hasil rekapitulasi dari berbagai satuan pendidikan menunjukkan bahwa kekurangan ruang kelas juga terjadi di banyak sekolah umum, baik negeri maupun swasta, mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Kondisi ini menyebabkan sejumlah sekolah harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar di ruang non-belajar seperti laboratorium, aula, atau ruang praktik.

Dengan demikian, pembangunan ruang kelas baru merupakan prioritas yang penting untuk memastikan terselenggaranya proses pembelajaran yang layak, aman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dan merata, guna menjamin seluruh peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, memperoleh akses pendidikan dalam lingkungan yang memadai.

Gambar 2.150
Kebutuhan RKB Berdasarkan Perbandingan Jumlah Rombongan Belajar Dengan Ruang Kelas Eksisting

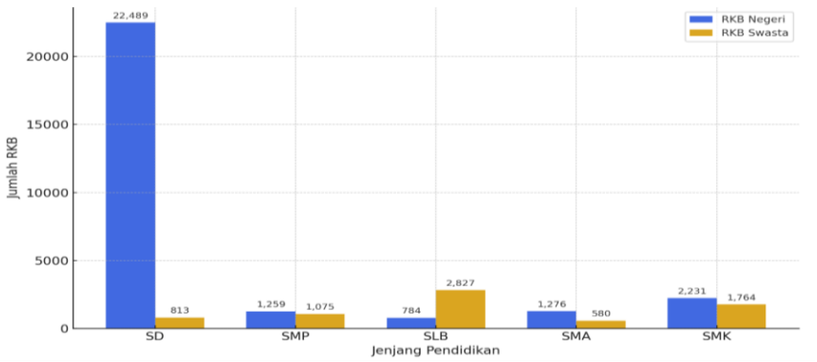

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan perbandingan jumlah rombongan belajar dengan ruang kelas eksisting, terlihat bahwa jenjang Sekolah Dasar (SD) masih mendominasi kebutuhan dengan 23.302 unit RKB, baik di sekolah negeri (22.489 unit) maupun swasta (813 unit). Ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan dasar masih menjadi prioritas utama dalam pemenuhan sarana pendidikan di Jawa Barat.

Selanjutnya, kebutuhan RKB tertinggi berikutnya terdapat pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 3.995 unit, disusul Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 3.611 unit. Kondisi ini menyoroti pentingnya dukungan fasilitas untuk pendidikan kejuruan serta pendidikan inklusif.

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), kebutuhan RKB masing-masing adalah 2.334 unit dan 1.856 unit, relatif lebih kecil dibandingkan jenjang lainnya, namun tetap penting dalam mendukung kelangsungan pendidikan menengah.

Secara total, jumlah kebutuhan RKB di Jawa Barat mencapai 35.098 unit, yang terdiri dari 28.039 unit untuk sekolah negeri dan 7.059 unit untuk sekolah swasta. Data ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan fasilitas ruang belajar tetap perlu menjadi perhatian utama, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan untuk satuan pendidikan luar biasa.

Gambar 2.151
Kebutuhan RKB Berdasarkan Perbandingan Antara Jumlah Rombongan Belajar Maksimal Dengan Kapasitas Ruang Kelas

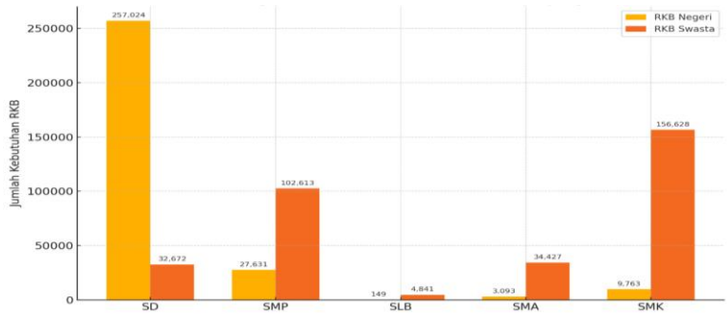

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan perbandingan antara jumlah rombongan belajar maksimal dengan kapasitas ruang kelas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan terbesar ruang kelas baru terdapat pada jenjang Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 289.696 unit. Kebutuhan ini jauh melampaui jenjang pendidikan lainnya, mencerminkan tingginya tekanan pada pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat, baik untuk sekolah negeri (257.024 unit) maupun swasta (32.672 unit).

Di tingkat menengah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati urutan kedua dengan kebutuhan total 166.391 unit RKB, di mana sebagian besar berasal dari sekolah swasta (156.628 unit). Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta masih berperan dominan dalam penyediaan pendidikan kejuruan. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), kebutuhan RKB mencapai 130.244 unit, dengan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sekolah swasta (102.613 unit) dibandingkan negeri (27.631 unit). Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kapasitas ruang belajar di tingkat SMP.

Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), kebutuhan RKB lebih moderat sebesar 37.520 unit, yang juga lebih banyak berasal dari sekolah swasta (34.427 unit). Untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), kebutuhan RKB tercatat paling kecil, yakni 4.990 unit, tetapi memiliki arti strategis mengingat sifat pendidikan khusus yang membutuhkan ruang belajar dengan spesifikasi tertentu.

Secara keseluruhan, total kebutuhan RKB di Jawa Barat mencapai 628.841 unit, dengan distribusi kebutuhan yang memperlihatkan tekanan lebih tinggi pada sektor pendidikan dasar dan swasta. Kondisi ini

menegaskan perlunya strategi pemerataan pembangunan RKB, terutama di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan dasar dan menengah.

2.2.9.3 Kebutuhan Anggaran Pembelian Lahan dan Bangunan

Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan yang besar dalam penyediaan dan pengelolaan lahan serta bangunan untuk jenjang pendidikan menengah, khususnya SMA dan SMK. Permasalahan ini mencakup keterbatasan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), ketidakjelasan status kepemilikan aset, hingga kondisi bangunan sekolah yang belum memenuhi standar kelayakan. Tidak sedikit sekolah yang hingga kini berdiri di atas lahan milik pihak ketiga, seperti pemerintah kabupaten/kota, yayasan, atau perseorangan, tanpa sertifikat resmi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketidakpastian legalitas ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap skema pendanaan pembangunan dan rehabilitasi dari pemerintah pusat, serta menimbulkan risiko kelembagaan dalam jangka panjang, khususnya terkait tata ruang dan kebijakan pertanahan.

Selain aspek legalitas, banyak sekolah juga masih beroperasi dalam kondisi fisik yang tidak memadai. Beberapa SMA dan SMK menggunakan bangunan semi permanen, gedung lama yang tidak layak, atau bahkan menyewa tempat, sehingga mengalami kekurangan ruang kelas, laboratorium, ruang praktik, serta fasilitas penunjang lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengidentifikasi kebutuhan pengadaan atau legalisasi lahan di 84 satuan pendidikan dengan estimasi kebutuhan anggaran lebih dari Rp551 miliar. Namun, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memiliki estimasi nilai karena proses pendataan dan administrasi belum selesai. Penyelesaian isu lahan dan bangunan menjadi prasyarat penting untuk menjamin keberlanjutan program perluasan akses pendidikan menengah serta peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Situasi ini menegaskan bahwa legalisasi dan penyediaan lahan sekolah merupakan komponen krusial dalam strategi pengembangan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Tanpa kejelasan status lahan, sekolah akan kesulitan mengakses anggaran pembangunan, rehabilitasi, maupun perluasan ruang belajar, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Terlebih, dengan semakin meningkatnya tekanan terhadap daya tampung

pendidikan di wilayah padat penduduk seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bogor, langkah-langkah strategis seperti pemetaan ulang aset, percepatan proses sertifikasi, dan intervensi anggaran yang tepat sasaran perlu segera diimplementasikan. Upaya ini penting agar pembangunan Unit Sekolah Baru dan pengembangan satuan pendidikan eksisting dapat berjalan secara terencana, legal, dan berkelanjutan.

2.3 Kondisi Keuangan Daerah

2.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap pendanaan serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini.

2.3.1.1 Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan mulai tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diberlakukan mulai tahun 2020, bahwa pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana perimbangan; dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa; dan transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan.
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari : hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan daerah yang disajikan setiap tahunnya menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020–2024 dengan menggunakan struktur pendapatan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Realisasi pendapatan pada periode 2020-2024, terjadi pertumbuhan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,59 persen. Rendahnya angka rata-rata pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir disebabkan adanya penurunan yang signifikan pada komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar 6,03 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan berupa hibah BOS yang sebelumnya menjadi pendapatan dalam APBD Provinsi, untuk kemudian dilakukan transfer kepada Kabupaten/Kota menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan berupa hibah BOS yang sejak tahun 2022 disalurkan secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,0 persen, dimana

tingkat pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 4,06 persen, Pendapatan Retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 251,58 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 3,05 persen serta dari Lain-lain PAD Yang Sah sebesar minus 7,73 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	**PENDAPATAN**	**34.504.275.705.318**	**36.991.873.224.931**	**33.236.110.512.395**	**34.772.844.052.840**	**36.686.793.694.469**	**0,59**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**18.521.882.178.042**	**20.333.679.966.126**	**23.249.622.253.957**	**24.375.389.630.532**	**25.311.062.568.010**	**4,00**
4.1.1	Pajak daerah	17.035.963.236.918	18.847.183.713.165	21.542.602.963.635	22.467.329.387.753	23.432.165.679.367	4,06
4.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	40.220.203.478	43.262.322.502	44.837.616.240	60.804.726.832	814.501.472.803	251,58
4.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	401.703.315.844	414.780.606.267	468.989.416.325	541.138.347.206	430.658.809.497	3,05
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.043.995.421.802	1.028.453.324.192	1.193.192.257.757	1.306.117.168.741	633.736.606.343	-7,73
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**15.881.415.189.271**	**16.577.293.915.554**	**9.860.664.924.368**	**10.255.156.462.670**	**11.352.536.350.459**	**-2,73**
4.2.1	**Dana Perimbangan**	**15.881.415.189.271**	**16.489.128.153.554**	**9.821.049.167.368**	**10.243.073.273.670**	**11.315.687.571.459**	**-2,78**
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.063.105.718.266	2.594.482.992.137	2.107.890.742.700	1.987.047.229.841	2.551.545.408.500	13,74
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	2.964.612.155.000	3.007.926.119.000	2.981.692.750.817	3.298.949.402.645	3.664.312.930.238	2,92
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	10.853.697.316.005	10.886.719.042.417	4.731.465.673.851	4.957.076.641.184	5.099.829.232.721	-26,50
4.2.1.4	Dana Insentif Daerah (DID)		88.165.762.000	39.615.757.000	12.083.189.000	36.848.779.000	
4.2.2	**Transfer Antar Daerah**	**35.106.000.000**	**28.792.400.000**	**28.451.500.000**	**27.288.300.000**	**-**	11,57
4.2.2.1	Bantuan Keuangan dari provinsi /Pemerintah Daerah lainnya	35.106.000.000	28.792.400.000	28.451.500.000	27.288.300.000	-	11,57
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**100.978.338.005**	**80.899.343.251**	**125.823.334.070**	**142.297.959.638**	**23.194.776.000**	**0,88**
4.3.1	Pendapatan Hibah	36.459.066.005	33.163.983.828	43.604.779.909	21.978.000.000	23.194.776.000	7,12
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		18.942.959.423	53.767.054.161	93.031.659.638	-	
4.3.4	Dana Penyesuaian	29.413.272.000	-	-	-	-	

Sumber: BPKAD - LRA Tahun 2020-2024 (Audited), diolah

Berikut ini disajikan grafik rata–rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 2.152
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

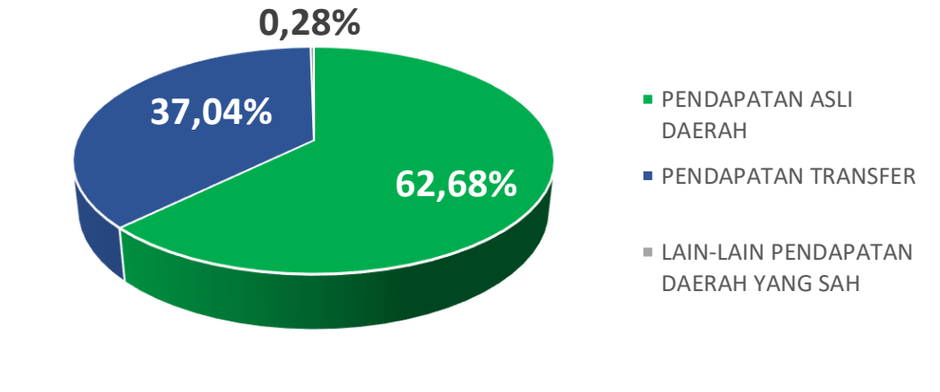

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rata–rata proporsi komponen Pendapatan Daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 62,68 persen, proporsi Pendapatan Transfer sebesar 37,04 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,28 persen dari seluruh total pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

   Rata–rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 92,42 persen. Sisanya terdiri dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,80 persen, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,99 persen, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,80 persen.

Gambar 2.153
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2020-2024

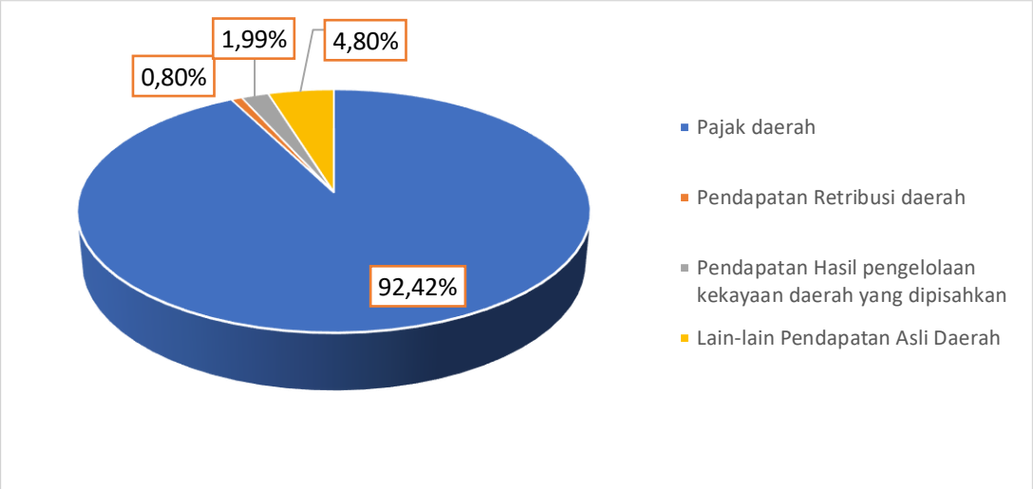

2. Pendapatan Transfer

Rata–rata proporsi komponen Dana Perimbangan terbesar berasal dari Dana Alokasi Khusus yaitu sebesar 59,22 persen. Sisanya terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar 24,34 persen, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 16,27 dan Dana Insentif Daerah sebesar 0,18 persen.

Gambar 2.154
Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2020-2024

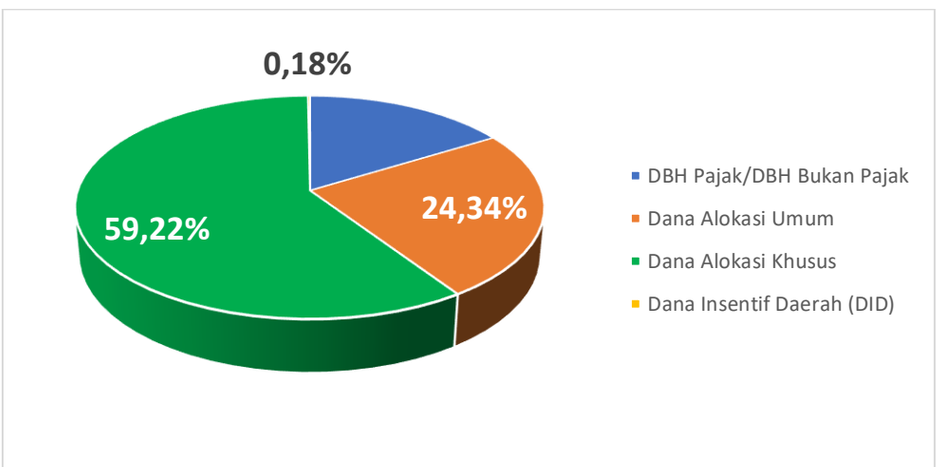

3. Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penyumbang terbesar dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dengan rata-rata sebesar 30,87 persen.

2.3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Peta ini menggambarkan tingkat kapasitas keuangan daerah berdasarkan rasio tertentu, dan digunakan sebagai dasar dalam berbagai kebijakan fiskal, seperti pemberian hibah, penentuan dana pendamping, pembiayaan utang, subsidi bunga pinjaman, persetujuan pembentukan dana abadi daerah, serta pengalokasian transfer dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan serta meningkatkan kualitas Belanja Daerah. Selain itu, sinergi kebijakan fiskal nasional diharapkan dapat mendorong penguatan belanja produktif dan peningkatan *output* serta *outcome* layanan publik di daerah. Hal ini dilakukan melalui harmonisasi antara belanja pusat dan daerah, yang didukung oleh integrasi Bagan Akun Standar (BAS) guna menyelaraskan program, kegiatan, dan hasil kebijakan secara lebih terukur dan efektif. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan berdasarkan formula tertentu dengan dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.97
Rentang dan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,119	sangat rendah
1,119 ≤ Ra i a a ita Fi kal aera < 1,656	rendah
1,656 ≤ Ra i a a ita Fi kal aera < 2,193	sedang
2,193 ≤ Ra i a a ita Fi kal aera < 2,730	tinggi
2,730 ≤ Ra i a a ita Fi kal aera	sangat tinggi

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024

Apabila berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dengan melihat realisasi APBD Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berada pada kelompok Rasio Kapasitas Fiskal aera dengan kateg ri "tinggi", untuk le i jela n a da a t dili at a da tabel berikut ini.

Tabel 2.98
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	18.521.882.178.042	20.333.679.966.126	23.249.622.253.957	24.375.389.630.532	25.311.062.568.010
Transfe ke Daerah	15.881.415.189.271	16.577.293.915.554	9.860.664.924.368	10.255.156.462.670	11.315.687.571.459
Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.106.000.000	28.792.400.000	28.451.500.000	27.288.300.000	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;	65.872.338.005	52.106.943.251	97.371.834.070	115.009.659.638	23.194.776.000
SiLPA	3.289.300.908.323	1.272.234.413.783	2.575.016.379.799	2.335.392.104.049	800.160.988.688
Jumlah (1)	37.793.576.613.641	38.264.107.638.714	35.811.126.892.194	37.108.236.156.889	37.486.954.539.327
Belanja Pegawai	5.816.825.233.210	6.179.742.118.217	6.671.258.864.365	7.128.719.982.768	8.121.654.828.721
Belanja bagi Hasil	7.212.501.291.449	7.608.373.465.011	9.221.944.994.686	9.796.443.745.014	9.992.153.126.253
Belanja Bunga					
Utang	-	-	-	328.337.292.135	566.806.035.144
Jumlah (2)	13.029.326.524.659	13.788.115.583.228	15.893.203.859.051	17.253.501.019.917	18.680.613.990.118
(3) = (1) - (2)	24.764.250.088.982	24.475.992.055.486	19.917.923.033.143	19.854.735.136.972	18.806.340.549.209
Rasio Kapasitas Fiskah Daerah (RKFD)	4,257	3,961	2,986	2,785	2,316

Sumber: BPKAD - LRA Tahun 2020-2024 (Audited)), diolah

Pada sisi realisasi belanja periode Tahun 2020-2024 belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata–rata sebesar 0,12 persen. Angka pertumbuhan tersebut ditunjang dari belanja operasi yang mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,22 persen dengan komponen yang terdiri dari : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial;. Penurunan rata-rata dari komponen Belanja Operasi ini dikarenakan mulai tahun 2021 dalam Belanja Hibah terdapat Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang alokasinya dialihkan langsung ke Kabupaten/Kota, sehingga hal tersebut menyebabkan belanja hibah secara rata-rata mengalami penurunan.

Sedangkan pada Belanja Modal rata-rata pertumbuhannya sebesar minus 1,03 persen. Belanja Tidak Terduga dengan alokasi tertinggi BTT terjadi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 terus mengalami penurunan hingga saat ini. Belanja Transfer mengalami tren peningkatan tipis dengan rata-rata sebesar ,33 persen. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019–2024 dengan menggunakan struktur belanja daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
5	**BELANJA**	**38.127.531.749.249**	**37.470.910.437.064**	**32.774.222.386.723**	**35.513.040.224.353**	**35.549.352.079.771**	**0,12**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**31.377.525.521.203**	**28.736.720.924.943**	**23.376.850.918.139**	**26.059.278.742.196**	**26.757.729.745.675**	**1,22**
5.1.1	Belanja Pegawai	6.097.572.592.290	6.179.742.118.217	6.671.258.864.365	7.128.719.982.768	8.121.654.828.721	6,73
5.1.2	Belanja Barang dan jasa	4.796.352.354.090	6.688.760.948.583	6.978.233.442.923	6.929.929.568.526	6.674.957.432.817	7,12
5.1.3	Belanja Bunga	18.123.947.774	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	22.171.174.200	10.888.578.950	13.357.475.900	-50,89
5.1.5	Belanja Hibah	9.948.395.206.015	9.774.239.405.311	3.305.292.221.215	4.779.009.848.767	5.110.982.109.616	-0,50
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	206.085.750.000	742.282.400.000	196.885.510.000	243.722.617.132	63.755.945.500	22,19
5.2	**Belanja Modal**	**1.672.906.514.876**	**2.045.428.563.538**	**2.419.138.025.661**	**2.523.831.913.631**	**2.116.137.579.713**	**-1,03**
5.2.1	Belanja Modal	1.672.906.514.876	2.045.428.563.538	2.419.138.025.661	2.523.831.913.631	2.116.137.579.713	-1,03
5.3	**Belanja tidak terduga**	**3.154.919.548.515**	**261.344.249.524**	**93.700.984.191**	**23.602.781.810**	**784.110.806**	**-65,47**
5.3.1	Belanja tidak terduga	3.154.919.548.515	261.344.249.524	93.700.984.191	23.602.781.810	784.110.806	-65,47!
5.4	**Belanja transfer**	**12.233.175.835.689**	**11.779.112.751.891**	**13.087.542.164.168**	**13.873.334.932.769**	**13.447.170.449.962**	**0,33**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.212.501.291.449	7.608.373.465.011	9.221.944.994.686	9.796.443.745.014	9.992.153.126.253	5,24
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.020.674.544.240	4.170.739.286.880	3.865.597.169.482	4.076.891.187.755	3.455.017.323.709	-8,53

Sumber: BPKAD - LRA Tahun 2020-2024 (*Audited*), diolah

2.3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Penerimaan Pinjaman Daerah; Pencairan Dana Cadangan; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Kembali Dana Bergulir.
2. Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri dari : Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Dana Bergulir; Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo.

Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan menggunakan struktur pembiayaan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 19,34 persen. Penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,98 persen, dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mengalami tren penurunan dengan rata-rata mencapai minus 5,30 persen.

Realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 148,73 persen. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2024 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH (netto)**	**4.819.021.978.913**	**3.054.053.591.932**	**1.873.503.978.377**	**1.540.602.953.484**	**618.246.076.073**	**-19,34**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**4.872.039.978.913**	**3.154.053.591.932**	**2.635.609.455.927**	**2.899.940.245.619**	**1.237.052.111.217**	**-8,98**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	3.289.300.908.323	1.272.234.413.783	2.575.016.379.799	2.335.392.104.049	800.160.988.688	**-5,30**
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.532.607.660.148	1.881.560.755.969	60.529.903.522	-	680.614.442	
	Pencairan Dana Cadangan				563.789.491.913	436.210.508.087	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
6.1.8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	50.131.410.442	258.422.180	63.172.606	758.649.657	-	**155,14**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**53.018.000.000**	**100.000.000.000**	**762.105.477.550**	**1.359.337.292.135**	**618.806.035.144**	**148,73**
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	53.018.000.000	100.000.000.000	562.105.477.550	231.000.000.000	52.000.000.000	**76,67**
	Pembentukan Dana Cadangan			200.000.000.000	800.000.000.000	-	
6.2.5	Dana Bergulir						
	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo				328.337.292.135	566.806.035.144	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.195.765.934.982	2.575.016.379.799	2.335.392.104.049	800.406.781.971	1.755.687.546.941	**19,20**

Sumber: BPKAD - LRA Tahun 2020-2024 (Audited), diolah

2.3.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah: Pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.101
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah

Pola Hubungan Instruktif, Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).**Pola Hubungan Konsultatif**, Dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi. **Pola Hubungan Partisipatif**, Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. **Pola Hubungan Delegatif**, Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pengukuran terhadap kemandirian keuangan daerah membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pihak eksternal pada setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.102
Pendapatan Asli Daerah (PAD) disandingkan dengan Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Total PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
1	Kota Bekasi	4,094,344,308,118.00	6,841,007,322,280.00	59.85%	Partisipatif
2	Kota Bogor	1,666,675,706,831.00	2,946,189,917,355.00	56.57%	Partisipatif
3	Kota Bandung	4,119,022,915,821.00	7,494,227,311,798.00	54.96%	Partisipatif

No	Kabupaten/Kota	Total PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
4	Kabupaten Bekasi	4,174,388,449,881.00	7,656,264,014,774.00	54.52%	Partisipatif
5	Kota Depok	2,348,534,453,898.00	4,328,171,198,378.00	54.26%	Partisipatif
6	Kabupaten Bogor	5,145,530,165,866.00	10,852,090,790,037.00	47.42%	Konsultatif
7	Kota Cirebon	779,879,929,358.00	1,794,111,924,607.00	43.47%	Konsultatif
8	Kota Cimahi	565,421,802,831.00	1,556,393,435,757.00	36.33%	Konsultatif
9	Kabupaten Karawang	2,093,598,013,912.00	5,796,837,193,782.00	36.12%	Konsultatif
10	Kota Sukabumi	452,802,605,328.00	1,271,650,168,050.00	35.61%	Konsultatif
11	Kabupaten Bandung	2,029,176,395,682.00	5,925,156,775,479.00	34.25%	Konsultatif
12	Kabupaten Purwakarta	810,785,235,813.00	2,594,958,812,455.00	31.24%	Konsultatif
13	Kabupaten Bandung Barat	952,021,711,556.00	3,465,066,875,614.00	27.47%	Konsultatif
14	Kabupaten Subang	816,345,251,790.00	2,978,879,265,201.00	27.40%	Konsultatif
15	Kota Tasikmalaya	440,084,336,839.00	1,705,871,148,316.00	25.80%	Konsultatif
16	Kabupaten Cianjur	1,150,790,377,354.00	4,822,063,870,852.00	23.87%	Instruktif
17	Kabupaten Sumedang	691,065,244,064.00	2,934,191,214,462.00	23.55%	Instruktif
18	Kabupaten Cirebon	1,067,915,168,215.00	4,628,091,592,372.00	23.07%	Instruktif
19	Kota Banjar	178,778,484,877.00	789,461,242,287.00	22.65%	Instruktif
20	Kabupaten Indramayu	801,158,947,731.00	3,685,576,337,826.00	21.74%	Instruktif
21	Kabupaten Majalengka	656,194,843,617.00	3,083,408,997,193.84	21.28%	Instruktif
22	Kabupaten Pangandaran	276,241,947,419.00	1,302,302,515,008.00	21.21%	Instruktif
23	Kabupaten Sukabumi	842,296,862,064.00	4,549,299,635,326.00	18.51%	Instruktif
24	Kabupaten Kuningan	452,802,605,328.00	2,825,946,955,530.00	16.02%	Instruktif
25	Kabupaten Ciamis	366,846,626,559.00	2,530,497,954,569.00	14.50%	Instruktif
26	Kabupaten Garut	700,671,796,147.00	4,908,754,980,437.00	14.27%	Instruktif
27	Kabupaten Tasikmalaya	483,209,585,669.00	3,432,957,118,118.00	14.08%	Instruktif
	Provinsi Jawa Barat (Murni)	**19,307,785,060,631.00**	**30,998,963,018,931.00**	**62.29%**	**Partisipatif**
	Provinsi Jawa Barat (Pasca Efisiensi)	**19,307,785,060,631.00**	**30,829,409,187,931.00**	**62.63%**	**Partisipatif**

Sumber : Peraturan Daerah APBD Provinsi dan Perkada Perubahannya Tahun 2025 dan Peraturan Daerah APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas, rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kotanya. Jika dikategorikan terhadap pola hubungan dengan pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat masuk ke dalam kategori pola hubungan partisipatif yang artinya peranan pemerintah pusat semakin berkurang, karena tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok merupakan 5 (lima) kabupaten/kota dengan rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi di Jawa Barat yaitu di atas 50 persen dan masuk ke dalam kategori pola hubungan partisipatif seperti Provinsi Jawa Barat.

2. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (*Share*)

Share merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah (*share*) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Belanja\ Daerah} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.103
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	PAD	Total Belanja	% *Share*	Kemampuan Keuangan
1	Kota Bekasi	4.094.344.308.118	6.984.726.328.180,00	58,62%	Tinggi
2	Kota Bogor	1.666.675.706.831	2.944.652.722.664,00	56,60%	Tinggi
3	Kota Bandung	4.119.022.915.821	7.809.391.947.890,00	52,74%	Tinggi
4	Kota Depok	2.348.534.453.898	4.537.067.866.021,00	51,76%	Tinggi
5	Kabupaten Bekasi	4.174.388.449.881	8.471.083.818.174,00	49,28%	Rendah
6	Kota Cirebon	779.879.929.358	1.734.419.135.944,00	44,96%	Rendah
7	Kabupaten Bogor	5.145.530.165.866	11.444.340.780.022,00	44,96%	Rendah
8	Kota Sukabumi	452.802.605.328	1.293.849.541.127,00	35,00%	Rendah
9	Kabupaten Karawang	2.093.598.013.912	6.048.618.879.041,00	34,61%	Rendah
10	Kota Cimahi	565.421.802.831	1.676.763.532.027,00	33,72%	Rendah
11	Kabupaten Bandung	2.029.176.395.682	6.414.981.775.479,00	31,63%	Rendah
12	Kabupaten Purwakarta	810.785.235.813	2.628.660.765.943,00	30,84%	Rendah
13	Kabupaten Bandung Barat	952.021.711.556	3.465.066.875.614,00	27,47%	Rendah
14	Kabupaten Subang	816.345.251.790	3.001.530.828.804,00	27,20%	Rendah
15	Kota Tasikmalaya	440.084.336.839	1.738.123.837.429,00	25,32%	Rendah
16	Kabupaten Cianjur	1.150.790.377.354	4.867.263.870.852,00	23,64%	Rendah Sekali
17	Kabupaten Sumedang	691.065.244.064	2.929.691.214.462,00	23,59%	Rendah Sekali
18	Kota Banjar	178.778.484.877	789.461.242.287,00	22,65%	Rendah Sekali
19	Kabupaten Cirebon	1.067.915.168.215	4.728.637.373.172,00	22,58%	Rendah Sekali
20	Kabupaten Indramayu	801.158.947.731	3.755.576.337.826,00	21,33%	Rendah Sekali
21	Kabupaten Majalengka	656.194.843.617	3.090.517.287.973,28	21,23%	Rendah Sekali
22	Kabupaten Sukabumi	842.296.862.064	4.523.211.793.087,00	18,62%	Rendah Sekali
23	Kabupaten Pangandaran	276.241.947.419	1.527.346.019.629,00	18,09%	Rendah Sekali
24	Kabupaten Kuningan	452.802.605.328	2.844.197.735.477,00	15,92%	Rendah Sekali
25	Kabupaten Garut	700.671.796.147	4.973.762.608.356,00	14,09%	Rendah Sekali
26	Kabupaten Ciamis	366.846.626.559	2.613.997.954.569,00	14,03%	Rendah Sekali
27	Kabupaten Tasikmalaya	483.209.585.669	3.535.419.618.118,00	13,67%	Rendah Sekali

No	Kabupaten/Kota	PAD	Total Belanja	% *Share*	Kemampuan Keuangan
	Provinsi Jawa Barat (Murni)	**19.307.785.060.631**	**31.075.544.907.123,00**	**62,13%**	**Tinggi**
	Provinsi Jawa Barat (Pasca Efisiensi)	**19.307.785.060.631**	**30.905.991.076.122,90**	**62,47%**	**Tinggi**

Sumber : Peraturan Daerah APBD Provinsi dan Perkada Perubahannya Tahun 2025 dan Peraturan Daerah APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel kemampuan keuangan daerah di atas, kemampuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 masuk ke dalam kategori Tinggi dengan share sebesar 62,13 persen pada APBD Tahun 2025 Murni. Artinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik dalam membiayai kebutuhan anggaran pemerintahannya. Namun hal ini masih dapat ditingkatkan dengan terus berinovasi terkait pembiayaan dari sumber pendanaan lainnya di luar APBD dan APBN.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Depok masuk ke dalam kategori Tinggi, sedangkan 23 kabupaten/kota lainnya masih tergolong Rendah dan Rendah sekali. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bahwa sumbangan PAD terhadap total belanjanya masih rendah dan perlu didorong untuk lebih menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatannya, baik dari pajak, retribusi, atau pendapatan lainnya. Berdasarkan sebaran spasialnya, kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.155
Peta Sebaran Kemampuan Daerah Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2025

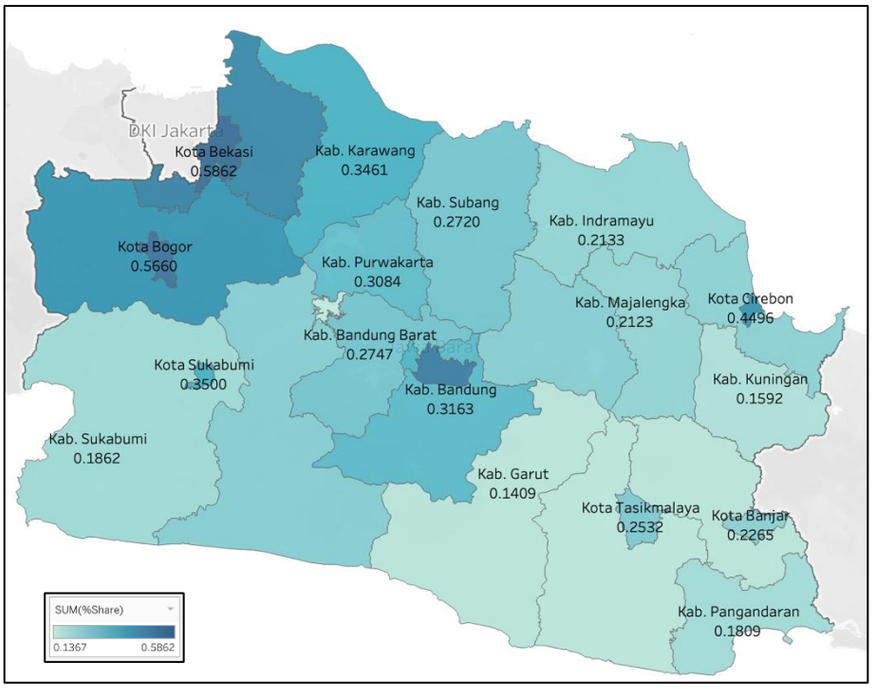

Sumber : Analisis, 2025

Dilihat dari persepektif spasial, kemampuan keuangan daerah dengan kategori Tinggi, terkonsentrasi pada kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Jabodebek, Bandung Raya, dan Kota Cirebon. Sedangkan kemampuan keuangan daerah dengan kategori Rendah dan Rendah Sekali tersebar pada kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat bagian selatan dan sebagian wilayah Ciayumajakuning. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan daerah Tinggi merupakan wilayah perkotaan dengan dominasi sektor industri dan jasa, sedangkan kabupaten/kota dengan kategori Rendah dan Rendah Sekali merupakan daerah-daerah rural.

2.3.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

2.3.2.1 Aset

Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,22 persen Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara Aset lancar mengalami penurunan yaitu sebesar 2,79 persen, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,85 persen, dan Aset lainnya sebesar 10,99 persen. Dan Investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan rata-rata 4,27 persen.

2.3.2.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 89,63 persen. Peningkatan kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka panjang, yaitu dari Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.057.932.783.255, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.400.836.099.846. Hal ini berarti Kewajiban Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp.342.903.316.591 atau turun sebesar 10,08 persen dibandingkan dengan nilai Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2020.

Utang Dalam Negeri tersebut merupakan pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dan Pinjaman Dukungan Program PEN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi dampak pandemi Virus COVID-19.

2.3.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2018- 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan dari Laporan posisi Keuangan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, pada periode tersebut ekuitas mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 1,87 persen.

Gambaran neraca daerah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2018–2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.104
Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	1.131.847.061.555	2.310.512.110.990	2.032.351.282.087	582.614.269.893	1.589.712.804.299	25,92
Kas Di Bendahara Penerimaan	-	89.213	1.510.511	6.418.500	973.100	
Kas Di Bendahara Pengeluaran	20.000	530.671.383	65.647.050	166.241.670	746.930.285	530.650,92
Kas Di BLUD	136.415.669.478	263.800.322.223	267.782.857.032	197.523.491.696	152.292.066.054	17,35
Kas Dana BOS			190.807.369	96.360.212	462.094.769	
Kas Lainnya	4.303.182.750	173.185.990	-	20.000.000.000	13.000.000.000	
Investasi Jangka Pendek (Deposito)			35.000.000.000	-		
Piutang Pajak Dan Retribusi	-					
Piutang Pajak	204.060.195.852	247.781.377.283	318.785.952.012	316.275.728.918	311.287.676.662	6,60
Piutang Retribusi	524.774.840	508.577.040	519.950.240	568.366.040	28.179.221.010	973,48
Piutang Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	2.506.785.118	4.300.000.000	6.300.000.000	14.431.350.114	14.431.350.114	
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	22.490.299.519	49.570.035.179	183.713.760.005	121.001.617.101	72.696.679.411	49,01
Piutang BLUD	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	399.409.300	399.409.300	399.409.300	399.409.300	-	- 20,26
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	16.617.963.114	16.564.949.950	16.564.949.962	16.562.324.962	-	- 22,24
Bagian Lancar Piutang Sewa	597.371.000	787.369.000	562.369.000	12.375.000	-	- 38,79
Bagian Lancar Piutang Kerjasama	6.986.206.000	9.758.589.000	10.178.053.800	9.935.224.800	-	-1,70
Piutang Bantuan Keuangan	12.526.511.538	-	-			
Piutang Lainnya	1.587.118.142	731.921.244	715.521.245	710.521.245	4.584.787.535	84,53
Penyisihan Piutang	-16.064.189.370	-16.258.074.110	-17.538.378.532	-24.800.694.710	- 33.101.193.096	7,77
Penyisihan Piutang BLUD	-	-				
Beban Dibayar Dimuka	9.426.982.520	6.089.031.346	2.695.620.294	5.287.899.857	6.467.950.024.	7,01
Persediaan	337.614.929.778	570.433.701.789	463.382.990.169	380.709.543.346	366.663.803.857	17,86
Persediaan BLUD	35.088.593.281	-				
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	-					
Piutang Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan	-					
JUMLAH ASET LANCAR	**1.906.928.884.414**	**3.465.683.266.821**	**3.321.672.301.544**	**1.641.500.447.944**	**2.527.457.113.024**	5,85
INVESTASI JANGKA PANJANG						
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						
Dana Bergulir	44.334.326.511	44.075.904.331	44.010.323.114	43.251.673.457	42.571.059.015	- 11,42
Dana Penjaminan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Penyisihan Dana Bergulir	-49.334.326.511	-49.075.904.331	-49.010.323.114	-48.251.673.457	- 47.571.059.015	-0,88
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.882.194.508.151	10.418.305.549.717	12.476.216.273.574	12.742.947.824.686	12.922.722.402.804	4,98

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	**9.882.194.508.151**	**10.418.305.549.717**	**12.476.216.273.574**	**12.742.947.824.686**	**12.922.722.402.804**	4,98
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**9.882.194.508.151**	**10.418.305.549.717**	**12.476.216.273.574**	**12.742.947.824.686**	**12.922.722.402.804**	4,89
ASET TETAP						
Tanah	12.232.960.957.707	12.333.331.817.481	12.730.040.835.804	12.742.764.748.468	12.805.231.379.854	1,32
Peralatan dan Mesin	6.605.616.572.814	7.441.717.938.457	8.349.955.680.051	9.219.315.217.540	10.008.465.829.185	11,05
Gedung dan Bangunan	8.938.773.352.285	9.237.601.362.252	11.146.691.343.801	11.757.571.348.715	11.972.515.246.202	8,14
Jalan, Jaringan dan Instalasi	9.280.959.559.657	9.649.411.456.068	10.897.333.786.667	11.792.249.483.031	12.491.798.208.140	6,69
Aset Tetap Lainnya	1.077.308.808.301	1.241.659.469.130	1.394.904.992.371	1.538.912.900.214	1.684.577.658.019	14,12
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.436.601.951.364	1.799.700.759.153	376.470.138.528	302.794.125.616	258.184.762.873	- 16,63
Akumulasi Penyusutan	-14.343.219.873.158	-15.144.809.773.359	-16.984.215.682.289	-18.658.504.862.975	-20.248.798.480.264	9,25
JUMLAH ASET TETAP	**25.229.001.328.970**	**26.558.613.029.183**	**27.911.181.094.933**	**28.695.102.960.609**	**28.971.974.624.009**	3,37
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan			200.172.222.222	436.357.123.564	-	
JUMLAH DANA CADANGAN			**200.172.222.222**	**436.357.123.564**	**-**	
ASET LAINNYA						
Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-				
Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	314.998.000	-				
Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama	147.898.063.665	142.175.680.655	164.883.112.370	158.593.950.370	152.280.583.370	0,22
Bagian Jangka Panjang Piutang Lainnya	10.131.485.325	6.901.276.369	3.901.276.369	-	-	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	519.696.049.916	522.852.449.648	529.986.735.367	550.583.290.552	-	- 18,64
Aset Tak Berwujud	734.268.000	807.268.800	1.081.739.610	1.286.184.270	1.892.340.320	93,50
Aset Lain - Lain	1.838.836.210.798	1.829.997.109.584	1.809.787.879.540	1.821.253.576.334	1.432.630.654.041	-5,55
Akumulasi Amortisasi	- 153.641.000	- 300.839.883	- 470.588.237	- 698.095.799	- 918.195.749	52,12
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	- 901.171.362.628	- 908.716.794.022	- 911.486.811.393	- 916.016.506.513	- 650.476.549.271	-7,12
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-24.732.050.905	-25.265.170.907	-30.615.282.301	-32.305.161.077	-	- 13,77
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			217.903.344.841	671.602.532.000	78.232.594.000	
JUMLAH ASET LAINNYA	**1.591.554.021.172**	**1.568.450.980.245**	**1.784.971.406.166**	**2.254.299.770.137**	**1.013.643.426.711**	**-3,44**
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi Tanah					687.188.827.915	
Properti Investasi Gedung dan Bangunan					53.960.564.820	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					- 33.861.571.293	
JUMLAH PROPERTI INVESTASI					**707.287.821.442**	
JUMLAH ASET	**38.609.678.742.707**	**42.011.052.825.965**	**45.694.213.298.439**	**45.770.208.126.940**	**46.143.085.387.990**	**2,71**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-			
Pendapatan Diterima Dimuka	5.364.149.165	18.810.077.628	3.416.802.114	7.512.369.790	22.388.424.761	98,10
Utang Belanja	482.275.025.675	676.329.793.283	605.098.531.465	408.813.434.846	443.684.024.089	2,88
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	285.439.035	784.110.806	336.501.327	
Utang Bagi Hasil Pajak Retribusi kepada Pemkab/Pemkot	-	-	-			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**487.639.174.841**	**695.139.870.911**	**608.800.772.614**	**417.109.915.442**	**466.408.950.177**	**3,80**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja - BLUD	-					
Utang Dalam Negeri	1.532.607.660.148	3.374.647.022.657	3.400.836.099.846	3.057.932.783.255	2.491.126.748.111	
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	-					
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**1.532.607.660.148**	**3.374.647.022.657**	**3.400.836.099.846**	**3.057.932.783.255**	**2.491.126.748.111**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**2.020.246.834.989**	**4.069.786.893.568**	**4.009.636.872.460**	**3.475.042.698.697**	**2.953.784.510.136**	**85,02**
EKUITAS						
EKUITAS	36.589.431.907.709	37.941.265.932.397	41.684.576.425.979	42.295.165.428.243	43.185.549.689.702	1,64
JUMLAH EKUITAS	**36.589.431.907.709**	**37.941.265.932.397**	**41.684.576.425.979**	**42.295.165.428.243**	**43.185.549.689.702**	**1,64**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**38.609.678.742.697**	**42.011.052.825.965**	**45.694.213.298.439**	**45.770.208.126.940**	**46.143.085.387.990**	**2,71**

Sumber: Neraca Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024

Berdasarkan penyajian laporan keuangan yang dijelaskan di atas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024 disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.105
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (*current ratio*)	3,91	4,99	5,46	3,94	5,57
2	Rasio Cepat (*quick ratio*)	2,67	4,16	4,69	3,02	4,68
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,052	0,097	0,088	0,076	0,064
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,013	0,018	0,015	0,010	0,068

Sumber: Hasil perhitungan BPKAD, Tahun 2024

Hasil perhitungan rasio keuangan yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Secara rinci Analisis tersebut disajikan sebagai berikut.

2.3.2.4 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

   Rasio Lancar guna mengevaluasi kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar pada tahun 2020 adalah sebesar 3,91 dan sampai dengan periode tahun 2024 mencapai sebesar 5,57.

2. Rasio Cepat *(Quick Ratio*)

   Rasio cepat berguna untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan

menggunakan aktiva yang lebih likuid. Quick ratio pada tahun 2020 sebesar 2,67 dan pada tahun 2024 quick ratio sebesar 4,68. Dengan hasil tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

2.3.2.5 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas yaitu rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu organisasi dalam melunasi semua kewajiban. Termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan atau rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas secara rinci sebagai berikut:

1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

   Rasio Total Utang Terhadap Total Aset menggambarkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, yaitu semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,052 dan pada tahun 2024 sebesar 0,064 Hal ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Utang Terhadap Modal

   Rasio Utang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,013 serta periode tahun 2024 sebesar 0,068. Dari perhitungan tersebut bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

2.3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang berkaitan dengan proprosi penggunaan anggaran dan pembiataan daerah. Pengelolaan keuangan daerah

diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kebijakan pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.106
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No Kode	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5.	**BELANJA**	**43.263.671.357.326**	**38.127.531.749.249**	**88,13**	**39.431.760.292.994**	**37.470.910.437.064**	**95,03**
5.1	**Belanja Operasi**	**22.539.337.866.668**	**21.066.529.850.169**	**93,47**	**24.017.780.103.431**	**23.385.024.872.111**	**97,37**
5.1.01	Belanja Pegawai	6.829.576.254.322	6.097.572.592.290	89,28	6.341.916.140.318	6.179.742.118.217	97,44
5.1.02	Belanja Barang	4.971.072.042.816	4.796.352.354.090	96,49	7.080.953.004.127	6.688.760.948.583	94,46
5.1.03	Belanja Bunga	18.123.947.774	18.123.947.774	100,00	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	10.506.797.571.756	9.948.395.206.015	94,69	9.848.211.558.986	9.774.239.405.311	99,25
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	213.768.050.000	206.085.750.000	96,41	746.699.400.000	742.282.400.000	99,41
5.2	**Belanja Modal**	**1.800.874.189.805**	**1.672.906.514.876**	**92,89**	**2.607.035.849.589**	**2.045.428.563.538**	**78,46**
5.2.01	Belanja Tanah	149.635.263.367	138.301.711.310	92,43	90.996.975.472	77.716.525.638	85,41
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	772.268.846.754	728.630.241.573	94,35	1.096.964.368.478	927.428.164.677	84,54
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	478.746.499.627	437.161.093.234	91,31	638.229.404.904	394.724.275.968	61,85
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	190.037.576.741	162.277.350.276	85,39	665.534.053.494	532.806.912.702	80,06
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	207.996.809.326	204.543.011.238	98,34	115.311.047.241	112.752.684.553	97,78
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	2.189.193.990	1.993.107.245	91,04	-	-	-
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**4.659.456.084.240**	**3.154.919.548.515**	**67,71**	**409.909.204.632**	**261.344.249.524**	**63,76**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.659.456.084.240	3.154.919.548.515	67,71	409.909.204.632	261.344.249.524	63,76
5.4	**Transfer**	**14.264.003.216.613**	**12.233.175.835.689**	**85,76**	**12.397.035.135.342**	**11.779.112.751.891**	**95,02**
5.4.01	Belanja bagi Hasil	8.770.891.955.109	7.212.501.291.449	82,23	7.845.680.998.429	7.608.373.465.011	96,98
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	5.493.111.261.504	5.020.674.544.240	91,40	4.551.354.136.913	4.170.739.286.880	91,64

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2023, LRA 2024 (unreviu) diolah

..Lanjutan Tabel ...

No kode	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Rata-Rata Penyerapan (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
5.	**BELANJA**	**34.105.173.644.759**	**32.774.222.386.723**	**96,10**	**37.161.192.747.868**	**35.513.040.224.353**	**95,56**	**36.911.051.200.250**	**35.548.799.933.035**	**96,31**	**93,79**
5.1	**Belanja Operasi**	**17.766.096.244.585**	**17.173.841.212.703**	**96,67**	**19.515.920.017.639**	**19.092.270.596.143**	**97,83**	**20.630.060.865.454**	**19.984.707.792.554**	**96,87**	**95,85**
5.1.01	Belanja Pegawai	6.905.458.651.916	6.671.258.864.365	96,61	7.310.964.528.660	7.128.719.982.768	97,51	8.276.768.784.207	8.121.654.828.721	98,13	95,40
5.1.02	Belanja Barang	7.287.878.948.326	6.978.233.442.923	95,75	7.146.989.234.172	6.929.929.568.526	96,96	7.044.213.675.439	6.674.957.432.817	94,77	94,65
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67
5.1.04	Belanja Subsidi	23.928.000.000	22.171.174.200	92,66	12.303.600.000	10.888.578.950	88,50	15.000.000.000	13.357.475.900	89,05	61,19
5.1.05	Belanja Hibah	3.351.605.894.343	3.305.292.221.215	98,62	4.801.096.920.725	4.779.009.848.767	99,54	5.226.090.824.408	5.110.982.109.616	97,80	97,42
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	197.224.750.000	196.885.510.000	99,83	244.565.734.082	243.722.617.132	99,66	67.987.581.400	63.755.945.500	93,78	97,01
5.2	**Belanja Modal**	**2.566.127.774.581**	**2.419.138.025.661**	**94,27**	**2.661.567.412.576**	**2.523.831.913.631**	**94,83**	**2.186.205.105.630**	**2.116.137.579.713**	**96,80**	**89,13**
5.2.01	Belanja Tanah	103.518.369.664	81.338.939.358	78,57	62.982.568.517	27.644.449.730	43,89	9.316.940.000	8.747.686.000	93,89	77,53
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	924.690.925.453	888.786.247.946	96,12	944.286.534.017	920.236.267.820	97,45	830.805.545.863	807.445.445.134	97,19	92,10
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	826.198.771.325	808.512.629.411	97,86	602.412.576.584	576.544.000.256	95,71	480.598.271.429	449.982.952.666	93,63	86,50
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	556.350.820.445	493.707.712.151	88,74	893.513.683.123	841.779.131.802	94,21	709.727.996.224	695.251.518.838	97,96	85,93
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	155.368.887.694	146.792.496.795	94,48	153.668.573.435	153.054.625.618	99,60	151.822.463.714	151.004.624.972	99,46	95,22
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	4.703.476.900	4.573.438.405	97,24	3.933.888.400	3.705.352.103	94,19	58,82
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**468.969.961.965**	**93.700.984.191**	**19,98**	**425.194.924.725**	**23.602.781.810**	**5,55**	**359.131.440.268**	**784.110.806**	**0,22**	**26,20**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	468.969.961.965	93.700.984.191	19,98	425.194.924.725	23.602.781.810	5,55	359.131.440.268	784.110.806	0,22	26,20
5.4	**Transfer**	**13.303.979.663.628**	**13.087.542.164.168**	**98,37**	**14.558.510.392.928**	**13.873.334.932.769**	**95,29**	**13.735.653.788.898**	**13.447.170.449.962**	**97,90**	**94,24**
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9.313.777.324.266	9.221.944.994.686	99,01	10.434.400.625.641	9.796.443.745.014	93,89	10.255.193.544.830	9.992.153.126.253	97,44	94,35
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	3.990.202.339.362	3.865.597.169.482	96,88	4.124.109.767.287	4.076.891.187.755	98,86	3.480.460.244.068	3.455.017.323.709	99,27	94,43

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024 (*Audited*), diolah

2.3.3.1 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur guna menyajikan kelompok belanja yang dialokasikan untuk kebutuhan aparatur. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.107
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.532.857.992.683	2.561.466.904.432	2.762.853.535.321	3.071.995.567.009	3.485.784.809.844
2	Belanja Tambahan Penghasilan	2.059.386.858.796	2.097.023.615.370	2.343.233.902.364	2.344.872.192.666	2.834.394.098.618
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	236.666.381.523	1.144.794.053.299	1.137.642.128.644	1.290.379.017.277	1.479.258.004.582
4	Biaya Pemungutan Pajak					
5	Insentif Pemungutan Pajak	235.739.354.700	64.008.893.450			
6	Insentif Pemungutan Retribusi	938.678.823	311.065.093			
7	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	33.424.775.000	29.604.419.000	158.811.417.063	161.477.181.914	167.797.180.061
8	Beban Pegawai BLUD	-	189.837.948.819	225.383.590.856	222.273.301.372	129.411.176.416
9	Belanja Honorarium PNS Provinsi	-	-	-	-	-
10	Honorarium PNS Non Provinsi	-	-	-	-	-
11	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
12	Uang Jahit Pakaian	-	-	-	-	-
13	Belanja Premi Asuransi	1.778.632.541	484.025.767.379	446.891.149.224	523.485.018.391	-
14	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-	-
15	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-	-
16	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	-	-
17	Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi	338.522.737.311	393.749.593.758	-	-	-
18	Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi	-	-	-	-	-
19	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-
20	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
21	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.931.792.000	1.907.442.000	2.284.456.000	1.411.750.000	-
22	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	7.736.968.180	11.495.786.247	50.670.923.681	18.788.767.224	-
23	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)**	374.306.561.490	436.581.045.646	-	-	-
24	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	2.215.180.306	1.970.827.437	1.489.159.200
25	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	30.961.800.000	31.768.242.498	23.520.400.000
	TOTAL	**5.823.290.733.047**	**7.414.806.534.493**	**7.160.948.083.459**	**7.668.421.865.788**	**8.121.654.828.721**

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024, diolah

Realisasi alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Provinsi Jawa Barat selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100 (%)
1	2020	5.823.290.733.047	38.180.549.749.249	15,25
2	2021	7.414.806.534.493	37.570.910.437.064	19,74
3	2022	7.160.948.083.459	33.536.327.864.273	21,35
4	2023	7.668.421.865.788	36.872.377.516.488	20,80
5	2024	8.121.654.828.721	36.168.158.114.915	22,46

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024, diolah

2.3.3.2 Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran, yaitu dengan menghitung realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pengeluaran wajib dan mengikat terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,22 persen, peningkatan tersebut diantaranya komponen belanja sebesar 5,30 persen dan pengeluaran pembiayaan sebesar 129,69 persen. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.109
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Barat 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja**	**17.239.402.097.723**	**16.770.355.921.890**	**14.645.583.477.152**	**15.651.870.298.132**	**16.844.257.294.987**	**5,30**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.532.857.992.683	2.561.466.904.432	2.762.853.535.321	3.071.995.567.009	3.485.784.809.844	0,64
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.059.386.858.796	2.097.023.615.370	2.343.233.902.364	2.344.872.192.666	2.834.394.098.618	14,88
3	Biaya Pemungutan Pajak	-	-	-	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak	235.739.354.700	64.008.893.450	69.758.107.115	77.558.493.910	118.686.788.020	-6,84
5	Insentif Pemungutan Retribusi	938.678.823	311.065.093	720.160.297	142.854.182	94.212.991	-13,68
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	676.800.000	619.200.000	676.800.000	676.800.000		-39,34
7	Gaji dan Tunjangan DPRD	117.238.180.298	159.832.890.311	158.811.417.063	161.477.181.914	167.797.180.061	21,96
8	Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	199.919.334	2.214.742.504	2.215.180.306	1.970.827.437	1.489.159.200	191,71
9	Belanja Penerimaan Lainnya Gubernur/ Wakil Gubernur	32.747.975.000	28.985.219.000	30.285.000.000	31.479.496.000	23.520.400.000	-4,81
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/ Kota	12.233.175.835.689	11.779.112.751.891	9.221.944.994.686	9.796.443.745.014	9.992.153.126.253	7,52
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	26.440.502.400	76.780.639.839	55.084.380.000	165.253.140.000	220.337.520.000	80,20
B	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**53.018.000.000**	**100.000.000.000**	**762.105.477.550**	**559.337.292.135**	**618.806.035.144**	**129,69**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	53.018.000.000	100.000.000.000	762.105.477.550	231.000.000.000	52.000.000.000	103,45
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	328.337.292.135	566.806.035.144	
	TOTAL A+B	**17.292.420.097.723**	**16.870.355.921.890**	**15.407.688.954.702**	**16.211.207.590.267**	**17.463.063.330.131**	**5,22**

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024 (*Audited*), diolah

2.3.4 Proporsi Pembiayaan Daerah

Proporsi pembiayaan daerah disajikan guna memperkirakan defisit, serta untuk menghitung penutup defisit. Penutup defisit antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode tahun 2020 sampai dengan periode tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	34.504.275.705.318	36.991.873.224.931	33.236.110.512.395	34.772.844.052.840	36.686.793.694.469
2	Belanja Daerah	38.127.531.749.249	37.470.910.437.064	32.774.222.386.723	5.513.040.224.353	35.548.799.933.035
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	53.018.000.000	100.000.000.000	762.105.477.550	1.359.337.292.135	618.806.035.144
A.	Defisit Riil	-3.676.274.043.931	- 579.037.212.133	- 300.217.351.878	-2.099.533.463.648	519.187.726.290
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	3.289.300.908.323	1.272.234.413.783	2.575.016.379.799	2.335.392.104.049	800.167.988.688
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.532.607.660.148	1.881.560.755.969	60.529.903.522	-	680.614.442
3	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	563.789.491.913	436.210.508.087
4	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	50.131.410.442	258.422.180	63.172.606	758.649.657	-
5	Koreksi	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	4.872.039.978.913	3.154.053.591.932	2.635.609.455.927	2.899.940.245.619	1.237.052.111.217
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**1.195.765.934.982**	**2.575.016.379.799**	**2.335.392.104.049**	**800.406.781.971**	**1.756.246.837.507**

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (*Audited*), diolah

Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada tahun 2021 yaitu Rp3.060.918.146.012. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada periode Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.111
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata–Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	3.289.300.908.323	1.272.234.413.783	2.575.016.379.799	2.335.392.104.049	1.756.246.837.507	- 5,30
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		3.289.300.908.323	1.272.234.413.783	2.575.016.379.799	2.335.392.104.049	1.756.246.837.507	- 5,30

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024 (Audited), diolah

Tabel 2.112
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		Rata-Rata Pertumbuh-an (%)
	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Bersumber Dari:	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Bersumber Dari:**	**1,195,765,934,983**		**2,575,016,379,799**		**2,335,392,104,049**		**800,406,781,971**		**1.756.246.837.507**	
Pelampauan Pendapatan	**Pelampauan Pendapatan**	(3,710,717,966,299)	(310)	868,841,564,937	34	1,010,984,474,671	43	(848,042,036,462)	(106)	393,635,380.168	22
Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah	Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah	3,105,312,227,153	260	1,342,927,472,479	52	1,114,513,758,576	48	962,977,063,356	120		
Sisa Pelaksanaan Transfer	Sisa Pelaksanaan Transfer	2,030,827,380,924	170	617,922,383,451	24	216,437,499,460	9	685,175,460,159	86	1.362.251.267.215	78
Penghematan Belanja	**Penghematan Belanja**	**5,136,139,608,077**	430	**1,960,849,855,930**	76	**1,330,951,258,036**	57	**1,648,152,523,515**	206		
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(229,655,706,796)	(19)	(254,675,041,068)	(10)	(27,280,938,736)	(1)	296,294,918	0		
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	20,737,310,078	1	-	-	-	
Penghematan Pembiayaan Netto	**Penghematan Pembiayaan Netto**	**(229,655,706,796)**	(19)	**(254,675,041,068)**	(10)	**(6,543,628,658)**	(0)	**296,294,918**	0	360.190.124	0.02

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2024 (Audited), diolah

2.3.5 Proyeksi Keuangan Daerah

2.3.5.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan e merinta an aera (“UU H ”) e ngaturan enda a tan daera diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi diatur di dalam Undang-undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 Tentang a jak aera dan Retri u i aera (“UU R ”) ementara dana perimbangan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara e merinta u at dan e merinta an aera (“UU e rim a ngan euangan”) Namun dalam UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD.

Di dalam UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dalam upaya menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, UU HKPD merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan mereformulasi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan layanan publik. Alokasi DBH akan disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan 1 (satu) tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Oleh karena itu, kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara akan diperhitungkan begitu pula perbaikan lingkungan yang terdampak kegiatan eksploitasi. Reformulasi DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan unit cost dan target layanan, serta

penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah untuk mencapai prioritas nasional sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.

Terkait pilar kedua, yaitu penguatan *local taxing power* dalam kaitan dengan kewenangan Provinsi, diberlakukannya skema pemungutan Opsen Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota tanpa menambah beban wajib pajak dan berlaku efektif pada tahun 2025. Opsen Pajak juga diharapkan mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Opsen atas PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB sekaligus mempercepat penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota. Opsen Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan sumber penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan Provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB dengan kata lain memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Pemungutan Opsen Pajak ini menuntut sinergi yang baik antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah juga memperluas basis pajak melalui sinergi pajak Pusat dan Daerah seperti valet parkir, objek rekreasi dan sebagainya. Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi retribusi dilakukan agar retribusi yang akan dipungut Daerah dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Dengan berlakunya UU HKPD ini yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pada tahun 2025, terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak yang menjadi kewenangan Provinsi, dari yang semula hanya 5 (lima) jenis pajak menjadi 7 (tujuh) jenis pajak yaitu semula PKB, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, bertambah 2 (dua), yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen MBLB.

Gambar 2.156
Jenis Pajak yang Ditangani Provinsi Jawa Barat

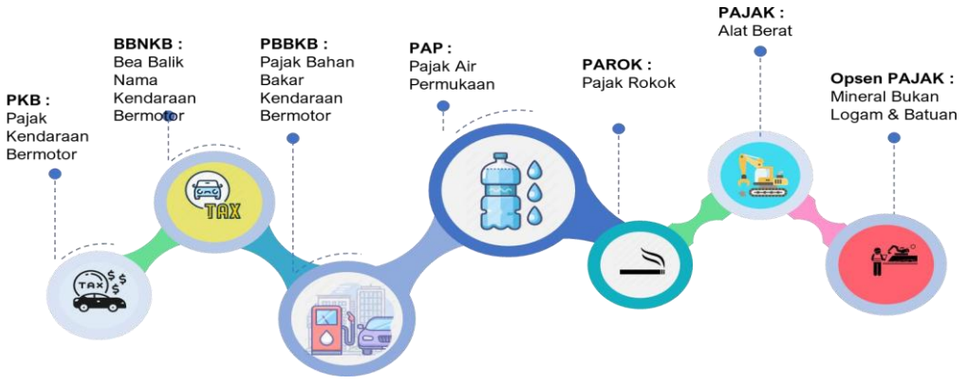

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2024

Bagi Provinsi Jawa Barat, PKB dan BBNKB saat ini masih menjadi tumpuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang dimiliki bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, jumlah Pendapatan Asli Daerah berada di angka Rp19.6 Triliun pada tahun 2018, meningkat di angka Rp21,2 Triliun pada tahun 2019, namun saat terjadi pandemi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi penurunan jumlah PAD ke angka sebesar Rp18,5 Triliun pada tahun 2020 dan Rp20,33 Triliun pada tahun 2021. Dari angka tersebut, PKB dan BBNKB sangat terpengaruhi sekali sehingga memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian PAD pada setiap tahunnya. Dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2023, rata-rata kontribusi PKB mencapai sebesar 39,38 persen dan rata-rata kontribusi BBNKB sebesar 26,08 persen.

Atas dasar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, yang diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi kontribusi terbesar dalam menyokong terselenggaranya pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Terkait kondisi diatas, setidaknya ada 3 (tiga) hal terkait pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, diantaranya yaitu:

Be a n Ter ada Waji a jak : “O en” (B & BBN B) dalam penjelasan UU nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa pungutan Opsen TANPA menambah beban WP, sehingga hasil simulasi akan mengurangi kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi.

Tarif Eksisting PKB & BBNKB : Perbedaan tarif PKB & BBNKB yang berlaku saat ini, antar Provinsi (Bahkan Dengan Provinsi Tetangga)

khususnya PKB pribadi (1,5 persen; 1,75 persen & 2 persen) & BBNKB (10 persen & 12,5 persen).

Pengelolaan Pembayaran : Pengelolaan Opsen (PKB & BBNKB), terkait kesiapan teknis (SDM, Sarana dan Prasarana, serta sistem/aplikasi kesamsatannya Khusus untuk perubahan besaran tarif PKB dan BBNKB dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.157
Perubahan Tarif PKB dan BBNKB

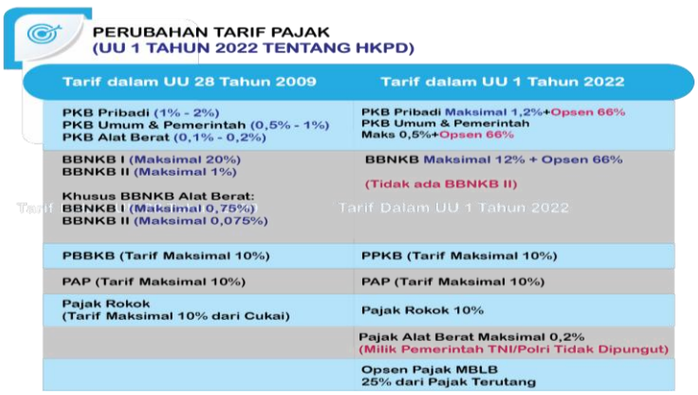

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2024

Dari hasil perubahan besaran tarif PKB dan BBNKB ini akan menjadikan perubahan yang sangat penting mengingat akan terjadi secara nyata berkurangnya besaran pendapatan daerah yang pada gilirannya akan mengurangi kapasitas fiskal daerah, artinya bahwa besaran volume APBD Provinsi Jawa Barat akan berkurang ketika besaran tarif tersebut harus diberlakukan. Adapun pemberlakukan tarif tersebut akan dilaksanakan setelah ada kesepakatan antar pemerintah daerah dengan pihak legislatif melalui proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang didalamnya mengatur terkait besaran tarif baru PKB dan BBNKB.

Dampak secara langsung apabila diterapkannya tarif maksimal PKB di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,2 persen adalah akan adanya beban tambahan kepada Wajib Pajak. Adapun beban tambahan bagi wajib pajak PKB sebesar 13,83 persen. Hal ini tentunya akan berdampak kepada adanya potensi pengurangan tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan mengacu kepada data pada tahun 2021, tingkat ketaatan PKB di Jawa Barat mencapai 48 persen saja, dan akan menurun apabila ada kenaikan tarif pajak, yang pada gilirannya akan menurunkan PAD yang bersumber dari PKB. Selain itu apabila diterapkan tarif maksimal BBNKB

di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 12 persen, maka akan adanya beban tambahan beban wajib pajak PKB sebesar 59,36 persen dari tarif eksisting saat ini.

Sementara itu, terkait implementasi PKB menggunakan tarif proporsional sebesar 1,05 persen, apabila kemudian dibandingkan dengan tarif eksisting saat ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada beban tambahan untuk wajib pajak, bahkan ada penurunan sebesar 0,39 persen. Namun disisi lain, Dampak secara langsung apabila diterapkannya tarif proporsional PKB di Provinsi Jawa Barat adalah akan adanya pengurangan kepada PAD Provinsi Jawa Barat sebesar 14,28 persen. Pun hal yang sama berlaku buat BBNKB, jika diberlakukan tarif proporsional sebesar 7,5 persen, akan membuat perolehan pajak BBNKB menurun sebesar 14,28 persen setiap tahunnya.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sehingga proyeksi pendapatan tahun 2024-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan proyeksi belanja mempertimbangkan dampak yang muncul dari diberlakukannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut terhadap kapasitas fiskal daerah. Adapun target dan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.113
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2030

Kode Akun	Uraian	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	Proyeksi Tahun 2029	Proyeksi Tahun 2030
4	**PENDAPATAN**	**31.093.909.959.215**	**31.995.827.257.992**	**32.955.702.075.731**	**33.944.373.138.003**	**34.962.704.332.143**	**36.011.585.462.108**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**19.372.208.702.215**	**19.778.098.876.136**	**20.212.811.082.766**	**20.644.819.866.168**	**21.072.349.044.809**	**21.493.329.985.512**
4.1.01	Pajak Daerah	17.691.848.216.117	18.065.073.651.496	18.434.173.641.740	18.797.478.875.765	19.153.062.245.543	19.498.696.771.426
4.1.02	Retribusi Daerah	855.125.149.196	895.461.514.156	937.919.915.081	982.391.485.507	1.028.971.680.075	1.077.760.479.418
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	368.060.136.003	387.301.981.882	407.549.773.792	428.856.101.667	451.276.304.795	474.868.615.552
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	457.175.200.899	430.261.728.602	433.167.752.153	436.093.403.229	439.038.814.396	442.004.119.116
4.2	**Pendapatan Transfer**	**11.698.506.481.000**	**12.193.869.629.020**	**12.718.349.256.201**	**13.274.308.999.951**	**13.864.388.369.464**	**14.491.545.226.177**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**11.698.506.481.000**	**12.193.869.629.020**	**12.718.349.256.201**	**13.274.308.999.951**	**13.864.388.369.464**	**14.491.545.226.177**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	11.698.506.481.000	12.193.869.629.020	12.718.349.256.201	13.274.308.999.951	13.864.388.369.464	14.491.545.226.177
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.703.170.866.000	2.814.607.641.146	2.930.638.337.827	3.051.452.338.005	3.177.246.830.812	3.308.227.134.396
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.996.117.553.000	4.054.502.151.990	4.113.739.769.279	4.173.842.867.747	4.234.824.092.360	4.296.696.272.832
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus-Fisik	153.640.882.000	182.827.499.567	217.558.596.141	258.887.436.885	308.067.372.035	366.589.846.362
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	4.845.577.180.000	5.141.932.336.317	5.456.412.552.954	5.790.126.357.314	6.144.250.074.257	6.520.031.972.587
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-	-
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	-	-	-	-	-	-

Kode Akun	Uraian	Target Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	Proyeksi Tahun 2029	Proyeksi Tahun 2030
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**23.194.776.000**	**23.858.752.836**	**24.541.736.764**	**25.244.271.884**	**25.966.917.870**	**26.710.250.419**
4.3.01	Hibah	23.194.776.000	23.858.752.836	24.541.736.764	25.244.271.884	25.966.917.870	26.710.250.419
4.3.02	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
5	**BELANJA**	**32.233.350.761.578**	**31.529.021.222.847**	**31.538.896.040.587**	**33.027.567.102.859**	**35.345.898.296.999**	**36.161.585.462.107**
5.1	**Belanja operasi**	**19.871.008.391.104**	**19.785.034.773.724**	**20.113.747.642.039**	**20.518.613.071.505**	**22.058.753.800.226**	**21.715.165.471.063**
5.1.01	Belanja pegawai	8.816.725.773.027	9.341.145.840.783	9.574.674.486.802	9.814.041.348.972	10.059.392.382.697	10.310.877.192.264
5.1.02	Belanja barang dan jasa	7.805.435.653.523	7.123.922.320.268	7.140.509.378.543	7.224.804.721.302	7.232.952.006.968	7.760.775.314.874
5.1.03	Belanja bunga						
5.1.04	Belanja subsidi	136.241.421.779	167.308.492.868	175.673.917.511	184.457.613.387	193.680.494.056	203.364.518.759
5.1.05	Belanja hibah	3.078.528.792.775	3.037.396.530.333	3.102.897.919.322	3.170.587.097.596	4.443.276.275.870	3.305.965.454.143
5.1.06	Belanja bantuan sosial	34.076.750.000	115.261.589.473	119.991.939.860	124.722.290.248	129.452.640.636	134.182.991.023
5.2	**Belanja modal**	**4.838.300.704.728**	**3.624.479.599.592**	**3.572.340.648.093**	**4.019.322.757.015**	**4.458.689.058.708**	**5.250.347.876.216**
5.2.1	Belanja Modal	4.838.300.704.728	3.624.479.599.592	3.572.340.648.093	4.019.322.757.015	4.458.689.058.708	5.250.347.876.216
5.3	**Belanja tidak terduga**	**291.800.586.591**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**
5.3.1	Belanja tidak terduga	291.800.586.591	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
5.4	**Belanja transfer**	**7.232.241.079.155**	**7.619.506.849.531**	**7.352.807.750.455**	**7.989.631.274.339**	**8.328.455.438.065**	**8.696.072.114.828**
5.4.01	Belanja bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.833.280.488.886	5.499.367.485.461	5.597.554.672.875	5.697.503.357.756	5.799.245.345.233	5.902.813.019.831
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	1.398.960.590.269	2.120.139.364.071	1.755.253.077.579	2.292.127.916.584	2.529.210.092.832	2.793.259.094.997
	Surplus/Defisit	**-1.139.440.802.363**	**466.806.035.145**	**1.416.806.035.144**	**916.806.035.144**	**-383.193.964.856**	**-149.999.999.999**

Catatan
1) Ranperda Perubahan APBD TA 2025
2) proyeksi Tahun 2026-2030 (hasil Perhitungan Bappeda Jabar, 2025)

Pada tahun 2025-2030 kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi: Gaji dan Tunjangan ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Gaji dan Honorarium Pegawai ASN BLUD, Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
2. Pemenuhan belanja *fixed cost* seperti: Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Gas, Telepon/Internet); Pemeliharaan Peralatan, Mesin, Kendaraan dan Bangunan; Tenaga *Outsourcing*; Tenaga Teknis yang akan beralih menjadi PPPK paruh waktu; Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
3. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Daerah serta penerapan pelayanan dasar, diantaranya:
   a. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029
   b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 14 (empat belas) jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial

pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Sinkronisasi prioritas pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
6. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
7. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
8. Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah diantaranya yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
9. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
10. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
11. Pengalokasian untuk pendanaan Bantuan Keuangan dan Hibah yang memberikan efek akseleratif pencapaian target-target pembangunan strategis pembangunan daerah yang makin dirasakan masyarakat daerah.

12. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah.
13. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
14. Serta belanja-belanja prioritas lainnya.

2.3.5.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Selain pendapatan dan belanja daerah yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, pada bagian ini dibahas mengenai pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran cicilan utang dalam rangka pinjaman daerah dan provinsi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman daerah.
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dan lain-lain (untuk konteks obligasi daerah).

4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

2.3.5.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

A. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)*

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan fluktuatif antar tahun. Sebagai tahun dasar perencanaan perubahan RPJMD, SiLPA tahun 2020 memiliki angka tertinggi dibandingkan 3 (tiga) tahun setelahnya. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 SiLPA mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Selain hal tersebut dalam perencanaan pembiayaan daerah dilakukan melalui skema pinjaman daerah didasarkan kepada estimasi defisit APBD dan kemampuan fiskal daerah. Dimana analisa kemampuan fiskal daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun ke belakang, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan perkiraan maju pada tahun 2025 dan tahun 2029.

Selanjutnya, pada perubahan tahun 2020 dan pada tahun 2021 telah dilakukan pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI). Pada tahun 2020, alokasi pinjaman daerah sebesar Rp1.532.607.660.148 sedangkan pada tahun 2021, diajukan pinjaman daerah sebesar Rp2.212.962.698.017. Adanya mekanisme pengajuan pinjaman daerah akan tercatat dalam proyeksi pembiayaan daerah. Tabel di bawah menyajikan

realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 2.114
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	**PEMBIAYAAN**	**4.819.021.978.913**	**3.054.053.591.932**	**1.873.503.978.377**	**1.540.602.953.484**	**618.253.076.073**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**4.872.039.978.913**	**3.154.053.591.932**	**2.635.609.455.927**	**2.899.940.245.619**	**1.237.059.111.217**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	3.289.300.908.323	1.272.234.413.783	2.575.016.379.799	2.335.392.104.049	800.167.988.688
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.532.607.660.148	1.881.560.755.969	60.529.903.522	-	680.614.442
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	563.789.491.913	436.210.508.087
6.1.5	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	50.131.410.442	258.422.180	63.172.606	758.649.657	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**53.018.000.000**	**100.000.000.000**	**762.105.477.550**	**1.359.337.292.135**	**618.806.035.144**
6.2.2	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	53.018.000.000	100.000.000.000	562.105.477.550	231.000.000.000	52.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	200.000.000.000	800.000.000.000	-
6.2.5	Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	328.337.292.135	566.806.035.144

Sumber : BPKAD - LRA Tahun 2020-2024 (Audited), diolah

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun ke belakang, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan perkiraan maju pada tahun 2025 dan tahun 2030. Tabel di bawah menyajikan realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 2.115
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

Kode Akun	Uraian	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028	Proyeksi Tahun 2029	Proyeksi Tahun 2030
6	**PEMBIAYAAN**	**1.139.440.802.363**	**- 466.806.035.144**	**-1.416.806.035.144**	**-916.806.035.144**	**383.193.964.856**	**150.000.000.000**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.756.246.837.507**	**250.000.000.000**	**250.000.000.000**	**250.000.000.000**	**1.050.000.000.000**	**250.000.000.000**
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	1.756.246.837.507	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	800.000.000.000	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah						
6.2	**Pengeluaran pembiayaan**	**616.806.035.144**	**716.806.035.144**	**1.666.806.035.144**	**1.166.806.035.144**	**666.806.035.144**	**100.000.000.000**
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	566.806.035.144	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah	50.000.000.000	150.000.000.000	800.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	300.000.000.000	500.000.000.000	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		**1.139.440.802.363**	**- 466.806.035.144**	**-1.416.806.035.144**	**-916.806.035.144**	**383.193.964.856**	**150.000.000.000**

1) Ranperda Perubahan APBD TA 2025
2) proyeksi Tahun 2026-2029 (hasil Perhitungan Bappeda Jabar, 2025)

I. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan kebijakan sebagai upaya dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian sasaran RPD. Rencana penggunaan kapasitas keuangan akan dialokasikan berdasarkan prioritas, yaitu:

a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah.
c. Prioritas III, dialokasikan membiayai program perangkat daerah dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi

2.3.6 Kebutuhan Perencanaan Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

2.3.6.1 Tantangan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Sejumlah tantangan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah telah dikaji dan dianalisis oleh Bapenda Jawa Barat (2024), antara lain:

- Intensifikasi Pendapatan Daerah selain PKB dan BBNKB: diperlukan peningkatan Profesionalisme Pengelolaan BUMD dan Pemanfaatan Aset Daerah;
- Transformasi Digital : perlunya pemerataan Teknologi dan Digitalisasi mengingat kondisi saat ini yang belum meratanya literasi digital penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat sehingga aspek pembiayaan belum optimal dilakukan;
- Kebijakan Pusat atas Kendaraan Listrik dan Peningkatan PPN: terdapat target 30% kendaraan Listrik tahun 2030 dan rencana peningkatan dari PPN 11% menjadi 12%, menjadi tantangan tersendiri sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
- Penguatan Sinergi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat dilakukan melalui sinergi pengelolaan pendapatan serta integrasi data dan informasi perpajakan;

- Meningkatkan Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak; diperlukan upaya lebih dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak secara transparan dan simplikasi prosedur pembayaran

2.3.6.2 Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Terkait dengan tantangan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, terdapat sejumlah strategi Bappenda Jawa Barat sebagai institusi yang mempunyai tupoksi pengelolaan pendapatan daerah terkait upaya peningkatan pendapatan tersebut, diantaranya:

1. Penguatan transformasi digital layanan pajak
2. Pengaturan insentif dan sanksi perpajakan
3. Integrasi data perpajakan dari Pusat – Provinsi – Kabupaten/Kota
4. Peningkatan profesionalisme aparatur pengelola pajak
5. Mencari alternatif pendapatan lainnya, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
6. Kolaborasi tiga aspek utama (3 *matching aspect*): pendanaan, program, dan promosi.

Gambar 2.158
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

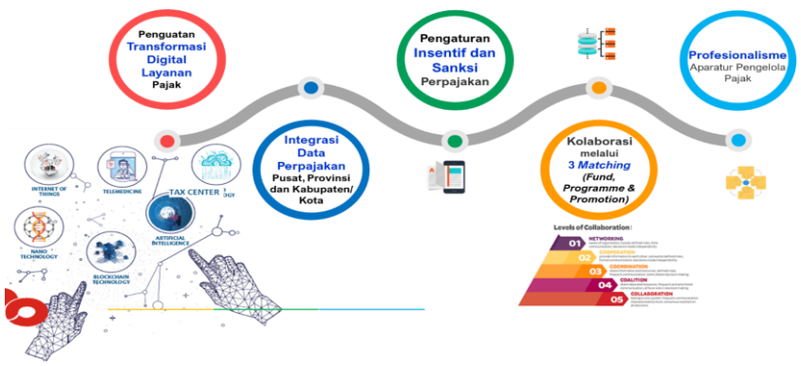

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2024

2.3.6.3 Alternatif Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD provinsi. Walau demikian, peluang untuk sumber- sumber pendanaan lainnya berkontribusi dalam membiayai pembangunan daerah sangat terbuka lebar. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat periode

Tahun 2024-2026 telah mengindentifikasi beberapa sumber pendanaan non APBD provinsi, antara lain:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

Tabel 2.116
Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024
(dalam Ribuan Rupiah)

No.	Tahun	Dana Dekonsentrasi	Dana Tugas Pembanguan	Jumlah
1	2020	334.427.767	625.462.432	959.890.199
2	2021	205.891.509	446.272.816	652.164.325
3	2022	51.487.382	135.290.960	186.778.342
4	2023	83.285.047	340.641.583	423.926.630
5	2024	62.780.247	185.997.357	248.777.604

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBN di Provinsi Jawa Barat pada 5 (lima) tahun terakhir sangat fluktuatif yaitu terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup besar dan tahun 2022 berada pada posisi menurun. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK) serta disebabkan tidak adanya Dana Urusan Bersama yang disalurkan ke Jawa Barat.

b. APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta

sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

c. *Corporate Social Responbility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Provinsi Jawa Barat yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Sampai dengan tahun 2024, telah terdaftar sebanyak 283 mitra PKBL dan TJSL Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terbagi menjadi 205 perusahaan swasta, 57 BUMN dan 21 BUMD.

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Gambar 2.159
Proporsi Mitra PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat

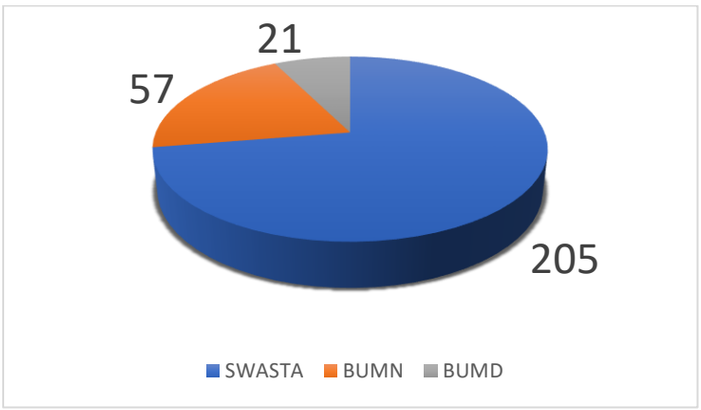

Sumber: Sekretariat Fasilitasi CSR Jawa Barat, 2024

Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari TJSL/PKBL dari Tahun 2017 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.160
Jumlah Pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Jawa Barat

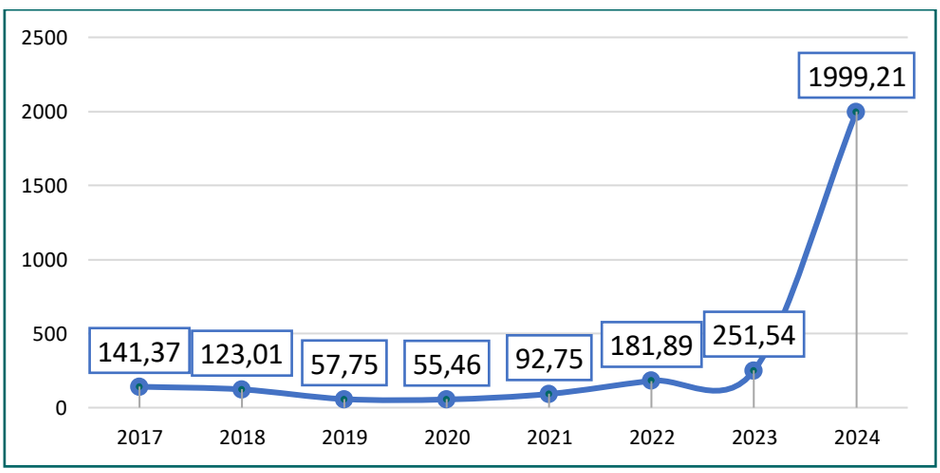

Sumber: website CSR Jawa Barat, 2025, diolah

Dari gambar di atas didapatkan informasi bahwa sumber pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat bersifat sangat fluktuatif dari Tahun 2017 hingga 2024. Jumlah dana tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar Rp1,9 Triliun, disusul dengan tahun berikutnya pada tahun 2023 sebesar Rp251,54 miliar. Kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2023 menuju tahun 2024. Sebaliknya, penurunan terbesar terdapat pada tahun 2018 dan terus menurun hingga tahun 2020 sebesar Rp55,36 miliar. Adapun realisasi Kegiatan

PKBL dan TJSL Tahun 2024 berdasarkan kategori dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.117
Realisasi Kegiatan PKBL dan TJSL Tahun 2024

No.	Kategori	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)
1	Infrastruktur dan sanitasi Lingkungan	42.446.527.906	2,12
2	Kesehatan	17.685.034.544	0,88
3	Lingkungan	472.082.968.123	23,61
4	Pendidikan	1.323.189.515.099	66,19
5	Peningkatan Daya beli	18.086.916.179	0,90
6	Sarana Keagamaan	5.753.677.353	0,29
7	Sosial	112.088.377.440	5,61
8	Lainnya	7.878.982.632	0,39
	Jumlah	**1.999.211.999.276**	**100**

Sumber: website CSR Jawa Barat, 2025, diolah kembali

Apabila melihat tabel di atas, didapatkan infomasi bahwa kegiatan PKBL dan TJSL pada tahun 2024, kategori lingkungan mempunyai proporsi yang paling besar yaitu sebesar 69,92 persen atau sebesar Rp451.273.228.387, hal ini dapat diindikasikan bahwa terhadap isu lingkungan melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan, mendapatkan dukungan pendanaan yang paling besar dari perusahaan-perusahaan yang berada di Provinsi Jawa Barat.

d. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)

Dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta urgensi percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai strategis baik di level provinsi maupun nasional, Skema pendanaan program melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) didorong untuk beberapa program infrastruktur strategis.

Selama tahun 2024, Provinsi Jawa Barat masih mengelola 6 proyek KPBU yang terus berproses. Sampai dengan akhir tahun 2024, sudah ada 2 proyek yang sudah dalam tahap transaksi, yaitu TPPAS Regional Nambo dan TPPAS Regional Legok Nangka. Ada 3 proyek dalam tahap

persiapan yaitu SPAM Regional Jatigede, SPAM Regional Sinumbra dan Perkeretaapian Perkotaan Metro Bandung. Serta 1 (satu) proyek dalam tahap perencanaan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.118
Status Proyek KPBU di Jawa Barat Tahun 2024

No.	Nama Proyek	Tahap Perencanaan	Tahap Persiapan	Tahap Transaksi	Tahap Konstruksi
1	TPPAS Regional Nambo			✓	
2	TPPAS Regional Legok Nangka			✓	
3	SPAM Regional Jatigede		✓		
4	SPAM Regional Sinumbra		✓		
5	Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung		✓		
6	PLTS Atap di Gedung Sekolah	✓			
7	TPPAS Regional Cirebon Raya	✓			

Sumber: Simpul KPBU Jawa Barat, 2024

Progres dari keenam proyek ini terkesan berjalan sangat lambat, hal ini disebabkan banyak tantangan yang harus dilalui oleh masing-masing proyek. Setiap proyek memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki tantangan yang berbeda. Seperti pada proyek TPPAS Regional Nambo yang mengalami tantangan dalam memenuhi pembiayaan (*financial close*), selain juga terkait tantangan atas proses perijinan dan kesepakatan antar daerah. Sementara di proyek TPPAS Regional Legok Nangka tantangan datang dari pihak off-taker yang akan membeli produk akhir dari sampah yaitu listrik. Untuk proyek SPAM Regional tantangan yang paling besar adalah kesepakatan tarif air curah dan kemampuan PDAM dalam menyerap air yang diproduksi.

e. Dana Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum

dapat memberi peran maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerja sama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

f. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah mencakup penerbitan obligasi daerah/sukuk, pinjaman kepada pemerintah serta ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko yang ada. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan (*revenue bond*). Selain Obligasi Daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah Obligasi Syariah atau Sukuk.

Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2023, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Sukuk daerah merupakan surat berharga berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyiapan pranata regulasi dan kelembagaan telah dilakukan oleh

pemerintah daerah, antara lain melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Barat serta pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Kegiatan penguatan ekonomi syariah di Jawa Barat dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah baru, diantaranya dengan meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dalam membiayai kegiatan usaha produktif baik yang dijalankan oleh usaha kecil, menengah maupun besar.

g. Pembayaran Berbasis Hasil (*Result Based Payment*)

Pembayaran Berbasis Hasil atau *Result Based Payment* merupakan salah satu mekanisme insentif pendanaan dalam urusan perubahan iklim yang dapat diakses dengan menunjukkan pencapaian atau hasil dalam penurunan emisi yang melibatkan berbagai sektor, seperti sektor lahan dan kehutanan, energi, industri, limbah, dan transportasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana *Result Based Payment* (RBP) *Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) for *Result Period* 2014 – 2016, *Green Climate Fund* (F) Out u t 2 untuk ateg ri e manfaatan "*Result Based Payment for Verified Emission Reduction*", a a Barat mendapatkan alokasi sebesar 205.488 USD yang dapat dimanfaatkan dalam rentang waktu Tahun 2024-2030. Pemanfaatan ini diperuntukkan untuk kegiatan berbasis lahan dan lingkungan yang dapat mendorong penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang meliputi; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Program Kampung Iklim (Proklim), Pembuatan Kajian *Nationally Determined Contribution* (NDC) Provinsi, Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan, dan Fasilitasi Peningkatan Jasa Lingkungan.

Untuk Jawa Barat, jika Jawa Barat memiliki kawasan hutan sebesar 794.622,11 Ha pada tahun 2020, dapat diasumsikan bahwa Jawa Barat memiliki potensi penyimpanan karbon dalam kawasan hutan sekitar 110,52 juta ton karbon. Potensi ini belum termasuk luas kawasan *mangrove* yang memiliki total potensi seluas 39.305 Ha dari luas

eksisting sebesar 12.205 Ha. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki potensi Hutan Rakyat seluas 856.174,88 Ha yang dapat juga dimasukkan ke dalam perhitungan potensi karbon. Jika dapat dilakukan dengan optimal, potensi penyimpanan karbon di Jawa Barat dari sektor kehutanan dapat mencapai 4.680,67 juta ton karbon (CO2eq).

Selain sektor kehutanan, sektor energi terbarukan juga menjadi salah satu sektor yang didorong dalam upaya penurunan emisi dan perdagangan karbon. Bahkan dalam *Paris Agreement Credit Mechanism* (PACM), sektor ini masih menjadi satu-satunya sektor yang dipertimbangkan untuk melakukan skema karbon kredit. Di Jawa Barat, energi terbarukan didorong melalui pembangunan pembangkit listrik dengan energi alternatif seperti surya (PLTS), air (PLTA dan PLTMH), angin (PLTB), *biomass*.

Total emisi yang dapat dikurangi dari sektor energi yaitu sebesar 3.083,8 juta ton CO2eq. Jika digabungkan dengan potensi dari sektor kehutanan, potensi total emisi yang bisa dikurangi di Jawa Barat yaitu sebesar 7.764,47 CO2eq. Kemudian, jika diasumsikan paling tidak sebanyak 60% total emisi tersebut harus diberikan untuk mendorong NDC Indonesia, berarti sebesar 4.658,68 juta ton CO2eq dapat masuk ke dalam pasar karbon *voluntary*/sukarela dengan skema *offset* emisi. Jika harga satu ton karbon sebesar Rp30.000, jumlah keuntungan yang didapat yaitu sekitar Rp139,76 triliun.

Jumlah emisi Karbon di Jawa Barat menurut data SIGNSMART KLHK pada sektor energi pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 44.885 Gg CO2eq. Jika diasumsikan rata-rata kenaikan jumlah emisi karbon sebanyak 3%, maka potensi pendapatan daerah yang didapatkan dari pajak karbon adalah sebagai berikut.

Tabel 2.119
Potensi Pendapatan Daerah yang Didapatkan dari Pajak Karbon

Tahun	Jumlah Emisi Karbon (Gg CO2eq)	Tarif Pajak Karbon Minimal (Rp/kg CO2eq)	Potensi pendapatan (Rp juta)
2025	44.885	30	1.346.550
2026	46.487	30	1.394.622
2027	48.147	30	1.444.410
2028	49.866	30	1.495.975

Tahun	Jumlah Emisi Karbon (Gg CO2eq)	Tarif Pajak Karbon Minimal (Rp/kg CO2eq)	Potensi pendapatan (Rp juta)
2029	51.646	30	1.549.381
2030	53.490	30	1.604.694

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat diproyeksikan memiliki potensi pendapatan sebesar 1,6 triliun rupiah melalui implementasi pajak karbon pada sektor energi. Potensi ini belum termasuk potensi pada sektor lainnya seperti limbah atau pun transportasi yang menjadi sektor penyumbang emisi terbesar kedua dan ketiga di Jawa Barat.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan dalam 4 (empat) aspek utama yaitu: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Daya Saing Daerah, dan (4) Aspek Pelayanan Umum. Aspek-aspek tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya dan permasalahan dari setiap aspek diidentifikasi berdasarkan gambaran umum kondisi daerah serta hasil analisis capaian/kinerja penyelenggaraan pembangunan yang dilengkapi dengan catatan-catatan kondisi dalam pembangunan Jawa Barat pada periode pembangunan sebelumnya. Berikut kategorisasi permasalahan pembangunan.

2.4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan aspek geografi dan demografi dapat dipandang sebagai permasalahan yang menyangkut aspek pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta masyarakat yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan aspek geografi dan demografi meliputi: Potensi sumber daya alam; Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; Kualitas lingkungan hidup; Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; dan Demografi.

- **Potensi Sumber Daya Alam belum optimal**; Potensi sumber daya alam yang mendukung keberlanjutan hidup masyarakat di Jawa Barat

mengalami sedikit penurunan. Salah satu komoditas pangan yang mengalami penurunan produksi pangan yaitu padi dari 9.017 juta ton pada 2020 menjadi 8.627 juta ton pada 2024, serta menyusutnya luas panen dari 1,93 juta hektar menjadi 1,82 juta hektar pada periode yang sama, mencerminkan menurunnya kapasitas produksi pangan pokok. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti alih fungsi lahan, penurunan kualitas tanah, hingga dampak perubahan iklim. Selain itu terdapat permasalahan pada pengembangan Ekowisata Terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya amenitas, daya tarik wisata (*attraction*), kemudahan mencapai destinasi wisata (*accessibility*), serta keamanan dan keramahtamahan (*ancilliary*). Terbatasnya amenitas yang dilengkapi dengan fasilitas *showcase* dan galeri yang tertata serta belum berkembangnya ekonomi kreatif di dalam kawasan ekowisata, sehingga belum memberikan *trickle down effect* yang lebih besar untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih inklusif. Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata alam yang besar dengan jumlah destinasi wisata yang tersebar luas, terdiri dari 1.430 destinasi wisata alam, 816 wisata buatan, dan 615 desa wisata yang tercatat hingga tahun 2024. Namun, belum terbangunnya integrasi yang kuat antara sektor pariwisata dengan ekonomi kreatif serta keterbatasan fasilitas pendukung menjadi hambatan dalam mewujudkan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif.

- **Berkurangnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**; Kurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi banyak wilayah di Provinsi Jawa Barat, terutama di daerah urban dan industri. Pertumbuhan populasi yang pesat dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, termasuk banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi akibat kebutuhan hidup telah berdampak terhadap kemampuan alam untuk mendukung kehidupan. Selain itu, sekitar 40 persen wilayah Provinsi Jawa Barat telah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam hal penyediaan air bersih, khususnya di wilayah Pantura dan Bandung Raya. Hal ini berisiko memperburuk kerusakan lingkungan, mengancam keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

- **Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan belum optimal**;

Ketahanan energi belum optimal ditunjukkan oleh akses listrik yang berkualitas belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Walaupun tingkat rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 telah mencapai 99,9 persen dari total rumah tangga namun secara kualitas di beberapa wilayah masih belum memenuhi standar teknis (fluktuasi tegangan) yang berlaku, khususnya di Provinsi Jawa Barat bagian selatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi sarana ketenagalistrikan seperti kapasitas infrastruktur distribusi yang masih belum dapat mengimbangi sisi kebutuhannya. Tingginya ketergantungan sumber pembangkitan listrik berbahan batu bara dan bahan bakar fosil masih menjadi permasalahan lain di Jawa Barat. Dari total konsumsi energi, baik dari sisi pembangkit listrik maupun konsumsi energi non-pembangkit listrik, di Provinsi Jawa Barat sebesar 29,35 MTOE (2023), sekitar 74,19 persen di antaranya masih ditopang oleh sumber energi primer fosil, seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tersebut berdampak pada peningkatan emisi gas CO2 sehingga dalam kerangka implementasi kebijakan *Net Zero Emission* (NZE) diperlukan penerapan Mekanisme Transisi Energi (ETM) secara bertahap. Pada tahun 2022, beberapa Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batu Bara (PLTU) di Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan menempuh proses *early retirement mechanism*. Implementasi transisi energi dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan rendah emisi termasuk *co-firing* batubara dengan biomassa, konservasi dan efisiensi energi, penggunaan teknologi dekarbonisasi seperti *Carbon Capture Storage*, dan introduksi energi baru seperti hidrogen dan/atau nuklir.

Permasalahan ketahanan air di Jawa Barat adalah sampai tahun 2018 di Jawa Barat terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan kondisi kritis dan sangat kritis. Ada sebanyak 215 DAS dari 324 DAS di Provinsi Jawa Barat yang diketahui termasuk dalam kategori kritis dan sangat kritis. DAS dengan luas tingkat kekritisan sangat besar adalah DAS Citarum, yang mencapai 199.176,70 ha. DAS menjadi sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia.

Permasalahan lain yaitu sistem pangan di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan ke depan. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jawa Barat mengalami peningkatan dari 76,78 pada tahun 2020 menjadi 82,97 pada tahun 2024, dan berada di peringkat ke-8 secara nasional, capaian ini belum mencerminkan pemerataan ketahanan pangan di seluruh wilayah. Rata-rata IKP kabupaten/kota tahun 2024 sebesar 81,14 mengindikasikan adanya ketimpangan antarwilayah, dimana daerah seperti Kota Bekasi (93,90) dan Kota Bandung (91,55) menunjukkan ketahanan pangan yang tinggi, sementara Kabupaten Bogor (70,01), Kota Tasikmalaya (74,37), dan Bandung Barat (75,79) masih tertinggal. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Jawa Barat mencapai 3,81 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir yang menunjukan adanya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

- **Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah**; Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan tren peningkatan dari 61,59 pada tahun 2020 menjadi 66,09 pada tahun 2024, nilai ini masih tergolong sedang dan mengindikasikan bahwa tantangan lingkungan belum sepenuhnya teratasi. Secara rinci, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) masih menunjukkan capaian yang relatif rendah dan terus mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2022-2024), yaitu sebesar 46,67 pada tahun 2024. Demikian pula dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang capaian tahun 2024 masih rendah berada pada angka 42,07 mencerminkan tingginya pencemaran dan degradasi tanah yang terjadi. Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan pesatnya urbanisasi, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan industrialisasi yang turut mendorong peningkatan pencemaran udara dan air secara signifikan. Di sisi lain, pengelolaan sampah juga belum optimal. Hal ini tercermin dari capaian akses penanganan sampah di wilayah perkotaan yang selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, bahkan mengalami penurunan dari 74,64 persen pada tahun 2023 menjadi 70,77 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya

kualitas layanan pengelolaan sampah di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.

- **Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim yang belum optimal**; Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan geologis yang kompleks, seperti keberadaan 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif, serta letaknya di pertemuan lempeng tektonik. Kombinasi faktor alam tersebut menjadikan Jawa Barat rentan terhadap berbagai bencana, antara lain gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga tsunami. Dampak perubahan iklim turut memperparah kondisi ini melalui peningkatan intensitas cuaca ekstrem. Tingkat kerentanan ini tercermin dalam Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Barat yang, meskipun menurun dari 145,81 pada 2020 menjadi 114,15 pada 2024, masih berada dalam kategori sedang. Sejumlah 24 kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan yang sedang, dengan karakteristik risiko yang berbeda antarwilayah. Wilayah selatan rawan tsunami dan longsor, wilayah tengah rentan terhadap gempa bumi, dan wilayah utara lebih sering terdampak banjir akibat alih fungsi lahan.

  Kerawanan ini juga berdampak pada infrastruktur strategis. Bencana gempa dan longsor di akhir tahun 2024 menyebabkan kerusakan pada ruas jalan Sukanagara–Sindangbarang sepanjang 1,2 km dan ruas jalan Sukabumi (Baros)–Sagaranten sepanjang 4,2 km. Hal ini berdampak pada akses masyarakat yang terganggu dan capaian indikator kemantapan jalan provinsi tahun 2024 mencapai 90,22 persen dari target 90,50 persen. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan upaya mitigasi dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.

- **Permasalahan demografi**; Permasalahan demografi menyangkut kondisi sumber daya manusia yang menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu wilayah dengan ketimpangan distribusi yang tinggi, dimana terjadi konsentrasi penduduk yang sangat padat terutama pada daerah urban atau kota-kota besar atau daerah tertentu, sementara wilayah lain mengalami penurunan jumlah penduduk. Hal ini terjadi akibat urbanisasi yang cepat atau migrasi penduduk antar daerah mengingat

Jawa Barat termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kelahiran tinggi di Indonesia sehingga cenderung mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. Selain itu, permasalahan demografi mencakup pertambahan penduduk dan pengendalian penduduk serta diperkuat dengan masih terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana.

1. **Pertambahan Penduduk dan kebutuhan pengendaliannya**; Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2024 tercatat mencapai 50.345.189 jiwa menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rata-rata periode 2020–2024 sebesar 1,13 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1,11 persen. Selain itu, proyeksi kepadatan penduduk terus meningkat dari 1.300 jiwa/km² pada 2020 menjadi 1.370 jiwa/km² pada 2025, dan diperkirakan mencapai 1.413 jiwa/km² pada 2029. Kondisi ini menunjukkan tekanan tinggi terhadap ruang, lingkungan, serta sarana dan prasarana publik. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas orang, barang dan jasa, yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah. Tingkat konektivitas wilayah tahun 2024 masih 60,47 persen, menunjukkan belum optimalnya infrastruktur pendukung pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemerataan pembangunan menjadi isu strategis yang perlu direspon secara terintegrasi.
2. **Puncak bonus demografi dan antisipasi ketergantungan penduduk**; Daya saing daerah salah satunya didukung oleh pengendalian penduduk dan juga kualitas keluarga. Upaya pengendalian penduduk salah satunya terindikasikan dengan angka *Total Fertility Rate* (TFR). TFR sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk mengukur efektivitas kebijakan keluarga berencana dan upaya pengendalian pertumbuhan populasi. TFR membantu dalam memahami struktur demografi suatu populasi. Jika TFR tinggi, populasi cenderung memiliki proporsi besar anak-anak dan remaja yang dapat memiliki dampak pada ekonomi dan layanan masyarakat. Jawa Barat pada tahun 2023 memiliki angka TFR 2,06 atau 106,79 persen dari target capaian kinerja nasional. Kondisi ini menghasilkan

bonus demografi yang berpuncak pada periode 2025-2029. Proporsi penduduk usia produktif mulai mengalami penurunan dari 69,96 persen pada tahun 2020 menjadi 69,87 persen pada 2024, dan diproyeksikan terus menurun hingga 68,86 persen pada tahun 2030. Sebaliknya, rasio ketergantungan terus meningkat, dari 42,84 persen pada tahun 2022–2023 dan diproyeksikan mencapai 53,5 persen pada tahun 2045. Kondisi ini mengindikasikan bahwa beban penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif akan semakin berat. Oleh karena itu, selain penyiapan sumber daya manusia yang unggul di masa puncak demografi, perlu juga dirancang strategi jangka panjang untuk mengantisipasi peningkatan jumlah lansia dan ketergantungan ekonomi yang menyertainya.

2.4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat melingkupi kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, kehidupan beragama dan budaya, serta Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, Masyarakat Inklusif.

A. Kesejahteraan Ekonomi

Permasalahan kesejahteraan ekonomi di Provinsi Jawa Barat terdiri dari daya beli masyarakat, kemiskinan, tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan, ketimpangan akses, serta kesejahteraan petani dan nelayan.

- **Daya Beli Masyarakat Masih Rendah;** Daya beli masyarakat yang masih rendah merupakan salah satu permasalahan utama di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercermin dari capaian pengeluaran per kapita yang secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Jawa Barat tercatat sebesar Rp12.157 ribu, sementara rata-rata nasional mencapai Rp12.341 ribu. Ketertinggalan ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta (Rp19.953 ribu) dan DI Yogyakarta (Rp15.361 ribu). Selain itu, terdapat ketimpangan yang signifikan antarwilayah dalam provinsi, misalnya, pengeluaran per kapita di Kota Bandung mencapai Rp18.795 ribu, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya hanya Rp8.965 ribu, menunjukkan kesenjangan sebesar Rp9.830 ribu.

Daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin sangat rentan terhadap inflasi barang dan jasa, sehingga perlu upaya pengendalian inflasi dimana harga-harga di tingkat konsumen rentan oleh gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok global maupun faktor internal. Hal ini ditunjang dengan belum optimalnya stabilitas pasokan, sistem rantai pasok dan perlindungan sosial yang belum tepat sasaran.

- **Kemiskinan Masih Tinggi;** Kemiskinan masih menjadi permasalahan krusial di Provinsi Jawa Barat meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2021 hingga 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 346,6 ribu orang, di tengah kenaikan garis kemiskinan dari Rp427.402 menjadi Rp524.052 per kapita per bulan. Namun demikian, sebagian besar penduduk miskin (78,55 persen) justru berada di wilayah perkotaan dan bekerja di sektor informal (62,87 persen) serta non-pertanian (67,73 persen), yang artinya banyak penduduk miskin yang bermigrasi ke kota untuk mencari peluang kerja, namun tidak terserap di sektor formal.

  Selain itu, analisis berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa kualitas kemiskinan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perdesaan. Pada tahun 2024, P1 di wilayah perdesaan tercatat sebesar 1,45 persen, lebih tinggi dibanding perkotaan yang sebesar 1,15 persen. Hal serupa terlihat pada P2, yaitu 0,33 persen di perdesaan dan 0,28 persen di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin lebih banyak di wilayah perkotaan, kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih parah, baik dari sisi jarak terhadap garis kemiskinan maupun tingkat ketimpangan antarpenduduk miskin. Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrem pada 2023 tercatat sebanyak 403,38 ribu jiwa, meskipun telah menurun dari 941,86 ribu jiwa pada 2022. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan dan dalam bentuk ekstrem, masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan sensitif terhadap wilayah. Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem masih signifikan, dengan 403,38 ribu jiwa pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.

- **Tingkat Pengangguran Masih Tinggi;** Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih cukup tinggi hal ini terlihat dari pertumbuhan Angkatan kerja yang tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja meskipun menunjukkan tren penurunan dari 10,46 persen pada tahun 2020 menjadi 6,75 persen pada tahun 2024. Angka ini masih tercatat sebagai yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa, menandakan bahwa penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Kondisi ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, terlihat dari tingginya tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMK sebesar 12,74 persen, SMA sebesar 10,19 persen, Diploma dan Universitas secara bersamaan sebesar 11,29 persen pada tahun 2024.

  Masalah pengangguran juga lebih menonjol pada kelompok usia muda, terutama usia 15–19 tahun yang mencapai 32,33 persen dan 20–24 tahun sebesar 20,34 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif awal belum sepenuhnya siap memasuki pasar kerja karena keterbatasan pengalaman serta akses terhadap peluang kerja yang layak. Dari sisi kewilayahan, pengangguran di wilayah perkotaan mencapai 6,98 persen, lebih tinggi dibandingkan di perdesaan sebesar 5,84 persen, mencerminkan tekanan pasar kerja yang lebih besar di kota-kota besar. Secara keseluruhan, meskipun partisipasi angkatan kerja menunjukkan tren meningkat, yaitu dari 64,95 persen (2021) menjadi 67,71 persen (2024), masih dibutuhkan kebijakan afirmatif dan inovatif yang menyasar kelompok usia muda, perempuan, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis industri agar pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan
- **Kesenjangan Pendapatan Masih Terjadi;** Di Jawa Barat masih terdapat kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Hal ini tercermin dari tren Gini Rasio yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 0,398 pada tahun 2020 menjadi 0,428 pada tahun 2024. Angka ini tidak hanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (0,381), tetapi juga menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan ketimpangan tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Kesenjangan ini juga terlihat dari disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana pada September 2024 Gini Rasio perkotaan tercatat sebesar 0,439, sementara perdesaan hanya 0,327. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh konsentrasi PDRB di empat wilayah utama (Kabupaten Bogor, Bekasi, Karawang, dan Kota Bandung) yang menyumbang lebih dari 51% terhadap total PDRB provinsi, serta tingginya Gini Rasio di beberapa kota seperti Kota Bogor (0,477), Kota Bandung (0,440), dan Kota Cirebon (0,424). Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berjalan secara inklusif dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

- **Ketimpangan Akses;** Masih terdapat ketimpangan akses dalam pemerataan pembangunan. Ketimpangan ini tercermin dari masih rendahnya tingkat aksesibilitas infrastruktur yang hanya mencapai 38,76 persen pada tahun 2024, menunjukkan belum optimalnya jangkauan layanan transportasi dasar di banyak wilayah, terutama daerah perdesaan dan terpencil.

  Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dan survei lapangan masing-masing Dinas Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa masih terdapat 7 desa *blank spot* dengan kriteria tanpa selular yang tersebar di 4 Kabupaten dan 60 desa *blank spot* dengan kriteria tanpa konektivitas fiber optik yang tersebar di 11 kabupaten. Hal ini mengindikasikan kesenjangan dalam infrastruktur digital yang penting untuk mendukung pendidikan dan perekonomian modern.

  Sementara itu, kondisi infrastruktur permukiman menunjukkan tingkat kemantapan jalan desa baru mencapai 65,46 persen, yang berdampak pada keterisolasian wilayah dan lambatnya distribusi layanan publik. Ketimpangan akses ini tidak hanya memperlambat pemerataan pembangunan, tetapi juga berpotensi memperbesar disparitas kesejahteraan antarwilayah di Jawa Barat.
- **Kesejahteraan Petani dan Nelayan Masih Rendah;** Kesejahteraan petani dan nelayan perlu didukung dengan pengembangan rantai nilai tambah *(add value chain*) berbasis pertanian dan perikanan. Provinsi Jawa Barat merupakan kontributor kedua dalam produksi beras nasional, namun tingkat kesejahteraan petani khususnya pangan masih lebih rendah dari provinsi lain. Capaian NTP Provinsi Jawa Barat

Tahun 2024 sebesar 112,17 poin, mengindikasikan sisi pendapatan petani masih lebih rendah dari pengeluarannya. Kesejahteraan petani juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya harga jual yang rendah, akses yang terbatas terhadap pasar, ketidakpastian iklim dan bencana alam, serta kurangnya akses pengetahuan terhadap perkembangan teknologi pertanian.

B. Kesehatan

Permasalahan kesehatan adalah belum optimal pemerataan dan distribusi infrastruktur pelayanan kesehatan. **Pemerataan dan distribusi infrastruktur pelayanan kesehatan antarwilayah** menjadi perhatian serius. Jumlah rumah sakit di Jawa Barat Per Februari 2025 sebanyak 429 unit dengan ketersediaan tempat tidur rumah sakit pada tahun 2022 tercatat sebanyak 60.692 unit yang belum merata jumlah persebarannya. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Selain permasalahan infrastruktur, permasalahan kesehatan lain yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial dan budaya adalah masih rendahnya literasi kesehatan pada masyarakat yang berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan, pola hidup sehat, dan pemanfaatan layanan kesehatan secara tepat. Beberapa kebiasaan atau kepercayaan (budaya) lokal seperti keengganan melahirkan di fasilitas kesehatan, penggunaan dukun bayi tanpa pelatihan medis, atau tabu terhadap imunisasi menjadi penghambat pelayanan kesehatan yang aman, termasuk kesenjangan sosial ekonomi yang sangat berpengaruh salah satunya terhadap kesehatan mental masyarakat dan pembiayaan kesehatan yang menjadi hambatan tersendiri dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

C. Pendidikan

Permasalahan pendidikan terdiri dari: akses pendidikan, partisipasi sekolah, disparitas kualitas sumber daya manusia, keterkaitan (*link and match)* pendidikan, literasi digital, dan kompetensi tenaga kerja.

- **Akses pendidikan**; Salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat adalah belum optimalnya akses layanan sosial,

khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan distribusi layanan pendidikan masih menjadi persoalan nyata. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya 14 (empat belas) kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK baik negeri maupun swasta, serta 128 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Selain itu, kebutuhan ruang kelas baru (RKB) sangat tinggi, mencapai 35.098 unit berdasarkan kondisi eksisting rombongan belajar, bahkan melonjak hingga 628.841 unit jika mengacu pada kebutuhan ideal dengan rombongan belajar maksimal. Kesenjangan ini menyebabkan banyak sekolah harus memanfaatkan ruang non-belajar seperti laboratorium atau aula untuk proses pembelajaran.

- **Partisipasi Sekolah;** Masih rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya anak tidak sekolah. Jumlah penduduk terbesar secara nasional namun belum sebanding dengan kualitas sumber daya. Hal ini dapat dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat, SMP/Sederajat, hingga SMA/Sederajat. Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat mayoritas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan masing-masing capaian 94,89 persen, 79,64 persen dan 69,63 persen. Sedangkan angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun sebesar 0,53 persen, usia 13-15 tahun sebesar 8,53 persen dan usia 16-18 tahun 27,16 persen. Angka tersebut masih di atas rata-rata Nasional. Permasalahan pendidikan selanjutnya yaitu kurikulum yang belum mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja global serta belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- **Disparitas Kualitas SDM;** Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang, tingkat pendidikan yang relatif rendah, lemahnya keterkaitan (*link and match*) antara lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja, masih rendahnya minat baca dan literasi masyarakat, belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM serta kurangnya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja.
- ***Link and Match* Pendidikan;** Keterkaitan yang lemah (*link and match*) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja. Lemahnya keterkaitan (*link and match*) antara lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan

dengan dunia kerja diindikasikan oleh tingkat pengangguran terbuka disumbang paling banyak dari lulusan SMK yaitu sebesar 12,74 persen. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurikulum pendidikan SMK yang belum adaptif dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wirausaha mandiri.

- **Literasi Digital;** Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM menjadi permasalahan di Jawa Barat. Meskipun Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, pencapaian ini masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Barat mengalami kemajuan, namun secara rata-rata kemampuan literasi digital masyarakatnya masih menjadi tantangan. Jika ditelusuri lebih dalam, Budaya Digital (*Digital Culture*) di Provinsi Jawa Barat merupakan pilar yang berkontribusi besar dalam pencapaian Indeks Literasi Digital. Sehingga Provinsi Jawa Barat perlu melakukan upaya lebih untuk meningkatkan capaian 3 (tiga) pilar lainnya yaitu Kecakapan Digital (*Digital Skill*), Etika Digital (*Digital Ethics*), dan Keamanan Digital (*Digital Safety*). Rendahnya *digital skill* masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kemampuan masyarakat melindungi data pribadi dan keamanan digital masih menjadi tantangan.
- **Kompetensi Tenaga Kerja;** Kurangnya SDM yang kompeten yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keterserapan tenaga kerja penduduk dilihat dari kualifikasi pendidikan di Provinsi Jawa Barat masih rendah. Pada tahun 2024 penduduk bekerja berdasarkan kualifikasi pendidikan, masih didominasi tenaga kerja yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 37,25%. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 11,46%. Selain disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, kurangnya SDM yang kompeten juga disebabkan oleh keterbatasan keberadaan BLK yang tersertifikasi, baik dari aspek sarana prasarana maupun tenaga pelatih yang kompeten, serta belum berkembangnya pusat pendidikan dan inovasi.
- **Perlindungan sosial belum merata**; salah satu permasalahan di Jawa Barat adalah menjamin perlindungan sosial bagi seluruh pekerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Di Provinsi Jawa

Barat, meskipun Pekerja cukup besar dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil, namun tingkat perlindungan sosial terhadap pekerja masih belum optimal, terutama pada kelompok pekerja rentan dan sektor informal. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan , di bulan maret dari Jumlah Penduduk Bekerja (Diluar ASN/TNI/POLRI dll) sebanyak 19,1 juta orang, jumlah pekerja yang aktif menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan adalah sebesar 6,4 juta orang atau 33,54 persen. Untuk pekerja formal dari 9,6 juta orang hanya 5,26 juta (54,68 persen) saja yang aktif sedangkan untuk untuk pekerja informal dari 9,48 juta orang hanya 1,15 juta (12,1 persen) saja yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- **Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Agama Belum Optimal;** Provinsi Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, antara lain 13 (tiga belas) kampung adat yang telah diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) dan 147 kampung budaya aktif yang masih melestarikan seni, tradisi, dan kearifan lokal. Potensi ini seharusnya dapat menjadi modal strategis dalam pembangunan daerah, namun hingga kini pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pembangunan secara sistematis. Selain itu, nilai-nilai agama yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, etika sosial, dan harmoni sosial juga belum sepenuhnya diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan sosial budaya.

  Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) juga menjadi indikator penting yang mencerminkan kondisi tersebut. Meskipun IKUB Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan dari 70,52 pada tahun 2021 menjadi 76,47 pada tahun 2024 dan telah masuk kategori tinggi, capaian ini tetap menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai agama, khususnya dalam menghadapi tantangan modernisasi, urbanisasi, dan dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mendukung pemajuan kebudayaan dan nilai-nilai agama secara holistik.
- **Peran Pemuda Belum Optimal;** Populasi Pemuda yang mencakup 23,81 persen dari total penduduk Jawa Barat (Susenas, 2024), memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, kekuatan moral, dan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Namun, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2021, IPP Jawa Barat tercatat sebesar 47 poin, dan meskipun mengalami peningkatan hingga tahun 2023, seluruh domain IPP masih menunjukkan capaian yang tertinggal dibandingkan nasional. Terutama pada domain lapangan dan kesempatan kerja, selisihnya mencapai 10 poin, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda mencapai 18,83 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 13,41 persen.

Selain itu, indikator lain juga menunjukkan rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan stagnan di angka 18,11 persen selama dua tahun terakhir, sementara keterlibatan dalam kegiatan ekonomi mandiri baru mencapai 16,25 persen pada tahun 2024. Temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, serta ruang partisipasi yang inklusif bagi pemuda agar potensi mereka dapat dioptimalkan secara lebih berkelanjutan.

- **Kelompok Rentan;** Ketimpangan gender dan perlindungan terhadap kelompok sosial merupakan isu sosial yang saling terkait dan memerlukan perhatian serius dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terus menunjukkan tren menurun dan secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional dalam lima tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2024, IPG Jawa Barat tercatat sebagai yang terendah di antara provinsi lain di Jawa–Bali, menandakan masih adanya kesenjangan signifikan dalam capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, meskipun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami tren penurunan selama periode 2020–2024, nilai capaiannya masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Hal tersebut juga diperkuat oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang pada tahun 2024 hanya mencapai 50,59 persen, jauh tertinggal

dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai 84,51 persen. Kesenjangan partisipasi sebesar 34 poin ini menunjukkan bahwa adanya hambatan struktural dan sosial membatasi akses perempuan terhadap peluang ekonomi, sehingga memperkuat gambaran ketimpangan gender di Provinsi Jawa Barat. Beberapa kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan antara lain :

- **Perempuan;** seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan, baik di dalam rumah tangga, tempat kerja, maupun dalam masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan sangat penting terutama terhadap hak reproduksi, perlindungan dari kekerasan dan akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan yang setara.
- **Anak-anak;** terutama yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian hak-hak dasarnya. Perlindungan terhadap anak-anak termasuk hak atas pendidikan yang layak, perlindungan dari pekerja anak, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang baik. Upaya peningkatan kualitas hidup anak mengarah pada pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan yang ditunjukkan dengan capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2023 yang menurun dari 63,30 menjadi 63,83, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- **Penyandang Disabilitas;** seringkali dihadapkan pada keterbatasan fisik dan sosial yang membuat mereka lebih rentan terhadap diskriminasi dan kurangnya akses terhadap layanan publik. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas meliputi akses yang setara pada pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas umum yang ramah disabilitas.
- **Lanjut Usia (lansia);** seringkali menjadi kelompok rentan yang terabaikan dalam akses terhadap layanan Kesehatan dan sosial. Perlindungan terhadap lansia meliputi pengakuan terhadap hak mereka untuk hidup dengan sehat, bermartabat, dan akses fasilitas umum ramah lansia.
- **Kelompok Minoritas;** meliputi kelompok etnis, agama, atau ras tertentu seringkali menjadi korban diskriminasi dan marginalisasi. Perlindungan terhadap kelompok minoritas meliputi perlindungan

hak-hak mereka untuk hidup tanpa diskriminasi dan mendapatkan akses setara terhadap sumber daya dan layanan.

- **Kualitas keluarga;** Dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas, mengarah pada pencapaian 3 (tiga) aspek meliputi ketahanan, kesejahteraan, dan partisipasi. Namun hingga tahun 2023, capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Provinsi Jawa Barat masih rendah yang mengindikasikan bahwa terdapat hambatan pada pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: 1) masih rendahnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokoknya; 2) masih kurangnya kemampuan resiliensi keluarga terhadap perubahan perubahan kondisi; serta 3) masih rendahnya peran dan kontribusi dalam menjalankan fungsi keluarga.

2.4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menggambarkan keunggulan komparatif dan keungulan kompetitif yang dimiliki Provinsi Jawa Barat ditinjau dari aspek daya saing sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi makro. Berikut permasalahan aspek daya saing daerah.

- **Rasio ketergantungan yang tinggi**; Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif menjadi sangat penting sebagai penggerak perekonomian daerah. Berdasarkan struktur umur penduduk, Jawa Barat memiliki komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Kelompok usia ini menjadi kekuatan utama dalam aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, proporsi usia produktif di Provinsi Jawa Barat terlihat sedikit demi sedikit terus mengalami penurunan dari sebesar 69,96 persen pada tahun 2020 menjadi 69,87 persen pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan menjadi 68,86 persen di tahun 2030. Terjadinya pengurangan usia produktif utamanya disebabkan oleh semakin rendahnya tingkat kelahiran dan semakin tingginya derajat kesehatan yang menyebabkan peningkatan usia harapan hidup yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut.

- **Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas;** Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dimana pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Jawa Barat belum diikuti dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara merata. Beberapa kondisi yang dialami Jawa Barat yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, diantaranya adalah masih tingginya angka ketimpangan pendapatan di masyarakat, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, lapangan pekerjaan yang terbatas, kerusakan lingkungan ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan yang cukup besar, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik, dan lain sebagainya. Selain itu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat rentan terhadap guncangan eksternal yang dicirikan dengan tingginya ketergantungan pada sektor industri pengolahan dan investasi yang tidak merata sehingga perlu dioptimalkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat.
- **Produktivitas dan kualitas sektor perekonomian;** Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian masih belum sebanding dengan potensinya. Dengan rata-rata pertambahan angkatan kerja Provinsi Jawa Barat mencapai 400 ribu per tahun, upaya penciptaan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan memerlukan sumber daya investasi yang besar. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan masih belum menjangkau keseluruhan angkatan kerja. Selain faktor pendidikan, masih rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat antara lain disebabkan oleh kapasitas teknologi dalam menghasilkan nilai tambah masih terbatas. Berbagai sektor perekonomian masih belum dikembangkan optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Sektor-sektor tersebut antara lain meliputi pariwisata, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan sekala kecil (IKM/UMKM).
- **Kapasitas Daya Usaha dan Daya Saing IKM/UMKM Jawa Barat Masih Terbatas;** Hal ini disebabkan karena kapasitas teknologi dan akses pembiayaan serta upaya penciptaan lingkungan wirausaha belum optimal. Kelincahan UMKM dalam menciptakan daya saing

produk masih kurang yang disebabkan ketidakmampuan dalam memahami teknologi.

- **Tingginya Investasi Belum Diikuti Dengan Percepatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat**; Realisasi investasi dan pemerataannya perlu ditingkatkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian selatan
- **Kinerja Ekosistem Ekonomi Digital yang Juga Belum Optimal**; Hal ini disebabkan belum meratanya infrastruktur digital dan literasi digital bagi pelaku usaha.
- **Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur;** Pemerataan dan kualitas infrastruktur di Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun capaian Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) tahun 2024 mencapai 76,06 persen dan sedikit melampaui target 75,91 persen, masih terdapat beberapa indikator penting yang belum memenuhi target. Misalnya, tingkat kemantapan jalan hanya tercapai sebesar 90,22 persen dari target 90,50 persen. Kesenjangan dalam konektivitas juga tercermin dari belum terintegrasinya simpul transportasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta masih terbatasnya transportasi massal di wilayah-wilayah tertentu. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Di wilayah selatan Jawa Barat, kondisi geografis yang berbukit dan rawan bencana memperburuk aksesibilitas antar pusat kegiatan ekonomi.

  Di sektor sumber daya air, indeks kinerja sistem irigasi pada tahun 2024 hanya mencapai 57,04 persen, meskipun meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah kondisi optimal. Kenaikan rata-rata tahunan sebesar 1,1 persen sejak 2019 menunjukkan perbaikan yang lambat ditengah kebutuhan mendesak terhadap produktivitas pertanian yang lebih tinggi.

Gambar 2.161
Permasalahan Transportasi Jawa Barat

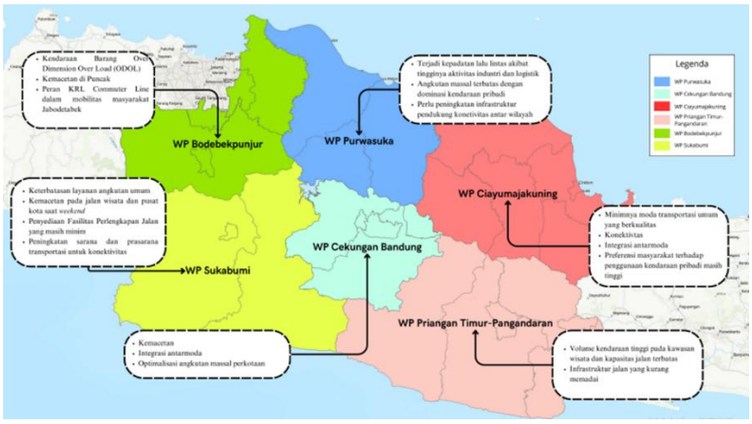

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

- **Infrastruktur perumahan permukiman**; Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman belum menjangkau keseluruhan masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih adanya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah, serta belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir). Hingga tahun 2024, capaian akses sanitasi layak, akses air minum layak serta akses penanganan persampahan perkotaan masing-masing baru mencapai 75,10 persen, 94,90 persen, dan 70,77 persen. Selain itu, pada sektor perumahan masih terdapat permasalahan angka backlog kepemilikan rumah yang cukup tinggi sebesar 2.198.057, banyaknya Rumah Tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Provinsi Jawa Barat sekitar 7.466.228 rumah tangga, dan luasnya kawasan permukiman kumuh sebesar 6.340,05 Ha serta minimnya ketersediaan lahan di perkotaan untuk pengembangan perumahan. Kesemuanya memberikan gambaran kompleksnya permasalahan perumahan yang yang perlu ditangani.
- **Insfrastruktur Pendidikan dan Kesehatan**; masih terdapat sejumlah daerah Kecamatan yang tidak memiliki infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai sehingga pemenuhan kebutuhannya dilakukan dengan mengakses dari wilayah kecamatan lainnya. Berdasarkan analisis modal imbal jasa pendidikan (*return to education*) untuk kabupaten/kota di Jawa Barat, terlihat perbedaan nilai yang

memperlihatkan masih belum meratanya kualitas pendidikan di Jawa Barat terutama terdapat ketimpangan yang besar antara kabupaten dan kota. Ketimpangan ini terlihat dari infrastruktur pendidikan yang berbeda antara kabupaten dan kota. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pendidikan yang berkualitas dan perawatan kesehatan yang baik. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan perkembangan potensi daerah. Selanjutnya, belum meratanya infrastruktur kesehatan menyebabkan sulitnya akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dilihat dari rasio ketersediaan puskesmas dan rasio ketersediaan tempat tidur terhadap rasio penduduk, masih diperlukan penambahan puskesmas dan rumah sakit namun tetap perlu memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan dalam pemenuhannya. Dengan terpenuhinya infrastruktur kesehatan, masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan akan meningkatkan angka harapan hidup sehat masyarakat.

- **Infrastruktur Digital;** Infrastruktur digital belum merata. Disrupsi digital memiliki perkembangan yang sangat pesat dan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar memiliki potensi untuk meningkatkan potensi ekonomi digital melalui penetrasi internet di masyarakat. Berdasarkan Indeks Daya Saing Digital Tahun 2025, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-2 dalam ke-3 tahun terakhir di bawah DKI Jakarta dengan poin sebesar 61,9. Permasalahan dalam pencapaian indeks daya saing digital Provinsi Jawa Barat yaitu perkembangan penggunaan digitalisasi belum optimal dalam meningkatkan perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas serta ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sub indeks *output* memiliki capaian paling rendah dalam menunjang Indeks Daya Saing Digital di Provinsi Jawa Barat. Pada dimensi *output*, pilar kewirausahaan dan produktivitas paling besar menyumbang 62,6 sedangkan pilar paling kecil yaitu ketenagakerjaan sebesar 40,4 persen. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dan Survei Lapangan masing-masing Dinas Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota di Jawa Barat

menunjukkan bahwa masih terdapat 8 desa *blank spot* dengan kriteria tanpa selular yang tersebar di 5 Kabupaten dan 61 Desa Blankspot dengan kriteria tanpa konektivitas fiber optik yang tersebar di 12 Kabupaten. Berdasarkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Provinsi Jawa Barat selalu di atas IP-TIK nasional. Namun, capaian IP-TIK Provinsi Jawa Barat 2017 sampai dengan 2023 ma i mem e r l e re dikat 'Sedang' rtin a ma i terdapat permasalahan pada 3 Subindeks IP-TIK yaitu Akses dan Infrastruktur, penggunaan, dan keahlian. Dari tiga hal tersebut, yang menjadi permasalahan utama adalah akses dan infrastruktur yang mendapat poin terendah diantara ketiganya dan dapat tergambar dari masih adanya Desa *Blankspot* di Jawa Barat. Selain infrastruktur digital berupa ketersediaan internet, tentu infrastruktur digital lainnya pun menjadi hal yang juga memerlukan perhatian dan peningkatan sesuai dengan tantangan dan perkembangan teknologi yang terjadi.

- **Iklim Investasi;** Regulasi terkait insentif investasi masih terbatas. Regulasi terkait insentif kemudahan investasi masih terbatas pada ketentuan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada level pemerintahan, insentif terhadap kemudahan investasi PMA maupun PMDN seperti insentif pajak dan retribusi daerah, dan subsidi bunga kredit modal kerja masih terbatas dalam penyelenggaraan investasi dan penanaman modal daerah. Model-model inisiatif yang telah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten dalam menyediakan skema insentif kredit modal kerja perlu diperluas skala implementasinya.
- **Ruang Investasi;** Belum optimalnya kepastian ruang untuk investasi. Investasi membutuhkan alokasi ruang dan infrastruktur pendukung yang diatur di dalam rencana tata ruang wilayah dalam rangka memberikan kepastian berusaha, serta efisiensi dalam penyediaan infrastruktur wilayah. Alokasi ruang untuk investasi belum sepenuhnya diimbangi dengan layanan infrastruktur pendukung sehingga mengurangi daya saing investasi wilayah.

2.4.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan aspek pelayanan umum ditinjau dari:

- **Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas;** Dalam mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia, integritas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi unsur penting pada tata Kelola pemerintahan yang akan menciptakan sistem yang efektif untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, mencegah dan menjauhi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berfokus pada pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat sudah mampu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel yang ditandai dengan perolehan indeks reformasi birokrasi dengan kategori A (93,08 poin) dan menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbaik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Namun demikian masih terdapat beberapa unsur yang harus terus dilakukan penguatan, diantaranya:

  1. **Pelayanan Publik**

     Pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat masih memerlukan penguatan yang berkesinambungan meskipun sudah mencapai predikat tertinggi. Penguatan tersebut terkait sistem manajemen pelayanan agar mampu mendorong perubahan profesional para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

  2. **Birokrasi yang adaptif**

     Kapasitas birokrasi yang belum adaptif dan responsif terhadap dinamika global dan tuntutan masyarakat menjadi fokus yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kapasitas birokrasi di Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan penguatan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan serta menghadapi disrupsi global.

     Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang besar sehingga diperlukan peningkatan jangkauan pelayanan untuk percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

3. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

   Capaian indeks SPBE Provinsi Jawa Barat telah berada pada predikat sangat baik pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat membantu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

   Namun demikian, dari uraian domain pembentuk SPBE, domain manajemen SPBE merupakan salah satu domain yang memiliki tingkat kematangan yang paling rendah dibandingkan domain lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan penerapan manajemen SPBE melalui penerapan secara menyeluruh pada manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan, serta audit infrastruktur dan audit keamanan SPBE.

4. **Inovasi Daerah**

   Capaian inovasi di tingkat Provinsi Jawa Barat sejauh ini sudah cukup baik, namun perlu terus mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dan mendorong kabupaten/kota untuk juga terus meningkatkan inovasi daerahnya untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Selain itu, pelaksanaan inovasi tidak hanya berfokus pada ide-ide baru dan kreatif, serta regulasi dan tatanan kelembagaan, tetapi harus juga terdapat peran budaya inovasi di dalamnya.

   Budaya inovasi yang kuat, memungkinkan sebuah inovasi dibangun secara berkesinambungan. Karena itu, budaya inovasi harus menjadi suatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan.

2.4.2 Identifikasi Isu Strategis Daerah

2.4.2.1 Isu Sesuai Konteks (Lingkungan Dinamis)

A. Isu Global

Sejumlah isu global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah. Langkah awal pembangunan jangka menengah 2025-2029 harus mampu menjadi landasan / fondasi bagi upaya pencapaian

tujuan pembangunan jangka panjang yang sudah mengantisipasi konteks tantangan global tersebut.

Berdasarkan Draft RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, terdapat ejumla i u gl al ang e rlu di e r atikan, di e u t e a gai "megatrend a a Barat 2045"

Gambar 2.162
Konteks Isu Global yang Dihadapi Provinsi Jawa Barat
Dalam "Megatrend Jawa Barat 2045"

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario *intermediate*, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO) dalam *State of The Climate* 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1

(satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Dalam bonus demografi dimana mencermati dinamika penduduk Provinsi Jawa Barat yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan

konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan rasio gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal;
2. Keberlanjutan sosial budaya, melalui peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan;
3. Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang aktivitas pembangunan; dan
4. Investasi SDM untuk menjawab daya saing Jawa Barat agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif di berbagai aspek di level internasional, memaksimalkan era industri 4.0 menuju society 5.0 yang ditandai dengan masyarakat telah mencapai *comport, vitality and high quality life*.

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

Urbanisasi dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

B. Isu Nasional

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini.

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini

masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan e m a ngunan renda kar n e a gai “tulang u nggung”nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke

depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi.

Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing

daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

C. Isu Regional Jawa Bali

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya.

Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada.

Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat.

Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu.

Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat.

Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang ke depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi.

D. Isu Berdasarkan *West Java Development Forum* (WJDF)

West Java Development Forum (WJDF) 2023 merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang meminta daerah menerjemahkan rencana pembangunan jangka panjang sampai tahun 2045. WJDF 2023 melibatkan berbagai pihak seperti kalangan akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, inohong Jabar, Forkopimda, media, hingga generasi milenial.

Dilibatkannya stakeholders dari berbagai kalangan diharapkan dapat membuat rencana pembangunan lebih maksimal, merata dan

mewakili harapan seluruh masyarakat. Semua stakeholders yang mewakili memberikan pandangan bagaimana Jawa Barat di tahun 2045. Berdasarkan hasil WJDF tersebut, pembangunan tak bisa fokus hanya pada satu sektor, melainkan harus multidimensi. Namun dari pandangan generasi muda, setidaknya ada tiga sektor penting yang harus diakomodir, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia.

2.4.2.2 Sintesa Isu Kontekstual Lingkungan Dinamis

Pertimbangan-pertimbangan dari berbagai stakeholder tersebut kemudian distrukturkan dan menjadi isu yang diharapkan dapat memberi masukan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Sejumlah isu yang dihasilkan dari WJDF diuraikan berikut ini.

A. Fokus Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Isu layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, mencakup: akses layanan kesehatan bersama; tuntas wajib belajar sampai dengan SMA; *stunting*; pemenuhan layanan pendidikan masyarakat; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama; pemenuhan akses layanan dasar yang berkualitas (kesehatan, pendidikan); dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung bonus demografi.

Adapun isu perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mencakup: kemiskinan dan rumah tidak layak huni; penanganan kemiskinan melalui ekonomi keluarga; sistem informasi PPKS; perlindungan masyarakat miskin secara tepat sasaran; pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama wilayah perbatasan; pemberdayaan masyarakat miskin petani dan nelayan; layanan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan; dan skenario mitigasi bertambahnya penduduk miskin.

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah, mencakup: pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal; pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal ketimpangan akses sosial dan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif; kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat;

pemerataan kualitas hidup berbasis teknologi; dan skenario mitigasi melebarnya tingkat ketimpangan

Isu penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja, mencakup; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja lokal; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; optimalisasi kuantitas dan kualitas BLK; pencetakan wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; digital skill kepada tenaga kerja pemuda; kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; SDM tenaga kerja yang kompeten; dan perluasan kesempatan kerja untuk semua kalangan.

Isu kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan), mencakup: konflik antar nelayan dalam pemanfaatan ruang laut; pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap bersama pada batas wilayah laut 12 mil; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; dan pemanfaatan bersama pelabuhan perikanan.

Sedangkan isu sistem pangan yang berkelanjutan, meliputi: produktivitas pertanian dan perikanan; adaptasi varietas pertanian berketahanan iklim; sistem pangan berkelanjutan; kelancaran distribusi ternak wilayah perbatasan; belum optimalnya penerapan pola konsumsi pangan yang berkelanjutan; pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang berkelanjutan; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; ketersediaan pangan berkelanjutan; ketersediaan dan akses pangan; dan optimalisasi *logistic global value chain* dan *blue economy*.

B. Fokus Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Isu infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana, meliputi: aglomerasi perkotaan di Bodebekpunjur, Rebana, dan Cekungan Bandung sebagai *engine of growth*; infrastruktur persampahan berkelanjutan dan sistem transportasi yang efisien penyediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air, air bersih, limbah,

jalan, sampah yang merata; penyediaan dan layanan sistem transportasi; konektivitas antar pusat kegiatan; persampahan serta rantai pasok pangan yang efisien; infrastruktur berkelas dunia; keselamatan pelayaran ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) lintas provinsi; infrastruktur wilayah dan logistik terintegrasi (kereta, sistem logistik pelabuhan dan bandara, air bersih, transportasi darat); infrastruktur perbatasan terintegrasi, handal dan adaptif bencana (jalan, sampah, air bersih, pelabuhan kereta, air limbah); dan peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung perekonomian.

Untuk isu infrastruktur digital yang merata dan berkualitas, mencakup: pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam ekonomi digital; kesiapan transformasi digital yang berkelanjutan; keterjangkauan akses digital yang merata; dan penggunaan teknologi digital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu transformasi energi fosil ke energi baru terbarukan, mencakup pengembangan EBT untuk mendukung *green economy* dan transisi energi.

Sementara, isu infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mencakup penanganan banjir terintegrasi, ketersediaan air baku dan air bersih yang berkualitas dan berkelanjutan, serta peningkatan pelayanan sistem irigasi.

C. Fokus Peningkatan Produktivitas Daerah

Isu produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian, mencakup: Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan; optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi; pengembangan IKM dan UKM; optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata dan ekraf; peningkatan investasi dan promosi investasi industri; peningkatan produktivitas tenaga kerja industri; pengembangan pariwisata kelas dunia; kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas; Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas; link an match antara industri dan sektor hulu; dan mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional.

Adapun isu UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, mencakup: peran pemuda dalam

kewirausahaan; peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; optimalisasi pertumbuhan startup; pemberdayaan UMKM dan startup; penguatan IKM dan UMKM; pemberdayaan UMKM dan koperasi; peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri); pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM; integrasi pengembangan ekraf; pemberdayaan UMKM dan koperasi wilayah perbatasan; kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM; dan komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis.

D. Fokus Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan

Isu pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, mencakup: pendidikan usia dini berbasis lingkungan hidup; peningkatan kualitas pendidikan pada usia dini (0-5 tahun); pemajuan kebudayaan; pengelolaan SDM yang terintegrasi (publik, swasta, dan masyarakat); penguatan kurikulum adaptif berbasis TIK; pengembangan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); pelestarian masyarakat adat dan cagar budaya; optimalisasi kompetensi tenaga kerja; pendidikan vokasi; keselarasan subsidi pendidikan; akses pendidikan lintas batas wilayah perbatasan; pemajuan kebudayaan daerah; dan peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Adapun isu kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan, meliputi: pemberdayaan masyarakat yang inklusif; pembangunan yang merata dan inklusif; dan inklusivitas dalam pembangunan bagi semua kalangan. Adapun isu ketersediaan infrastruktur digital meliputi: peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital; peningkatan kemampuan SDM digital (digital skill); akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi melalui peningkatan literasi digital; transformasi digital; dan digital divide/kesenjangan untuk mengakses teknologi digital

E. Fokus Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

Isu pembangunan keluarga yang berkualitas, mencakup: sistem informasi PPKS; Jabar sebagai provinsi yang memperhatikan lansia;

meminimalisir gangster; dan *awareness* terhadap kesehatan mental. Adapun isu pemajuan kebudayaan, mencakup: aspek regulasi muatan lokal kebudayaan daerah; platform kebudayaan; dan penanaman nilai agama dan budaya bangsa.

F. Fokus Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan, meliputi: penanganan kualitas lingkungan terintegrasi; alih fungsi lahan; peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup; kerusakan pesisir pantai; pengelolaan sampah; Banjir Rob Pantai Utara akibat perubahan iklim; alih fungsi lahan; ekonomi berkelanjutan berbasis industri hijau; pemenuhan kawasan lindung; pengelolaan limbah; RTH dan imbal jasa ekologis; pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan; ekonomi hijau berbasis digital; dan dampak pengembangan industri manufaktur terhadap lingkungan.

Adapun isu mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, meliputi: mitigasi tsunami pada zona megathrust pantai selatan; penanganan bencana yang belum optimal karena terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat; mitigasi bencana dan perubahan iklim; timbulnya abrasi di pesisir laut yang menyebabkan luas daratan berkurang; dan perlindungan sosial adaptif.

G. Fokus Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu tata kelola pemerintahan kolaboratif, meliputi: kelembagaan kerjasama antar daerah; struktur organisasi yang efektif; kolaborasi pentahelix dalam penanganan berbagai masalah infrastruktur dasar; tata kelola pemerintahan yang inklusif; environmental leadership; dan perbaikan regulasi dalam semua aspek birokrasi.

Adapun isu pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik, meliputi: pelayanan adaptif dan terintegrasi pada kawasan greater metro pemanfaatan citra digital dalam pendataan kendaraan bermotor optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam pelayanan publik; digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dan kemudahan izin berusaha dan investasi.

Sementara isi sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan, meliputi: kawasan perbatasan yang berdaya saing; penyiapan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien; transformasi digital; pencarian alternatif sumber pendanaan yang lain belum optimal; pemimpin yang adaptif dan responsif; insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah; pembangunan inklusif yang berkelanjutan; pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan; dan Peningkatan partisipasi pada forum-forum inovasi IPTEK dan sains.

2.4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Isu KLHS)

Isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan (PB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dihasilkan dari rangkaian tahapan dan proses dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029, yang di dalamnya mengkaji juga ketercapaian TPB/SDGs Jawa Barat. Dari hasil KLHS, telah disepakati 9 (sembilan) isu strategis pembangunan berkelanjutan yang memiliki keterkaitan (*interlinkages*) antara berbagai tujuan dan sasaran TPB/SDGs dan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Isu Strategis PB 1: Kualitas dan Pemerataan Pendidikan.**
   Permasalahan utama pada bidang pendidikan yaitu belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang termasuk pengembangan sistem teknologi informasi digital. Isu kualitas dan pemerataan pendidikan berkaitan dengan sasaran dari TPB 4 Pendidikan Berkualitas, diantaranya akses pemenuhan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, kualitas dan distribusi tenaga pendidik, serta keterjangkauan akses informasi pendidikan digital. Isu strategis pembangunan berkelanjutan terkait pendidikan dipengaruhi juga oleh isu kemiskinan (TPB 1), kesetaraan gender (TPB 5), pendidikan vokasi yang memenuhi kebutuhan industri (TPB 9), dan kemitraan/kolaborasi pembangunan pendidikan (TPB 17).

2. **Isu Strategis PB 2: Perlindungan Sosial**
   Permasalahan utama isu terkait perlindungan sosial adalah belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran dalam

mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif. Isu perlindungan sosial berkaitan dengan sasaran dari TPB 1 Tanpa Kemiskinan, yaitu meliputi cakupan penerima bantuan sosial, cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta kualitas alokasi pendanaan pengentasan kemiskinan. Isu perlindungan sosial dipengaruhi juga oleh isu kerawanan pangan (TPB 2), akses kesehatan untuk masyarakat miskin (TPB 3), kesetaraan gender (TPB 5), akses air bersih dan sanitasi untuk masyarakat miskin (TPB 6), akses energi bersih dan terjangkau untuk masyarakat miskin (TPB 7), pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (TPB 8), kesenjangan wilayah (TPB 10), serta ketersediaan data masyarakat miskin, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan bantuan hukum untuk masyarakat (TPB 16).

3. **Isu Strategis PB 3: Kualitas Infrastruktur Lingkungan**

   Permasalahan utama pada isu kualitas infrastruktur lingkungan adalah belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan. Isu kualitas infrastruktur lingkungan berkaitan dengan sasaran dari TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi dan TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yang dipengaruhi juga oleh isu kemiskinan (TPB 1), energi bersih dan terjangkau (TPB 7), penanganan limbah industri UMKM dan kawasan wisata (TPB 8), infrastruktur perdesaan dan pembangunan di daerah tertinggal (TPB 10), pengelolaan kota dan permukiman berkelanjutan (SDG 11), pola konsumsi dan produksi serta sirkular ekonomi (TPB 12), dan infrastruktur rendah emisi dan adaptif terhadap perubahan iklim (TPB 13).

4. **Isu Strategis PB 4: Pelayanan Kesehatan**

   Permasalahan utama pelayanan kesehatan adalah belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas. Isu strategis pembangunan berkelanjutan terkait pelayanan kesehatan merupakan sasaran dari TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, yang dipengaruhi juga oleh isu

kemiskinan (TPB 1), penanganan *stunting* (TPB 2), kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi (TPB 5), praktik Buang Air Besar Sembarangan (TPB 6), dan kesenjangan perkotaan dan perdesaan (TPB 10).

5. **Isu Strategis PB 5: Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Biru dan Hijau**

   Permasalahan utama pada isu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi biru dan hijau adalah belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah. Isu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi biru dan hijau merupakan sasaran dari TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yang dipengaruhi juga oleh isu lainnya, diantaranya pengarusutamaan gender (TPB 5), pengolahan sampah menjadi energi dan sirkular ekonomi (TPB 7), pembangunan infrastruktur (TPB 9), kesenjangan perkotaan dan perdesaan (TPB 10), pengelolaan kota dan permukiman berkelanjutan (TPB 11), pengelolaan limbah industri (TPB 12), infrastruktur rendah emisi dan adaptif terhadap perubahan iklim (TPB 13), pengelolaan ekosistem lautan (TPB 14), pengelolaan ekosistem daratan (TPB 15), serta kemitraan pembangunan dan inovasi pendanaan (TPB 17).

6. **Isu Strategis PB 6: Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim**

   Permasalahan utama pada isu penanggulangan bencana dan perubahan iklim adalah belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim, serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Isu tersebut merupakan sasaran dari TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, diantaranya penanganan korban bencana alam, pengurangan risiko bencana, serta pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, yang dipengaruhi juga oleh isu kemiskinan dan perlindungan sosial di kawasan rawan bencana (TPB 1), penataan ruang di kawasan rawan bencana dan pengembangan strategi penanggulangan bencana (TPB 11), dan penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri (TPB 9).

7. **Isu Strategis PB 7: Tata Kelola Pembangunan Wilayah**

   Permasalahan utama tata kelola pembangunan wilayah adalah belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat. Isu tata kelola pembangunan wilayah terutama berkaitan dengan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan, yaitu pembangunan perkotaan dan perdesaan yang seimbang dan terintegrasi. Isu tersebut dipengaruhi juga oleh isu terkait pertumbuhan ekonomi (TPB 8), pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah (TPB 9), tata ruang dan pembangunan kawasan permukiman (TPB 11), tata kelola kawasan konervasi laut/perairan (TPB 14), pengelolaan hutan dan lahan (TPB 15), tata kelola pemerintahan (TPB 16), dan kolaborasi pembangunan (TPB 17).

8. **Isu Strategis PB 8: Daya Dukung Lingkungan Hidup**

   Permasalahan utama pada isu daya dukung lingkungan hidup adalah penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air. Isu daya dukung lingkungan hidup berkaitan dengan berbagai sasaran TPB, terutama TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi, berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air baku untuk domestik, pertanian dan industri, dan TPB 15 Ekosistem Daratan, berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Isu tersebut juga dipengaruhi oleh isu lainnya, seperti ketahanan pangan dan alih fungsi lahan pertanian (TPB 2), aktivitas pariwisata (TPB 8), alih fungsi lahan untuk infrastruktur dan kawasan industri (TPB 9), tata ruang di kawasan rawan bencana (TPB 11), dan pengelolaan limbah industri (TPB 12).

9. **Isu Strategis PB 9: Pengelolaan DAS**

   Permasalahan pengelolaan DAS adalah rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut. Isu terkait pengelolaan DAS terutama berkaitan dengan sasaran TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi terkait pengelolaan sumber daya air, serta TPB 15 Ekosistem Daratan terkait konservasi hutan dan lahan, penanganan lahan kritis dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Isu tersebut dipengaruhi juga oleh isu pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan persampahan (TPB 11), pengelolaan limbah industri (TPB 12),

konservasi laut (TPB 14), penegakan hukum (TPB 16), serta pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multipihak (TPB 17).

2.4.3 Rumusan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu strategis Daerah disimpulkan melalui perumusan isu-isu strategis berdasarkan kontekstual (lingkungan dinamis), isu KLHS, serta pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada. Setiap komponen dilihat benang merah keterkaitannya antara potensi – permasalahan – isu strategis, hingga diperoleh kelompok aspek pembentuk komponen pembangunan daerah. Aspek-aspek tersebut dirumuskan sebagai isu strategis daerah. Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Jawa Barat.

Tabel 2.120
Kesimpulan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	WJDF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Potensi wilayah yang luas dengan keanekaragaman sumber daya baik di wilayah darat maupun pesisir dan laut	Kemiskinan, pengangguran, ekonomi yang tidak berkelanjutan	Peetumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau dan biru		Transformasi kedalam ekonomi hijau dan ekonomi biru		Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan	***Green* dan *Blue Economy:*** *Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal*
Jumlah penduduk produktif dan puncak bonus demografi pada tahun 2030	Jumlah penduduk yang meningkat, akses layanan dasar, literasi digital, pendidikan vokasi, budaya sosial kemasyarakatan	Perlindungan sosial yang belum optimal dan kurang adaptif;	Bonus demografi 2030	Bonus demografi	Arahan pembangunan dan peran Jabar dalam Regional Jawa-Bali	Peningkatan produktivitas daerah; Penguatan daya saing SDM berkelanjutan; Penguatan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju	**Kualitas dan Daya Saing SDM:** Perkembangan penduduk menciptakan potensi SDM yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	WJDF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkembangan perkotaan pada simpul-simpul pusat pertumbuhan wilayah da konektivitas regional	Ketimpangan penyediaan dan kualitas infrastruktur	Kualitas dan pemerataan pendidikan; Pelayanan kesehatan yang belum merata	Pemerataan pembangunan dan keberadaan penduduk kelas menengah	Pemindahan ibukota negara; Konektivitas dan infrastruktur dasar	Ketimpangan pembangunan Utara-Selatan	Penguatan infrastruktur berkelanjutan	**Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Dasar**: Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar
Kondisi lingkungan alami yang masih terjaga di beberapa wilayah terutama Jabar selatan	Kerawanan bencana, pengelolaan lingkungan pesisir, pencemaran, penyediaan RTH perkotaan	Kualitas infrastruktur lingkungan; Penanggulangan bencana dan perubahan iklim; Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup	Persaingan sumber daya alam	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kebencanaan	Perubahan iklim dan Bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	**Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**: Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana
Ketersediaan RTRW dan dukunga pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan strategis nasional dan provinsi	Kebutuhan ruang, alih fungsi lahan, pengendalian pemanfaatan ruang	Pengelolaan DAS	Urbanisasi dan pembangunan perkotaan serta transportasi berkelanjutan				**Keberlanjutan Penataan Ruang:** Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS				ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	WJDF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							berfungsi linduang guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan
Inovasi pemerintahan dan pelayanan publik termasuk yang terbaik	Birokrasi yang kurang adaptif, integritas pemerintahan, ekosistem inovasi	Tata kelola pembanguan wilayah			Tata Kelola Pemerintahan terkait kerjasama regional	Tata kelola pemerintahan yang baik	**Kualitas Tata Kelola Pemerintahan:** Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan

Sumber: Hasil Analisis RPJMD 2025-2029, Bappeda Jabar 2025

2.4.3.1 Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma *green* dan *blue economy* yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan *green and blue economy*.

Gambar 2.163
Isu Strategis Terkait *Green and Blue Economy* Serta Pembangunan Inklusif

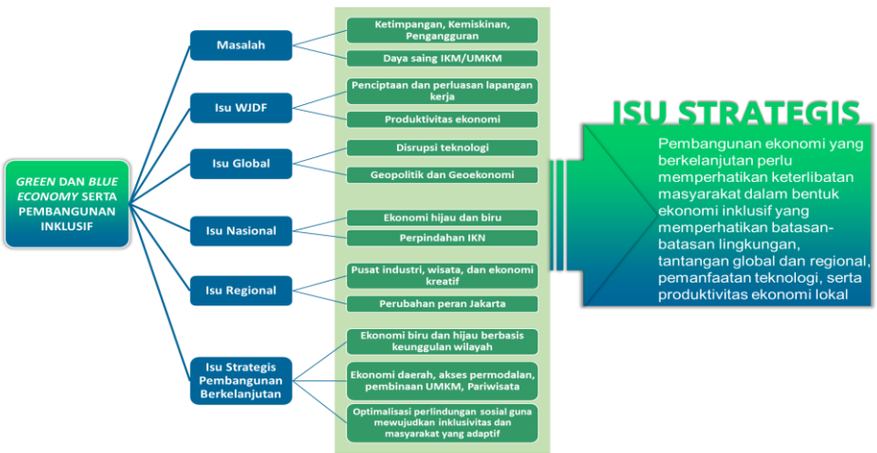

Green economy merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. *Blue economy*, di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini mencakup pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. *Blue economy* menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidup dari laut.

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *green* dan *blue economy* dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2.4.3.2 Isu Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.

Gambar 2.164
Isu Terkait Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

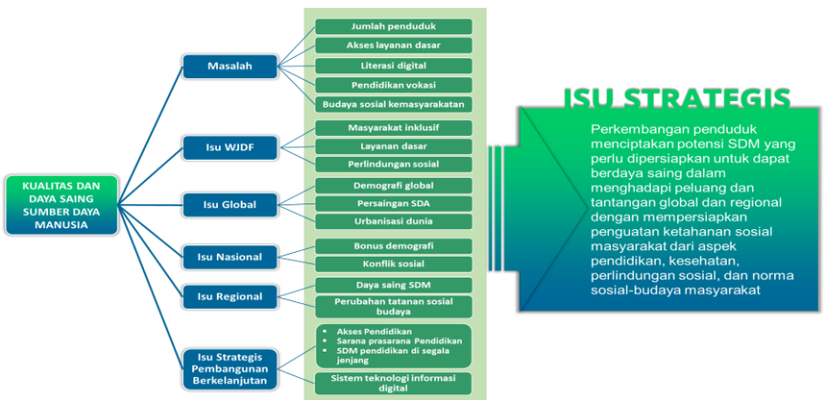

Isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa poin penting terkait isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia:

1. **Kualitas Pendidikan dan Pelatihan**
   Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global yang terus berubah.

2. **Relevansi Keterampilan**
   Sumber daya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi saat ini. Program pendidikan dan pelatihan harus dapat menghasilkan lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja atau yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar.

3. **Inovasi dan Kreativitas**
   Selain keterampilan teknis, penting juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan sumber daya manusia. Kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi adalah faktor-faktor yang mendorong daya saing individu dan organisasi.

4. **Kesejahteraan dan Motivasi**
   Faktor-faktor non-finansial seperti lingkungan kerja yang kondusif, pengakuan atas prestasi, serta kesempatan untuk pengembangan karir juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kesejahteraan mental dan fisik juga harus diperhatikan untuk menjaga produktivitas dan kualitas kerja yang optimal.

5. **Pemberdayaan dan Keterlibatan**
   Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat dan motivasi untuk berkontribusi secara positif.

6. **Adaptasi terhadap Perubahan**
   Globalisasi dan teknologi telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk

beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini akan lebih mampu mempertahankan daya saingnya dalam pasar kerja yang kompetitif.

Perbaikan terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, inovasi, kesejahteraan, dan pemberdayaan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

2.4.3.3 Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu permasalahan sekaligus tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat. Kesenjangan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menciptakan perbedaan kualitas kehidupan, termasuk kualitas sumber daya manusianya. Dalam Indonesia Development Forum (2018), kesenjangan ini berkaitan dengan permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar khususnya di antara masyarakat marginal yang dapat menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan (Saratri, 2009). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor geografi, kualitas sumber daya alam dan manusia, hingga keterbatasan aksesibilitas perhubungan antar daerah. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial dan sistem ekonomi yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu.

Gambar 2.165
Isu Terkait Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

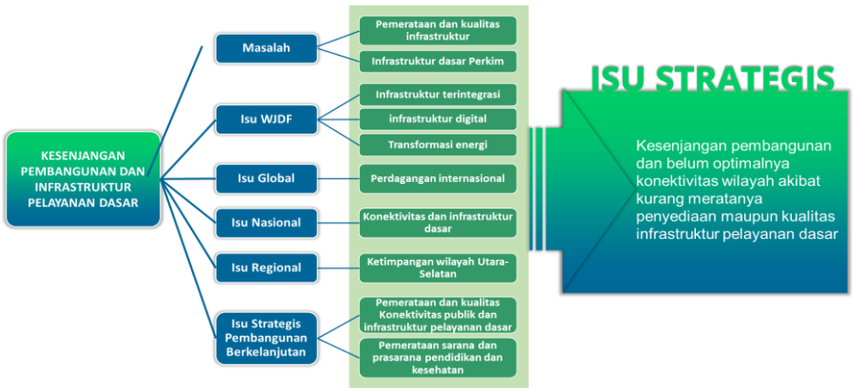

Isu tentang kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses dan kualitas hidup Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar :

1. **Akses yang Tidak Merata**

   Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Daerah perkotaan biasanya lebih terjamin infrastrukturnya dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.

2. **Dampak pada Kualitas Hidup**

   Kesenjangan infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit dan menghambat pembangunan ekonomi lokal.

3. **Pengembangan Ekonomi**

   Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang efisien dan listrik yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketidakmampuan untuk mengakses infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi pengembangan ekonomi lokal.

4. **Inklusivitas Sosial**
   Infrastruktur pelayanan dasar yang merata merupakan prasyarat untuk inklusi sosial yang sejati. Semua warga harus memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang mendasar untuk memastikan keadilan sosial.

5. **Perubahan Iklim dan Keberlanjutan**
   Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam juga penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman ini.

6. **Pemerataan Pembangunan**
   Penting untuk menerapkan kebijakan dan program yang mengarah pada pemerataan pembangunan infrastruktur, baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

7. **Tantangan Finansial**
   Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar seringkali melibatkan tantangan finansial yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang atau daerah yang terpencil. Diperlukan strategi keuangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ini.

Penanggulangan kesenjangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi yang tepat waktu dan strategi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak dasarnya secara merata dan berkelanjutan.

2.4.3.4 Isu Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara

berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana merupakan salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan RPJMD dalam tahap Pembangunan Fondasi Daerah di Jawa Barat 2025-2029.

Gambar 2.166
Isu Terkait Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

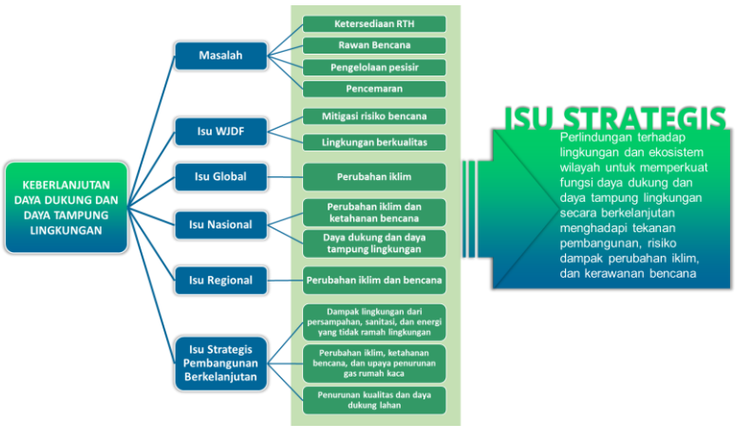

Upaya pengelolaan dan penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dipersiapkan sejak tahap awal pembangunan Jawa Barat ini untuk menjamin kelancaran pembangunan dalam jangka panjang. Isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan tema isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut sejumlah poin utama yang terkait dengan isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

1. **Daya Dukung dan Daya Tampung**

   Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung populasi spesies tertentu atau aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Daya tampung, di sisi lain, mengacu pada kapasitas maksimum lingkungan untuk menanggung beban dari aktivitas manusia atau faktor lainnya tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan yang signifikan.

2. ***Over exploitasi* Sumber Daya**

   Salah satu masalah utama adalah *over* exploitasi sumber daya alam seperti air tanah, hutan, dan lahan pertanian. Jika tidak dikelola

dengan baik, hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas lingkungan, degradasi tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan hilangnya ekosistem.

3. **Perubahan Iklim**
   Perubahan iklim juga mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanasan global dapat mengubah pola hujan, meningkatkan suhu permukaan laut, dan menyebabkan perubahan ekstrem cuaca, yang semuanya berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

4. **Manajemen Sumber Daya**
   Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan secara lestari, konservasi air, penggunaan energi terbarukan, dan pengendalian polusi, untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan mendatang.

5. **Kehidupan Berkelanjutan**
   Konsep keberlanjutan mencakup tidak hanya perlindungan lingkungan fisik tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

6. **Kolaborasi Global**
   Isu keberlanjutan lingkungan adalah masalah global yang memerlukan kerjasama internasional dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangannya. Kesepakatan internasional seperti Persetujuan Paris tentang perubahan iklim menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.

7. **Pendidikan dan Kesadaran**
   Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan adalah langkah krusial dalam mendukung perubahan perilaku dan keputusan yang lebih ramah lingkungan di semua tingkatan masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam untuk pemanfaatan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang dapat menopang kehidupan manusia merupakan tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.

Perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

2.4.3.5 Isu Keberlanjutan Penataan Ruang

Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Isu keberlanjutan penataan ruang menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan.

Gambar 2.167
Isu Terkait Keberlanjutan Penataan Ruang

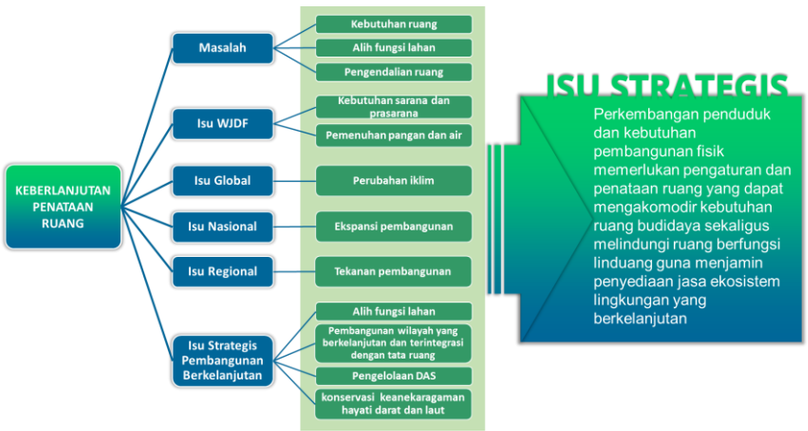

Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait isu keberlanjutan penataan ruang :

1. **Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan**

   Pembangunan perkotaan yang cepat sering kali menghadapi tantangan dalam hal penggunaan lahan yang efisien, penataan kawasan yang terintegrasi, dan infrastruktur yang memadai. Keberlanjutan penataan ruang mencakup pembangunan perkotaan yang terencana dengan baik untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kerusakan lingkungan.

2. **Perlindungan Lingkungan**

   Penataan ruang yang berkelanjutan memperhatikan perlindungan lingkungan alam, termasuk pelestarian ruang terbuka hijau, konservasi ekosistem, dan penanganan limbah secara efektif. Hal ini membantu menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta keanekaragaman hayati yang ada di sekitar area perkotaan dan pedesaan.

3. **Keadilan Sosial**

   Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan harus mengutamakan keadilan sosial, memastikan akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

4. **Adaptasi terhadap Perubahan Iklim**

   Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan kondisi lingkungan secara global. Penataan ruang yang berkelanjutan mencakup

infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti drainase yang baik untuk mengatasi banjir, penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, dan desain yang mengurangi jejak karbon.

5. **Penggunaan Lahan yang Efisien**
   Isu keberlanjutan penataan ruang juga melibatkan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup zonasi yang tepat untuk penggunaan lahan, perlindungan terhadap tanah subur dan area lindung, serta pengelolaan pertanian yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pedesaan.

6. **Partisipasi Masyarakat**
   Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan penataan ruang, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini juga memastikan penerimaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

7. **Kolaborasi Antar Pemerintah**
   Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antar pemerintah, termasuk pemerintah lokal, regional, dan nasional, serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini penting untuk menyinkronkan kebijakan dan strategi dalam mengelola pertumbuhan perkotaan dan pedesaan secara holistik.

Melalui pendekatan yang berkelanjutan dalam penataan ruang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif bagi generasi saat ini dan masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan penataan ruang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.

2.4.3.6 Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan.

Gambar 2.168
Isu Terkait Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

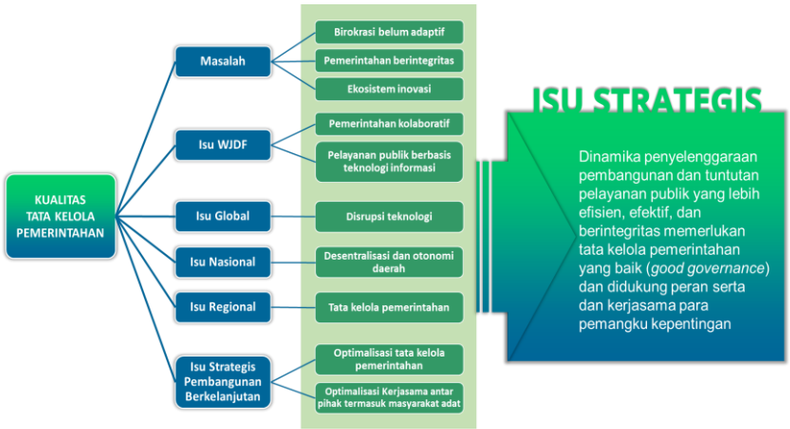

Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintahan :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

   Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabel pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

2. **Keterlibatan Masyarakat**

   Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik.

3. **Keadilan dan Keterbukaan**

   Kualitas tata kelola pemerintahan juga mencakup keadilan dalam penyediaan layanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah yang efektif harus memastikan bahwa keputusan dan layanan yang disediakan tidak diskriminatif dan tersedia untuk semua warga tanpa pandang bulu.

4. **Efisiensi dan Efektivitas**

   Tata kelola yang baik menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan baik agar program-program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

5. **Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi**

   Penegakan hukum yang kuat dan sistem anti-korupsi yang efektif adalah komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.

6. **Inovasi dan Teknologi**

   Pemerintah yang efektif harus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

7. **Kolaborasi dan Kemitraan**

   Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi bersama atas tantangan yang kompleks dan lintas-batas.

Secara keseluruhan, kualitas tata kelola pemerintahan berperan penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah yang baik mampu mengelola negara dengan adil, efektif, dan transparan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan.

Jabar Istimewa

Lembur Diurus, Kota Ditata

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2025-2029

Visi merupakan pernyataan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai dalam periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan oleh kepala daerah dalam periode pelaksanaannya. Dalam RPJMD, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Adapun Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi merupakan hal yang penting memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai suatu daerah dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi pembangunan.

3.1.1 Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi RPJMN, ”Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi

Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Jawa Barat Tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah:

"JABAR ISTIMEWA, LEMBUR DIURUS KOTA DITATA"

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Pernyataan **Jabar Istimewa - Lembur Diurus, Kota Ditata** mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Kalimat Visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro lokal sebagai asal muasal tradisi (dimaknai dengan lembur/perdesaan) maupun unsur kemajuan pembangunan yang lebih makro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.

Secara filosofis frase, kalimat Jabar Istimewa – Lembur Diurus, Kota Ditata, memiliki makna kata sebagai berikut:

- **JABAR** merupakan akronim dari Jawa Barat sebagai Provinsi yang terdiri atas penduduk/masyarakat dan wilayah/daerah yang terbagi dalam 27 Kabupaten/Kota.
- **ISTIMEWA** memiliki arti situasi atau kondisi di mana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan publik, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan layanan infrastruktur. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.

  Perwujudan visi tersebut juga dicirikan oleh sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang kompetitif, perekonomian yang mengistimewakan berfokus pada masyarakat menengah kebawah dan keberlangsungan kualitas lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik menuntut efisiensi dan efektivitas.
- **LEMBUR DIURUS**, *Lembur* dalam bahasa Sunda berarti desa atau kampung, dan *Diurus* berarti dikelola atau dipelihara menjadi lebih baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar berkembang dan menikmati kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan.

  Pengelolaan perdesaan meliputi pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata serta sektor lainnya yang dilaksanakan dengan tetap menjaga fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup serta menjaga kearifan lokal dan tradisi.
- **KOTA DITATA**, Kota merujuk pada kawasan perkotaan atau kota-kota besar di Jawa Barat, sedangkan ditata berarti dikelola atau ditata dengan baik. Slogan ini mengandung arti bahwa pemerintah akan fokus pada penataan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan limbah, dan pembangunan ekonomi yang lebih terencana. Pembangunan wilayah perkotaan akan diwujudkan sebagai kawasan perdagangan barang dan jasa, serta kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah. Hal ini

bertujuan untuk menjadikan kota-kota di Jawa Barat sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan memperhatikan kesejahteraan warganya dan menciptakan kota yang lebih maju, modern, serta ramah lingkungan.

Selaras dengan tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029 “Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola” sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 tahap pertama. Pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Visi Jawa Barat Istimewa melahirkan kerangka yang berpijak pada keselarasan kualitas lingkungan dengan kualitas manusia serta kebermanfaatannya bagi kepentingan negara dan bangsa. Istimewa merupakan lekatan nilai dan kerangka kesundaan dalam pelaksanaan misi melalui kebijakan dan langkah pembentukan masyarakat Jawa Barat yang berkarakter, sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi keunggulan untuk membawa kemakmuran. Adapun "Lembur Diurus, Kota Ditata" mencerminkan visi pembangunan yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Jawa Barat ingin memastikan bahwa daerah pedesaan tidak akan tertinggal dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, sementara di sisi lain, kota-kota di Jawa Barat juga mendapat perhatian serius dalam hal penataan dan perbaikan kualitas hidup, sehingga baik desa maupun kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan harmonis.

3.1.2 Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029

Visi Jabar Istimewa dengan slogan: **Lembur Diurus, Kota Ditata**, memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan pembangunan daerah dalam berbagai bidang urusan. Visi ini diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi Jabar Istimewa, sebagaimana berikut:

1. **Misi Kesatu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**. Dalam rangka mencapai kesejahteraan diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang kompetitif. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul tersebut diperlukan

langkah-langkah yang strategis seperti kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, penguatan nilai-nilai agama dan budaya serta lingkungan sosial yang positif. Misi ini mengantarkan penerapan konsep pembangunan dalam Budaya Sunda tumbuh dalam paradigma pembangunan manusia itu sendiri. Karena *kamanunggalan* (persatuan) hidup yang lahir dari manusia, alam, dan sang Pencipta menjadi satu kesatuan filosofi hidup. *Kamanunggalan* hidup lahir pula dari filosofi *Gapura Pancawaluya* (Gerbang Lima Kesempurnaan). Manusia yang bermoral baik dari segala aspek merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) harus memiliki sikap *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer* (sehat, berkarakter, benar, pintar, kreatif).

Pemahaman konsep karakter manusia Sunda di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. *Cageur*; merupakan keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohani. Diartikan sebagai SDM yang secara nutrisi terpenuhi, sehat, tidak *stunting*, fasilitas kesehatan yang memadai, lengkap, dan mudah diakses. Dari sisi tata ruang dan lingkungan berarti mampu memberikan lingkungan yang sehat dan terawat;
b. *Bageur*; merupakan keadaan atau karakter yang religius, beretika, berbudaya. *Caang Bulan Opat Welas Jalan Gede Sasapuan, Teu Geuneuk Teu Maleukmeuk* (Hati yang ridho, Ikhlas, tidak ada dendam dan hati yang kecewa). Dari sisi ini merupakan bagian dari pembangunan pendidikan berbasis karakter atau dapat juga dijadikan sebagai individu yang taat dan menjalankan syariat agama;
c. *Bener*; merupakan keadaan atau karakter manusia yang benar, yakni taat pada hukum dan peraturan. Hal ini dapat diaplikasikan sebagai SDM yang memegang teguh ideologi Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
d. *Pinter*; merupakan keadaan atau karakter manusia yang memiliki ilmu pengetahuan (*Luhur ku elmu, sugih ku pangarti*). SDM yang menguasai teknologi, cakap dalam memanfaatkannya dan mampu berdaya saing atau dapat disebut kompeten dengan terus meningkatkan kompetensi dalam menjalankan roda pembangunan.
e. *Singer*; merupakan keadaan atau karakter manusia yang terampil atau piawai, cekatan atau *tanginas* yakni manusia yang serba bisa

(*masagi*) atau banyak keterampilannya (*Jembar ku pangabisa*) dan bersifat *Pok, Pek, Prak* (Senada antara ucapan, bahan garapan, dan pelaksanaan yang nyata).

Selain itu, metode pembangunan manusia dilandaskan melalui 3 (tiga) *core value* sistem pendidikan yakni; kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Untuk mencapai 3 (tiga) *core value* tersebut, maka dibentuk konsep *masagi* melalui *Gerbang Pancaniti*: *Niti surti* (belajar untuk merasakan), *Niti harti* (belajar untuk mengetahui), *Niti bukti* (belajar untuk melakukan), *Niti bakti* (belajar untuk hidup bersama), dan *Niti jadi/sajati* (belajar menuju sempurna). Sehingga insan Jawa Barat berkarakter unggul dapat melahirkan kemampuan untuk menjadikan investasi dan pembangunan yang pesat menjadi ruang karya yang berkualitas dalam menghasilkan kesejahteraan dan daya saing.

2. **Misi Kedua**: **Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif**. Misi ini menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan berpegang pada kepentingan masyarakat dan keberlangsungan kualitas lingkungan. Dengan menerapkan bahwa 'lingkungan adalah titipan generasi maka aktivitas ekonomi dan penerapan teknologi diterapkan selaras dengan ketentuan tata ruang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi menjadi penting dengan tetap menjaga korelasi positif antara kondisi lingkungan yang baik dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam filosofi sunda, pembagian tata ruang ini merujuk kepada filosofi '*Mulasara Buana*' yang artinya menjaga keseimbangan alam semesta. Maka pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat menerapkan ketentuan pembagian ruang yaitu :
   - *Leuweung Larangan*: dijaga keseimbangannya untuk masyarakat Sabuana.
   - *Leuweung Tutupan*: Hutan Lindung yang menutupi *leuweung* larangan.
   - *Leuweung Garapan*: Hutan yang boleh dimanfaatkan.

Dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan, menjadikan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi meningkat tanpa mengeksploitasi lingkungan dengan berdasarkan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang didalamnya mencerminkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: pilar ekonomi (produktivitas dan nilai tambah), sosial (pemberdayaan dan inklusivitas), serta lingkungan (pelestarian dan daya dukung ekosistem) sesuai dengan transformasi menuju sistem ekonomi rendah karbon, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berbasis keunggulan lokal yang berkelanjutan.

3. **Misi Ketiga Yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**. Misi ini mengantarkan konsep bahwa ketimpangan atau disparitas antara pembangunan di daerah perkotaan dan pedesaan dimana pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah perkotaan lebih terjamin dibandingkan di wilayah pedesaan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembangunan dan pelayanan dasar yang merata menjadi jaminan inklusivitas sosial masyarakat karena memiliki akses yang sama. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional. Konsep Pembangunan Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam Budaya sunda yang memiliki cita-cita luhur mewujudkan Jawa Barat yang "*Gemah Ripah, Repeh Rapih*". Maka diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkeadilan. Dalam konsep *Tritangtu*, mengelola lingkungan adalah dengan tiga prinsip dasar tata kelola air dalam Budaya Sunda yaitu *Gunung/Leuweung Kudu Awian (*Hutan harus ditanami bambu atau pepohonan), *Lengkob Kudu Balongan* (Lembah harus dibangun kolam/danau), dan *Lebak Kudu Sawahan* (Daerah landai harus ditanami padi). Tiga prinsip ini yang akan memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat, serta menjaga alam dari bencana. Konsep utamanya adalah merawat hutan dengan penghijauan (reboisasi), mengelola air sebagai sumber kehidupan

dengan membangun irigasi, serta ketahanan pangan dengan mengelola lahan pertanian.

4. **Misi Keempat: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance***. Birokrasi sebagai mesin pembangunan diarahkan kepada kinerja yang mampu memperbaiki situasi dan kondisi masyakat. Pelaksanaan birokrasi dengan struktur pemerintahan dan jabatan memerlukan keselarasan peran. Birokrasi yang berkualitas mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut efisiensi dan efektivitas, penegakan hukum dan anti korupsi, inovasi dan teknologi, serta berkolaborasi dengan *stakeholder*. Dalam filosofi sunda, pembagian peran dan kewenangan terdapat dalam filosofi *Tri Tangtu di Buana*. *Tri Tangtu di Buana* terdiri dari *prabu, rama,* dan *resi*. Di dalam naskah Sunda kuno Fragmen *Carita Parahyangan* ini merupakan 3 (tiga) peran yang secara bersamaan memegang jabatan di pemerintahan Kerajaan Sunda dengan kewenangan, hak dan kewajiban yang berbeda dalam menjalankan tugas menuju tujuan bersama yaitu kemakmuran rakyat.

   Pada sistem pemerintahan saat ini, *Prabu* diartikan sebagai pemimpin tertinggi di wilayah pemerintahan, yaitu Kepala Daerah, yang memberikan garis kebijakan. *Rama* merupakan para pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang melaksanakan kebijakan, melaksanakan pelayanan publik, serta berperan sebagai perekat NKRI. *Resi* adalah para pejabat fungsional yang menggunakan ilmu pengetahuan dalam menjalankan tugasnya, berperan dalam transformasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai arah kebijakan, menghadirkan pelayanan keilmuan dan perekat NKRI. Maka *Tri Tangtu* dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan perlu dilandasi oleh *tekad, ucap*, dan *lampah* yang berwujud dalam perilaku berintegritas. *Tri Tangtu* melahirkan kerja kolaboratif dimana kebijakan pimpinan akan menghadirkan semangat dan arah kebijakan yang berdampak kepada kemakmuran rakyat. Pembagian peran diterapkan menjadi cara

Pemerintah dalam mengatur dan mengurus masyarakat, dimana peran partisipasi masyarakat yang juga memiliki tekad yang sama, ucapan yang terbukti dirasakan masyarakat, dan tindakan bersama dengan masyarakat akan membangun keseimbangan dunia dan pembangunan yang konstruktif menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dengan cara yang Istimewa.

Gambar 3.1
Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Sejalan dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dimana visi Presiden dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi atau Asta Cita sebagai misi presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional atau *goals* (tujuan) yang ingin dicapai, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 3.2
8 Misi (Asta Cita) atau Prioritas Nasional

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, 2025

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029 didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. **Karakteristik masyarakat Jawa Barat** yang religius dan berbudaya *adiluhung* mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. **Posisi geografis Jawa Barat** yang berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadikan Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang Sumatera-Jawa-Bali;
3. **Jumlah penduduk Jawa Barat** yang merupakan penduduk terbanyak di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar didukung oleh sektor industri, pertanian, dan pariwisata;
4. **Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif** menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
5. **Keragaman budaya Jawa Barat** merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan;
6. **Keamanan dan ketertiban** yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan; dan
7. **Sarana dan prasarana** yang mendukung pengembangan ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Subbab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

3.2.1 Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Jawa Barat yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dielaborasi dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Jawa Barat.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Jawa Barat Tahap I (Tahun 2025-2029).

Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat, ditandai dengan:

a. Pendapatan per kapita meningkat;
b. Kemiskinan dan ketimpangan menurun;
c. Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat;
d. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
e. Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Gambar 3.3
Sasaran Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029

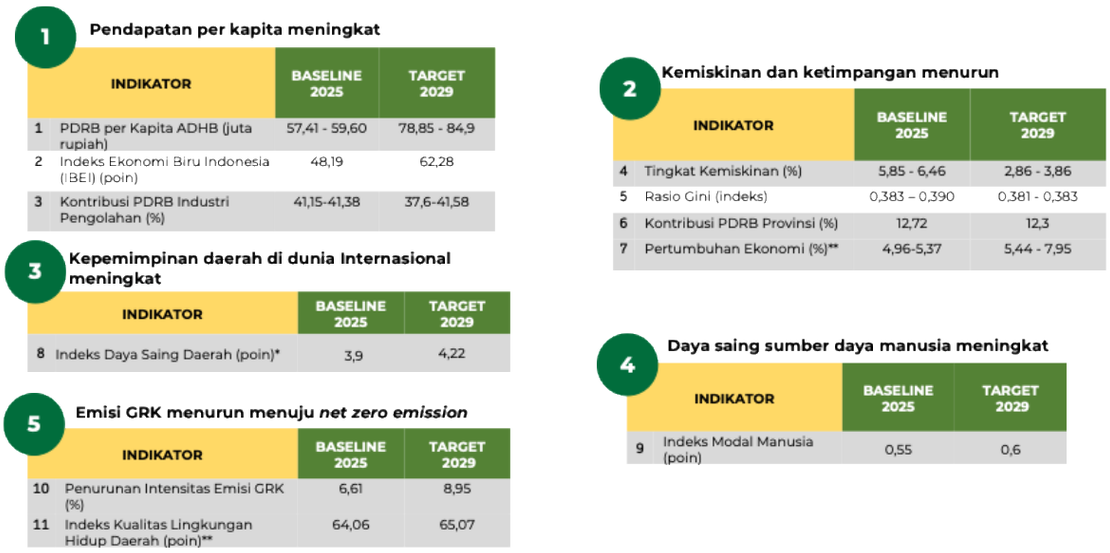

1 Pendapatan per kapita meningkat

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
1	PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah)	57,41 - 59,60	78,85 - 84,9
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (poin)	48,19	62,28
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,15-41,38	37,6-41,58

2 Kemiskinan dan ketimpangan menurun

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
4	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46	2,86 - 3,86
5	Rasio Gini (indeks)	0,383 – 0,390	0,381 - 0,383
6	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,72	12,3
7	Pertumbuhan Ekonomi (%)**	4,96-5,37	5,44 - 7,95

3 Kepemimpinan daerah di dunia Internasional meningkat

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
8	Indeks Daya Saing Daerah (poin)*	3,9	4,22

4 Daya saing sumber daya manusia meningkat

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
9	Indeks Modal Manusia (poin)	0,55	0,6

5 Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	8,95
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)**	64,06	65,07

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat menggunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategis yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan indikator makro.

Berdasarkan hasil perumusan, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3.2.2 Uraian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

1. **Perwujudan Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**, memiliki Tujuan yaitu: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur*, *Bageur*, *Bener*, *Pinter*, dan *Singer*, dengan sasaran:
   1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
   2) Terbentuknya individu bertaqwa, beretika, dan berbudaya;
   3) Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
   4) Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan
   5) Terbentuknya individu kreatif dan cekatan.

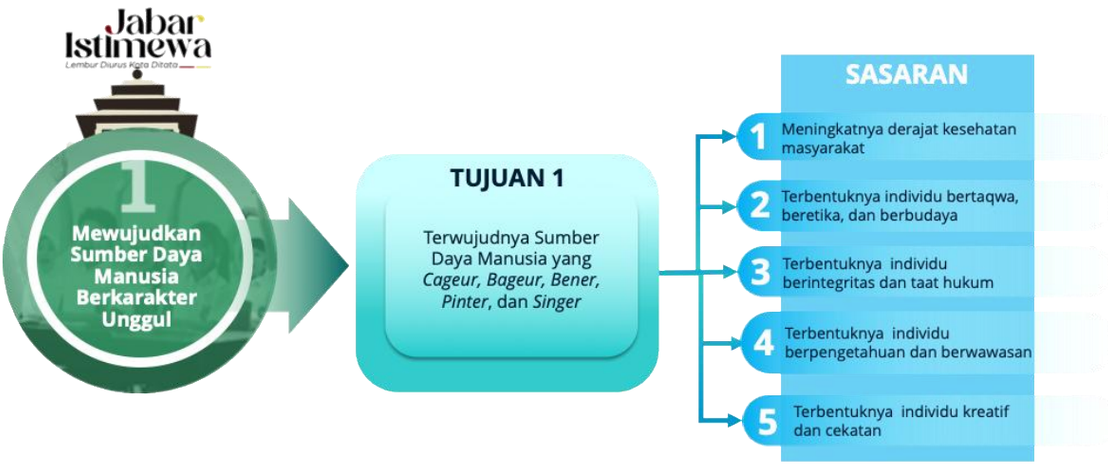

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

2. **Perwujudan Misi 2**: **Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif**. Misi ini memiliki tujuan, yaitu: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:
   1) Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan yang berdaya saing;
   2) Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang berkualitas;
   3) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis teknologi untuk swasembada pangan serta kesejahteraan petani/nelayan;
   4) Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten;

5) Terkendalinya stabilitas ekonomi makro; dan
6) Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

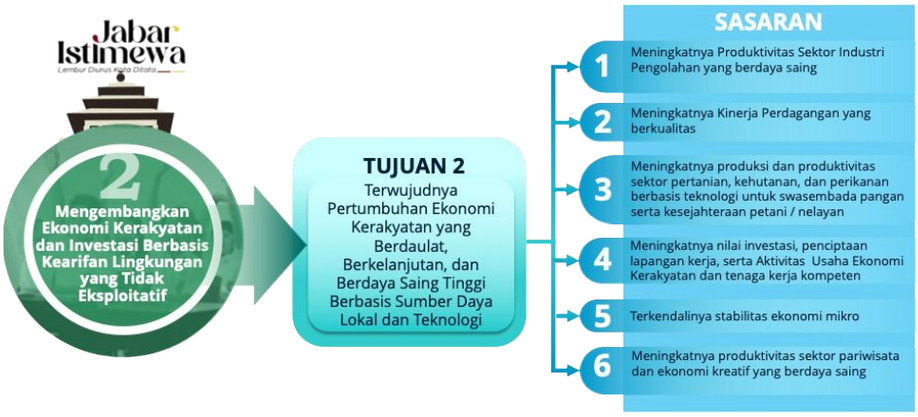

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

3. **Perwujudan Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**, memiliki tujuan yaitu: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:
   1) Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan sekitar kawasan konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; dan
   2) Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.

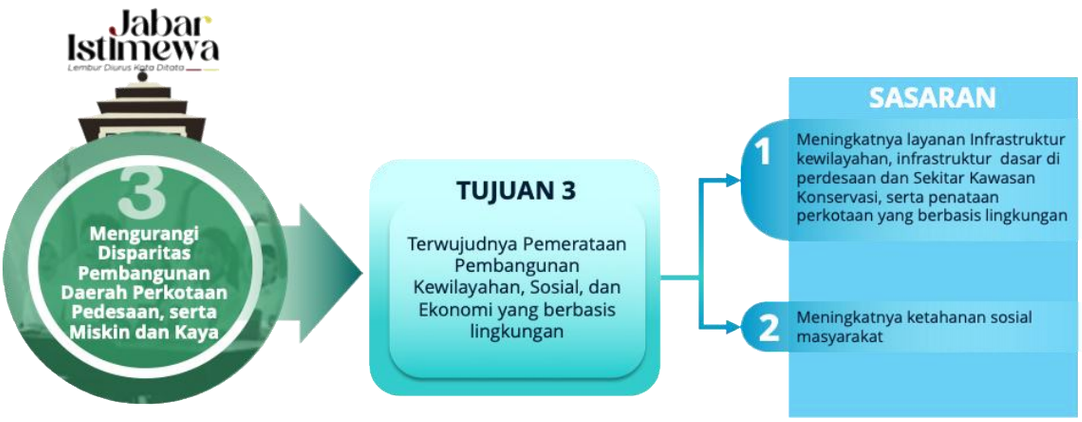

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

4. **Perwujudan Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan dengan Prinsip *Good and Clean Governance*,** memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu:

a. Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:
   1) Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan
   2) Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.
b. Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Secara lebih rinci tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat lengkap dengan indikator kinerja tujuan/sasaran disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		*OUTCOME*	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET						KET.
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)		(6)	(7)						(8)
VISI: JABAR ISTIMEWA – LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA															
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer				**Indeks Modal Manusia**		**N/A**	**0,55**	**0,56**	**0,57**	**0,59**	**0,6**	**0,6**	
			1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan yang sangat baik bahkan di atas rata-rata nasional menjadikan SDM Jawa Barat yang unggul dari kesehatan mental dan fisik (jiwa & raga)	a.	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,16	75,29	75,56	75,84	76,11	76,39	76,66	
						b.	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,9	15,14	14,39	13,65	12,92	12,2	11,49	
			1.1.2	Terbentuknya individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	Masyarakat yang beretika, toleran, dan berbudaya	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	73,71	74,05	74,39	74,74	75,08	75,43	
						b.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,5 (2023)	56,7	57,24	57,78	58,33	58,89	59,45	
			1.1.3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Kehidupan masyarakat yang tenteram, aman, dan kondusif	a.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	N/A	56,5	57,24	57,98	58,74	59,5	60,27	

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		*OUTCOME*	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET						KET.
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)		(6)	(7)						(8)
VISI: JABAR ISTIMEWA – LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA															
						b.	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	N/A	3,02	3,08	3,14	3,21	3,27	3,34	
						c.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	49,51	50,01	50,26	50,51	50,76	51,01	
			1.1.4	Terbentuknya individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Jawa Barat memiliki SDM potensial yang berilmu dan beradab serta berdaya saing tinggi pada seluruh lapangan kerja potensial yang ada	a.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,24	9,35	9,48	9,61	9,72	9,84	9,92	
						b.	Harapan Lama Sekolah	12,8	12,91	12,97	13,03	13,09	13,15	13,17	
			1.1.5	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	SDM Jawa Barat unggul dan berperan aktif dalam pembangunan	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	61,1	62,51	63,94	65,41	66,92	68,46	70,03	
						b.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	66,44	69,71	70,61	71,29	71,83	72,27	72,65	
						c.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458	0,458	0,457	0,448	0,439	0,431	0,422	
						d.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,51	71,95	73,12	73,87	74,62	75,38	76,15	
Mengembangkan Ekonomi kerakyatan dan Investasi	2.1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan				**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		**4,95**	**4,96 - 5,37**	**5,15 - 6,20**	**5,23 - 7,48**	**5,27 - 7,63**	**5,44 - 7,95**	**5,49 - 6,06**	
						Kontribusi PDRB Provinsi		**12,82**	**12,72**	**12,62**	**12,54**	**12,46**	**12,3**	**12,22**	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET						KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						(8)
VISI: JABAR ISTIMEWA – LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA												
berbasis Kearifan Lingkungan yang tidak Eksploitatif	yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi			**Indeks Ekonomi Hijau Daerah**	**52,67 (2023)**	**61,3**	**61,73**	**62,69**	**63,86**	**64,61**	**65,5**	
				Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	**45,29**	**48,19**	**51,38**	**54,78**	**58,41**	**62,28**	**66,4**	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	**6,75**	**6,42 - 6,99**	**6,31 - 6,66**	**6,05 - 6,49**	**6,00 - 6,53**	**5,94 - 6,56**	**5,86 - 6,27**	
				PDRB Per Kapita	**56,08**	**57,41-59,60**	**63,65-66,00**	**68,22-71,60**	**73,27-77,80**	**78,85-84,90**	**85,36-91,57**	
		2.1.1 Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan	41,39	41,87 - 42,00	41,51 - 41,67	41,15 - 41,35	40,79 - 41,03	40,1 - 40,4	39,41 - 40,08	
		2.1.2 Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	a. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	4,85	4,17	5,51	6,44	6,79	6,96	4,6	
		2.1.3 Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kesejahteraan petani & nelayan	a. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU)	5,99	4,58	4,42	4,23	4,01	3,48	3,47	
				b. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59	1,69 - 3,4	2,16 - 3,92	2,27 - 4,52	2,75 - 5,21	2,95 - 6,00	4,44 - 6,92	

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET						KET.
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)		(6)	(7)						(8)
VISI: JABAR ISTIMEWA – LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA															
						c.	Nilai Tukar Petani (NTP)	112,17	112-117	114-119	115-121	116-124	118-126	119-128	
			2.1.4	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Meningkatnya nilai investasi dan PDRB sektor ekonomi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,7	24,72	24,84 - 25,12	24,96 - 25,24	25,08 - 25,36	25,21 - 25,49	25,33 - 25,61	
						b.	Rasio Kewirausahaan Daerah	3,05	3,11	3,23	3,34	3,47	3,73	3,87	
			2.1.5	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Laju inflasi Jawa Barat dapat ditekan dibawah rata-rata nasional dan cenderung stabil	a.	Tingkat Inflasi	1,64	3,3 - 3,8	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	
						b.	Inklusi Keuangan	88 (2023)	94,22	94,7	95,18	95,66	96,15	96,64	
						c.	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	2,142	1,444	1,475	1,5	1,529	1,56	1,585	
						d.	Total Kredit/PDRB	N/A	23,7	25,08	26,55	28,1	30,84	31,48	
			2.1.6	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam PDRB Jawa Barat	a.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	20,73 (2023)	22,81	22,58	22,36	22,14	21,54	21,7	
						b.	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	3,07	3,15	3,21 - 3,46	3,28 - 3,65	3,35 - 3,86	3,43 - 4,09	3,52 - 4,00	
Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan	3.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan				**Rasio Gini**		**0,428**	**0,383 - 0,390**	**0,381 - 0,410**	**0,381 - 0,410**	**0,380 - 0,409**	**0,381 - 0,383**	**0,379 - 0,408**	
						Penurunan Intensitas Emisi GRK		**N/A**	**6,61**	**6,97**	**7,98**	**8,76**	**8,95**	**12,68**	

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET						KET.
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)		(6)	(7)						(8)
VISI: JABAR ISTIMEWA – LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA															
Pedesaan, serta Kondisi Miskin dan Kaya		Ekonomi yang berbasis lingkungan	3.1.1	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Terbentuknya kawasan perkotaan dan perdesaan yang nyaman, layak huni, dan ramah bagi berbagai kelompok dengan ekosistem yang terjaga dan berkesinambungan	a.	Indeks Kualitas Infrastruktur	76,06	62,93	66,11	67,53	68,93	70,47	71,49	
						b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	56,25	56,95	58,11	59,26	60,42	61,57	63,97	
						c.	Indeks Desa	77,11	77,46	79	80	81	82	83	
						d.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,02	64,06	64,31	64,56	64,82	65,07	65,32	
						e.	Indeks Ketahanan Air	N/A	3,25	3,29	3,35	3,40	3,45	3,50	
						f.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca								
							Kumulatif	N/A	2,66	3,31	4,02	4,8	5,65	6,55	
							Tahunan	N/A	9,27	10,63	12,46	14,53	16,47	18,45	
						g.	Indeks Risiko Bencana	114,15	109,18	108,3	107,44	106,58	105,73	104,88	
			3.1.2	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Menurunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.	a.	Tingkat Kemiskinan	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44	3,89 - 4,66	2,86 - 3,86	2,57 - 3,52	
						b.	Indeks Kesejahteraan Sosial	56.88	57,38	57,9	58,5	59	59,7	60,25	
Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good*	4.1	Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi				**Indeks Daya Saing Daerah**		**3,88**	**3,9**	**3,96**	**4,04**	**4,13**	**4,22**	**4,32**	
			4.1.1	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Ekosistem riset dan penerapan IPTEK menjadikan Jawa Barat terbuka untuk berbagai inovasi	a.	Indeks Inovasi Daerah	81,27	81,28	81,29	81,3	81,31	81,32	81,33	

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		*OUTCOME*	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET						KET.
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)		(6)	(7)						(8)
VISI: JABAR ISTIMEWA – LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA															
and Clean Governance					pembangunan dan menarik SDM serta potensi investasi yang berkaitan dengan teknologi inovatif dan ramah lingkungan										
			4.1.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Transparansi, Akuntabilitas, dan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	a.	Indeks Demokrasi Provinsi	83,04	86,03	87,52	89,02	90,51	92,01	93,51	
	4.2	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan				**Indeks Reformasi Birokrasi**		**A-**	**A-**	**A-**	**A-**	**A-**	**A-**	**A-**	
			4.2.1	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Jawa Barat yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memiliki daya saing yang semakin kuat.	a.	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General) (Persen)	86,44	86,45	86,47	86,5	86,54	86,59	86,65	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025
Keterangan: N/A: Data belum tersedia

Dalam rangka keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMN, maka sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		**P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance***	
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan	S15. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Indonesia
	2. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga		
	3. Indeks Kemerdekaan Pers		
	4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
	5. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik		
	6. Persentase kader yang menempati Jabatan Strategis		
	7. Indeks Demokrasi Indonesia		
	8. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		
	9. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan		
	10. Indeks Hak Asasi Manusia		
	11. Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
	12. Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik		
	13. Indeks Akses terhadap Keadilan		
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		**P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan	1. *Asia Power Index (Military Capability)*	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	-
	2. *Asia Power Index (Diplomatic Influence)*		-

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
	4. *Global Cybersecurity Index*		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	5. Indeks Keamanan Laut Nasional		-
S3. Terbangunnya *Eco-region* Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	6. Indeks Ketahanan Pangan	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	7. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan		-
	8. Meningkatkan Produksi Pangan		-
	9. Berkurangnya Impor Pangan		-
	10. Nilai Tukar Petani Indeks Kesejahteraan Petani		Nilai Tukar Petani
S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	11. Indeks Ketahanan Energi	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan
	12. Pasokan Energi Primer		
	13. Konsumsi Energi Final per Kapita		
	14. Porsi EBT dalam Bauran Energi		
	15. Intensitas Energi Primer		
	16. Kapasitas Tampungan Air per Kapita		
	17. Meningkatnya Air Minum Jaringan Perpipaan		
	18. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman		Indeks Kualitas Infrastruktur
	19. Menurunnya luas lahan kritis		
	20. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman		
	21. Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka		
S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	22. Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (Peringkat GIEI)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Inklusi Keuangan
	23. Kontribusi PDB Syariah		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	24. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	25. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		Indeks Transformasi Digital Nasional
S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	26. Indeks Ekonomi Hijau	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	27. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	28. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)		Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan
	29. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
	30. Proporsi Tenaga Kerja Hijau		
	31. Tingkat Input Material Sirkular		
S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	32. Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	33. Perlindungan Kawasan Perairan		
	34. Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru		
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		**P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif** **P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur
	2. Wktu Tempuh pada Lintas Utama (Jam/100 Km)		
	3. Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan (%)		
	4. *On Time Performance* Udara (%)		
	5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)		
	6. Kondisi Jalur KA sesuai Standar (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	7. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)		
	8. Indeks Pembangunan TIK Nasional		
	9. Konsumsi Listrik per Kapita (kwh)		
S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	10. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi
	11. Aset Perbankan/PDB (%)		
	12. Aset Dana Pensiun/PDB (%)		Kapasitas Fiskal Daerah
	13. Aset Asuransi/PDB (%)		
	14. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
	15. Total Kredit/PDB (%)		Total Kredit/PDRB
	16. Inklusi Keuangan (%)		Inklusi Keuangan
S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	17. Rasio PDB Pariwisata (%)	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
	18. Devisa Pariwisata (Miliar USD)		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum
S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	19. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	20. Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%)		Rasio Kewirausahaan Daerah
	21. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)		
	22. Rasio Kewirausahaan (%)		
S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	23. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		**P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahu keatas (tahun)	S4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	2. Harapan Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah
	3. Rata-rata nilai PISA a. Membaca b. Matematika c. Sains		
	4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional17.03 a. Literasi Membaca b. Numerasi		
	5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)		
	6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)		
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
	8. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		
S15. Kesehatan untuk Semua	9. Usia Harapan Hidup (tahun)	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
	10. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)		
	11. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
	12. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
	13. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	14. Prevalensi obesitas >18 tahun		
	15. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		
S16. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
	17. Indeks Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak
	18. Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
	19. Indeks Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender
	20. Indeks Pembangunan Gender		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	21. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial
	22. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)		
S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	23. Peringkat Indeks Inovasi Global	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Rasio Kewirausahaan Daerah
	25. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	S14. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah
	26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	27. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
	28. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games		
	29. Peringkat pada Asian Games		
	30. Peringkat pada Asian Para Games		
	31. Peringkat pada SEA Games		
	32. Peringkat pada ASEAN Para Games		
	33. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga (%)		
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		**P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif**	
S19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
	2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)		
	3. Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per Kapita (Rp Juta)		
	4. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan (%)		
	5. Biaya Logistik (%PDB)		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	6. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)	S7. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	8. Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)		
	9. Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun)		
	10. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (%)		
	11. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)		
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		**P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	1. Tingkat Kemiskinan	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin
	2. Proporsi penduduk kelas menengah		
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal		
	4. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
S23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	5. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	6. Persentase desa mandiri (%)		Indeks Desa
S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	7. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional		
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		**P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
		P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*	
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	1. Indeks Integritas Partai Politik 2. Indeks Pembangunan Hukum 3. Indeks Materi Hukum 4. Indeks Persepsi Korupsi 5. Indeks Integritas Nasional	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat
S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	6. Indeks Pelayanan Publik 7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 8. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	S16. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)
S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	9. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	10. *Clearance rate* tindak pidana judi 11. *Clearance rate* tindak pidana penyelundupan		
S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	12. *Return on Asset* (ROA) BUMN (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Kapasitas Fiskal Daerah
S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	13. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%) 14. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		
S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi	15. Tingkat Inflasi (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
yang inklusif dan berkelanjutan			
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		**P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul** **P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	
S33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	S2. Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
	3. Indeks Layanan Keagamaan		
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		Indeks Pembangunan Kebudayaan
	5. Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas		
S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana
	7. Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada empat sektor prioritas (kelautan&pesisir, air, pertanian dan kesehatan)		
	8. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Arah kebijakan dalam RPJMD merupakan rangkaian kerja penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan ini menjadi landasan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan dijabarkan kembali menjadi strategi pembangunan yang menjelaskan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan. Strategi berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus, dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

3.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dijabarkan kedalam rencana komprehensif melalui arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja dalam melaksanakan misi isu strategis daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Arah kebijakan selanjutnya diuraikan ke dalam strategi sebagai rencana tindakan komprehensif dan langkah atau upaya dari pelaksanaan kebijakan dan diimplementasikan menjadi program prioritas pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) yang dirumuskan dengan tema **“Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola”** sebagai penguatan modalitas atau sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.4
Posisi RPJMD Tahun 2025-2029 dalam RPJPD Tahun 2025-2045

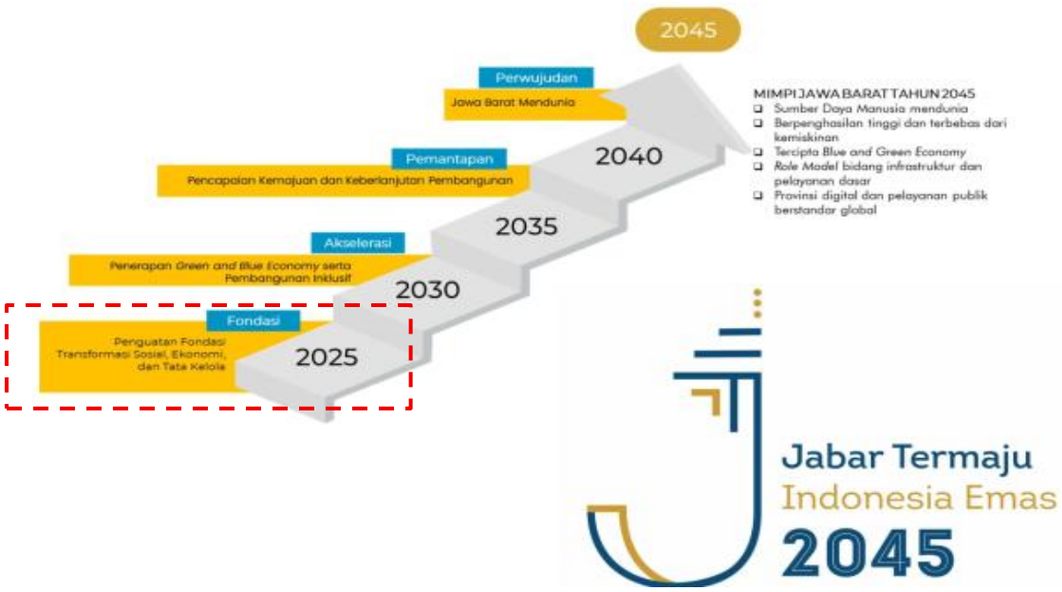

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, diolah, 2025

Upaya penguatan fondasi dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi meliputi:

1. Mendorong penduduk tumbuh seimbang di setiap wilayah;
2. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif;
3. Penguatan tata kelola sumber daya alam, pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten, serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan inovatif;
5. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah;
6. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
9. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Upaya penguatan fondasi dilaksanakan dengan mengacu pada penahapan 8 (delapan) Misi RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap 1 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing yaitu, Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Adaptif;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif yaitu, Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam, Pembentukan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja yang Kompeten, serta Penciptaan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan;
3. Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel, dan Inovatif yaitu, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Kolaboratif dan Inovatif;
4. Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah yaitu, Penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan yaitu, Perlindungan Kebudayaan Lokal dan Tradisi Masyarakat serta Optimalisasi Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif yaitu, Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah;
7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas yaitu, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
8. Penguatan Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkelanjutan yaitu, Penguatan Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkelanjutan.

Mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah periode 2025-2029 dan diselaraskan dengan tahap pertama pencapaian misi RPJPD (2025-2029) serta misi presiden dalam RPJMN Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian misi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
1	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	1	Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	
		2	Peningkatan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan serta penyediaan sarana-prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan primer dan rujukan termasuk layanan khusus/unggulan	
		3	Peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga medis serta tenaga kesehatan.	
		4	Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	
		5	Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui deteksi dini/*screening*, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	
		6	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		7	Peningkatan penuntasan dan pencegahan *stunting*.	
		8	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	
		9	Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup	
		10	Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
		11	Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat.	
		12	Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama.	
		13	Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.	
		14	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	
		15	Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi	
		16	Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas	
		17	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	
		18	Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital *literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	
		19	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
		20	Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	
		21	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	
		22	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	
		23	Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	
		24	Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu.	
		25	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		26	Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global.	
		27	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	
		28	Peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi	
		29	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		30	Pemberdayaan perempuan, pemuda, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
		31	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	
2	Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	1	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ *stock yard* yang modern terintegrasi).	
		2	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	
		3	Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
		4	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global	
		5	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	
		6	Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (*result base payment*)	
		7	Penguatan ekosistem industri berbasis rantai pasok dan sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan	
		8	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
		9	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		10	Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	
		11	Penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*.	
		12	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, untuk pengembangan pertanian, perikanan, dan kehutanan.	
		13	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan	
		14	Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	
		15	Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy.	
		16	Pengelolaan susut dan sisa pangan untuk ketahanan pangan menuju swasembada pangan	
		17	Penguatan sistem pangan untuk ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan	
		18	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	
		19	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	
		20	Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi	
		21	Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.	
		22	Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		23	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		24	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM.	
		25	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	
		26	Pengembangan investasi di wilayah bertata ruang industri berbasis klaster dan potensi keunggulan wilayah dengan mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM.	
		27	Penguatan proses bisnis UMKM berkelanjutan melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
		28	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	
		29	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	
		30	Penguatan Ekosistem Halal terintegrasi	
		31	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	
		32	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	
		33	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif berbasis kearifan lingkungan.	
		34	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kakayaan budaya dan intelektual	
3	Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	1	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	
		2	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	
		3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid *waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.	
		4	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.	
		5	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	
		6	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	
		7	Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban *renewal* pada area yang telah mengalami urban *decay* dalam suatu kawasan perkotaan.	
		8	Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	
		9	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan.	
		10	Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	
		11	Percepatan pelaksanaan reforma agraria untuk pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah serta penyempurnaan sistem pendaftaran tanah menuju stelsel positif yang menjamin kepastian hukum dan transformasi layanan pertanahan berbasis digital yang terintegrasi	
		12	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan.	

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
		13	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan *grid* tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	
		14	Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	
		15	Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.	
		16	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	
		17	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:	
			1.Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Kalipucang-Cilacap;	
			2. Akses Pelabuhan Patimban.	
			3. Bandung Intra *Urban Toll Road* (BIUTR)	
			4. Cibadak-Palabuhanratu;	
			5. Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang;	
			6. Ciranjang-Padalarang;	
			7. Garut-Pameungpeuk;	
			8. Kalipucang-Pangandaran;	
			9. Cirebon-Indramayu; dan	
			10. Cirebon-Kuningan;	
			11. Kertajati-Indramayu;	
		18	Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan	
		19	Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan *dry port* KA Pelabuhan Patimban, serta *dry port* KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon.	
		20	Reaktivasi layanan perkeretaapian di Jawa Barat terutama pada:	
			1.Layanan perkeretaapian ruas Cipatat-Padalarang;	
			2.Layanan perkeretaapian Banjar-Pangandaran-Cijulang;	

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
			3.Layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari;	
			4.Layanan perkeretaapian Bandung-Ciwidey; serta	
			5.Reaktivasi layanan perkeretaapian pada ruas Cibatu-Garut-Cikajang.	
		21	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.	
		22	Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.	
		23	Pengembangan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.	
		24	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api antar Kota Sukabumi – Palabuhan Ratu	
		25	Penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa.	
		26	Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu.	
		27	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).	
		28	Peningkatan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan	
		29	Pengembangan upaya pelestarian hutan berfungsi lindung dan ekosistem alami.	
		30	Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air	
		31	Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	
		32	Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga.	
		33	Pengelolaan sampah terpadu di Jawa Barat	
		34	Mengembangkan mekanisme pendukung perdagangan karbon dan pajak karbon	
		35	Dukungan peningkatan pelayanan sampah melalui fasilitas pengelolaan sampah regional	
		36	Penyiapan dan penetapan instrumen *circular economy* dalam pengelolaan sampah.	
		37	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah pada ekosistem darat dan laut	
		38	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	
		39	Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air.	

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
		40	Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu:	
			1. Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis;	
			2. Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang;	
			3. Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon;	
			4. Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor;	
			5. Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka;	
			6. Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung.	
		41	Pembangunan Kilang Minyak Bumi Balongan	
		42	Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	
		43	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang.	
		44	Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *cofiring* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	
		45	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, mitigasi bencana hidrometeorologi melalui modifikasi cuaca, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	
		46	Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.	
		47	Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		48	Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan	

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
			kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		49	Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	
		50	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
		51	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
		52	Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.	
4	Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	1	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri	
		2	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah serta dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.	
		3	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
		4	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).	
		5	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	
		6	Peningkatan kualitas Demokrasi	
		7	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	
		8	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
		9	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
		10	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	
		11	Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	
		12	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomial nelayan dan kepentingan pelayaran); (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi	

No	Misi	Arah Kebijakan		Keterangan
			digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital); serta (iv) penguatan keamanan siber dan pusat data.	
		13	Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Strategi menjadi rencana tindakan yang komprehensif untuk melaksanakan arah kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.4
Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul			
1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur*, *Bageur*, *Bener*, *Pinter*, dan *Singer***		
1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan upaya promotif-preventif dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		2	Menyediakan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		3	Menyediakan layanan infrastruktur sanitasi
		4	Meningkatkan kualitas infrastruktur ruang terbuka hijau di perkotaan
		5	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan termasuk layanan khusus/unggulan
		6	Menyediakan pelayanan kesehatan rutin bagi masyarakat
		7	Melaksanakan penataan dan redistribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan ~~ke~~ termasuk daerah-daerah sulit/terpencil
		8	Menyediakan beasiswa bagi dokter spesialis sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit
		9	Menyediakan pelayanan kesehatan prima dan sarana/prasarana layanan kesehatan bagi lansia dan kelompok rentan lainnya
		10	Meningkatkan deteksi dini/ *screening* untuk penyakit menular dan tidak menular
		11	Menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat termasuk menjaga kesehatan lingkungan
		12	Memanfaatkan nilai-nilai budaya dan integrasi kearifan lokal dalam program kesehatan
		13	Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dalam rangka penyediaan pangan sehat, perbaikan gizi, perbaikan gizi, penggunaan obat yang rasional, dan imunisasi lengkap bagi balita dan anak-anak, serta kesehatan jiwa untuk masyarakat
		14	Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan reproduksi
		15	Pengembangan kesehatan tradisional
		16	Menyiapkan masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas terutama di Daerah Afirmasi 3TP
		17	Meningkatkan upaya penuntasan dan pencegahan *stunting*
		18	Meningkatkan peran Kader Posyandu dan PKK dalam upaya penuntasan dan pencegahan *stunting*
		19	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
		20	Meningkatkan akses, kuantitas, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak
		21	Meningkatnya akses dan kualitas pengelolaan gizi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan setiap kelompok dalam siklus hidup
		22	Mengembangkan program promotif dan preventif kesehatan dan gizi pada kelompok dalam siklus hidup
1.2	Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	1	Mengoptimalkan pengembangan kampung adat berbasis hutan, daerah aliran sungai, kampung nelayan dan kampung adat berbasis perkotaan
		2	Melestarikan budaya lokal, Nilai budaya dan tradisi masyarakat
		3	Meningkatkan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar etnis dan umat beragama
1.3	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	1	Meningkatkan keadilan hukum dan demokrasi berkualitas
		2	Memperkuat Regulasi dan Kebijakan untuk Partisipasi Publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
		3	Penguatan struktural (regulasi kelembagaan), budaya (kontrol masyarakat), dan agensi (fungsi media sosial) melalui pendekatan *pentahelix*
		4	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		5	Meningkatkan keadilan hukum dan demokrasi berkualitas

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	
1.4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	1	Mengembangkan skema pemberian beasiswa/kerjasama pembiayaan peserta pendidikan dasar dan menengah, serta pesantren.
		2	Meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA
		3	Menyiapkan kurikulum STEAM dan pemenuhan infrastruktur digital untuk mendukung pengajaran berbasis TIK
		4	Meningkatkan minat baca dan literasi digital bagi seluruh masyarakat
		5	Meningkatan akses guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan lanjutan dan sertifikasi.
		6	Menyediakan jaringan internet yang menjangkau daerah terpencil/ *blank spot*
		7	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang memenuhi standar, aman bencana, serta sarana transportasi sekolah dasar dan menengah sesuai kondisi daerah
		8	Kolaborasi pengadaan tanah sekolah dengan pemerintah kabupaten/kota dan swasta
		9	Mengembangkan sekolah-sekolah vokasi pada pusat-pusat perkembangan wilayah/pusat ekonomi wilayah
		10	Mengembangkan pendidikan berkarakter yang diwujudkan antara lain melalui sekolah kebangsaan
		11	Mengembangkan kurikulum ekologi, sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, muatan lokal pancawaluya.
		12	Mengembangkan akses pendidikan berkebutuhan khusus
		13	Mengembangkan akses pendidikan nonformal
		14	Mengembangkan bantuan biaya pendidikan vokasi bagi warga tidak mampu
		15	Mengembangkan dan memperluas jangkauan sekolah terbuka dan pesantren, serta sekolah berbasis asrama
		16	Mengembangkan jejaring, kemitraan dan kerja sama internasional untuk memperluas peluang beasiswa pendidikan di luar negeri
		17	Memberikan dukungan pengembangan hub pendidikan global
		18	Mengembangkan kurikulum STEAM berbasis Vokasi dan keunggulan wilayah bertaraf global
		19	Meningkatkan minat baca masyarakat
		20	Mengoptimalkan pembangunan literasi masyarakat
1.5	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	1	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda
		2	Mengoptimalkan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		3	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan
		4	Penguatan karakter, kompetensi individu dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda
		5	Meningkatkan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.
		6	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan keluarga.
		7	Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan.
		8	Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender.
Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif			
2	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi**		
2.1	Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	1	Membangun kawasan pergudangan/ *stock yard* yang modern terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan
		2	Memberikan kemudahan perizinan dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya
		3	Membangun sarana dan prasarana kereta api logistik terutama untuk akses dan *dry port* KA Palabuhan Patimban
		4	Mengintegrasikan *dry port* KA Patimban dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon
		5	Pengembangan penggunaan bahan baku lokal untuk kebutuhan industri unggulan
		6	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi IPTEK untuk meningkatkan daya saing Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di tataran global
		7	Memperluas akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis
		8	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas peneliti untuk penguatan riset di sektor ekonomi produktif
		9	Meningkatkan pembiayaan dan kolaborasi riset sektor ekonomi produktif antara pemerintah, akademik, DUDI baik dalam dan luar negeri
		10	Menata kerangka regulasi dan kelembagaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta kolaborasi multi pihak
		11	Mengembangkan sektor industri (besar dan IKM/UMKM) unggulan berbasis potensi wilayah
		12	Penguatan pengarusutamaan penerapan industri hijau pada sektor industri

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	
2.2	Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	1	Memperluas ekosistem digital untuk memperkuat bisnis UMKM
		2	Memperluas akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis
		3	Meningkatkan perluasan akses pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan kemitraan untuk pemberdayaan IKM/UMKM, terutama di daerah afirmasi 3TP
		4	Penguatan P3DN, UMK dan Koperasi
		5	Memperkuat rantai pasok nilai tambah industri dalam negeri
		6	Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen
		7	Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan melalui proses Litbang dan dukungan pengembangan sumber daya produksi yang berkualitas
		8	mengembangkan sistem perdagangan yang optimal, efisien, merata dan berdaya saing
		9	Menyiapkan dan melaksanakan penataan *government-induced activities* untuk peningkatan pergerakan orang dan barang di daerah afirmasi 3TP
2.3	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	1	Meningkatkan penyediaan instrumen hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
		2	Penguatan infrastruktur pelabuhan perikanan
		3	Penyiapan lahan untuk komoditas unggulan
		4	Perluasan Akses pasar
		5	Penambahan gudang penyimpanan
		6	Digitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan
		7	Hilirisasi produk pertanian, perikanan, dan kehutanan
		8	Penataan fasilitas penangkapan dan pengembangan sarana prasarana produksi budidaya perikanan
		9	Penguatan infrastruktur pelabuhan perikanan
		10	Mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan
		11	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan melalui transformasi sistem regenerasi petani, penyuluhan pertanian, serta sinergi pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha
		12	Mengembangkan klaster pertanian bioindustri berbasis unggulan daerah
		13	Menerapkan pertanian pangan berkelanjutan
		14	Menerapkan pertanian presisi
		15	Meningkatkan pelayanan sistem irigasi dalam rangka meningkatkan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
		16	Melakukan konservasi energi dengan pemanfaatan prasarana/sarana bersumber energi terbarukan dan pemanfaatan angkutan umum massal
		17	Penguatan Infrastruktur dan Teknologi untuk penyelamatan pangan
		18	Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
		19	Meningkatkan ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, stabilitas pangan, kualitas pangan, dan tata kelola pangan
		20	Meningkatkan penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
		21	Memanfaatkan sumber daya perairan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, dengan menjaga kesehatan ekosistem laut
2.4	Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	1	Memperkuat tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		2	Mengembangkan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi
		3	Meningkatkan sarana prasarana lembaga pelatihan bagi angkatan kerja
		4	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
		5	Memetakan dan melakukan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi di daerah afirmasi 3TP
		6	Memberikan kemudahan perizinan dan/atau insentif fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP
		7	Meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM
		8	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing berbasis klaster terintegrasi dan keunggulan wilayah
		9	Meningkatkan perluasan akses pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan kemitraan untuk pemberdayaan IKM/UMKM, terutama di daerah afirmasi 3TP
		10	Menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital dan inkubator bisnis.
		11	Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	
		12	Meningkatkan fasilitasi sertifikasi halal, penguatan literasi halal, promosi produk dan jasa halal; dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor
2.5	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	1	Mengoptimalkan pengaturan harga, pengendalian biaya produksi, dan peningkatan efisiensi produksi
		2	Penguatan tata kelola pengendalian inflasi daerah untuk stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok penting
		3	Mengoptimalkan Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
		4	Mengoptimalkan potensi CSR, KPBU, Ekonomi dan keuangan syariah
		5	Meningkatkan kapasitas belanja daerah
		6	Mengoptimalkan pendapatan transfer daerah
		7	Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan swasta
		8	Restrukturisasi dan Penyehatan BUMD, serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan BUMD
		9	Optimalisasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis desa dan kelurahan
		10	Peningkatan pendapatan asli daerah serta pemanfaatan potensi sumber pembiayaan alternatif & kreatif
2.6	Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	1	Pengembangan atraksi wisata, Promosi dan pemasaran, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan paket wisata, serta penerapan pariwisata digital
		2	Meningkatkan penyediaan akomodasi dan sarana prasarana lainnya untuk mengembangkan produktivitas pariwisata
		3	Mengembangkan daya tarik wisata (wisata alam, kultural, dan *heritage*) secara kolaboratif dan partisipatif
		4	Mengembangkan daya tarik wisata (wisata alam, kultural, dan *heritage*) secara kolaboratif dan partisipatif
		5	Pengembangan dan penguatan SDM, kelembagaan, dan jejaring ekonomi kreatif lintas Kabupaten/ Kota dan Nasional
Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya			
3	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan**		
3.1	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	1	Menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya
		2	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
		3	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan
		4	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi terpadu perkotaan
		5	Menerapkan Pembangunan infrastruktur *hybrid (green and grey infrastructure)* di kawasan perkotaan untuk ketahanan bencana
		6	Menetapkan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb)
		7	Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		8	Meningkatkan penyediaan hunian vertikal perkotaan
		9	Meningkatkan penataan kawasan kumuh perkotaan dan/atau urban *renewal*
		10	Meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi
		11	Meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan
		12	Membangun Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan
		13	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar pusat kegiatan, klaster perekonomian dan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan
		14	Mengoptimalisasikan Bandar udara di Jawa Barat
		15	Membangunan dan mengoptimalkan Pelabuhan Laut dan ASDP di Jawa Barat
		16	Meningkatkan peran terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi
		17	Meningkatkan ketersedian fasilitas lalu lintas berkeselamatan;
		18	Mendorong pemanfaatan energi rendah emisi untuk aktivitas industri
		19	Menyediakan akses jalan yang terkoneksi ke kawasan industri
		20	Menyediakan akses telekomunikasi dan digital untuk aktivitas industri
		21	Melakukan pendampingan dan pengawasan pengelolaan limbah dan sampah industri
		22	Menyediakan dan melakukan penataan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
		23	Menyediakan dukungan untuk penataan fasilitas hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	
		24	Mendorong redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak sesuai prioritas reforma agraria nasional, mengoptimalkan pemanfaatan tanah terlantar dan tanah negara serta integrasi reforma agraria dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat
		25	Mempercepat sertifikasi tanah melalui PTSL dan mempercepat pelayanan pertanahan modern berbasis digital serta penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan secara cepat, adil, dan transparan
		26	Membangun dan memperluas cakupan sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi di kawasan perkotaan dan perdesaan.
		27	Melakukan persiapan dan dukungan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan di kawasan metropolitan
		28	Memperkuat pengelolaan jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta jalan desa
		29	Meningkatkan kemantapan jalan pada jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta jalan desa
		30	Mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada ruas:
			1. Depok-Antasari Seksi 3 (Sawangan-Bojong Gede)
			2. Depok-Antasari Seksi 4 (Bojong Gede-Salabenda)
			3. Bekasi- Cawang-Melayu Seksi 2B (Margajaya-Tambun)
			4. Bogor-Ringroad Seksi 3B (Kayumaning-Salabenda)
			5. Ciawi-Sukabumi Seksi IIIB (Cibadak-Sukabumi Barat)
			6. Ciawi-Sukabumi Seksi IVB (Sukabumi Barat-Sukabumi Timur)
			7. Jakarta-Cikampek II Selatan (Jatiasih-Setu dan Setu-Sukabungah)
			8. Akses Palabuhan Patimban
			9. Cikunir-Karawaci *Elevate*
			10. Bogor-Serpong Via Parung (JORR III)
			11. Sentul Selatan-Karawang Barat (JORR III)
			12. Sukabumi-Ciranjang
			13. Ciranjang-Padalarang
			14. Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis
			15. Caringin-Cisarua
			16. Akses Patimban *Extend* (sadang-Subang)
			17. Bandung-Inter *Urban Toll Road*
		31	Meningkatkan kualitas dan spesifikasi jalan khusus, terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan dan perdesaan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah antar Provinsi dan dunia usaha
		32	Membangun sarana dan prasarana kereta api logistik terutama untuk akses dan *dry port* KA Palabuhan Patimban
		33	Mengintegrasikan *dry port* KA Patimban dengan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon
		34	Meningkatkan upaya penyiapan *readiness criteria* untuk mendukung reaktivasi layanan perkeretaapian, meliputi:
			1. Dukungan penyiapan dokumen perencanaan
			2. Dukungan penyiapan lahan
			3. Upaya mitigasi dampak sosial dan lingkungan
		35	Meningkatkan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat)
		36	Menyiapkan prasarana dan sarana elektrifikasi jalur KA, terutama untuk layanan perkeretaapian komuter
		37	Mendukung pengembangan kereta api cepat (HST/*High Speed Train*) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya
		38	Mendukung penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone* dan *maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian
		39	Membangun sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP
		40	Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat di kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, dan/atau Daerah Afirmasi 3TP
		41	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
		42	Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak di Perdesaan dan Kawasan Perdesaan

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	
		43	Mengembangkan Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah di Perdesaan dan Kawasaan Perdesaan
		44	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
		45	Meningkatkan Infrastruktur Sosial dan Kebudayaan serta Infrastruktur Pendukung Perekonomian di Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
		46	Mengembangkan Ekosistem Perekonomian Desa melalui Revitalisasi Lembaga Keuangan Desa berbasis potensi ekonomi lokal perdesaan
		47	Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal Skala Desa
		48	Meningkatkan Hiliriasasi Perekonomian Desa dan Pengembangan Komoditas Ekspor berbasis Potensi Ekonomi Lokal Desa
		49	Meningkatkan Akses Pasar dan Permodalan dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Desa
		50	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian hutan berfungsi lindung dan ekosistem alami
		51	Meningkatkan pemanfaatan potensi keragaman hayati dan jasa lingkungan serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem sumber daya alam hayati
		52	Peningkatan fungsi kawasan hutan untuk mempertahankan daya tampung dan daya dukung lingkungan
		53	Mengembangkan Upaya Rehabilitasi dan pelaksanaan strategi FOLU *Net Sink*
		54	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.
		55	Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui perhutanan sosial
		56	Meningkatkan upaya konservasi, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan di Daerah Aliran Sungai Prioritas (DAS Citarum, DAS Cilamaya, DAS Kali Bekasi) dan wilayah pesisir dan laut
		57	Mengendalikan pembangunan wilayah dan infrastruktur melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)
		58	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan peruntukkan ruang sebagaimana arahan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)
		59	Meningkatkan upaya-upaya untuk memitigasi perubahan iklim khususnya aksi-aksi dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, energi, transportasi, limbah, dan persampahan
		60	Meningkatkan upaya-upaya untuk adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi kerugian ekonomi sebagai dampak bencana perubahan iklim pada sektor pertanian, sumber daya air, konservasi ekosistem pesisir khususnya bagian utara, dan kesehatan
		61	Mengembangkan sistem pengelolaan limbah domestik secara individu maupun terpadu pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan untuk mengurangi pencemaran air dan mengurangi emisi gas rumah kaca sektor limbah domestik, menuju akses sanitasi AMAN
		62	Pengelolaan sampah mandiri untuk mengurangi timbulan sampah dan penanganan kawasan tuntas sampah
		63	Pemanfaatan sampah menjadi energi (RDF, WtE, *Hydrogen*, atau skema lainnya) untuk mengurangi timbulan sampah di *landfill* dan mengurangi emisi gas rumah kaca
		64	Pengelolaan sampah di DAS untuk mengurangi penyumbatan DAS
		65	Menyiapkan tata kelola dan kelembagaan penerapan perdagangan dan pajak karbon
		66	Melakukan percepatan penyelesaian konstruksi dan operasionalisasi Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional pada wilayah Bandung Raya dan Bogor-Depok-Tangerang Selatan (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Nambo)
		67	Melakukan optimalisasi pelayanan sampah Regional Bandung Raya pada TPAS Regional Sarimukti sampai dengan beroperasinya TPPASR Legok Nangka, melakukan pengelolaan gas metan, serta melakukan konservasi dan penutupan TPAS Regional Sarimukti
		68	Melakukan fasilitasi perencanaan dan penyiapan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur) dan pengelolaan sampah terpadu (TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya)
		69	Mempersiapkan mekanisme dan instrumen pelaksanaan *circular-economy* pengelolaan sampah
		70	Mengurangi ancaman terhadap ekosistem darat dan laut pada sektor hutan dan lahan, pertanian dan perkebunan, serta perairan
		71	Melakukan pemanfaatan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas ekosistem darat dan laut guna melestarikan keanekaragaman hayati
		72	Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem
		73	Membangun jaringan irigasi dan. Peningkatan Layanan Irigasi
		74	Rehabilitasi daerah irigasi kewenangan Provinsi dan Pembangunan daerah irigasi baru
		75	Melakukan upaya penambahan kapasitas tampung dan pengembangan jaringan infrastruktur sumber daya air
		76	Membangun bendungan/waduk baru untuk meningkatkan kapasitas tampung, pemenuhan air baku dan pengendalian banjir
		77	Dukungan Pembangunan Kilang Minyak Bumi Balongan

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	
		78	Menyediakan infrastruktur energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan di kawasan perkotaan
		79	Membangun infrastruktur jaringan transmisi migas
		80	Membangun akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan
		81	Menguatkan kurikulum di setiap satuan pendidikan untuk mengelola risiko bencana
		82	Meningkatkan penggunaan sistem peringatan dini bencana
		83	Meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya bencana
		84	Mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
		85	Meningkatkan upaya mitigasi struktural dan non-struktural di lokasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat
		86	Meningkatkan upaya implementasi penurunan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, serta pengelolaan limbah dan sampah
		87	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		88	Memperkuat upaya mitigasi bencana hidrometeorologi melalui modifikasi cuaca
3.2	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	1	Menjamin pemenuhan dan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan).
		2	Memperkuat sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi bagi kelompok marjinal, rentan dam masyarakat di daerah afirmasi 3TP (Jabar Selatan)
		3	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kerja penyandang disabilitas di sektor formal
		4	Meningkatkan partisipasi kerja penyandang disabilitas di sektor formal
		5	Mengembangkan edukasi sektor formal untuk menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja
		6	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
		7	Menyediakan layanan panti wreda/griya lansia di 27 kabupaten/kota
		8	Mengoptimalkan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		9	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan
		10	Penguatan karakter, kompetensi individu dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda
		11	Meningkatkan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.
Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*			
4.1	**Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi**		
4.1.1	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	1	Meningkatkan riset berbasis permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah
		2	Meningkatkan kolaborasi riset di berbagai sektor pembangunan terutama sektor ekonomi produktif antara pemerintah, akademik, DUDI baik dalam dan luar negeri
		3	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di Daerah.
4.1.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	1	Meningkatkan Kerja sama Internasional dan Ketahanan Daerah
		2	Menyediakan dan memperkuat Infrastruktur Pertahanan di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)
		3	Memperkuat Regulasi dan Kebijakan Kerja Sama Antardaerah dalam pengelolaan wilayah, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
		4	Meningkatkan kualitas etika dan budaya politik melalui Pendidikan politik
		5	Meningkatkan kewaspadaan daerah serta kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan untuk mencegah konflik sosial melalui kolaborasi lintas sektor
		6	Meningkatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan
		7	Meningkatkan penyediaan akses layanan aspirasi bagi seluruh masyarakat
4.2	**Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan**		
4.2.1	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	1	Mengembangkan instrumen Regulasi Daerah yang efektif, efisien, dan selaras dengan Regulasi Nasional dan Prinsip *Good Governance*
		2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik selaras dengan prinsip *Good and Clean Governance*
		3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem kompensasi yang adil, transparan, dan akuntabel
		4	Mengembangkan Kelembagaan dan penataan aparatur daerah yang Adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran		Strategi	
		5	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah melalui Penguatan Kompetensi SDM serta Peningkatan Etos Kerja dan Integritas
		6	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN serta Penguatan Sistem Manajemen Talenta
		7	Mengembangkan Sistem *Reward* dan *Punishment* yang Transparan
		8	Meningkatkan Kesejahteraan ASN Berbasis Capaian Kinerja
		9	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui desain kebijakan penataan wilayah (pemekaran/penggabungan wilayah/kabupaten/kota/kelurahan/desa)
		10	Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Pembangunan Berbasis Risiko
		11	Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
		12	Meningkatkan digitalisasi pada sektor strategis
		13	Meningkatkan literasi digital
		14	Meningkatkan keamanan siber dan pusat data
		15	Meningkatkan implementasi *Smart Province*
		16	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola organisasi pemerintahan dan pelayanan publik

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

3.3.2 Strategi Pencapaian Target Indikator Makro Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang paling signifikan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa dengan lebih dari 65 persennya di dalamnya termasuk usia produktif, luas lahan baku sawah yang mencapai lebih dari 900 ribu hektar, serta kemantapan Kawasan Industri eksisting di Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor, dan Purwakarta, menjadi modal besar Jawa Barat untuk mengambil peran penting dalam perekonomian nasional. Modal dan peran strategis tersebut tercermin dalam tema pembangunan jangka panjang Jawa Barat Tahun 2025-2045, yaitu pusat pengembangan *cutting edge* industry, inovasi dan pendidikan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional.

Dalam trayektori jangka panjang, Tahun 2025-2029 berperan sebagai tahapan pondasi yang menuntut penguatan modalitas dan sumber daya untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan. Pemenuhan peran tahap pondasi ini kemudian dimaksimalkan melalui Visi, Misi, dan Program Strategis (Asta Cita) yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia dengan Indeks Modal Manusia mencapai 0,59 poin, penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen.

Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen pada tahun 2029 didukung oleh kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif. Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, berbagai intervensi yang bersifat *extraordinary* juga harus dilakukan di tingkat provinsi, utamanya dalam memaksimalkan potensi lokal yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Fokus intervensi pemerintah pusat di Jawa Barat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 (delapan) persen adalah pada pengembangan ekosistem dan infrastruktur pendukung industri, swasembada pangan, air, dan energi, mengembangkan pusat pertumbuhan baru, serta pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif. Intervensi tersebut juga didukung oleh Visi, Misi, dan Program Strategis (9 Langkah) Jawa Barat Tahun 2025-2029, utamanya melalui pengembangan ekosistem pertanian organik, perluasan lapangan kerja, serta mendorong investasi pada daerah bertata ruang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sehingga, dengan intervensi tersebut, Provinsi Jawa Barat dapat mengejar percepatan ekonomi nasional dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonominya hingga 7,95 persen di tahun 2029.

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 7,95 persen pada tahun 2029, ditopang oleh kuatnya permintaan domestik yang ditunjukan oleh percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 5,04 persen pada tahun 2025 menjadi 7,65 persen pada 2029. Kondisi penguatan ini terjadi seiring dengan terkendalinya harga berbagai komoditas pada rentang 1,5 - 3,5 persen per tahun. Perbaikan pasar kerja seiring dengan resiliensi dan diversifikasi pasar ekspor produk industri pengolahan, serta peningkatan kesejahteraan seiring penurunan tingkat kemiskinan juga diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih tinggi membutuhkan total realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp2.277 Triliun selama periode 2025-2029. Percepatan tersebut juga menyebabkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang lebih tinggi, yaitu dari 6,24 persen pada tahun 2025 menjadi 9,74 persen pada tahun 2029. Tingginya pertumbuhan investasi tersebut harus diiringi dengan perbaikan kualitas

dan efisiensi produksi yang ditunjukan oleh nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang mencapai 3,4 pada tahun 2029.

Kekuatan permintaan domestik dan tingginya investasi perlu dioptimalkan dengan menjaga tingkat pertumbuhan ekspor dan impor. Ekspor luar negeri terus meningkat pada kecepatan pertumbuhan 6,77 - 8,78 persen seiring dengan produksi sektor-sektor perekonomian yang lebih tinggi dan efisien, stabilitas pangsa pasar global seiring dengan diversifikasi dan perluasan pasar ekspor baik dalam maupun luar negeri, serta diversifikasi komoditas ekspor yang juga mencakup produk ekonomi kreatif. Seiring dengan ekspansi produk ekspor Jawa Barat ke pasar dalam dan luar negeri, potensi pertumbuhan juga dioptimalkan dengan menjaga pertumbuhan impor di tingkat 3,42 - 4,86. Strategi perluasan permintaan melalui ekspor, serta pengurangan *loss* akibat impor, diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat pada PDRB sisi pengeluaran harus diimbangi dengan tingginya produktivitas sektor ekonomi. Dalam mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi, diperlukan dorongan yang lebih kuat dalam memanfaatkan potensi pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi fokus intervensi, diantaranya sektor pertanian, konstruksi, industri pengolahan, dan akomodasi makan minum.

Tema pembangunan Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional, serta adanya intervensi untuk mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi tercermin dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Jawa Barat yang tumbuh pada tingkat 1,88-4,64 persen selama periode 2025-2029, didukung oleh peningkatan layanan jaringan irigasi, aksesibilitas daerah produksi, peningkatan produksi padi menjadi 12,7 juta ton pada tahun 2029, serta peningkatan produktivitas tanaman hortikultura, perkebunan, dan perikanan seiring dengan upaya hilirisasi pada komoditas-komoditas potensial.

Pengembangan daerah industri baru di Rebana yang berfokus pada industri kendaraan listrik dan bagiannya, serta hilirisasi *blue economy* diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan pada sub sektor industri alat angkutan, mesin, dan makanan-minuman. Pada saat yang bersamaan, perhatian pada sub sektor tekstil dan produk tekstil juga menjadi asumsi yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

mengingat subsektor ini memiliki karakteristik padat karya, sehingga upaya mendorong keberlanjutannya akan sangat berpengaruh pada pasar tenaga kerja di Jawa Barat. Intervensi yang kuat pada berbagai sub sektor tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan secara umum pada rentang 4,36-6,27 persen. Aktivitas Industri Pengolahan sebagai sektor dominan juga harus didukung oleh terjaganya tingkat suku bunga untuk mendorong ekspansi kinerja kredit usaha di sektor industri pengolahan.

Pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan kemudian didetailkan pada tingkat komoditas yang memiliki potensi pengembangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi menuju 8 (delapan) persen pada tahun 2029.

Gambar 3.5
Sebaran Komoditas Unggulan yang Dikembangkan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 Persen

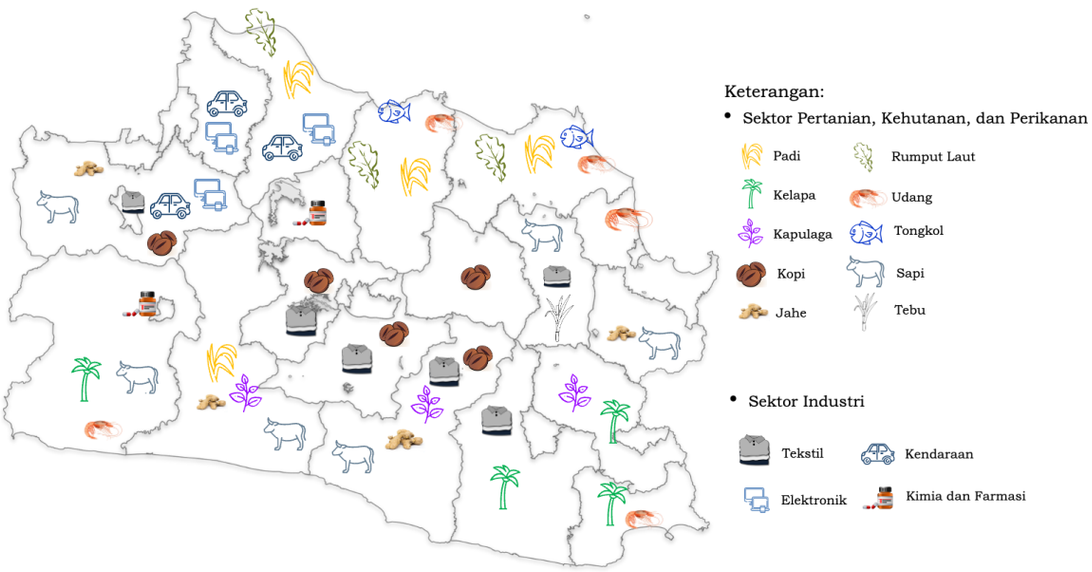

Sumber: Kajian Potensi Wilayah Jawa Barat, Bappeda Jabar, 2025

Pengembangan berbagai komoditas di atas didukung juga dari sektor infrastruktur. Upaya pengembangan kawasan industri di Rebana, peningkatan kualitas dan cakupan layanan irigasi, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, penataan daerah pesisir, serta pengembangan transportasi perkotaan, menjadi sumber pertumbuhan sektor konstruksi pada tingkat 6,60-10,29 persen sepanjang Tahun 2025-2029. Selain mendukung pengembangan sektor

primer dan sekunder yang telah dijelaskan, kemantapan infrastruktur juga diharapkan mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor tersier.

Sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran, serta sektor-sektor penyediaan jasa diharapkan dapat tumbuh lebih progresif. Pengembangan sektor pariwisata ditunjukan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang lebih ekspansif dengan rata-rata peningkatan sebesar 11 juta orang per tahun. Pembentukan kawasan pertumbuhan baru, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan transportasi perkotaan, dapat menjadi sumber pertumbuhan sektor jasa yang lebih tinggi.

Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi yang telah diterjemahkan di tingkat lapangan usaha, serta informasi lokasi pengembangan dalam RPJMN dan kajian potensi wilayah, kemudian dilakukan *cascading* untuk mengetahui indikasi program dan kegiatan prioritas yang dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi menuju 8 (delapan) persen di tingkat Jawa Barat.

1. Pengembangan Industri

Strategi ini dibuat untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah melalui;

a. Optimalisasi dan Pengembangan Perwilayahan Industri:

   Difokuskan di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Ciamis mendorong penguatan daya saing wilayah industri berbasis keunggulan lokal dan mendukung pertumbuhan kawasan industri prioritas melalui kegiatan:

   1. Pemetaan Industri;
   2. Hilirisasi Industri;
   3. Peningkatan Kawasan Industri Tematik (Industri Hijau, Industri Halal, Industri Kelautan Perikanan, Industri Otomotif, Industri Energi Terbarukan, Industri Fitofarmaka, Industri Dirgantara)
   4. Pengembangan Ekosistem Perwilayahan Industri;

5. Peningkatan Pengembangan Sentra IKM Terintegrasi

b. Peningkatan Kualitas Industri: Dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Sukabumi mengakselerasi transformasi industri rakyat menuju industri berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui kegiatan:
   1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri;
   2. Peningkatan Daya Saing Industri;
   3. Peningkatan Kemitraan Industri;
   4. Peningkatan Penggunaan Teknologi Tepat Guna;
   5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

c. Meningkatkan Kemudahan Berusaha Sektor Industri ditargetkan di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Barat untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui kegiatan:
   1. Kemudahan pengurusan dokumen teknis perizinan berusaha industri
   2. Pendataan dan pelaporan kinerja industri
   3. Pengawasan industri dan jaminan produk halal

Perwujudan dari indikasi program dan kegiatan strategis ini adalah adanya penambahan pelaku usaha yang bermitra dengan Industri Besar; mempersiapkan IKM obat herbal terstandarisasi, menyediakan hilirisasi kelapa, kitosan, dan atsiri; meningkatnya keterisian lahan KI eksisting; dan meningkatnya jumlah perusahaan yang bekerjasama dengan IKM, meningkatkan IKM yang terstandarisasi; meningkatkan industri dan sentra IKM yang menerapkan industri hijau.

Strategi ini juga untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan industri pada koridor Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (sektor industri prioritas seperti makanan, minuman, semikonduktor, kendaraan bermotor, listrik berbasis baterai, serta mesin dan perlengkapan) dan pengembangan koridor industri Cirebon–Kertajati (sektor industri prioritas: industri dirgantara dan industri mesin dan perlengkapan), serta pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi,

industri mesin dan perlengkapan, industri semikonduktor, industri makanan dan minuman, serta industri tekstil dan alas kaki).

2. Pengembangan Sektor Primer dan Swasembada Pangan

Strategi ini dibuat untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap perekonomian daerah melalui;

a. Ekosistem Holistik Pertanian dan Peternakan (Langkah Kedua): Difokuskan pada daerah afirmasi seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Lokus ini difokuskan untuk membangun sistem pertanian dan peternakan yang terintegrasi, mendukung produksi padi dan ternak unggulan bernilai tambah tinggi (*high value*), serta keberlanjutan ekosistem melalui kegiatan:
   1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
   2) Penyediaan alat mesin pertanian;
   3) Pompa terintegrasi untuk sumber air;
   4) SDM Pertanian (penyuluh & petani);
   5) Sertifikasi dan distribusi bibit unggul (padi, jagung, dan kedelai);
   6) Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim;
   7) Pengembangan pertanian berbasis kawasan meliputi kota agropolitan Sukabumi, Cirebon, dan Tasikmalaya.
b. Konservasi dan Peningkatan Produktivitas Lahan Perkebunan dan Kehutanan: Dilaksanakan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan dan kehutanan melalui konservasi sumber daya alam melalui kegiatan:
   1) Pengendalian dan pemanfaatan kawasan;
   2) Bantuan embung dan pipanisasi; dan
   3) Pengembangan pupuk organik.
c. Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan: Ditargetkan di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya untuk mengoptimalkan hasil tangkapan seperti lobster, udang, dan rumput

laut, sekaligus meningkatkan keberlanjutan sumber daya kelautan melalui kegiatan:

1) Penataan wilayah pesisir dan pelabuhan mencakup penataan Pelabuhan Perikanan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, serta sarana prasarana sistem rantai dingin produk perikanan (Langkah Kedelapan);
2) Peningkatan kapasitas SDM perikanan;
3) Pengembangan produksi garam; dan
4) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budibudaya air payau dan Revitalisasi tambak rakyat.

Perwujudan dari langkah strategis ini adalah produksi padi tumbuh dari 1,71 persen menjadi 5,60 persen per Tahun; jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat dari 25 persen menjadi 75 persen; optimasi daerah irigasi yang sudah memiliki waduk; peningkatan produksi dan serapan tenaga kerja sektor kehutanan; tertatanya Pelabuhan Pendaratan Ikan di Indramayu, Cirebon, Garut, dan Pangandaran.

3. Pengembangan Kawasan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Strategi ini dibuat untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah melalui;

a. Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Budaya Unggulan: Difokuskan di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi alam dan budaya unggulan melalui kegiatan:
   1) Operasionalisasi dan Optimalisasi Destinasi Pariwisata;
   2) Pengembangan Desa Wisata;
   3) Promosi Destinasi Pariwisata;
   4) Fasilitasi dan Dukungan UNESCO *Global Geopark;*
   5) Pengembangan SDM, Promosi, dan Kemitraan ekonomi kreatif; dan
   6) Investasi di wilayah bertata ruang pariwisata (Langkah Keempat).
b. Peningkatan Aksesibilitas dan Integrasi Destinasi Wisata: Dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,

Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya untuk memperkuat konektivitas antar destinasi melalui infrastruktur jalan dan infrastruktur pendukung lainnya;

c. Peningkatan Kapasitas Ekspor Produk Ekraf Bernilai Tambah Tinggi: Ditargetkan di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Bandung untuk mendorong ekspor produk kreatif seperti kriya, *fashion*, desain grafis, film, kuliner, dan lain-lain melalui kegiatan:
   1) Pendampingan Pelaku Ekraf Berpotensi ekspor;
   2) Pengembangan SDM Pelaku Ekonomi Kreatif;
   3) Penguatan 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif;
   4) Destinasi Pariwisata berdaya saing global Sebanyak 5 Destinasi wisata; dan
   5) Investasi di wilayah bertata ruang ekraf (Langkah Keempat).

Perwujudan dari langkah strategis ini adalah meningkatnya kualitas layanan di seluruh destinasi pariwisata, meningkatnya ketersediaan sarana prasarana, terwujudnya daya tarik pariwisata yang terstandarisasi, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dari 88 juta menjadi 152 juta di tahun 2029.

Berbagai asumsi, skenario, intervensi, serta indikasi program dan kegiatan prioritas yang menyasar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 7,95 persen, menjadi asumsi dan landasan penting dalam mem-*breakdown* target laju pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten kota.

Gambar 3.6
Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 7,95 Persen Tahun 2029

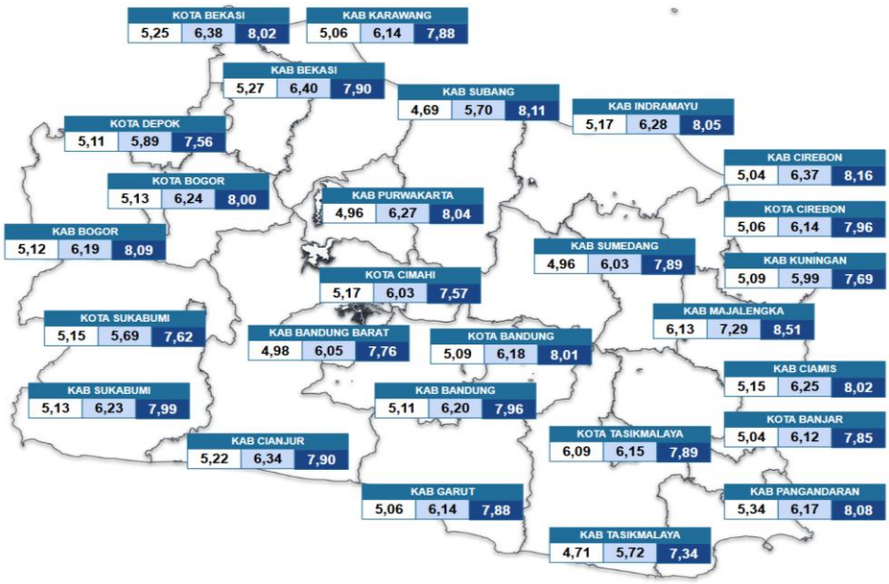

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih optimis pada wilayah-wilayah yang menjadi fokus pengembangan, yaitu kawasan perkotaan, wilayah ekonomi biru, dan pusat-pusat industri. Di kawasan perkotaan, intervensi utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas dan sistem transportasi, serta penyediaan perumahan yang memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, pengembangan wilayah ekonomi biru difokuskan pada peningkatan nilai tambah dari sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang kemudian diperkuat melalui pengembangan industri pengolahan agar mampu menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dan berkelanjutan. Di sisi lain, kawasan industri diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada subsektor strategis seperti kendaraan, makanan dan minuman, serta tekstil dan pakaian jadi, yang menjadi andalan dalam mendorong ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Upaya hilirisasi produk pertanian dan perikanan, khususnya di luar kawasan industri eksisting, juga menjadi strategi penting untuk memperluas basis industri dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Ketercapaian target laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus diiringi dengan kualitas pembangunan yang tercermin dalam ketercapaian target indikator makro daerah.

Di samping itu, Pengangguran di Jawa Barat adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi dan kolaboratif. Sinergi antara pemerintah, industri, pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif. Sehingga dalam mendukung pencapaian target TPT yang diproyeksikan menuju tren yang positif dari 6,75 persen di tahun 2024 menjadi 5,94 – 6,56 persen pada tahun 2029, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun strategi penanganan pengangguran terbuka. Strategi ini mencakup:

1. Reformasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis Penempatan
   a. Pembaruan kurikulum vokasi agar responsif terhadap kebutuhan industri 4.0, teknologi informasi, otomasi, dan manufaktur canggih dengan target penempatan lulusan sesuai bidangnya;
   b. Penguatan kemitraan antara sekolah vokasi/SMK, BLK, dan dunia usaha untuk memastikan *link and match* serta program magang yang efektif;
   c. Peningkatan jumlah dan kualitas BLK di seluruh kabupaten/kota, dengan fokus pada pelatihan berbasis digital dan teknologi;
   d. Pemberian insentif bagi perusahaan yang aktif terlibat dalam pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

2. Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Diversifikasi Sektor
   a. Mendorong investasi di sektor padat karya dan UMKM di luar wilayah industri utama untuk mengurangi disparitas wilayah;
   b. Pengembangan ekonomi kreatif, pertanian modern, dan pariwisata sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru di daerah non-industri;
   c. Fasilitasi akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong semangat berwirausaha, khususnya bagi generasi muda dan NEET.

3. Penguatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Data Pasar Kerja
   a. Pengembangan sistem informasi pasar kerja terintegrasi (*real-time labor market information system*) untuk pemetaan kebutuhan dan potensi tenaga kerja;
   b. Pendataan pencari kerja secara sistematis termasuk dari sektor informal, dengan pemanfaatan aplikasi digital dan kolaborasi lintas instansi.

4. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
   a. Meningkatkan koordinasi ketenagakerjaan provinsi yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas;
   b. Sinkronisasi program pelatihan, penempatan kerja antar dinas serta antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
   c. *Monitoring* dan evaluasi berkala atas seluruh program yang terkait ketenagakerjaan untuk memastikan efektivitas dan menghindari tumpang tindih.

5. Perbaikan Infrastruktur dan Akses Teknologi
   a. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja kedepan;
   b. Peningkatan akses pelatihan digital bagi tenaga kerja usia produktif, terutama di luar kawasan industri;
   c. Penyediaan fasilitas internet dan perangkat pendukung untuk memperluas jangkauan pelatihan daring.
6. Transformasi Budaya Kerja dan Mentalitas Tenaga Kerja
   a. Kampanye perubahan *mindset* dan peningkatan motivasi melalui program *soft skills*, pelatihan disiplin, dan etos kerja;
   b. Penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya pengembangan diri serta kesiapan menghadapi dunia kerja modern yang dimulai sejak bangku sekolah.

7. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Ketenagakerjaan
   a. Pemberantasan praktik pungli dan korupsi dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan kerja;
   b. Penguatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dari praktik ketidakadilan dan diskriminasi;
   c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengawasan ketenagakerjaan agar adaptif terhadap dinamika dunia kerja yang terus berkembang;
   d. Penguatan regulasi dan sistem penyelenggaraan pengawasan serta pelaporan terpusat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan.
8. Pembentukan dan penguatan kelembagaan penanganan pengangguran yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah di Jawa Barat.

Strategi tersebut tidak hanya mendukung penurunan TPT, melainkan memperkuat pasar kerja yang inklusif. Seiring dengan meningkatnya pemerataan kesempatan kerja dan menurunnya jumlah pengangguran, maka akan mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Manusia menjadi jalan bagi masyarakat agar mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Untuk membangun manusia yang berkualitas, dilakukan melalui beberapa langkah strategis diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan

Strategi ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak melalui;

   a. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan (USB dan RKB) di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bandung;

b. Pendidikan STEAM bemuatan lokal Kreatif di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya;
c. Peningkatan pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya.

2. Peningkatan layanan kesehatan

Strategi ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan terhadap kesehatan yang layak melalui;

a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, Kota Cirebon;
b. Peningkatan *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Tasikmalaya;
c. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya.

3. Peningkatan akses standar hidup layak

Strategi ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap peningkatan pendapatan yang layak melalui;

a. Peningkatan, pendampingan dan permodalan usaha di Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, Kota Cirebon;

b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kota Sukabumi.

Tingkat Kemiskinan diharapkan bisa menurun seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa langkah strategis diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan

Strategi ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak melalui;

a. Peningkatan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Depok;
b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan pendampingan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.
b. Peningkatan dan penguatan peran BUMDes di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bogor, Kota Sukabumi.

2. Mengurangi Beban Pengeluaran

Strategi ini memastikan bahwa masyarakat bisa merasa terbantu dalam mengurai beban pengeluarannya. Bantuan beban pengeluaran ini dilakukan dalam bentuk Penerapan Program Kartu Miskin yang diselenggarakan hampir di seluruh daerah Provinsi Jawa Barat,

diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

3. Mengurangi Kantong Kemiskinan

Strategi ini memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan terhadap kesehatan yang layak melalui;

a. Peningkatan, pendampingan dan permodalan usaha di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok;
b. Percepatan *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Karawang dan Kota Bogor.

4. Menguatkan Kelembagaan

Strategi ini dilakukan dengan melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota.

3.3.3 Penahapan Pembangunan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi, maka ditentukan penahapan pembangunan tahunan untuk RPJMD Tahun 2025-2029. Penahapan pembangunan menjelaskan prioritas dan fokus pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kepala daerah. Fokus pembangunan tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tahap I pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Penahapan pembangunan tahunan pada 2 (dua) tahun pertama (2025-2026) berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan peningkatan layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan dasar-dasar pengembangan sumber daya manusia dan kewilayahan. Pada tahun ketiga dan seterusnya dilakukan pengembangan

ekonomi yang bertujuan untuk mencapai peningkatan daya saing daerah dengan meningkatkan produksi pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif industri sehingga tercapai pemantapan daya saing daerah.

Penahapan pembangunan tahunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.7
Tahapan Pembangunan Tahunan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Secara lebih detail penahapan pembangunan diuraikan ke dalam arah kebijakan sebagai acuan pemrograman sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.5
Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Misi Pembangunan	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Fondasi pembangunan	**Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar dan Konektivitas daerah**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan**	**Penguatan Kemampuan Kompetitif Daerah melalui Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Berbasis Lingkungan**	**Pemantapan Daya Saing Daerah**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi untuk mewujudkan Jabar Istimewa	*Fokus pada Penyediaan infrastruktur layanan dasar (jaringan jalan, Pembangunan ruang kelas baru, peningkatan fasilitas Kesehatan, sanitasi, stunting, kemisikinan, dll)*	*Pemerataan akses layanan dasar dan keterhubungan antar wilayah maupun antar komponen pembangunan*	*Pengembangan produktivitas melalui produksi pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta industri yang didukung oleh SDM dan Manajemen Pembangunan yang berkualitas*	*Penguatan kemampuan kompetitif daerah melalui investasi dan kewirausahaan daerah*	*Peningkatan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain melalui produktivitas, inovasi dan kesejahteraan masyarakat*
Mewujudkan SDM Berkarakter Unggul	Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Penguatan sistem layanan sosial pendukung bantuan pendidikan dan kesehatan bagi warga kurang mampu	Pengembangan dukungan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam layanan pendidikan dan kesehatan terutama pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dasar-menengah dan layanan kesehatan berkualitas	Pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat berbasis kebutuhan kompetensi dan masalah kesehatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah
		Intensifikasi penanganan dan pencegahan *stunting* dan kesehatan ibu			
		Peningkatan partisipasi peserta wajib belajar			
	Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum dan peran sekolah asrama/*boarding school* dan pesantren dalam pembentukan karakter pelajar dan pemuda	Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi digital murid sekolah dan tenaga pendidikan dan kesehatan	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok pemuda berbasis budaya dan keagamaan dalam penguatan aspek penerapan unsur budaya dan agama sebagai pembentuk karakter individu dan keluarga di lingkungan permukiman dan lingkungan sekolah	Pengembangan kelompok pemuda berbasis budaya dan agama melalui konektivitas dengan pusat riset dan pendidikan berbasis budaya dan agama di mancanegara
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi	Pemerataan sebaran layanan tenaga pendidikan	Pengembangan perguruan tinggi dan sekolah vokasi	Pengembangan lanjut perguruan tinggi dan	Penguatan promosi dan kerjasama pendidikan

Misi Pembangunan	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Fondasi pembangunan	**Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar dan Konektivitas daerah**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan**	**Penguatan Kemampuan Kompetitif Daerah melalui Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Berbasis Lingkungan**	**Pemantapan Daya Saing Daerah**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	guru dan tenaga kependidikan serta tenaga kesehatan	dan kesehatan berkualitas didukung infrastruktur mobile	berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) sesuai potensi unggulan wilayah	sekolah berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dengan kerjasama industri dan pusat pendidikan unggulan luar daerah	berbasis STEAM dan pelatihan vokasi dengan industri global dan entitas pendidikan tinggi dan pelatihan mancanegara
	Penyiapan program sekolah vokasi dan afiliasi dengan industri dan ekonomi potensial daerah	Pengembangan sekolah vokasi dan balai pelatihan terpadu dan keahlian spesifik			
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lingkungan	Penerapan hasil riset dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan	Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.	Pemasaran hasil produksi daerah dan peningkatan kerjasama luar daerah dalam pengembangan dan pemasaran hasil produksi daerah
	Riset dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lingkungan	Perluasan hasil pengembangan ekonomi kerakyatan dan peluang kerjasama dengan industri besar	Pengembangan konektivitas rantai ekonomi daerah	Diversifikasi produk, riset dan penerapan teknologi, kerjasama peningkatan produktivitas berkelanjutan dengan sektor industri dan ekosistem riset mancanegara	Promosi dan pemasaran produk industri ekonomi daerah dan UMKM lokal ke pasar luar daerah dan luar negeri
	Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal serta deregulasi bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan)	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.		
	Pemetaan potensi ekonomi lokal dan ekonomi inklusif masyarakat yang dapat terafiliasi dengan rantai ekonomi yang lebih luas	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan masyarakat lokal dalam partisipasi penataan dan pengembangan ODTW potensial, industri		

Misi Pembangunan	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Fondasi pembangunan	**Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar dan Konektivitas daerah**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan**	**Penguatan Kemampuan Kompetitif Daerah melalui Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Berbasis Lingkungan**	**Pemantapan Daya Saing Daerah**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi dan industri yang andal (sumber energi listrik konvensional dan EBT, jaringan air baku, jaringan dan sistem pengelolaan air limbah, sistem persampahan daur ulang, sistem drainase terpadu, sistem irigasi pertanian, jaringan jalan pendukung produksi dan distribusi)	rumahan, industri pertanian, industri pengolahan skala besar, dan potensi ekonomi unggulan lainnya		
Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ *stockyard* yang modern terintegrasi).	Pengembangan lanjut dan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ *stockyard* yang modern terintegrasi).	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:	Pembangunan sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi antara kawasan pusat perkembangan ekonomi, pusat wisata, dan kawasan perkotaan sekitar
		Reaktivasi jalur perangkutan barang pada wilayah-wilayah pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan lokal			

Misi Pembangunan	TAHAP I (2025) Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Fondasi pembangunan	TAHAP II (2026) Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar dan Konektivitas daerah	TAHAP III (2027) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan	TAHAP IV (2028) Penguatan Kemampuan Kompetitif Daerah melalui Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Berbasis Lingkungan	TAHAP V (2029) Pemantapan Daya Saing Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan jaringan jalan pendukung konektivitas antar wilayah hingga pelosok	Peningkatan konektivitas Utara-Selatan dan konektivitas desa-kota			
	Penanganan lanjut permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	Dukungan fasilitasi dan pengembangan sistem pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat sektor informal, masyarakat MBR, pekerja industri, aparatur negara, dan nelayan	Penyediaan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.	Peningkatan penyediaan akses rumah tangga terhadap hunian layak di pusat-pusat ekonomi non perkotaan berbasis hunian terbatas yang ramah lingkungan dan memanfaatkan EBT
	Penyediaan sistem jaringan sanitasi dan air bersih hingga pelosok daerah sesuai dengan karakteristik wilayah	Percepatan penyediaan infrastruktur sanitasi (air minum/air bersih, persampahan, limbah, drainase) pada permukiman perkotaan, permukiman pusat pertumbuhan perdesaan, dan pelosok perdesaan	Peningkatan dan pemerataan layanan jaringan infrastruktur dasar permukiman hingga pelosok wilayah Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.	Pengembangan pengelolaan jaringan infrastruktur dasar permukiman melalui kerjasama swasta dan pemberdayaan masyarakat dalam proses *circular economy* di permukiman	Pengembangan infrastruktur lanjutan dengan minimum standar ketahanan perubahan iklim dan kebencanaan
Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*	Pengembangan sistem meritokrasi dan identifikasi kebutuhan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas SDM berjenjang dan penyiapan spesifikasi keahlian unggulan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri	Penerapan TIK dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan komunikasi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan pemerintahan	Kerjasama perangkat daerah, organisasi pemerintahan, dan SDM unggulan dengan perguruan tinggi, entitas riset, unit

Misi Pembangunan	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
	Penyiapan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Fondasi pembangunan	Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar dan Konektivitas daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan	Penguatan Kemampuan Kompetitif Daerah melalui Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Berbasis Lingkungan	Pemantapan Daya Saing Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelatihan dan pengembangan dasar-dasar pelaksanaan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berbasis clean and good governance	Pengembangan sistem birokrasi dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis kinerja dan target pelayanan publik	(DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global		pemerintahan lokal mancanegara
	Integrasi dan penataan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep satu data dan satu sistem informasi bersama				

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

3.4 Lokus Pembangunan

Lokus Pembangunan disajikan berdasarkan kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang.

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, meliputi:

1. Pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan (WP) dengan ketetapan kawasan yang dikendalikan perkembangannya, kawasan yang didorong perkembangannya, kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
2. Pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
2. Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung;
3. Pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Nasional;
4. Pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
5. Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
6. Pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) pertahanan dan keamanan.

Strategi Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
   a. Menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur- Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
   b. Meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
   c. Meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.

2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
   a. Meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
   b. Mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
   b. Meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
   c. Meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
   d. Menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan

e. Pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.

3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi meliputi:
   a. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya-Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
   b. Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
   c. Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
   d. Mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
   e. Mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
   f. Mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
   g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
   h. Mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;

i. Mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
j. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
k. Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.

4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
   a. Meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
   b. Membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
   c. Meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
   d. Mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
   e. Mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung Hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   f. Meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
   g. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
   h. Mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
   i. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
   j. Meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30 persen dari luas DAS;

k. Mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
l. Mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
   a. Mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
   b. Mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
   c. Melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
   d. Merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
   e. Memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
   f. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
   g. Pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30 persen dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.
6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
   a. Merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;

b. Mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
c. Pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
   Mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
d. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
   a. Meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
   b. Menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
   c. Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
   d. Mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek-Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan meliputi:
   a. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
   b. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan

sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

c. Strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan setiap Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 3.8
Arah Kebijakan per Wilayah Pengembangan

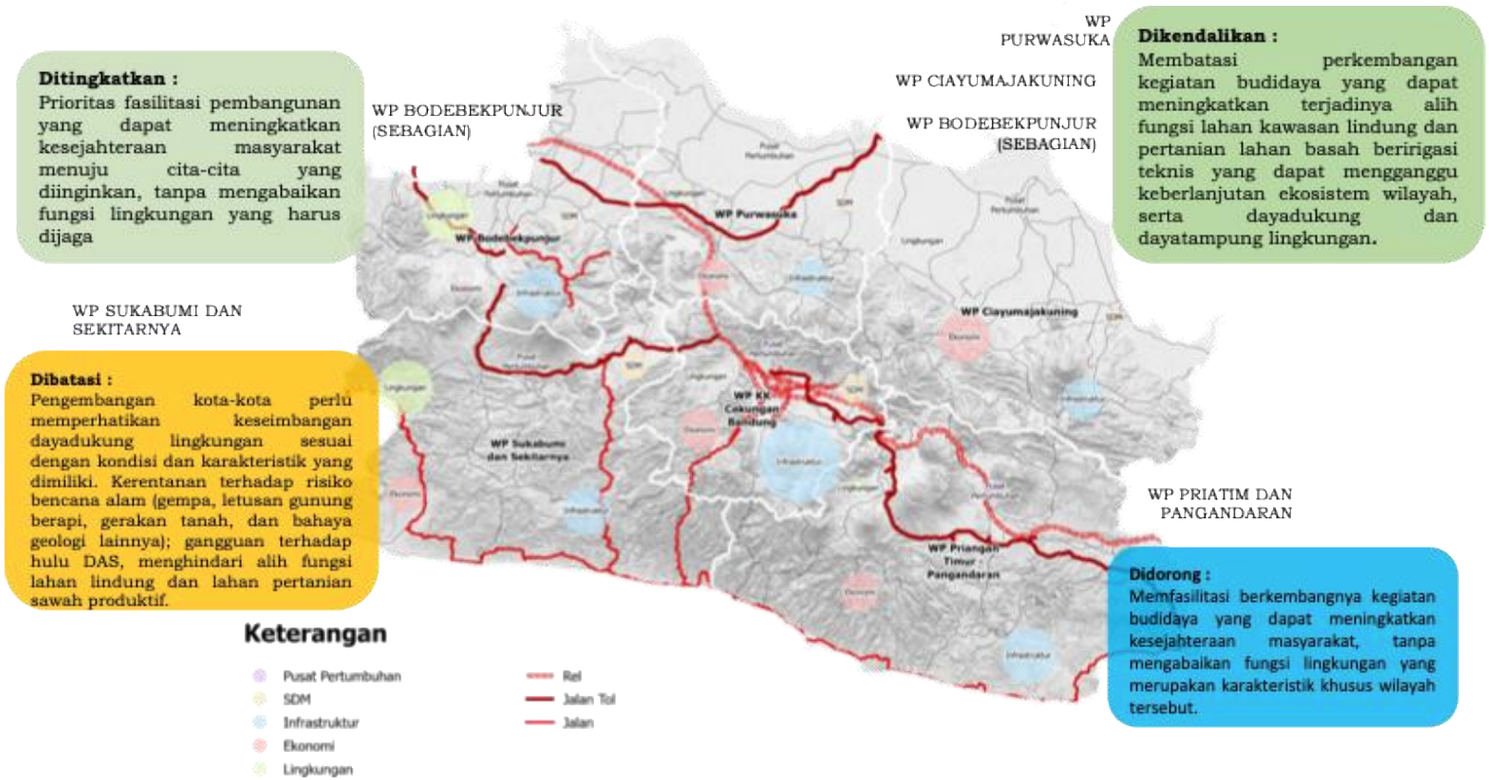

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Tabel 3.6
Arah Kebijakan dan *Highlight* Intervensi Pembangunan Kewilayahan

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
Arah Kebijakan WP Bodebekpunjur			
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di WP Bodebekpunjur diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah serta pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pusat pertumbuhan baru yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi digital, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.	Peningkatan 6A Pariwisata pada hot-spot pariwisata, antara lain: Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunung Padang	Kab. Bogor
SDM	Pengembangan SDM berdaya saing global (talenta global) serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di WP Bodebekpunjur diarahkan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan kerja, meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan sistem perlindungan sosial.	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kota Bogor (PHTC).	Kota Bogor
		Pengembangan World Class Research University Berbasis Potensi Wilayah pada Institut Pertanian Bogor.	Kab. Bogor
		Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. III Salak dr, H. Sadjiman (Kota Bogor)	Kota Bogor
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKL; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi, efisien, merata, serta adaptif terhadap bencana.	Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan	Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Bogor
		Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi	Kab. Bogor, Kota Bogor
		Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road	Kab. Bogor, Kota Bogor
		Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung)	Kab. Bogor
		Pembangunan Jalan Puncak II	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
		Pembangunan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II	Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bekasi,
		Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bekasi dan Cikarang	Kab. Bekasi, Kota Bekasi
		Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bogor	Kab. Bogor, Kota Bogor
		Pembangunan TPST Regional Bekasi Raya	Kab. Bekasi, Kota Bekasi
		Pembangunan TPST Regional Bogor-Sukabumi	Kab. Bogor, Kota Bogor
		Pengembangan SPAM Bogor Raya	Kab. Bogor, Kota Bogor
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur
		Urban Renewal pada kota kota wisata, antara lain: Bogor	Kab. Bogor

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan.	Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur
		Pengembangan KEK Lido	Kab. Bogor
Lingkungan	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKL; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi, efisien, merata, serta adaptif terhadap bencana.	Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.	Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.	Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur
		Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke - Pesanggrahan, DAS Cimandiri, DAS Cibuni.	Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke - Pesanggrahan, DAS Cimandiri.	Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur
		Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi. (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango)	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
		Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem. (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango)	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
		Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan. (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango)	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
		Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi. (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango)	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik. (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango)	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
		Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango)	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
		Penguatan pengelolaan hutan lestari (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango)	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
		Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango)	Kab. Bogor, Kab. Cianjur
Arah Kebijakan WP Purwasuka			
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas PKN, PKW dan PKL; mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; dan mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.		

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mengembangkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan pendidikan.	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Karawang (PHTC).	Kab. Karawang
		Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RSAU dr. Hoedijono (Kab. Subang).	Kab. Subang
		Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang.	Kab. Karawang
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana serta membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Karawang dan Cikarang (PHTC).	Kab. Karawang
		Pengembangan SPAM Regional Cikarang-Karawang-Purwakarta.	Kab. Karawang, Kab. Purwakarta
		Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban.	Kab. Subang
		Pembangunan jalur KA akses Pelabuhan Patimban.	Kab. Subang
		Pembangunan Pelabuhan Patimban dan Patimban Industrial Estate.	Kab. Subang
		Pembangunan TPST Regional Karawang-Purwakarta	Kab. Karawang, Kab. Purawakarta
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
		Pembangunan PLTS Apung Jatiluhur	Kab. Purwakarta
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kalli Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, serta Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, Waduk Darma, Waduk Sadawarna, Waduk Cipancuh, Situ Lembang, Situ Patenggang, Situ Cisanti, Situ Cipanunjang-Cileunca	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.	Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK Phonska 3 dan 4 di Cikampek	Kab. Karawang
		Pengembangan koridor industri Bogor–Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang–Patimban (sektor industri prioritas: industri makanan dan minuman, semikonduktor, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan industri mesin dan perlengkapan)	Kab Subang, Kab Karawang Kab. Purwakarta
		Pembangunan Pelabuhan Patimban dan Patimban Industrial Estate	Kab. Subang
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
		Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
		Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
		Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
		Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Jatiluhur, D.I. Rentang, D. I. Cihea, D. I. Cikeusik, D. I. Seuseupan, D. I. Cipanas II, D. I. Cipancuh, D. I. Cileuleuy, D. I. Leuwinangka	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
		Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean	Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang
Arah Kebijakan WP Ciayumajakuning			
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif; mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan; pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah.	Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pengembangan kota agropolitan Cirebon.	Kota Cirebon
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera; membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; mengembangkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya; serta mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan pendidikan.	Penyediaan dan peningkatan Layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Gunung Jati Cirebon (PHTC).	Kota Cirebon
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur strategis yang terintegrasi, efisien,	Pemenuhan pelayanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab.

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
	merata serta adaptif terhadap bencana serta membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.		Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cirebon (PHTC).	Kab. Cirebon, Kota Cirebon
		Pembangunan TPST Regional Cirebon Raya.	Kab. Cirebon, Kota Cirebon
		Pengernbangan SPAM Rcgional Cirebon Raya.	Kab. Cirebon, Kota Cirebon
		Pembangunan pipa gas bumi Cirebon - Semarang.	Kab. Cirebon, Kota Cirebon
		Pengembangan Kertajati Aerocity.	Kab. Majalengka
		Perencanaan dan Persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta - Surabaya	Kab. Majalengka, Kab. Cirebon
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan sektor dan komoditas unggulan; mendorong agribisnis; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.	Pengembangan koridor industri Cirebon - Kertajati (sektor industri prioritas: industri dirgantara dan industri mesin dan perlengkapan).	Kota Cirebon, Kab. Cirebon. Kab. Majalengka
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu raw sugar, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa dan bioplastik.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu).	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu).	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu)	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu).	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Eretan dan PPN Kejawanan.	Kab. Indramayu
		Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan kawasan pesisir di Indramayu-Cirebon.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Cirebon
		Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
		Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Indramayu-Cirebon	Kab. Indramayu, Kab. Cirebon
		Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan; mengembangkan wisata budaya, religi dan alam; mendorong pengembangan hutan *mangrove*, rumput laut dan perikanan tambak; mengendalikan perikanan tangkap; serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipanger, DAS Kali Kesunean.	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon
Arah Kebijakan WP Priangan Timur - Pangandaran			
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; serta mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.	Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	Kota Tasikmalaya
		Penguatan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer di Pameungpeuk, serta penguatan kawasan Pameungpeuk sebagai pertahanan dan keamanan matra udara	Kab. Garut
		Pengembangan Kota Agropolitan Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
		Peningkatan 6A pariwisata di Santolo, Leuweung Sancang, dan Bojonglarang Jayanti	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera serta mengembangkan sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Kota Tasikmalaya
		Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr.Soekardjo Tasikmalaya dan di RSUD Pameungpeuk (PHTC)	Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya
		Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya
		Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya
		Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya
		Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata dalam mendukung kegiatan pariwisata dan adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.	Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau	Kota Tasikmalaya
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Kota Tasikmalaya
		Pembangunan rumah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Tasikmalaya (PHTC)	Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya
		Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
		Pembangunan jalur ganda KA Lintas Bandung-Cicalengka-Tasikmalaya-Kroya	Kota Tasikmalaya
		Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya-Ciamis	Kota Tasikmalaya
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cikunten, D. I. Cikunten II, D. I. Manganti, D. I. Bantarheulang, D. I. Lakbok Utara	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banjar	Kota Banjar
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Ciwulan, DAS Citanduy, DAS Cijulang, Situ Bagendit, Situ Gede	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Pembangunan infrastruktur PLTA PS Matenggeng	Kab. Ciamis
		Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan	Kab. Garut, Kab. Cianjur

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
		Peningkatan/pembangunan jalan ruas Garut-Cikajang-Pameungpeuk, Cidaun-Ciwidey-Soreang, Sindangbarang-Sukanegara-Cianjur, Tasikmalaya-Cikatomas-Cikalong, dan Jalan Lintas Selatan Jawa Barat	
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; meningkatkan kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan); mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan kawasan pariwisata terintegrasi; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi (Kab. Garut)	Kab. Garut
		Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: pertanian hortikultura dan peternakan	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Ciwulan, DAS Citanduy, DAS Cijulang, DAS Cikandang, DAS Cimedang, DAS Cilangla	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
		Peningkatan ketahanan bencana	Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
Arah Kebijakan WP Sukabumi dan Sekitarnya			
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; dan mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.	Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang terpadu mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pengembangan kota agropolitan sukabumi	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi
		Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata, antara lain: Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunungpadang, Bojonglarang Jayanti	Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera serta mengembangkan sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD R. Syamsudin, SH Sukabumi (PHTC)	Kota Sukabumi
		Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah	Kab. Cianjur
		Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital	Kab. Cianjur
		Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	Kab. Cianjur
		Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	Kab. Cianjur
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata dalam mendukung kegiatan pariwisata dan adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi (PHTC)	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi
		Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pembangunan Jalan Puncak II	Kab. Cianjur
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cipamingkis dan D. I. Ciletuh	Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Cimandiri	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pembangunan infrastruktur PLTP Cisolok-Cisukarame	Kab. Sukabumi
		Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan	Kab. Cianjur

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
		Peningkatan/pembangunan jalan ruas Cidaun-Ciwidey-Soreang, Sindangbarang-Sukanegara-Cianjur dan Jalan Lintas Selatan Jawa Barat	Kab. Cianjur
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; meningkatkan kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan); mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan kawasan pariwisata terintegrasi; mengembangkan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti (Kab. Sukabumi)	Kab. Sukabumi
		Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembanga varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	
		Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: pertanian hortikultura dan peternakan	Kab. Cianjur
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Cimandiri, DAS Cibuni	Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur
		Peningkatan ketahanan bencana	Kab. Cianjur
		Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragam ekosistem (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Pengurangan status keterancanaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
		Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab.Sukabumi
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Penguatan pengelolaan hutan lestari (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana (TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, Geopark Ciletuh)	Kab. Sukabumi
		Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Sukabumi	Kota Sukabumi
Arah Kebijakan WP Cekungan Bandung			
Pusat Pertumbuhan	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL; pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; meningkatkan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik; mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.	Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Bandung	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi
		Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu (WM Bandung, Kawasan Perkotaan Perkotaan Jatinangor)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Penyusunan metropolitan statistical area (WM Bandung)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Penataan kawasan strategis dan penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan terpadu di Wilayah Metropolitan Bandung (WM Bandung, Kawasan Perkotaan Perkotaan Jatinangor)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
SDM	Pengembangan SDM diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera; membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; meningkatkan pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya; serta	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan (WM Bandung, Kawasan Perkotaan Perkotaan Jatinangor)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Pengembangan World Class Research University Berbasis Potensi Wilayah pada Institut Teknologi Bandung	Kota Bandung
		Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di WM Bandung (PHTC)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
	mendorong kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan.		Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. II Dustira (Kota Cimahi), Lembaga Farmasi Puskesad (Kota Bandung), Lembaga Biologi Vaksin Puskesad (Kota Bandung)	Kota Bandung, Kota Cimahi
		Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
Infrastruktur	Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.	Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau (WM Bandung, Kawasan Perkotaan Perkotaan Jatinangor)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan (WM Bandung, Kawasan Perkotaan Perkotaan Jatinangor)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Perencanaan dan persiapan pembangunan LRT Bandung	Kota Bandung, Kab. Bandung
		Pembangunan BRT Cekungan Bandung	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung	Kota Bandung
		Pembangunan TPST Regional Bandung Raya	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Bandung, termasuk penerapan SIH3 dan FEWS	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Bandung	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Bandung (PHTC)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
		Pembangunan SPAM Regional Bandung	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Elektrifikasi jalur KA Komuter Bandung Raya Segmen Cicalengka-Padalarang	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Cicalengka-Tasikmalaya-Kroya	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Perencanaan pembangunan pipa gas bumi Cikampek-Bandung	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang
		Urban Renewal pada kota-kota wisata, antara lain: Lembang dan Ciwidey	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Jatiluhur, D. I. Rentang, D. I. Cihea, D. I. Cikeusik, D. I. Cipanas II, D. I. Cipancuh, D. I. Cileuleuy, D. I. Leuwinangka	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Pembangunan infrastruktur PLTA PS Upper Cisokan	Kab. Bandung barat
		Pembangunan infrastruktur PLTP Patuha	Kab. Bandung
		Pembangunan infrastruktur PLTP Wayang-Windu	Kab.Bandung
Ekonomi	Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan;	Pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri semikonduktor, industri makanan dan minum, serta industri tekstil dan alas kaki)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang

Fokus	Arah kebijakan	*Highlight* Intervensi	Lokasi
	mengembangkan kegiatan perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi, industri non polutif dan pariwisata; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Geowisata dan Artefak Gua Pawon (Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat), serta revitalisasi kawasan purbakala Situs Gua Pawon	Kab. Bandung Barat
		Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata, antara lain: Tangkubanparahu dan Rancaupas-Pangalengan	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat
		Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
Lingkungan	Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan; mengendalikan pengembangan kegiatan kawasan perkotaan; mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal; meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan; serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean	Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Sumedang
		Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Cimahi dan Kota Bandung	Kota Cimahi, Kota Bandung

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

3.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Daerah adalah program yang memiliki dampak besar, menyentuh kepentingan publik, dan seringkali bersifat lintas urusan. Program prioritas memiliki tujuan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara cepat. Program-program ini dapat bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki urgensi tinggi karena berdampak luas ataupun berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

3.5.1 Program Prioritas sesuai Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Program Prioritas Daerah didasarkan pada agenda pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD Tahun 2025-2029. Program prioritas daerah ditetapkan dengan mengacu pada hasil penjabaran strategi sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan *(visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan)* pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Provinsi Jawa Barat menetapkan 25 program prioritas daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Program Prioritas Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
   a. Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Program ini menjadi upaya strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan fasilitas, distribusi tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi, serta penerapan standar mutu layanan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai wilayah agar menghadirkan layanan kesehatan yang merata, bermutu, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan.
   b. Program Penangan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. Program ini merupakan upaya komprehensif untuk menekan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang menjadi beban kesehatan masyarakat melalui penguatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta didukung oleh sistem surveilans, deteksi dini, imunisasi, dan jejaring layanan

kesehatan yang terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyakit. Dengan dukungan edukasi, perubahan perilaku hidup sehat, dan pengendalian faktor risiko, sehingga dapat mengendalikan laju penyebaran penyakit menular sekaligus menekan prevalensi penyakit tidak menular agar tercipta masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas.

c. Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional. Program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan praktik pengobatan tradisional dapat berkembang secara aman, berkualitas, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan modern, melalui pembinaan, regulasi, standarisasi, serta penguatan riset dan pemanfaatan tanaman obat, sehingga dapat menjaga keamanan, khasiat, dan mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, program ini juga berperan penting dalam melestarikan kearifan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya industri jamu dan produk herbal yang berdaya saing, sehingga memberikan manfaat ganda bagi kesehatan masyarakat.
d. Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* serta Peningkatan Gizi pada Kelompok dalam Siklus Hidup. Program ini merupakan langkah komprehensif untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, produktif melalui percepatan penurunan prevalensi stunting dan pencegahan stunting, peningkatan status gizi masyarakat secara holistik dan berkesinambungan yang menyasar seluruh tahapan siklus hidup, terutama kelompok rentan sehingga dibutuhkan sinergi lintas sektor dan penguatan peran layanan kesehatan dasar serta masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
e. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama. Program ini merupakan strategi penting untuk memperkuat kohesi sosial, melestarikan identitas budaya bangsa, dan membangun kehidupan beragama yang harmonis melalui pelestarian kearifan lokal, penguatan karakter, ruang interaksi sosial yang sehat, serta pengembangan moderasi beragama yang bertujuan

untuk membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan berdaya tahan terhadap tantangan globalisasi maupun potensi konflik.

f. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkuat kepastian hukum sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan melalui penguatan aparat penegak hukum, deteksi dini potensi konflik, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkokoh ketahanan daerah, dan membangun kepercayaan masyarakat agar tercipta stabilitas wilayah yang mendukung terwujudnya pembangunan yang adil dan berkesinambungan.
g. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi. Program ini menjadi kunci untuk membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta berakar pada nilai budaya lokal melalui integrasi kearifan lokal, penguatan penguasaan IPTEK, peningkatan kualitas pendidik, penyediaan sarana prasarana, dan pemberian beasiswa yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dalam menghadapi tantangan global sekaligus menjaga jati diri bangsa.
h. Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat. Program ini menjadi kunci untuk memperkuat fondasi sosial pembangunan melalui penguatan peran keluarga, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pembinaan generasi muda didukung kolaborasi lintas sektor, program ini akan mewujudkan keluarga yang tangguh dan sejahtera, perempuan yang berdaya dan terlindungi haknya, serta generasi penerus yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan.

2. Program Prioritas Misi 2 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif
   a. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan

berkelanjutan melalui penguatan kapasitas industri, integrasi rantai pasok, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Barat yang sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pusat industri pengolahan berbasis potensi lokal di tingkat nasional maupun global.

b. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Program ini menjadi strategi untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui integrasi antara produksi, distribusi, dan pemasaran didukung kolaborasi multipihak, digitalisasi perdagangan, pengembangan infrastruktur logistik, serta promosi dagang internasional, sehingga meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dan memperluas akses pasar.
c. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Program ini mendukung ketahanan pangan menjadi strategi penting dalam memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan produktivitas melalui pembangunan sistem pertanian terpadu dari hulu hingga hilir didukung oleh penerapan teknologi modern, integrasi rantai pasok, penguatan kelembagaan, serta praktik pertanian berkelanjutan.
d. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan. Program ini menjadi upaya strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan kelautan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah produk dengan mendorong akses permodalan, teknologi, kelembagaan, serta kemitraan yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat rantai nilai dan pemasaran hasil.
e. Program Peningkatan dan Pemerataan Investasi. Program ini menjadi upaya strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan sebaran investasi, serta penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan fokus pada penyederhanaan regulasi, penguatan infrastruktur, fasilitasi kemitraan, serta promosi investasi, sehingga mampu meningkatkan

arus investasi, memperluas lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mengoptimalkan potensi lokal.

f. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberdayaan Kewirausahaan Daerah. Program ini menjadi upaya dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperkuat peran wirausaha lokal sebagai penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, serta pemberdayaan kewirausahaan dengan dukungan pendampingan, permodalan, dan jejaring pasar, sehingga mampu menekan angka pengangguran, memperluas kesempatan kerja, dan melahirkan wirausaha mandiri.
g. Program Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Restrukturisasi dan Penyehatan BUMD. Program ini menjadi upaya strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengendalikan inflasi, dan memperkuat daya tahan fiskal melalui optimalisasi kebijakan ekonomi, penguatan koordinasi fiskal dan moneter, serta peningkatan kinerja BUMD dengan tata kelola yang lebih transparan, adaptif, dan berdaya saing.
h. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan. Program ini menjadi upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan destinasi wisata berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital.

3. Program Prioritas Misi 3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin Dan Kaya
   a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Program ini menjadi upaya strategis dalam menciptakan kota yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar, pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur, penerapan prinsip ramah lingkungan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

b. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan. Program ini menjadi upaya strategis untuk memperkuat kemandirian dan daya saing desa melalui pemanfaatan potensi lokal, penguatan nilai budaya, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian tradisi, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sehingga mampu mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, berkarakter, serta berwawasan lingkungan.
c. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim. Program ini menjadi strategi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, energi, dan ketahanan iklim melalui pengendalian pencemaran, pengembangan energi terbarukan, serta integrasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan pembangunan.
d. Program Pengurangan Risiko Bencana. Program ini menjadi upaya strategis dalam membangun kesiapsiagaan, memperkuat mitigasi, serta meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dan wilayah terhadap berbagai potensi bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh, penerapan tata ruang berbasis mitigasi, serta pelibatan aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, agar mampu menekan kerugian sosial-ekonomi dan lingkungan akibat bencana.
e. Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (Lansia dan Penyandang Disabilitas). Program ini menjadi komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus memastikan hak-hak dasar masyarakat miskin, dan kelompok rentan termasuk lansia dan penyandang disabilitas terpenuhi secara adil dan berkelanjutan melalui peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial yang inklusif, serta sinergi lintas sektor dengan basis data terpadu.

4. Program Prioritas Misi 4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*

a. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah. Program ini menjadi upaya strategis untuk memperkuat kapasitas IPTEK sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan melalui penguatan ekosistem riset, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan dukungan terhadap inovasi berbasis potensi lokal, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi dan sosial.
b. Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan. Program ini menjadi upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan, dan akuntabel dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama melalui penguatan mekanisme partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi *pentahelix* yang mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berkelanjutan.
c. Program Transformasi Birokrasi Berbasis Digital. Program ini menjadi upaya strategis untuk menciptakan birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem pemerintahan digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.
d. Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional. Program ini menjadi upaya strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel, sekaligus memperluas jejaring kolaborasi lintas wilayah maupun global melalui penguatan integritas aparatur, keterbukaan informasi, serta diplomasi daerah di berbagai bidang, agar mampu meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Untuk mendukung program prioritas daerah, selanjutnya disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk 9 (sembilan) Langkah

Membangun Jabar (9 *Lengkah Ngawangun Jabar*) yang sekaligus merupakan program unggulan kepala daerah sebagai berikut:

1. LANGKAH PERTAMA

Langkah Pertama yaitu **Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan**, dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mulus dan terkoneksi dari jalan nasional hingga jalan desa (*jalan leucir*), pembangunan rumah rakyat miskin, pemenuhan akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani jaringan listrik, penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, untuk mewujudkan Jabar ODF/BABS (*Open Defecation Free*/Bebas Buang Air Besar Sembarangan), serta penataan saluran air dan drainase dalam rangka pencegahan banjir.

2. LANGKAH KEDUA

Langkah Kedua yaitu **Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di Seluruh Wilayah Pertanian dan Ekosistem Pertanian Organik serta pengembangan benih dan bibit unggul melalui perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan bendung lapang, pembangunan cekdam/embung dan pompanisasi dengan tenaga surya.**

Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di Seluruh Wilayah Pertanian, dilaksanakan dengan melalui—perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan bendung lapang, pembangunan cekdam/embung dan pompanisasi dengan tenaga surya. Langkah Kedua juga mendorong terciptanya **Ekosistem Pertanian Organik serta pengembangan benih dan bibit unggul** untuk memperkuat Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional. Langkah ini dilaksanakan melalui konektivitas pertanian berbasis kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta penggunaan alat pertanian modern dan tepat guna.

3. LANGKAH KETIGA

Langkah Ketiga yaitu **Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan**

ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.

Pengembangan Pendidikan Berkarakter dengan kurikulum pancawaluya disertai penguatan pendidikan budi pekerti dan agama yang didukung ketercukupan ruang kelas tingkat SD, SMP, SMA/SMK, serta pesantren dan madrasah guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan; pembentukan 10 (sepuluh) sekolah kejuruan unggulan sistem *boarding* berkapasitas 1.000 siswa per sekolah dengan kurikulum *link and match* dunia kerja, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk membentuk manager-manager baru di Jawa Barat; serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa Jawa Barat berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.

Pembentukan 10 (sepuluh) sekolah kejuruan unggulan sistem *boarding* diwujudkan melalui pembangunan SMK istimewa di kawasan industri bekerja sama dengan dunia industri dan usaha untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai serta pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi yang salah satunya melalui beasiswa di perguruan tinggi dan politeknik berorientasi terapan. Program ini didampingi dengan pelatihan kewirausahaan dan penempatan kerja, untuk memastikan lulusan mampu menjadi manajer baik dalam usaha mandiri maupun perusahaan berskala nasional dan global

Agenda pembangunan bidang pendidikan ini mencakup tiga fokus utama, yaitu: pengembangan pendidikan berkarakter, perluasan akses layanan pendidikan, dan penguatan akses lulusan ke dunia kerja. Pengembangan pendidikan berkarakter mencakup penerapan kurikulum berbasis keterampilan teknis lokal, vokasi ekologi, gerakan pembelajaran berbasis nilai pancawaluya, serta pelatihan integritas dan kedisiplinan siswa.

Program perluasan akses layanan pendidikan dilakukan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) untuk siswa SMA/SMK/SLB dan santri, serta beasiswa lanjutan bagi lulusan berprestasi

ke jenjang pendidikan tinggi berorientasi terapan. Program ini juga meliputi penambahan ruang kelas baru dan pembangunan toilet bagi sekolah jenjang menengah yang membutuhkan, guna meningkatkan kenyamanan dan kelayakan proses belajar mengajar.

Dari aspek pemerataan, pembangunan sekolah baru diprioritaskan di 14 (empat belas) kecamatan yang belum memiliki sarana pendidikan jenjang SMA. Pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk usia sekolah di setiap wilayah secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan akses pendidikan di daerah yang masih belum terjangkau.

4. LANGKAH KEEMPAT

Langkah Keempat yaitu **Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan**.

Pengembangan Lapangan Kerja Baru pada sektor industri, pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui kemudahan perizinan, penyiapan tenaga kerja terampil berbasis penempatan, penguatan *link and match* industri besar dan industri kecil dan menengah (IKM). Langkah ini didukung juga dengan pengembangan wirausaha muda di berbagai bidang, termasuk *start-up*.

Upaya pengembangan lapangan kerja baru ini meliputi dorongan terhadap investasi di sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Pada sektor industri, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri, menciptakan iklim kemitraan industri, serta mengembangkan ekosistem perwilayahan industri. Fokus pembangunan industri meliputi:

- Pemerataan dan pengembangan wilayah industri unggulan berdasarkan potensi lokal melalui pemetaan sektoral, peningkatan kawasan industri tematik, dan penguatan sentra IKM yang saling terintegrasi.
- Peningkatan kualitas industri berfokus pada peningkatan mutu bahan baku, pengembangan kapasitas SDM industri, adopsi teknologi industri ramah lingkungan, serta memperluas akses pasar bagi produk dalam negeri.

- Meningkatkan Kemudahan Berusaha Sektor Industri dengan perbaikan layanan perizinan dan dokumen usaha industri secara digital, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat investasi industri dan menjamin kenyamanan berusaha.

Pada sektor industri, pembangunan diarahkan untuk memperkuat rantai nilai tambah, menciptakan keterkaitan antara Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan industri besar, serta mengembangkan sentra-sentra IKM unggulan.

Agenda pembangunan ini juga menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai prioritas, dengan fokus pada pengembangan pendidikan vokasi di jenjang SMK, Diploma, dan Sarjana yang diarahkan pada penempatan kerja dan penciptaan wirausaha baru.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, implementasi pembangunan bidang investasi difokuskan pada:

- Penetapan dan operasionalisasi peraturan daerah yang memberikan kemudahan investasi;
- Pengembangan sarana dan prasarana wilayah guna meningkatkan kesiapan ruang investasi dan efisiensi distribusi barang serta jasa;
- Penciptaan ekosistem bisnis yang ramah dan berdaya saing tinggi.

Pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, melalui:

- Standarisasi layanan jasa dan *amenitas* wisata; dan
- Pengembangan destinasi unggulan dengan melengkapi elemen atraksi buatan maupun budaya, aksesibilitas, paket wisata, aktivitas wisatawan, dan layanan pendukung.

Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada sektor-sektor unggulan Jawa Barat, seperti *fashion*, gim, kriya, dan kuliner. Penguatan ekonomi kreatif dilakukan melalui:

1. Peningkatan akses pembelajaran digital untuk pelaku kreatif;
2. Pengembangan platform industri kreatif;
3. Penguatan basis data dan jaringan riset produk kreatif;
4. Perluasan akses pemasaran produk;
5. Aktivasi dan optimalisasi pusat kreasi;

6. Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

5. LANGKAH KELIMA

Langkah Kelima yaitu **Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus serta pemberiaan beasiswa dokter spesialis sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat**.

Penambahan layanan khusus dimaksud meliputi 10 (sepuluh) layanan prioritas diantaranya adalah Stroke, Kanker, Jantung, Penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, Uronefrologi (ginjal dan saluran kemih), Respirasi (sistem pernafasan), Diabetes Militus dan Gastrohepatologi (pencernaan dan hati). Layanan prioritas ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Provinsi Jawa Barat dalam penanganan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan pula upaya peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan dukungan pada tatanan operasional termasuk penyediaan *ambulance* ICU dan *ambulance transport*, program dokter desa, pengembangan puskesmas rawat inap terutama di wilayah perbatasan provinsi, serta pengembangan layanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, selain pemenuhan terhadap infrastruktur kesehatan dan peningkatan pelayanan, secara beriringan perlu dilakukan pemenuhan dan pemerataan terhadap ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki strategi prioritas untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, khususnya dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Program beasiswa ini direncanakan dalam beberapa siklus sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

6. LANGKAH KEENAM

Langkah keenam yaitu **Penanganan *stunting* dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan**. Penanganan *stunting* dan gizi buruk dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan asupan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi

kepada ibu hamil, ibu menyusui (ASI Eksklusif), dan balita. Langkah ini sejalan dengan program prioritas nasional pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, terdapat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yaitu Makanan Bergizi Gratis.

Pengembangan Industri Pengobatan berbasis kearifan lingkungan, peningkatan layanan kesehatan tradisional yang didukung dengan pengembangan industri obat-obat tradisional sebagai alternatif pengobatan.

7. LANGKAH KETUJUH

Langkah ketujuh yaitu **Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan**. Pemulihan kondisi lingkungan didukung oleh pembangunan infrastruktur rendah emisi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global. Langkah ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha.

8. LANGKAH KEDELAPAN

Langkah kedelapan yaitu **Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)** dan pengolahan sampah menjadi energi lainnya. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri dilaksanakan secara terintegrasi sampai dengan tingkat Rumah Tangga (RT) yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dimulai dari hulu hingga ke hilir. Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan melalui upaya lainnya seperti daur ulang, 3R, dan pengolahan sampah menjadi energi. Dalam hal pengolahan sampah diarahkan untuk menjadi energi seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF), *Waste to Electricity* (WtE), *Waste to Hydrogen*, dan teknologi lainnya

9. LANGKAH KESEMBILAN

Langkah Kesembilan yaitu **Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.** Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, serta guru agama dan guru ngaji guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui kolaborasi antar pemerintahan daerah sebagai bentuk perwujudan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan. Transformasi birokrasi berdampak tercermin dalam karakter birokrasi yang jujur, bersih, dan tulus melayani masyarakat.

Program Prioritas Daerah dan 9 (sembilan) Langkah Membangun Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Program Prioritas Daerah dan 9 Langkah Membangun Jawa Barat

No	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat
1.	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	**LANGKAH KELIMA:** Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat. **LANGKAH KEENAM:** Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
2.	Program Penangan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	
3.	Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional	
4.	Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup	
5.	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	-
6.	Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-
7.	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	**LANGKAH KETIGA:** Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.

No	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat
8.	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	-
9.	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	-
10.	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	-
11.	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	**LANGKAH KEDUA:** Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di Seluruh Wilayah Pertanian **dan Ekosistem Pertanian Organik serta pengembangan benih dan bibit unggul** melalui perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan bendung lapang, pembangunan cekdam/embung dan pompanisasi dengan tenaga surya **LANGKAH KEENAM:** Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui **penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi** di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.
12.	Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	-
13.	Program Peningkatan dan pemerataan investasi	**LANGKAH KETIGA:** Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem *boarding*, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum *link and match* dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat. **LANGKAH KEEMPAT:** Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan
14.	Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	
15.	Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Penyehatan BUMD	-
16.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	**LANGKAH KEEMPAT:** Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan
17.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	**LANGKAH PERTAMA:** Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (*Open Defecation Free*/bebas buang air besar sembarangan) serta penataan saluran air dan drainase dalam rangka pencegahan banjir.

No	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat
18.	Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	**LANGKAH KESEMBILAN:** Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta **Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan** dan transformasi birokrasi berdampak.
19.	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	**LANGKAH KETUJUH:** Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan. **LANGKAH KEDELAPAN:** Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
20.	Program Pengurangan Risiko Bencana	-
21.	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	-
22.	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	-
23.	Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	-
24.	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	**LANGKAH KESEMBILAN:** Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan **transformasi birokrasi berdampak.**
25.	Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Dalam mewujudkan agenda pembangunan sebagaimana telah dijabarkan melalui program prioritas daerah, maka diperlukan dukungan dari program perangkat daerah yang menjadi prioritas pada periode RPJMD Tahun 2025-2029. Program Perangkat Daerah berdasarkan hasil dari cascading kinerja dan dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3.8
Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
JABAR ISTIMEWA, LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA									
1	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**	**1.1**	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer**		**Indeks Modal Manusia (Poin)**				
			1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan yang sangat baik bahkan di atas rata-rata nasional menjadikan SDM Jawa Barat yang unggul dari kesehatan mental dan fisik (jiwa & raga)**	**a. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)**	1. Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan 2. Program Penangan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 3. Program Pengelolaan Layanan Pengobatan Tradisional 4. Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok	**LANGKAH KELIMA:** Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat **LANGKAH KEENAM:** Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta		
					b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Persen)				
				Meningkatnya layanan kesehatan kerja di tempat kerja informal	1 Persentase pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja			1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
				Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	2 Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan				
				Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	3 Angka Kematian Ibu (per 100.000KH)				
					4 Persentase balita stunting (pendek dan sangat pendek)				
					5 Angka Kematian Balita (per 1000 KH)				

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Terkendalinya Penyakit Kejiwaan di Wilayah Jawa Barat	6	Persentase penduduk usia ≥7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	dalam siklus hidup	Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.			
						Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	7	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional					
						Meningkatnya Masyarakat yang berperilaku Hidup Sehat	8	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat			2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
						Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	9	Persentase faskes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar			3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya					
						Meningkatnya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang sesuai standar	11	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK) dan Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) yang sesuai standar perizinan			4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
				1.1.2	**Terbentuknya Individu Bertaqwa,**	**Masyarakat yang beretika, toleran, dan berbudaya**	a.	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Poin)**	5. Program Peningkatan Ketahanan	-			

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
					Beretika, dan Berbudaya		b.	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)**	Sosial Budaya dan Toleransi Beragama				
						Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Persentase penurunan kasus diskriminasi dan intoleran			1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terhadap Pembangunan	2	Persentase Rekomendasi Hasil FKUB yang Ditindaklanjuti			2	Program Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
						Meningkatnya Pelindungan Warisan Budaya Jawa Barat	3	Persentase Warisan Budaya Jawa Barat yang dilindungi			3	Program Pengembangan Kebudayaan	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
						Cagar Budaya terlindungi	4	Persentase Cagar Budaya yang terlindungi dan dimanfaatkan			4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
						Benda Koleksi Museum Sri Baduga dan Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat lestari	5	Jumlah Benda Koleksi Museum Sri Baduga dan Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang lestari			5	Program Pengelolaan Permuseuman	
				1.1.3	**Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum**	**Kehidupan masyarakat yang tenteram, aman, dan kondusif**	**a.**	**Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persen)**	6. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			
							b.	**Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat (Poin)**					
							c.	**Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Poin)**					
						Berkurangnya potensi konflik sosial	1	Persentase Pengurangan Potensi Konflik Sosial			1	Program peningkatan kewaspadaan	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
												nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	
						Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan			2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
						Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	3	Persentase penegakan PERDA dan Peraturan Gubernur yang terselesaikan					
						Meningkatnya pelindungan masyarakat di Jawa Barat	4	Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					
						Meningkatnya profesionalisme anggota Satpol PP dan PPNS	5	Persentase anggota satpol PP dan PPNS yang mendapatkan pelatihan					
				1.1.4	**Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan**	**Jawa Barat memiliki SDM potensial yang berilmu dan beradab serta berdaya saing tinggi pada seluruh lapangan kerja potensial yang ada**	**a.**	**Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun (Tahun)**	7. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	**LANGKAH KETIGA:** Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10			
							b.	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**					
						Meningkatnya Partisipasi Sekolah	1	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB			1	Program Pengelolaan Pendidikan	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
						Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa	2	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB					

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
					3 Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB		sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.		
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	4 Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB				
					5 Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB				
					6 Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB				
				Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja	7 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
					8 Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Meningkatnya Ketersediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Profesional	9 Indeks Pemerataan Guru			2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan	10 Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan			3 Program Pembinaan Perpustakaan	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
					11 Persentase Ketercukupan Tenaga Perpustakaan				
					12 Tingkat Kunjungan ke Perpustakaan				
					13 Persentase Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)				
				Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah Kuno	14 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki			4 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
			1.1.5		**a. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Poin)**	8. Program Peningkatan	-		

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
			Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	**SDM Jawa Barat unggul dan berperan aktif dalam pembangunan**	**b.**	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) (Poin)**	Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat				
					c.	**Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Poin)**					
					d.	**Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Angka)**					
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	1	Rasio Wirausaha Pemuda			1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang dimanfaatkan					
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	3	Angka pemuda aktif mengikuti organisasi					
				Meningkatnya peran pemuda dalam kepemimpinan	4	Angka pemuda yang menduduki posisi manajerial					
				Meningkatnya pembudayaan dan prestasi Olahraga	5	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas			2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
				Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berolahraga	6	Persentase Peningkatan Masyarakat aktif Berolahraga					
				Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	7	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan					
				Meningkatnya Kesejahteraan atlet	8	Persentase atlet yang mendapatkan penghargaan sesuai standar					
				Meningkatnya kualitas kepramukaan	9	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan			3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				Menurunnya perkawinan anak di Jawa Barat	10	Persentase Penurunan Jumlah Perkawinan Anak			4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
								Keluarga Sejahtera (KS)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Meningkatnya penerapan kebijakan pengendalian penduduk	11 Persentase Kebijakan Pengendalian Penduduk yang Diterapkan			5 Program Pembinaan Keluarga Berencana	
				Meningkatnya kesertaan keluarga berencana)KB) di Jawa Barat	12 Persentase Peserta KB Aktif/mCPR			6 Program Pengendalian Penduduk	
				Meningkatnya Kualitas layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Jawa Barat	13 Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan untuk Standardisasi di Jawa Barat			7 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	14 Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender			8 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
				Meningkatnya pemenuhan hak anak	15 Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak			9 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi gender serta anak	16 Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat			10 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
				Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan khusus anak	17 Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak			11 Program Perlindungan Khusus Anak	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Menurunnya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di kabupaten/kota di Jawa Barat	18	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)			12	Program Perlindungan Perempuan	
2	**Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif**	**2.1**	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi**				**Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)**						
							Kontribusi PDRB Provinsi (Persen)						
							Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Poin)						
							Indeks Ekonomi Biru Indonesia (Poin)						
							Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)						
							PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)						
				2.1.1	**Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing**	**Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri**	**a.**	**Rasio PDRB Industri Pengolahan (Poin)**	9. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	-			
							b.	**Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Poin)**					
						Meningkatnya produksi Industri Pengolahan	1	Nilai Produksi Industri Pengolahan			1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
						Meningkatnya kualitas pelayanan IKM Logam	2	Pertambahan Jumah Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam					
						Meningkatnya Kualitas Layanan IKM IPOK	3	Pertambahan Jumah Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan					
						Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan industri	4	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri terhadap Izin Usaha			2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*		Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
								Industri kabupaten/kota yang masuk dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
						Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	~~5~~	Persentase peningkatan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas			3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
				2.1.2	**Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas**	**Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan**	**a.**	**Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (Persen)**	10. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	-			
						Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Kebutuhan Pokok Antar Waktu			1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
						Terkendalinya penyaluran pupuk bersubidi	2	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi					
						Meningkatnya Perlindungan Konsumen	3	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berkaitan Keamanan Produk dan Jasa Serta Ketentuan Lain Sesuai dengan Perundang-Undangan			2	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
						Meningkatnya Pengembangan Ekspor	4	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)			3	Program Pengembangan Ekspor	
						Meningkatnya omzet pelaku usaha pada pemasaran produk dalam negeri	5	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada pemasaran produk dalam negeri				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
				Meningkatnya pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai standar	6 Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berfungsi			4 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Meningkatnya Akses Ekspor	7 Laju Pertumbuhan Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)			5 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
				Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha tentang ketentuan perdagangan	8 Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan perdagangan				
				Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola UKPBJ	9 Tingkat Kematangan UKPBJ			6 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
			2.1.3 Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	**Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kesejahteraan petani & nelayan**	**a. *Prevalence of Undernourishment* (PoU) (Poin)** **b. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Persen)** **c. Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)**	11. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan 12. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	**LANGKAH KEDUA:** Pembangunan jaringan irigasi serta **pengembangan ekosistem pertanian organik**, melalui **konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan,** serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan **pompa bertenaga surya** **LANGKAH**		
				Meningkatnya kualitas penggunaan dan pengawasan sarana pertanian	1 Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pengawasan Sarana Pertanian			1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
				Meningkatnya produksi peternakan	2 Produksi peternakan				
				Poktan menerapkan GAP Perkebunan	3 Persentase poktan yang menerapkan GAP Perkebunan				
				Meningkatnya Budidaya Tanaman Pangan	4 Persentase Peningkatan Luas			2 Program Penyediaan dan	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
								Panen Tanaman Pangan		**KEENAM:** Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui **penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi** di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan.		Pengembangan Prasarana Pertanian	
						Meningkatnya produktivitas diversifikasi produk perkebunan	5	Persentase poktan yang meningkatkan produktivitas olahannya					
						Meningkatnya Prasarana peternakan	6	Persentase peningkatan prasarana peternakan					
						Tanaman Pangan dan Hortikultura terlindungi dari Gangguan Serangan OPT/DPI	7	Persentase Luas Lahan yang Terlindungi dari Serangan OPT/DPI			3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
						Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	8	Persentase luas lahan perkebunan terdampak perubahan iklim yang tertangani					
						Terkendalinya Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan/kompetensi produsen dan pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura			4	Program Perizinan Usaha Pertanian	
						Meningkatnya kinerja perkebunan besar	10	Persentase Perkebunan Besar yang berizin dan meningkat kinerjanya					
						Terkendalinya penyakit hewan dari wilayah terdampak PHMSZ di Jawa Barat	11	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular			5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Meningkatnya Mutu Produk Hewan	12	Persentase peningkatan Mutu Produk Hewan					
						Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	13	Persentase Cadangan Pangan			6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
										Pangan Masyarakat	PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
				Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan	14	Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	15	Persentase penurunan lokasi rentan rawan pangan			8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	16	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap	17	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Konsumsi Ikan	18	Angka Konsumsi Ikan			11	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Meningkatnya Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan	19	Persentase produk perikanan yang sesuai standar mutu dan keamanan					
				Meningkatnya Produksi Garam Provinsi Jawa Barat	20	Jumlah Produksi Garam			12	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan	21	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan			13	Program Penyuluhan Pertanian	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
				Meningkatnya produktivitas pelaku usaha peternakan	22	Persentase Pelaku Usaha Peternakan yang produktif					
				Meningkatnya SDM Peternak dan Pelaku	23	Persentase alumni pelatihan yang menerapkan Hasil					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Usaha Ketahanan Pangan di Jawa Barat		Pelatihan Bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan					
						Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Manusia dan kelembagaan Pertanian	24	Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh					
						Meningkatnya Kompetensi SDM pertanian	25	Persentase SDM Pertanian yang bersertifikat kompetensi					
				2.1.4	**Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten**	**Meningkatnya nilai investasi dan PDRB sektor ekonomi**	**a.**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen)**	13. Program Peningkatan dan pemerataan investasi	**LANGKAH KEEMPAT:** Mengembangkan **lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri,** serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan			
							b.	**Rasio Kewirausahaan Daerah (Persen)**					
						Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Penanaman Modal	1	Persentase Pelaku Usaha yang Lapor LKPM			1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
						Meningkatnya Digitalisasi dan Pemanfaatan Data Informasi PMPTSP	2	Digitalisasi dan Pemanfaatan Data Informasi PMPTSP			2	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
						Meratanya Sebaran Potensi Investasi di Jawa Barat	3	Persentase Potensi Investasi di 27 Kabupaten/Kota yang Teridentifikasi			3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
						Meningkatnya Promosi Investasi	4	Jumlah Investor yang berminat untuk Berinvestasi			4	Program Promosi Penanaman Modal	
						Pelayanan Perizinan Sesuai Standar	5	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar			5	Program Pelayanan Penanaman Modal	

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
				Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	6 Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	14. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah		6 Program Perencanaan Tenaga Kerja	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
				Meningkatnya tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi dan berdaya	7 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			7 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja	8 Persentase pencari kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri			8 Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Meningkatnya penerapan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	9 Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan			9 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
				Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan yang baik	10 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)			10 Program Hubungan Industrial	
				Meningkatnya akses koperasi terhadap pelayanan perizinan ushaha koperasi	11 Persentase Bimbingan/Konsultasi Izin Usaha Koperasi			11 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
				Meningkatnya kepatuhan koperasi	12 Persentase Kepatuhan Koperasi			12 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
				Meningkatnya Koperasi memiliki sertifikat kesehatan KSP/USP	13 Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			13 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Meningkatnya kualitas pelatihan koperasi	14	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan			14	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
						Meningkatnya Usaha Koperasi	15	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya			15	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
						Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam keanggotaan dan kegiatan usaha koperasi	16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi					
						Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam keanggotaan dan kegiatan usaha koperasi	17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi			16	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
						Meningkatnya kualitas pelatihan UMKM	18	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan			17	Program Pengembangan UMKM	
						Transmigran mendapatkan penempatan	19	Persentase Transmigran yang ditempatkan			18	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
				2.1.5	**Terkendalinya stabilitas ekonomi makro**	**Laju inflasi Jawa Barat dapat ditekan dibawah rata-rata nasional dan cenderung stabil**	**a.**	**Tingkat Inflasi (Persen)**	15. Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Penyehatan BUMD	-			
							b.	**Inklusi Keuangan (Persen)**					
							c.	**Kapasitas Fiskal Daerah (Poin)**					
							d.	**Total Kredit/PDRB (Persen)**					
						Kebijakan Pengendalian Inflasi Responsif terhadap Isu Peningkatan Harga Barang di Masyarakat	1	Persentase Kebijakan Pengendalian Inflasi yang Diimplementasi			1	Program Perekonomian dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah terhadap Pembangunan	2	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah					
						Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah terhadap Pembangunan	3	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah					
						Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah	4	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah			2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KEUANGAN
				2.1.6	**Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing**	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam PDRB Jawa Barat**	**a.**	**Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (Persen)**	16. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	**LANGKAH KEEMPAT:** Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta **pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan**			
							b.	**Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum (Persen)**					
						Meningkatkan jumlah destinasi pariwisata yang memiliki sistem pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan yang sesuai standar	1	Jumlah DTW Unggulan Provinsi dan/atau Desa/Kampung Wisata Unggulan Provinsi yang memenuhi standar			1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
						Meningkatnya promosi pariwisata Jawa Barat secara nasional dan internasional	2	Persentase Aktivitas Promosi yang terealisasi			2	Program Pemasaran Pariwisata	
						Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi	3	Persentase pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi			3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Pertumbuhan Investasi industri kreatif dan Jumlah Tenaga Kerja industri kreatif	4	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif			4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
3	**Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya**	**3.1**	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan**				**Rasio Gini (Poin)**						
							Penurunan Intensitas Emisi GRK (Persen)						
				3.1.1	**Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan**	**Terbentuknya kawasan perkotaan dan perdesaan yang nyaman, layak huni, dan ramah bagi berbagai kelompok dengan ekosistem yang terjaga dan berkesinambungan**	**a.**	**Indeks Kualitas Infrastruktur (Persen)**	17. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	**LANGKAH PERTAMA:** Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open			
							b.	**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (Persen)**					
							c.	**Indeks Desa (Persen)**					
							d.	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Poin)**					
							e.	**Indeks Ketahanan Air (Poin)**					
							f.	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif dan Tahunan (Persen)**					
							g.	**Indeks Resiko Bencana (Poin)**					
						Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Preservasi Jalan	1	Persentase Jalan Terbangunan/Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis			1	Program Penyelenggaraan Jalan	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN
						Rekomendasi hasil survey kondisi jalan diterapkan	2	Persentase rekomendasi hasil					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						dalam dokumen perencanaan		survey kondisi jalan yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan		Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan). **LANGKAH KEDUA:** Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya.			UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Material Jalan Memiliki Jaminan Mutu	3	Persentase Jalan Terbangun Yang Menggunakan Material Lulus Uji Pembanding					
						Meningkatnya preservasi jalan	4	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar					
						Meningkatnya kualitas pelayanan penataan ruang	5	Persentase pemanfaat ruang yang mematuhi ketentuan rekomendasi pemanfaatan ruang kewenangan provinsi			2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
						RTRW Kab/Kota sesuai dengan RTRW Provinsi	6	Persentase RTRW Kab/Kota yang sinkron dengan RTRW Provinsi					
						Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti					
						Terselenggaranya Pengembangan Jasa Konstruksi	8	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat Jasa Konstruksi			3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
						Meningkatnya Kualitas Infrastruktur SDA	9	Persentase Infrastruktur SDA yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi					
						Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi	10	Persentase Infrastruktur Irigasi yang Sesuai Standar					

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Tata Kelola Konstruksi					
				Infrastruktur Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi sesuai standar	11	Persentase Infrastruktur Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi yang sesuai Standar			4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Tertatanya Kawasan Strategis Daerah provinsi	12	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
				Terbangunnya Infrastruktur di Kawasan Strategis Provinsi	13	Persentase Terbangunnya Infrastruktur di Kawasan Strategis Provinsi			6	Program Pengembangan Permukiman	
				Meningkatnya infrastruktur dasar air minum aman	14	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota			7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Meningkatnya infrastruktur dasar sanitasi aman	15	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional			8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
				Bangunan Gedung memenuhi standar	16 Persentase Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung			9 Program Penataan Bangunan Gedung	
				Infrastruktur SDA memadai dan berfungsi	17 Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung			10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
					18 Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di Daerah Irigasi				
				Meningkatnya Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum	19 Persentase Konektivitas Transportasi Darat			11 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
				Lalu Lintas Lancar dan Berkeselamatan	20 Persentase Daerah Rawan Kecelakaan dan Kemacetan yang Ditangani				
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi	21 Persentase Kebijakan Pengembangan Bidang Transportasi Yang Dimanfaatkan				
				Meningkatnya Kualitas Layanan LLAJ	22 Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ				
				Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum Transportasi Darat	23 Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Darat				
				Meningkatnya Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Laut dan ASDP	24 Persentase Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP			12 Program Pengelolaan Pelayaran	
				Meningkatnya Kualitas Layanan	25 Indeks Kepuasan Masyarakat				
				Meningkatnya Kesiapan Pengelolaan Pelabuhan Laut	26 Persentase Persyaratan Pengelolaan Pelabuhan Laut yang Terpenuhi				

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
				Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum Transportasi Laut dan ASDP	27 Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Laut dan ASDP					
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perkeretapian di Jawa Barat	28 Persentase Perencanaan Perkeretapian di Jawa Barat yang Dimanfaatkan			13	Program Pengelolaan Perkeretaapian	
				Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum Perkeretaapian	29 Persentase Peningkatan Pengguna Kereta Api					
				Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)	30 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang telah Ditangani			14	Program Kawasan Permukiman	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatnya PSU Permukiman	31 Persentase Satuan Permukiman yang mendapatkan penanganan PSUnya			15	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				Korban Bencana/Relokasi mendapatkan Rumah Layak	32 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni			16	Program Pengembangan Perumahan	
				Meningkatnya jumlah pengembang yang tersertifikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	33 Persentase pengembang tersertifikasi			17	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Meningkatnya Pemanfaatan perencanaan penggunaan tanah	34	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			18	Program Penatagunaan Tanah	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
						Optimalnya Persiapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi	35	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu			19	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	
						Masyarakat Mendapatkan Penetapan Ganti Rugi dan Santunan Sesuai Ketentuan	36	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang selesai tepat waktu			20	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	
						Terinventarisasinya Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat	37	Persentase Invetarisasi sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			21	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	
						Masyarakat Mendapatkan Redistribusi Tanah dan Penataan Akses dari BPN	38	Persentase jumlah kabupaten/kota terfasilitasi redistribusi tanah dan penataan akses			22	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	
						Masyarakat Mendapatkan Kepastian Hukum Penetapan Tanah Ulayat	39	Persentase Tanah Ulayat yang terinventarisir			23	Program Penetapan Tanah Ulayat	
						Meningkatnya Kualitas Penataan Desa di Kabupaten/Kota	40	Persentase nilai indeks dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa di kabupaten/kota	18. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	**LANGKAH KESEMBILAN:** Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK,	24	Program Penataan Desa	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA
						Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kerja Sama Desa di Kabupaten/Kota	41	Persentase nilai indeks dimensi				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						ekonomi desa di kabupaten/kota		Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta **Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan** dan transformasi birokrasi berdampak.			N MASYARAKAT DAN DESA
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/Kota	42	Persentase nilai indeks dimensi sosial desa di kabupaten/kota			25	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	43	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Lingkungan, Desa di kabupaten/kota			26	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
					44	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Layanan Dasar Desa di kabupaten/kota					
					45	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Aksesibilitas Desa di kabupaten/kota					
				Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan	46	Persentase Perencanaan Pembangunan yang sudah terintegrasikan dengan rencana pembangunan lingkungan hidup	19. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Energi, serta Penanganan Perubahan Iklim	**LANGKAH KETUJUH:** Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan	47	Persentase Perencanaan Pembangunan yang sudah terintegrasikan dengan rencana pembangunan lingkungan hidup					
					48	Persentase Pembinaan Terhadap Kebijakan					

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						dan/atau Produk hukum		pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan. **LANGKAH KEDELAPAN:** Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).			
				Terkendalinya pencemaran Air	49	Penurunan Parameter COD			2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Terkendalinya pencemaran Air Laut	50	Persentase kab/kota di wilayah pesisir yang dibina					
				Terkendalinya pencemaran Udara	51	Penurunan konsentrasi parameter SO2					
				Meningkatnya Kualitas pelayanan laboratorium lingkungan	52	Parameter Pengujian Kualitas Air yang Terakreditasi					
					53	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen Laboratorium Parameter Pengujian Kualitas Air Laut yang terakreditasi					
					54	Parameter Pengujian Kualitas Udara yang Terakreditasi					
					55	Parameter Pengujian Kualitas Limbah dan B3					
				Terkendalinya Pencemaran B3 dan LB3	56	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3			3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
				Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan	57	Persentase Dokumen Lingkungan yang di proses			4	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan	

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
				dampak lingkungan dari usaha/kegiatan						izin perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	
				Kegiatan Usaha Baru Yang Berdampak Lingkungan Tidak Melanggar Hukum Lingkungan	58	Persentase Jumlah pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi					
				Meningkatnya perlindungan lingkungan hidup	59	Persentase peningkatan Masyarakat Hukum Adat yang terbina di Kabupaten/Kota			5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
				Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	60	Persentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup			6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
				Meningkatnya penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	61	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup			7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	
				Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	62	Persentase penanganan pengaduan lingkungan Hidup			8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya kelestarian keanekaragaman hayati	63	Persentase Lokasi Taman Kehati atau RTH Kehati yang dibina			9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					64	Jumlah Sarana dan Prasarana			10		

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
					Keanekaragaman Hayati yang dikelola			Program Pengelolaan Persampahan	
				Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	65 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah				
				Meningkatnya pengelolaan sampah regional	66 Persentase Jasa Layanan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional				
				Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK sektor limbah dan persampahan	67 Presentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK di Kabupaten/Kota			11 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya aksi pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak	68 Persentase Kampung Iklim yang dibina				
				Meningkatnya Sampah yang diolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	69 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			12 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Meningkatnya Kondisi Daya Dukung DAS	70 Nilai Kondisi Lahan DAS			13 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
				Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	71 Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitasnya			14 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan di Jawa Barat	72	Persentase Penurunan Kerusakan Areal Preservasi dan Perlindungan Setempat yang ditangani			15	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
						Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan	73	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan terhadap kawasan hutan dan hutan rakyat			16	Program Pengelolaan Kehutanan	
						Terarahnya Pengelolaan Hutan	74	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan					
						Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu	75	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar					
						Meningkatnya kualitas pengolahan Hasil Hutan Kayu	76	Persentase pengolahan Hasil Hutan Kayu yang berkualitas					
						Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	77	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar					
						Meningkatnya kualitas pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	78	Persentase pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berkualitas					
						Terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	79	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	80	Persentase Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			17	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	81	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Sektor Kelautan dan Perikanan					
						Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi	82	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Jawa Barat			18	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Tingkat kepatuhan pengguna air tanah terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Jawa Barat	83	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Jawa Barat					
						Meningkatnya kualitas pembangunan sarana pengelolaan aneka energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan Provinsi	84	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi			19	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
						Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca	85	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi					
						Terkendalinya usaha bidang ketenagalistrikan	86	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan			20	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
								kewenangan Gubernur					
						Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat	87	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat					
						Terkendalinya usaha pertambangan pada aspek teknis	88	Persentase usaha pertambangan yang menerapkan aspek teknis			21	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	
						Terkendalinya usaha pertambangan pada aspek pengusahaan	89	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan					
						Meningkatnya usaha pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan	90	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan					
						Meningkatnya kualitas bahan tambang	91	Persentase pengujian kualitas bahan tambang					
						Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	92	Nilai Penangan Tematik Kawasan Rawan Bencana	20. Program Pengurangan Risiko Bencana	-	22	Program Penanggulangan Bencana	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	93	Peresentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana					
						Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan logistik dan Peralatan pada saat Keadaan Darurat Bencana	94	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada saat keadaan Darurat Bencana					

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
				Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekontruksi	95 Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana				
				Meningkatnya kapasitas kab/kota dalam penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	96 Kabupaten/Kota yang Terbina Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota			23 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			3.1.2 Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	**Menurunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.**	**a. Tingkat Kemiskinan (Persen)** **b. Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)**	21. Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	-		
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial untuk Fakir Miskin	1 Persentase bansos kesejahteraan keluarga yang disalurkan tepat sasaran			1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
				Meningkatnya Pendapatan dari Fakir Miskin	2 Persentase KUBE yang meningkat pendapatannya				
				Terlindunginya anak dalam pengasuhan orang tua angkat	3 Persentase Anak yang Mendapat Pengasuhan Orang Tua Angkat				
				Meningkatnya partisipasi Pelaku Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4 Persentase PSKS yang Aktif			2 Program Pemberdayaan Sosial	
				Anak Terlantar kembali berfungsi sosial	5 Persentase Anak Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali			3 Program Rehabilitasi Sosial	

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						PPKS berfungsi sosial	6	Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali					
						Penyandang Disabilitas Kembali Berfungsi Sosial	7	Persentase Penyandang Disabilitas yang tertangani dan berfungsi sosial kembali					
						Lanjut Usia Terlantar kembali berfungsi sosial	8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali					
						Gelandangan dan Pengemis Kembali Berfungsi Sosial	9	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang tertangani dan berfungsi sosial kembali)					
						Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Tuna Susila kembali berfungsi sosial	10	persentase WRSE dan Wanita Tuna Susila yang tertangani dan berfungsi sosial kembali)					
						Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	11	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial			4	Program Penanganan Bencana	
						Terlindunginya WNI migran korban tindak kekerasan	12	Persentase warga negara korban tindak kekerasan yang terlindungi			5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Taman Makam Pahlawan	13	Indek Kepuasan Masyarakat (TMP)			6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
						Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan	14	Persentase Kebijakan Daerah Bidang			7		SEKRETARIAT DAERAH

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Kesejahteraan Rakyat terhadap Pembangunan		Kesejahteraan Rakyat yang Berbasis Bukti dan Partisipatif				Program Kesejahteraan Rakyat	
							15	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terimplementasi dengan Baik					
4	**Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance***	**4.1**	**Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi**				**Indeks Daya Saing Daerah (Poin)**						
				4.1.1	**Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan**	**Ekosistem riset dan penerapan IPTEK menjadikan Jawa Barat terbuka untuk berbagai inovasi pembangunan dan menarik SDM serta potensi investasi yang berkaitan dengan teknologi inovatif dan ramah lingkungan**	**a.**	**Indeks Inovasi Daerah (Poin)**	22. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	-			
						Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pembangunan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam Penyelesaian Permasalahan di Jawa Barat	1	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup pemerintahan dan pengkajian peraturan yang berbasis isu strategis			1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pembangunan Lingkup Sosial dan Kependudukan dalam Penyelesaian Permasalahan di Jawa Barat	2	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup sosial dan kependudukan yang berbasis isu strategis					
						Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pembangunan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan dalam Penyelesaian Permasalahan di Jawa Barat	3	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup ekonomi dan pembangunan yang berbasis isu strategis					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Meningkatnya Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi	4	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Didiseminasikan					
						Meningkatnya Peringkat Akreditasi Jurnal	5	Peringkat Jurnal yang Memenuhi Akreditasi					
						Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual	6	Persentase Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi					
						Inovasi Daerah Bermutu	7	Persentase Usulan Inovasi Daerah yang Dilaporkan					
						Meningkatnya Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi	8	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Didiseminasikan			2	Program Riset Dan Inovasi Daerah	
						Meningkatnya Peringkat Akreditasi Jurnal	9	Peringkat jurnal yang memenuhi Akreditasi					
						Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual	10	Persentase Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi					
						Inovasi Daerah Bermutu	11	Persentase Usulan Inovasi Daerah yang Dilaporkan					
				4.1.2	**Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan**	**Transparansi, Akuntabilitas, dan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan**	**a.**	**Indeks Demokrasi Provinsi (Poin)**	23. Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pembangunan	-			
						Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik Bagi Usia Pemilih	1	Persentase usia pemilih yang menerapkan hasil pembinaan pendidikan politik			1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
												Etika Serta Budaya Politik	
						Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan			2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		4.2	**Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan**				**Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)**						
				4.2.1	**Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif**	**Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Jawa Barat yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memiliki daya saing yang semakin kuat.**	**a.**	**Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General) (Persen)**	24. Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	**LANGKAH KESEMBILAN:** Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan **transformasi birokrasi berdampak.**			
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	2	Indeks Pemerintahan Digital					
						Meningkatnya kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasis Publik	3	Indeks Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik			2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
						Tercapainya Kolaborasi Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS			3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
						Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	5	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)			4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Lingkungan Pemerintah Daerah						Pengamanan Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
						Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	6	Tingkat Ketersediaan Arsip			5	Program Pengelolaan Arsip	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
						Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	7	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip			6	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	8	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup			7	Program Perizinan Penggunaan Arsip	
						Meningkatnya Kualitas Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan	9	Nilai Deregulasi Kebijakan	25. Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional		9	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
						Meningkatnya Harmonisasi Regulasi Daerah	10	Persentase Regulasi Daerah yang Harmonis					
						Progres kinerja perangkat Daerah sesuai Perencanaan	11	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi akselerasi Kinerja			10	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	
						Meningkatnya Efektivitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	12	Persentase Kerja Sama Daerah yang Efektif			11	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
							13	Persentase Kerja Sama Internasional yang Efektif					
						Meningkatnya Penerapan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	14	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal SANGAT BAIK			12	Program Penataan Organisasi	
						Organisasi Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi	15	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur					

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
				Organisasi Tepat Proses	16 Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses					
				Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi	17 Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi					
				Budaya kerja diterapkan secara efektif oleh Perangkat Daerah	18 Nilai Budaya Kerja BerAKHLAK Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat					
				Meningkatnya kualitas tatakelola SAKIP	19 Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal A					
				Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Organisasi	20 Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi					
				Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Lancar	21 Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lancar			13	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD
				Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Lancar	22 Persentase Pembahasan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Lancar					
				Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	23 Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			14	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	24	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam					
						Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	25	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
						Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
						Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	27	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam					
						Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	28	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
						Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	29	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat			15	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
						Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam	30	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						perbaikan perencanaan Pembangunan Daerah		Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat					
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	31	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah			16	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	KEUANGAN
						Hasil Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Diterapkan Oleh Kabupaten/Kota	32	Rata-rata Indeks Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten/Kota					
						Administrasi Barang Milik Daerah Andal	33	Indeks Sertifikasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah					
						Pengelolaan Barang Milik Daerah Akuntabel dan Produktif	34	Indeks Realisasi Penerimaan Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah					
						Perencanaan Anggaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	35	Persentase Prioritas Pembangunan Daerah yang Dianggarkan Dalam APBD			17	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	36	Persentase Tindaklanjut Usulan Pencairan Dana yang Tepat Waktu					
						Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	37	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
						Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Diterapkan Kabupaten/Kota	38	Persentase Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Diterapkan Oleh Kabupaten/Kota					
						Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan	39	Kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Standar Akuntansi Pemerintahan							
						Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran APBD Kab/Kota dan Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota	40	Persentase Kepgub Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran APBD Kab/Kota dan Kepgub Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota					
						Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota	41	Persentase Kepgub Hasil Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota					
						Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	42	Persentase Dokumen Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	43	Persentase Dokumen Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	44	Persentase Dokumen Dana Darurat dan Mendesak Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	45	Persentase Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
						Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	46	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian			18	Program Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN
						Meningkatnya kualitas promosi dan mutasi	47	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi					
						Meningkatnya kualitas pengembangan karir ASN	48	Nilai Kriteria Pengembangan Karier					

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
				Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin	49 Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin					
				Meningkatnya kualifikasi ASN	50 Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi					
				Meningkatnya kinerja ASN	51 Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja					
				Meningkatnya displin ASN	52 Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin					
				Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Teknis dan Fungsional Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	53 Persentase peningkatan Kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional			19	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
				Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Manajerial dan Dasar Serta Pimpinan Daerah Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	54 Persentase peningkatan kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial					
				Meningkatnya Implementasi Corporate University	55 Indeks Maturitas Corporate University					
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol & Promosi Informasi yang Prima	56 Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol & Promosi Informasi yang Difasilitasi			20	Program Pelayanan Penghubung	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
				Meningkatnya pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota	57 Nilai dampak implementasi SAKIP			21	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
				Meningkatnya kepatuhan penerapan kriteria	58 Persentase rekomendasi hasil					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat		reviu LKPD yang ditindaklanjuti dalam LKPD					
						Meningkatnya penyelesaian kerugian negara/daerah	59	Persentase kasus Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan					
						Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	60	Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI yang diselesaikan					
						Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan tertentu	61	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu					
						Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP Internal	62	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal					
						Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP eksternal	63	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP eksternal					
						Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	64	Persentase Kabupaten/kota yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan umum dan tujuan tertentu					
						Meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan PPDB SMA/SMK/SLB di Jawa Barat	65	Persentase KCD yang mematuhi ketentuan PPDB					

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran		*Outcome*	Indikator		Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah		Keterangan
						Meningkatnya kepatuhan BUMD	66	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BUMD					
						Meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan bantuan keuangan kabupaten/kota	67	Persentase Kab/Kota penerima Bantuan Keuangan Kab/Kota yang patuh					
						Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan dana desa	68	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh					
						Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan dana BOS, BOPD dan BPMU	69	Persentase sampling sekolah penerima dana BOS, BOPD dan BPMU yang patuh					
						Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan pengguna produk dalam negeri	70	Persentase kepatuhan dalam penerapan P3DN					
						Meningkatnya kepatuhan dalam penerapan kriteria penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi (LPPD)	71	Persentase hasil review LPPD yang diterapkan dalam penyusunan LPPD					
						Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	72	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP			22	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
						Meningkatnya Kapabilitas APIP	73	Level Maturitas APIP					
						Meningkatnya Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	74	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM)					
						Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan Korupsi	75	Persentase nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)					
						Meningkatnya Kepemilikan Dokumen	76	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun			23	Program Pencatatan Sipil	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas Daerah	9 Langkah Membangun Jawa Barat	Dukungan Program Perangkat Daerah	Keterangan
				Pencatatan Sipil Kab/Kota	77 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					78 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai				
					79 Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan				
				Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	80 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			24 Program Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	81 Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan			25 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					82 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)				
				Meningkatnya Pemanfaatan Profil Kependudukan	83 Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan			26 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

3.5.2 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

RPJMD Tahun 2025-2029 Jawa Barat juga mendukung program prioritas nasional yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029. Berikut program prioritas pembangunan daerah yang mendukung program prioritas nasional.

Tabel 3.9
Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)							
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	P4	Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*	Penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang Efektif Persentase Kerja Sama Internasional yang Efektif
PN 2. Sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.							
1	Mencapai Swasembada Pangan, Engeri, dan Air	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pengawasan Sarana Pertanian 2. Produksi peternakan 3. Persentase poktan yang menerapkan GAP Perkebunan
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan Persentase poktan yang meningkatkan produktivitas olahannya Persentase Pneingkatan Prasarana Peternakan
		Pembangunan pangan akuatik (blue food)					
		Pembangunan pangan hewani				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan yang Terlindungi dari Serangan OPT/DPI Persentase luas lahan perkebunan terdampak perubahan iklim yang tertangani
		Pembangunan pangan lokal dan nabati				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan/kompetensi produsen dan pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan
		Peningkatan penyediaan energi				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
		Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan lokasi rentan rawan pangan
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular
		Konservasi sumber daya air				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
		Pengelolaan susut dan sisa pangan				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan
						Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	-			Program Peningkatan dan pemerataan investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Lapor LKPM
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Digitalisasi dan Pemanfaatan Data Informasi PMPTSP
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi di 27 Kabupaten/Kota yang Teridentifikasi

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat untuk Berinvestasi
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar
12	Menjamin Ketersediaan pupuk, benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	-		Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan	Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan
						2. Persentase Pelaku Usaha Peternakan yang produktif
						3. Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital		Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya demi keadilan ekonomi	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Nilai Produksi Industri Pengolahan
						2. Pertambahan Jumah Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam
						3. Pertambahan Jumah Industri Kecil Menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
							terhadap Izin Usaha Industri
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya			Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berkaitan Keamanan Produk dan Jasa Serta Ketentuan Lain Sesuai dengan Perundang-undangan
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Kebutuhan Pokok Antar Waktu
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada pemasaran produk dalam negeri
						Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berfungsi
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Laju Pertumbuhan Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)
						Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ
						Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Binaan yang Meningkat Omzet Usahanya
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Penurunan Kerusakan Areal Preservasi dan Perlindungan Setempat yang ditangani
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik				Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Nilai Kondisi Lahan DAS
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau				Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitasnya
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan				Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi							
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Energi, dan Penanganan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital				-	-
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	-	-	-

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
	inovatif-karakteristik-mandiri lainnya						
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya demi keadilan ekonomi	Pengembangan koperasi sektor produksi			Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan pemberdayaan kewirausahaan daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Bimbingan/Konsultasi Izin Usaha Koperasi
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya
						Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas							
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Penurunan kematian ibu dan anak	P1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (per 100.000KH)
							2. Angka Kematian Balita (per 1000KH)
		Pencegahan dan penurunan stunting			Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Peningkatan Gizi pada kelompok dalam siklus hidup		Persentase balita stunting (pendek dan sangat pendek)
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis			Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan		Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa
		Penuntasan TBC					Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis					Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		Investasi pelayanan kesehatan primer					Persentase penduduk usia ≥7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses					Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar
8	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas			Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi		
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah				Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul					
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi				-	-
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi				-	-
		Perluasan layanan pendidikan anak usia dini				-	-
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan perlindungan hak	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita			Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
	perempuan, anak, serta penyandang disabilitas				Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat		Keluarga yang Mendapatkan Penguatan untuk Standardisasi di Jawa Barat
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Penurunan Jumlah Perkawinan Anak
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebijakan Pengendalian Penduduk yang Diterapkan
						Program Pengendalian Penduduk	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR
						Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender
						Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang *Up To Date* Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Program Perlindungan Khusus Anak	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	-			Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, dan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Angka pemuda aktif mengikuti organisasi

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
					Penyiapan Generasi Penerus Jawa Barat	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
			P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah DTW Unggulan Provinsi dan/atau Desa/Kampung Wisata Unggulan Provinsi yang memenuhi standar
						Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Aktivitas Promosi yang terealisasi
PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri							
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya demi keadilan ekonomi	Pengembangan hilirisasi Nikel	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan
		Pengembangan hilirisasi Tembaga				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
		Pengembangan hilirisasi Bauksit				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan industri yang masuk SIINas
		Pengembangan hilirisasi Timah					Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit					
		Pengembangan hilirisasi Kelapa					
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut					
		Pengembangan hilirisasi Kimia					
		Pengembangan industri semikonduktor					
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil					
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja					
		Pengembangan industri dirgantara					
PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan							
5	Pemberantasan Kemiskinan	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (lansia dan penyandang disabilitas)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase bansos kesejahteraan keluarga yang disalurkan tepat sasaran
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastuktur wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Satuan Permukiman yang mendapatkan penanganan PSUnya
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa			Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase nilai indeks dimensi ekonomi desa di kabupaten/kota
						Program Penataan Desa	Persentase nilai indeks dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa di kabupaten/kota
PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan							
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	P4	Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian
		Transformasi digital layanan publik prioritas				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pemerintahan Digital
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program stabilitas ekonomi makro daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pencegahan tindak pidana korupsi	P4	Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip Good And Clean Governance	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase Regulasi Daerah yang Harmonis
PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur							
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	P1			Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja
	beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah			Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama		FKUB yang Ditindaklanjuti
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Jawa Barat yang dilindungi
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Selain program prioritas nasional diatas, terdapat tema atau program nasional yang membutuhkan dukungan program daerah, diantaranya sebagai berikut:

a. Swasembada Pangan

Swasembada Pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara. Konsep ini mengacu pada kondisi di mana suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sendiri tanpa bergantung pada impor. Hal ini berarti produksi pangan domestik mencukupi baik dari segi jumlah, kualitas, maupun keterjangkauan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi dan berkaitan dengan salah satu poin dalam konsep *human security*.

Dalam mewujudkan swasembada pangan harus memperhatikan 3 (tiga) pilar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan. Ketersediaan pangan merupakan salah satu dimensi/aspek/indikator yang menggambarkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi melalui penyediaan sendiri, impor, dan penyediaan cadangan pangan. Keterjangkauan pangan mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Hal ini mencakup tidak hanya kemampuan untuk membeli pangan tetapi juga akses fisik ke sumber-sumber pangan, distribusi pangan yang efisien, stabilitas pasokan dan harga, sistem logistik, manajemen stok, serta kebijakan yang mendukung dan memastikan bahwa pangan tersedia dan mudah dijangkau bagi semua lapisan masyarakat. Sehingga, keterjangkauan terhadap pangan berkaitan erat dengan permasalahan fisik, ekonomi dan sosial. Pemanfaatan merupakan konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gini yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Salah satu parameter yang digunakan baik oleh nasional, daerah maupun kabupaten/kota untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat yaitu Skor Pola Pangan Harapan (SPPH).

Provinsi Jawa Barat mendukung swasembada pangan melalui :

1. Mempertahankan KP2B Jawa Barat;
2. Peningkatan infrastruktur pangan seperti rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan rehabilitasi jaringan irigasi;
3. Mengembangkan pertanian organik untuk menghasilkan pangan sehat;
4. Memberikan bantuan benih, pupuk, obat-obatan dan alat mesin pertanian bagi petani untuk meningkatkan produktivitas;
5. Penggunaan teknologi presisi/pertanian modern dalam meningkatkan produktivitas pangan.

b. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Program MBG dilaksanakan di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Program MBG dapat menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dukungan Provinsi Jawa Barat terhadap program ini:

1. Sektor Ekonomi: mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok. Sehingga, lebih banyak pihak terkait distribusi dan produksi pangan bergizi.
2. Sektor Kesehatan: mendorong upaya makan bergizi secara teratur kepada kelompok rentan serta keamanan pangan yang dikonsumsi.
3. Sektor Pendidikan: mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
4. Sektor Ketahanan Pangan: memperkuat produksi pangan lokal untuk menghasilkan pangan yang berkualitas.
5. Memfasilitasi terbentuknya dan terselenggaranya kantor satuan pelayanan yang representatif.

c. *Sekolah Rakyat*

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjawab tantangan kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan marjinal. Materi pembelajaran dirancang tidak hanya berisi kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung (calistung), tetapi juga ditambah dengan pendidikan karakter, keterampilan hidup (*life skills*), serta pengetahuan sosial dan budaya lokal. Sekolah Rakyat merupakan Sekolah Terintegrasi dari Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sekolah Rakyat menyelenggarakan pendidikan unggulan yang tidak hanya menekankan aspek akademis tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter dan kepribadian luhur. Sebagai *Centre of Excellence*, Sekolah Rakyat berkomitmen memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan menginspirasi dan mengembangkan intelektual. Melalui *excellence of thought* (keunggulan dalam pemikiran) dan *excellence of character* (keunggulan dalam karakter). Sekolah Rakyat diharapkan menghasilkan lulusan yang cerdas intelektualnya, Tangguh mentalnya dan kuat karakternya.

Provinsi Jawa Barat mendukung sekolah rakyat melalui penyediaan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik. Adapun rencana pembangunan sekolah rakyat di Jawa Barat berdasarkan Kepmensos Nomor 126/HUK/2025 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ada di 13 lokasi sebagai berikut:

Tabel 3.10
Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

No	Kabupaten/Kota	Instansi/Daerah Pengusul	Jumlah		
			Rombongan Belajar	Siswa	Jenjang
1	Sukabumi	Sentra Phalamarta Sukabumi	4	100	SMA
2	Kota Cimahi	Sentra Abiyoso Cimahi	4	100	SMP
3	Kota Cimahi	Pemprov Jawa Barat	4	100	SMA
4	Kota Bandung	Sentra Wyataguna Bandung 1	2	50	SMP
5	Kota Bandung	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	4	100	SMA
6	Bogor	Sentra Galih Pakuan	2	50	SMA

No	Kabupaten/Kota	Instansi/Daerah Pengusul	Jumlah		
			Rombongan Belajar	Siswa	Jenjang
7	Bogor	Sentra Terpadu Inten Soewono Cibinong	4	100	SMP
8	Kota Bekasi	Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi	9	180	SMA
9	Kota Cirebon	Pemkot Cirebon	4	100	SD & SMP
10	Bandung Barat	Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung Lembang	4	100	SMA
11	Bandung Barat	Sentra Wyataguna Bandung 2	4	100	SMP
12	Sumedang	Pemkab Sumedang	6	150	SD, SMP & SMA
13	Bandung	Pemkab Bandung	6	150	SMP & SMA

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

d. Koperasi Merah Putih

Koperasi merah putih merupakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa akan dilakukan Percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat sendiri akan ada percepatan pembentukan koperasi sebanyak 5.877 unit, untuk percepatan pembentukan koperasi ini terdapat Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembentukan koperasi merah putih ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di wilayah perdesaan, beberapa permasalahan tersebut adalah pendapatan penduduk desa masih minim, kurangnya lapangan kerja di desa, tidak stabilnya harga bahan pokok, fasilitas Kesehatan masih terbatas, dan juga terjebak hutang pinjaman *online*/rentenir. Unit usaha yang terdapat pada koperasi merah putin ini terdiri dari beberapa unit usaha, yaitu kantor koperasi, toko sembako, aktivitas simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang penyimpanan dan juga penyediaan logistik desa.

Dalam pendirian koperasi merah putih terdapat 3 (tiga) mode, yaitu: (1) Membangun koperasi baru; (2) Mengembangkan koperasi yang sudah ada; (3) Revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Terkait pendanaan untuk percepatan pembentukan koperasi merah putih ini dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan Jawa Barat dalam pembentukan koperasi merah putih ini adalah:

1. Menyediakan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
2. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan pada tiap daerah dalam pelaksanaan pembentukan 5.877 koperasi desa/kelurahan merah putih; dan
3. Melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kepada Pemerintah Pusat.

e. Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah merupakan inisiatif strategis nasional dalam sektor perumahan yang diluncurkan untuk menjawab tantangan *backlog* perumahan nasional yang tinggi serta untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasikan pembangunan rumah tapak dan hunian vertikal secara masif dan berkelanjutan, mencakup pembangunan hunian baru serta perbaikan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah yaitu:

1. Mengurangi *backlog* kepemilikan rumah di Indonesia secara signifikan;
2. Meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni;
3. Memastikan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Sasaran program 3 juta rumah ini meliputi:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perkotaan dan perdesaan;
2. Pegawai negeri, TNI/Polri, pekerja sektor informal, serta generasi muda (milenial) yang belum memiliki rumah;
3. Daerah dengan kepadatan tinggi dan *backlog* perumahan yang tinggi, termasuk kawasan kumuh.

Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memiliki sejumlah dampak strategis:

1. Penurunan *backlog* nasional secara progresif, menuju target ideal ketersediaan hunian;
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui hunian layak, sehat, dan aman;
3. Penguatan pusat pertumbuhan kota berkelanjutan, melalui integrasi perumahan dengan infrastruktur dasar dan tata ruang.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk mendukung Program 3 Juta Rumah khususnya agar dapat diimplementasikan di Jawa Barat melalui kebijakan Pembangunan Rumah untuk Masyarakat Miskin. Berikut ini beberapa program yang secara langsung mendukung Program 3 Juta Rumah, yaitu:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
   Program perbaikan rutilahu menjadi program yang memiliki dampak signifikan dalam implementasi Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk melakukan perbaikan rutilahu sebanyak 218.553 unit rumah hingga tahun 2030 meliputi rutilahu di kawasan kumuh kewenangan provinsi, di kawasan kumuh kewenangan kabupaten/kota dan diluar kawasan kumuh;
2. Perbaikan Rumah bagi Korban Terdampak Bencana dan Pembangunan Rumah bagi Korban Relokasi Terdampak Program Pemerintah
   Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pemenuh Standar Pelayanan Minimal khususnya meliputi korban becana dan korban terdampak program pemerintah. Adapun peran pemerintah provinsi meliputi:
   a. Penyediaan anggaran APBD provinsi untuk perbaikan rumah dengan pendekatan padat karya atau swakelola;
   b. Pembangunan rumah dengan prinsip tahan bencana, terutama di daerah rawan bencana seperti rumah panggung dan rumah tahan gempa;
   c. Fasilitasi penggantian hak atas tanah dan bangunan, bekerja sama dengan ATR/BPN dan pemerintah pusat;
   d. Penguatan sosial ekonomi masyarakat terdampak, dengan pendekatan pengembangan kawasan dan pemberdayaan.

3. Fasilitasi Kolaborasi Peran Swasta dan BUMN/BUMD

   Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mendorong peran pengembang nasional, BUMN (Perumnas, PPDPP), dan BUMD daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah susun. Disisi lain, pemanfaatan dana CSR dapat digunakan untuk perbaikan rutilahu ataupun pengembangan model *community-based housing*;

4. Fasilitasi Kelembagaan dan Regulasi Daerah

   Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun dan menerapkan Peraturan Gubernur atau Pergub Teknis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan rumah bersubsidi dan relokasi. Selain itu, upaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan BPHTB dan percepatan PBG sesuai SKB 3 Menteri Tahun 2024 juga terus dilakukan agar percepatan program 3 juta rumah dapat tercapai.

5. Penyiapan *Readiness Criteria* Pembangunan Rumah Tapak di Wilayah Perdesaan dan Pembangunan Hunian Vertikal di Wilayah Perkotaan

   a. Menyiapkan dukungan lahan, penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen teknis pembangunan rumah khususnya hunian vertikal di perkotaan;
   b. Menyusun konsep pengembangan hunian berbasis kawasan (*Transit Oriented Development*) dan layanan dasar (sekolah, pasar, fasilitas kesehatan);
   c. Menyusun skema pembiayaan alternatif, seperti kemitraan KPBU untuk pembangunan hunian vertikal.

f. Pengendalian Inflasi di Daerah

Pengendalian di infilasi dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya terhadap bahan pokok penting. Dari aspek ketersediaan, dilakukan peningkatan produksi pangan dan hortikultura melalui program strategis daerah seperti pengembangan irigasi perpompaan, serta perluasan akses petani terhadap pupuk yang terjangkau untuk meningkatkan produksi dan penguatan cadangan pangan. Dari aspek keterjangkauan, pengendalian inflasi daerah dilakukan melalui program/kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI), serta Gelar Pangan Murah (GPM) khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Sementara

dari aspek kelancaran distribusi, dilaksanakan melalui optimalisasi Pusat Distribusi Provinsi (PDP) serta perbaikan infrastruktur dari sentra produksi ke pasar. Pengendalian inflasi juga dilakukan dengan membangun komunikasi yang efektif melalui publikasi informasi harga, edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi, serta koordinasi antar-*stakeholder* untuk mencegah kepanikan pasar.

g. Pencegahan Stunting

Pengelolaan gizi masyarakat masih menjadi isu penting mengingat status gizi sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi gizi masyarakat adalah prevalensi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar. Prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir, dengan penurunan signifikan dari 26,21 persen pada 2020 menjadi 15,9 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut menjadikan capaian prevalensi stunting Jawa Barat berada di bawah nasional dan standar WHO. Namun masih perlu dilakukan upaya pencegahan untuk menghindari adanya kasus stunting baru. Upaya tersebut dilakukan melalui intervensi berdasarkan kelompok sasaran (*continuum of care*) yaitu ibu hamil dan ibu nifas melalui pemeriksaan kehamilan minimal 6 (enam) kali selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK, kemudian pada anak usia 0-23 bulan melalui pemberian ASI ekslusif, imunisasi dasar lengkap, kemudian pada anak usia 24-59 bulan melalui intervensi korektif jika mulai ada gangguan tumbuh kembang melalui pemantauan pertumbuhan, stimulasi tumbuh kembang, dan layanan gizi, remaja putri melalui konsumsi tablet tambah darah, pendidikan gizi dan kesehatan reproduksi serta pemeriksanaan kesehatan kepada calon pengantin.

Selain intervensi sektor kesehatan, diperlukan dukungan dari lintas sektor lainnya seperti ketersediaan pangan bergizi, peningkatan akses sanitasi dan air minum layak untuk menjamin kesehatan lingkungan sekitar tempat tinggal agar proses penyerapan nutrisi pada anak bisa terlaksana secara optimal, serta perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi keluarga, jaminan perlindungan sosial, serta program keluarga bencana melalui pengaturan kelahiran yang sehat dan

perencanaan keluarga yang matang sehingga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan anak tumbuh optimal sejak dalam kandungan. Program keluarga berencana bukan hanya tentang mengatur jumlah anak, tetapi juga memastikan bahwa setiap kehamilan terjadi dalam kondisi sehat, siap secara fisik, mental, dan ekonomi.

3.5.3 Rencana Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2025-2030

Dalam mendukung proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun proyek/kegiatan strategis provinsi pada Tahun 2025-2030. Proyek/kegiatan strategis provinsi tersebut memerlukan dukungan serta kolaborasi pendanaan baik itu APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota serta Badan Usaha/Swasta. Proyek-proyek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didukung dalam penyiapan *readiness criteria* baik dokumen perencanaan ataupun lahan dan dampak sosial serta fasilitasi dalam proses percepatan pembangunan proyek oleh pemerintah provinsi. Sedangkan proyek/kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota didorong melalui mekanisme bantuan keuangan dengan *sharing* pendanaan dan bantuan yang bersifat stimulan bagi kabupaten/kota. Selain untuk mendukung proyek strategis nasional, proyek/kegiatan strategis provinsi ditujukan untuk mewujudkan program prioritas dan 9 (sembilan) langkah membangun Jawa Barat.

Tabel 3.11
Rencana Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2025-2030

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
Langkah 1. Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF *(Open Defecation Free*/bebas buang air besar sembarangan) serta penataan saluran air dan drainase dalam rangka pencegahan banjir.									
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jalan Provinsi	6.238.351.008.771		✓	✓	✓	BINA MARGA	
2	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Akses Utama menuju sentra produksi, industri, dan pariwisata unggulan		3.500.000.000.000		✓	✓	✓		APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Lahan dan kontruksi APBD Kab Kota: Dokumen Perencanaan/Lahan dan kontruksi; BUMN/BUMD/Swasta: CSR
3	Penggantian Jembatan Cihaur Sp.3 Loji (Tegalnyampai) - Balewer - Puncak Darma	Kabupaten Sukabumi	51.314.678.280		✓	✓			
4	Penggantian Jembatan Cilengka Sagaranten - Tegalbuleud	Kabupaten Sukabumi	30.505.658.835		✓	✓			
5	Penggantian Jembatan Citarum Lama Jalan Raya Dayeuhkolot (Dayeuhkolot)	Kabupaten Bandung	190.000.000.000		✓	✓			
6	Penggantian Jembatan Cisereuh Sp3. Loji (Tegalnyampai) - Balewer - Puncak Darma	Kabupaten Sukabumi	36.000.000.000		✓	✓			
7	Penggantian Jembatan Cicangon Hilir Palumbonsari - Johar - Tegalloa (Loji)	Kabupaten Karawang	110.000.000.000		✓	✓			
8	Pembangunan *Underpass* Gatot Subroto (Cimahi)	Kota Cimahi	310.000.000.000		✓	✓			APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Kontruksi/Lahan; APBD Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
9	Pembangunan *Underpass* Kebon Pedes (Kota Bogor)	Kota Bogor	280.000.000.000		✓	✓			APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Kontruksi/Lahan; APBD Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
10	Pembangunan *Underpass* Jl. Perjuangan (Bekasi)	Kota Bekasi	700.000.000.000		✓	✓			APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Kontruksi/Lahan; APBD Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
11	Pembangunan *Flyover* Citayam (Kota Depok-bogor)	Kota Depok, Kabupaten Bogor	350.000.000.000		✓	✓			APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Kontruksi/Lahan; APBD Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
12	Rekonstruksi Jalan Lingkar Purwakarta - Karawang - Cianjur - Bogor (Puncak 2)	Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta	1.730.000.000.000		✓	✓			APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Kontruksi/Lahan; APBD Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
13	Pembangunan Jalan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi	Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi	320.000.000.000		✓	✓			APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Kontruksi; APBD Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
14	Rekonstruksi Jalan Lingkar Jatigede	Kabupaten Sumedang	547.000.000.000		✓	✓			APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Kontruksi; APBD Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
15	Rekonstruksi & pembangunan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat Wilayah Barat	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung	2.042.000.000.000		✓	✓		BINA MARGA	APBD Provinsi: Dokumen Perencanaan/Kontruksi; APBD Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
16	Rekonstruksi & Pembangunan Jalur Tengah Selatan (JTS) Jawa Barat Wilayah Timur	Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran	3.174.000.000.000	✓	✓	✓			APBN: Dukungan melalui DAK; APBD Provinsi dan Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
17	Rekonstruksi Jalan Lingkar Utara Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu,	1.700.000.000.000	✓	✓	✓			APBN: Dukungan melalui DAK; APBD Provinsi dan Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
		Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan							
18	Pembangunan Jalan Tol Cikunir - Karawaci (*Elevated*)	Kota Bekasi	26.150.000.000.000		✓	✓			APBN: Dukungan melalui DAK; APBD Provinsi dan Kab/kota: Dokumen Perencanaan dan Lahan
19	Pembangunan Jalan Tol Bogor - Serpong via Parung (JORR III)	Kabupaten Bogor	12.352.000.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
20	Pembangunan Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (JORR III)	Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang	33.338.000.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
21	Pembangunan Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang	Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur	9.405.000.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
22	Pembangunan Jalan Tol Ciranjang - Padalarang	Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat	7.792.000.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
23	Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Segmen Gedebage - Nagreg)	Kabupaten Bandung	34.190.000.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
24	Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban *Extend*	Kabupaten Subang	5.470.000.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
25	Pembangunan Jalan Tol Caringin - Cisarua	Kabupaten Bogor	8.083.000.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
26	Pembangunan Jalan Tol Bandung *Inter Urban Toll Road* (BIUTR)	Kota Bandung	10.113.000.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
27	Gapura Perbatasan		44.200.000.000	✓			✓		Dukungan APBD: Fasilitasi Percepatan Pembangunan
28	Jembatan Gantung		8.739.688.635		✓				
29	Jembatan Gantung Desa		77.026.036.451					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
30	Jalan Leucir Desa		3.399.401.380.003						
31	Fasilitas Lalu Lintas Jalan Provinsi	Jalan Provinsi	1.589.167.551.083		✓			PERHUBUNGAN	

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
32	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas (CCTV)	Jalan Provinsi	73.000.000.000		✓				
33	*Bus Rapid Transit* (BRT)	Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi	3.061.407.205.791	✓	✓	✓	✓		APBN: Pembangunan Prasarana BRT (Depo, Jalur Khusus, Halte) ; APBD Provinsi/Kab/kota: Pengelolaan BRT (Subsidi dan Kelembagaan, Feeder), dukungan infrastruktur (Fasilitas lalu-lintas, Pedestrian) serta dampak sosial; BUMN/BUMD/Swasta: Pengelolaan Armada
34	Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung (LRT)	Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi	2.000.000.000.000	✓	✓	✓	✓		APBN: Pembangunan Prasarana BRT (Depo, Jalur Khusus, Halte) ; APBD Provinsi/Kab/kota: Pengelolaan BRT (Subsidi dan Kelembagaan, Feeder), dukungan infrastruktur (Fasilitas lalu-lintas, Pedestrian) serta dampak sosial; BUMN/BUMD/Swasta: Pengelolaan Armada
35	Reaktivasi Kereta Api Banjar - Cijulang	Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut	5.810.836.182.995	✓	✓	✓	✓		APBN: Pembangunan Prasarana, Kereta Api; APBD Provinsi/Kab/kota: Pengelolaan , dukungan infrastruktur, akses simpul transportasi) serta dampak sosial; BUMN/BUMD/Swasta: Pengelolaan dan Lahan
36	Reaktivasi Kereta Api Cipatat - Padalarang	Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur	2.066.628.728.038	✓	✓	✓	✓		APBN: Pembangunan Prasarana, Kereta Api; APBD Provinsi/Kab/kota: Pengelolaan , dukungan infrastruktur, akses simpul transportasi) serta dampak sosial; BUMN/BUMD/Swasta: Pengelolaan dan Lahan
37	Reaktivasi Kereta Api Rancaekek -Tanjungsari	Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang	3.000.000.000.000	✓	✓	✓	✓		APBN: Pembangunan Prasarana, Kereta Api; APBD Provinsi/Kab/kota: Pengelolaan , dukungan infrastruktur, akses simpul transportasi) serta dampak sosial; BUMN/BUMD/Swasta: Pengelolaan dan Lahan

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
38	Reaktivasi Kereta Api Bandung - Ciwidey	Kota Bandung, Kabupaten Bandung	3.000.000.000.000	✓	✓	✓	✓		APBN: Pembangunan Prasarana, Kereta Api; APBD Provinsi/Kab/kota: Pengelolaan , dukungan infrastruktur, akses simpul transportasi) serta dampak sosial; BUMN/BUMD/Swasta: Pengelolaan dan Lahan
39	Pengembangan Kawasan dan Optimalisasi BIJB	Kabupaten Majalengka	50.000.000.000	✓	✓	✓	✓		Kolaborasi dukungan untuk pengembangan Kawasan dan optimalisasi BIJB
40	Bandara Nusawiru	Kabupaten Pangandaran	872.195.273.644		✓	✓	✓		APBD: Pembangunan sarana prasarana sebagai stimulan agar dunia usaha ikut hadir dalam pengelolaan Nusawiru
41	Pelabuhan Regional Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	139.000.000.000	✓	✓				APBN: Konstruksi; APBD: Pengelolaan Pelabuhan
42	Revitalisasi Terminal B	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor,	150.000.000.000		✓				
43	Pengembangan Simpul Transportasi di Kawasan Perkotaan	Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi	3.001.500.000.000		✓		✓		APBD: Kajian dan Fasilitas Perijinan; BUMN/BUMD/Swasta: Pembangunan dan pengelolaan TOD
44	**Pembangunan Rumah Rakyat Miskin**		**22.856.171.262.056**					PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	27 Kabupaten/Kota	292.173.062.056	✓	✓	✓	✓		Kolaborasi Pendanaan
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh diluar Kewenangan Provinsi	27 Kabupaten/Kota	2.917.503.200.000		✓	✓	✓		Kolaborasi Pendanaan
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh	27 Kabupaten/Kota	19.646.495.000.000		✓	✓	✓		Kolaborasi Pendanaan

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
45	**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**625.962.902.210**						
	Penataan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	27 Kabupaten/Kota	625.962.902.210		✓				Kolaborasi Pendanaan
46	**Sanitasi Lingkungan**		**2.261.643.350.000**						
	Pembangunan Toilet & *Septictank* Individual	27 Kabupaten/Kota	6.643.350.000		✓				
	Pembangunan SPALD Regional	27 Kabupaten/Kota	50.000.000.000	✓	✓		✓		APBN
	Pembangunan IPLT	27 Kabupaten/Kota	2.205.000.000.000	✓	✓		✓		Kolaborasi Pendanaan
47	**Penyediaan Air Minum**		**6.226.338.140.000**						
	SPAM Regional Jatigede	Majalengka, Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan	4.737.500.000.000	✓	✓	✓	✓		APBD: Pembayaran availabilty payment (AP), Lahan, dan dukungan pengelolaan; Konstruksi dan Pengelolaan oleh Badan Usaha
	SPAM Regional Sinumbra	Kota Bandung, Kab. Bandung, KBB	1.242.000.000.000	✓	✓	✓	✓		APBD: Pembayaran availabilty payment (AP), Lahan, dan dukungan pengelolaan; Konstruksi dan Pengelolaan oleh Badan Usaha
	SPAM Regional Bandung Selatan	Kota Bandung, Kab. Bandung	225.000.000.000	✓	✓	✓	✓		Untuk optimalisasi SPAM dan Pembangunan IPA SPAM Tahap II
	SPAM Berbasis Masyarakat		21.838.140.000		✓				
48	**100% Elektrifikasi**		**1.564.819.843.500**						
	Listrik Desa	27 Kabupaten/Kota	1.435.069.843.500	✓	✓	✓	✓		
	Pembangunan PLTS Atap	27 Kabupaten/Kota	104.250.000.000	✓	✓			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	Revitalisasi PLTMh dan DME	27 Kabupaten/Kota	11.700.000.000		✓				
	Biogas	27 Kabupaten/Kota	13.800.000.000		✓				
TOTAL			**230.080.208.890.292**						
Langkah 2. Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan pelayanan Daerah Irigasi (DI) di Seluruh Wilayah Pertanian dan Ekosistem Pertanian Organik serta pengembangan benih dan bibit unggul melalui perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, perbaikan dan pembangunan bendung lapang, pembangunan cekdam/embung dan pompanisasi dengan tenaga surya									
49	Jaringan Irigasi (Cai Ngalir)	27 Kabupaten/Kota	4.214.005.871.306	✓	✓	✓	✓	SUMBER DAYA AIR	APBN: Melalui Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharan (TPOP); APBD Provinsi: OP Irigasi dan situ kewenangan provinsi; Rehab

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
									dan Pembangunan Jaringan Irigasi
50	Penyelamatan sumber mata air	19 Kabupaten	529.500.000.000		✓	✓	✓		Kolaborasi Pendanaan Provinsi dan Kabupaten/kota untuk pembebasan dan pengelolaan mata air
51	Normalisasi Sungai, Situ, Embung dan Pengamanan Pantai/Muara		770.349.961.546	✓	✓	✓			APBN: Pembangunan/konstruksi/lahan pada WS Kewenangan Pusat; APBD Provinsi/Kab/kota: Pembebasan lahan, serta konstruksi pada WS Kewenangan Provinsi
52	Pengembangan kawasan sentra tematik dan terintegrasi		**5.000.000.000.000**					DTPH, DKPP, Disbun	
53	Irigasi Perpompaan bertenaga surya berbasis sentra	27 Kabupaten/Kota		✓	✓	✓	✓		berpotensi bisa menaikan IP
54	Pengembangan pertanian organik	Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran			✓	✓	✓		**DTPH** - sudah ada Perda, target peningkatan 5% per tahun dari LBS **DKPP** - pengolahan dari sisa kotoran peternakan - memperbanyak UPO yang akan mengendalikan
55	Pengembangan bioindustri lokal	- Padi (Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Indramayu) - Kopi arabika (Kab. Garut, Kab. Bandung) - Hortikultura (Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat)		✓	✓	✓	✓		

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
		- Manggis, Nanas, Mangga (Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka)							
56	Penerapan pertanian presisi	27 Kab. Kota		✓	✓	✓	✓		- penerapan pertanian modern dengan pengunaan teknologi dan data agar lebih efisien
57	Pengembangan kawasan sumber bibit (ayam sentul, sapi pasundan, domba)	- Sapi Pasundan (Kab. Ciamis, Kab. Garut, Kab. Kuningan) - Domba (Kab. Garut) - Ayam Sentul (Kab. Ciamis, Kab. Majalengka) - Sapi Perah (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat)	69.500.000.000		✓	✓		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
58	Pengembangan kampung kelapa	Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Banjar Kab. Pangandaran	100.000.000.000	✓	✓	✓	✓	Dinas Perkebunan	- jika di Kabupaten Tasikmalaya sudah clear, makan akan lanjut di Kabupaten Sukabumi dan Pangandaran - aktivitas sampai pengolahan
59	Pengembangan kampung teh	Kabupaten Bandung Kabupaten Cianjur	100.000.000.000		✓	✓	✓		- aktivitas sampai dengan hilirisasi - mendongkrak pariwisata
	TOTAL		**10.783.355.832.852**						
3. Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.									
60	BOPD	27 Kabupaten/Kota	6,796,048,020,530		✓			PENDIDIKAN	Bantuan Pendidikan Untuk Operasioan Pendididkan Untuk Siswa di SMA/SMK/SLB Negeri
61	BPMU	27 Kabupaten/Kota	3,073,644,000,000		✓				Bantuan Pendidikan Untuk Operasioan Pendididkan Untuk Siswa di SMA/SMK/SLB Negeri

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
62	Penyelesaian lahan dan Bangunan	27 Kabupaten/Kota	583.270.025.579		✓				Ada 92 Lahan yang masih belum berstatus kepemilikan Pemprov Jawa Barat yang harus diselesaikan. Ada 106 lahan milik desa yang harus segera diselesaikan kepemilikannya
63	Pembangunan USB SMA/SMK/SLB	27 Kabupaten/Kota	2.712.669.500.000		✓	✓	✓		Target Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Memprioritaskan kepada Wilayah atau Kecamatan yang belum memiliki sekolah Negeri dan Wilayah yang memiliki Jumlah lulusan yang Tinggi. Penyediaan lahan dapat dialokasikan melalui APBD Kab Kota.
64	Pembangunan SMK Istimewa	27 Kabupaten/Kota	491.500.000.000		✓		✓		Target Pembangunan 10 SMK Istimewa Keterlibatan Badan Usaha yang sudah bermitra dengan Pemprov jawa Barat dalam Dunia Industrti
65	Pembangunan RKB R.Kelas Berdasarkan Rombel	27 Kabupaten/Kota	1.287.300.000.000	✓	✓		✓		APBN : Melalui Program Revitalisasi Infrastruktu Pendidikan APBD : Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk menambah Daya Tampung Jumlah RKB yang dibutuhkan 4291 Ruang Kelas Baru
66	Pembangunan RKB Pemenuhan Optimalisasi Rombel SMA/SMK/SLB	27 Kabupaten/Kota	5.181.140.000.000	✓	✓		✓		APBN : Melalui Program Revitalisasi Infrastruktu Pendidikan APBD : Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk menambah Daya Tampung Jumlah RKB yang dibutuhkan 13005 Ruang Kelas Baru
67	Pembangunan RKB R.Kelas Berdasarkan Rombel SD/SMP	27 Kabupaten/Kota	6.921.880.000	✓	✓	✓	✓		APBN : Melalui Program Revitalisasi Infrastruktu Pendidikan

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
									APBD : Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk menambah Daya Tampung Jumlah RKB yang dibutuhkan 22.489 Ruang Kelas Baru
68	Pembangunan RKB Pemenuhan Optimalisasi Rombel SD/SMP	27 Kabupaten/Kota	79.703.400.000	✓	✓	✓	✓		APBN : Melalui Program Revitalisasi Infrastruktu Pendidikan APBD : Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk menambah Daya Tampung Jumlah RKB yang dibutuhkan 257.024 Ruang Kelas Baru
69	Rehabilitasi/Revitalisasi Ruang Kelas	27 Kabupaten/Kota	219.060.000.000	✓	✓				APBN : Melalui Program Revitalisasi Infrastruktu Pendidikan
70	Pendidikan karakter pancawaluya	27 Kabupaten/Kota	59.075.000.000		✓				Peningkatan Kualitas siswa melalui Peningkatan Kompetensi baik perilaku dan tata krama juga masukan termasuk Agama dan Budaya
	TOTAL		**10.620.639.805.579**						
Langkah 4. Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan.									
71	**Penataan desa wisata**	Kab. Sukabumi, Kab. Kuningan, Kab. Subang	100.000.000.000		✓			Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
72	**Pelabuhan Perikanan Dadap**	Kab. Indramayu	223.090.000.000	✓	✓	✓	✓	Dinas Kelautan & Perikanan	- untuk menopang perekonomian dari sektor SDA Jawa Barat bagian timur - Revitalisasi dilakukan multiyears
73	Pelabuhan Perikanan Jayanti	Kab. Cianjur	84.996.167.658	✓	✓	✓	✓		- Revitalisasi dilakukan multiyears
74	Pelabuhan Perikanan Pal Jaya	Kab Bekasi	81.100.000.000	✓	✓	✓	✓		- Revitalisasi dilakukan multiyears
75	Pelabuhan Perikanan Batukaras	Kab. Pangandaran	201.900.000.000	✓	✓	✓	✓		- berat kalau dijadikan program prioritas Gubernur, karena masih ada kelengkapan taperencanaan yang belum tersedia, - Revitalisasi pelabuhan

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
									perikanan tangkap - terkendala lahan yang sudah digunakan oleh aktivitas ekonomi
76	Industri Pergaraman	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Bekasi	20.000.000.000		✓				- perlu ada lembaga yang bisa menyerap produksi garam, ketika produksi tinggi untuk menjaga harga - kendalanya di pemasaran dan kualitas
77	Revitalisasi Tambak untuk Pangan Akuatik	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Bekasi	10.000.000.000		✓				
78	Pengembangan usaha koperasi merah putih	27 Kabupaten Kota	70.000.000.000		✓			Dinas Koperasi & Usaha Kecil	- bentuk aktivitas pendampingan dan pelatihan
79	UMKM naik kelas	27 Kabupaten Kota	150.000.000.000		✓				- kegiatan yang multisektor
80	penguatan iklim investasi melalui kemudahan berusahan dan peningkatan kepatuhan	27 Kabupaten Kota	250.000.000.000		✓			DPMPTSP	- insentif tidak berupa nominal, akan tetapi bisa berupa kemudahan
TOTAL			**1.191.086.167.658**						
Langkah 5. Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat									
81	Penyempurnaan RSUD kab/kota dengan penambahan layanan khusus/unggulan	25 Kab/Kota	1.057.389.242.426	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	APBN: melalui program pengadaan alat kesehatan (SIHREN) APBD: Pengembangan RS berupa sarana prasarana (alkes) maupun pembangunan fisik untuk pengembangan layanan unggulan sesuai dengan karakteristik penyakit masyarakat (RS Pengampuan)
82	Penyempurnaan UOBK RS Provinsi dengan penambahan layanan khusus (Paviliun Jawa Barat)	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi,	5.528.440.267.056	✓	✓	✓	✓		APBN: melalui program pengadaan alat kesehatan (SIHREN) APBD: Pengembangan RS berupa sarana prasarana (alkes) maupun pembangunan fisik untuk pengembangan layanan unggulan sesuai

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
		Kabupaten Cirebon							dengan karakteristik penyakit masyarakat (RS Pengampuan)
83	Pengadaan Mobil *Ambulance* ICU	Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta	17.853.750.000		✓				Pengadaan ambulance ICU pada RS diwilayah bakorwil
84	Pengadaan *ambulance transport*	Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta	3.648.375.000		✓				Pengadaan ambulance transport diwilayah bakorwil
85	Pengadaan layanan kesehatan mobile dan operasional rutin	RS Paru, RSUD Pameungpeuk, RS Kesehatan Kerja, RSUD Al-Ihsan/RSUD Welas Asih	10.841.062.500		✓				Pengadaan mobile layanan kesehatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di UOBK RS Provinsi
86	Pengadaan dan operasional Mobil Layanan Pemeriksaan Gigi	RSUD Al-Ihsan/RSUD Welas Asih	1.843.922.250		✓				Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mendukung pelayanan langsung ke masyarakat
87	Pengadaan dan operasional Mobil *ambulance* mini ICU	RSUD Jampang Kulon	3.570.750.000		✓				Pengadaan mobil ambulance mini ICU untuk memudahkan pemberian layanan kesehatan terutama yang lokasinya jauh dari RS
88	Pengadaan *ambulance transport* di Desa	27 Kab/Kota	72.967.500.000	✓	✓				Pengadaan ambulance trasport untuk peningkatan layanan kesehatan yang lebih terjangkau untuk masyarakat desa
89	Pengembangan Puskemas Rawat Inap	27 Kab/Kota	558.050.500.000	✓	✓	✓	✓		Peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap di daerah yang sulit akses ke layanan rujukan (RS)
90	Beasiswa Dokter Spesialis dan Sub Spesialis	UOBK RS Provinsi dan Kab. Indramayu, Kab. Kuningan,	41.359.262.880	✓	✓				Peningkatan Dokter Spesialis dan sub spesialis yang nantinya akan ditempatkan di RS yang belum memiliki atau masih

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
		Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Tasik							kekurangan dokter spesialis dan sub spesialis
91	Dokter Desa	27 Kab/Kota	76.979.187.600		✓				Peningkatan layanan kesehatan masyarakat di desa yang sulit akses kesehatan
92	Pengembangan Layanan Kesehatan Tradisional	RSUD Welas Asih dan 3 Kab/Kota	12.802.781.944		✓	✓			Penambahan layanan kesehatan tradisional di rumah sakit, puskesmas atau griya sehat
	TOTAL		**7.385.746.601.656**						
Langkah 6. Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan									
93	**Revitalisasi Lumbung pangan masyarakat**	18 Kabupaten/ Kota: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Banjar	30.000.000.000		✓			Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan	- tidak ada kewenangan untuk pembangunan lumbung pangan, kewenangan provinsi adalah revitalisasi lumbung pangan - perlu ada kegiatan multipihak dengan DPMDES APBN: Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) : - Operasonal; - Pelatihan Manajemen dan Stok Kemasan; - Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Keuangan; APBD Provinsi/Kab/Kota: Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) : - Rehabilitasi Gudang;

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
									- Pengadaan Peralatan; - Pelatihan dan Pengelolaan; - Penambahan stok Cadangan Pangan BUMN/BUMD/Swasta: Pengelolaan dan Pemasaran
94	**ASRI**		5.400.000.000		✓				- tujuan utama masyarakat desa bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri
	TOTAL		**35.400.000.000**						
Langkah 7. Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan.									
95	**Peningkatan fungsi kawasan hutan**	Kab. Karawang, Kab. Purwakara, Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Garut	500.000.000.000		✓			Dinas Kehutanan	Masukan DISHUT terkait pengingkatan fungsi kawasan hutan : - 4 lokasi ini belum tentu disetujui oleh K/L - akan ada konflik sosial jika hutan produksi beralih fungsi menjadi hutan konservasi - alih fungsi ini membutuhkan proses panjang, rata-rata 5 tahun - Cikuray untuk menjadi Tahura akan sulit karena sudah terbagi 100% KHDPK (Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus) - pengurusan Tahura 11.000 ha membutuhkan kajian mengingat akan berat pada saat pengelolaan
96	**Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan**	Kab. Tasikmalaya Kab. Cianjur Kab. Ciamis Kab. Sukabumi Kab. Pangandaran Kab. Garut	50.000.000.000		✓	✓	✓		
	TOTAL		**550.000.000.000**						

No	Proyek/Kegiatan Strategis Provinsi	Lokasi	Indikasi Anggaran (5 Tahun)	Sumber Pendanaan				Sektor Penanggung Jawab	Keterangan
				APBN	APBD Provinsi	APBD Kab/Kota	Badan Usaha		
Langkah 8. Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)									
97	**Pengelolaan Sampah**		**11.177.260.580.046**						
	TPPAS Lulut Nambo	Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok	1.847.090.625.000		✓	✓	✓		APBD: Tipping Fee
	TPPAS Legok Nangka	Cekungan Bandung	6.415.846.818.000		✓	✓	✓		APBD: Tipping Fee, Transmisi Listrik, Reservoir, Transmisi air baku, pembangunan pagar
	Sarimukti	Cekungan Bandung	267.544.837.450		✓	✓	✓		Diarahkan melalui skema B to B atau KPBU; APBD: Kompensasi Tegakan, Pembangunan Akses Jalan, Lahan Urug, serta Tipping Fee
	TPPAS Cirebon Raya	Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu	13.000.000.000	✓	✓	✓	✓		Diarahkan melalui skema B to B atau KPBU; APBD: Kompensasi Tegakan, Pembangunan Akses Jalan, Lahan Urug, serta Tipping Fee
	TPPAS Bekarpur	Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta	300.000.000.000	✓	✓	✓	✓		Diarahkan melalui skema B to B atau KPBU; APBD: Kompensasi Tegakan, Pembangunan Akses Jalan, Lahan Urug, serta Tipping Fee
	TPPAS Bersama Sukabumi	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi	185.000.000.000	✓	✓	✓	✓		Diarahkan melalui skema B to B atau KPBU; APBD: Kompensasi Tegakan, Pembangunan Akses Jalan, Lahan Urug, serta Tipping Fee
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah		2.148.778.299.596	✓	✓	✓	✓		
	TOTAL		**11.177.260.580.046**						
Langkah 9. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.									
98	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RT, RW, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan		3.104.622.500.000					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	TOTAL		**3.104.622.500.000**						
	GRAND TOTAL		**274.928.320.378.083**						

Sumber: Hasil Perumusan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

Jabar Istimewa

Lembur Diurus, Kota Ditata

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Dasar Perumusan Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Penjabaran program ke kegiatan dan subkegiatan dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Program perangkat daerah ini merupakan input timbal-balik dari Renstra PD yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang ditunjang dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dimana secara vertikal menghubungkan proses perencanaan *"bottom-up"* dan *"top-down"*. Pencapaian kinerja program/kegiatan merupakan hasil dari sinergitas program/kegiatan lainnya yang saling menunjang.

Gambar 4.1
Dasar Perumusan Program Perangkat Daerah

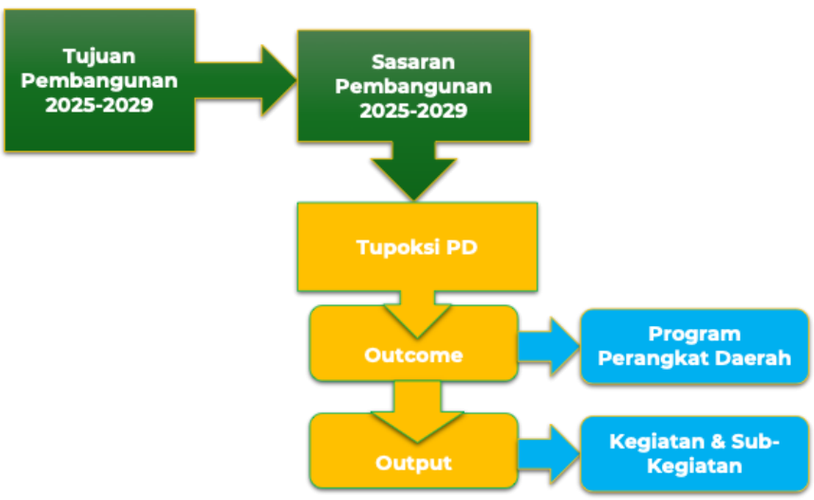

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Pembangunan Provinsi Jawa Barat periode tahun 2025 sampai dengan 2029 ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah. Berbagai program dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Setiap program dilengkapi dengan indikator dan target indikator yang disertai dengan pagu indikatif. Program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada nomenklatur program yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.2 Pertimbangan Kerangka Pendanaan dalam Program Perangkat Daerah

Pada subbab ini selain menguraikan Program PD juga menjelaskan kerangka pendanaan yang akan digunakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Kerangka pendanaan ini penting untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Proyeksi belanja daerah telah dilakukan dalam bentuk kerangka pendanaan. Belanja Daerah yang telah diproyeksikan pada Bab II dokumen ini dialokasikan untuk mendanai program perangkat daerah. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai target pembangunan nasional.

Kerangka pendanaan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan optimal. Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Kerangka pendanaan untuk RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan analisis keuangan daerah yang mencakup berbagai sumber pendanaan, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sumber utama pendanaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain.
2. Transfer dari Pemerintah Pusat: Termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
3. Pinjaman dan Hibah: Sumber pendanaan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis, terutama yang memerlukan investasi besar.
4. Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dana swadaya masyarakat.

Dalam kerangka pendanaan ini, prioritas penggunaan anggaran akan difokuskan pada:

1. Pembangunan Infrastruktur: Memperbaiki dan membangun fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat.
2. Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendukung program-program yang dapat meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan UMKM dan sektor industri.

4. Pelestarian Lingkungan Hidup: Mengalokasikan dana untuk program-program yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Proses penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua perangkat daerah. Setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang mengacu pada kerangka pendanaan ini pada setiap tahunnnya. RKA tersebut kemudian akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan sebelum diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Program perangkat daerah yang disertai dengan indikator target dan pagu indikatif tahun 2025 sampai dengan 2030 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Program dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**11.386.411.421.604**		**11.514.698.526.202**		**11.990.194.020.694**		**12.340.367.316.456**		**12.706.665.002.323**	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**5.691.219.784.305**		**5.748.131.982.148**		**6.005.613.301.969**		**6.063.669.434.989**		**6.171.725.568.008**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan (Nilai)	83,46	83,70	83,90	5.621.286.484.443	84,10	5.677.499.349.291	84,30	5.931.816.757.149	84,50	5.989.159.500.577	84,70	6.095.887.847.596	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Poin)	95	95,5	96	2.211.445.454	96,5	2.233.559.908	97	2.333.609.795	97,5	2.356.168.750	98	2.398.156.277	1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Poin)	95	95,5	96	2.281.588.794	96,5	2.304.404.682	97	2.407.627.983	97,5	2.430.902.470	98	2.474.221.771	1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Poin)	95	95,5	96	2.902.194.488	96,5	2.931.216.433	97	3.062.517.085	97,5	3.092.122.371	98	3.147.224.778	1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Poin)	95	95,5	96	3.151.296.086	96,5	3.182.809.047	97	3.325.379.517	97,5	3.357.525.888	98	3.417.357.854	1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Poin)	95	95,5	96	2.960.577.626	96,5	2.990.183.402	97	3.124.125.415	97,5	3.154.326.267	98	3.210.537.165	1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas	95	95,5	96	3.590.175.219	96,5	3.626.076.971	97	3.788.503.145	97,5	3.825.126.523	98	3.893.291.251	1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidikan Wilayah VI	Pendidikan Wilayah VI (Poin)													
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Poin)	95,0	95,5	96,0	3.155.147.348	96,5	3.186.698.821	97,0	3.329.443.529	97,5	3.361.629.187	98,0	3.421.534.275	1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Poin)	95,0	95,5	96,0	3.766.824.096	96,5	3.804.492.337	97,0	3.974.910.433	97,5	4.013.335.805	98,0	4.084.854.471	1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (Poin)	95,0	95,5	96,0	2.580.765.748	96,5	2.606.573.406	97,0	2.723.332.026	97,5	2.749.658.417	98,0	2.798.658.031	1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (Poin)	95	95,5	96	3.183.398.526	96,5	3.215.232.512	97	3.359.255.355	97,5	3.391.729.203	98	3.452.170.681	1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI (Poin)	95	95,5	96	2.624.552.084	96,5	2.650.797.605	97	2.769.537.200	97,5	2.796.310.256	98	2.846.141.217	1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII (Poin)	95	95,5	96	2.636.937.473	96,5	2.663.306.848	97	2.782.606.781	97,5	2.809.506.180	98	2.859.572.295	1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII (Poin)	95	95,5	96	2.735.473.345	96,5	2.762.828.078	97	2.886.585.957	97,5	2.914.490.520	98	2.966.427.483	1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	95,5	96	3.419.662.767	96,5	3.453.859.395	97	3.608.571.270	97,5	3.643.455.250	98	3.708.382.550	1.01.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Teknologi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bidang Pendidikan UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Poin)													Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMK PPN LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMK PPN LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT (Poin)	95	95,5	96	261.667.213	96,5	264.283.886	97	276.122.195	97,5	278.791.462	98	283.759.597	1.01.0.00.0.00.01.0026 - SMK PPN LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 CIAMIS	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 CIAMIS (Poin)	95	95,5	96	534.608.072	96,5	539.954.153	97	564.140.812	97,5	569.594.349	98	579.744.665	1.01.0.00.0.00.01.0047 - SMKN 1 CIAMIS
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 CIBADAK KAB. SUKABUMI	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 CIBADAK KAB. SUKABUMI (Poin)	95	95,5	96	2.084.786.846	96,5	2.105.634.714	97	2.199.954.331	97,5	2.221.221.242	98	2.260.803.970	1.01.0.00.0.00.01.0024 - SMKN 1 CIBADAK KAB. SUKABUMI
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 CIBINONG KAB. BOGOR	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 CIBINONG KAB. BOGOR (Poin)	95	95,5	96	882.827.348	96,5	891.655.621	97	931.596.365	97,5	940.602.087	98	957.363.855	1.01.0.00.0.00.01.0015 - SMKN 1 CIBINONG KAB. BOGOR
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 CIKARANG BARAT KAB. BEKASI	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 CIKARANG BARAT KAB. BEKASI (Poin)	95	95,5	96	334.405.079	96,5	337.749.130	97	352.878.235	97,5	356.289.501	98	362.638.671	1.01.0.00.0.00.01.0019 - SMKN 1 CIKARANG BARAT KAB. BEKASI
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 GARUT	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 GARUT (Poin)	95	95,5	96	1.326.274.224	96,6	1.339.536.966	97	1.399.540.068	97,5	1.413.069.391	98	1.438.250.647	1.01.0.00.0.00.01.0041 - SMKN 1 GARUT
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 KARAWANG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 KARAWANG (Poin)	95	95,5	96	487.386.678	96,5	492.260.544	97	514.310.820	97,5	519.282.652	98	528.536.401	1.01.0.00.0.00.01.0020 - SMKN 1 KARAWANG
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 KOTA BANJAR	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 KOTA BANJAR (Poin)	95	95,5	96	383.215.802	96,5	387.047.960	97	404.385.352	97,5	408.294.537	98	415.570.449	1.01.0.00.0.00.01.0048 - SMKN 1 KOTA BANJAR
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	95,5	96	440.106.095	96,5	444.507.156	97	464.418.371	97,5	468.907.893	98	477.263.951	1.01.0.00.0.00.01.0018 - SMKN 1 KOTA BEKASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bidang Pendidikan SMKN 1 KOTA BEKASI	Pada SMKN 1 KOTA BEKASI (Poin)													
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 KOTA CIMAHI	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 KOTA CIMAHI (Poin)	95	95,5	96	708.843.116	96,5	715.931.547	97	748.000.922	97,5	755.231.830	98	768.690.254	1.01.0.00.0.00.01.0032 - SMKN 1 KOTA CIMAHI
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 KOTA CIREBON	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 KOTA CIREBON (Poin)	95	95,5	96	1.535.121.219	96,5	1.550.472.431	97	1.619.924.157	97,5	1.635.583.929	98	1.664.730.451	1.01.0.00.0.00.01.0037 - SMKN 1 KOTA CIREBON
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 KOTA DEPOK	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 KOTA DEPOK (Poin)	95	95,5	96	162.832.678	96,5	164.461.005	97	171.827.856	97,5	173.488.912	98	176.580.529	1.01.0.00.0.00.01.0017 - SMKN 1 KOTA DEPOK
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 KOTA SUKABUMI	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 KOTA SUKABUMI (Poin)	95	95,5	96	573.942.757	96,5	579.682.184	97	605.648.417	97,5	611.503.207	98	622.400.350	1.01.0.00.0.00.01.0023 - SMKN 1 KOTA SUKABUMI
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 KOTA TASIKMALAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 KOTA TASIKMALAYA (Poin)	95	95,5	96	358.298.207	96,5	361.881.189	97	378.091.263	97,5	381.746.263	98	388.549.079	1.01.0.00.0.00.01.0044 - SMKN 1 KOTA TASIKMALAYA
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 KUNINGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 KUNINGAN (Angka)	95	95,5	96	793.434.785	96,5	801.369.133	97	837.265.591	97,5	845.359.420	98	860.423.940	1.01.0.00.0.00.01.0039 - SMKN 1 KUNINGAN
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 LOSARANG KAB. INDRAMAYU	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 LOSARANG KAB. INDRAMAYU (Poin)	95	95,5	96	248.083.528	96,5	250.564.363	97	261.788.121	97,5	264.318.821	98	269.029.050	1.01.0.00.0.00.01.0036 - SMKN 1 LOSARANG KAB. INDRAMAYU
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 MAJALENGKA	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 MAJALENGKA (Poin)	95	95,5	96	252.500.000	96,5	255.025.000	97	266.448.567	97,5	269.024.320	98	273.818.402	1.01.0.00.0.00.01.0035 - SMKN 1 MAJALENGKA
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 MUNDU CIREBON	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 MUNDU CIREBON (Poin)	95	95,5	96	1.703.551.062	96,5	1.720.586.573	97	1.797.658.377	97,5	1.815.036.301	98	1.847.380.710	1.01.0.00.0.00.01.0038 - SMKN 1 MUNDU CIREBON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 PACET KAB. CIANJUR	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 PACET KAB. CIANJUR (Poin)	95	95,5	96	2.956.292.792	96,5	2.985.855.720	97	3.119.603.879	97,5	3.149.761.022	98	3.205.890.565	1.01.0.00.0.00.01.0025 - SMKN 1 PACET KAB. CIANJUR
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 PANGANDARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 PANGANDARAN (Poin)	95	95,5	96	327.825.567	96,5	331.103.822	97	345.935.258	97,5	349.279.407	98	355.503.654	1.01.0.00.0.00.01.0049 - SMKN 1 PANGANDARAN
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 PURWAKARTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 PURWAKARTA (Poin)	95	95,5	96	490.752.566	96,5	495.660.092	97	517.862.647	97,5	522.868.814	98	532.186.469	1.01.0.00.0.00.01.0021 - SMKN 1 PURWAKARTA
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 RAJAPOLAH KAB. TASIKMALAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 RAJAPOLAH KAB. TASIKMALAYA (Poin)	95	95,5	96	801.645.700	96,5	809.662.157	97	845.930.093	97,5	854.107.681	98	869.328.097	1.01.0.00.0.00.01.0046 - SMKN 1 RAJAPOLAH KAB. TASIKMALAYA
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 1 SUMEDANG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 1 SUMEDANG (Poin)	95	95,5	96	208.630.082	96,5	210.716.383	97	220.155.194	97,5	222.283.430	98	226.244.577	1.01.0.00.0.00.01.0034 - SMKN 1 SUMEDANG
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 11 KOTA BANDUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 11 KOTA BANDUNG (Poin)	95	95,5	96	505.522.053	96,5	510.577.273	97	533.448.027	97,5	538.604.857	98	548.202.933	1.01.0.00.0.00.01.0031 - SMKN 11 KOTA BANDUNG
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 2 GARUT	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 2 GARUT (Poin)	95	95,5	96	273.407.000	96,5	276.141.070	97	288.510.509	97,5	291.299.534	98	296.490.566	1.01.0.00.0.00.01.0042 - SMKN 2 GARUT
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 2 KOTA BANDUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 2 KOTA BANDUNG (Poin)	95	95,5	96	314.879.729	96,5	318.028.526	97	332.274.268	97,5	335.486.356	98	341.464.809	1.01.0.00.0.00.01.0027 - SMKN 2 KOTA BANDUNG
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 2 KOTA TASIKMALAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 2 KOTA TASIKMALAYA (Poin)	95	95,5	96	197.605.910	96,5	199.581.969	97	208.522.026	97,5	210.537.804	98	214.289.642	1.01.0.00.0.00.01.0045 - SMKN 2 KOTA TASIKMALAYA
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 2 SUBANG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 2 SUBANG (Poin)	95	95,5	96	3.895.631.268	96,5	3.934.587.580	97	4.110.833.151	97,5	4.150.572.486	98	4.224.536.744	1.01.0.00.0.00.01.0022 - SMKN 2 SUBANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 3 KOTA BANDUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 3 KOTA BANDUNG (Poin)	95	95,5	96	1.919.007.215	96,5	1.938.197.288	97	2.025.016.727	97,5	2.044.592.519	98	2.081.027.679	1.01.0.00.0.00.01.0028 - SMKN 3 KOTA BANDUNG
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 3 KOTA BOGOR	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 3 KOTA BOGOR (Poin)	95	95,5	96	971.490.228	96,5	981.205.130	97	1.025.157.147	97,5	1.035.067.319	98	1.053.512.482	1.01.0.00.0.00.01.0016 - SMKN 3 KOTA BOGOR
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 3 KUNINGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 3 KUNINGAN (Poin)	95	95,5	96	115.744.347	96,5	116.901.790	97	122.138.279	97,5	123.318.987	98	125.516.562	1.01.0.00.0.00.01.0040 - SMKN 3 KUNINGAN
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 4 GARUT	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 4 GARUT (Poin)	95	9,5	96	141.307.589	96,5	142.720.665	97	149.113.682	97,5	150.555.161	98	153.238.092	1.01.0.00.0.00.01.0043 - SMKN 4 GARUT
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 5 PANGALENGAN KAB. BANDUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 5 PANGALENGAN KAB. BANDUNG (Poin)	95	95,5	96	507.588.985	96,5	512.664.874	97	535.629.140	97,5	540.807.055	98	550.444.374	1.01.0.00.0.00.01.0033 - SMKN 5 PANGALENGAN KAB. BANDUNG
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 6 KOTA BANDUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 6 KOTA BANDUNG (Poin)	95	95,5	96	545.832.439	96,5	551.290.763	97	575.985.233	97,5	581.553.270	98	591.916.697	1.01.0.00.0.00.01.0029 - SMKN 6 KOTA BANDUNG
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan SMKN 9 KOTA BANDUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada SMKN 9 KOTA BANDUNG (Poin)	95	95,5	96	1.488.212.629	96,5	1.503.094.755	97	1.570.424.249	97,5	1.585.605.506	98	1.613.861.400	1.01.0.00.0.00.01.0030 - SMKN 9 KOTA BANDUNG
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**5.690.695.514.820**		**5.762.025.460.350**		**5.979.994.224.184**		**6.272.065.521.981**		**6.530.261.209.883**	
MENINGKATNYA PARTISIPASI SEKOLAH	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB (%)	0,06	0,11	0,11	1.761.860.554.871	0,11	1.783.944.572.040	0,11	1.851.428.514.239	0,11	1.941.854.877.318	0,11	2.021.793.225.233	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi siswa	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB (Nilai)	67,19	68,05	68,92	40.420.898.216	69,80	40.927.553.415	70,69	42.475.781.254	71,59	44.550.357.932	72,50	46.384.316.821	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB (Nilai)	65,12	65,61	66,12	112.170.814.699	66,64	113.576.818.251	67,17	117.873.258.599	67,71	123.630.353.727	68,26	128.719.717.687	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,80		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%)	82,16	82,68	83,18	120.077.449.244	83,66	121.582.558.399	84,12	126.181.843.865	84,56	132.344.741.941	84,98	137.792.842.182	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (%)	0,6	0,11	0,11	477.178.933.873	0,11	483.160.126.729	0,11	501.437.348.217	0,11	525.928.250.978	0,11	547.578.599.826	1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (%)	0,06	0,11	0,11	282.214.481.162	0,11	285.751.894.737	0,11	296.561.459.480	0,11	311.045.936.738	0,11	323.850.445.767	1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (%)	0,06	0,11	0,11	483.343.021.788	0,11	489.401.478.321	0,11	507.914.800.760	0,11	532.722.071.380	0,11	554.652.094.464	1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (%)	0,06	0,11	0,11	366.737.748.210	0,11	371.334.617.526	0,11	385.381.648.056	0,11	404.204.227.790	0,11	420.843.688.631	1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
Meningkatnya Partisipasi Sekolah	Persentase penurunan angka putus	0,06	0,11	0,11	192.166.960.808	0,11	194.575.674.965	0,11	201.936.180.335	0,11	211.799.026.360	0,11	220.517.939.629	1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (%)													
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (%)	0,06	0,11	0,11	289.521.930.720	0,11	293.150.939.423	0,11	304.240.398.906	0,11	319.099.926.327	0,11	332.235.985.684	1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (%)	0,06	0,11	0,11	251.335.445.113	0,11	254.485.805.832	0,11	264.112.621.418	0,11	277.012.251.954	0,11	288.415.731.191	1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (%)	0,06	0,11	0,11	319.749.374.100	0,11	323.757.268.280	0,11	336.004.519.188	0,11	352.415.450.755	0,11	366.922.976.133	1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (%)	0,06	0,11	0,11	188.916.581.253	0,11	191.284.553.571	0,11	198.520.560.765	0,11	208.216.583.144	0,11	216.788.021.648	1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (%)	0,06	0,11	0,11	257.481.406.756	0,11	260.708.803.947	0,11	270.571.026.200	0,11	283.786.094.277	0,11	295.468.425.332	1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI (%)	0,06	0,11	0,11	195.799.208.214	0,11	198.253.450.727	0,11	205.753.080.827	0,11	215.802.349.620	0,11	224.686.063.592	1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII (%)	0,06	0,11	0,11	180.363.246.261	0,11	182.624.006.918	0,11	189.532.398.647	0,11	198.789.426.593	0,11	206.972.787.013	1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persentase penurunan angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII (%)	0,06	0,11	0,11	106.150.164.727	0,11	107.480.702.523	0,11	111.546.535.974	0,11	116.994.625.104	0,11	121.810.822.831	1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan I	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan I (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan I (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan II	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan II (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan II (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan III	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan III (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan III (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan IV	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan IV (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan IV (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan V	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan V (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan V (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan VI	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan VI (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan VI (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan VII	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan VII (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan VII (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan VIII	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pendidikan VIII (Nilai)													
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan VIII (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan IX	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan IX (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan IX (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan X	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan X (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan X (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan XI	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan XI (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan XI (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan XII	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan XII (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	pada Cabang Dinas Pendidikan XII (Nilai)													
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa Cabang Dinas Pendidikan XIII	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan XIII (Nilai)	67,19	68,05	68,92	19.301.020	69,8	19.542.948	70,69	20.282.228	71,59	21.272.841	72,5	22.148.558	1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan XIII (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Nilai Kompetensi Literasi SMA/SMK/SLB pada UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Nilai)	67,19	68,05	68,92	349.492.056	69,8	353.872.759	70,69	367.259.234	71,59	385.196.690	72,5	401.053.687	1.01.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
	Nilai Kompetensi Numerasi SMA/SMK/SLB pada UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Nilai)	69,01	69,22	69,44		69,67		69,91		70,16		70,42		1.01.0.00.0.00.01.0014 - UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Nilai)	65,12	65,61	66,12	4.293.426.906	66,64	4.347.242.807	67,17	4.511.692.469	67,71	4.732.049.852	68,26	4.926.849.294	1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang	65,12	65,61	66,12	3.865.015.160	66,64	3.913.461.140	67,17	4.061.501.493	67,71	4.259.870.918	68,26	4.435.232.654	1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan Wilayah II (Nilai)													
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Nilai)	65,12	65,61	66,12	7.404.952.011	66,64	7.497.769.281	67,17	7.781.398.625	67,71	8.161.453.038	68,26	8.497.427.204	1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Nilai)	65,12	65,61	66,12	9.985.968.904	66,64	10.111.137.895	67,17	10.493.627.046	67,71	11.006.150.496	68,26	11.459.229.405	1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas Pendidikan Wilayah IV (Nilai)													
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Nilai)	65,12	65,61	66,12	2.607.129.241	66,64	2.639.808.267	67,17	2.739.668.247	67,71	2.873.477.483	68,26	2.991.766.983	1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (Nilai)	65,12	65,61	66,12	3.209.280.909	66,64	3.249.507.597	67,17	3.372.431.586	67,71	3.537.145.871	68,26	3.682.755.927	1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Nilai)	65,12	65,61	66,12	7.452.525.164	66,64	7.545.938.739	67,17	7.831.390.261	67,71	8.213.886.336	68,26	8.552.018.970	1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas Pendidikan Wilayah VII (Nilai)													
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Nilai)	65,12	65,61	66,12	3.423.428.525	66,64	3.466.339.443	67,17	3.597.465.855	67,71	3.773.171.129	68,26	3.928.497.394	1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (Nilai)	65,12	65,61	66,12	4.616.545.326	66,64	4.674.411.351	67,17	4.851.237.307	67,71	5.088.178.535	68,26	5.297.638.362	1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (Nilai)	65,12	65,61	66,12	4.280.409.526	66,64	4.334.062.261	67,17	4.498.013.323	67,71	4.717.702.597	68,26	4.911.911.421	1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI (Nilai)	65,12	65,61	66,12	3.195.101.502	66,64	3.235.150.458	67,17	3.357.531.338	67,71	3.521.517.874	68,26	3.666.484.588	1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII (Nilai)	65,12	65,61	66,12	3.806.670.244	66,64	3.854.384.900	67,17	4.000.190.489	67,71	4.195.565.398	68,26	4.368.279.935	1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Nilai Iklim Inklusivitas SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII (Nilai)	65,12	65,61	66,12	3.997.449.629	66,64	4.047.555.607	67,17	4.200.668.553	67,71	4.405.835.091	68,26	4.587.205.585	1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
	Nilai Iklim Keamanan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII (Nilai)	72,22	72,71	73,22		73,74		74,27		74,81		75,36		1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
	Nilai Iklim Kebhinekaan SMA/SMK/SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII (Nilai)	69,65	70,15	70,66		71,18		71,71		72,25		72,8		1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0001 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas Pendidikan Wilayah II (%)													
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Dinas Pendidikan Wilayah X (%)													
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0011 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0012 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII
Lulusan SMK Terserap di Dunia Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII (%)	82,16	82,68	83,18	189.922.034	83,66	192.302.609	84,12	199.577.128	84,56	209.324.754	84,98	217.941.812	1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII (%)	84,91	86,42	87,14		87,34		87,54		87,74		87,94		1.01.0.00.0.00.01.0013 - CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN					**4.496.122.479**		**4.541.083.704**		**4.586.494.541**		**4.632.359.486**		**4.678.224.432**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TENAGA KEPENDIDIKAN														
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG PROFESIONAL	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,72	0,75	0,76	4.496.122.479	0,77	4.541.083.704	0,78	4.586.494.541	0,79	4.632.359.486	0,80	4.678.224.432	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**2.639.658.480.804**		**2.683.312.633.442**		**2.729.512.571.931**		**3.197.273.270.862**		**2.814.032.555.916**	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**1.799.311.934.812**		**1.915.646.373.293**		**1.978.971.053.663**		**2.025.521.904.434**		**2.051.483.619.785**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan (Nilai)	89,69	89,70	89,71	991.169.000.000	89,72	991.169.000.000	89,73	991.169.000.000	89,74	991.169.000.000	89,75	991.169.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada Laboratorium Kesehatan (Poin)	93,09	92,70	92,80	20.208.080.556	92,90	24.002.921.888	93,00	25.351.766.456	93,10	26.785.367.619	93,20	28.309.694.641	1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum (IKP/ ES III) (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PELATIHAN KESEHATAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola UPTD Pelatihan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada UPTD Pelatihan Kesehatan (Poin)	94,69	-	90,00	3.832.424.490	90,50	8.212.359.633	91,00	9.185.838.415	91,50	10.280.034.900	92,00	11.510.553.003	1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PELATIHAN KESEHATAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola RSUD Pameungpeuk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada RSUD Pameungpeuk (Poin)	86,95	87,00	87,05	54.060.381.250	87,10	64.540.240.084	87,15	69.698.261.896	87,20	73.356.283.708	87,25	78.514.305.521	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola RSUD Jampangkulon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada RSUD Jampangkulon (Poin)	87,75	83,55	88,00	94.797.793.112	88,37	115.207.000.000	89,00	124.309.000.000	89,00	126.811.000.000	90,00	132.713.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola RS Jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan pada RS Jiwa (Poin)	90,08	89,00	89,50	78.090.496.740	90,00	93.969.262.959	90,50	97.009.012.701	90,75	100.226.000.000	91,00	103.636.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola RSUD Welas Asih	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada RSUD Welas Asih (Poin)	97,10	97,15	97,15	507.300.000.000	97,20	553.947.000.000	97,25	581.645.000.000	97,30	610.727.000.000	97,35	610.727.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0008 - RSUD AL IHSAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola RS Paru	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada RS Paru (Poin)	95,75	90,30	90,40	25.298.129.900	90,50	29.800.000.000	90,60	44.120.000.000	90,70	47.462.000.000	90,80	53.828.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola RSUD Kesehatan Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada RSUD Kesehatan Kerja (Poin)	87,00	86,00	87,00	24.555.628.764	87,00	34.798.588.729	87,00	36.483.174.195	88,00	38.705.218.207	89,00	41.076.066.620	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**812.495.364.040**		**742.256.027.553**		**722.902.803.513**		**1.143.087.651.673**		**733.860.221.376**	
Meningkatnya Kesehatan Keluarga	cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar (%)	90,8	35	45	618.329.838	55	618.329.838	70	618.329.838	85	618.329.838	85	618.329.838	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase balita dipantau pertumbuhanny a (%)	81,35	83,93	87		89,1		92		94		97		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	98,8	91	92		93		94		95		96		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan 6 kali (ANC 6x) (%)	895	80	82		85		88		90		92		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (%)	91,3	88	89		90		91		92		93		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Masyarakat yang	Persentase Penduduk	0	5	10	159.167.006	15	159.167.006	20	159.167.006	25	159.167.006	30	159.167.006	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berperilaku Hidup Sehat	dengan aktivitas fisik cukup (%)													
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan (%)	0	40	45	211.260.031	50	211.260.031	55	211.260.031	60	211.260.031	65	211.260.031	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Barat	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	97,73	98	98,2	429.652.000.000	98,4	429.652.000.000	98,6	429.652.000.000	98,8	429.652.000.000	99	429.652.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Fasilitas Kesehatan	Persentase kabupaten/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah (%)	67	65	70	36.804.437.211	76	36.804.437.211	83	36.804.437.211	90	36.804.437.211	90	36.804.437.211	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak menular di Wilayah Jawa Barat	Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate) (Persentase)	83	90	90	2.536.076.615	90	2.536.076.615	90	2.536.076.615	90	2.536.076.615	90	2.536.076.615	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka populasi bebas penyakit tidak menular (%)	51,85	62,69	74,07		85,19		92,59		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (%)	0	60	63		66		69		72		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa (%)	0	15	20		25		30		36		36		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Terkendalinya Penyakit Kejiwaan di Wilayah Jawa Barat	Persentase penduduk usia â‰¥7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	-	10	15	39.586.296	20	39.586.296	25	39.586.296	30	39.586.296	30	39.586.296	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kekebalan Kelompok Masyarakat Jawa Barat	Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kekebalan kelompok (%)	22,22	25,93	29,63	817.941.000	33,33	817.941.000	37,04	817.941.000	44,44	817.941.000	55,55	817.941.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan provinsi dalam kesiapsiagaan dan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang	100	100	100	765.892.912	100	765.892.912	100	765.892.912	100	765.892.912	100	765.892.912	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
respon terhadap bencana dan KLB	terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (%)													
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan (%)	100	100	100	91.517.000	100	91.517.000	100	91.517.000	100	91.517.000	100	91.517.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	0	60	63	2.094.424.766	66	2.094.424.766	69	2.094.424.766	72	2.094.424.766	75	2.094.424.766	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD Pelatihan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada UPTD Pelatihan Kesehatan (Poin)	94,69	92,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PELATIHAN KESEHATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Indikator Nasional Mutu (INM) di Laboratorium Kesehatan (%)	-	80	82	20.378.610.000	84	41.201.393.244	86	37.558.075.524	88	96.705.844.833	90	38.223.420.933	1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Pameungpeuk	Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Pameungpeuk (%)	-	46,2	46,2	41.600.000.000	54,0	24.637.783.244	62,0	22.019.465.524	69,0	82.192.234.833	77,0	23.734.810.933	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT
Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Jampangkulon	Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Jampangkulon (%)	-	75,0	76,9	89.448.323.170	85,0	37.837.783.244	92,0	35.219.465.524	92,0	95.392.234.833	92,0	36.934.810.933	1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI
Meningkatnya kualitas pelayanan RS Jiwa	Indikator Nasional Mutu (INM) di RS Jiwa (%)	-	-	81,8	28.253.145.834	82,0	29.837.783.244	82,0	27.219.465.524	91,0	87.392.234.833	91,0	28.934.810.933	1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT
Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Welas Asih	Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD Welas Asih (%)	69	76,9	84,6	99.787.350.191	92	28.237.783.244	92	25.619.465.524	100	85.792.234.833	100	27.334.810.933	1.02.0.00.0.00.01.0008 - RSUD AL IHSAN
Meningkatnya kualitas pelayanan RS Paru	Indikator Nasional Mutu (INM) di RS Paru (%)	-	-	81,8	11.300.000.000	82	34.937.783.244	82	32.319.465.524	99	92.492.234.833	91	34.034.810.933	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Kesehatan Kerja	Indikator Nasional Mutu (INM) di RSUD	-	61,00	69,20	47.937.302.170	77,00	71.775.085.414	77,00	69.156.767.694	77,00	129.330.000.000	85,00	70.872.113.103	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kesehatan Kerja (%)													KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					**27.148.668.938**		**24.860.232.596**		**27.088.714.755**		**28.113.714.755**		**28.138.714.755**	
Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar (%)	59,85	60	62	22.345.182.510	62,5	21.655.644.270	63	22.345.182.510	63,5	22.345.182.510	64	22.345.182.510	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	100	100	1.313.486.428	100	189.588.326	100	703.532.245	100	703.532.245	100	703.532.245	1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PELATIHAN KESEHATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Pameungpeuk	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan rumah sakit yang ditingkatkan kompetensinya (%)	-	-	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	1.500.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT
Meningkatnya kualitas pelayanan RS Paru	Persentase sumber daya manusia yang memiliki sertifikat uji kompetensi (%)	60	-	61	1.000.000.000	62	1.500.000.000	63	2.000.000.000	64	2.500.000.000	65	3.000.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT
Meningkatnya kualitas SDM pada RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%)	-	100	100	490.000.000	100	515.000.000	100	540.000.000	100	565.000.000	100	590.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					**213.062.442**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	
Meningkatnya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang sesuai standar	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK) dan Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional	92	93	94	213.062.442	96	150.000.000	98	150.000.000	98	150.000.000	100	150.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(PBOT) yang sesuai standar perizinan (%)													
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**489.450.572**		**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**	
Meningkatnya Masyarakat yang berperilaku Hidup Sehat	Persentase penduduk yang merapkan perilaku hidup sehat (%)	15	17	19	489.450.572	21	400.000.000	23	400.000.000	25	400.000.000	27	400.000.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**3.067.726.515.811**		**1.555.349.437.567**		**2.197.171.796.033**		**2.139.968.119.151**		**3.330.839.335.506**	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**337.895.903.243**		**331.869.809.366**		**337.831.792.416**		**346.756.973.816**		**357.667.343.396**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Angka)	81,57	82,00	83,00	178.184.266.759	83,25	178.370.883.849	83,3	184.496.474.274	83,35	188.092.153.539	83,40	192.699.329.457	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan infrastruktur jalan, jembatan, dan penataan ruang yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi (Poin)	65,12	65,50	66,00	5.178.957.520	66,50	10.357.930.172	67,00	10.224.620.819	67,50	9.950.076.796	68,00	9.730.442.064	1.03.0.00.0.00.01.0007 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan infrastruktur jalan, jembatan, dan penataan ruang yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I (Poin)	65,12	65,50	66,00	7.588.753.441	66,50	7.554.510.270	67,00	7.314.735.368	67,50	7.457.293.335	68,00	7.639.954.130	1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan infrastruktur jalan, jembatan, dan penataan ruang yang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD Pengelolaan	65,12	65,50	66,00	5.916.306.805	66,50	5.372.438.858	67,00	4.586.153.561	67,50	4.675.533.790	68,00	4.790.057.476	1.03.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II (Poin)													
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan infrastruktur jalan, jembatan, dan penataan ruang yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III (Poin)	65,12	65,50	66,00	7.783.896.996	66,50	7.798.806.887	67,00	8.064.499.150	67,50	8.221.669.375	68,00	8.423.052.987	1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan infrastruktur jalan, jembatan, dan penataan ruang yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV (Poin)	65,12	65,50	66,00	6.573.277.947	66,50	6.236.747.280	67,00	5.730.913.086	67,50	6.435.774.030	68,00	5.985.713.891	1.03.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan infrastruktur jalan, jembatan, dan penataan ruang yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V (Poin)	65,12	65,50	66,00	6.224.396.099	66,50	6.236.318.799	67,00	5.878.466.340	67,50	5.993.032.646	68,00	6.139.827.476	1.03.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan infrastruktur jalan, jembatan, dan penataan ruang yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI (Poin)	65,12	65,50	66,00	7.121.196.952	66,50	7.134.837.455	67,00	7.347.860.443	67,50	7.491.063.989	68,00	7.674.551.971	1.03.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sumber Daya Air (%)	86,26	87,00	87,50	84.052.972.159	88,00	74.608.269.375	88,50	74.969.096.312	89,00	74.479.505.944	89,50	77.727.456.538	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS Ciliwung-cisadane	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD PSDA WS Ciliwung-Cisadane (Poin)	0	65	66	2.985.979.671	67	2.784.577.638	68	3.213.035.402	69	3.974.338.942	70	4.371.772.836	1.03.0.00.0.00.02.0004 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS Cisadea-Cibareno	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD PSDA WS Cisadea-Cibareno (Poin)	0	65	66	4.108.532.344	67	4.019.385.578	68	4.571.324.136	69	5.468.456.550	70	6.015.302.205	1.03.0.00.0.00.02.0003 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS Citarum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD PSDA WS Citarum (Poin)	0	65	66	5.444.077.967	67	5.488.485.764	68	5.587.334.340	69	6.246.067.774	70	6.970.674.551	1.03.0.00.0.00.02.0002 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITARUM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung (Poin)	0	65	66	5.516.496.463	67	5.568.146.109	68	5.674.960.720	69	6.342.456.792	70	7.076.702.471	1.03.0.00.0.00.02.0006 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS Citanduy	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PSDA WS Citanduy (Poin)	0	65	66	3.653.031.121	67	3.518.334.233	68	4.020.167.656	69	4.862.184.422	70	5.348.402.864	1.03.0.00.0.00.02.0005 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITANDUY
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDA WS Ciwulan - Cilaki	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD PSDA WS Ciwulan - Cilaki (Poin)	0	65	66	7.563.760.999	67	6.820.137.099	68	6.152.150.809	69	7.067.365.890	70	7.074.102.479	1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					**303.378.229.918**		**282.300.921.812**		**240.287.044.328**		**249.774.115.559**		**259.630.250.157**	
Infrastruktur Situ, Embung, Waduk dan Air Baku Sesuai Standar	Persentase Infrastruktur Situ, Embung dan Waduk yang sesuai Standar (%)	-	100	100	7.577.250.951	100	7.334.976.046	100	8.168.473.651	100	10.085.321.016	100	11.093.853.117	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air
Infrastruktur Sungai di WS. Kewenangan Provinsi Sesuai Standar	Persentase Infrastruktur Sungai di WS. Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar (%)	-	100	100	12.900.000.000	100	11.190.000.000	100	11.609.000.000	100	12.169.900.000	100	12.886.890.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air
Infrastruktur Pengaman Pantai di WS. Kewenangan	Persentase Infrastruktur Pengaman	-	100	100	3.750.000.000	100	3.625.000.000	100	4.537.500.000	100	4.991.250.000	100	5.490.375.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Provinsi Sesuai Standar	Pantai di WS. Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar (%)													
Terkendalinya Pemanfaatan Sumber Daya Air oleh Pengguna	Persentase Rekomendasi Teknis yang Diterbitkan Sesuai Standar (%)	-	100	100	2.150.000.000	100	2.365.000.000	100	2.601.500.000	100	2.861.650.000	100	3.147.815.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air
Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan Sumber Daya Air	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan Sumber Daya Air yang Diproses (%)	-	100	100	4.550.000.000	100	5.005.000.000	100	5.505.500.000	100	6.056.050.000	100	6.661.655.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air
Infrastruktur Irigasi Kewenangan Provinsi Sesuai Standar	Persentase Infrastruktur Irigasi Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar (%)	-	100	100	5.020.255.774	100	5.022.281.351	100	5.674.509.487	100	6.681.960.435	100	7.350.156.479	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air
Infrastruktur SDA Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Ciliwung-Cisadane	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Ciliwung-Cisadane (%)	0,18	0,37	0,39	11.516.623.596	0,41	10.168.285.956	0,43	10.617.424.667	0,45	10.828.626.006	0,47	11.411.488.607	1.03.0.00.0.00.02.0004 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE
Infrastruktur Irigasi Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Ciliwung-Cisadane	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 10 Daerah Irigasi pada WS Ciliwung-Cisadane (Poin)	58,16	58,47	58,74	13.214.124.199	58,91	15.535.536.619	59,21	16.089.090.282	60,28	16.797.999.309	60,53	17.177.799.240	1.03.0.00.0.00.02.0004 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE
Infrastruktur SDA Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Cisadea-Cibareno	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Cisadea-Cibareno (%)	0,64	0,68	0,70	26.761.890.814	0,72	15.070.486.564	0,74	15.127.535.219	0,76	16.740.288.741	0,78	17.034.317.615	1.03.0.00.0.00.02.0003 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO
Infrastruktur Irigasi Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Cisadea-Cibareno	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 12 Daerah Irigasi pada WS Cisadea-Cibareno (Poin)	53,78	55,69	56,31	18.137.337.610	56,44	52.451.071.372	57,91	24.696.178.509	58,61	26.857.683.868	59,02	26.882.375.996	1.03.0.00.0.00.02.0003 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO
Infrastruktur SDA Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Citarum	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Citarum (%)	0,22	0,43	0,45	47.895.135.747	0,47	8.854.704.884	0,49	9.803.114.254	0,51	12.183.425.679	0,53	13.401.768.247	1.03.0.00.0.00.02.0002 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITARUM
Infrastruktur Irigasi Memadai dan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	54,57	54,60	54,74	24.499.843.750	55,05	26.949.828.125	55,52	26.644.810.938	56,17	27.609.292.031	56,76	27.870.221.234	1.03.0.00.0.00.02.0002 - UPTD PENGELOLAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Berfungsi pada UPTD PSDA WS Citarum	(IKSI) di 34 Daerah Irigasi pada WS Citarum (Poin)													SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITARUM
Infrastruktur SDA Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung (%)	0,53	0,56	0,58	10.832.717.075	0,60	8.065.988.783	0,62	8.872.587.662	0,64	9.759.846.427	0,66	10.735.831.070	1.03.0.00.0.00.02.0006 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG
Infrastruktur Irigasi Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 27 Daerah Irigasi pada WS Cimanuk-Cisanggarung (Poin)	60,15	60,39	60,6	34.343.549.182	61,16	37.277.904.100	61,57	36.305.694.510	61,94	19.473.284.384	62,23	19.609.890.357	1.03.0.00.0.00.02.0006 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG
Infrastruktur SDA Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Citanduy	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Citanduy (%)	0,17	0,33	0,35	7.381.767.186	0,37	8.186.147.240	0,39	9.004.761.965	0,41	9.905.238.160	0,43	10.895.761.976	1.03.0.00.0.00.02.0005 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITANDUY
Infrastruktur Irigasi Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Citanduy	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 10 Daerah Irigasi pada WS Citanduy (Poin)	54,45	55,73	56,13	21.755.523.586	57,79	21.931.075.945	58,33	11.824.183.539	59,18	19.206.601.893	59,68	19.507.262.082	1.03.0.00.0.00.02.0005 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITANDUY
Infrastruktur SDA Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Ciwulan-Cilaki	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung pada UPTD PSDA WS Ciwulan-Cilaki (%)	0,40	0,46	0,48	25.191.634.789	0,50	11.277.001.602	0,52	12.404.701.762	0,54	13.645.171.938	0,56	13.660.210.899	1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI
Infrastruktur Irigasi Memadai dan Berfungsi pada UPTD PSDA WS Ciwulan-Cilaki	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di 6 Daerah Irigasi pada WS Ciwulan-Cilaki (Poin)	61,26	61,89	62,69	25.900.575.659	62,82	31.990.633.225	63,25	20.800.477.883	63,82	23.920.525.672	64,78	24.812.578.238	1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					**2.550.000.000**		**9.500.000.000**		**7.500.000.000**		**17.500.000.000**		**6.500.000.000**	
Meningkatnya infrastruktur dasar air minum aman	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap	100	100	100	2.550.000.000	100	9.500.000.000	100	7.500.000.000	100	17.500.000.000	100	6.500.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota (%)													
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					**1.050.000.000**		**1.200.000.000**		**6.200.000.000**		**6.200.000.000**		**1.200.000.000**	
Meningkatnya Pengolahan Sampah di Fasilitas Pengolahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	7,45	23,04	26,11	1.050.000.000	29,59	1.200.000.000	33,53	6.200.000.000	38	6.200.000.000	40	1.200.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					**1.200.000.000**		**3.161.687.998**		**3.161.687.998**		**3.161.687.998**		**6.411.687.998**	
Meningkatnya infrastruktur dasar sanitasi aman	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (%)	100	100	100	1.200.000.000	100	3.161.687.998	100	3.161.687.998	100	3.161.687.998	100	6.411.687.998	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					**3.400.000.000**		**4.070.000.000**		**5.687.000.000**		**6.255.700.000**		**6.881.270.000**	
Infrastruktur Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi sesuai standar	Persentase Infrastruktur Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi yang sesuai Standar (%)	-	-	100	1.700.000.000	100	1.870.000.000	100	2.057.000.000	100	2.262.700.000	100	2.488.970.000	1.03.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Sumber Daya Air
Infrastruktur Drainase memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS Citarum	Persentase Drainase yang dioperasikan dan dipelihara pada UPTD PSDA WS Citarum (%)	-	-	100	1.700.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	1.03.0.00.0.00.02.0002 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CITARUM
Infrastruktur Drainase memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS Cisadea - Cibareno	Persentase Drainase yang dioperasikan dan dipelihara pada UPTD PSDA WS Cisadea - Cibareno (%)	-	-	-	-	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	1.03.0.00.0.00.02.0003 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Infrastruktur Drainase memadai dan berfungsi pada UPTD PSDA WS Ciwulan - Cilaki	Persentase Drainase yang dioperasikan dan dipelihara pada UPTD PSDA WS Ciwulan - Cilaki (%)	-	-	-	-	-	-	100	1.210.000.000	100	1.331.000.000	100	1.464.100.000	1.03.0.00.0.00.02.0001 - UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					**4.250.000.000**		**8.150.000.000**		**7.050.000.000**		**7.050.000.000**		**8.150.000.000**	
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan di Kawasan Strategis Provinsi	Persentase Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan di Kawasan Strategis Provinsi dalam kondisi baik (%)	0	0	20	4.250.000.000	40	8.150.000.000	60	7.050.000.000	80	7.050.000.000	100	8.150.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					**510.000.000**		**655.000.000**		**695.000.000**		**655.000.000**		**650.000.000**	
Bangunan Gedung memenuhi standar	Persentase Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung (%)	-	100	100	510.000.000	100	655.000.000	100	695.000.000	100	655.000.000	100	650.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					**11.000.000.000**		**8.500.000.000**		**7.000.000.000**		**6.000.000.000**		**11.916.810.576**	
Tertatanya Kawasan Strategis Daerah provinsi	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	0	15,63	28,13	11.000.000.000	45,31	8.500.000.000	62,5	7.000.000.000	81,25	6.000.000.000	100	11.916.810.576	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					**2.395.366.859.230**		**898.566.494.971**		**1.574.133.747.871**		**1.488.739.118.358**		**2.663.706.449.959**	
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan/Preservasi Jalan (Bidang Teknik)	Persentase Jalan Terbangunan/Terpreservasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Teknis (BIDANG TEKNIK) (%)	100	100	100	32.800.000.000	100	16.200.000.000	100	15.560.000.000	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Rekomendasi hasil survey kondisi jalan diterapkan dalam dokumen perencanaan (HARBANG)	Persentase rekomendasi hasil survey kondisi jalan yang ditindaklanjuti	100	100	100	67.541.688.339	100	22.251.458.837	100	42.270.720.000	100	41.105.000.000	100	75.570.000.000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dalam dokumen perencanaan (HARBANG) (%)													
Material Jalan Memiliki Jaminan Mutu (LABKON)	Persentase Jalan Terbangun Yang Menggunakan Material Lulus Uji Pembanding (UPTD LABKON) (%)	-	100	100	2.300.000.000	100	2.625.000.000	100	2.777.329.612	100	2.727.395.833	100	3.038.765.625	1.03.0.00.0.00.01.0007 - UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
Meningkatnya preservasi jalan di wilayah UPTD I	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD I (%)	83,84	89,21	97,4	361.466.425.045	97,75	141.684.221.258	98	154.924.945.088	98,25	238.219.037.790	98,5	412.613.427.294	1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
Meningkatnya preservasi jalan di wilayah UPTD II	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD II (%)	79,73	84,19	97,33	372.218.891.499	97,75	265.943.480.730	98	340.007.905.534	98,25	250.931.346.258	98,5	403.911.351.185	1.03.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II
Meningkatnya preservasi jalan di wilayah UPTD III	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD III (%)	89,04	94,6	97,47	607.647.062.742	97,75	167.989.351.764	98	242.206.165.355	98,25	366.431.185.737	98,5	608.236.182.638	1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III
Meningkatnya preservasi jalan di wilayah UPTD IV	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD IV (%)	87,65	92,19	97,61	316.696.719.946	97,75	113.424.070.070	98	208.894.619.741	98,25	239.262.396.175	98,5	413.708.953.598	1.03.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV
Meningkatnya preservasi jalan di wilayah UPTD V	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD V (%)	85,61	93,68	97,52	310.159.521.427	97,75	76.371.474.240	98	224.906.205.720	98,25	114.324.561.453	98,5	217.774.227.140	1.03.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V
Meningkatnya preservasi jalan di wilayah UPTD VI	Persentase panjang jalan yang terpelihara kemantapannya sesuai standar di wilayah UPTD VI (%)	90,98	94,5	97,69	324.536.550.232	97,75	92.077.438.072	98	342.585.856.822	98,25	232.638.195.111	98,5	525.753.542.480	1.03.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					**3.625.523.420**		**3.625.523.420**		**3.625.523.420**		**3.625.523.420**		**3.625.523.420**	
Terselenggaranya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Kepada	-	15,47	15,69	3.625.523.420	15,91	3.625.523.420	16,13	3.625.523.420	16,35	3.625.523.420	16,56	3.625.523.420	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Masyarakat Jasa Konstruksi (%)													
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					**3.500.000.000**		**3.750.000.000**		**4.000.000.000**		**4.250.000.000**		**4.500.000.000**	
Meningkatnya kualitas pelayanan penataan ruang	Persentase pemanfaat ruang yang mematuhi ketentuan rekomendasi pemanfaatan ruang kewenangan provinsi (%)	24	87,50	88	1.000.000.000	88,50	1.200.000.000	90	316.307.626	90,50	317.399.421	91	310.470.428	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
RTRW Kab/Kota sesuai dengan RTRW Provinsi	Persentase RTRW Kab/Kota yang sinkron dengan RTRW Provinsi (%)	30,45	81	82	1.500.000.000	83	1.300.000.000	84	3.325.555.616	86	3.541.204.313	88	3.772.562.174	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (%)	5,6	18	20	1.000.000.000	22	1.250.000.000	24	358.136.759	27,5	391.396.266	29,8	416.967.398	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**158.662.233.908**		**153.175.478.586**		**151.814.988.158**		**151.181.287.921**		**142.558.103.103**	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**64.825.818.798**		**69.034.704.312**		**70.934.213.884**		**70.325.513.647**		**73.434.217.938**	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, dan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan dan Permukiman (Poin)	77,91	78,5	79	52.482.233.908	79,5	54.450.146.192	80	54.863.450.153	80,5	55.509.011.220	81	56.459.321.849	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan UPTD P3JB	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan dan Pelayanan Apartemen Transit Jawa Barat (%)	95,21	80	80	12.343.584.890	80	14.584.558.120	80	16.070.763.731	80	14.816.502.427	80	16.974.896.089	1.04.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN JAWA BARAT
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					**8.514.793.970**		**7.514.793.970**		**6.514.793.970**		**6.514.793.970**		**12.750.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Korban Bencana/Relokasi mendapatkan Rumah Layak	Persentase Warga Negara Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	100	8.514.793.970	100	7.514.793.970	100	6.514.793.970	100	6.514.793.970	100	12.750.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					**82.571.621.140**		**73.875.980.304**		**71.615.980.304**		**71.590.980.304**		**53.623.885.165**	
Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang telah Ditangani (%)	32,9	39,8	51,83	82.571.621.140	64,99	73.875.980.304	78,81	71.615.980.304	93,7	71.590.980.304	100	53.623.885.165	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					**2.650.000.000**		**2.650.000.000**		**2.650.000.000**		**2.650.000.000**		**2.650.000.000**	
Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase PSU Permukiman dalam kondisi baik (%)	0	20	40	2.650.000.000	60	2.650.000.000	80	2.650.000.000	100	2.650.000.000	100	2.650.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	
Meningkatnya Pengembang Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Tersertifikasi	Persentase Pengembang Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Tersertifikasi (%)	0	0	1,43	100.000.000	4,29	100.000.000	7,14	100.000.000	10,7	100.000.000	14	100.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**93.751.234.774**		**97.564.145.784**		**99.354.611.200**		**102.006.995.761**		**103.733.925.018**	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**66.167.285.976**		**67.490.631.695**		**68.840.444.330**		**70.217.253.216**		**71.621.598.280**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja (Nilai)	86,44	86,45	86,47	33.023.764.674	86,50	33.684.239.967	86,54	34.357.924.767	86,59	35.045.083.262	86,65	35.745.984.927	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Poin)	82,88	83	84	33.143.521.302	85	33.806.391.728	86	34.482.519.563	87	35.172.169.954	88	35.875.613.353	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**19.485.837.581**		**20.043.514.089**		**20.624.166.870**		**21.228.742.545**		**21.858.226.738**	
Berkurangnya Gangguan Ketentraman dan Kertertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan (%)	183	98	98,3	1.750.000.000	98,6	8.017.405.600	98,9	8.249.666.700	99,2	8.491.497.000	99,5	8.743.290.600	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	Persentase penegakan PERDA dan Peraturan Gubernur yang terselesaikan (%)	100	60	80	10.959.886.981	83	8.017.405.600	86	8.249.666.700	89	8.491.497.000	92	8.743.290.600	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya pelindungan masyarakat di Jawa Barat	Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	80	90	1.200.000.000	91	2.004.351.500	92	2.062.416.700	93	2.122.874.200	94	2.185.822.600	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya profesionalisme anggota Satpol PP dan PPNS	Persentase anggota satpol PP dan PPNS yang mendapatkan pelatihan (%)	100	90	92	5.575.950.600	93	2.004.351.389	94	2.062.416.770	95	2.122.874.345	96	2.185.822.938	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					**7.550.000.000**		**9.750.000.000**		**9.610.000.000**		**10.281.000.000**		**9.974.100.000**	
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Nilai Penangan Tematik Kawasan Rawan Bencana (Poin)	0,76	0,77	0,78	3.000.000.000	0,79	4.500.000.000	0,8	4.500.000.000	0,81	4.881.000.000	0,82	4.774.100.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat	100	100	100	2.407.099.761	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Bencana Sesuai Standar (%)													
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan logistik dan Peralatan pada saat Keadaan Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada saat keadaan Darurat Bencana (%)	100	100	100	1.758.065.000	100	2.150.000.000	100	2.110.000.000	100	2.200.000.000	100	2.100.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekontruksi	Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (poin)	0,60	0,61	0,62	384.835.239	0,63	600.000.000	0,64	500.000.000	0,65	700.000.000	0,66	600.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					**548.111.217**		**280.000.000**		**280.000.000**		**280.000.000**		**280.000.000**	
Meningkatnya kapasitas kab/kota dalam penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang Terbina Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	548.111.217	100	280.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**170.480.116.020**		**172.484.458.339**		**175.543.387.509**		**178.617.895.258**		**181.798.993.162**	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**123.967.116.020**		**126.446.458.339**		**128.975.387.509**		**131.554.895.258**		**134.185.993.162**	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Dinas Sosial (Nilai)	83,13	84,63	85,63	90.876.447.468	87,13	92.693.976.417	88,6	94.547.855.946	90,1	96.438.813.065	91,17	98.367.589.326	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas tata kelola di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa	Indeks Kepuasan Masyarakat (Klien) pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (Poin)	80	84,63	85,63	2.192.806.158	87,13	2.236.662.281	88,6	2.281.395.527	90,1	2.327.023.437	91,7	2.373.563.906	1.06.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARSA
Meningkatnya kualitas tata kelola di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja	Indeks Kepuasan Masyarakat (Klien) pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja (Poin)	75	84,63	85,63	2.833.202.502	87,13	2.889.866.552	88,6	2.947.663.883	90,1	3.006.617.161	91,7	3.066.749.504	1.06.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA REMAJA
Meningkatnya kualitas tata kelola di	Indeks Kepuasan	80	84,63	85,63	6.893.360.267	87,13	7.031.227.472	88,6	7.171.852.022	90,1	7.315.289.062	91,7	7.461.594.843	1.06.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak	Masyarakat (Klien) pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak (Poin)													PELAYANAN SOSIAL GRIYA RAMAH ANAK
Meningkatnya kualitas tata kelola di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel (Poin)	80	84,63	85,63	5.952.855.487	87,13	6.071.912.597	88,6	6.193.350.849	90,1	6.317.217.866	91,7	6.443.562.223	1.06.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA HARAPAN DIFABEL
Meningkatnya kualitas tata kelola di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia	Indeks Kepuasan Masyarakat (Klien) pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia (Poin)	97,13	84,63	85,63	9.243.579.968	87,13	9.428.451.567	88,6	9.617.020.599	90,1	9.809.361.011	91,7	10.005.548.231	1.06.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA LANSIA
Meningkatnya kualitas tata kelola di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya	Indeks Kepuasan Masyarakat (Klien) pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (Poin)	90	84,63	85,63	3.134.677.267	87,13	3.197.370.812	88,6	3.261.318.229	90,1	3.326.544.593	91,7	3.393.075.485	1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARYA
Meningkatnya kualitas tata kelola di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri	Indeks Kepuasan Masyarakat (Klien) pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Wanita Mandiri (Poin)	75	84,63	85,63	2.022.913.846	87,13	2.063.372.123	88,6	2.104.639.565	90,1	2.146.732.357	91,7	2.189.667.004	1.06.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA WANITA MANDIRI
Meningkatnya kualitas tata kelola di UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (Klien) pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Poin)	-	84,63	85,63	817.273.057	87,13	833.618.518	88,6	850.290.889	90,1	867.296.706	91,7	884.642.640	1.06.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					**4.388.000.000**		**4.388.000.000**		**4.388.000.000**		**4.388.000.000**		**4.388.000.000**	
Meningkatnya partisipasi Pelaku Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif (%)	100	100	100	4.288.000.000	100	4.288.000.000	100	4.288.000.000	100	4.288.000.000	100	4.288.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya partisipasi Pelaku Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan	Persentase PSKS yang Aktif di UPTD Pengembangan dan Pelatihan	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kesejahteraan Sosial di UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial (%)													
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	
Terlindunginya WNI migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara korban tindak kekerasan yang terlindungi (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					**34.500.000.000**		**34.000.000.000**		**34.500.000.000**		**35.000.000.000**		**35.500.000.000**	
Anak Terlantar kembali berfungsi sosial di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa	Persentase Anak Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (%)	100	100	100	2.146.942.172	100	2.146.942.172	100	2.146.942.172	100	2.291.942.172	100	2.391.942.172	1.06.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARSA
Anak Terlantar kembali berfungsi sosial di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja	Persentase Anak Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja (%)	100	100	100	1.830.882.061	100	1.830.882.061	100	1.830.882.061	100	1.830.882.061	100	1.830.882.061	1.06.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA REMAJA
Anak Terlantar kembali berfungsi sosial di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak	Persentase Anak Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak (%)	100	100	100	12.745.405.435	100	12.645.405.435	100	12.745.405.435	100	12.700.405.435	100	12.700.405.435	1.06.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA RAMAH ANAK
PPKS berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Penyandang Disabilitas Kembali Berfungsi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang tertangani dan berfungsi sosial kembali (%)	100	100	100	4.318.425.110	100	4.218.425.110	100	4.318.425.110	100	4.418.425.110	100	4.518.425.110	1.06.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA HARAPAN DIFABEL
Lanjut Usia Terlantar kembali berfungsi sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang tertangani dan berfungsi sosial kembali (%)	100	100	100	7.370.548.076	100	7.270.548.076	100	7.370.548.076	100	7.470.548.076	100	7.570.548.076	1.06.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA LANSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Gelandangan dan Pengemis Kembali Berfungsi Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang tertangani dan berfungsi sosial kembali (%)	100	100	100	4.987.797.146	100	4.887.797.146	100	4.987.797.146	100	5.087.797.146	100	5.187.797.146	1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA KARYA
Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Tuna Susila kembali berfungsi sosial	Persentase WRSE dan Wanita Tuna Susila yang tertangani dan berfungsi sosial kembali (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.100.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA WANITA MANDIRI
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial untuk Fakir Miskin	Persentase bansos kesejahteraan keluarga yang disalurkan tepat sasaran (%)	98	98	100	129.461.629	100	129.461.629	100	129.461.629	100	129.461.629	100	129.461.629	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Meningkatnya Pendapatan dari Fakir Miskin	Persentase KUBE yang meningkat pendapatnnya (%)	30	30	35	720.538.371	40	720.538.371	40	720.538.371	45	720.538.371	50	720.538.371	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
Terlindunginya anak dalam pengasuhan orang tua angkat	Persentase Anak yang Mendapat Pengasuhan Orang Tua Angkat (%)	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					**6.250.000.000**		**6.250.000.000**		**6.250.000.000**		**6.250.000.000**		**6.250.000.000**	
Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial (%)	100	100	100	6.250.000.000	100	6.250.000.000	100	6.250.000.000	100	6.250.000.000	100	6.250.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					**275.000.000**		**300.000.000**		**330.000.000**		**325.000.000**		**375.000.000**	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Taman Makam Pahlawan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Taman Makam Pahlawan (Nilai)	B	B	B	275.000.000	B	300.000.000	B	330.000.000	A	325.000.000	A	375.000.000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**165.570.105.645**		**168.848.868.496**		**172.204.740.986**		**175.639.740.527**		**179.155.944.450**	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					**136.734.410.446**		**139.469.098.655**		**142.258.480.628**		**145.103.650.241**		**148.005.723.245**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nilai)	88,72	88,73	88,74	115.875.899.239	88,75	118.193.417.225	88,76	120.557.285.569	88,77	122.968.431.281	88,78	125.427.799.905	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor	IKM pada UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor (%)	100	100	100	1.514.298.071	100	1.544.584.032	100	1.575.475.713	100	1.606.985.227	100	1.639.124.932	2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada UPTD Wasnaker Wilayah II Karawang	IKM pada UPTD Wasnaker Wilayah II Karawang (%)	100	100	100	8.934.405.233	100	9.113.093.337	100	9.295.355.204	100	9.481.262.308	100	9.670.887.554	2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II KARAWANG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon	IKM pada UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon (%)	100	100	100	1.096.238.490	100	1.118.163.260	100	1.140.526.525	100	1.163.337.056	100	1.186.603.797	2.07.3.32.0.00.01.0003 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III CIREBON
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada UPTD Wasnaker Wilayah IV Bandung	IKM pada UPTD Wasnaker Wilayah IV Bandung (%)	100	100	100	1.257.200.066	100	1.282.344.067	100	1.307.990.948	100	1.334.150.767	100	1.360.833.783	2.07.3.32.0.00.01.0004 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya	IKM pada UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya (%)	100	100	100	795.618.057	100	811.530.418	100	827.761.027	100	844.316.247	100	861.202.572	2.07.3.32.0.00.01.0005 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V TASIKMALAYA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan	IKM pada UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi (%)	100	100	100	2.951.913.841	100	3.010.952.118	100	3.071.171.160	100	3.132.594.583	100	3.195.246.475	2.07.3.32.0.00.01.0006 - UPTD BALAI LATIHAN KERJA KOMPETENSI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ketransmigrasian pada UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi														
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri	IKM pada UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri (%)	100	100	100	2.355.783.618	100	2.402.899.290	100	2.450.957.276	100	2.499.976.422	100	2.549.975.950	2.07.3.32.0.00.01.0007 - UPTD BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia	IKM pada UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (%)	100	100	100	1.953.053.831	100	1.992.114.908	100	2.031.957.206	100	2.072.596.350	100	2.114.048.277	2.07.3.32.0.00.01.0008 - UPTD BALAI LATIHAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	59,26	48,15	51,85	50.000.000	55,56	50.000.000	59,26	50.000.000	62,96	50.000.000	66,67	50.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					**16.327.657.554**		**16.563.637.045**		**16.809.338.891**		**17.065.163.654**		**17.331.528.396**	
Meningkatnya tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi dan berdaya	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	100	100	100	6.696.470.504	100	6.793.252.893	100	6.894.022.716	100	6.998.944.256	100	7.108.188.563	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya kompetensi pencari kerja dalam negeri	Persentase pencari kerja yang diuji kompetensi (%)	50	50	60	9.631.187.050	73	9.770.384.152	80	9.915.316.175	88	10.066.219.398	97	10.223.339.833	2.07.3.32.0.00.01.0006 - UPTD BALAI LATIHAN KERJA KOMPETENSI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					**6.278.037.646**		**6.450.172.797**		**6.629.399.916**		**6.816.011.193**		**7.010.310.854**	
Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri. (%)	55,72	56,72	57,72	1.668.287.219	58,72	1.714.029.359	59,72	1.761.656.074	60,72	1.811.245.010	61,72	1.862.877.010	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya	Persentase peningkatan lulusan pelatihan kerja mandiri dengan predikat baik (%)	100,00	100,00	100,00	2.269.272.699	100,00	2.331.493.033	100,00	2.396.276.845	100,00	2.463.729.750	100,00	2.533.961.714	2.07.3.32.0.00.01.0007 - UPTD BALAI LATIHAN KERJA MANDIRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kompetensi Pekerja Migran Indonesia	Persentase peningkatan lulusan pelatihan PMI dengan predikat baik (%)	100,00	100,00	100,00	2.340.477.728	100,00	2.404.650.405	100,00	2.471.466.997	100,00	2.541.036.433	100,00	2.613.472.130	2.07.3.32.0.00.01.0008 - UPTD BALAI LATIHAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					**4.436.000.000**		**4.571.960.000**		**4.713.521.552**		**4.860.915.440**		**5.014.381.956**	
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan yang baik	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	-	54	60	4.436.000.000	66	4.571.960.000	72	4.713.521.552	78	4.860.915.440	84	5.014.381.956	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					**1.743.999.999**		**1.743.999.999**		**1.743.999.999**		**1.743.999.999**		**1.743.999.999**	
Meningkatnya penerapan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan (%)	-	9,85	20,15	782.495.024	30,45	782.495.024	40,75	782.495.024	51,05	782.495.024	61,35	782.495.024	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap Norma Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	Persentase perusahaan yang patuh terhadap Norma ketenagakerjaan Wilayah I Bogor (%)	0	1,33	2,73	186.816.237	4,12	186.816.237	5,52	186.816.237	6,91	186.816.237	8,31	186.816.237	2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR
Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap Norma Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang	Persentase perusahaan yang patuh terhadap Norma ketenagakerjaan Wilayah II Karawang (%)	0	3,86	7,90	290.118.573	11,94	290.118.573	15,98	290.118.573	20,02	290.118.573	24,06	290.118.573	2.07.3.32.0.00.01.0002 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II KARAWANG
Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap Norma Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon	Persentase perusahaan yang patuh terhadap Norma ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon (%)	0	1,30	2,65	219.579.083	4,00	219.579.083	5,36	219.579.083	6,71	219.579.083	8,07	219.579.083	2.07.3.32.0.00.01.0003 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III CIREBON
Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap	Persentase perusahaan yang patuh	0	2,40	4,91	156.295.092	7,42	156.295.092	9,93	156.295.092	12,44	156.295.092	14,95	156.295.092	2.07.3.32.0.00.01.0004 - UPTD PENGAWASAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Norma Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung	terhadap Norma ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung (%)													KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV BANDUNG
Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap Norma Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya	Persentase perusahaan yang patuh terhadap Norma ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya (%)	0	0,96	1,96	108.695.990	2,96	108.695.990	3,96	108.695.990	4,97	108.695.990	5,97	108.695.990	2.07.3.32.0.00.01.0005 - UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH V TASIKMALAYA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**32.375.224.424**		**33.075.043.094**		**33.791.299.808**		**34.524.565.969**		**35.275.443.626**	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**28.979.370.670**		**29.560.772.875**		**30.151.988.332**		**30.755.028.099**		**31.370.128.661**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang urusan PPPA dan PPKB	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Nilai)	83,92	84,3	84,7	27.702.163.000	85	28.245.248.975	85,3	28.796.998.715	85,7	29.359.388.793	86	29.932.620.176	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan UPTD PPA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPTD PPA (Poin)	88,3	88,8	89,05	1.277.207.670	89,3	1.315.523.900	89,55	1.354.989.617	89,8	1.395.639.306	90,05	1.437.508.485	2.08.2.14.0.00.01.0001 - Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AKB Provinsi Jawa Barat
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					**1.255.660.000**		**1.261.226.000**		**1.267.348.600**		**1.274.083.460**		**1.281.491.806**	
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender (%)	100	100	100	1.255.660.000	100	1.261.226.000	100	1.267.348.600	100	1.274.083.460	100	1.281.491.806	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					**571.316.258**		**654.260.580**		**735.710.188**		**713.459.860**		**737.035.358**	
Menurunnya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di kabupaten/kota di Jawa Barat	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk	1,77	1,67	1,67	131.270.258	1,66	160.209.980	1,66	274.163.585	1,65	194.658.634	1,65	196.354.009	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perempuan) (Angka)													
Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Persentase Keberhasilan penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) terhadap perempuan (%)	100	100	100	440.046.000	100	494.050.600	100	461.546.603	100	518.801.226	100	540.681.349	2.08.2.14.0.00.01.0001 - Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AKB Provinsi Jawa Barat
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					**170.000.000**		**180.000.000**		**190.000.000**		**200.000.000**		**210.000.000**	
Meningkatnya Kualitas layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Jawa Barat	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan untuk Standardisasi di Jawa Barat (%)	18,52	33,33	46,67	170.000.000	60	180.000.000	73,33	190.000.000	86,67	200.000.000	100	210.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					**325.000.000**		**350.000.000**		**375.000.000**		**400.000.000**		**425.000.000**	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi gender dan anak	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat (Persentase)	100	100	100	325.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					**410.357.496**		**438.911.639**		**468.393.488**		**498.849.430**		**530.328.169**	
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak (Persentase)	100	100	100	410.357.496	100	438.911.639	100	468.393.488	100	498.849.430	100	530.328.169	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					**663.520.000**		**629.872.000**		**602.859.200**		**683.145.120**		**721.459.632**	
Menurunnya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak di kabupaten/kota di Jawa Barat	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak) (Angka)	0,29	0,26	0,26	175.474.000	0,26	193.021.400	0,25	212.323.540	0,25	233.555.894	0,25	206.911.483	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas pelayanan	Tingkat Penanganan	100	100	100	488.046.000	100	436.850.600	100	390.535.660	100	449.589.226	100	514.548.149	2.08.2.14.0.00.01.0001 - Unit Pelaksana Teknis

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
perlindungan khusus anak	Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak (%)													Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AKB Provinsi Jawa Barat
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**134.466.902.287**		**147.842.249.176**		**150.496.463.922**		**153.203.184.326**		**155.960.445.065**	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**122.327.104.435**		**124.773.646.524**		**127.269.119.454**		**129.814.501.843**		**132.410.791.880**	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Nilai)	88,69	88,8	88,9	104.128.189.260	89	106.210.753.045	89,1	108.334.968.106	89,2	110.501.667.468	89,3	112.711.700.817	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan pada UPTD BKHKMV	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD BKHKMV (Poin)	85,5	85,8	83	1.978.739.652	83,5	2.018.314.445	84	2.058.680.734	84,5	2.099.854.349	85	2.141.851.436	2.09.3.27.0.00.01.0001 - UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian pada UPTD BPMKP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD BPMKP (Poin)	89,84	85,8	87	631.490.550	87,3	644.120.363	87,5	657.002.770	87,8	670.142.825	88	683.545.683	2.09.3.27.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
Meningkatnya kualit as tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian pada UPTD BPPKP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD BPPKP (Poin)	90,9	84	85	2.483.615.390	86	2.533.287.698	87	2.583.953.452	88	2.635.632.520	89	2.688.345.170	2.09.3.27.0.00.01.0002 - UPTD BALAI PELATIHAN PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN CIKOLE LEMBANG
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian pada UPTD BPPTDK Margawati	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD BPPTDK Margawati (Poin)	96,56	86,4	88,5	4.117.804.340	88,5	4.200.160.427	88,5	4.284.163.636	88,5	4.369.846.909	88,5	4.457.243.847	2.09.3.27.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian pada UPTD BPPTU Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD BPPTU Jatiwangi (Poin)	83	83	83	2.126.257.264	83	2.168.782.409	83	2.212.158.057	83	2.256.401.218	83	2.301.529.242	2.09.3.27.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian pada UPTD BPPTSPHPT Cikole	â• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD BPTSPHPT Cikole (Poin)	89,5	89,5	89,5	1.655.380.418	89,5	1.688.488.026	89,5	1.722.257.787	89,5	1.756.702.943	89,5	1.791.837.000	2.09.3.27.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pertanian pada UPTD BPMKP/BP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD BPMKP/BP (Poin)	82,5	82,6	82,7	1.099.408.669	82,8	1.121.396.842	82,9	1.143.824.779	83	1.166.701.275	83,1	1.190.035.300	2.09.3.27.0.00.01.0007 - UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pertanian pada UPTD BPPIBTSP Bunikasih	â• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD BPPIBTSP Bunikasih (Poin)	85	85	85	1.642.584.945	85,5	1.675.436.644	85,5	1.708.945.377	86	1.743.124.285	86	1.777.986.773	2.09.3.27.0.00.01.0008 - UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pertanian pada UPTD BPPIBTSP Ciamis	Persentase peningkatan prasarana peternakan pada UPTD BPPIBTSP Ciamis (%)	84,65	87	97,25	1.193.850.295	87,5	1.217.727.300	87,75	1.242.081.846	88	1.266.923.483	88,25	1.292.261.953	2.09.3.27.0.00.01.0009 - UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian pada UPTD Rumah Sakit Hewan (RSH)	â• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPTD Rumah Sakit Hewan (Poin)	91,8	89,5	89,7	1.269.783.652	89,9	1.295.179.325	90	1.321.082.910	90,2	1.347.504.568	90,2	1.374.454.659	2.09.3.27.0.00.01.0010 - UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					**10.230.375.200**		**21.000.000.000**		**21.000.000.000**		**21.000.000.000**		**21.000.000.000**	
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan sesuai dengan pola pangan harapan	Persentase masyarakat terbina yang menerapkan rencana tindak lanjut hasil pembinaan konsumsi pangan (%)	100	100	100	958.535.200	100	3.163.140.000	100	3.163.140.000	100	3.163.140.000	100	3.163.140.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Meningkatnya cadangan pangan pemerintah daerah	Persentase cadangan pangan (%)	69,53	50	50	7.035.595.000	50	13.364.430.000	50	13.364.430.000	50	13.364.430.000	50	13.364.430.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Terjaganya harga pangan antar wilayah antar waktu	Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis (%)	-	9	8,85	2.236.245.000	8,7	4.472.430.000	8,55	4.472.430.000	8,4	4.472.430.000	8,25	4.472.430.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					**650.000.000**		**709.180.000**		**768.921.816**		**829.259.831**		**890.230.533**	
Berkurangnya wilayah rentan rawan pangan	Persentase penurunan lokasi rentan rawan pangan (%)	3	3	4	650.000.000	4,2	709.180.000	4,4	768.921.816	4,6	829.259.831	4,8	890.230.533	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					**1.259.422.652**		**1.359.422.652**		**1.458.422.652**		**1.559.422.652**		**1.659.422.652**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	96	96	96	408.308.000	96	439.133.500	96	474.113.260	96	507.211.652	96	542.710.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Meningkatnya PSAT yang memiliki jaminan mutu dan kemanan pangan	Persentase PSAT Pre Market yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100	100	100	851.114.652	100	920.289.152	100	984.309.392	100	1.052.211.000	100	1.116.712.652	2.09.3.27.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					**875.000.000**		**975.000.000**		**975.000.000**		**975.000.000**		**975.000.000**	
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**	
Optimalnya Persiapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu (Persentase)	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	
Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Terselesaikan	Persentase Kasus sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terselesaikan (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					**75.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	
Masyarakat Mendapatkan Penetapan Ganti Rugi dan Santunan Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH					**275.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**		**225.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Masyarakat Mendapatkan Redistribusi Tanah dan Penataan Akses dari BPN	Persentase Masyarakat pengusul yang terfasilitasi redistribusi tanah dan penataan akses dari BPN (%)	100	100	100	275.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					**-**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	
Meningkatnya data hasil inventarisasi tanah ulayat lintas kabupaten/kota di Jawa Barat	Persentase Tanah Masyarakat Adat yang Mendapatkan Kepastian Hukum dengan Penetapan Tanah Ulayat (%)	-	-	100	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					**125.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	
Meningkatnya Pemanfaatan perencanaan penggunaan tanah	Persentase Dokumen Rencana Penggunaan Tanah yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	125.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	1.04.1.03.2.10.01.0000 - Dinas Perumahan dan Permukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**179.185.316.721**		**180.596.928.054**		**182.036.671.615**		**183.619.172.548**		**185.116.879.749**	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**70.330.566.721**		**71.737.178.054**		**73.171.921.615**		**74.635.360.048**		**76.128.067.249**	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	82,44	82,94	83,44	60.557.926.186	83,94	61.769.084.709	84,44	63.004.466.403	84,94	64.264.555.732	85,44	65.549.846.847	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD PSTR (Poin)	65	65	65,5	4.636.902.016	66	4.729.640.056	66,5	4.824.232.857	67	4.920.717.514	67,5	5.019.131.864	2.11.0.00.0.00.03.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TPA/TPST REGIONAL
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD LLH (Poin)	88,13	86,75	86,85	5.135.738.519	86,95	5.238.453.289	87,05	5.343.222.355	87,15	5.450.086.802	87,25	5.559.088.538	2.11.0.00.0.00.03.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					**1.300.000.000**		**1.300.000.000**		**1.300.000.000**		**1.300.000.000**		**1.300.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan	Persentase Kebijakan/Produk hukum yang dihasilkan atau disosialisasikan (Persentase)	-	20	40	1.300.000.000	60	1.300.000.000	80	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Perencanaan Pembangunan yang Sudah terintegrasikan dengan rencana pembangunan lingkungan hidup (%)	-	19,64	39,29		58,93		78,57		100		100		2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase rekomendasi Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang terverifikasi (Persentase)	-	42	57		71		85		100		100		2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					**20.000.000.000**		**20.000.000.000**		**20.000.000.000**		**20.000.000.000**		**20.000.000.000**	
Terkendalinya pencemaran Air	Penurunan Parameter COD (mg/L) (Angka)	24,83	24,58	24,33	10.328.784.298	24,08	4.099.400.000	23,83	3.954.400.000	23,58	3.911.400.000	23,83	4.302.540.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran Air Laut	Persentase kab/kota di wilayah pesisir yang dibina (%)	-	36,36	54,55	3.043.919.956	72,73	5.527.520.032	100,00	5.909.750.000	100,00	5.449.165.000	100,00	6.440.928.500	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran Udara	Penurunan konsentrasi parameter SO2Â (Âµg/m3) (Angka)	9,82	9,57	9,32	1.256.554.468	9,07	2.079.000.000	8,82	2.286.900.000	8,57	2.515.590.000	8,32	2.767.149.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas pelayanan laboratorium lingkungan	Parameter Pengujian Kualitas Air Laut yang terakreditasi (%)	-	-	-	4.983.371.278	33,33	7.749.579.968	67,00	7.250.000.000	100,00	7.465.000.000	100,00	5.764.653.000	2.11.0.00.0.00.03.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	Parameter Pengujian Kualitas Air yang Terakreditasi (Angka)	45,88	49,41	51,76		54,12		56,47		58,82		61,18		2.11.0.00.0.00.03.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	Parameter Pengujian	-	-	-		0,04		0,08		0,12		0,16		2.11.0.00.0.00.03.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kualitas Limbah dan B3 (%)													
	Parameter Pengujian Kualitas Udara yang Terakreditasi (Angka)	26,92	30,77	34,62		42,31		50,00		57,69		65,38		2.11.0.00.0.00.03.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen Laboratorium (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.0.00.0.00.03.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK sektor limbah dan persampahan	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK di Kabupaten/Kota (%)	62,96	66,67	70,37	150.000.000	74,07	181.500.000	77,78	199.650.000	81,48	219.615.000	85,18	241.576.500	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya aksi pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak	Persentase Kampung Iklim yang dibina (%)	74	75	85	237.370.000	95	363.000.000	105	399.300.000	115	439.230.000	125	483.153.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
Meningkatnya kelestarian keanekaragaman hayati	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola (%)	-	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Lokasi Taman Kehati atau RTH Kehati yang dibina (%)	65,52	72,14	79,31		86,21		93,10		100,00		106,90		2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					**195.000.000**		**200.000.000**		**205.000.000**		**210.000.000**		**215.000.000**	
Terkendalinya Pencemaran B3 dan LB3	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3 (%)	100	100	100	195.000.000	100	200.000.000	100	205.000.000	100	210.000.000	100	215.000.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN					**750.000.000**		**750.000.000**		**750.000.000**		**750.000.000**		**750.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan dampak lingkungan dari usaha/kegiatan	Persentase Dokumen Lingkungan yang di proses (%)	100	100	100	220.451.367	100	230.000.000	100	220.451.367	100	220.451.367	100	220.451.367	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan Usaha Baru Yang Berdampak Lingkungan Tidak Melanggar Hukum Lingkungan	Persentase Jumlah pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi (Persentase)	-	20	40	529.548.633	60	520.000.000	80	529.548.633	100	529.548.633	120	529.548.633	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	
Meningkatnya perlindungan lingkungan hidup	Persentase peningkatan Masyarakat Hukum Adat yang terbina di Kabupaten/Kota (%)	0	0	25	150.000.000	50	150.000.000	75	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**1.466.000.000**		**1.466.000.000**		**1.466.000.000**		**1.466.000.000**		**1.466.000.000**	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	Presentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	82,11	86,96	88,16	1.466.000.000	88,97	1.466.000.000	89,77	1.466.000.000	90,57	1.466.000.000	91,37	1.466.000.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**	
Meningkatnya penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	78,01	79,19	80,35	400.000.000	81,51	400.000.000	82,67	400.000.000	83,89	400.000.000	84,83	400.000.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					**2.000.000.000**		**2.000.000.000**		**2.000.000.000**		**2.000.000.000**		**2.000.000.000**	
Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					**81.593.750.000**		**81.593.750.000**		**81.593.750.000**		**81.707.812.500**		**81.707.812.500**	
Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin)	48,13	49,28	50,43	500.000.000	51,58	576.000.000	52,73	691.200.000	52,73	520.000.000	53,88	520.000.000	2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	78,11	81,73	85,53		89,5		93,65		98		100		2.11.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengelolaan sampah regional	Persentase Jasa Layanan Sampah yang dikelola Di TPA/TPST Regional (%)	28,54	28,54	28,54	81.093.750.000	28,54	81.017.750.000	28,54	80.902.550.000	81,59	81.187.812.500	100	81.187.812.500	2.11.0.00.0.00.03.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH TPA/TPST REGIONAL
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**14.543.060.167**		**14.840.421.370**		**15.143.229.798**		**15.501.594.394**		**15.815.626.282**	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**13.618.060.167**		**13.890.421.370**		**14.168.229.798**		**14.451.594.394**		**14.740.626.282**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nilai)	79,22	80	81	13.618.060.167	82	13.890.421.370	83	14.168.229.798	84	14.451.594.394	85	14.740.626.282	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					**450.000.000**		**450.000.000**		**450.000.000**		**475.000.000**		**475.000.000**	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	54,02	60	67	450.000.000	68	450.000.000	72	450.000.000	76	475.000.000	80	475.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**125.000.000**		**125.000.000**	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun (%)	88,28	92	97	100.000.000	98	100.000.000	99	100.000.000	99,8	125.000.000	99,9	125.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai (%)	52,41	54	55		56		57		62		66		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah (%)	64,46	66	67		68		69		70		71		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					**275.000.000**		**300.000.000**		**325.000.000**		**350.000.000**		**375.000.000**	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	83,78	100	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,75	7	8		10		11		12		13		2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	
Meningkatnya Pemanfaatan Profil Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**176.432.766.895**		**174.856.204.760**		**175.798.111.382**		**176.758.856.136**		**177.738.815.786**	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**46.171.893.237**		**47.095.331.102**		**48.037.237.724**		**48.997.982.478**		**49.977.942.128**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan	83,49	83,60	83,80	46.171.893.237	84,00	47.095.331.102	84,20	48.037.237.724	84,40	48.997.982.478	84,60	49.977.942.128	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masyarakat dan Desa (Nilai)													
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					**3.000.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa di Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota (%)	-	81,84	82,00	3.000.000.000	83,00	500.000.000	84,00	500.000.000	85,00	500.000.000	86,00	500.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					**3.000.000.000**		**3.000.000.000**		**3.000.000.000**		**3.000.000.000**		**3.000.000.000**	
Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kerja Sama Desa di Kabupaten/Kota	Nilai indeks dimensi ekonomi desa di kabupaten/kota (%)	-	70,65	72,00	3.000.000.000	73,00	3.000.000.000	74,00	3.000.000.000	75,00	3.000.000.000	76,00	3.000.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					**115.260.873.658**		**115.260.873.658**		**115.260.873.658**		**115.260.873.658**		**115.260.873.658**	
Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Aksesibilitas Desa di kabupaten/kota (%)	-	87,34	88,00	115.260.873.658	89,00	115.260.873.658	90,00	115.260.873.658	91,00	115.260.873.658	92,00	115.260.873.658	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Layanan Dasar Desa di kabupaten/kota (%)	-	81,80	83,00		84,00		85,00		86,00		87,00		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase peningkatan nilai indeks komposit Lingkungan Desa di kabupaten/kota (%)	-	73,00	74,00		75,00		76,00		77,00		78,00		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					**9.000.000.000**		**9.000.000.000**		**9.000.000.000**		**9.000.000.000**		**9.000.000.000**	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	Nilai indeks dimensi sosial desa di kabupaten/kota (%)	-	76,83	78,00	9.000.000.000	79,00	9.000.000.000	80,00	9.000.000.000	81,00	9.000.000.000	82,00	9.000.000.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Adat di Kabupaten/Kota														
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**5.951.379.455**		**6.038.757.401**		**6.134.398.229**		**6.239.099.163**		**6.353.735.370**	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					**660.000.000**		**726.000.000**		**798.600.000**		**878.460.000**		**966.306.000**	
Meningkatnya kesertaan keluarga berencana (KB) di Jawa Barat	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR (Persentase)	64,30	64,32	64,34	660.000.000	64,36	726.000.000	64,38	798.600.000	64,40	878.460.000	64,42	966.306.000	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					**2.378.293.931**		**2.388.982.904**		**2.400.503.318**		**2.412.923.785**		**2.426.318.889**	
Meningkatnya penerapan kebijakan pengendalian penduduk	Persentase Kebijakan Pengendalian Penduduk yang Diterapkan (Persentase)	75	87,5	100	2.378.293.931	100	2.388.982.904	100	2.400.503.318	100	2.412.923.785	100	2.426.318.889	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					**2.913.085.524**		**2.923.774.497**		**2.935.294.911**		**2.947.715.378**		**2.961.110.481**	
Menurunnya perkawinan anak di Jawa Barat	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama SebelumÂ UmurÂ 18Â Tahun (%)	5,78	5,28	4,78	2.913.085.524	4,28	2.923.774.497	3,78	2.935.294.911	3,28	2.947.715.378	2,78	2.961.110.481	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**449.908.421.036**		**1.158.997.133.368**		**1.198.159.735.092**		**2.156.826.077.130**		**1.466.713.124.063**	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**168.756.616.880**		**184.576.555.351**		**197.293.934.488**		**267.679.267.580**		**480.677.799.959**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan (Nilai)	84,02	85,6	85,62	91.829.653.980	85,65	98.043.896.161	85,68	100.519.509.379	85,7	138.571.549.960	85,72	319.586.521.459	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	IKM Layanan Tata Usaha (UPTD PPP LLAJ Wilayah I) (%)	0	100	100	7.150.000.000	100	7.834.000.000	100	8.783.400.000	100	10.424.740.000	100	17.396.858.000	2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(UPTD PPP LLAJ Wilayah I)														
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	IKM Layanan Tata Usaha (UPTD PPP LLAJ Wilayah II) (%)	0	100	100	4.820.000.000	100	6.645.000.000	100	7.284.500.000	100	8.182.950.000	100	14.376.223.000	2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	IKM Layanan Tata Usaha (UPTD PPP LLAJ Wilayah III) (%)	0	100	100	5.370.962.900	100	6.433.059.190	100	7.106.365.109	100	8.345.001.620	100	15.456.120.000	2.15.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH III
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)	IKM Layanan Tata Usaha (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV) (%)	0	100	100	4.850.000.000	100	5.295.000.000	100	6.454.500.000	100	26.463.800.000	100	13.493.401.000	2.15.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH IV
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (UPTD PJK Nusawiru)	IKM Layanan Tata Usaha (UPTD PJK Nusawiru) (%)	0	100	100	47.720.000.000	100	52.488.000.000	100	57.949.300.000	100	64.446.230.000	100	76.219.984.000	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN NUSAWIRU
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (UPTD PPP LLASDP)	IKM Layanan Tata Usaha (UPTD PPP LLASDP) (%)	0	100	100	4.538.000.000	100	5.156.800.000	100	5.817.480.000	100	7.024.228.000	100	13.372.352.000	2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (UPTD PPP Pelabuhan Laut)	IKM Layanan Tata Usaha (UPTD PPP Pelabuhan Laut) (%)	0	100	100	2.478.000.000	100	2.680.800.000	100	3.378.880.000	100	4.220.768.000	100	10.776.340.500	2.15.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PELABUHAN LAUT
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					**255.151.804.156**		**483.621.222.269**		**498.915.105.771**		**556.347.355.223**		**970.835.324.104**	
Meningkatnya Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum	Persentase Konektivitas Transportasi Darat (Persentase)	93,01	93,75	94,73	1.500.000.000	96,32	2.500.000.000	96,69	3.500.000.000	97,06	3.500.000.000	97,43	4.000.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Lalu Lintas Lancar dan Berkeselamatan	Persentase Daerah Rawan Kecelakaan dan Kemacetan yang Ditangani (Persentase)	53,64	61,32	63,81	3.330.000.000	65,56	12.800.665.057	67,15	13.000.000.000	69,01	15.000.000.000	70,51	15.400.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Persentase Kebijakan	100	100	100	1.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	4.000.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan Bidang Transportasi	Pengembangan Bidang Transportasi Yang Dimanfaatkan (Persentase)													
Meningkatnya Penggunaan Angkutan Umum Transportasi Darat	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Darat (Persentase)	-	3,00	6,00	2.400.000.000	9,00	4.200.000.000	12,00	4.500.000.000	15,00	4.800.000.000	18,00	4.800.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah I	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah I (%)	90.77%	90.90%	91.25%	28.800.000.000	91.55%	35.850.000.000	91.87%	32.000.000.000	92.12%	39.150.000.000	92.16%	172.748.164.586	2.15.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I
Meningkatnya Kualitas Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah II	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah II (%)	91,64	91,80	92,00	152.886.804.156	92,13	356.970.557.212	92,45	373.465.105.771	92,57	424.297.355.223	92,61	542.509.627.718	2.15.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II
Meningkatnya Kualitas Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah III	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah III (%)	74,55	79,34	84,60	34.935.000.000	89,45	35.900.000.000	90,23	31.950.000.000	90,54	33.000.000.000	90,61	93.677.531.800	2.15.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH III
Meningkatnya Kualitas Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah IV	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan LLAJ UPTD PPP LLAJ Wilayah IV (%)	96,75	96,78	96,83	29.800.000.000	96,87	31.900.000.000	96,91	37.000.000.000	96,93	33.100.000.000	96,95	133.700.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH IV
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**4.170.000.000**		**4.470.000.000**		**5.000.000.000**	
Meningkatnya Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Laut dan ASDP	Persentase Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP (Persentase)	92,86	92,86	92,86	3.000.000.000	92,86	3.000.000.000	92,86	2.170.000.000	100	2.470.000.000	100	3.000.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Pengguna Angkutan Umum Transportasi Laut dan ASDP	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum Transportasi Laut dan ASDP (Persentase)	-	1,00	2,00	500.000.000	3,00	500.000.000	4,00	500.000.000	5,00	500.000.000	6,00	500.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Layanan UPTD PP LLASDP	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPTD PP LLASDP (%)	89,88	90,03	90,45	500.000.000	90,90	500.000.000	91,14	500.000.000	91,23	500.000.000	91,31	500.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0002 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kesiapan Pengelolaan Pelabuhan Laut	Persentase Persyaratan Pengelolaan Pelabuhan Laut yang Terpenuhi (Persentase)	59,38	59,38	60,42	1.000.000.000	64,58	1.000.000.000	68,75	1.000.000.000	73,96	1.000.000.000	78,96	1.000.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PELABUHAN LAUT
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					**21.000.000.000**		**485.799.355.748**		**497.780.694.833**		**1.328.329.454.327**		**10.200.000.000**	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perkeretapian di Jawa Barat	Persentase Perencanaan Perkeretapian di Jawa Barat yang Dimanfaatkan (Persentase)	8,33	9,52	30,95	17.500.000.000	52,38	482.299.355.748	59,52	493.530.694.833	61,90	1.324.054.454.327	64,29	5.700.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Pengguna angkutan Umum Perkeretaapian	Persentase Peningkatan Pengguna Kereta Api (Persentase)	-	3,00	6,00	3.500.000.000	9,00	3.500.000.000	12,00	4.250.000.000	15,00	4.275.000.000	18,00	4.500.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**168.380.764.030**		**163.918.914.562**		**165.042.040.699**		**166.188.980.450**		**167.360.265.720**	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**51.931.174.240**		**52.969.797.725**		**54.029.193.679**		**55.109.777.563**		**56.211.973.104**	
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian-Keamanan Informasi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Nilai)	88,43	88,84	88,85	48.314.656.986	88,85	49.310.491.960	88,63	50.319.887.914	88,68	51.350.471.798	88,73	52.452.667.339	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	76,65	76,75	76,85	3.616.517.254	76,95	3.659.305.765	77,05	3.709.305.765	77,15	3.759.305.765	77,25	3.759.305.765	2.16.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSAT LAYANAN DIGITAL DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					**12.677.400.290**		**12.625.503.631**		**12.689.233.814**		**12.755.589.681**		**12.824.679.410**	
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Poin)	85,22	85,33	85,30	12.677.400.290	85,35	12.625.503.631	85,40	12.689.233.814	85,45	12.755.589.681	85,50	12.824.679.410	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					**103.772.189.500**		**98.323.613.206**		**98.323.613.206**		**98.323.613.206**		**98.323.613.206**	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	-	-	2,19	84.107.466.859	2,24	78.658.890.565	2,29	78.658.890.565	2,34	78.658.890.565	2,39	78.658.890.565	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika pada UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	-	-	2,19	19.664.722.641	2,24	19.664.722.641	2,29	19.664.722.641	2,34	19.664.722.641	2,39	19.664.722.641	2.16.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PUSAT LAYANAN DIGITAL DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**55.245.536.087**		**95.997.538.609**		**96.764.489.381**		**97.546.779.169**		**98.344.714.752**	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**37.595.536.087**		**38.347.538.609**		**39.114.489.381**		**39.896.779.169**		**40.694.714.752**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Nilai)	79,31	80,01	80,05	35.393.297.287	81	36.062.296.137	81,5	36.713.729.791	82	37.428.735.817	82,5	38.175.535.790	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM pada UPTD Balai Pelatihan Koperasi Dan Kewirausahaaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	100	100	100	2.202.238.800	100	2.285.242.472	100	2.400.759.590	100	2.468.043.352	100	2.519.178.962	2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAAN
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	
Terkendalinya Penambahan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Persentase Koperasi Usaha Simpan Pinjam Yang Mematuhi Ketentuan Izin (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	
Meningkatnya kepatuhan koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi (Persentase)	15	16	17	500.000.000	18	500.000.000	19	500.000.000	20	500.000.000	21	500.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	
Meningkatnya Koperasi memiliki sertifikat kesehatan KSP/USP	Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi (%)	25	30	35	150.000.000	40	150.000.000	45	150.000.000	50	150.000.000	55	150.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN					**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
LATIHAN PERKOPERASIAN														
SDM Koperasi yang memiliki sertifikat uji kompetensi	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat Uji Kompetensi (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya (Persentase)	70,4	74,2	78	1.000.000.000	81,8	1.000.000.000	85,6	1.000.000.000	89,4	1.000.000.000	93,2	1.000.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					**10.000.000.000**		**50.000.000.000**		**50.000.000.000**		**50.000.000.000**		**50.000.000.000**	
Meningkatnya Kemandirian UMKM	Persentase UMKM yang Mandiri (Persentase)	2,84	10	30	6.571.000.000	48	46.571.000.000	60	46.571.000.000	70	46.571.000.000	80	46.571.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha	Persentase UMKM yang Menerapkan Hasil Pembinaan (Persentase)	100	100	100	3.429.000.000	100	3.429.000.000	100	3.429.000.000	100	3.429.000.000	100	3.429.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**	
Meningkatnya Omzet Usaha UMKM	Persentase UMKM Binaan yang Meningkat Omzet Usahanya (%)	12	13	14	5.000.000.000	15	5.000.000.000	16	5.000.000.000	17	5.000.000.000	18	5.000.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**60.461.336.340**		**62.109.428.067**		**63.778.666.578**		**65.469.480.359**		**67.182.306.627**	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**51.479.836.340**		**52.509.433.067**		**53.559.621.728**		**54.630.814.163**		**55.723.430.446**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal (Persentase)	85,00	85,20	85,50	51.479.836.340	85,70	52.509.433.067	85,90	53.559.621.728	86,20	54.630.814.163	86,50	55.723.430.446	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					**4.665.000.000**		**4.865.000.000**		**5.065.000.000**		**5.265.000.000**		**5.465.000.000**	
Meratanya Sebaran Potensi Investasi di Jawa Barat	Persentase Potensi Investasi di 27 Kabupaten/Kota yang Teridentifikasi (%)	96	96	100	4.665.000.000	100	4.865.000.000	100	5.065.000.000	100	5.265.000.000	100	5.465.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					**1.500.000.000**		**1.700.000.000**		**1.900.000.000**		**2.100.000.000**		**2.300.000.000**	
Meningkatnya Promosi Investasi	JUMLAH INVESTOR YANG BERMINAT UNTUK BERINVESTASI (Investor)	12	12	12	1.500.000.000	12	1.700.000.000	12	1.900.000.000	12	2.100.000.000	12	2.300.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					**1.500.000.000**		**1.600.000.000**		**1.700.000.000**		**1.800.000.000**		**1.900.000.000**	
Pelayanan Perizinan Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000	100	1.900.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					**700.000.000**		**800.000.000**		**900.000.000**		**1.000.000.000**		**1.100.000.000**	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Lapor LKPM (%)	40	40	45	700.000.000	50	800.000.000	55	900.000.000	60	1.000.000.000	65	1.100.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					**616.500.000**		**634.995.000**		**654.044.850**		**673.666.196**		**693.876.181**	
Meningkatnya Digitalisasi dan Pemanfaatan Data Informasi PMPTSP	DIGITALISASI DAN PEMANFAATAN DATA INFORMASI PMPTSP (Persentase)	100	100	100	616.500.000	100	634.995.000	100	654.044.850	100	673.666.196	100	693.876.181	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**445.923.570.819**		**134.762.930.532**		**564.875.751.356**		**540.316.657.803**		**463.084.859.216**	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**43.858.322.678**		**44.735.489.132**		**45.630.198.914**		**46.542.802.892**		**47.473.658.950**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Nilai)	82,32	82,50	83,00	43.858.322.678	83,35	44.735.489.132	83,60	45.630.198.914	84,10	46.542.802.892	84,40	47.473.658.950	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					**3.962.703.141**		**4.391.153.081**		**4.895.492.922**		**5.491.572.879**		**6.047.532.402**	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,69	0,70	0,72	831.197.505	0,73	1.051.496.881	0,75	1.326.871.102	0,76	1.671.088.877	0,78	1.950.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang dimanfaatkan (%)	72,00	72,72	73,45	250.000.000	73,96	250.000.000	74,00	250.000.000	74,57	250.000.000	74,94	250.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	Angka pemuda aktif mengikuti organisasi (Poin)	1,76	1,79	1,83	1.491.060.925	1,86	1.550.167.018	1,90	1.615.183.720	1,93	1.686.702.092	1,97	1.765.372.301	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya peran pemuda dalam kepemimpinan	Angka pemuda yang menduduki posisi manajerial (Poin)	3,87	3,91	3,94	1.390.444.711	3,98	1.539.489.182	4,01	1.703.438.100	4,05	1.883.781.910	4,09	2.082.160.101	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					**397.102.545.000**		**84.636.288.319**		**513.350.059.520**		**487.282.282.032**		**408.563.667.864**	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	17	17,19	25	63.839.519.603	20	67.365.163.319	20,5	477.844.434.520	26	72.144.842.785	20,5	73.258.042.864	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berolahraga	Persentase Peningkatan Masyarakat aktif Berolahraga (Persentase)	10	10	7,5	5.957.400.397	8	8.200.000.000	8,5	7.200.000.000	9	9.000.000.000	10	8.000.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan (%)	87,50	87,87	88,31	300.000.000.000	89,19	1.000.000.000	89,63	1.000.000.000	90,07	1.000.000.000	90,51	300.000.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kesejahteraan atlet	Persentase atlet yang mendapatkan penghargaan sesuai standar (%)	100	100	100	27.305.625.000	100	8.071.125.000	100	27.305.625.000	100	405.137.439.247	100	27.305.625.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	16	16,47	16,96	1.000.000.000	17,47	1.000.000.000	17,77	1.000.000.000	18,48	1.000.000.000	18,67	1.000.000.000	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kepramukaan (Persentase)													
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
Tercapaianya Kolaborasi Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	3,07	3,07	3,10	1.000.000.000	3,10	1.000.000.000	3,20	1.000.000.000	3,20	1.000.000.000	3,30	1.000.000.000	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) (Skor)	642	767	778	1.000.000.000	789	1.000.000.000	803	1.000.000.000	817	1.000.000.000	831	1.000.000.000	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**40.273.654.010**		**41.328.458.137**		**42.418.643.672**		**43.563.985.162**		**44.766.402.883**	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**30.083.564.010**		**30.832.974.629**		**31.599.076.573**		**32.400.500.557**		**33.237.953.020**	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD PKDJB	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PKDJB (Poin)	95,56	95,57	95,67	30.083.564.010	95,77	30.832.974.629	95,87	31.599.076.573	95,97	32.400.500.557	96,07	33.237.953.020	3.26.2.22.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					**1.651.170.000**		**1.764.461.604**		**1.884.686.654**		**2.012.269.477**		**2.147.660.369**	
Meningkatnya Perlindungan Warisan Budaya Jawa Barat	Persentase Warisan Budaya Jawa Barat yang dilindungi (%)	-	16,67	16,67	651.170.000	16,67	764.461.604	16,67	884.686.654	16,67	1.012.269.477	16,67	1.147.660.369	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya Pelindungan Warisan Budaya Jawa Barat pada UPTD PKDJB	Persentase Warisan Budaya Jawa Barat yang dilindungi pada UPTD PKDJB (Persentase)	56,53	16,67	16,67	1.000.000.000	16,67	1.000.000.000	16,67	1.000.000.000	16,67	1.000.000.000	16,67	1.000.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN					**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KESENIAN TRADISIONAL														
Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan SDM kesenian tradisional Jawa Barat	Persentase pelaku dan lembaga kesenian tradisional yang mengalami peningkatan kapasitas dan kompetensi (Persentase)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	
Pelestarian dan pemanfaatan sejarah lokal Jawa Barat	Persentase SDM, lembaga, dan data sejarah lokal yang diberdayakan (Persentase)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**	
Cagar Budaya terlindungi	Persentase Cagar Budaya yang terlindungi dan dimanfaatkan (%)	43,18	16,67	16,67	3.000.000.000	16,67	3.000.000.000	16,67	3.000.000.000	16,67	3.000.000.000	16,67	3.000.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Cagar Budaya terlindungi pada UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat	Persentase Cagar Budaya yang terlindungi dan dimanfaatkan (%)	43,18	16,67	16,67	2.000.000.000	16,67	2.000.000.000	16,67	2.000.000.000	16,67	2.000.000.000	16,67	2.000.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					**3.138.920.000**		**3.331.021.904**		**3.534.880.445**		**3.751.215.128**		**3.980.789.494**	
Benda Koleksi Museum Sri Baduga dan Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat lestari	Jumlah Benda Koleksi Museum Sri Baduga dan Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang lestari (Anakan)	0	7.390	7.390	3.138.920.000	7.390	3.331.021.904	7.390	3.534.880.445	7.390	3.751.215.128	7.390	3.980.789.494	3.26.2.22.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**48.797.724.795**		**49.662.329.292**		**50.623.551.266**		**51.629.223.203**		**52.640.248.581**	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**45.554.184.059**		**46.393.867.741**		**47.321.745.096**		**48.268.179.997**		**49.233.543.598**	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas	89,61	89,7	90	45.554.184.059	91	46.393.867.741	92	47.321.745.096	93	48.268.179.997	94	49.233.543.598	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Nilai)													
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					**2.743.540.736**		**2.743.540.736**		**2.753.040.736**		**2.764.840.736**		**2.804.840.736**	
Meningkatnya layanan Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan	Persentase Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (%)	-	27	27	2.743.540.736	32	2.743.540.736	37	2.753.040.736	42	2.764.840.736	57	2.804.840.736	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (%)	-	88,96	89		90		91		92		93		2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase Perpustakaan yang Dibina sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) (%)	-	30	75		77		79		81		82		2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tingkat Kunjungan ke Perpustakaan (Angka)	-	93,75	94,95		96,05		97,25		98,45		99,65		2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					**500.000.000**		**524.920.815**		**548.765.434**		**596.202.470**		**601.864.247**	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	24	32	40	500.000.000	48	524.920.815	56	548.765.434	64	596.202.470	72	601.864.247	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**2.263.400.000**		**2.376.950.000**		**2.413.445.612**		**2.458.445.612**		**2.485.445.611**	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					**876.950.000**		**876.950.000**		**878.445.612**		**898.445.612**		**910.445.611**	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	100	100	100	876.950.000	100	876.950.000	100	878.445.612	100	898.445.612	100	910.445.611	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					**936.450.000**		**1.000.000.000**		**1.015.000.000**		**1.020.000.000**		**1.030.000.000**	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip (%)	100	100	100	936.450.000	100	1.000.000.000	100	1.015.000.000	100	1.020.000.000	100	1.030.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					**450.000.000**		**500.000.000**		**520.000.000**		**540.000.000**		**545.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	-	60	61	450.000.000	62	500.000.000	63	520.000.000	64	540.000.000	65	545.000.000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**183.087.913.568**		**541.868.921.840**		**251.971.237.777**		**563.639.918.157**		**427.166.460.713**	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**88.112.913.568**		**89.875.171.839**		**91.672.675.276**		**93.506.128.782**		**95.376.251.357**	
Meningkatnya kualitas Birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan (Nilai)	87,01	88	88	38.264.029.018	88	32.213.548.183	88	32.049.730.318	88	28.879.167.195	88	25.717.699.204	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di CDKPWS	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDKPWS (Poin)	90	90	90	3.499.322.872	90	3.094.034.179	90	3.420.442.290	90	3.563.777.447	90	3.825.633.177	3.25.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di CDKPWU	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDKPWU (Poin)	71	71	90	4.506.177.235	90	3.480.147.941	90	3.374.298.167	90	3.077.564.134	90	2.862.465.132	3.25.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PPC	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPC (Poin)	85	86	86	9.033.234.793	86	15.497.865.506	86	14.495.732.275	86	17.690.066.242	86	20.473.435.861	3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PELABUHAN PERIKANAN CILAUTEREUN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PPMC	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPMC (Poin)	78	80	80	4.039.874.593	80	17.936.808.012	80	22.115.385.618	80	24.625.390.893	80	26.689.352.667	3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PELABUHAN PERIKANAN MUARA CIASEM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDKPWS	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PSDKPWS (Poin)	85	85,25	85,5	2.362.440.107	85,75	2.237.317.630	86	2.457.406.255	86,25	2.250.570.975	86,5	2.519.266.141	3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PSDKPWU	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PSDKPWU (Poin)	82	82,25	82,5	1.199.626.110	82,75	1.281.710.410	83	1.325.065.768	83,25	1.364.771.807	83,5	1.428.185.977	3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah UPTD PENGUJIAN DAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PENGUJIAN DAN	90	90,25	90,25	8.132.510.593	90,26	4.031.437.581	90,26	3.987.445.856	90,27	4.145.601.320	90,27	4.408.505.697	3.25.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU PRODUK PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENERAPAN MUTU PRODUK PERIKANAN	PENERAPAN MUTU PRODUK PERIKANAN (Poin)													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PAPLWS	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PAPLWS (Poin)	85	85	85	6.090.000.000	85	4.166.591.140	85	3.066.402.024	85	3.001.633.904	85	2.887.126.570	3.25.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH SELATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD PAPLWU	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD PAPLWU (Poin)	83	83	83	10.985.698.247	83	5.935.711.255	83	5.380.766.704	83	4.907.584.866	83	4.564.580.931	3.25.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH UTARA
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					**3.000.000.000**		**3.000.000.000**		**3.000.000.000**		**3.000.000.000**		**3.000.000.000**	
Meningkatnya Produksi Garam di Wilayah Selatan	Jumlah Produksi Garam di Wilayah Selatan (Ton)	63	71,82	71,82	77.460.837	71,82	82.216.800	71,82	92.082.236	71,82	102.987.822	71,82	115.007.447	3.25.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN
Meningkatnya Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Selatan (CDKPWS) (%)	72,79	73	73,2	1.011.986.957	73,4	1.051.002.033	73,6	1.102.860.098	73,8	1.140.050.191	74	1.188.295.408	3.25.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN
Meningkatnya Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Utara (CDKPWU)	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Utara (CDKPWU) (%)	32,43	32,5	32,5	691.113.043	32,5	652.097.967	32,5	600.239.902	32,5	563.049.809	32,5	514.804.592	3.25.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA
Meningkatnya Produksi Garam di Wilayah Utara	Jumlah Produksi Garam di Wilayah Utara (Ton)	16.451,25	66.000,00	67.000,00	335.663.629	68.000,00	360.599.998	69.000,00	354.271.453	70.000,00	347.569.233	71.000,00	340.468.206	3.25.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA
Meningkatnya Produksi Garam	Jumlah produksi Garam (Ton)	211.046,319	215.000	220.000	500.375.534	230.000	470.683.202	240.000	467.146.311	250.000	462.942.945	260.000	458.024.347	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Terjaganya kawasan di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Persentase Ruang Laut yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (%)	85,5	87,21	88,95	383.400.000	90,73	383.400.000	92,55	383.400.000	94,4	383.400.000	96,29	383.400.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN					**53.489.895.000**		**404.152.975.050**		**104.942.040.310**		**405.881.027.968**		**256.998.423.282**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	291.284,149	282.608,47	282.707,39	14.190.688.251	282.813,40	29.587.353.875	282.919,46	7.537.148.972	283.032,62	33.453.673.184	283.145,84	20.626.933.877	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Laut Wilayah Selatan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut Wilayah Selatan (Ton)	12.069	15.859,00	15.865,00	10.525.966.112	15.871,00	50.340.945.375	15.877,00	15.205.990.775	15.883,00	67.469.606.850	15.889,00	49.431.581.244	3.25.0.00.0.00.01.0003 - UPTD PELABUHAN PERIKANAN CILAUTEREUN
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Laut Wilayah Utara (UPTD PPMC)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut Wilayah Utara (Ton)	241.492	251.272,00	251.360,00	28.773.240.637	251.454,00	324.224.675.800	251.548,00	82.198.900.563	251.649,00	304.957.747.934	251.750,00	186.939.908.161	3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPTD PELABUHAN PERIKANAN MUARA CIASEM
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					**35.353.855.000**		**41.121.087.450**		**47.984.094.066**		**56.151.071.938**		**65.869.775.606**	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.298.112,232	1.309.100,00	1.309.150,00	2.745.172.926	1.309.200,00	3.642.031.904	1.309.250,00	4.747.019.273	1.309.300,00	6.252.976.400	1.309.350,00	8.910.155.137	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut di wilayah selatan (CDKPWS)	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut di wilayah selatan (CDKPWS) (Ton)	304.085,908	555.441,71	555.462,93	10.429.206.073	555.484,13	13.144.645.950	555.505,34	16.276.077.432	555.526,55	20.367.566.698	555.547,75	27.571.552.981	3.25.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN
Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut di wilayah utara (CDKPWU)	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut di wilayah selatan (CDKPWU) (Ton)	535.715,16	753.658,29	753.687,08	7.843.351.218	753.715,87	8.671.504.533	753.744,66	9.418.689.034	753.773,45	10.338.916.005	753.802,25	12.276.999.473	3.25.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA
Meningkatnya produksi perikanan budidaya air payau dan laut di wilayah selatan (UPTD PAPLWS)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya air payau dan laut di wilayah selatan pada UPTD PAPLWS (Ton)	22.731,7	21.505,28	21.506,10	7.718.297.191	21.506,92	7.750.157.177	21.507,75	8.417.953.324	21.508,57	8.594.223.929	21.509,39	10.205.255.812	3.25.0.00.0.00.01.0008 - UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH SELATAN
Meningkatnya produksi perikanan budidaya air payau dan laut di wilayah utara (UPTD PAPLWU)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya air payau dan laut di wilayah Utara (UPTD PAPLWU) (Ton)	1.221.572,73	423.854,02	423.870,21	6.617.827.591	423.886,40	7.912.747.887	423.902,60	9.124.355.002	423.918,79	10.597.388.905	423.934,98	6.905.812.203	3.25.0.00.0.00.01.0009 - UPTD PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT WILAYAH UTARA
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN					**2.131.250.000**		**2.519.687.501**		**2.972.428.125**		**3.501.689.469**		**4.122.010.468**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Wilayah Selatan (PSDKPWS)	Persentase Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku di Wilayah Selatan (PSDKPWS) (%)	82,50	85,75	86	213.653.660	86,25	285.382.030	86,50	434.238.426	86,75	566.909.882	87	728.661.006	3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN
Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Sektor Kelautan dan Perikanan yang Terselesaikan (%)	96,05	80,00	82,50	1.676.654.375	85,00	1.934.616.063	87,50	2.114.585.368	90,00	2.422.118.606	92,50	2.783.593.669	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Wilayah Utara (PSDKPWU)	Persentase Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku di Wilayah Utara (PSDKPWU) (%)	75	85,75	86	240.941.965	86,25	299.689.408	86,5	423.604.331	86,75	512.660.981	87	609.755.793	3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					**1.000.000.000**		**1.200.000.000**		**1.400.000.000**		**1.600.000.000**		**1.800.000.000**	
Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	46,61	24,17	24,44	600.000.000	24,71	720.000.000	24,98	840.000.000	25,25	960.000.000	25,53	1.080.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan	Persentase produk perikanan yang sesuai standar mutu dan keamanan (%)	100	100	100	400.000.000	100	480.000.000	100	560.000.000	100	640.000.000	100	720.000.000	3.25.0.00.0.00.01.0007 - UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU PRODUK PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**65.340.059.724**		**68.222.122.600**		**70.222.122.600**		**71.222.122.600**		**72.222.122.600**	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**56.490.060.724**		**57.472.122.600**		**58.472.122.600**		**59.472.122.600**		**60.472.122.600**	
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dan umum pada Dinas Pariwisata dan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Angka)	49,83	50,03	50,23	56.490.060.724	50,43	57.472.122.600	50,63	58.472.122.600	50,83	59.472.122.600	51,03	60.472.122.600	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebudayaan Jawa Barat														
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**	
Meningkatkan jumlah destinasi pariwisata yang memiliki sistem pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan yang sesuai standar	Jumlah Destinasi Wisata Unggulan Provinsi dan/atau Desa/Kampung Wisata Unggulan Provinsi yang memenuhi standar (Lokasi)	-	5	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Persentase Destinasi Wisata Provinsi yang memenuhi standar (%)	40	60,00	60,00		80,00		80,00		100		100,00		3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					**2.099.999.000**		**4.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**	
Meningkatnya promosi pariwisata Jawa Barat secara nasional dan internasional	Persentase Aktivitas Promosi yang terealisasi (%)	31,82	11,76	13,73	2.099.999.000	15,69	4.000.000.000	17,65	5.000.000.000	19,61	5.000.000.000	21,57	5.000.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					**750.000.000**		**750.000.000**		**750.000.000**		**750.000.000**		**750.000.000**	
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi industri kreatif dan Jumlah Tenaga Kerja Industri kreatif	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Angka)	163.814	155.000	160.000	750.000.000	165.000	750.000.000	172.000	750.000.000	173.000	750.000.000	175.000	750.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi	Persentase pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi (%)	91,82	14,29	14,29	1.000.000.000	17,14	1.000.000.000	20	1.000.000.000	22,86	1.000.000.000	25,71	1.000.000.000	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**543.204.184.074**		**609.366.104.830**		**624.155.758.785**		**640.289.443.786**		**657.987.213.646**	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					**333.482.168.643**		**340.100.812.016**		**346.902.828.256**		**353.840.884.821**		**360.917.702.518**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Meningkatnya kualitas tata kelola Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan (Nilai)	84,23	85,02	85,3	55.232.664.697	85,52	53.207.803.752	86,08	54.271.959.828	86,49	55.357.399.024	87,5	56.464.547.005	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Nilai)	86,68	86,70	86,72	200.182.455.304	86,74	204.186.104.410	86,76	208.269.826.498	86,78	212.435.223.028	86,80	216.683.927.489	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD Balai Benih Hortikultura	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Balai Benih Hortikultura (Poin)	80	80	80	10.000.000.000	80	10.200.000.000	80	10.404.000.000	80	10.612.080.000	80	10.824.321.600	3.27.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA
Meningkatnya kualitas tata kelola Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (BPSBP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD BPSBP (Nilai)	96,19	85,02	85,07	2.300.593.777	85,12	3.424.075.646	85,17	3.492.557.158	85,22	3.562.408.302	85,27	3.633.656.468	3.27.0.00.0.00.02.0002 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD Balai Benih Kentang	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Balai Benih Kentang (Poin)	80	80	80	10.000.000.000	80	10.200.000.000	80	10.404.000.000	80	10.612.080.000	80	10.824.321.600	3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI BENIH KENTANG
Meningkatnya kualitas tata kelola Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (BPP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD BPP (Nilai)	100	85,02	85,05	2.395.904.596	85,08	3.969.795.596	85,11	4.049.191.508	85,14	4.130.175.338	85,17	4.212.778.844	3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Balai Benih Padi dan Palawija (Poin)	80	80	80	10.000.000.000	80	10.200.000.000	80	10.404.000.000	80	10.612.080.000	80	10.824.321.600	3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA
Meningkatnya kualitas tata kelola Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (BPPBP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD BPPBP (Nilai)	100	95	95	3.370.550.269	95	3.913.032.612	95	3.991.293.264	95	4.071.119.129	95	4.152.541.512	3.27.0.00.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan	80	80	80	10.000.000.000	80	10.200.000.000	80	10.404.000.000	80	10.612.080.000	80	10.824.321.600	3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hortikultura (Poin)													
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Poin)	80	80	80	10.000.000.000	80	10.200.000.000	80	10.404.000.000	80	10.612.080.000	80	10.824.321.600	3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian (Poin)	80	80	80	10.000.000.000	80	10.200.000.000	80	10.404.000.000	80	10.612.080.000	80	10.824.321.600	3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Poin)	80	80	80	10.000.000.000	80	10.200.000.000	80	10.404.000.000	80	10.612.080.000	80	10.824.321.600	3.27.0.00.0.00.01.0007 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					**75.455.843.945**		**118.533.143.733**		**119.615.257.390**		**120.725.116.700**		**122.002.295.493**	
Poktan menerapkan GAP Perkebunan	Persentase poktan yang menerapkan GAP Perkebunan (%)	5,55	8,60	9,60	7.939.774.914	10,60	7.651.548.990	11,54	7.812.337.816	12,41	8.095.638.342	13,22	8.305.410.350	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Kelompok tani melakukan diversifikasi produk perkebunan	Persentase Poktan yang produktif mendiversifikasi produk perkebunan (%)	13,49	24,19	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya populasi ternak	Produksi peternakan (Ton)	2.167.697	2.180.630	2.223.537	2.673.497.462	2.234.289	2.700.232.452	2.245.136	2.700.232.452	2.256.081	2.727.234.776	2.267.123	3.127.234.776	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Meningkatnya Kepatuhan Distributor obat Hewan terhadap Persyaratan Teknis	Persentase unit usaha distributor obat hewan yang mematuhi ketentuan persyaratan teknis (%)	100	100	100	95.585.379	100	97.495.086	100	122.363.000	100	156.555.350	100	187.255.350	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Meningkatnya penggunaan benih perkebunan yang bersertifikat	Persentase benih perkebunan	40,45	16,6	33,2	784.212.178	49,8	7.169.750.743	66,4	6.821.576.608	83	6.683.725.274	100	6.479.539.554	3.27.0.00.0.00.02.0002 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang bersertifikat (%)													SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN
Meningkatnya produksi bibit ternak domba yang memenuhi standar	Persentase produksi benih/bibit ternak domba yang memenuhi standar (%)	89,45	85	85	6.495.222.047	85	6.560.474.267	85	6.560.474.267	85	6.626.279.700	85	6.656.177.700	2.09.3.27.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI
Meningkatnya Produktivitas Ternak Ayam sentul dan Itik rambon	Persentase menetasnya ternak Ayam Sentul dan Itik Rambon (%)	71	74	77	4.952.676.944	79	5.079.203.713	81	5.479.203.713	83	5.588.787.700	83	5.588.787.700	2.09.3.27.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI
Meningkatnya produksi susu segar sapi perah yang berkualitas untuk percontohan	Persentase volume susu segar yang memenuhi standar percontohan (%)	98	98	98	5.342.028.600	98	5.395.448.286	98	5.395.448.286	98	5.449.418.768	98	5.449.418.958	2.09.3.27.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
Pakan memiliki jaminan kualitas keamanan dan mutu	Persentase permohonan pengujian mutu dan keamanan pakan yang terlayani sesuai standar (%)	100	100	100	1.610.211.032	100	1.626.313.142	100	1.626.313.160	100	1.658.839.426	100	1.658.839.426	2.09.3.27.0.00.01.0007 - UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG
Kelompok tani melakukan pengolahan produk perkebunan	Persentase Poktan yang produktif melakukan pengolahan produk perkebunan (%)	-	-	42,86	726.474.963	57,14	1.570.800.000	71,43	1.265.501.699	85,71	1.153.452.985	100	742.157.663	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya produktivitas bibit ternak sapi perah	Persentase performa bibit ternak sapi perah di BPPIBTSP Bunikasih yang sesuai standar (%)	37	75	77	7.595.655.833	80	7.671.612.392	82	7.671.612.392	85	7.748.328.515	90	7.748.328.515	2.09.3.27.0.00.01.0008 - UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH
Meningkatnya pengguna benih yang terlayani kebutuhan benih bermutu	Persentase Pengguna Benih yang terlayani kebutuhan benih bermutu (%)	100	100	100	5.175.420.042	100	13.827.233.570	100	14.758.620.035	100	15.254.980.862	100	16.088.019.238	3.27.0.00.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN
Meningkatnya produktivitas sapi potong	Persentase bibit dan benih sapi potong percontohan yang sesuai standar (%)	-	22	25	4.215.394.103	30	4.257.548.044	35	4.257.548.000	40	4.300.123.480	50	4.300.123.480	2.09.3.27.0.00.01.0009 - UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS
Meningkatnya Budidaya Benih Tanaman Hortikultura pada UPTD Balai Benih Hortikultura	Persentase Peningkatan Produksi Benih Tanaman Hortikultura pada UPTD	0	5	5	538.085.428	5	1.064.274.161	5	1.046.961.595	5	1.038.301.416	5	1.026.100.796	3.27.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Balai Benih Hortikultura (%)													
Meningkatnya budidaya benih kentang di Jawa Barat pada UPTD Balai Benih Kentang	Persentase Peningkatan Produksi Benih Kentang pada UPTD Balai Benih Kentang (%)	-	5	5	538.085.428	5	1.064.274.161	5	1.046.961.595	5	1.038.301.416	5	1.026.100.796	3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI BENIH KENTANG
Meningkatnya Budidaya Benih Padi dan Palawija pada UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija	Persentase Peningkatan Produksi Benih Padi dan Palawija pada UPTD Balai Benih Padi dan Palawija (%)	0	5	5	2.905.661.311	5	6.385.644.966	5	7.119.338.847	5	7.475.770.194	5	8.003.586.209	3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA
Meningkatnya kualitas penggunaan dan pengawasan sarana pertanian UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pengawasan Sarana Pertanian pada UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian (%)	-	0,139	0,139	1.399.022.113	0,139	2.979.967.651	0,139	3.140.884.786	0,139	3.322.564.531	0,139	3.488.742.706	3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
Meningkatnya Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persentase Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100	100	100	10.761.708.560	100	21.285.483.221	100	20.939.231.903	100	20.766.028.316	100	20.522.015.920	3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya sarana alat mesin pertanian	Persentase Penggunaan Alat Mesin Pertanian (%)	100	100	100	10.761.708.560	100	21.285.483.221	100	20.939.231.903	100	20.766.028.316	100	20.522.015.920	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Terkendalinya Serangan OPT pada Tanaman Perkebunan	Persentase Kelompok Tani yang terfasilitasi Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (%)	-	-	100	945.419.048	100	860.355.667	100	911.415.333	100	874.757.333	100	1.082.440.436	3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					**80.309.347.596**		**94.873.961.599**		**100.909.410.227**		**107.994.300.552**		**116.537.833.705**	
Meningkatnya Produktivitas olahan produk perkebunan melalui pemanfaatan prasarana	Persentase poktan yang meningkatkan produktivitas olahannya (%)	4,63	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pascapanen dan pengolahan														
Meningkatnya pengembangan jalan produksi perkebunan	Persentase pengembangan jalan produksi perkebunan yang berfungsi (%)	1,98	2,78	3,58	3.152.627.501	4,67	4.589.839.492	5,86	4.633.345.860	7,06	3.831.395.011	8,25	3.677.739.470	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya Prasarana peternakan	Persentase peningkatan prasarana peternakan (%)	20,00	20,00	20,00	1.529.587.625	20,00	1.682.543.261	20,00	1.934.924.750	20,00	2.167.445.289	20,00	2.166.455.289	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Meningkatnya prasarana penanganan dampak perubahan iklim yang berfungsi	Presentase pengembangan prasarana penanganan dampak perubahan iklim yang berfungsi (%)	-	-	4,58	3.391.539.795	5,41	2.528.449.482	6,31	2.509.877.139	7,22	2.481.887.246	8,12	2.445.144.592	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya prasarana laboratorium pengujian penyakit hewan dan produk hewan	Persentase peningkatan prasarana peternakan di UPTD BKHKMV (%)	50	60	65	1.677.980.742	70	1.023.303.890	75	1.276.100.356	80	1.503.611.392	85	1.513.611.392	2.09.3.27.0.00.01.0001 - UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Meningkatnya Produktivitas olahan produk perkebunan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan	Persentase poktan yang meningkat produktivitas olahannya (%)	-	0	43,87	5.536.852.299	57,62	4.543.962.305	70,63	4.624.251.948	85,13	5.482.115.311	100	5.818.245.092	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya produksi DOC dan DOD yang berkualitas	Persentase Kelompok Peternak Binaan yang mendapatkan Bantuan DOC (%)	0	8	19	532.030.758	33	615.436.909	50	689.203.338	73	758.123.672	100	758.123.672	2.09.3.27.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI
Terpenuhinya kebutuhan prasarana perkantoran	Persentase kebutuhan prasarana kantor yang terpenuhi (%)	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.27.0.00.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN
Terpenuhinya prasarana pendukung produktivitas ternak domba	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan di UPTD BPPTDK Margawati (%)	66,67	100	23,08	3.884.730.126	38,46	5.273.203.138	53,85	5.785.987.514	69,23	6.264.586.265	84,62	5.264.586.265	2.09.3.27.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI
Terpenuhinya Prasarana Peternakan di UPTD BPPTU Jatiwangi	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan di UPTD BPPTU Jatiwangi (%)	0	5	30	6.675.000.000	55	10.342.500.000	80	11.223.600.000	90	10.045.960.000	100	12.000.950.000	2.09.3.27.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI
Terpenuhinya Prasarana Peternakan Sapi Potong	Persentase peningkatan prasarana peternakan pada	40	40	65	1.565.741.496	85	1.722.312.645	90	2.028.990.162	95	3.514.788.194	100	4.514.588.194	2.09.3.27.0.00.01.0009 - UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	UPTD BPPIBTSP Ciamis (%)													INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS
Terpenuhinya Prasarana Pelayanan Rumah Sakit Hewan	Persentase peningkatan prasarana peternakan pada UPTD RSH (%)	100	100	50	1.538.275.000	60	1.845.930.000	70	3.067.441.600	80	3.680.929.920	90	3.580.929.920	2.09.3.27.0.00.01.0010 - UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
Terpenuhinya prasarana peternakan di UPTD BPTSPHPT Cikole	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan pada UPTD BPPTSPHPT Cikole (%)	33,3	42	50	2.036.524.168	60	2.240.176.584	72	2.208.997.200	89	3.059.896.920	100	3.059.896.988	2.09.3.27.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
Terlaksananya pengujian mutu dan kemanan pakan di UPTD BPMKP/BP Cikole	Persentase peningkatan prasarana peternakan pada UPTD BPMKP/BP (%)	100	100	100	4.150.000.000	100	1.565.000.000	100	1.112.800.000	100	1.024.080.000	100	1.024.080.000	2.09.3.27.0.00.01.0007 - UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG
Meningkatnya Budidaya Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (%)	-	0,2	0,2	14.366.666.667	0,2	18.403.000.000	0,2	19.239.570.000	0,2	20.235.088.300	0,2	21.419.755.077	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Terpenuhinya prasarana pendukung produktivitas bibit sapi perah	Persentase peningkatan prasarana peternakan pada UPTD BPPIBTSP Bunikasih (%)	33,3	33,3	46,7	1.538.458.085	60	1.692.303.893	73,3	2.095.180.360	86,6	3.474.216.432	100	6.454.217.600	2.09.3.27.0.00.01.0008 - UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH
Meningkatnya Budidaya Tanaman Hortikultura	Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (%)	-	0,5	0,5	14.366.666.667	0,5	18.403.000.000	0,5	19.239.570.000	0,5	20.235.088.300	0,5	21.419.755.077	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya Frekuensi Pertanaman Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) (%)	-	1,63	1,63	14.366.666.667	1,63	18.403.000.000	1,63	19.239.570.000	1,63	20.235.088.300	1,63	21.419.755.077	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					**7.424.000.000**		**7.424.000.000**		**7.424.000.000**		**7.424.000.000**		**7.424.000.000**	
Meningkatnya Mutu Produk Hewan	Persentase peningkatan Mutu Produk Hewan (Persentase)	18,33	15	7	220.000.000	7	220.000.000	7	220.000.000	7	220.000.000	7	220.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Terkendalinya penyakit hewan dari wilayah terdampak PHMSZ di Jawa Barat	Persentase Penurunan Kejadian penyakit Hewan Menular (%)	74,09	5	5	2.733.000.000	7	2.733.000.000	7	2.733.000.000	10	2.733.000.000	10	2.733.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya deteksi penyakit hewan dan produk hewan	Persentase peningkatan sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teruji (Persentase)	100	100	5	1.683.000.000	5	1.683.000.000	5	1.683.000.000	5	1.683.000.000	5	1.683.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0001 - UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Produk hasil ternak memiliki jaminan mutu ASUH	Persentase produk Susu ASUH yang tersertifikasi (Persentase)	80	100	100	851.000.000	100	851.000.000	100	851.000.000	100	851.000.000	100	851.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Hewan	Tingkat Kesembuhan pasien (%)	97,21	93,2	93,5	1.937.000.000	93,75	1.937.000.000	94	1.937.000.000	94,2	1.937.000.000	94,5	1.937.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0010 - UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					**27.596.924.587**		**29.058.951.750**		**29.443.340.781**		**29.840.103.074**		**30.200.714.616**	
Meningkatnya luas lahan perkebunan yang tertangani dari dampak perubahan iklim	Persentase luas lahan perkebunan terdampak perubahan iklim yang tertangani (%)	2,18	3,38	2,26	182.614.527	3,77	310.000.000	5,28	310.000.000	6,78	310.000.000	8,29	310.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Tanaman Pangan dan Hortikultura terlindungi dari Gangguan Serangan OPT/DPI pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persentase Luas Lahan yang Terlindungi dari Serangan OPT/DPI pada UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	98,22	95,50	95,53	21.620.311.060	95,55	21.467.511.060	95,58	21.284.895.700	95,60	20.568.884.587	95,63	20.815.514.616	3.27.0.00.0.00.01.0007 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya Pengujian Kandungan Kimia Sarana Produksi dan Produk Hasil Pertanian	Persentase Sarana Produksi dan Produk Hasil Pertanian yang memiliki hasil uji kandungan kimia (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya perlindungan usaha pertanian	Persentase Peningkatan petani yang terlindungi usaha pertaniannya (%)	-	1	1	4.000.000.000	1	4.400.000.000	1	4.840.000.000	1	5.824.000.000	1	5.856.400.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Terkendalinya Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Laju peningkatan luas pengendalian serangan OPT tanaman perkebunan (%)	25	25	-	793.999.000	-	1.881.440.690	-	2.008.445.081	-	2.137.218.487	-	2.218.800.000	3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rasio penanganan seranganÂ OPTÂ Perkebunan (%)	-	-	38		49,86		61,48		62,01		62,5		3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					**350.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**		**400.000.000**	
Terkendalinya Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada UPTD BPSBTPH	Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan/kompetensi produsen dan pengedar benih tanaman pangan dan hortikultura pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya kinerja perkebunan besar	Persentase Perkebunan Besar yang berizin dan meningkat kinerjanya (%)	9,87	15,79	28,95	150.000.000	43,2	200.000.000	56,36	200.000.000	68,15	200.000.000	80,49	200.000.000	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					**18.585.899.303**		**18.975.235.732**		**19.460.922.131**		**20.065.038.639**		**20.504.667.314**	
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perkebunan (%)	34,52	75	75	3.476.842.351	75	3.614.166.358	75	3.732.170.011	75	3.855.035.416	75	3.982.962.875	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia perkebunan terhadap pengendalian OPT tanaman tembakau	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkebunan terhadap pengendalianÂ OPT (%)	-	-	75	945.419.048	75	892.522.333	75	946.148.667	75	1.103.921.667	75	1.082.440.436	3.27.0.00.0.00.02.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
Meningkatnya produktivitas pelaku usaha peternakan	Persentase Pelaku Usaha Peternakan yang produktif (%)	100	100	100	2.264.000.000	100	2.264.000.000	100	2.264.000.000	100	2.264.000.000	100	2.264.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Manusia dan kelembagaan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh (%)	99,6	100	100	8.263.120.247	100	8.442.376.646	100	8.557.621.788	100	8.744.946.107	100	8.867.646.514	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya SDM Peternak dan Pelaku Usaha Ketahanan Pangan di Jawa Barat	Persentase alumni pelatihan yang menerapkan Hasil Pelatihan Bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan (Persentase)	60	60	65	1.736.000.000	65	1.736.000.000	70	1.736.000.000	70	1.736.000.000	75	1.736.000.000	2.09.3.27.0.00.01.0002 - UPTD BALAI PELATIHAN PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN CIKOLE LEMBANG
Meningkatnya Kompetensi SDM pertanian pada UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase SDM Pertanian yang bersertifikat kompetensi pada UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	19,70	21,21	22,73	1.900.517.657	24,24	2.026.170.395	25,76	2.224.981.665	27,27	2.361.135.449	28,79	2.571.617.489	3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					**246.403.198.791**		**276.555.262.773**		**281.800.368.028**		**287.140.375.389**		**292.577.182.896**	
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**232.603.198.793**		**237.255.262.769**		**242.000.368.024**		**246.840.375.385**		**251.777.182.892**	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kehutanan (Nilai)	80	85	86	192.072.922.793	87	195.657.559.169	88	198.962.094.064	89	200.706.674.029	90	202.874.511.400	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada CDK Wilayah I	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDK Wilayah I (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada CDK Wilayah II	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDK Wilayah II (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada CDK Wilayah III	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDK Wilayah III (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada CDK Wilayah IV	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDK Wilayah IV (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada CDK Wilayah V	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDK Wilayah V (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
layanan pada CDK Wilayah VI	pada CDK Wilayah VI (Poin)													KEHUTANAN WILAYAH VI
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada CDK Wilayah VII	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDK Wilayah VII (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada CDK Wilayah VIII	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDK Wilayah VIII (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada CDK Wilayah IX	Indeks Kepuasan Masyarakat pada CDK Wilayah IX (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD P2HH	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD P2HH (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PELAYANAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD SPTH	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD SPTH (Poin)	90	91	91	2.568.000.000	93	2.576.000.000	94	2.607.000.000	95	2.767.000.000	96	2.890.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada UPTD TAHURA Ir. H. Djuanda	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD TAHURA Ir. H. Djuanda (Poin)	90	91	91	12.282.276.000	93	13.261.703.600	94	14.361.273.960	95	15.696.701.356	96	17.112.671.492	3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD TAMAN HUTAN RAYA IRH DJUANDA
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					**9.999.999.998**		**35.000.000.004**		**35.000.000.004**		**35.000.000.004**		**35.000.000.004**	
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar (%)	10	10	15	90.000.000	20	622.500.000	25	622.500.000	30	622.500.000	35	622.500.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah I	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah I (%)	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah II	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	standar di CDK Wilayah II (%)													
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah III	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah III (%)	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah IV	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah IV (%)	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah V	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah V (%)	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah VI	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah VI (%)	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah VII	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah VII (%)	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah VIII	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah VIII (%)	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Kayu di CDK Wilayah IX	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah IX (%)	10	10	15	40.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX
Meningkatnya kualitas pengolahan Hasil Hutan Kayu	Persentase pengolahan Hasil Hutan	10	10	15	600.000.000	20	660.000.000	25	660.000.000	30	660.000.000	35	660.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PELAYANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kayu yang berkualitas (%)													PENGOLAHAN HASIL HUTAN
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar (%)	10	10	12	98.962.500	14	144.410.625	16	144.410.625	18	144.410.625	20	144.410.625	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah I	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah I (%)	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah II	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah II (%)	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah III	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah III (%)	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah IV	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah IV (%)	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah V	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah V (%)	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah VI	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	memenuhi standar di CDK Wilayah VI (%)													
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah VII	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah VII (%)	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah VIII	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah VIII (%)	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII
Terkendalinya Kualitas Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di CDK Wilayah IX	Persentase Pelaku Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Produksinya memenuhi standar di CDK Wilayah IX (%)	10	10	12	90.000.000	14	90.000.000	16	90.000.000	18	90.000.000	20	90.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX
Meningkatnya kualitas pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Persentase pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berkualitas (%)	10	10	12	400.000.000	14	440.000.000	16	440.000.000	18	440.000.000	20	440.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD PELAYANAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN
Terarahnya Pengelolaan Hutan	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan (%)	100	100	100	597.500.000	100	1.727.375.000	100	1.727.375.000	100	1.727.375.000	100	1.727.375.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Berkurangnya Lahan Kritis	Persentase Penurunan Lahan Kritis (%)	6,44	11	11	350.000.000	13	900.000.000	15	900.000.000	17	900.000.000	19	900.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah I	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah I (%)	6,44	11	11	759.309.144	13	2.607.884.353	15	2.607.884.353	17	2.607.884.353	19	2.607.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah II	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah II (%)	6,44	11	11	669.309.144	13	2.517.884.353	15	2.517.884.353	17	2.517.884.353	19	2.517.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah III	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah III (%)	6,44	11	11	669.309.144	13	2.517.884.353	15	2.517.884.353	17	2.517.884.353	19	2.517.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah IV	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah IV (%)	6,44	11	11	669.309.144	13	2.517.884.353	15	2.517.884.353	17	2.517.884.353	19	2.517.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah V	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah V (%)	6,44	11	11	669.309.144	13	2.517.884.353	15	2.517.884.353	17	2.517.884.353	19	2.517.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah VI	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah VI (%)	6,44	11	11	669.309.144	13	2.517.884.353	15	2.517.884.353	17	2.517.884.353	19	2.517.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah VII	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah VII (%)	6,44	11	11	669.309.144	13	2.517.884.353	15	2.517.884.353	17	2.517.884.353	19	2.517.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah VIII	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah VIII (%)	6,44	11	11	669.309.144	13	2.517.884.353	15	2.517.884.353	17	2.517.884.353	19	2.517.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII
Berkurangnya Lahan Kritis di CDK Wilayah IX	Persentase Penurunan Lahan Kritis di CDK Wilayah IX (%)	6,44	11	11	669.309.144	13	2.517.884.353	15	2.517.884.353	17	2.517.884.353	19	2.517.884.353	3.28.0.00.0.00.01.0009 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX
Benih dan Bibit Tanaman Hutan memenuhi standar mutu	Persentase Peningkatan Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang tersertifikasi (%)	6,44	11	11	279.755.202	13	3.544.755.202	15	3.544.755.202	17	3.544.755.202	19	3.544.755.202	3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
Terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100	100.000.000	100	1.155.000.000	100	1.155.000.000	100	1.155.000.000	100	1.155.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Menurunnya Kerusakan Hutan	Persentase Penurunan Kerusakan Hutan (%)	-	0,50	0,45	200.000.000	0,40	220.000.000	0,35	220.000.000	0,30	220.000.000	0,25	220.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah I	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah I (%)	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I
Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah II	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah II (%)	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II
Menurunnya Kerusakan Kawasan	Persentase Penurunan	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Hutan di CDK Wilayah III	Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah III (%)													KEHUTANAN WILAYAH III
Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah IV	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah IV (%)	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV
Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah V	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah V (%)	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V
Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah VI	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah VI (%)	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI
Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah VII	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah VII (%)	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII
Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah VIII	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah VIII (%)	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII
Menurunnya Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah IX	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan di CDK Wilayah IX (%)	-	0,50	0,45	-	0,40	125.000.000	0,35	125.000.000	0,30	125.000.000	0,25	125.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					**620.000.000**		**620.000.000**		**610.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**	
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar (%)	-	5	5	155.000.000	10	155.000.000	15	155.000.000	20	170.000.000	25	170.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah I	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	standar di CDK Wilayah I (%)													
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah II	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar di CDK Wilayah II (%)	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah III	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar di CDK Wilayah III (%)	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah IV	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar di CDK Wilayah IV (%)	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah V	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar di CDK Wilayah V (%)	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah VI	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar di CDK Wilayah VI (%)	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah VII	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar di CDK Wilayah VII (%)	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah VIII	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Situ yang memenuhi standar di CDK Wilayah VIII (%)													
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di CDK Wilayah IX	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar di CDK Wilayah IX (%)	-	5	5	25.000.000	10	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	30.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX
Meningkatnya Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ di Kawasan TAHURA Ir. H. Djuanda	Persentase Habitat Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ex-Situ dan In-Situ yang memenuhi standar di Kawasan TAHURA Ir. H. Djuanda (%)	-	5	5	240.000.000	10	240.000.000	15	230.000.000	20	260.000.000	25	260.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0012 - UPTD TAMAN HUTAN RAYA IRH DJUANDA
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					**2.780.000.000**		**3.280.000.000**		**3.690.000.000**		**4.100.000.000**		**4.600.000.000**	
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif (%)	8,06	10,00	11,61	1.025.000.000	13,22	1.075.000.000	14,83	1.125.000.000	16,45	1.175.000.000	18,06	1.315.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah I	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah I (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah II	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah II (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah III	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah III (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah IV	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah IV (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah V	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah V (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah VI	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah VI (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah VII	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah VII (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah VIII	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah VIII (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII
Meningkatnya Keberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) di CDK Wilayah IX	Persentase Kelompok Tani Hutan (KTH) yang produktif di CDK Wilayah IX (%)	8,06	10,00	11,61	195.000.000	13,22	245.000.000	14,83	285.000.000	16,45	325.000.000	18,06	365.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0009 - CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					**400.000.000**		**400.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	
Meningkatnya Kondisi Daya Dukung DAS	Nilai Kondisi Lahan DAS (Poin)	50	49	48	400.000.000	46	400.000.000	44	500.000.000	42	500.000.000	40	500.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					**204.044.774.569**		**306.455.715.821**		**302.219.377.725**		**305.613.639.994**		**390.234.903.708**	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**94.494.774.569**		**96.384.670.058**		**98.312.363.462**		**100.278.610.731**		**102.284.182.945**	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Nilai)	88,24	88,54	88,84	78.136.472.119	89,14	79.699.201.562	89,44	81.293.185.593	89,74	82.919.049.306	90	84.577.430.290	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur (Poin)	4,7	4,72	4,74	1.750.961.436	4,76	1.785.980.663	4,78	1.821.700.279	4,80	1.858.134.284	4,82	1.895.296.970	3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor (Poin)	4,7	4,72	4,74	1.978.046.945	4,76	2.017.607.884	4,78	2.057.960.042	4,80	2.099.119.242	4,82	2.141.101.627	3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta (Poin)	4,7	4,72	4,74	2.003.042.094	4,76	2.043.102.936	4,78	2.083.964.995	4,80	2.125.644.294	4,82	2.168.157.180	3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung (Poin)	4,7	4,72	4,74	1.931.342.913	4,76	1.969.969.771	4,78	2.009.369.166	4,80	2.049.556.550	4,82	2.090.547.681	3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang (Poin)	4,7	4,72	4,74	1.773.724.431	4,76	1.809.198.919	4,78	1.845.382.898	4,80	1.882.290.556	4,82	1.919.936.367	3.29.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya (Poin)	4,7	4,72	4,74	1.696.691.642	4,76	1.730.625.475	4,78	1.765.237.984	4,80	1.800.542.744	4,82	1.836.553.599	3.29.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon (Poin)	4,7	4,72	4,74	1.723.459.985	4,76	1.757.929.184	4,78	1.793.087.768	4,80	1.828.949.523	4,82	1.865.528.514	3.29.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pada UPTD Laboratorium ESDM	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Laboratorium ESDM (Poin)	4,7	4,72	4,74	3.501.033.004	4,76	3.571.053.664	4,78	3.642.474.737	4,80	3.715.324.232	4,82	3.789.630.717	3.29.0.00.0.00.01.0008 - UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					**1.621.128.755**		**17.595.244.263**		**17.745.244.263**		**17.895.244.263**		**18.045.244.263**	
Sarana Konservasi Air Tanah Berfungsi di Wilayah Jawa Barat	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Jawa Barat (%)	61,03	64,08	65,36	351.128.755	66,67	1.000.000.000	68,00	1.150.000.000	69,36	1.300.000.000	70,75	1.300.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana Konservasi Air Tanah Berfungsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas I Cianjur (%)	62,34	65,46	66,77	10.000.000	68,10	2.100.000.000	69,46	2.100.000.000	70,85	2.100.000.000	72,27	2.100.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR
Sarana Konservasi Air Tanah Berfungsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas II Bogor (%)	58,99	61,94	63,17	10.000.000	64,44	2.100.000.000	65,73	2.100.000.000	67,04	2.100.000.000	68,38	2.100.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR
Sarana Konservasi Air Tanah Berfungsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas III Purwakarta (%)	67,28	70,64	72,06	10.000.000	73,50	2.100.000.000	74,97	2.100.000.000	76,47	2.100.000.000	77,99	2.100.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA
Sarana Konservasi Air Tanah Berfungsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas IV Bandung (%)	63,94	67,14	68,48	10.000.000	69,85	2.100.000.000	71,25	2.100.000.000	72,67	2.100.000.000	74,12	2.100.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG
Sarana Konservasi Air Tanah Berfungsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas V Sumedang (%)	58,19	61,10	62,32	10.000.000	63,57	2.100.000.000	64,84	2.100.000.000	66,13	2.100.000.000	67,46	2.100.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG
Sarana Konservasi Air Tanah Berfungsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas VI Tasikmalaya (%)	55,87	58,66	59,84	10.000.000	61,03	2.100.000.000	62,25	2.100.000.000	63,50	2.100.000.000	64,77	2.100.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA
Sarana Konservasi Air Tanah Berfungsi di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persentase Sarana Konservasi Air Tanah yang Berfungsi di Wilayah Cabang Dinas VII Cirebon (%)	60,58	63,61	64,88	10.000.000	66,18	2.100.000.000	67,50	2.100.000.000	68,85	2.100.000.000	70,23	2.100.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Jawa Barat	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan	91,22	92,22	93,22	400.000.000	94,22	807.639.589	95,22	807.639.589	96,22	807.639.589	97,22	823.711.018	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penggunaan Air Tanah di Jawa Barat (%)													
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur (%)	95,06	92,22	93,22	100.000.000	94,22	148.824.000	95,22	148.824.000	96,22	148.824.000	97,22	164.895.429	3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor (%)	95,40	92,22	93,22	100.000.000	94,22	135.782.208	95,22	135.782.208	96,22	135.782.208	97,22	151.853.637	3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta (%)	97,35	92,22	93,22	100.000.000	94,22	74.093.842	95,22	74.093.842	96,22	74.093.842	97,22	90.165.271	3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung (%)	80,23	92,22	93,22	100.000.000	94,22	158.042.208	95,22	158.042.208	96,22	158.042.208	97,22	174.113.637	3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang (%)	83,68	92,22	93,22	100.000.000	94,22	129.740.208	95,22	129.740.208	96,22	129.740.208	97,22	145.811.637	3.29.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja	100,00	92,22	93,22	100.000.000	94,22	58.194.000	95,22	58.194.000	96,22	58.194.000	97,22	74.265.429	3.29.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cabang Dinas VI Tasikmalaya (%)													
Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persentase pengguna Air Tanah yang mematuhi ketentuan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon (%)	100,00	92,22	93,22	100.000.000	94,22	109.388.208	95,22	109.388.208	96,22	109.388.208	97,22	125.459.637	3.29.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON
Meningkatnya pengujian kualitas air tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	Persentase Meningkatnya Sampel Pengujian Kualitas Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat (%)	82,34	83,00	84,00	100.000.000	85,00	273.540.000	86,00	273.540.000	87,00	273.540.000	88,00	294.968.568	3.29.0.00.0.00.01.0008 - UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					**2.428.066.000**		**3.000.000.000**		**3.098.868.998**		**3.000.000.000**		**3.000.000.000**	
Terkendalinya usaha pertambangan pada aspek teknis	Persentase usaha pertambangan yang menerapkan aspek teknis (%)	56,67	59,17	61,67	500.000.000	64,17	1.100.000.000	66,67	1.100.000.000	69,17	1.100.000.000	71,67	1.100.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terkendalinya usaha pertambangan pada aspek pengusahaan	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan (%)	76,86	78,80	79,60	500.000.000	81,60	601.834.000	82,00	700.702.998	82,80	601.834.000	83,60	601.834.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya usaha pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur (%)	75	76	77	297.060.000	78	197.060.000	79	197.060.000	80	197.060.000	81	197.060.000	3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR
Meningkatnya usaha pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor (%)	88,89	89,89	90,89	369.260.000	91,89	269.260.000	92,89	269.260.000	93,89	269.260.000	94,89	269.260.000	3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya usaha pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta (%)	80	81	82	72.020.000	83	72.020.000	84	72.020.000	85	72.020.000	86	72.020.000	3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA
Meningkatnya usaha pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung (%)	70	71	72	213.890.000	73	213.890.000	74	213.890.000	75	213.890.000	76	213.890.000	3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG
Meningkatnya usaha pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang (%)	70	71	72	154.300.000	73	154.300.000	74	154.300.000	75	154.300.000	76	154.300.000	3.29.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG
Meningkatnya usaha pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya (%)	71,43	72,43	73,43	133.220.000	74,43	83.220.000	75,43	83.220.000	76,43	83.220.000	77,43	83.220.000	3.29.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA
Meningkatnya usaha pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon (%)	75	76	77	88.316.000	78	88.316.000	79	88.316.000	80	88.316.000	81	88.316.000	3.29.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON
Meningkatnya kualitas bahan tambang	Persentase pengujian kualitas bahan	70,59	80	88	100.000.000	89	220.100.000	91	220.100.000	92	220.100.000	94	220.100.000	3.29.0.00.0.00.01.0008 - UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	tambang di Jawa Barat (%)													
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					**4.065.479.000**		**9.022.620.000**		**9.473.751.000**		**10.122.620.000**		**8.872.620.000**	
Meningkatnya kualitas pembangunan sarana pengelolaan aneka energi baru terbarukan yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi (%)	-	17,13	67,33	2.056.655.000	89,94	2.472.620.000	91,95	2.596.251.000	98,00	2.752.026.060	100	2.322.620.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya EBT dan konservasi energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur (%)	-	0,47	1,84	255.350.000	2,46	900.000.000	2,52	945.000.000	2,69	1.001.700.000	2,74	900.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya EBT dan konservasi energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor (%)	-	3,30	12,96	275.140.000	17,31	900.000.000	17,70	945.000.000	18,87	1.001.700.000	19,25	900.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya EBT dan konservasi energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta (%)	-	7,66	30,12	283.960.000	40,23	900.000.000	41,13	945.000.000	43,84	1.001.700.000	44,73	900.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya EBT dan konservasi energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja	-	1,99	7,82	275.754.000	10,45	900.000.000	10,68	945.000.000	11,39	1.001.700.000	11,62	900.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung (%)													
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya EBT dan konservasi energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang (%)	-	3,01	11,84	272.030.000	15,82	900.000.000	16,17	945.000.000	17,24	1.001.700.000	17,59	900.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya EBT dan konservasi energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya (%)	-	0,01	0,03	280.310.000	0,04	900.000.000	0,04	945.000.000	0,04	1.001.700.000	0,04	900.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya EBT dan konservasi energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persentase Kontribusi Pemanfaatan EBT terhadap Tingkat Upaya Penurunan emisi GRK sektor Energi di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon (%)	-	0,69	2,71	266.280.000	3,62	900.000.000	3,71	945.000.000	3,95	1.001.700.000	4,03	900.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON
Meningkatnya kualitas komoditas Energi Baru Terbarukan	Persentase komoditas EBT yang diuji atau dikembangkan (%)	33,00	41,67	50,00	100.000.000	58,33	250.000.000	64,58	262.500.000	70,00	358.693.940	75,00	250.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0008 - UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					**101.435.326.245**		**180.453.181.500**		**173.589.150.002**		**174.317.165.000**		**258.032.856.500**	
Terkendalinya usaha bidang ketenagalistrikan	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur (%)	0	60	65	210.000.000	70	231.000.000	75	300.000.000	80	195.997.854	85	323.244.068	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terkendalinya usaha bidang ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Cabang	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrika	65	70	71	108.480.000	72	119.328.000	73	193.111.397	74	193.111.397	75	320.068.953	3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	n kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur (%)													
Meningkatnya tingkat keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor (%)	65	70	71	148.760.000	72	163.636.000	73	188.181.400	74	188.181.400	75	314.645.957	3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR
Meningkatnya tingkat keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta (%)	65	70	71	294.680.000	72	324.148.000	73	372.770.200	74	372.770.200	75	517.693.637	3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA
Meningkatnya tingkat keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung (%)	65	70	71	229.751.840	72	252.727.024	73	290.636.078	74	290.636.078	75	427.346.102	3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG
Meningkatnya tingkat keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang (%)	65	70	71	123.751.840	72	136.127.024	73	156.546.078	74	156.546.078	75	279.847.102	3.29.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG
Meningkatnya tingkat keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah	65	70	71	31.799.999	72	34.979.999	73	40.226.999	74	40.226.999	75	151.896.116	3.29.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	VI Tasikmalaya (%)													
Meningkatnya tingkat keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persentase pemenuhan kepatuhan teknis usaha ketenagalistrikan kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon (%)	65	70	71	115.271.840	72	126.799.024	73	145.818.878	74	145.818.878	75	268.047.182	3.29.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat (%)	0	25	40	7.171.334.726	55	11.661.743.629	70	11.195.273.884	85	11.299.276.027	100	7.988.823.123	3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur (%)	0	25	40	19.810.662.000	55	35.659.191.600	70	34.232.823.936	85	34.336.826.079	100	52.218.148.420	3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor (%)	0	25	40	9.116.268.000	55	16.409.282.400	70	15.752.911.104	85	15.856.913.247	100	24.368.694.015	3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah	0	25	40	6.411.949.000	55	11.541.508.200	70	11.079.847.872	85	11.183.850.015	100	16.954.481.120	3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ESDM Wilayah III Purwakarta	Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta (%)													
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung (%)	0	25	40	13.713.143.000	55	24.683.657.400	70	23.696.311.104	85	23.800.313.247	100	37.901.950.970	3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang (%)	0	25	40	17.508.283.000	55	31.514.909.400	70	30.254.313.024	85	30.358.315.167	100	45.094.742.294	3.29.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya (%)	0	25	40	17.393.553.000	55	31.308.395.400	70	30.056.059.584	85	30.160.061.727	100	45.601.762.205	3.29.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas	0	25	40	9.047.638.000	55	16.285.748.400	70	15.634.318.464	85	15.738.320.607	100	25.301.465.236	3.29.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	ESDM Wilayah VII Cirebo (%)													
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**32.875.577.948**		**32.973.835.418**		**33.073.763.265**		**33.175.389.885**		**33.278.744.158**	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**5.779.851.173**		**5.878.108.643**		**5.978.036.490**		**6.079.663.110**		**6.183.017.383**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada UPTD BPSMB Agro Bandung	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum pada UPTD BPSMB Agro Bandung (%)	100	100	100	1.294.654.261	100	1.316.663.383	100	1.339.046.661	100	1.361.810.454	100	1.384.961.232	3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AGRO BANDUNG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum pada UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon (%)	100	100	100	1.253.454.431	100	1.274.763.157	100	1.296.434.130	100	1.318.473.510	100	1.340.887.560	3.31.3.30.0.00.01.0002 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AIR MINUM DALAM KEMASAN CIREBON
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada UPTD Keramik dan Tabung Gas Bogor	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum pada UPTD Keramik dan Tabung Gas Bogor (%)	100	100	100	1.569.619.714	100	1.596.303.249	100	1.623.440.404	100	1.651.038.891	100	1.679.106.552	3.31.3.30.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada UPTD Logam dan Elektronika Karawang	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum pada UPTD Logam dan Elektronika Karawang (%)	100	100	100	1.662.122.767	100	1.690.378.854	100	1.719.115.295	100	1.748.340.255	100	1.778.062.039	3.31.3.30.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LOGAM DAN ELEKTRONIKA KARAWANG
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					**354.166.344**		**382.680.658**		**390.948.724**		**403.043.597**		**420.347.956**	
Meningkatnya Akses Ekspor	Laju Pertumbuhan Pemanfaatan SKA (%)	7,44	2,75	2,68	323.284.344	2,60	318.832.289	3,00	330.715.518	2,45	348.787.070	2,50	353.665.777	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha tentang ketentuan perdagangan	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan perdagangan (%)	100	100	100	30.882.000	100	63.848.369	100	60.233.206	100	54.256.527	100	66.682.179	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					**1.000.000.000**		**1.130.575.116**		**1.243.632.628**		**1.367.995.890**		**1.504.795.479**	
Meningkatnya pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai standar	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berfungsi (%)	8,89	6,67	7,49	1.000.000.000	8,31	1.130.575.116	9	1.243.632.628	9,93	1.367.995.890	10,75	1.504.795.479	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					**15.000.000.000**		**15.000.000.000**		**15.000.000.000**		**15.000.000.000**		**15.000.000.000**	
Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)	3,15	6	6	15.000.000.000	6	15.000.000.000	6	15.000.000.000	6	15.000.000.000	6	15.000.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terkendalinya penyaluran pupuk bersubidi	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi (%)	-	6	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					**3.114.934.594**		**3.750.000.000**		**3.750.000.000**		**3.750.000.000**		**3.750.000.000**	
Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna SKA (triliun rupiah)	14,11	10,50	10,54	3.114.934.594	10,59	3.750.000.000	10,63	3.750.000.000	10,67	3.750.000.000	10,70	3.750.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					**6.764.006.117**		**5.832.471.001**		**5.645.897.851**		**5.529.439.716**		**5.395.335.768**	
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berkaitan Keamanan Produk dan Jasa Serta Ketentuan Lain Sesuai dengan Perundang-Undangan (%)	-	85	85	5.860.137.569	85	4.914.471.001	86	4.704.897.851	86	4.595.439.716	86	4.508.335.768	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya kualitas layanan pengujian dan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap	5	4-5	4-5	250.000.000	4-5	250.000.000	4-5	270.000.000	4-5	280.000.000	4-5	290.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kalibrasi UPTD BPSMB Agro Bandung	pelayanan UPTD BPSMB Agro Bandung (Nilai)													SERTIFIKASI MUTU BARANG AGRO BANDUNG
Meningkatnya kualitas layanan pengujian dan kalibrasi UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon (Nilai)	5	4-5	4-5	254.500.000	4-5	283.000.000	4-5	271.000.000	4-5	259.000.000	4-5	247.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0002 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AIR MINUM DALAM KEMASAN CIREBON
Meningkatnya kualitas layanan pengujian dan kalibrasi UPTD BPSMB Logam Elektronika Karawang	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Logam Elektronika Karawang (Nilai)	5	4-5	4-5	262.103.490	4-5	210.000.000	4-5	220.000.000	4-5	230.000.000	4-5	190.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LOGAM DAN ELEKTRONIKA KARAWANG
Meningkatnya kualitas layanan pengujian dan kalibrasi UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas Bogor	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD BPSMB Air Keramik dan Tabung Gas Bogor (Nilai)	5	4-5	4-5	137.265.058	4-5	175.000.000	4-5	180.000.000	4-5	165.000.000	4-5	160.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					**862.619.720**		**1.000.000.000**		**1.065.247.572**		**1.045.247.572**		**1.025.247.572**	
Meningkatnya omzet pelaku usaha pada pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada pemasaran produk dalam negeri (%)	-	15	15	862.619.720	15	1.000.000.000	15	1.065.247.572	15	1.045.247.572	15	1.025.247.572	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**105.178.226.060**		**107.466.768.990**		**109.701.486.256**		**111.987.202.451**		**114.325.190.046**	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**94.778.965.212**		**96.691.884.069**		**98.643.356.076**		**100.634.157.307**		**102.665.079.443**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Poin)	89,28	89,54	89,80	83.834.553.159	90,10	85.561.417.011	90,40	87.323.671.078	90,70	89.122.037.664	91,00	90.957.253.766	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada UPTD Industri Logam	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan	100	100	100	2.657.134.650	100	2.702.305.939	100	2.748.245.140	100	2.794.965.308	100	2.842.479.718	3.31.3.30.0.00.01.0005 - UPTD INDUSTRI LOGAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	umum pada UPTD Industri Logam (%)													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan (%)	100	100	100	8.287.277.403	100	8.428.161.119	100	8.571.439.858	100	8.717.154.335	100	8.865.345.959	3.31.3.30.0.00.01.0006 - UPTD INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					**10.102.560.158**		**10.474.884.921**		**10.758.130.180**		**11.053.045.144**		**11.360.110.603**	
Meningkatnya produksi Industri Pengolahan	Nilai Produksi Industri Pengolahan (Nilai)	2.093,72	2.335	2.406	7.808.086.401	2.581	8.332.035.987	2.692	8.615.281.246	2.773	8.910.196.210	2.990	9.217.261.669	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya kualitas pelayanan IKM Logam	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah yang dilayani pada UPTD Industri Logam (Nilai)	35	35	40	1.129.288.385	45	1.142.848.934	50	1.142.848.934	55	1.142.848.934	60	1.142.848.934	3.31.3.30.0.00.01.0005 - UPTD INDUSTRI LOGAM
Meningkatnya Kualitas Layanan IKM IPOK	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah yang dilayani pada UPTD Industri Pangan, Olahan, dan Kemasan (Nilai)	102	110	115	1.165.185.372	115	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	120	1.000.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0006 - UPTD INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan industri	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri terhadap Izin Usaha Industri (Angka)	87,5	50	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					**146.700.690**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	
Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Peningkatan Industri yang masuk SIINAS (%)	33,02	11	11	146.700.690	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	
Transmigran mendapatkan penempatan	Persentase Transmigran yang di tempatkan (%)	100	87	88	200.000.000	89	200.000.000	90	200.000.000	91	200.000.000	92	200.000.000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**569.975.459.822**		**590.170.278.820**		**615.591.499.291**		**641.201.327.666**		**667.038.896.601**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**449.293.148.418**		**458.279.011.387**		**467.444.591.614**		**476.793.483.446**		**486.329.353.115**	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan	Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi (%)	-	100	100	35.628.367.929	100	36.340.935.288	100	37.067.753.993	100	37.809.109.073	100	38.565.291.255	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Administrasi Pimpinan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah (Poin)	82,66	82,7	83,4	375.764.320.186	84,1	383.279.606.590	84,8	390.945.198.722	85,5	398.764.102.696	86,2	406.739.384.750	4.01.0.00.0.00.01.0009 - Biro Umum
Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti (%)	-	100	100	1.795.459.464	100	1.831.368.653	100	1.867.996.026	100	1.905.355.947	100	1.943.463.066	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Praktek Baik RB Lingkup Biro Hukum dan HAM	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Lingkup Biro Hukum dan HAM (%)	-	100	100	1.397.024.061	100	1.424.964.542	100	1.453.463.833	100	1.482.533.110	100	1.512.183.772	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya Praktek Baik RB Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat (%)	-	100	100	12.710.437.732	100	12.764.646.487	100	13.023.939.416	100	13.288.418.205	100	13.558.186.569	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Biro Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Praktek Baik RB Lingkup Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro BUMD, Investasi dan	-	100	100	2.642.565.399	100	2.695.416.707	100	2.749.325.041	100	2.804.311.542	100	2.860.397.773	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Administrasi Pembangunan (%)													
Meningkatnya Praktek Baik RB Lingkup Biro Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Perekonomian (%)	-	100	100	1.783.817.946	100	1.819.494.305	100	1.855.884.191	100	1.893.001.875	100	1.930.861.912	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian
Meningkatnya Praktek Baik RB Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa (%)	-	100	100	2.102.872.473	100	2.144.929.922	100	2.187.828.521	100	2.231.585.091	100	2.276.216.793	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Biro Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Praktek Baik RB Lingkup Biro Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Organisasi (%)	-	100	100	879.080.925	100	1.096.662.544	100	1.114.595.794	100	1.132.887.710	100	1.151.545.464	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Organisasi
Meningkatnya Praktek Baik RB Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Administrasi Pimpinan (%)	-	100	100	12.314.894.345	100	12.561.192.232	100	12.812.416.077	100	13.068.664.398	100	13.330.037.686	4.01.0.00.0.00.01.0008 - Biro Administrasi Pimpinan
Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Umum	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Umum (%)	-	100	100	2.274.307.958	100	2.319.794.117	100	2.366.190.000	100	2.413.513.799	100	2.461.784.075	4.01.0.00.0.00.01.0009 - Biro Umum
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					**1.589.000.000**		**1.986.250.000**		**2.482.812.500**		**3.087.890.626**		**3.859.863.281**	
Pelayanan Publik Perangkat Daerah Memenuhi Ekspektasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal SANGAT BAIK (%)	84,62	86,84	87,26	121.000.000	87,56	176.250.000	87,86	257.812.500	88,16	322.265.625	88,46	402.832.031	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Organisasi
Kelembagaan Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur (Nilai)	37,378	37,378	38,271	984.000.000	38,271	1.080.000.000	38,271	1.125.000.000	41,518	1.406.250.000	41,518	1.757.812.500	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Organisasi
Organisasi Tepat Proses	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses (Nilai)	31,071	31,071	34,821	121.000.000	34,821	176.250.000	34,821	257.812.500	38,08	322.265.625	38,08	402.832.031	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Organisasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi (%)	100	100	100	242.000.000	100	352.500.000	100	515.625.000	100	628.906.250	100	786.132.813	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Organisasi
Meningkatnya kualitas tatakelola SAKIP	Persentase Tindak Lanjut LHE SAKIP dari KemenPANRB (%)	100	100	100	84.700.000	100	130.875.000	100	201.093.750	100	251.367.188	100	314.208.984	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Organisasi
Pelaporan Kinerja Berkualitas dan Bermanfaat	Nilai Pemenuhan Kualitas dan Kebermanfaatan Pelaporan Kinerja (Poin)	13,55	13,58	13,61	36.300.000	13,65	70.375.000	13,68	125.468.750	13,71	156.835.938	13,74	196.044.922	4.01.0.00.0.00.01.0007 - Biro Organisasi
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					**7.000.000.000**		**7.250.000.000**		**7.500.000.000**		**7.750.000.000**		**8.000.000.000**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Mengalami Peningkatan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (%)	55,56	59,26	62,96	874.137.400	66,67	901.196.500	70,37	928.974.366	74,07	956.752.143	81,48	984.529.921	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Meningkat (%)	37,72	42,11	46,49	706.715.696	50,88	733.774.796	55,26	761.552.662	59,65	789.330.439	64,04	817.108.217	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Poin)	27,55	35,31	35,72	365.515.296	36,2	419.633.496	36,62	475.189.228	37,04	530.744.782	37,53	586.300.338	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Poin)	35,29	40,84	41,67		42,5		43,33		44,16		44,99		4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administratif dalam	Persentase Dokumen Persiapan Penataan	-	100	100	1.024.495.637	100	1.051.554.737	100	1.079.332.603	100	1.107.110.380	100	1.134.888.158	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa	Daerah dan Penataan Desa yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti (%)													
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP yang Terimplementasi (%)	-	-	100	11.690.000	100	49.749.100	100	69.749.100	100	89.749.100	100	109.749.100	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang Efektif (%)	-	45	50	883.727.068	55	910.786.168	60	938.564.034	65	955.364.767	70	994.119.589	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Internasional	Persentase Kerja Sama Internasional yang Efektif (%)	-	45	50	2.514.321.506	55	2.528.293.062	60	2.572.403.644	65	2.607.936.249	70	2.643.514.759	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Sesuai Standar (%)	-	100	100	619.397.397	100	655.012.141	100	674.234.363	100	713.012.140	100	729.789.918	4.01.0.00.0.00.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					**99.456.250.000**		**109.414.249.999**		**124.299.251.000**		**139.058.624.999**		**153.667.218.750**	
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi	Persentase Partisipasi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang melanjutkan ke pendidikan tinggi (%)	8,81	9,64	9,75	50.000.000.000	9,9	60.000.000.000	9,97	70.000.000.000	10,1	80.000.000.000	10,2	90.000.000.000	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Biro Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Poin)	43,35	43,46	43,57	49.456.250.000	43,68	49.414.249.999	43,78	54.299.251.000	43,89	59.058.624.999	44,00	63.667.218.750	4.01.0.00.0.00.01.0003 - Biro Kesejahteraan Rakyat
	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Poin)	35,43	35,69	35,95		36,22		36,48		36,74		37,00		4.01.0.00.0.00.01.0003 - Biro Kesejahteraan Rakyat
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					**2.037.061.404**		**2.240.767.434**		**2.464.844.177**		**2.711.328.595**		**2.982.461.455**	
Meningkatnya Kualitas Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Deregulasi Kebijakan (Poin)	-	20,4	20,61	466.545.466	20,81	513.200.013	21,02	564.520.014	21,23	620.972.015	21,44	683.069.217	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Harmonisasi Regulasi Daerah	Nilai Harmonisasi Regulasi (%)	-	24,22	24,34	1.570.515.938	24,46	1.727.567.421	24,59	1.900.324.163	24,71	2.090.356.580	24,83	2.299.392.238	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					**7.400.000.000**		**7.800.000.000**		**8.200.000.000**		**8.600.000.000**		**9.000.000.000**	
Kebijakan Pengendalian Inflasi Responsif terhadap Isu Peningkatan Harga Barang di Masyarakat	Persentase Kebijakan Pengendalian Inflasi yang dirumuskan (%)	-	100	100	490.483.527	100	513.696.473	100	547.673.880	100	545.447.268	100	537.569.995	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah (%)	40,6	43	45	2.695.080.000	47	2.840.760.000	49	2.986.440.000	50	3.132.120.000	51	3.277.800.000	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian
	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah (%)	43,94	44,1	44,2		44,3		44,4		44,5		44,6		4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan BUMD	Return of Assets (RoA) BUMD Jabar (%)	0,65	0,68	0,72	480.260.000	0,75	506.220.000	0,79	532.180.000	0,84	558.140.000	0,88	584.100.000	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Invenstasi Daerah (Poin)	38,72	39,54	40,47	3.220.480.000	41,40	3.394.560.000	42,32	3.568.640.000	43,25	3.742.720.000	44,18	3.916.800.000	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan
	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah (Poin)	39,44	40,36	41,29		42,22		43,14		44,07		45		4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan
Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi Mutakhir yang ditindaklanjuti (%)	-	100	100	513.696.473	100	544.763.527	100	565.066.120	100	621.572.732	100	683.730.005	4.01.0.00.0.00.01.0005 - Biro Perekonomian
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					**2.700.000.000**		**2.700.000.000**		**2.700.000.000**		**2.700.000.000**		**2.700.000.000**	
Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	3	3	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	4.01.0.00.0.00.01.0006 - Biro Pengadaan Barang/Jasa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	
Progres kinerja perangkat Daerah sesuai Perencanaan	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Rekomendasi Akselerasi Kinerja (%)	0	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					**644.853.404.401**		**660.940.472.490**		**681.793.525.666**		**694.378.152.576**		**711.751.514.759**	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**333.802.295.185**		**339.337.193.819**		**358.852.695.739**		**359.987.135.580**		**370.232.939.523**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesekertariatan DPRD	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD (Nilai)	74,99	80,00	80,10	130.625.839.750	80,20	126.001.915.612	80,30	134.850.653.622	80,40	135.227.313.892	80,50	141.988.679.588	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya kesejahteraan dan administrasi anggota DPRD	Persentase Anggota DPRD yang Terpenuhi Haknya (%)	100	100	100	203.176.455.435	100	213.335.278.207	100	224.002.042.117	100	224.759.821.688	100	228.244.259.935	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					**311.051.109.216**		**321.603.278.671**		**322.940.829.927**		**334.391.016.996**		**341.518.575.236**	
Keprotokolan Kegiatan Pimpinan DPRD Lancar	Persentase Keprotokolan Kegiatan Pimpinan DPRD Lancar (%)	100	100	100	23.719.900.610	100	24.905.895.641	100	23.580.608.812	100	24.759.639.253	100	25.997.621.215	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lancar	Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lancar (Persentase)	100	100	100	48.166.545.799	100	48.304.123.770	100	48.448.580.639	100	50.871.009.671	100	51.030.273.370	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya publikasi kegiatan DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang terpublikasikan (Persentase)	100	100	100	22.150.238.880	100	23.257.750.824	100	24.420.638.365	100	22.150.238.880	100	23.257.750.824	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Lancar	Persentase Pembahasan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Lancar (Persentase)	100	100	100	68.220.467.328	100	68.901.854.007	100	69.617.310.021	100	71.892.752.499	100	72.302.854.074	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerapan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD Lancar	Persentase Pembahasan Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Lancar (Persentase)	100	100	100	185.652.143	100	194.934.750	100	204.681.488	100	214.915.562	100	225.661.340	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya Profesionalisme Anggota DPRD	Persentase Profesionalisme Anggota DPRD (Persentase)	100	100	100	11.740.456.379	100	12.327.479.198	100	12.943.853.158	100	13.591.045.816	100	14.270.598.107	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Lancar	Persentase Pembahasan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Yang Lancar (Persentase)	100	100	100	136.602.763.077	100	143.432.901.231	100	143.432.901.231	100	150.604.546.292	100	154.111.603.832	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Kebijakan Anggaran Lancar	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Lancar (Persentase)	100	100	100	265.085.000	100	278.339.250	100	292.256.213	100	306.869.023	100	322.212.474	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.01 - PERENCANAAN					**94.487.849.416**		**96.723.606.404**		**98.984.078.532**		**101.269.760.103**		**103.581.155.305**	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**61.759.778.997**		**66.155.663.000**		**67.059.340.789**		**67.902.548.584**		**68.677.222.634**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Nilai Evaluasi Reformasi Birorkasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Nilai)	91,40	91,43	91,47	61.759.778.997	91,51	66.155.663.000	91,56	67.059.340.789	91,62	67.902.548.584	91,70	68.677.222.634	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					**21.500.000.000**		**22.000.000.000**		**22.500.000.000**		**23.000.000.000**		**23.500.000.000**	
Meningkatnya sinergi perencanaan pembangunan daerah terhadap nasional	Tingkat Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Terhadap Rencana Pembangunan Nasional (%)	92,44	92,72	93,00	2.584.309.879	93,28	2.834.309.879	93,56	3.084.309.879	93,85	3.334.309.879	94,13	3.584.309.879	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi Rencana Pembangunan Daerah (%)	97,29	97,34	97,41	18.915.690.121	97,48	19.165.690.121	97,55	19.415.690.121	97,62	19.665.690.121	97,69	19.915.690.121	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI					**11.228.070.419**		**8.567.943.404**		**9.424.737.743**		**10.367.211.519**		**11.403.932.671**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	99,50	99,60	99,70	3.989.165.072	99,80	2.531.202.741	99,90	2.784.323.015	100	3.062.755.317	100	3.369.030.849	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	99,50	99,60	99,70	2.875.424.801	99,80	2.159.127.069	99,90	2.375.039.775	100	2.612.543.753	100	2.873.798.128	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	99,50	99,60	99,70	4.363.480.546	99,80	3.877.613.594	99,90	4.265.374.953	100	4.691.912.449	100	5.161.103.694	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 - KEUANGAN					**8.661.282.765.325**		**8.932.412.951.212**		**8.739.497.719.740**		**8.821.809.863.786**		**9.050.038.192.025**	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**578.664.405.086**		**615.232.613.244**		**625.604.167.609**		**641.961.327.522**		**658.837.884.432**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Lingkup SKPD	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Nilai)	73,00	88,46	85,00	56.428.202.237	86,00	59.249.614.000	87,00	62.212.096.000	88,00	65.322.701.000	89,00	68.588.835.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Lingkup UPTD	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPTD Pengamanan dan	-	72	73	44.117.214.374	76	68.301.631.000	79	65.957.076.000	82	69.254.931.000	85	72.717.680.000	5.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan aset

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	Pemanfaatan Aset (%)													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pendapatan di Badan Pendapatan Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bapenda (Nilai)	90,81	87,02	87,03	363.286.056.184	87,04	372.848.435.953	87,05	382.602.063.318	87,06	392.550.763.231	87,07	402.698.437.141	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Bandung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Bandung Barat (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.462.387.500	90,50	3.462.387.500	90,75	3.462.387.500	91,00	3.462.387.500	91,25	3.462.387.500	5.02.0.00.0.00.02.0001 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Bandung I Rancaekek	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Bandung I Rancaekek (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.417.856.755	90,50	3.417.856.755	90,75	3.417.856.755	91,00	3.417.856.755	91,25	3.417.856.755	5.02.0.00.0.00.02.0011 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Bandung Ii Soreang	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Bandung II Soreang (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.155.244.278	90,50	3.155.244.278	90,75	3.155.244.278	91,00	3.155.244.278	91,25	3.155.244.278	5.02.0.00.0.00.02.0015 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Bekasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Bekasi (Poin)	92,87	90,00	90,25	6.573.203.261	90,50	6.573.203.261	90,75	6.573.203.261	91,00	6.573.203.261	91,25	6.573.203.261	5.02.0.00.0.00.02.0009 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BEKASI
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Bogor	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Bogor (Poin)	92,87	90,00	90,25	5.845.817.700	90,50	5.845.817.700	90,75	5.845.817.700	91,00	5.845.817.700	91,25	5.845.817.700	5.02.0.00.0.00.02.0003 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BOGOR
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Ciamis	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Ciamis (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.314.379.248	90,50	3.314.379.248	90,75	3.314.379.248	91,00	3.314.379.248	91,25	3.314.379.248	5.02.0.00.0.00.02.0007 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Cianjur	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Cianjur (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.944.096.416	90,50	2.944.096.416	90,75	2.944.096.416	91,00	2.944.096.416	91,25	2.944.096.416	5.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Cirebon I Sumber	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Cirebon I Sumber (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.605.067.366	90,50	3.605.067.366	90,75	3.605.067.366	91,00	3.605.067.366	91,25	3.605.067.366	5.02.0.00.0.00.02.0018 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON I SUMBER
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Cirebon Ii Ciledug	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Cirebon Ii Ciledug (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.778.542.125	90,50	2.778.542.125	90,75	2.778.542.125	91,00	2.778.542.125	91,25	2.778.542.125	5.02.0.00.0.00.02.0006 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON II CILEDUG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Garut	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Garut (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.921.291.043	90,50	2.921.291.043	90,75	2.921.291.043	91,00	2.921.291.043	91,25	2.921.291.043	5.02.0.00.0.00.02.0002 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN GARUT
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Indramayu I	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Indramayu I (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.195.306.915	90,50	3.195.306.915	90,75	3.195.306.915	91,00	3.195.306.915	91,25	3.195.306.915	5.02.0.00.0.00.02.0023 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU I
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Karawang	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Karawang (Poin)	92,87	90,00	90,25	5.016.273.132	90,50	5.016.273.132	90,75	5.016.273.132	91,00	5.016.273.132	91,25	5.016.273.132	5.02.0.00.0.00.02.0022 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KARAWANG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Indramayu Ii Haurgeulis (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.584.730.788	90,50	2.584.730.788	90,75	2.584.730.788	91,00	2.584.730.788	91,25	2.584.730.788	5.02.0.00.0.00.02.0017 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Kuningan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Kuningan (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.730.657.530	90,50	2.730.657.530	90,75	2.730.657.530	91,00	2.730.657.530	91,25	2.730.657.530	5.02.0.00.0.00.02.0012 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Majalengka (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.972.021.420	90,50	2.972.021.420	90,75	2.972.021.420	91,00	2.972.021.420	91,25	2.972.021.420	5.02.0.00.0.00.02.0034 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten Majalengka														
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Pangandaran	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Pangandaran (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.612.826.930	90,50	2.612.826.930	90,75	2.612.826.930	91,00	2.612.826.930	91,25	2.612.826.930	5.02.0.00.0.00.02.0008 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Purwakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Purwakarta (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.139.272.178	90,50	3.139.272.178	90,75	3.139.272.178	91,00	3.139.272.178	91,25	3.139.272.178	5.02.0.00.0.00.02.0020 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Subang	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Subang (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.500.667.265	90,50	2.500.667.265	90,75	2.500.667.265	91,00	2.500.667.265	91,25	2.500.667.265	5.02.0.00.0.00.02.0031 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUBANG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Sukabumi I Cibadak (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.475.357.160	90,50	2.475.357.160	90,75	2.475.357.160	91,00	2.475.357.160	91,25	2.475.357.160	5.02.0.00.0.00.02.0035 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.890.911.517	90,50	2.890.911.517	90,75	2.890.911.517	91,00	2.890.911.517	91,25	2.890.911.517	5.02.0.00.0.00.02.0005 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RATU
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Sumedang	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Sumedang (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.438.837.579	90,50	3.438.837.579	90,75	3.438.837.579	91,00	3.438.837.579	91,25	3.438.837.579	5.02.0.00.0.00.02.0024 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kabupaten Tasikmalaya (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.952.817.423	90,50	2.952.817.423	90,75	2.952.817.423	91,00	2.952.817.423	91,25	2.952.817.423	5.02.0.00.0.00.02.0016 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota	92,87	90,00	90,25	4.126.895.599	90,50	4.126.895.599	90,75	4.126.895.599	91,00	4.126.895.599	91,25	4.126.895.599	5.02.0.00.0.00.02.0028 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah pada P3DW Kota Bandung I Pajajaran	Bandung I Pajajaran (Poin)													WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Bandung Ii Kawaluyaan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Bandung Ii Kawaluyaan (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.888.455.834	90,50	3.888.455.834	90,75	3.888.455.834	91,00	3.888.455.834	91,25	3.888.455.834	5.02.0.00.0.00.02.0032 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Bandung Iii Soekarno Hatta	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Bandung Iii Soekarno Hatta (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.421.382.708	90,50	3.421.382.708	90,75	3.421.382.708	91,00	3.421.382.708	91,25	3.421.382.708	5.02.0.00.0.00.02.0010 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Banjar	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Banjar (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.188.477.352	90,50	2.188.477.352	90,75	2.188.477.352	91,00	2.188.477.352	91,25	2.188.477.352	5.02.0.00.0.00.02.0026 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANJAR
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Bekasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Bekasi (Poin)	92,87	90,00	90,25	5.418.496.071	90,50	5.418.496.071	90,75	5.418.496.071	91,00	5.418.496.071	91,25	5.418.496.071	5.02.0.00.0.00.02.0029 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Bogor	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Bogor (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.848.897.221	90,50	3.848.897.221	90,75	3.848.897.221	91,00	3.848.897.221	91,25	3.848.897.221	5.02.0.00.0.00.02.0021 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BOGOR
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Cimahi	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Cimahi (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.462.517.288	90,50	2.462.517.288	90,75	2.462.517.288	91,00	2.462.517.288	91,25	2.462.517.288	5.02.0.00.0.00.02.0013 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIMAHI
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Cirebon (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.627.398.119	90,50	2.627.398.119	90,75	2.627.398.119	91,00	2.627.398.119	91,25	2.627.398.119	5.02.0.00.0.00.02.0014 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIREBON
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Depok I	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Depok I (Poin)	92,87	90,00	90,25	4.334.782.229	90,50	4.334.782.229	90,75	4.334.782.229	91,00	4.334.782.229	91,25	4.334.782.229	5.02.0.00.0.00.02.0030 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK I

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Depok II Cinere	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Depok Ii Cinere (Poin)	92,87	90,00	90,25	3.142.164.761	90,50	3.142.164.761	90,75	3.142.164.761	91,00	3.142.164.761	91,25	3.142.164.761	5.02.0.00.0.00.02.0027 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK II CINERE
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Tasikmalaya	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Tasikmalaya (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.692.459.278	90,50	2.692.459.278	90,75	2.692.459.278	91,00	2.692.459.278	91,25	2.692.459.278	5.02.0.00.0.00.02.0019 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah pada P3DW Kota Sukabumi	Indeks Kepuasan Masyarakat pada P3DW Kota Sukabumi (Poin)	92,87	90,00	90,25	2.153.440.302	90,50	2.153.440.302	90,75	2.153.440.302	91,00	2.153.440.302	91,25	2.153.440.302	5.02.0.00.0.00.02.0033 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					**8.038.990.751.713**		**8.273.048.268.442**		**8.069.231.800.605**		**8.134.630.615.738**		**8.345.398.412.067**	
Perencanaan Anggaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Prioritas Pembangunan Daerah yang Dianggarkan Dalam APBD (%)	-	100	100	3.077.417.000	100	3.231.288.000	100	3.392.852.000	100	3.562.495.000	100	3.740.620.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tindaklanjut Usulan Pencairan Dana yang Tepat Waktu (%)	-	100	100	1.024.117.000	100	1.075.323.000	100	1.129.090.000	100	1.185.545.000	100	1.244.823.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Persentase)	-	100	100	1.358.179.000	100	1.426.088.000	100	1.497.392.000	100	1.572.261.000	100	1.650.874.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Diterapkan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Diterapkan Oleh Kabupaten/Kota (%)	-	100	100	380.632.000	100	399.664.000	100	419.647.000	100	440.629.000	100	462.660.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kategori)	N/A	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1.253.318.864	Sangat Tinggi	1.315.984.000	Sangat Tinggi	1.381.783.000	Sangat Tinggi	1.450.873.000	Sangat Tinggi	1.523.417.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran APBD Kab/Kota dan Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota	Persentase Kepgub Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran APBD Kab/Kota dan Kepgub Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota (%)	-	100	100	1.184.568.250	100	1.243.798.000	100	1.305.988.000	100	1.371.289.000	100	1.439.854.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota	Persentase Kepgub Hasil Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang Ditindaklanjuti Oleh Kabupaten/Kota (%)	-	100	100	73.955.000	100	77.653.000	100	81.536.000	100	85.613.000	100	89.894.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	-	100	100	3.203.300.245	100	2.154.709.081	100	1.106.117.914	100	441.166.970	-	-	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan	Persentase Dokumen Pengelolaan	-	100	100	2.020.966.491.295	100	2.514.569.088.486	100	2.211.414.036.935	100	2.175.275.398.535	100	2.282.433.250.236	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Desa Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)													Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Dana Darurat dan Mendesak Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan PerundangNAundangan (%)	-	100	100	510.000.000.000	100	150.000.000.000	100	150.000.000.000	100	150.000.000.000	100	150.000.000.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	-	100	100	5.496.468.773.059	100	5.597.554.672.875	100	5.697.503.357.756	100	5.799.245.345.233	100	5.902.813.019.831	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					**10.089.198.000**		**10.593.659.000**		**11.123.341.000**		**11.679.510.000**		**12.263.485.000**	
Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Poin)	2,63	2,65	2,75	4.541.807.000	2,85	4.768.898.000	2,95	5.007.343.000	3,05	5.257.712.000	3,15	5.520.597.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Hasil Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Diterapkan Oleh Kabupaten/Kota	Rata-rata Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Poin)	-	2,65	2,75	1.004.896.000	2,85	1.055.141.000	2,95	1.107.898.000	3,05	1.163.293.000	3,15	1.221.458.000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah Andal	Indeks Sertifikasi Dokumen Kepemilikan	-	2,0	2,0	3.697.016.000	2,0	3.881.867.000	2,5	4.075.960.000	2,5	4.279.758.000	3,0	4.493.746.000	5.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan aset

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Barang Milik Daerah (Poin)													
Pengelolaan Barang Milik Daerah Akuntabel dan Produktif	Indeks Realisasi Penerimaan Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Poin)	-	3,5	3,5	845.479.000	3,5	887.753.000	3,5	932.140.000	4,0	978.747.000	4,0	1.027.684.000	5.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan aset
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					**33.538.410.526**		**33.538.410.526**		**33.538.410.526**		**33.538.410.526**		**33.538.410.526**	
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (%)	100	100	100	20.510.008.016	100	20.510.008.016	100	20.510.008.016	100	20.510.008.016	100	20.510.008.016	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Bandung Barat (%)	100	100	100	235.493.000	100	235.493.000	100	235.493.000	100	235.493.000	100	235.493.000	5.02.0.00.0.00.02.0001 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Bandung I Rancaekek (%)	100	100	100	606.871.050	100	606.871.050	100	606.871.050	100	606.871.050	100	606.871.050	5.02.0.00.0.00.02.0011 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Bandung Ii Soreang (%)	100	100	100	468.810.630	100	468.810.630	100	468.810.630	100	468.810.630	100	468.810.630	5.02.0.00.0.00.02.0015 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SOREANG
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Bekasi (%)	100	100	100	249.600.000	100	249.600.000	100	249.600.000	100	249.600.000	100	249.600.000	5.02.0.00.0.00.02.0009 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BEKASI
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Bogor (%)	100	100	100	508.449.841	100	508.449.841	100	508.449.841	100	508.449.841	100	508.449.841	5.02.0.00.0.00.02.0003 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BOGOR
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Ciamis (%)	100	100	100	389.635.870	100	389.635.870	100	389.635.870	100	389.635.870	100	389.635.870	5.02.0.00.0.00.02.0007 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Cianjur (%)	100	100	100	235.299.050	100	235.299.050	100	235.299.050	100	235.299.050	100	235.299.050	5.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIANJUR
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Cirebon I Sumber (%)	100	100	100	426.097.900	100	426.097.900	100	426.097.900	100	426.097.900	100	426.097.900	5.02.0.00.0.00.02.0018 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON I SUMBER
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Cirebon Ii Ciledug (%)	100	100	100	212.797.150	100	212.797.150	100	212.797.150	100	212.797.150	100	212.797.150	5.02.0.00.0.00.02.0006 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON II CILEDUG
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Garut (%)	100	100	100	171.168.560	100	171.168.560	100	171.168.560	100	171.168.560	100	171.168.560	5.02.0.00.0.00.02.0002 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN GARUT
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Indramayu I (%)	100	100	100	387.370.190	100	387.370.190	100	387.370.190	100	387.370.190	100	387.370.190	5.02.0.00.0.00.02.0023 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU I
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Indramayu II Haurgeulis (%)	100	100	100	333.464.276	100	333.464.276	100	333.464.276	100	333.464.276	100	333.464.276	5.02.0.00.0.00.02.0017 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Karawang (%)	100	100	100	554.110.000	100	554.110.000	100	554.110.000	100	554.110.000	100	554.110.000	5.02.0.00.0.00.02.0022 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KARAWANG
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Kuningan (%)	100	100	100	461.803.900	100	461.803.900	100	461.803.900	100	461.803.900	100	461.803.900	5.02.0.00.0.00.02.0012 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN
Meningkatnya Pendapatan Pajak	Persentase Realisasi Pajak	100	100	100	565.405.200	100	565.405.200	100	565.405.200	100	565.405.200	100	565.405.200	5.02.0.00.0.00.02.0034 - UPTD PUSAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Majalengka (%)													PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Pangandaran (%)	100	100	100	237.871.132	100	237.871.132	100	237.871.132	100	237.871.132	100	237.871.132	5.02.0.00.0.00.02.0008 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Purwakarta (%)	100	100	100	282.654.258	100	282.654.258	100	282.654.258	100	282.654.258	100	282.654.258	5.02.0.00.0.00.02.0020 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Subang (%)	100	100	100	591.508.281	100	591.508.281	100	591.508.281	100	591.508.281	100	591.508.281	5.02.0.00.0.00.02.0031 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUBANG
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Sukabumi I Cibadak (%)	100	100	100	817.587.958	100	817.587.958	100	817.587.958	100	817.587.958	100	817.587.958	5.02.0.00.0.00.02.0035 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu (%)	100	100	100	301.829.535	100	301.829.535	100	301.829.535	100	301.829.535	100	301.829.535	5.02.0.00.0.00.02.0005 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RATU
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Sumedang (%)	100	100	100	584.380.025	100	584.380.025	100	584.380.025	100	584.380.025	100	584.380.025	5.02.0.00.0.00.02.0024 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kabupaten Tasikmalaya (%)	100	100	100	361.607.000	100	361.607.000	100	361.607.000	100	361.607.000	100	361.607.000	5.02.0.00.0.00.02.0016 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada	100	100	100	619.987.142	100	619.987.142	100	619.987.142	100	619.987.142	100	619.987.142	5.02.0.00.0.00.02.0028 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	P3DW Kota Bandung I Pajajaran (%)													WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Bandung II Kawaluyaan (%)	100	100	100	610.447.900	100	610.447.900	100	610.447.900	100	610.447.900	100	610.447.900	5.02.0.00.0.00.02.0032 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Bandung III Soekarno Hatta (%)	100	100	100	383.447.630	100	383.447.630	100	383.447.630	100	383.447.630	100	383.447.630	5.02.0.00.0.00.02.0010 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Banjar	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Banjar (%)	100	100	100	156.677.000	100	156.677.000	100	156.677.000	100	156.677.000	100	156.677.000	5.02.0.00.0.00.02.0026 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANJAR
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Bekasi	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Bekasi (%)	100	100	100	162.552.000	100	162.552.000	100	162.552.000	100	162.552.000	100	162.552.000	5.02.0.00.0.00.02.0029 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Bogor	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Bogor (%)	100	100	100	300.116.917	100	300.116.917	100	300.116.917	100	300.116.917	100	300.116.917	5.02.0.00.0.00.02.0021 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BOGOR
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Cimahi	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Cimahi (%)	100	100	100	424.756.050	100	424.756.050	100	424.756.050	100	424.756.050	100	424.756.050	5.02.0.00.0.00.02.0013 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIMAHI
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Cirebon	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Cirebon (%)	100	100	100	168.136.754	100	168.136.754	100	168.136.754	100	168.136.754	100	168.136.754	5.02.0.00.0.00.02.0014 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIREBON
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Depok I	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Depok I (%)	100	100	100	313.474.400	100	313.474.400	100	313.474.400	100	313.474.400	100	313.474.400	5.02.0.00.0.00.02.0030 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK I
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Depok Ii Cinere	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Depok Ii Cinere (%)	100	100	100	429.565.001	100	429.565.001	100	429.565.001	100	429.565.001	100	429.565.001	5.02.0.00.0.00.02.0027 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK II CINERE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Sukabumi (%)	100	100	100	223.319.700	100	223.319.700	100	223.319.700	100	223.319.700	100	223.319.700	5.02.0.00.0.00.02.0033 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI
Meningkatnya Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW Kota Tasikmalaya (%)	100	100	100	252.107.210	100	252.107.210	100	252.107.210	100	252.107.210	100	252.107.210	5.02.0.00.0.00.02.0019 - UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA TASIKMALAYA
5.03 - KEPEGAWAIAN					**68.126.362.665**		**68.364.308.499**		**69.496.235.885**		**71.358.459.197**		**72.190.961.061**	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**60.283.632.019**		**60.259.953.828**		**61.325.865.555**		**62.607.028.507**		**63.882.857.457**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Daerah (Nilai)	88,83	89,20	89,60	60.283.632.019	89,80	60.259.953.828	90,20	61.325.865.555	90,75	62.607.028.507	91,00	63.882.857.457	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					**7.842.730.646**		**8.104.354.671**		**8.170.370.330**		**8.751.430.690**		**8.308.103.604**	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian (poin)	115	115	117,5	2.147.311.056	117,5	2.843.470.940	120	2.739.704.616	120	2.639.704.616	120	2.850.880.985	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi (Poin)	40	40	40	709.420.000	40	766.173.600	40	827.467.488	40	827.467.488	40	893.664.887	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir ASN	Nilai Kriteria Pengembangan Karier (Poin)	125	125	125	892.090.890	125	1.101.582.670	125	1.169.417.952	125	1.169.417.952	128	1.225.366.234	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (Poin)	120	120	120	689.639.400	120	906.671.531	120	848.672.997	120	848.672.997	120	916.566.836	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kualifikasi ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (Poin)	20,88	20,90	20,91	2.800.000.000	20,92	1.833.845.086	20,93	1.880.287.565	20,94	2.561.347.925	20,95	1.660.419.374	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Kinerja ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja (Poin)	28,06	28,07	28,08	475.519.300	28,10	513.560.844	28,11	554.645.712	28,12	554.645.712	28,13	599.017.368	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Disiplin ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin (poin)	5,00	4,99	4,99	128.750.000	4,99	139.050.000	4,99	150.174.000	4,99	150.174.000	4,99	162.187.920	5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Daerah
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**74.331.943.037**		**75.501.170.698**		**76.693.782.912**		**77.910.247.370**		**79.151.041.117**	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**58.461.383.037**		**59.630.610.698**		**60.823.222.912**		**62.039.687.370**		**63.280.481.117**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Nilai)	83,59	84,50	85,00	58.461.383.037	85,50	59.630.610.698	86,00	60.823.222.912	86,50	62.039.687.370	87,00	63.280.481.117	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**15.870.560.000**		**15.870.560.000**		**15.870.560.000**		**15.870.560.000**		**15.870.560.000**	
Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Teknis dan Fungsional Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional (%)	-	16,50	17,00	2.728.225.938	17,50	2.728.225.938	18,00	2.728.225.938	18,50	2.728.225.938	19,00	2.728.225.938	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kompetensi ASN di Bidang Manajerial dan Dasar Serta Pimpinan Daerah Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial (%)	-	16,5	17	11.102.245.411	17,5	11.102.245.411	18	11.102.245.411	18,5	11.102.245.411	19	11.102.245.411	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Implementasi Corporate University	Indeks Maturitas Corporate University (Kategori)	Mature	Mature	Mature	2.040.088.651	Mature	2.040.088.651	Mature	2.040.088.651	Advance	2.040.088.651	Advance	2.040.088.651	5.04.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**27.625.949.020**		**28.098.468.000**		**28.580.437.360**		**29.072.046.108**		**29.573.487.030**	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**23.625.949.019**		**24.098.467.999**		**24.580.437.359**		**25.072.046.107**		**25.573.487.029**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Nilai)	89,04	89,2	89,36	23.625.949.019	89,52	24.098.467.999	89,68	24.580.437.359	89,84	25.072.046.107	90	25.573.487.029	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					**2.967.401.936**		**2.967.401.936**		**2.967.401.936**		**2.967.401.936**		**2.967.401.936**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pembangunan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam Penyelesaian Permasalahan di Jawa Barat	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup pemerintahan dan pengkajian peraturan yang berbasis isu strategis (%)	-	100	100	439.929.823	100	439.929.823	100	439.929.823	100	439.929.823	100	439.929.823	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pembangunan Lingkup Sosial dan Kependudukan dalam Penyelesaian Permasalahan di Jawa Barat	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup sosial dan kependudukan yang berbasis isu strategis (%)	-	100	100	626.346.419	100	626.346.419	100	626.346.419	100	626.346.419	100	626.346.419	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pembangunan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan dalam Penyelesaian Permasalahan di Jawa Barat	Persentase rancangan kebijakan hasil riset lingkup ekonomi dan pembangunan yang berbasis isu strategis (%)	-	100	100	1.901.125.694	100	1.901.125.694	100	1.901.125.694	100	1.901.125.694	100	1.901.125.694	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Didiseminasikan (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Peringkat Akreditasi Jurnal	Peringkat jurnal yang memenuhi Akreditasi (Peringkat)	N/A	SINTA 4	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Inovasi Daerah Bermutu	Persentase Usulan Inovasi Daerah yang Dilaporkan (%)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					**1.032.598.065**		**1.032.598.065**		**1.032.598.065**		**1.032.598.065**		**1.032.598.065**	
Meningkatnya Diseminasi Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Didiseminasikan (%)	100	-	100	115.791.060	100	115.791.060	100	115.791.060	100	115.791.060	100	115.791.060	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Peringkat Akreditasi Jurnal	Peringkat jurnal yang memenuhi Akreditasi (Peringkat)	N/A	N/A	SINTA 4	37.964.282	SINTA 3	37.964.282	SINTA 3	37.964.282	SINTA 2	37.964.282	SINTA 2	37.964.282	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi (%)	100	-	100	37.964.282	100	37.964.282	100	37.964.282	100	37.964.282	100	37.964.282	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Inovasi Daerah Bermutu	Persentase Usulan Inovasi Daerah yang Dilaporkan (%)	100	-	100	840.878.441	100	840.878.441	100	840.878.441	100	840.878.441	100	840.878.441	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					**12.509.030.081**		**12.937.210.683**		**13.369.954.896**		**13.807.353.994**		**14.249.501.074**	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**11.409.030.081**		**11.637.210.683**		**11.869.954.896**		**12.107.353.994**		**12.349.501.074**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Penghubung	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penghubung (Nilai)	73,00	74,00	74,25	11.409.030.081	74,50	11.637.210.683	75,00	11.869.954.896	80,10	12.107.353.994	80,25	12.349.501.074	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					**1.100.000.000**		**1.300.000.000**		**1.500.000.000**		**1.700.000.000**		**1.900.000.000**	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol & Promosi Informasi yang Prima	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol & Promosi Informasi yang Difasilitasi (%)	100	100	100	1.100.000.000	100	1.300.000.000	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.900.000.000	5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					**102.463.230.669**		**104.738.097.035**		**107.239.708.976**		**109.803.558.656**		**112.431.256.992**	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**62.797.153.956**		**64.053.097.035**		**65.334.158.976**		**66.640.842.155**		**67.973.658.998**	
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pengawasan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah (Nilai)	80,27	77,02	79,81	62.797.153.956	80	64.053.097.035	81,20	65.334.158.976	81,48	66.640.842.155	82	67.973.658.998	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					**36.083.038.357**		**37.080.000.000**		**38.192.400.000**		**39.338.172.001**		**40.518.317.158**	
Meningkatnya pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota	Nilai dampak implementasi SAKIP* (Angka)	91,40	84,80	85,78	353.662.922	88,30	363.424.019	89,33	374.326.739	88,06	385.556.541	90	397.123.238	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan penerapan kriteria penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Persentase rekomendasi hasil reviu LKPD yang ditindaklanjuti dalam LKPD (%)	100	100	100	458.020.000	100	471.731.137	100	485.883.071	100	500.459.563	100	515.473.350	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya penyelesaian kerugian negara/daerah	Persentase kasus Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan (%)	100	72	75	572.266.000	77	588.060.542	78	605.702.358	79	623.873.429	80	642.589.631	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persentase rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI yang diselesaikan (%)	70,20	72,50	73,00	1.237.401.409	73,20	1.271.553.688	73,37	1.309.700.299	73,52	1.348.991.308	73,82	1.389.461.047	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan tertentu	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (%)	100	100	100	11.740.500.521	100	12.064.538.335	100	12.426.474.485	100	12.799.268.720	100	13.183.246.781	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal (%)	95,1	77,0	80,0	2.073.017.422	75,0	2.130.232.703	76,5	2.194.139.684	77,2	2.259.963.875	80,0	2.327.762.791	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP eksternal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP eksternal (%)	100	90	92	1.236.730.169	93	1.270.863.921	94,5	1.308.989.839	95,5	1.348.259.534	96	1.388.707.320	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan umum dan tujuan tertentu (%)	100	100	100	9.438.586.000	100	9.699.090.974	100	9.990.063.703	100	10.289.765.614	100	10.598.458.582	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	Persentase Kabupaten/kota yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan umum dan tujuan tertentu (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya Kepatuhan dalam Penerapan Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persentase rekomendasi hasil audit SPBE pada pemeritah daeerah provinsi jawa barat yang diterapkan (%)	100	100	81	376.417.098	82	386.806.210	83	398.410.396	86	410.362.708	88	422.673.589	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan PPDB SMA/SMK/SLB di Jawa Barat	Persentase KCD yang mematuhi ketentuan PPDB (%)	100	100	100	830.485.530	100	853.406.930	100	879.009.138	100	905.379.412	100	932.540.795	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan BUMD	Presentase rekomendasi	-	62	63	521.557.143	65	535.952.120	68	552.030.684	70	568.591.604	75	585.649.352	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	hasil pengawasan yang ditindaklanjuti BUMD (Persentase)													
Meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan bantuan keuangan kabupaten/kota	Persentase Kab/Kota penerima Bantuan Keuangan Kab/Kota yang patuh (%)	100	100	100	4.069.027.212	100	4.181.332.363	100	4.306.772.334	100	4.435.975.504	100	4.569.054.769	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan dana desa	Persentase sampling desa penerima dana desa yang patuh (%)	100	92	95	2.092.268.986	95,5	2.150.015.610	96	2.214.516.078	95	2.280.951.561	95	2.349.380.107	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan dana BOS, BOPD dan BPMU	Persentase sampling sekolah penerima dana BOS, BOPD dan BPMU yang patuh (%)	100	92	95	390.139.302	96	400.907.147	97	412.934.361	98	425.322.392	99	438.082.064	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan pengguna produk dalam negeri	Persentase kepatuhan dalam penerapan P3DN (%)	100	100	100	325.557.143	100	334.542.520	100	344.578.796	100	354.916.160	100	365.563.644	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya kepatuhan dalam penerapan kriteria penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi (LPPD)	Persentase hasil review LPPD yang diterapkan dalam penyusunan LPPD (%)	100	100	100	367.401.500	100	377.541.781	100	388.868.035	100	400.534.076	100	412.550.098	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					**3.583.038.356**		**3.605.000.000**		**3.713.150.000**		**3.824.544.500**		**3.939.280.836**	
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP* (%)	100	100	100	672.594.000	100	691.157.594	100	711.892.322	100	733.249.092	100	755.246.565	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Maturitas APIP* (Level)	3,290	3,184	3,135	930.398.400	3,135	956.077.396	3,135	984.759.718	3,153	1.014.302.509	3,170	1.044.731.585	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM (Perangkat Daerah)	5	5	6	873.933.356	6	898.053.917	5	924.995.534	5	952.745.400	5	981.327.762	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Persentase nilai Monitoring Center for	97,00	97,27	97,40	1.106.112.600	95,12	1.059.711.093	96,00	1.091.502.426	96,88	1.124.247.499	97,76	1.157.974.924	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prevention (MCP) (%)													
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**459.421.241.298**		**410.926.951.924**		**412.336.776.762**		**413.779.998.098**		**415.318.903.860**	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**35.285.531.298**		**35.991.241.924**		**36.711.066.762**		**37.445.288.098**		**38.194.193.860**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Nilai)	81,27	81,77	82,27	35.285.531.298	82,77	35.991.241.924	83,27	36.711.066.762	83,77	37.445.288.098	84,27	38.194.193.860	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					**7.000.000.000**		**7.500.000.000**		**8.000.000.000**		**8.500.000.000**		**9.000.000.000**	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Persentase penurunan kasus kejadian diskriminasi dan intoleransi masyarakat (%)	19,15	34,21	36	7.000.000.000	37,5	7.500.000.000	40	8.000.000.000	50	8.500.000.000	100	9.000.000.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					**256.856.550.000**		**256.856.550.000**		**256.856.550.000**		**256.856.550.000**		**256.856.550.000**	
Meningkatnya penerapan hasil pembinaan Pendidikan Politik Bagi Usia Pemilih	Persentase usia pemilih yang menerapkan hasil pembinaan pendidikan politik (%)	-	39,06	39,16	256.856.550.000	39,27	256.856.550.000	39,37	256.856.550.000	39,48	256.856.550.000	39,59	256.856.550.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.000.000.000**	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan (%)	50,96	50,96	53,51	5.000.000.000	56,18	5.000.000.000	58,99	5.000.000.000	61,94	5.000.000.000	65,04	5.000.000.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN					**1.179.160.000**		**1.179.160.000**		**1.179.160.000**		**1.179.160.000**		**1.179.160.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
Meningkatnya penerapan hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Masyarakat yang menerapkan hasil pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	76	70	71	1.179.160.000	72	1.179.160.000	72	1.179.160.000	73	1.179.160.000	74	1.179.160.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					**154.100.000.000**		**104.400.000.000**		**104.590.000.000**		**104.799.000.000**		**105.089.000.000**	
Berkurangnya potensi konflik sosial	Persentase Pengurangan Potensi Konflik Sosial (%)	-	14,85	14,85	154.100.000.000	19,80	104.400.000.000	19,80	104.590.000.000	14,85	104.799.000.000	15,84	105.089.000.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					31.594.755.336.100		31.538.734.082.874		32.783.175.449.377		34.969.534.587.176		35.643.913.900.400	

Sumber: Diolah oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan acuan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Sejumlah indikator pencapaian diuraikan berdasarkan sasaran-sasaran makro (**indikator makro**) yang merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang disusun berdasarkan pertimbangan target penyelenggaraan pembangunan periode 2025-2029 sesuai proporsi terhadap target jangka panjang pembangunan daerah Tahun 2025-2045. Selain itu, terdapat pula **indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** yang merupakan acuan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Kinerja Makro ditunjukkan dengan Indikator Makro, sedangkan kinerja utama ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pemerintah daerah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan visi misi Kepala Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi paling tinggi dan merupakan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*, yang pada umumnya merupakan hasil dari *crosscutting* beberapa urusan atau program. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET RPJMD						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Modal Manusia	Poin	N/A	0,55	0,56	0,57	0,59	0,60	0,60	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
2	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat Pendek) pada balita	Persen	15,90	15,14	14,39	13,65	12,92	12,20	11,49	Dinas Kesehatan, DP3AKB, Disdik Disperkim
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	56,50	57,24	57,98	58,74	59,50	60,27	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Poin	N/A	3,02	3,08	3,14	3,21	3,27	3,34	Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	61,10	62,51	63,94	65,41	66,92	68,46	70,03	Dinas Pemuda dan Olahrga
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44	3,89 - 4,66	2,86 - 3,86	2,57 - 3,52	Dinas Sosial, Dinkes, Disdik, DP3AKB, DPMD, Biro Kesejahteraan Rakyat, Disdukcapil, Disperkim, Disnakertrans, ESDM, DTPH, DKP, DKPP, Disbun, Dishut, DKUK
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU)	Persen	N/A	4,58	4,42	4,23	4,01	3,48	3,47	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
8	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	2,142	1,444	1,475	1,500	1,529	1,560	1,585	Bapenda, BPKAD, Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
9	Nilai Tukar Petani	Poin	112,17	112-117	114-119	115-121	116-124	118-126	119-128	DTPH, DISBUN, DKPP, DKP, DISHUT
10	Tingkat Inflasi	Persen	N/A	3,3 - 3,8	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	Biro Ekonomi, Disperindag, DKPP
11	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,06	62,93	66,11	67,53	68,93	70,47	71,49	DBMPR, Dishub, DSDA, Disperkim, DESDM

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET RPJMD						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	56,25	56,95	58,11	59,26	60,42	61,57	63,97	Dinas Perumahan dan Permukiman
13	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca									Dishut, Disbun, DTPH, DKP, DKPP, DLH, Disperkim
	a, Kumulatif	Persen	N/A	2,66	3,31	4,02	4,80	5,65	6,55	
	b, Tahunan	Persen	N/A	9,27	10,63	12,46	14,53	16,47	18,45	
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	66,09	64,06	64,31	64,56	64,82	65,07	65,32	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, DKP, Dishub, DSDA
15	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	66,44	69,71	70,61	71,29	71,83	72,27	72,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
16	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,51	71,95	73,12	73,87	74,62	75,38	76,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,458	0,458	0,457	0,448	0,439	0,431	0,422	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
18	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,05	3,11	3,23	3,34	3,47	3,73	3,87	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
19	Indeks Risiko Bencana	Poin	114,15	109,18	108,30	107,44	106,58	105,73	104,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Indeks Desa	Persen	77,11	77,46	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	76,67	73,71	74,05	74,39	74,74	75,08	75,43	Kesbangpol, Biro Kesejahteraan Rakyat
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	N/A	56,70	57,24	57,78	58,33	58,89	59,45	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,88	3,90	3,96	4,04	4,13	4,22	4,32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET RPJMD						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A-	A-	A-	A-	A-	A-	A-	Biro Organisasi, Inspektorat, Diskominfo, Dispusipda, Bappeda, BKD, BPKAD, BP2D
25	Indeks Inovasi Daerah	Poin	81,27	81,28	81,29	81,30	81,31	81,32	81,33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	83,04	86,03	87,52	89,02	90,51	92,01	93,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27	Indeks Ketahanan Air	Poin	N/A	3,25	3,29	3,35	3,40	3,45	3,50	DSDA, Dishut, DESDM, DLH, BBWS, Disperkim, DTPH, BPBD, Bappeda, Dinsos, BHLK, BMKG, Kementerian ESDM, Dinkes

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025
Keterangan : N/A, Indikator Baru

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dan penting dianalisis meliputi indikator makro dan 4 (empat) aspek utama yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah meliputi 45 indikator utama pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN sebagai arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat 5 (lima) tahun kedepan sebagai alat ukur utama dalam keberhasilan pembangunan jangka Panjang dan indikator kinerja kunci yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Adapun Penetapan target Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Aspek Geografi dan Demografi**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	82,97	83,42	83,72	84,02	84,32	84,62	84,92	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	Indeks Ketahanan Air	Poin	N/A	3,25	3,29	3,35	3,40	3,45	3,50	DSDA, Dishut, DESDM, DLH, BBWS, Disperkim, DTPH, BPBD, Bappeda, Dinsos, BHLK, BMKG, Kementerian ESDM, Dinkes
3	Penurunan intensitas emisi GRK **)	Persen	N/A	6,61	6,97	7,98	8,76	8,95	12,68	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perumahan dan Permukiman, , Dinas Perhubungan, Bappeda
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah **) ***)	Poin	66,09	64,06	64,31	64,56	64,82	65,07	65,32	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, DKP, DSDA
5	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat ***)	Persen	N/A	3,02	3,08	3,14	3,21	3,27	3,34	Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ***)	Persen	10,54	13,5	18,88	24,25	29,63	35	40,38	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ***)	Persen	7,45	23,04	26,11	29,59	33,53	38	40	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ***)	Persen RT	78,11	81,73	85,53	89,5	93,65	98	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Konsumsi Listrik per Kapita ***)	kWh/Kapita	1391,67	1.396,00	1.424,00	1.456,00	1.494,00	1.543,00	1.604,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU)	Persen	5,99	4,58	4,42	4,23	4,01	3,48	3,47	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
11	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	Poin	93,28	94,36	94,65	94,93	95,21	95,49	95,77	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
12	Kapasitas Air Baku ***)	m3/detik	N/A	105,28	120,12	135,7	151,48	167,52	183,75	Dinas Sumber Daya Air
13	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Konsumsi Air Siap Minum Perpipaan ***)	Persen	N/A	34,74	38,04	41,34	44,64	48	51,25	Dinas Perumahan dan Permukiman
14	Indeks Risiko Bencana ***)	Poin	114,15	109,18	108,3	107,44	106,58	105,73	104,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ***)									
	a. Kumulatif	Persen	N/A	2,66	3,31	4,02	4,8	5,65	6,55	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Energi dan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Bappeda
	b. Tahunan	Persen	N/A	9,27	10,63	12,46	14,53	16,47	18,45	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Bappeda
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi **)	Persen	4,95	4,96 - 5,37	5,15 - 6,20	5,23 - 7,48	5,27 - 7,63	5,44 - 7,95*	5,49 - 6,06	
2	PDRB per Kapita **)	Juta Rupiah	56,08	57,41 - 59,60	63,65 - 66,00	68,22 - 71,60	73,27 - 77,80	78,85 - 84,90	85,36 - 91,57	
3	Tingkat Kemiskinan **) ***)	Persen	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44	3,89 - 4,66	2,86 - 3,86	2,57 - 3,52	
4	Rasio Gini **)	Poin	0,428	0,383 - 0,390	0,381 - 0,420	0,381 - 0,420	0,380 - 0,419	0,379 - 0,418	0,379 - 0,418	
5	Indeks Modal Manusia **)	Poin	N/A	0,55	0,56	0,57	0,59	0,6	0,6	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka **) ***)	Persen	6,75	6,42 - 6,99	6,31 - 6,66	6,05 - 6,49	6,00 - 6,53	5,94 - 6,56	5,86 - 6,27	
7	Usia Harapan Hidup (UHH) ***)	Tahun	75,16	75,29	75,56	75,84	76,11	76,39	76,66	Dinas Kesehatan
8	Angka Kematian Ibu ***)	Per 100,000 kelahiran hidup	98,6	122	109	95	82	69	69	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita ***)	Persen	15,9	15,14	14,39	13,65	12,92	12,2	11,49	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) ***)	Persen	N/A	95	95	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) ***)	Persen	83	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
12	Indeks Kesejahteraan Petani	poin	N/A	0,6522	0,6808	0,7115	0,7401	0,7676	0,7962	DTPH, DISBUN, DKPP, DKP, DISHUT
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional ***)	Persen	97,73	98	98,4	98,6	98,8	99	99	Dinas Kesehatan
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: ***)									Dinas Pendidikan
	i) Literasi Membaca	Persen	60,94	61,59	62,25	62,92	63,6	64,29	64,99	Dinas Pendidikan
	ii) Numerasi	Persen	50,42	52,27	54,13	56	57,88	59,77	61,67	Dinas Pendidikan
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: ***)									Dinas Pendidikan
	i) Literasi Membaca	Persen	67,19	68,05	68,92	69,8	70,69	71,59	72,5	Dinas Pendidikan
	ii) Numerasi	Persen	69,01	69,22	69,44	69,67	69,91	70,16	70,42	Dinas Pendidikan
16	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun ***)	Tahun	9,24	9,35	9,48	9,61	9,72	9,84	9,92	Dinas Pendidikan
17	Harapan Lama Sekolah ***)	Tahun	12,8	12,91	12,97	13,03	13,09	13,15	13,17	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ***)	Persen	8,81	9,64	9,84	10,04	10,25	10,46	10,63	Biro Kesejahteraan Rakyat
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ***)	Persen	84,31	86,42	87,14	87,34	87,54	87,74	87,94	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi ***)	Persen	34,1	39,77	41,19	42,65	44,77	45,74	47,37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ***)	Persen	N/A	24	25,32	26,71	28,18	29,73	31,36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan.	Orang	N/A	51200	53359	55610	57956	60400	62948	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Sosial
23	b) Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	N/A	26	26	27	27	28	28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ***)	Poin	N/A	56,7	57,24	57,78	58,33	58,89	59,45	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ***)	Poin	76,67	73,71	74,05	74,39	74,74	75,08	75,43	Kesatuan Bangsa dan Politik, Biro Kesejahteraan Rakyat
26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) ***)	Indeks	66,44	69,71	70,61	71,29	71,83	72,27	72,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
27	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ***)	Indeks	0,458	0,458	0,457	0,448	0,439	0,431	0,422	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
28	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,51	71,95	73,12	73,87	74,62	75,38	76,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,23*	90,5	90,78	91,05	91,33	91,60	91,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
30	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	61,1	62,51	63,94	65,41	66,92	68,46	70,03	Dinas Pemuda dan Olahraga
31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	72,76	72,77	72,84	72,95	73	73,05	73,1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
32	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal ***)	Persen	45,61	46	46,92	48,93	51,02	53,2	55,47	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, DISKUK
33	Indeks kesejahteraan sosial (IKESOS)	Poin	56,88	57,38	57,90	58,50	59,00	59,70	60,25	Dinas Sosial
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Kontribusi PDRB Provinsi **)	Persen	12,82	12,72	12,62	12,54	12,46	12,3	12,22	
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	1,59	1,69 - 3,4	2,16 - 3,92	2,27 - 4,52	2,75 - 5,21	2,95 - 6,00	4,44 - 6,92	Disbun, DKP, DTPH, DKPP

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4,85	4,17	5,51	6,44	6,79	6,96	4,6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan ***)	Persen	41,39	41,87 - 42,00	41,51 - 41,67	41,15 - 41,35	40,79 - 41,03	40,1 - 40,4	39,41 - 40,08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen RT	-0,33	0,72	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	Dinas Perkebunan
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ***)	Persen	3,07	3,15	3,21-3,46	3,28-3,65	3,35-3,86	3,43-4,09	3,52-4,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara ***)	Ribu Orang	N/A	536,6	561,76	588,09	615,66	644,82	674,74	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional ***)	Persen	N/A	22,81	22,58	22,36	22,14	21,54	21,7	Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Rasio Kewirausahaan Daerah ***)	Persen	3,05	3,11	3,23	3,34	3,47	3,73	3,87	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,71	68,38	69,12	69,87	70,61	71,36	72,1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ***)	Persen	N/A	49,88	50,44	51	51,57	52,15	52,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DP3AKB
12	Indeks Inovasi Daerah ***)	Poin	81,27	81,28	81,29	81,3	81,31	81,32	81,33	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
13	Indeks Ekonomi Hijau Daerah ***)	Poin	N/A	61,3	61,73	62,69	63,86	64,61	65,5	Data dari tim PSDA, Disnakertrans, Disdik, Disbun, DTPH, Dishut, DLH, ESDM, DKP, Disperindag,
14	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Poin	45,29	48,19	51,38	54,78	58,41	62,28	66,4	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Energi dan Sumbe Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer ***)	Persen	24,36* (2023)	24,38	24,71	25,03	25,35	25,68	26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
16	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi ***)	Poin	6,15 (2023)	6,4	6,55	6,7	6,85	7	7,15	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi ***)	Persen	N/A	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto ***)	Persen	24,7	24,72	24,84 - 25,12	24,96 - 25,24	25,08 - 25,36	25,21 - 25,49	25,33 - 25,61	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Ekspor Barang dan Jasa ***)	Persen	N/A	21,90 - 21,94	22,35 - 22,53	22,81 - 23,15	23,28 - 23,78	23,77 - 24,43	24,26 - 25,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	76,06	62,93	66,11	67,53	68,93	70,47	71,49	DBMPR, Dishub, DSDA, Disperkim, DESDM
21	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan ***)	Persen	56,25	56,95	58,11	59,26	60,42	61,57	63,97	Dinas Perumahan Dan Permukiman
22	Modal Share Angkutan Umum	Persen	N/A	13	13,26	13,53	13,8	14,08	14,36	Dinas Perhubungan
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ***)	Persen	N/A	1,58	1,67	1,76	1,85	1,96	2,06	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
24	Tingkat Inflasi ***)	Persen	1,64	3,3 - 3,8	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	Biro Perekonomian (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ***)	Persentase	N/A	24,52	25,00 - 25,7	25,33 - 26,94	25,66 - 28,23	29,59	26,34 - 31,01	
26	Aset Dana Pensiun/PDRB ***)	Persen	N/A	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
27	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi ***)	Rupiah	N/A	6256296,31	7360717,455	8660101,563	10188865,36	11987501,13	14103649,26	
28	Total Kredit/PDRB ***)	Persen	N/A	23,7	25,08	26,55	28,1	30,84	31,48	
29	Inklusi Keuangan ***)	Persen	N/A	94,22	94,7	95,18	95,66	96,15	96,64	DKUK, Bapenda
30	Persentase Kerjasama Internasional yang efektif ***)	Persen	N/A	45	50	55	60	65	70	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
31	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ***)	Poin	N/A	0,557	0,57	0,572	0,58	0,591	0,6	Multi OPD, DLH, DTPH, DSDA, Dishut, Disbun, DSDA, DKP, Disperkim, DKPP
32	Intensitas Energi Primer ***)	SBM/Rp milyar	125,44 (2023)	145,15	142,56	140,85	135,42	131,57	129,19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
33	*Return on Assets* (RoA) BUMD Jabar ***)	Persen	N/A	1,62	1,72	1,83	1,95	2,07	2,20	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
34	Indeks Desa	Persen	77,11	77,46	79	80	81	82	83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
35	Persentase Desa Mandiri ***)	Poin	39,09	40,07	41,45	42,89	44,37	45,9	47,49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
36	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Provinsi	Produk	453.654	644.746	644.116	643.468	642.851	642.333	641.814	Dinkes, DKPP, DPMPTSP, Dinsos, DKUK, Disparbud, DKP, Diskominfo, DP3AKB, Disperindag, DPMDes, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Hukum ***)	Poin	89,3	89,32	89,34	89,37	89,39	89,42	89,44	Biro Hukum dan HAM
2	Indeks Sistem Pemerintahan	Poin	4,73	4,74	N/A (Indikator	N/A (Indikator	N/A (Indikator	N/A (Indikator	N/A (Indikator	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Berbasis Elektronik ***)				tidak dihitung dan digunakan)	tidak dihitung dan digunakan)	tidak dihitung dan digunakan)	tidak dihitung dan digunakan)	tidak dihitung dan digunakan)	
3	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	N/A (Indikator baru)	N/A (Indikator baru dihitung dan digunakan Tahun 2026)	2,19	2,24	2,29	2,34	2,39	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Pelayanan Publik ***)	Poin	4,76	4,76	4,77	4,77	4,78	4,78	4,79	Biro Organisasi
5	Indeks Integritas Nasional ***)	Poin	73,84	72,96	72,96	74,44	74,44	75,94	75,94	Inspektorat
6	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ***)	Persen	N/A	56,5	57,24	57,98	58,74	59,5	60,27	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Indeks Demokrasi Provinsi ***)	Poin	83,04	86,03	87,52	89,02	90,51	92,01	93,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Indeks Kepatuhan Daerah ***)	Poin	83,08*	83,50	84	84,50	85,51	85,99	86,48	Biro Hukum dan HAM
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A-	A-	A-	A-	A-	A-	A-	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, Diskominfo
10	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,88	3,9	3,96	4,04	4,13	4,22	4,32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah
11	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Poin	N/A	49,51	50,01	50,26	50,51	50,76	51,01	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	**PENDIDIKAN**									
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,24	9,35	9,48	9,61	9,72	9,84	9,92	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun	Persen	71,15	71,55	71,89	72,17	72,39	72,55	72,65	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas	Persen	55,14	57,02	57,65	58,28	58,89	59,39	59,80	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
4	Nilai Rapor Pendidikan	Nilai	69,79	70,6	71,41	72,36	73,31	73,75	74,05	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
2	**KESEHATAN**									
1	Nilai Standar Pelayanan Minimal Provinsi (KLB dan Bencana)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu (per 100,000KH)	per 100,000 kelahiran hidup	98,6	122	109	95	82	69	69	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Balita (per 1000KH)	Per 1000 kelahiran hidup	7,57	12,38	11,67	10,96	10,25	9,55	9,26	Dinas Kesehatan
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	86,44	90,11	97,5	97,75	98	98,25	98,5	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Provinsi yang Sesuai	Persen	59,80	61,23	62,40	63,58	65,10	67,10	68,69	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dengan Rencana Tata Ruang									
3	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	105,28	120,12	135,70	151,48	167,52	183,75	Dinas Sumber Daya Air
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Poin	57,04	57,80	58,20	58,70	59,30	60,00	60,50	Dinas Sumber Daya Air
5	Pesentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Persen	N/A	98,00	88,00	76,00	64,00	52,00	40,00	Dinas Sumber Daya Air
6	Persentase Pengurangan Panjang Garis Pantai yang Terkena Abrasi Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Persen	N/A	100	91,67	83,34	75,01	66,68	50,00	Dinas Sumber Daya Air
7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	34,74	38,04	41,34	44,64	48	51,25	Dinas Perumahan Dan Permukiman
8	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	10,54	13,5	18,88	24,25	29,63	35	40,38	Dinas Perumahan Dan Permukiman
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
1	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah yang Memenuhi Syarat Ketahanan Bangunan	Persen	78,81	79,82	80,83	81,84	82,85	83,86	84,86	Dinas Perumahan Dan Permukiman
2	Persentase Kawasan Permukiman yang memenuhi Standar Layak	Persen	N/A	8,14	25,28	42,46	59,69	76,97	94,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
3	Persentase Sisa Luasan Kawasan	Persen	67,05	60,14	48,17	35,01	21,19	6,28	0	Dinas Perumahan Dan Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kumuh Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)									
5	**TRANTIBUMLINMAS**									
1	Indeks Trantibumlinmas	Poin	N/A	65	66	67	68	69	70	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	**SOSIAL**									
1	Indeks Pemberdayaan Sosial	poin	N/A	64,67	64,68	65	66	68	69,80	Dinas Sosial
2	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	poin	N/A	70,65	70,85	70,90	72,00	73,50	75,00	Dinas Sosial
3	Indeks Penanganan Bencana	poin	N/A	50	55	60	65	70	75	Dinas Sosial
4	Indeks Rehabilitasi Sosial	poin	N/A	15	17	20	23	25	28	Dinas Sosial
7	**TENAGA KERJA**									
1	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	N/A	27,51	36,09	44,67	53,25	61,83	70,41	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Persen	N/A	74,62	75,35	76,09	76,82	77,56	78,29	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	816	816	819	822	825	828	831	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	62,02* (2023)	62,08	63,01	63,05	63,08	64,01	64,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi,	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Diskriminasi (KED) terhadap Anak yang Diselesaikan									
9	**PANGAN**									
1	Tingkat konsumsi pangan (energi dan protein)									Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- energi	kkal/kap/hari	2069,9	2100	2100	2100	2100	2100	2100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- protein	gr/kap/hari	62,3	57	57	57	57	57	57	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan	Poin	95,37	95,45	95,53	95,61	95,69	95,77	95,85	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
10	**PERTANAHAN**									
1	Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	113,8	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
11	**LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor persampahan kumulatif	Persen	N/A	1,42	2,4	3,7	5,63	7,81	10,11	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	46,86	64,61	64,81	65,01	65,21	65,41	65,61	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	88,34	85,14	85,2	85,26	85,32	85,38	85,42	Dinas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	83,68	59,52	59,92	60,32	60,72	61,12	61,52	Dinas Lingkungan Hidup
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Poin	N/A	0,557	0,572	0,587	0,604	0,622	0,639	Dinas Lingkungan Hidup
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Indeks Kualitas Layanan	Nilai	63,89	72,22	80	80,56	92,22	96,11	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	39,09	40,07	41,48	42,93	44,40	45,90	46,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	N/A	0,36	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3	Persentase Pengentasan Desa Sangat Tertinggal	Persen	N/A	0,04	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Angka Fertilitas Total (TFR)	Rata-rata Anak per Wanita	2,03	2,03	2,02	2,01	2,01	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
15	**PERHUBUNGAN**									
1	Tingkat Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat	Persen	57,58	60,34	62,14	64,27	65,41	67,38	68,49	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
2	Modal Share Angkutan Umum	Persen	N/A	13	13,26	13,53	13,8	14,08	14,36	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	77,54	77,75	78,14	78,53	78,92	79,31	79,69	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	2,66	2,85	3,04	3,23	3,42	3,61	3,80	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persen	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
18	**PENANAMAN MODAL**									
1	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	251,14	263,7	276,88	290,73	305,26	320,53	336,56	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Angka	91,81	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	46,16	47,45	48,78	50,15	51,55	52,99	54,48	Dinas Pemuda dan Olahrga
2	Indeks Partisipasi olahraga	Poin	0,208	0,227	0,247	0,269	0,294	0,320	0,349	Dinas Pemuda dan Olahrga
3	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Peringkat	1	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemuda dan Olahrga
20	**STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,07	3,07	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	Dinas Komunikasi Dan Informatika (Indikator Outcome)
21	**PERSANDIAN**									
1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	642	767	778	789	803	817	831	Dinas Komunikasi Dan Informatika (Indikator Outcome)
22	**KEBUDAYAAN**									
1	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Poin	N/A	27,36	27,86	28,36	28,86	29,36	29,86	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23	**PERPUSTAKAAN**									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,76	72,77	72,84	72,95	73,00	73,05	73,10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	75,07	75,08	75,09	75,1	75,11	75,12	75,13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**KEARSIPAN**									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Poin	80,5	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Poin	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	1.589.396,38	1.591.708,47	1.591.857,39	1.592.013,40	1.592.169,46	1.592.332,62	1.592.495,84	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2	Tingkat keberlanjutan kawasan konservasi di perairan wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil yang dikelola (EVIKA)	Poin	58,5	58,6	58,7	58,8	58,9	60	60,1	Dinas Kelautan Dan Perikanan
26	**PARIWISATA**									
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Persen	69,1	5,73	5,75	5,80	5,84	5,90	6,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Persen	3	0,89	0,95	1,05	1,10	1,15	1,2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Pertumbuhan Investasi Industri Kreatif	Rupiah (Triliun)	44,09	44,83	50,12	56,08	59,34	62,86	66,64	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27	**PERTANIAN**									
1	Indeks harga yang diterima (IT) Peternak	Poin	125,54	126,1	127,22	130,87	134,92	139,20	143	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2	Jumlah Produksi Tanaman pangan dan hortikultura	Ton	16,490,893	13,823,086	13,967,569	14,052,356	14,132,222	14,212,174	14,292,209	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Nilai Tambah Produk Perkebunan	Persen	51,77	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	Dinas Perkebunan
4	Laju peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	Persen	1,58	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Perkebunan
28	**KEHUTANAN**									
1	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Persen	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	Dinas Kehutanan
2	Persentase Tutupan Hutan	Persen	18,05	18,07	18,08	18,09	18,10	18,11	18,12	Dinas Kehutanan
29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**									
1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi Kewenangan Provinsi	Persen	7,61	7,68	7,87	7,96	7,96	7,99	7,99	Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2	Jumlah Konsumsi Listrik di Jawa Barat	GWh	70.064	71.670	73.654	75.893	78.481	81.662	85.461	Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
3	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek teknis dan aspek pengusahaan	Persen	56,67	59,17	61,67	64,17	66,67	69,17	71,67	Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
4	Persentase peningkatan titik muka air tanah yang dimanfaatkan	Persen	31,45	32,45	33,45	34,45	35,45	36,45	37,45	Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
30	**PERDAGANGAN**									
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,85	4,17	5,51	6,44	6,79	6,96	4,6	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Nilai Tambah Perdagangan	Triliun Rupiah	252,24	262,75	277,22	295,06	315,1	337,03	352,52	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	Nilai Ekspor	Juta USD	37.884,82	38.880,00	40.120,00	41.360,00	42.590,00	43.830,00	45.070,00	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**PERINDUSTRIAN**									
1	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persen	98,64	98,82	98,56	98,86	98,6	98,49	98,64	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Triliun Rupiah	133,13	113,87	263,88	381,74	472,58	596,3	558,89	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
32	**TRANSMIGRASI**									
1	Persentase Transmigran yang ditempatkan	Persen	100	87	88	89	90	91	92	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Indikator Outcome)
32	**SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Tingkat Inflasi	Persen	1,64	3,3 - 3,8	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	Sekretariat Daerah
2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	2,142	1,444	1,475	1,5	1,529	1,56	1,585	Sekretariat Daerah
3	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General)	Persen	86,44	86,45	86,47	86,5	86,54	86,59	86,65	Sekretariat Daerah
4	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,81	9,64	9,75	9,86	9,97	10,08	10,2	Sekretariat Daerah
5	Persentase BUMD Sehat	Persen	N/A	78,37	81,08	83,78	86,48	89,18	91,89	Sekretariat Daerah
6	Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,30	89,70	90,23	90,75	91,28	91,80	92,33	Sekretariat Daerah
7	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	75,9	76,66	77,43	78,2	78,98	79,77	80,57	Sekretariat Daerah
8	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja Sama dengan atau lebih besar dari 0%	Persen	63,04	63,28	63,51	63,75	63,98	64,22	64,45	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90,29	90,3	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35	Sekretariat Daerah
10	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,76	4,76	4,77	4,77	4,78	4,78	4,79	Sekretariat Daerah
11	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	68,45	68,45	73,093	73,093	73,093	79,598	79,598	Sekretariat Daerah
12	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	87	89	92	95	97	100	100	Sekretariat Daerah
13	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,55	13,58	13,61	13,65	13,68	13,71	13,74	Sekretariat Daerah
14	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	N/A	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	Sekretariat Daerah
33	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	4,77	4,78	4,79	4,80	4,81	4,82	4,83	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34	**PERENCANAAN**									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	95,97	96,1	96,24	96,38	96,52	96,66	96,79	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35	**KEUANGAN**									
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	N/A	4,75	3	3	3	3	3	Badan Pendapatan Daerah
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92,87	90	90,25	90,5	90,75	91	91,25	Badan Pendapatan Daerah
36	**KEPEGAWAIAN**									

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Sistem Merit	Poin	400	400	402,5	402,5	405	405	408	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin	53,93	53,96	53,98	54,01	54,03	54,05	54,07	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah
37	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Indeks Profesional ASN Dimensi Kompetensi	Poin	32,8	33	33,5	34	34,5	35	35,5	Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase rancangan kebijakan hasil riset yang berbasis isu strategis	Persen	N/A (indikator baru)	100	100	100	100	100	100	Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Skor Satuan Inovasi Daerah	Poin	149,17	149,20	149,23	149,25	149,27	149,3	149,35	Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
39	**PENGHUBUNG**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Badan Penghubung	Poin	96,75	96,90	97,00	97,10	97,20	97,30	97,40	Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung
40	**PENGAWASAN**									
1	Indeks Integritas Nasional	Poin	73,84	72,96	72,96	74,44	74,44	75,94	75,94	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi evaluasi	Nilai	N/A	21,43	21,7	21,56	21,61	21,66	21,72	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
3	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level (Skor)	3 (3,377)	3 (3,323)	3 (3,237)	3 (3,237)	3 (3,237)	3 (3,255)	3 (3,273)	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
4	Persentase rekomendasi hasil	Persen	95,1	72,5	73	75	76,5	77,2	80	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindaklanjuti									
41	**PEMERINTAHAN UMUM**									
1	Persentase partisipasi dan aksesibilitas politik masyarakat dalam proses demokrasi	Persen	75	70,10	73,60	75,40	80,20	83,60	88,10	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Persentase penurunan kasus kejadian konflik sosial	Persen	N/A	10,89	16,67	33,33	50	60	100	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025
Keterangan: *) Menggunakan data capaian Tahun 2023;
**) Indikator Makro
***) Indikator Utama Pembangunan
N/A, Indikator Baru

Jabar Istimewa

Lembur Diurus, Kota Ditata

BAB V
PENUTUP

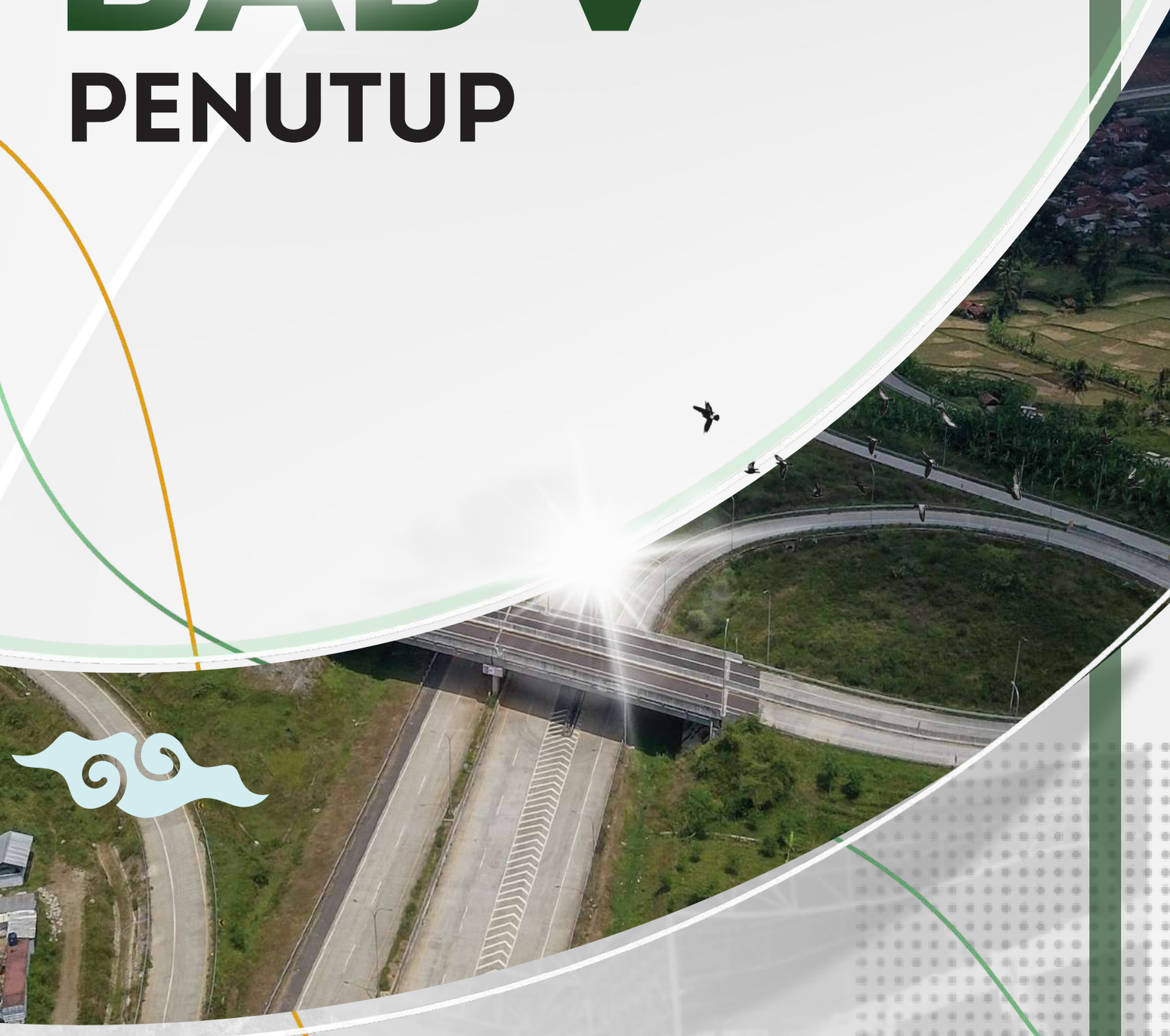

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Barat dijabarkan dengan berorientasi pada komitmen dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu **Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata**. Hal ini menggambarkan situasi atau kondisi dimana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam melaksanakan pembangunan daerah, dengan mengusung 4 (empat) misi pembangunan yaitu, (1) Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul; (2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif; (3) Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan, serta miskin dan kaya; serta (4) Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, sesuai dengan prinsip *good and clean governance*.

Visi dan Misi tersebut berlandaskan pada filosofi dan kosmologi sunda yang ingin diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 untuk mencapai *Gerbang Pancawaluya* (gerbang lima kesempurnaan) melalui perwujudan kondisi manusia Jawa Barat yang *Cageur* (sehat jasmani dan rohani), *Bageur* (rendah hati dan berkarakter), *Bener* (memegang teguh aturan dan hukum), *Pinter* (menguasai ilmu pengetahuan), dan *Singer* (kreatif dan cekatan), sesuai dengan konsep hidup manusia sebagai hamba yang berjalan di muka bumi dalam hubungannya dengan Tuhan (*Hablumminallah*), hubungan dengan lingkungan (*Hablumminal'alam*), dan hubungan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Disusunnya RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diharapkan agar visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dioperasionalisasikan untuk pembangunan tahunan RKPD yang pada pelaksanaannya dilakukan pengendalian dan evaluasi

guna mengetahui pencapaian target pembangunan dan menyesuaikan dengan perubahan atau dinamika yang terjadi. Setiap Perangkat Daerah merumuskan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang kemudian dioperasionalisasikan oleh Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJMD perlu dukungan dan keterlibatan multipihak dengan didukung oleh sumber pendanaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai sumber pendanaan pembangunan yang ada, yaitu APBN, APBD, CSR, KPBU, dana umat, dan peran serta masyarakat. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 juga memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, meliputi:

1) Gender dan inklusi sosial;
2) Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
3) Transformasi digital;
4) Pembangunan rendah karbon; dan
5) Pembangunan berketahanan iklim.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional. Evaluasi ini berfungsi sebagai proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan, sekaligus sebagai sarana menilai realisasi kinerja untuk menjamin tercapainya target secara efektif dan efisien. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas.

5.3 Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dalam implementasi visi, misi, dan program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, perlu diantisipasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu ketercapaian tujuan. Untuk itu, penerapan manajemen risiko menjadi penting sebagai upaya pencegahan. Manajemen risiko membangun budaya sadar risiko dalam mengelola potensi risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima, sehingga memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian sasaran organisasi. Tujuannya untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, serta pemantauan risiko secara berkesinambungan di lingkungan pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan visi, misi, serta program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030 dapat terwujud, sehingga pada akhir masa kepemimpinan tersebut masyarakat Jawa Barat berada dalam kondisi yang sejahtera dan makmur.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI